



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat

**MAJU &
SEJAHTERA**



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PROVINSI SULAWESI BARAT

Tahun Anggaran 2025





GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 3

RKPD disusun dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, Program Strategis Nasional dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD terdiri dari:

- a. bab kesatu, pendahuluan;
- b. bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab keempat, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab kelima, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- f. bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- g. bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

h. bab...

h. bab kedelepan, penutup.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah;
- b. penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan kabupaten;
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara provinsi.

Pasal 6

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LAMIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2026

NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-234
2.3. Permasalahan Pembangunan.....	II-416
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-9
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1. Arah Kebijakan Umum.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan.....	V-5
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...	VII-1
7.1. Indikator Kinerja Utama	VII-1
7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Luas dan Proporsi Wilayah Administasi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2024	BAB II – 2
2.2. Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat 2022	BAB II – 5
2.3. Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2022	BAB II – 9
2.4. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi	BAB II – 12
2.5. Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.....	BAB II – 14
2.6. Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 19
2.7. Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 22
2.8. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ha)	BAB II – 24
2.9. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	BAB II – 29
2.10. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2024	BAB II – 30
2.11. Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten dan Kejadian Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Jiwa).....	BAB II – 30
2.12. Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 34
2.13. Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 .	BAB II – 34
2.14. Indeks Tutupan lahan Sulawesi Barat Tahun 2020–2024..	BAB II – 34
2.15. Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021–2024	BAB II – 35
2.16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 35

2.17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen).....	BAB II – 42
2.18.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 43
2.19.	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Ribu).....	BAB II – 48
2.20.	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen)	BAB II – 48
2.21.	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Rupiah)	BAB II – 48
2.22.	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)	BAB II – 55
2.23.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat menurut Dimensi Tahun 2019–2023	BAB II – 63
2.24.	IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 70
2.25.	Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 73
2.26.	15 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022	BAB II – 76
2.27.	Indeks Infrastruktur menurut Komposit Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 79
2.28.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2019–2023.....	BAB II – 80
2.29.	Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022.....	BAB II – 83
2.30.	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 86
2.31.	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.	BAB II – 98
2.32.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 99

2.33.	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 100
2.34.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025)	BAB II – 101
2.35.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025).....	BAB II – 101
2.36.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025).....	BAB II – 102
2.37.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025).....	BAB II – 102
2.38.	Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 107
2.39.	Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 107
2.40.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2023	BAB II – 108
2.41.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2019–2023.....	BAB II – 109
2.42.	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 110
2.43.	Panjang Dan Kondisi Irigasi Teknis Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat S/D Tahun 2024.....	BAB II – 111
2.44.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 111
2.45.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 112

2.46.	Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (km).....	BAB II – 113
2.47.	Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 113
2.48.	Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 114
2.49.	Kondisi Jalan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 115
2.50.	Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat yang Direhabilitasi dan Dipelihara Tahun 2020–2024.....	BAB II – 115
2.51.	Kondisi ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 116
2.52.	Progres Penyusunan RTRW Kabupaten	BAB II – 117
2.53.	Progres Penyusunan RDTR	BAB II – 118
2.54.	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Pelatihan Ahli	BAB II – 119
2.55.	Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2020–2024	BAB II – 120
2.56.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2024.....	BAB II – 121
2.57.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 121
2.58.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 121
2.59.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 122
2.60.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 122
2.61.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 123

2.62.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 123
2.63.	Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 124
2.64.	Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2022–2024	BAB II – 124
2.65.	Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 125
2.66.	Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Tahun 2020–2024	BAB II – 125
2.67.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat...	BAB II – 125
2.68.	Indikator Kinerja Bidang ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat.....	BAB II – 126
2.69.	Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 127
2.70.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 128
2.71.	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 128
2.72.	Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 132
2.73.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2020–2024	BAB II – 133
2.74.	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 133
2.75.	Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2023..	BAB II – 133
2.76.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 138
2.77.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 138
2.78.	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 139

2.79.	Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023 (juta ton).....	BAB II – 140
2.80.	Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023.....	BAB II – 140
2.81.	Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 ..	BAB II – 141
2.82.	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 141
2.83.	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 141
2.84.	Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.....	BAB II – 142
2.85.	Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021	BAB II – 142
2.86.	Sebaran Eksisting Mangrove per kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 143
2.87.	Kondisi tutupan karang di Perairan Sulawesi Barat	BAB II – 143
2.88.	Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisian Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Hektar).....	BAB II – 144
2.89.	Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 145
2.90.	Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 .	BAB II – 145
2.91.	Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 146
2.92.	Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021–2024	BAB II – 146
2.93.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2019–2024	BAB II – 146
2.94.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020–2024.....	BAB II – 148
2.95.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020–2024	BAB II – 152

2.96. Age Specific Fertility Rate/ASFR (Jumlah Kelahiran per-1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) di Provinsi Sulawesi Barat (Persen), 2020–2024	BAB II – 154
2.97. Rasio Akseptor Baru KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 155
2.98. Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 155
2.99. Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024	BAB II – 155
2.100. Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 156
2.101. Kondisi Bandara Tamba Padang Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 156
2.102. Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 157
2.103. Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2024.....	BAB II – 157
2.104. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2020–2024.....	BAB II – 157
2.105. Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat.....	BAB II – 158
2.106. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 .	BAB II – 158
2.107. Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 159
2.108. WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2024	BAB II – 161
2.109. Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 161
2.110. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 162
2.111. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 162
2.112. Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 164

2.113. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 164
2.114. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024	BAB II – 165
2.115. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	BAB II – 166
2.116. Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 167
2.117. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 169
2.118. Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 169
2.119. Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 169
2.120. Jumlah Kader Pemuda Pelopor di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 170
2.121. Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2020–2024.....	BAB II – 171
2.122. Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020–2024	BAB II – 172
2.123. Jumlah Tabel Data Statistik Sektorial Yang Dipublikasikan Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 172
2.124. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan, Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2024	BAB II – 173
2.125. Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2018.....	BAB II – 175
2.126. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 176

2.127. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	BAB II – 177
2.128. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2024	BAB II – 177
2.129. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 178
2.130. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.	BAB II – 178
2.131. Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021	BAB II – 180
2.132. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022	BAB II – 180
2.133. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021	BAB II – 181
2.134. Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 182
2.135. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2020–2024	BAB II – 182
2.136. Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 185
2.137. Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 186
2.138. Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Ton).....	BAB II – 187
2.139. Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (ton/ha).....	BAB II – 187
2.140. Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Ha)	BAB II – 188

2.141. Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2021–2024	BAB II – 188
2.142. Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 191
2.143. Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat	BAB II – 195
2.144. Daftar Kelompok Tani Hutan Teregister Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.....	BAB II – 197
2.145. Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional.....	BAB II – 208
2.146. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 209
2.147. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 211
2.148. Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 212
2.149. Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .	BAB II – 212
2.150. Ratio Elektrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 213
2.151. Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2023	BAB II – 213
2.152. Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM	BAB II – 214
2.153. Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	BAB II – 214
2.154. Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022	BAB II – 215
2.155. Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024	BAB II – 215
2.156. Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	BAB II – 216
2.157. Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat Tahun 2022	BAB II – 217

2.158. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian	BAB II – 217
2.159. Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun 2017–2024.....	BAB II – 222
2.160. Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2024	BAB II – 223
2.161. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat (Kg) Tahun 2022–2023.....	BAB II – 224
2.162. Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	BAB II – 225
2.163. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan.....	BAB II – 226
2.164. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan	BAB II – 227
2.165. Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2023	BAB II – 228
2.166. Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 228
2.167. Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024.....	BAB II – 228
2.168. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 230
2.169. Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2020–2024	BAB II – 231
2.170. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat Tahun 2019–2023.....	BAB II – 231
2.171. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020–2024	BAB II – 232
2.172. Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 233
2.173. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 235
3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027	BAB III – 13
3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027	BAB III – 15

3.3.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027	BAB III – 17
4.1.	Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Provinsi Sulawesi Barat.....	BAB IV – 3
4.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.....	BAB IV – 4
4.3.	Keselarasan Asta Cita/Misi RPJM Nasional Tahun 2025–2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029	BAB IV – 4
4.4.	Indikator Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat	BAB IV – 9
4.5.	Penyelarasan Prioritas Nasional (Asta Cita) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026	BAB IV – 13
5.1.	Highlight Kebijakan Kabupaten Majene Tahun 2026	BAB V – 8
5.2.	Highlight Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026	BAB V – 11
5.3.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamasa Tahun 2026	BAB V – 14
5.4.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tahun 2026	BAB V – 17
5.5.	Highlight Kebijakan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026	BAB V – 20
5.6.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026	BAB V – 22
5.7.	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 25
5.8.	Kategori Capaian IPM Kabupaten	BAB V – 25
5.9.	Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2026	BAB V – 26
5.10.	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 27

5.11.	Penetapan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2026	BAB V – 27
5.12.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 28
5.13.	Kategori Capaian TPT Kabupaten	BAB V – 28
5.14.	Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tahun 2026	BAB V – 29
5.15.	Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 30
5.16.	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten	BAB V – 30
5.17.	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2026	BAB V – 31
5.18.	Capaian Indeks Gini Ratio Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 32
5.19.	Penetapan Target Indeks Gini Ratio Kabupaten Tahun 2026	BAB V – 32
6.1.	Daftar Alokasi Indikasi Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026	BAB VI – 1
6.2.	Daftar Calon Penerima Hibah Tahun 2026	BAB VI – 4
6.3.	Daftar Calon Penerima Bantuan Keuangan Tahun 2026...	BAB VI – 65
7.1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026	BAB VII – 1
7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026	BAB VII – 3

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	BAB II – 5
2.2. Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	BAB II – 9
2.3. Nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2020–2024	BAB II – 27
2.4. Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2024.....	BAB II – 28
2.5. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 36
2.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Antara Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020	BAB II – 37
2.7. Proporsi Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 (%)	BAB II – 38
2.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Jiwa)	BAB II – 39
2.9. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 40
2.10. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (persen)	BAB II – 41
2.11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen).....	BAB II – 41
2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 43
2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024.....	BAB II – 43
2.14. Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen).....	BAB II – 45

2.15.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2020–2024 (Persen).....	BAB II – 46
2.16.	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Persen).....	BAB II – 47
2.17.	Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	BAB II – 47
2.18.	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 49
2.19.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 49
2.20.	Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023	BAB II – 50
2.21.	Jumlah Penduduk Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)	BAB II – 51
2.22.	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Persen).....	BAB II – 51
2.23.	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Ribu Jiwa)	BAB II – 52
2.24.	Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 52
2.25.	Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024 (%).....	BAB II – 53
2.26.	Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2024	BAB II – 54
2.27.	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2022	BAB II – 57
2.28.	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023	BAB II – 58
2.29.	Hasil capaian IPA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2023	BAB II – 58
2.30.	Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 59
2.31.	Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 60

2.32.	Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 60
2.33.	Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 61
2.34.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 62
2.35.	Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (dalam Rp Triliun)	BAB II – 63
2.36.	Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 64
2.37.	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 64
2.38.	Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)	BAB II – 65
2.39.	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah).....	BAB II – 66
2.40.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018–2021	BAB II – 67
2.41.	Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	BAB II – 68
2.42.	Indeks Williamson Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 69
2.43.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 70
2.44.	Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 71
2.45.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 71
2.46.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 72
2.47.	Grafik 2.48Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 72
2.48.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Barat Tahun 2022–2024	BAB II – 75
2.49.	Skor IPLM menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 75

2.50.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 77
2.51.	Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 78
2.52.	Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019–2023 (Persen)	BAB II – 80
2.53.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2022.....	BAB II – 82
2.54.	Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019–2022.....	BAB II – 82
2.55.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024	BAB II – 84
2.56.	Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022–2024	BAB II – 85
2.57.	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 87
2.58.	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024	BAB II – 88
2.59.	Indeks Inovasi Daerah Berdasarkan Provinsi Tahun 2024	BAB II – 89
2.60.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 90
2.61.	Capaian SPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 92
2.62.	Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	BAB II – 93
2.63.	Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	BAB II – 93
2.64.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 94
2.65.	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 95
2.66.	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 96
2.67.	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 97

2.68.	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 100
2.69.	Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2020/2021–2024/2025	BAB II – 103
2.70.	Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2020/2021–2024/2025	BAB II – 104
2.71.	Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2020–2024	BAB II – 105
2.72.	Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024	BAB II – 106
2.73.	Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2019–2023	BAB II – 108
2.74.	Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2020–2024	BAB II – 109
2.75.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2020–2024	BAB II – 129
2.76.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	BAB II – 130
2.77.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 131
2.78.	Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 134
2.79.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020–2024	BAB II – 134
2.80.	Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2023	BAB II – 135
2.81.	Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 136
2.82.	Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 137
2.83.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2020–2024	BAB II – 137
2.84.	Persentase Sampah yang Terkelola di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 147

2.85.	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 147
2.86.	Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 148
2.87.	Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 149
2.88.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 150
2.89.	Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 151
2.90.	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 153
2.91.	Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024.....	BAB II – 165
2.92.	Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022.....	BAB II – 166
2.93.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 168
2.94.	Jumlah Klub dan Sarana Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 170
2.95.	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020.....	BAB II – 175
2.96.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024...	BAB II – 182
2.97.	Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023	BAB II – 183
2.98.	Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2020–2024	BAB II – 184
2.99.	Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2020–2024	BAB II – 185
2.100.	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2020–2024.....	BAB II – 191
2.101.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2020–2024 (Persen)	BAB II – 192

2.102. Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (m ³)	BAB II – 192
2.103. Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)	BAB II – 224
2.104. Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan.....	BAB II – 225
2.105. Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (Ton)	BAB II – 225
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2023 (persen/yoy)	BAB II – 3
3.2. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara-Negara (persen).....	BAB II – 3
3.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	BAB II – 5
3.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020–2023	BAB II – 6
3.5. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2022–Q1/2025 (Persen)	BAB II – 8
3.6. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2020–2024 (Persen).....	BAB II – 9
3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024	BAB II – 10
5.1. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 26
5.2. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Pertumbuhan TPT Kabupaten Tahun 2023–2024	BAB V – 29
5.3. Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2023–2024.....	BAB V – 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 3
2.2. Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	BAB II – 6
2.3. Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	BAB II – 7
2.4. Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022	BAB II – 10
2.5. Peta Status Pangan Tahun 2022.....	BAB II – 11
2.6. Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 13
2.7. Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 17
2.8. Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 20
2.9. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 25
2.10. Peta Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat	BAB II – 33
2.11. Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat	BAB II – 207
4.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	BAB IV - 16
4.2. Proses Perubahan Iklim	BAB IV - 17
4.3. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi	BAB IV - 34
4.4. Peta Rawan Bencana Tsunami	BAB IV - 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026 memiliki posisi strategis dalam meletakkan fondasi arah kebijakan pembangunan lima tahunan, sekaligus menjamin kesinambungan dan keberlanjutan agenda prioritas pembangunan yang telah berlangsung. Secara geografis, Sulawesi Barat merupakan provinsi yang memiliki karakteristik wilayah dengan topografi yang cukup kompleks, sebaran penduduk yang relatif rendah namun tidak merata, serta potensi sumber daya alam yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi sosial dan ekonomi, Sulawesi Barat saat ini masih menghadapi tantangan serius, antara lain pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, ketimpangan antar wilayah, angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, serta rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, masih memerlukan perhatian dan pembenahan secara sistematis. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah, seperti perkembangan kebijakan nasional pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, perubahan iklim, serta tuntutan akan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka menciptakan akselerasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan wilayah, dan penguatan daya saing daerah. Penekanan diberikan pada pendekatan berbasis data, perencanaan partisipatif, serta integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 bukan hanya merupakan amanat konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi daerah. RKPD ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal yang kuat dalam mengawal visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah menuju Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115).
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126).
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjaga konsistensi, sinergi, dan integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 mengacu dan merujuk pada berbagai dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan hierarkis dan substansial, baik secara nasional maupun daerah. Hubungan antar dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034

RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan kesesuaian spasial dan arah pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW, sehingga program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada wilayah yang sesuai peruntukannya dan mendukung pengembangan kawasan strategis provinsi, terutama dalam konteks konektivitas dan ketahanan bencana.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045

RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang dirumuskan menjadi bagian dari upaya pencapaian Visi Sulawesi Barat 2045 yakni Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi

Hijau dan Biru yang Inklusif, yang mana pada tahapan pertama difokuskan pada perkuatan fondasi transformasi.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 mengakomodasi Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025–2030 yang dalam hal ini menjabarkan sasaran dan target-target kinerja pembangunan, kebijakan dan prioritas program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, serta mengantisipasi perubahan situasi strategis seperti bencana alam, gejolak ekonomi, dan perubahan regulasi nasional.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 disusun selaras dengan RKP Tahun 2026 yang memuat program strategis nasional sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat, serta pemangku kepentingan lainnya guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 ini adalah:

1. Sebagai dasar penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan penyusunan RKPD Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan

antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat (1) Kondisi Umum Daerah menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, hal ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari renja, renstra dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), serta kebijakan bidang ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat; (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029 yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (2) Prioritas Pembangunan Tahun 2026, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA, mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, serta rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dengan Ibu kota adalah Kabupaten Mamuju. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat Pulau Sulawesi, terletak pada posisi geografis 0°12' - 03°38' Lintang Selatan (LS) dan 118°43' 15" - 119° 54' 3" Bujur Timur (BT). Posisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah strategis yang dikenal dengan “silang segitiga emas” antara Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang menjadi modal geografis pembangunan daerah kedepannya karena posisinya dekat dengan jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional. Sebelah Utara Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tahun 2016, BPS Provinsi Sulawesi Barat merilis data luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat mencapai 37.129,18 km², yang terdiri dari 54,79 persen wilayah laut (20.342 km²) dan 45,21 persen (16.787,18 km²) daratan. Namun, angka tersebut berubah di Tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat berkurang menjadi 16.594,74 km². Karena didominasi oleh laut, panjang garis pantai Provinsi Sulawesi Barat mencapai 677 km dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 pulau, menunjukkan bahwa potensi besar Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya berada di wilayah laut, sehingga penting bagi pemerintah daerah mempertimbangkan wilayah laut dalam rancangan pembangunan jangka menengah.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terbagi-bagi menjadi enam kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan, dan 576 desa. Setelah didirikan, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan pemerintahan yang signifikan. Pada awalnya provinsi ini hanya terdiri dari 5 (lima) kabupaten, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat terjadi pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat saat ini menjadi enam kabupaten. Letak dan posisi geografis kabupaten-kabupaten tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 20 38' 45" LS - 30 38' 15" LS dan 118 04' 00" BT - 119 04' 45" LS, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.

2. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 30 4' 10" LS - 30 32' 00" LS dan 1180 40' 27" BT - 1190 29' 41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
3. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 20 39' 216" LS - 30 19' 288" LS dan 1190 0' 216" BT - 1190 38' 144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
4. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 20 8' 7" LS - 20 57' 50" LS dan 1170 3' 57" BT - 1190 51' 17" BT.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 00 40' 10" LS - 10 50' 12" LS dan 1190 25' 26" BT - 1190 50' 20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km
6. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 10 43' 33" LS - 20 18' 54" LS dan 1190 7' 35" BT - 1190 52' 18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

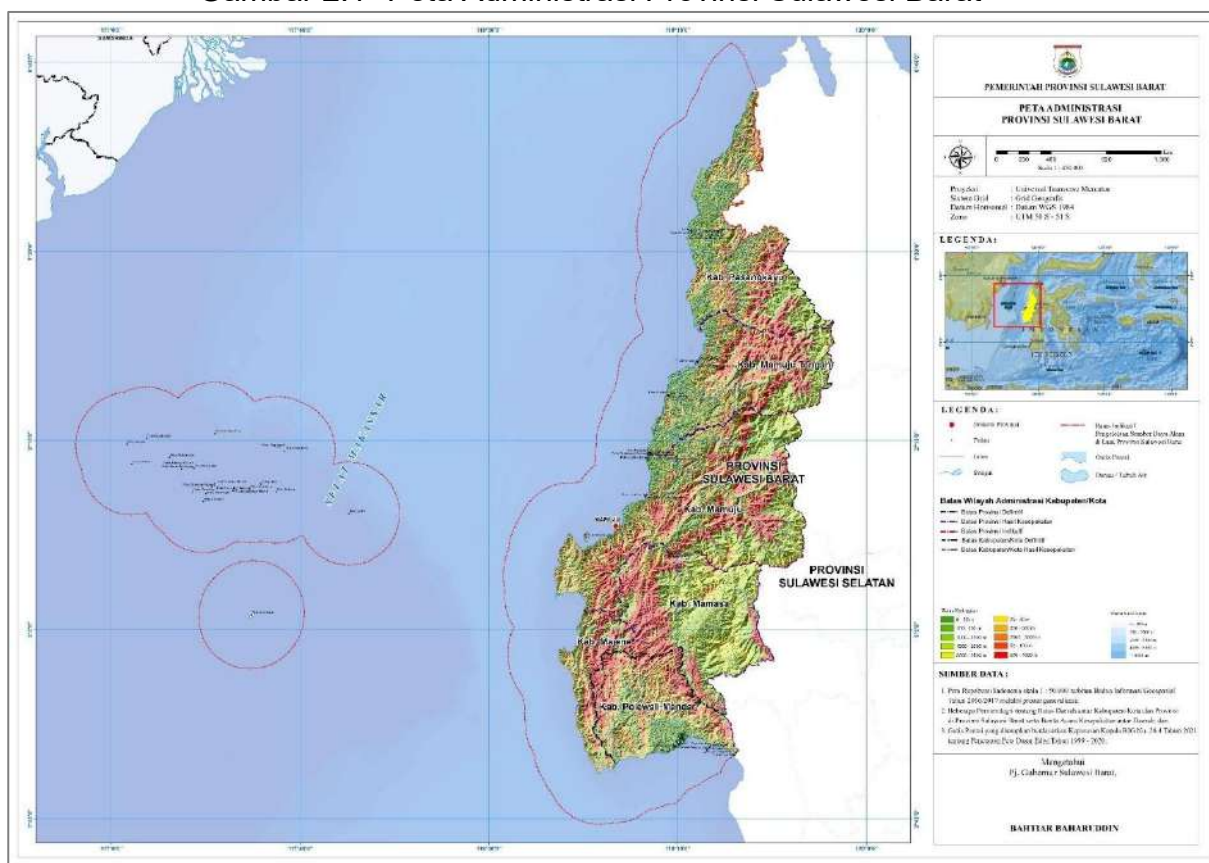
Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki wilayah paling luas dengan proporsi 29,78 persen atau setara dengan 4.942,25 km², kemudian Kabupaten Mamasa dengan proporsi 18,17 persen atau 3.015,95 km², dan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah masing-masing 17,49 persen dan 16,62 persen. Kabupaten Majene dan Polewali Mandar menjadi daerah dengan luas wilayah yang relatif paling kecil, yaitu hanya 900,92 km² atau 5,43 persen dan 2.074,12 km² atau 12,50 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.1 Luas dan Proporsi Wilayah Administasi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Luas Wilayah (Km ²)	Proporsi (%)
Majene	900,92	5,43
Polewali Mandar	2.074,12	12,50
Mamasa	3.015,95	18,17
Mamuju	4.942,25	29,78
Pasangkayu	2.903,18	17,49
Mamuju Tengah	2.758,34	16,62
Total	16.594,76	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diakses Tahun 2025

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

Semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki area laut, kecuali Kabupaten Mamasa, namun daerah dengan wilayah laut terluas berada di Kabupaten Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Barat dari data BPS Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat jumlah desa tepi laut paling banyak berada di ketiga daerah ini, memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat berada di tiga kabupaten ini. Ketiganya berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan jalur ALKI II. ALKI II memiliki banyak potensi karena merupakan jalur lalu-lintas barang ke luar negeri. Jalur ALKI II merupakan jalur transportasi laut nasional melalui Selat Makassar yang menghubungkan arus angkutan barang (tanker, peti kemas) dan pelayaran internasional sehingga memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Persoalannya kemudian, daerah-daerah yang termasuk dalam ALKI II belum sepenuhnya memiliki kapasitas produksi untuk terlibat dalam perdagangan internasional, termasuk Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1.2. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung

Esensi dasar dari identifikasi daya dukung dan daya tampung adalah bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (*supply side*) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (*demand side*) bisa tidak terbatas. Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung

lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan (supply) diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung. Status daya dukung dikatakan terlampaui apabila supply lebih kecil dari demand, demikian pula sebaliknya. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah pada laporan ini daya dukung disusun berdasarkan jasa lingkungan. Dalam Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa penilaian yang diuraikan diantaranya kondisi status daya dukung penyediaan air dan status pangan Adapun kajiannya daya dukung air Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

a. Daya Dukung Air

Daya dukung penyediaan air (*water supply capacity*) adalah kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk memasok air bersih yang cukup dan berkualitas kepada populasi yang membutuhkannya. Kemampuan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk keperluan rumah tangga, komersial, industri, pertanian, dan lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan status daya dukung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai. Nilai Potensi Tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk mendistribusikan potensi air pada setiap grid.

Pendekatan Grid ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi sejauh mana wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan keperluan lahan. Selanjutnya, data distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air penduduk. Dalam perhitungan ini, digunakan standar nilai kebutuhan air sebesar 800 m³/Tahun/kapita, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Hasil dari perhitungan ini akan menciptakan peta kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan informasi tentang seberapa besar kebutuhan air penduduk di berbagai wilayah. Selain itu, perhitungan juga mencakup kebutuhan air untuk lahan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh bukan hanya mengenai kebutuhan air manusia, tetapi juga kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri, dan sektor lainnya. Ini membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk merencanakan alokasi air yang efisien dan berkelanjutan.

Analisis ini, juga dilakukan perhitungan terkait status daya dukung daya dan tampung wilayah. Ini berguna untuk mengetahui batas maksimal populasi penduduk yang dapat didukung oleh sumber daya air alamiah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan

wilayah yang berkelanjutan dan memastikan bahwa ketersediaan air terjaga sesuai dengan karakteristik geografis dan lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.

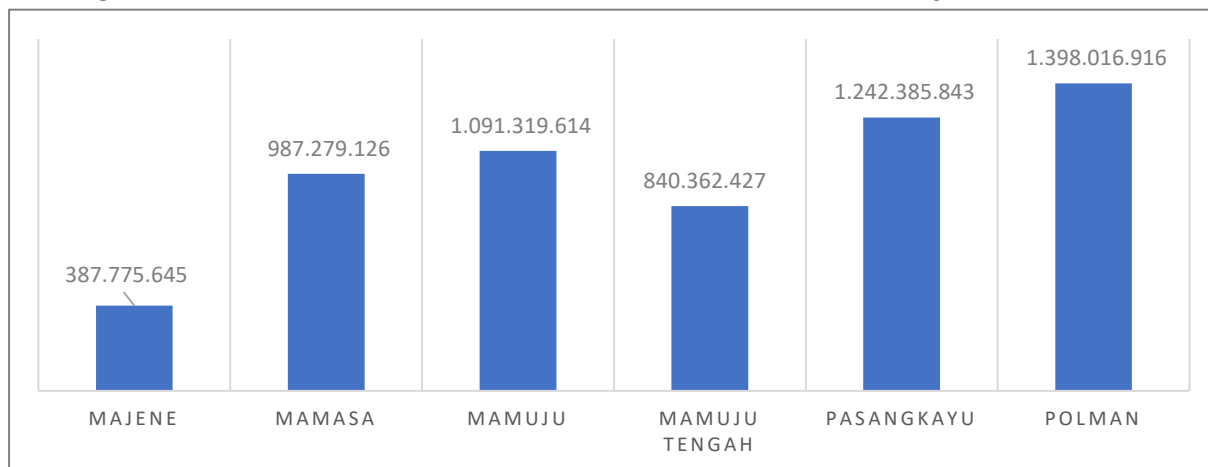
Tabel 2.2 Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Penduduk Tahun (Jiwa)	Ketersediaan	Kebutuhan m ³ /Tahun/kapita	Ketersediaan-Kebutuhan	Ambang Batas m ³ /Tahun/kapita	
		m ³ /Tahun/kapita		m ³ /Tahun/kapita	Ambang batas	2022
	2022	2022	2022	2022		
Majene	177.387	779.824.583	387.775.645	392.048.939	667.424	490.037
Mamasa	166.444	2.175.502.706	987.279.126	1.188.223.580	1.651.509	1.485.065
Mamuju	285.496	3.954.322.266	1.091.319.614	2.863.002.652	3.863.830	2.148.196
Mamuju Tengah	139.950	2.558.738.010	840.362.427	1.718.375.582	2.288.146	1.860.458
Pasangkayu	198.574	2.730.431.080	1.242.385.843	1.488.045.238	2.059.032	766.166
Polman	490.400	2.011.118.652	1.398.016.916	613.101.736	1.256.566	10.328.256
SULAWESI BARAT	1.458.251	14.209.937.297	5.947.139.571	8.262.797.727	11.786.507	17.078.178

Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung penyediaan air terlampaui atau tidak terlampaui. Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

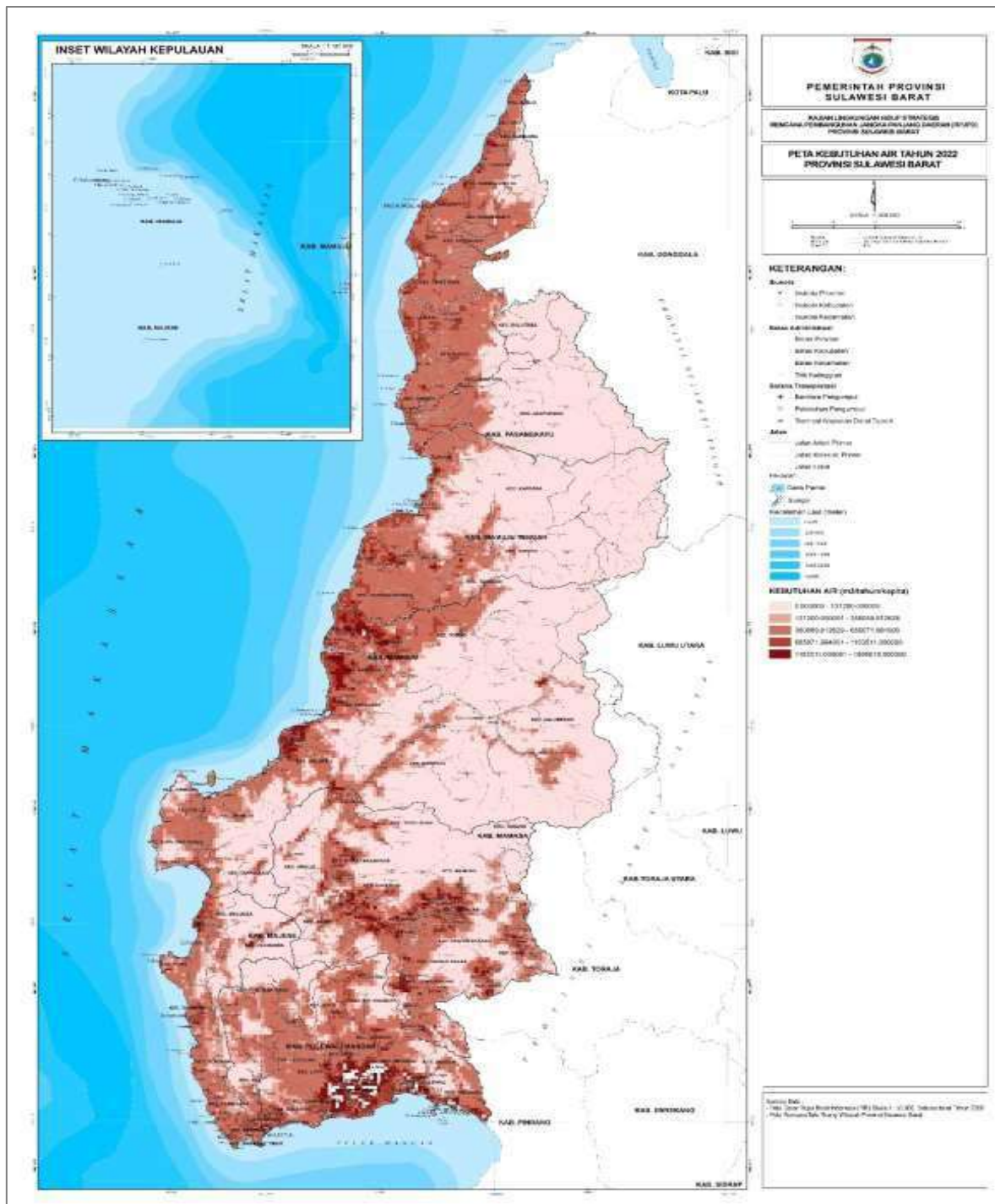
Grafik 2.1 Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



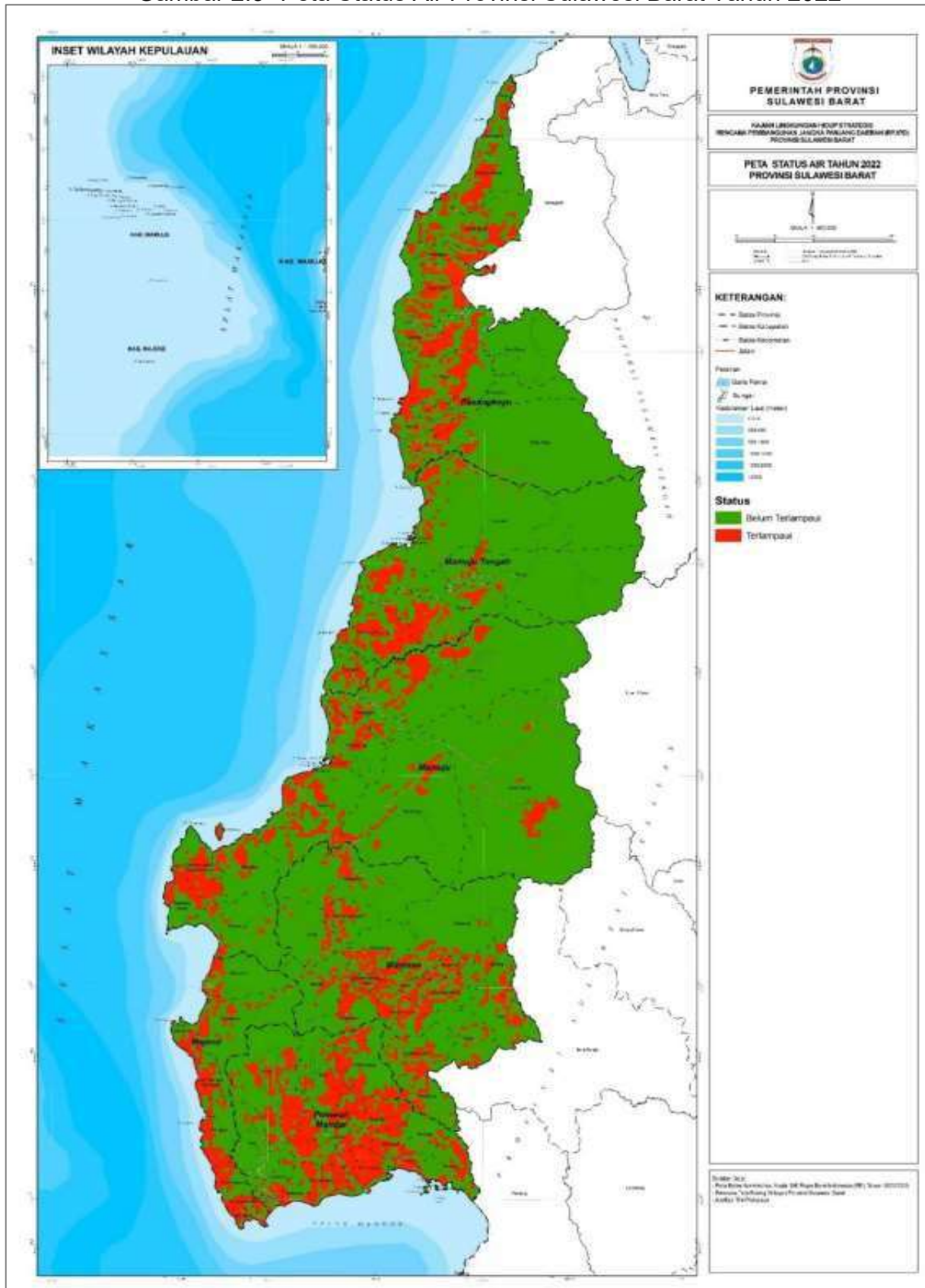
Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Grafik diatas memberikan pandangan yang cukup menarik tentang tren kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022. Ada dua kabupaten yang tinggi dalam kebutuhan air pada Tahun 2022, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.2 Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



Gambar 2.3 Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung penyediaan pangan merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, ketersediaan lahan pertanian, dan kebijakan pangan. Daya dukung ini sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi masalah kelaparan.

Daya dukung penyediaan pangan dapat diukur dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Ini mencakup jenis pangan yang dihasilkan, tingkat produktivitas pertanian, dan kualitas pangan yang tersedia. Selain itu, aspek konservasi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam daya dukung penyediaan pangan. Pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam sangat diperlukan agar wilayah tersebut dapat terus memproduksi pangan yang cukup untuk masa depan. Analisis tentang Daya dukung penyediaan pangan suatu wilayah sangat penting diketahui untuk melihat kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

Analisis ini dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang terdapat pada setiap kecamatan didistribusikan secara spasial ke grid yang digunakan sehingga diketahui sebaran jumlah populasi per setiap grid.

Distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada setiap grid digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan pangan individu dengan memperhatikan standar angka kecukupan energi (AKE) sebesar 2.150 kalori per hari per kapita. Selanjutnya, hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Provinsi Sulawesi Barat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pasokan pangan dalam wilayah tersebut. Selain itu, perhitungan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi batas maksimal populasi penduduk yang dapat diberdayakan oleh sumber daya alam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memperhitungkan karakteristik wilayah dan ketersediaan pangan, penjelasan secara rinci berdasarkan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut.

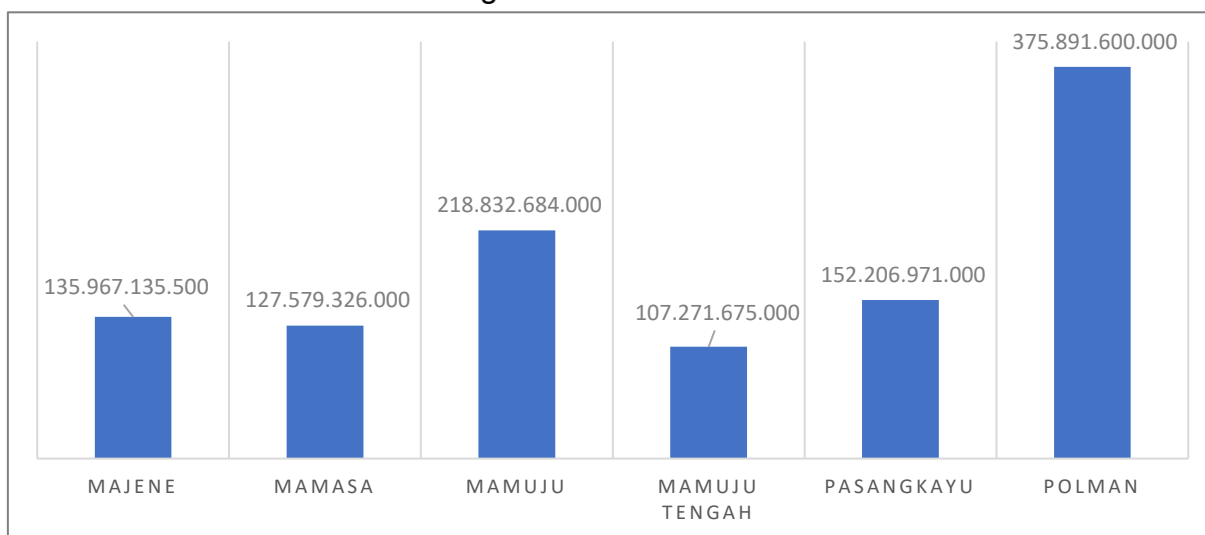
Tabel 2.3 Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2022

KABUPATEN	Penduduk Tahun	KETERSEDIAAN (hari/kapita)	Kebutuhan (hari/kapita)	Ketersediaan-Kebutuhan (hari/kapita)	Ambang Batas (hari/kapita)	
	2022		2022	2022	AMBANG BATAS	2022
Majene	177.387	60.664.484.813	135.967.135.500	(75.302.650.687)	79.267	(98.120)
Mamasa	166.444	190.376.652.439	127.579.326.000	62.797.326.439	248.371	81.927
Mamuju	285.496	299.947.759.157	218.832.684.000	81.115.075.157	392.094	106.598
Mamuju Tengah	139.950	182.427.940.764	107.271.675.000	75.156.265.764	237.988	98.038
Pasangkayu	198.574	192.713.041.168	152.206.971.000	40.506.070.168	251.540	52.966
Polewali Mandar	490.400	162.567.745.502	375.891.600.000	(213.323.854.49)	212.358	(278.042)
SULAWESI BARAT	1.458.251	1.088.697.623.844	1.117.749.391.500	(29.051.767.656)	1.421.618	(36.633)

Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Polewali Mandar dan Majene yang masih belum terpenuhi. Analisis terkait perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap kecamatan sangat diperlukan untuk mengukur berapa ambang batas penyediaan, mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kebutuhan, yang mana masa yang akan datang dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung wilayah.

Grafik 2.2 Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

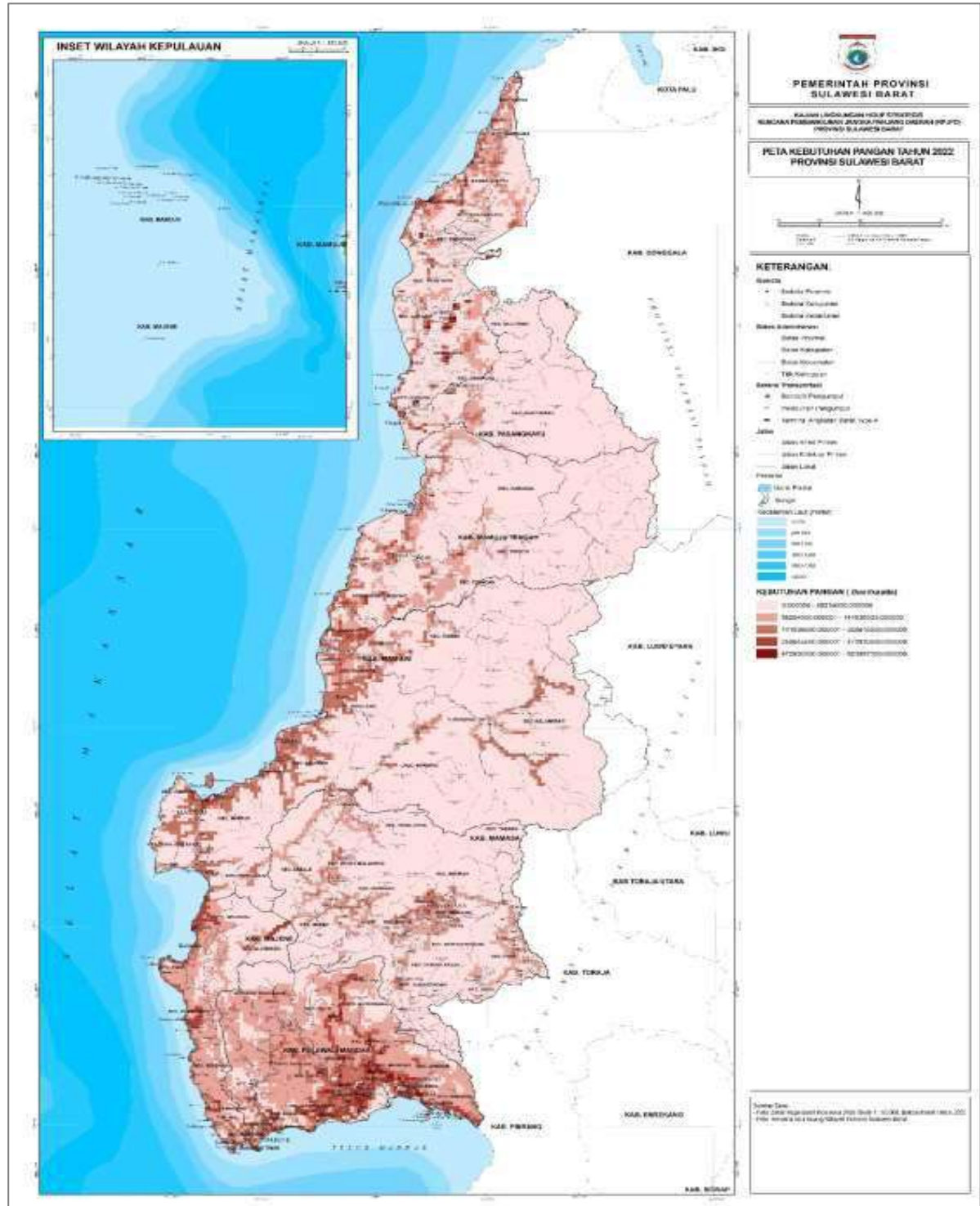


Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar mungkin menghadapi peningkatan kebutuhan pangan yang signifikan karena beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ekonomi lokal dapat menjadi pendorong

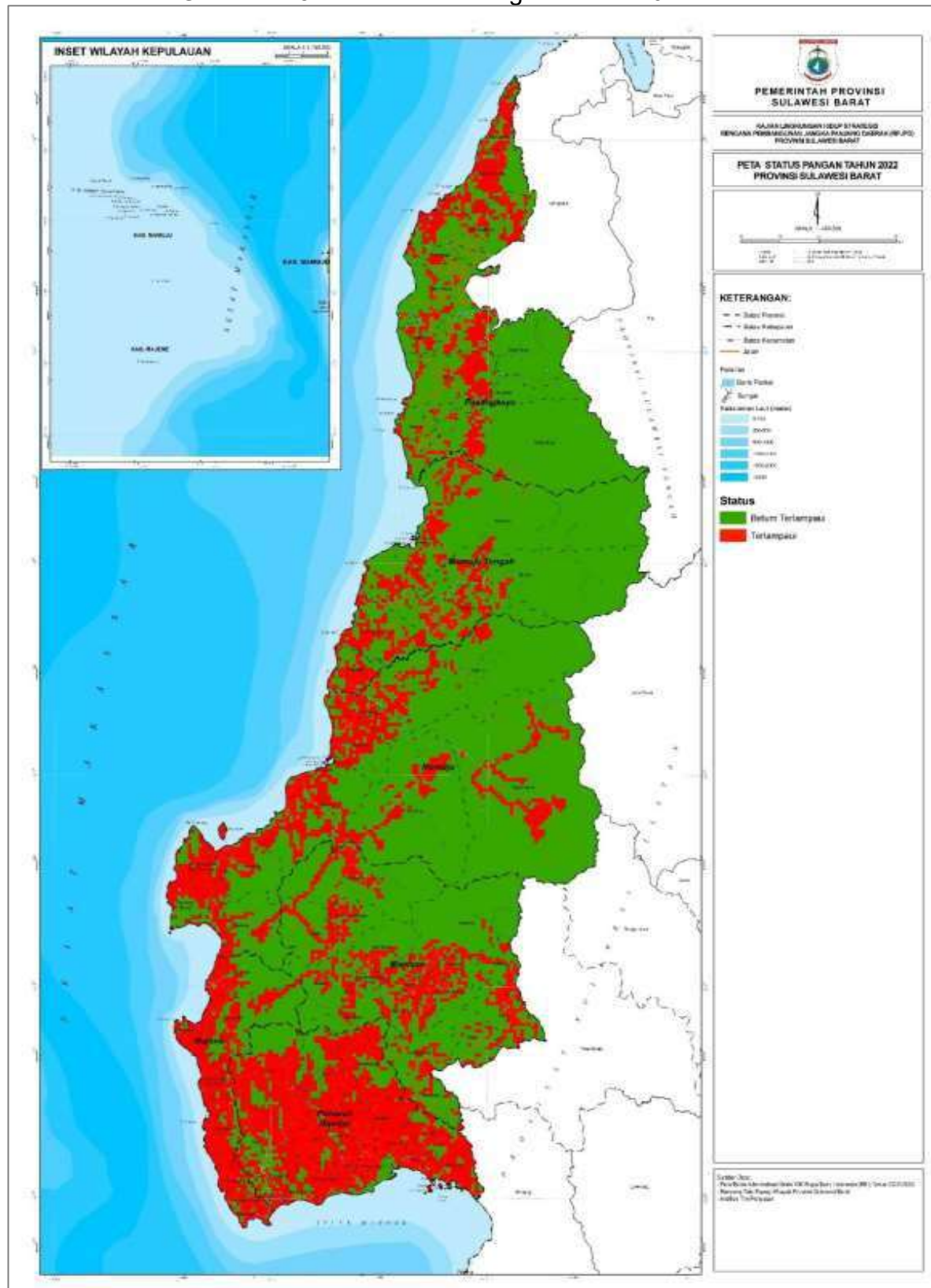
utama di balik tren ini. Peningkatan kebutuhan pangan juga dapat mencerminkan potensi pengembangan sektor pertanian dan agribisnis di kedua kabupaten tersebut.

Gambar 2.4 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Gambar 2.5 Peta Status Pangan Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

2.1.1.3. Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang beragam, dari datar, berbukit sampai bergunung. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu memiliki topografi datar, sedangkan Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa memiliki topografi berbukit sampai bergunung. Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar yang dapat dikembangkan karena banyaknya gunung. Aliran sungai memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Provinsi Sulawesi Barat bisa memanfaatkan potensi aliran sungai misalnya digunakan untuk irigasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA), jalur transportasi, terutama di daerah yang sulit diakses oleh jalan raya.

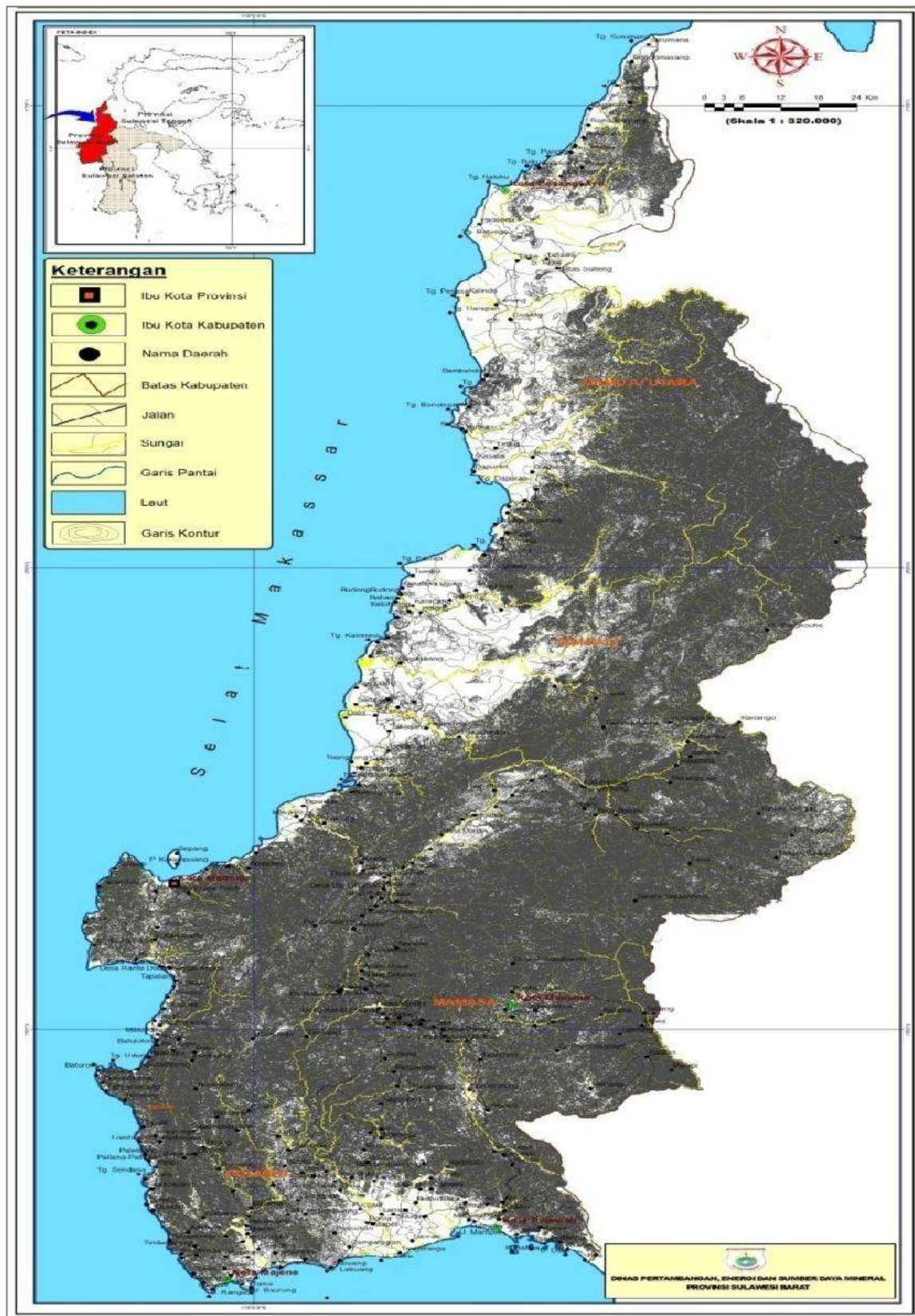
Tabel 2.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi

Kabupaten	Lembah	Lereng	Daratan
Majene	-	57	25
Polewali Mandar	3	86	78
Mamasa	-	180	1
Mamuju	-	77	24
Pasangkayu	1	21	41
Mamuju Tengah	-	23	33
Sulawesi Barat	4	444	202

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS, ada empat desa di Provinsi Sulawesi Barat yang secara topografi berada di daerah Lembah, satu desa berada di Kabupaten Pasangkayu dan tiga desa ada di Kabupaten Polewali Mandar. BPS mencatat total desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat yang berada di daerah dataran mencapai 202 desa/kelurahan, terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 78 Desa/Kelurahan. Sedangkan Desa/Kelurahan yang berada pada daerah lereng sebanyak 444 Desa/Kelurahan dengan terbanyak berada di Kabupaten Mamasa yaitu 180 Desa/Kelurahan.

Gambar 2.6 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

Sebagai daerah yang dominan lereng, Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa gunung yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi Masyarakat. Dalam beberapa hal, gunung memiliki banyak fungsi seperti pengendali sumber air, habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global, dan beberapa fungsi vital lainnya. Berdasarkan data, sekitar 193 gunung masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat, dimana Gunung Ganda Dewata merupakan gunung tertinggi dengan elevasi 3.037 meter di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten Mamasa (wilayah administratif taman nasional gandang dewata terletak di 3 kabupaten yaitu Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamasa). Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas, yang mencakup sekitar 70 persen dari total luas. Itu biasanya terletak di bagian tengah ke timur dan memanjang dari utara ke selatan, membentuk lembah yang curam.

Tabel 2.5 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian (meter)
1.	Majene	11	Seteng	1.001
2.	Polewali Mandar	28	Tetuh	1.448
3.	Mamasa	31	Mambulilling	2.873
4.	Mamuju	109	Ganda Dewata	3.037
5.	Pasangkayu	14	Pandabatu	284

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tak hanya menyimpan sumber daya alam, wilayah laut dan gunung Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi menjadi sumber bencana alam, terutama jika aktivitas eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu sebabnya, wajar jika Provinsi Sulawesi Barat ditempatkan sebagai provinsi kedua di Indonesia yang masuk dalam wilayah daftar rawan bencana. Menurut indeks risiko bencana yang dirilis oleh BNPB, Provinsi Sulawesi Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan kedua paling rentan terhadap bencana, dan dari 528 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Majene berada di urutan kedua terburuk di Indonesia. Itu sebabnya, dalam desain rencana pembangunan jangka panjang, kerawanan bencana mestinya perlu menjadi salah satu pertimbangan.

2.1.1.4. Geologi

Geologi di Provinsi Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartir. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batu sabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) di bagian timur memanjang utara-selatan wilayah Provinsi

Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong ditindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan batuan gunung api beranggotakan batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal–Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit–basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah–Pliosene dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit–basal. Batuan ini mempunyai anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal.

Sedangkan pada bagian barat wilayah Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batu lempung. Batuan berumur Miosen Tengah–Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

Batuan Gunungapi Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batu gamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosene Awal.

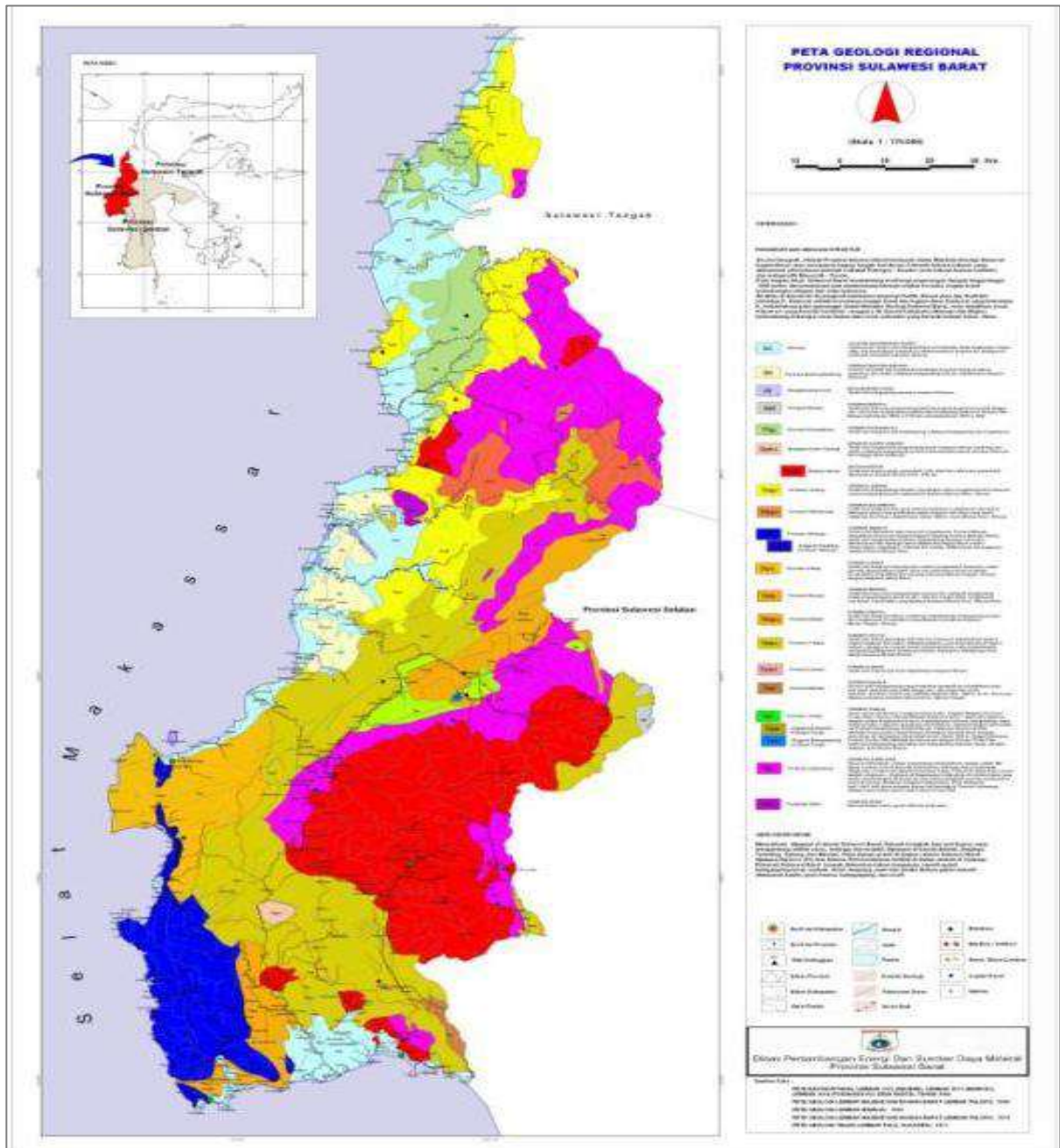
Pada bagian timur wilayah Provinsi Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosene. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuanannya didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml).

Formasi ini terdiri atas batu pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah–Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmvpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di Wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budong Budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batu lempung dan batu gamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen.

Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Provinsi Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Gambar 2.7 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala di Provinsi Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plysch Formasi Latimojong (KIs). Secara umum Formasi ini mengalami pemulihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dn diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

1. Foldbelt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke Selat Makassar.
2. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
3. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batu lempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batu gamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistesen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesa ke arah timur.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologis Provinsi Sulawesi Barat memberikan gambaran tentang aliran sungai, Hujan dan Pola Hujan, dan aspek lainnya yang pada dasarnya menunjukkan potensi dan tantangan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dialiri oleh beberapa sungai-sungai besar, dengan 5 (lima) aliran terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang, yang melewati Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, dan Polewali Mandar kemudian Sungai Karama, yang mengalir ke Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km. Selain dua sungai tersebut, ada beberapa aliran sungai lain seperti Sungai Matakali, Mambi, Mandar, Manyamba, Malunda, dan Kaluku dengan panjang di bawah 100 km.

Tabel 2.6 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi
1.	Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
2.	Matakali	28	Polewali Mandar
3.	Mambi	95	Polewali Mandar
4.	Mandar	90	Polewali Mandar
5.	Manyamba	28	Majene
6.	Malunda	38	Majene
7.	Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
8.	Karama	150	Mamuju

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat adalah ekosistem yang sangat penting dan penting. Ini terjadi karena bagian besar Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari daerah bergunung-gunung dengan curah hujan tinggi yang dikelilingi oleh banyak sungai besar. Di sisi lain, daerah datar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang terkena dampak banjir dan sedimentasi sungai besar. Akibatnya, ekosistem dan daya dukung daerah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya, sehingga, jelas bahwa arahan untuk pengembangan ekologi DAS harus dirancang dengan baik.

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumberdaya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

2.1.1.6. Klimatologi

Provinsi Sulawesi Barat masih mengandalkan pertanian sebagai sektor pendukung perekonomian daerah dan mayoritas masyarakat masih menggantungkan penghidupan mereka pada sektor primer. Ketergantungan perekonomian daerah Terhadap sektor pertanian secara langsung membuat ekonomi Provinsi Sulawesi Barat bergantung pada kondisi iklim. Jika kondisi iklimnya baik, maka produktivitas sektor pertanian akan meningkat, begitupun sebaliknya. Persoalannya kemudian, iklim, termasuk variabel yang sampai saat ini belum mampu dikendalikan, itu yang membuat ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan.

Karena dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi, Provinsi Sulawesi Barat umumnya memiliki iklim tropis. Suhu udara di Provinsi Sulawesi Barat bergantung pada musim angin laut karena berada di pinggir pantai dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Dalam tiga Tahun terakhir, suhu paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat 20,00°C dan paling tinggi 35,40°C. Suhu minimum tersebut menunjukkan bahwa pada posisi suhu paling rendah, suhu Provinsi Sulawesi Barat masih relatif hangat (tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi). Namun untuk suhu maksimumnya menunjukkan suhu yang cukup tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu 35°C keatas sudah masuk dalam kategori cukup panas. Dibandingkan angka Tahun 2020, terjadi perubahan suhu. Suhu paling rendah Tahun 2020 berada pada rentan 20,60°C hingga 28,10°C (hanya satu bulan yang suhunya 20°C), sementara di Tahun 2024 angkanya cenderung lebih rendah yaitu 20,00°C. Untuk suhu maksimum, terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang rerata hanya 35,00°C naik menjadi 35,40°C. Perubahan suhu ini merupakan salah satu penanda bahwa Provinsi Sulawesi Barat tidak lepas dari perubahan iklim.

Perubahan suhu sejalan dengan perubahan kelembaban udara. Dalam tiga Tahun terakhir, angka minimum dan rata-rata kelembaban udara di Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik. Tahun 2022, kelembaban di Provinsi Sulawesi Barat masih di angka 50 persen, kemudian naik jadi 39 persen Tahun 2023, dan mencapai 43 persen Tahun 2024. Secara rata-rata, angka kelembaban juga mengalami penurunan, dari 84,50 persen ke 81,29 persen, dan kemudian 80,22 persen. Kelembaban maksimum Provinsi Sulawesi Barat bahkan mencapai angka 100 persen. Jika kelembaban mencapai 100 persen, itu berarti udara dalam kondisi tersebut telah mencapai titik jenuh kelembaban yang berarti bahwa udara mengandung sebanyak mungkin uap air yang dapat diabsorpsi pada suhu dan tekanan tertentu.

Pada unsur kecepatan angin, angka paling rendah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam tiga Tahun terakhir adalah calm atau tidak ada angin atau nilai kecepatan anginnya 0, sementara angka maksimumnya mencapai 10,20 m/det. Jika diambil reratanya, ada penurunan angka kecepatan angin Tahun 2024 dari sebelumnya 4,10 m/det menjadi 2,05 m/det. Angka 2,05 m/det menunjukkan bahwa angin bergerak dengan kecepatan 2,05 meter setiap detik. Ini adalah ukuran kecepatan linier, yang berarti sejauh mana angin bergerak secara fisik dalam interval waktu yang sangat singkat (1 detik). Kecepatan angin 2,05 m/det tidak terlalu cepat.

Ini dapat dianggap sebagai angin ringan hingga sejuk, tergantung pada konteksnya. Kecepatan angin ini bisa terjadi dalam berbagai situasi cuaca.

Perubahan suhu dan cuaca berpengaruh pada perubahan tekanan udara. Selama Tahun 2022 hingga 2024, angka tekanan udara di Provinsi Sulawesi Barat secara rata-rata meningkat dari 1.005,90 mbar menjadi 1.006,95 mbar, dan 1.007,24 mbar. Tekanan udara adalah salah satu faktor kunci yang digunakan oleh meteorologis untuk membuat prakiraan cuaca. Perubahan dalam tekanan atmosfer dapat mengindikasikan perubahan cuaca yang akan datang. Tekanan rendah sering kali terkait dengan cuaca hujan dan badai, sementara tekanan tinggi dapat mengindikasikan cuaca cerah dan stabil. Selain itu, tekanan udara dapat memengaruhi suhu dan kecepatan angin di wilayah tertentu. Variasi tekanan udara memainkan peran dalam pembentukan pola cuaca lokal seperti angin kencang, gelombang panas, atau musim hujan.

Tabel 2.7 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Unsur Iklim	2020	2021	2022	2023	2024
Suhu (°C)					
Minimum/Minimum	20,60	20,40	20,60	21,00	20,00
Rata-rata/Average	28,10	27,70	27,40	28,12	28,30
Maksimum/Maximum	35,00	34,10	35,00	35,20	35,40
Kelembaban (%)					
Minimum/Minimum	46,00	48,00	50,00	39,00	43,00
Rata-rata/Average	79,00	81,50	84,50	81,29	80,22
Maksimum/Maximum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kecepatan Angin (m/det)					
Minimum/Minimum*	calm	calm	calm	calm	calm
Rata-rata/Average	1,95	3,30	2,30	4,10	2,05
Maksimum/Maximum	20,56	26,00	na	24,00	10,20
Tekanan Udara (mbar)					
Minimum/Minimum	1.000,90	1.000,30	999,60	988,60	1.001,40
Rata-rata/Average	1.006,50	1.006,30	1.005,90	1.006,95	1.007,24
Maksimum/Maximum	1.011,60	1.011,40	1.011,30	1.012,70	1.012,10
Jumlah Curah Hujan (mm/Tahun)	1.413,20	2.270,80	2.395,80	1.242,90	1.566,40
Jumlah Hari Hujan (hari)	201	217	168	152	268
Penyinaran Matahari**	75,00	5,90	6,00	6,90	6,22

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Keterangan:

- *Calm = tidak ada angin atau nilai kecepatan anginnya 0
- **Tahun 2020 satuan persen, Tahun 2021-2022 satuan jam

Unsur iklim yang lainnya juga mengalami perubahan dalam tiga Tahun terakhir. Jumlah curah hujan Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik, jumlah hari hujannya mengalami penurunan, sementara penyinaran matahari mengalami kenaikan. Angka curah hujan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 mencapai 1.566,40 mm/Tahun, menunjukkan bahwa jumlah air hujan yang jatuh selama satu Tahun, mencapai 1.566,40 milimeter. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang 1.242,90 mm/Tahun. Perubahan curah hujan mempengaruhi jumlah hari hujan. Hari hujan merujuk pada hari-hari ketika curah hujan tercatat dalam sebagian besar wilayah tersebut. Ini bisa berarti hujan deras, gerimis, atau hujan ringan. Tahun 2024, jumlah hari hujan Provinsi Sulawesi Barat naik dari 152 hari ke 268 hari, menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, wilayah tersebut mengalami hujan pada 268 hari yang berbeda atau menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat semakin sering hujan. Variabel ini pula yang mempengaruhi angka penyinaran matahari yang mencapai 6 jam per hari. Jumlah jam penyinaran matahari Provinsi Sulawesi Barat dapat bervariasi sepanjang Tahun dan tergantung pada musim. Musim panas seringkali memiliki lebih banyak jam penyinaran matahari daripada musim dingin.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Provinsi Sulawesi Barat mengalami banyak perubahan dalam luasan Kawasan hutan seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2015 sebesar 1.092.431 ha. Delapan Tahun kemudian, luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat berkurang seluas 22.442 ha menjadi 1.069.989 ha. Perubahan tersebut merujuk pada Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021).

Komposisi kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat juga ikut berubah salah satunya karena pengajuan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri. Perubahan luasan kawasan hutan salah satunya disebabkan karena permintaan pemerintah provinsi yang mengajukan perubahan status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Mamuju dan hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi di Kabupaten Polewali Mandar. Itu sebabnya luasan Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju turun dari 132.765 ha Tahun 2015 menjadi 128.691 ha di Tahun 2023 atau berkurang 4.074 ha. Tak hanya Kabupaten Mamuju, beberapa Kabupaten lain juga mengalami penurunan luasan Kawasan hutan lindung seperti Majene yang mengalami pengurangan luasan sebesar 39 ha dan Kabupaten Pasangkayu seluas 93.096 ha. Permintaan untuk melakukan konversi luasan hutan lindung menjadi Kawasan yang dapat dikelola untuk mendorong pemanfaatan sumber daya. Namun penting menjadi perhatian pemerintah daerah bahwa mengalih fungsikan Kawasan hutan lindung menjadi APL secara berlebihan bisa memicu munculnya persoalan lingkungan di masa depan sebab berdasarkan definisi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jika hutan lindung terus-menerus dikonversi menjadi APL, maka bencana seperti yang disebutkan tersebut di masa akan lebih sering dialami oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.8 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ha)

Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha)					Total
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	
Majene	44.405,18	-	7.590,28	6,33	-	52.001,79
Polewali Mandar	70.217,27	778,98	23.030,94	-	-	94.027,19
Mamasa	86.308,93	68.047,54	49.359,56	-	417,12	204.133,15
Mamuju	140.509,00	74.646,67	101.749,70	44.282,62	10.801,76	371.989,75
Pasangkayu	98.283,37	195,43	55.463,11	2.335,02	8.795,10	165.072,03
Mamuju Tengah	16.583,79	44.449,35	94.432,83	24.319,73	1.224,38	181.010,08
Sulawesi Barat	456.307,54	188.117,97	331.626,42	70.943,70	21.238,36	1.069.233,99

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)

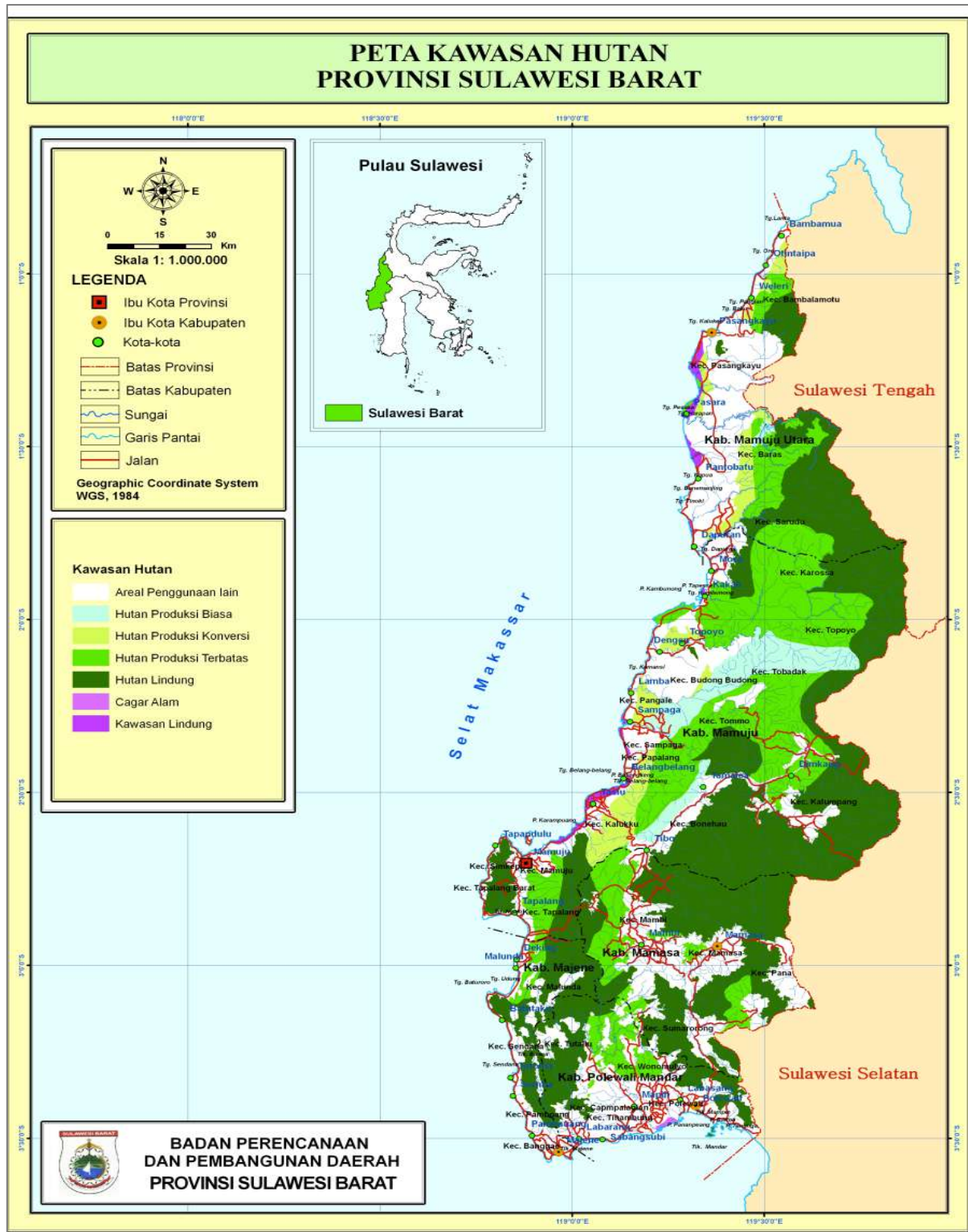
Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 ha jika merujuk pada RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034 (Perda No. 1 Tahun 2014), namun angka tersebut mengalami perubahan menjadi 366.456 ha Tahun 2021. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah provinsi rencana akan memanfaatkan Kawasan hutan lindung menjadi:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
2. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
3. Apabila ada jalan raya yang terpaksa memasuki kawasan hutan lindung, maka dilakukan pelepasan secara parsial dan tidak diperkenankan membangun atau memanfaatkan lahan di sepanjang jalan yang mengganggu fungsi kawasan lindungnya;

4. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Gambar 2.9 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutan Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.

Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Balabalakang, Taman wisata Goa alam.

Pemerintah daerah juga menetapkan daerah rawan bencana dalam dokumen RTRW. Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten Polewali Mandar; Kabupaten Pasangkayu; Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar;
2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar;
4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju; Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar;
5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat.

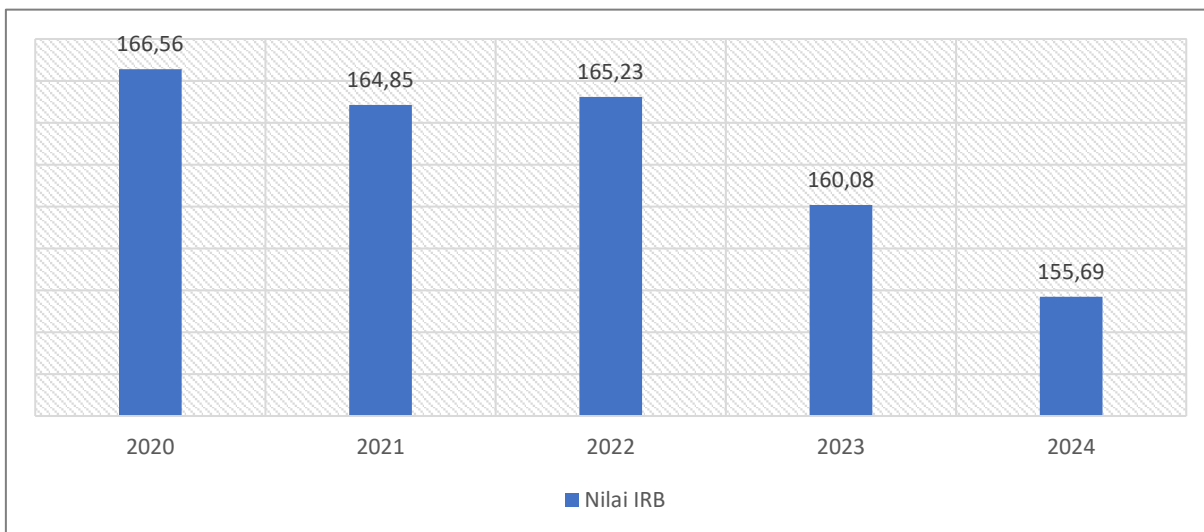
Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Dimana kawasan budidaya Provinsi meliputi: Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.8. Aspek Kebencanaan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada Tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko 155,69 (tinggi) dan merupakan skor IRBI tertinggi secara Nasional.

Grafik 2.3 Nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2020–2024

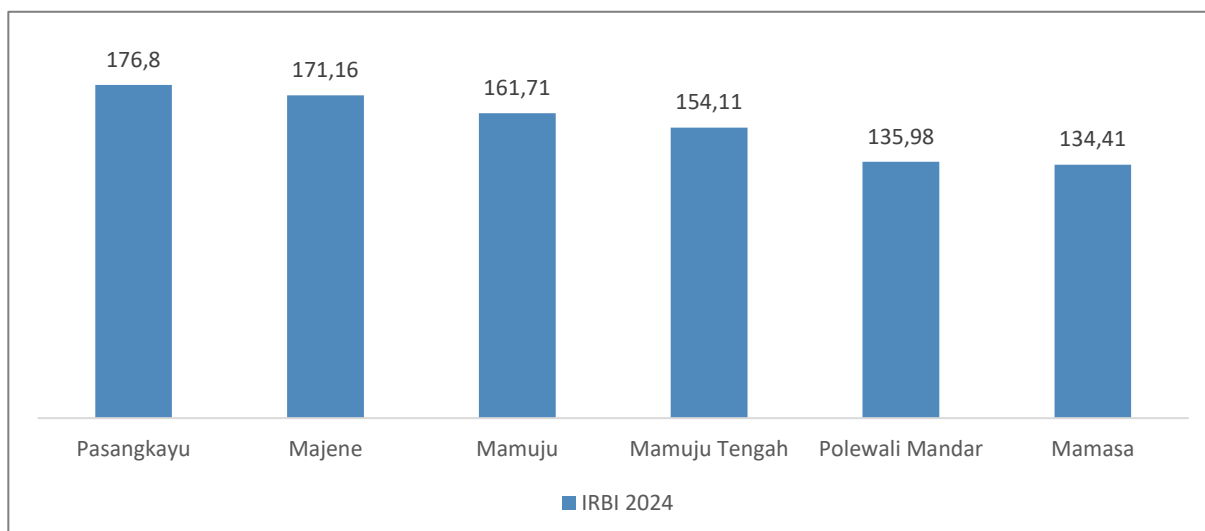


Sumber: BNPB, Tahun 2025

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki skor IRBI yang cukup tinggi. Pada Tahun 2020, skor IRBI Sulawesi Barat adalah 166,56 Poin, mengalami penurunan menjadi 164,85 Poin pada Tahun 2021. Pada 2023 skor IRBI Sulawesi Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,15 poin menjadi 160,08 Poin, hingga di Tahun 2024 menurun menjadi 155,69 poin. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya mitigasi bencana di provinsi tersebut. IRBI mengukur risiko berdasarkan tiga komponen utama: Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity). Penurunan skor ini bisa jadi hasil dari peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pengurangan kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Secara keseluruhan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat memiliki skor IRBI yang tinggi, mencerminkan kerentanannya terhadap berbagai jenis bencana alam. Upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah Sulawesi Barat.

Grafik 2.4 Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2024



Sumber: BNPB, Tahun 2025

Berdasarkan Grafik diatas bahwa Kabupaten Pasangkayu memiliki skor IRBI tertinggi, yaitu 176,8 poin dan masuk dalam kategori risiko tinggi rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten Majene memiliki skor IRBI sebesar 171,16 poin juga dalam kategori risiko tinggi rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Kabupaten Mamuju memiliki skor IRBI sebesar 161,71 poin masuk dalam kategori risiko tinggi. Mamuju sering mengalami gempa bumi. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki skor IRBI sebesar 154,11 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Wilayah ini rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten Polewali Mandar memiliki skor IRBI sebesar 135,98, juga dalam kategori risiko sedang. Banjir dan tanah longsor mempengaruhi skor IRBI di Polewali Mandar. Kabupaten Mamasa memiliki skor IRBI sebesar 134,41 poin masuk dalam kategori risiko sedang. Tanah longsor menjadi perhatian utama di wilayah ini.

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak Tahun 2016 adalah pelaksanaan survei penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah yang; terdiri dari: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Tabel 2.9 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,2	0,2	Rendah
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,2		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,2		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,2		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,2		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,2		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,2		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022–2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,20 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Tabel 2.10 Jumlah Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Gempa Bumi	Tsunami	Gempa Bumi dan Tsunami	Letusan Gunung Api	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang
Majene	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Polewali Mandar	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
Mamasa	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
Mamuju	–	–	–	–	-	5	–	–	1	–
Pasangkayu	–	–	–	–	-	–	–	–	–	–
Mamuju Tengah	–	–	–	–	-	9	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	2	16	–	–	3	–

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.11 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten dan Kejadian Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Jiwa)

Kabupaten	Gempa Bumi			Tanah Longsor			Banjir			Cuaca Ekstrem		
	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi
Majene	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Polewali Mandar	–	–	–	–	-	5	–	–	2	–	–	–
Mamasa	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Mamuju	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–
Pasangkayu	–	–	–	–	-	–	–	–	–	–	–	–
Mamuju Tengah	–	–	–	–	-	–	–	–	7	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	1	7	–	–	16	–	–	–

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan pengalaman kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah provinsi memetakan wilayah rawan bencana dalam RTRW, yaitu;

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tappalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Singkep, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).
4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong-Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh Tahun (Tahun 2014–2024) atau dua puluh Tahun mendatang (Tahun 2014–2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa:

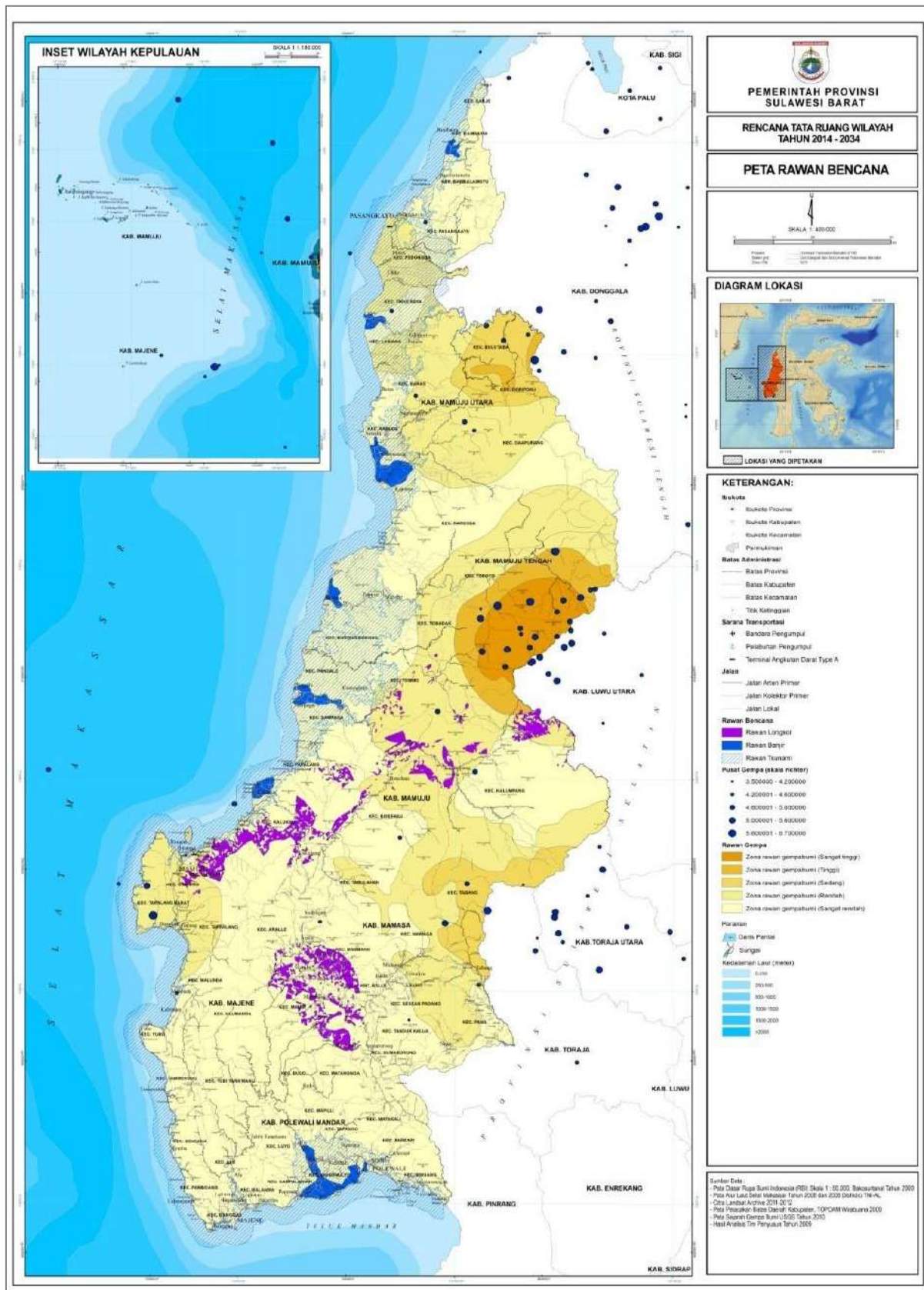
1. Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
2. Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
3. Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumberdaya manusia.

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Singkep, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang.

Curah hujan yang tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada, kawasan tertentu di Provinsi Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap longsor. potensi kekritisn, erosi dan longsor di Provinsi Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor.

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

2.1.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, adanya perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup setiap Tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan kualitas udara. Terkait dengan indikator IKLH mulai Tahun 2021 sudah menggunakan 4 indikator/sector sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan, bahwa untuk indikator IKLH terdiri dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL yakni: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 4) Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.12 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	N/A	61,43	61,11	66	70,00
Kab. Polewali Mandar	50,00	52,35	50,80	61,35	55,91
Kab. Mamasa	51,82	54,76	55,71	58,57	56,67
Kab. Mamuju	N/A	63,33	60,00	55,67	53,89
Kab. Pasangkayu	N/A	55,33	61,52	60,27	59,68
Kab. Mamuju Tengah	N/A	67,50	63,33	54,44	50,00
Prov. Sulawesi Barat	53,00	56,04	56,41	75,91	55,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Tabel 2.13 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	86,87	88,16	86,90	88,95	92,76
Kab. Polewali Mandar	85,51	88,56	90,76	92,87	89,96
Kab. Mamasa	91,48	92,80	92,53	94,71	91,53
Kab. Mamuju	92,88	92,96	94,19	94,89	88,96
Kab. Pasangkayu	92,94	94,24	95,16	96,51	93,26
Kab. Mamuju Tengah	88,62	89,13	91,73	92,08	92,29
Prov. Sulawesi Barat	89,72	90,97	91,88	92,24	91,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Tabel 2.14 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	58,90	64,04	64,00	65,03	65,63
Polewali Mandar	40,77	44,41	44,40	48,97	49,80
Mamasa	70,50	74,32	74,10	75,47	76,30
Mamuju	82,61	83,25	83,20	83,45	83,88
Pasangkayu	63,17	65,39	65,40	67,08	67,33
Mamuju Tengah	80,13	81,05	81,00	78,56	78,27
Sulawesi Barat	70,52	72,66	71,88	82,66	73,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Tabel 2.15 Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021–2024

Tahun	Nilai IKAL	Predikat Kriteria
2021	81,52	Baik
2022	87,92	Baik
2023	83,88	Baik
2024	84,94	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.

Tabel 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai IKLH	Predikat Kriteria
2020	74,91	Baik
2021	75,72	Baik
2022	76,77	Baik
2023	84,57	Baik
2024	76,33	Baik

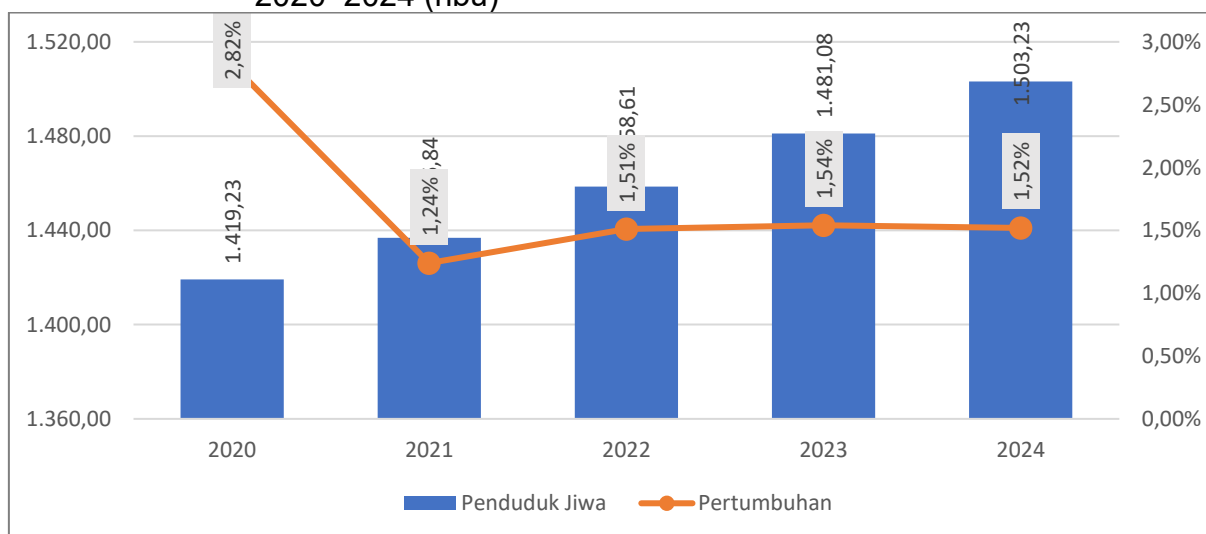
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang memasuki fase bonus demografi, sebuah peluang besar untuk mendorong pembangunan daerah karena sumber daya manusia didominasi oleh penduduk usia produktif. Bonus demografi Provinsi Sulawesi Barat terjadi karena keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Selama 5 Tahun terakhir yaitu Tahun 2020–2024, pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi pada rentang 1-2 persen berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat (catatan: data penduduk BPS adalah hasil estimasi). Fluktuasi yang cukup tajam terjadi di Tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,82 persen. Saat sensus penduduk dilakukan lagi Tahun 2020, BPS mencatat populasi Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1.419.230 jiwa, bertambah 22,17 persen dibandingkan dengan populasi saat sensus penduduk Tahun 2010 dan pada Tahun 2024 jumlah penduduk Sulawesi Barat sebanyak 1.503.232 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,52 persen.

Grafik 2.5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (ribu)

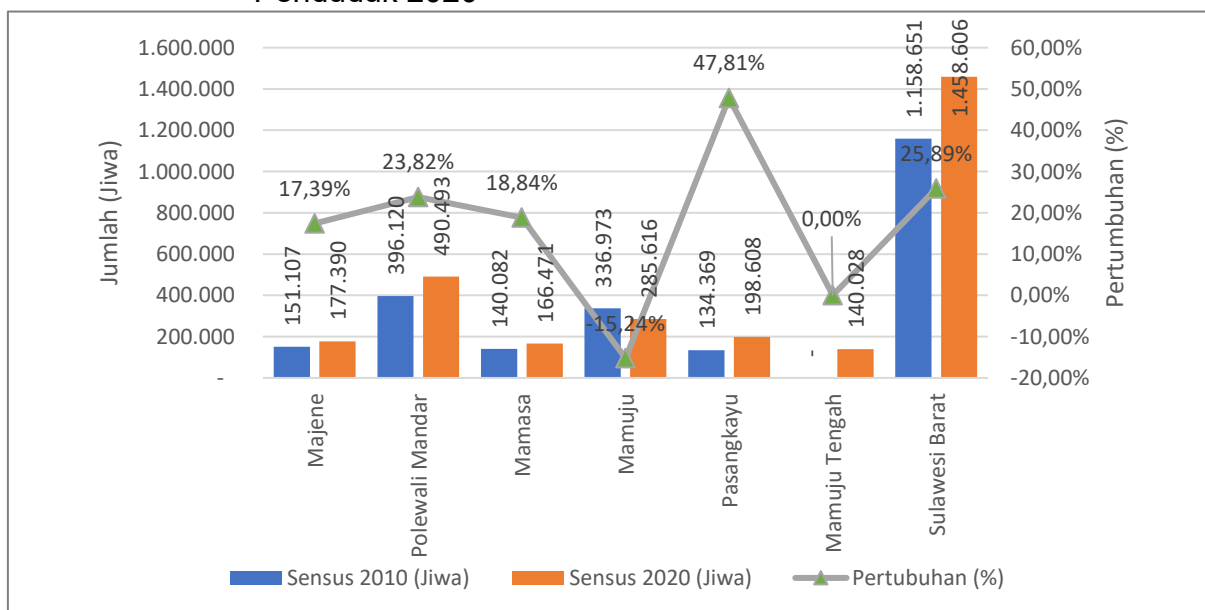


Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Setelah sensus penduduk 2020, BPS melakukan sensus long form. Pendataan Long Form SP2020 dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, maupun perumahan. Hasil sensus long form tersebut mengidentifikasi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.503.232 jiwa, lebih tinggi 84.000 jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2020.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat tak lepas dari dinamika penduduk kabupaten. Perubahan penduduk kabupaten terlihat jika membandingkan antara hasil sensus penduduk Tahun 2010 dan sensus 2020. Perbandingan tersebut menunjukkan hampir semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan penduduk positif, satu-satunya daerah yang mengalami penurunan penduduk adalah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju berkurang jumlah penduduknya dari 336.973 jiwa pada sensus penduduk Tahun 2010 menjadi 285.616 jiwa di sensus penduduk Tahun 2020 disebabkan adanya pemekaran wilayah Mamuju Tengah dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Mamuju. Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 47,81 persen, kemudian Kabupaten Polewali Mandar 23,82 persen. Kabupaten Mamasa dan Majene masing-masing tumbuh 18,84 persen dan 17,39 persen, sementara Mamuju Tengah saat sensus penduduk Tahun 2010 dilakukan masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju. Perubahan jumlah penduduk kabupaten membuat Penduduk Provinsi Sulawesi Barat naik 25,89 persen, dari sensus 2010 sebanyak 1.158.651 jiwa menjadi 1.458.606 jiwa saat sensus penduduk Tahun 2020. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain, sekaligus menempatkannya sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat, disusul dengan Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, Mamasa, dan Mamuju Tengah.

Grafik 2.6 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Antara Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020

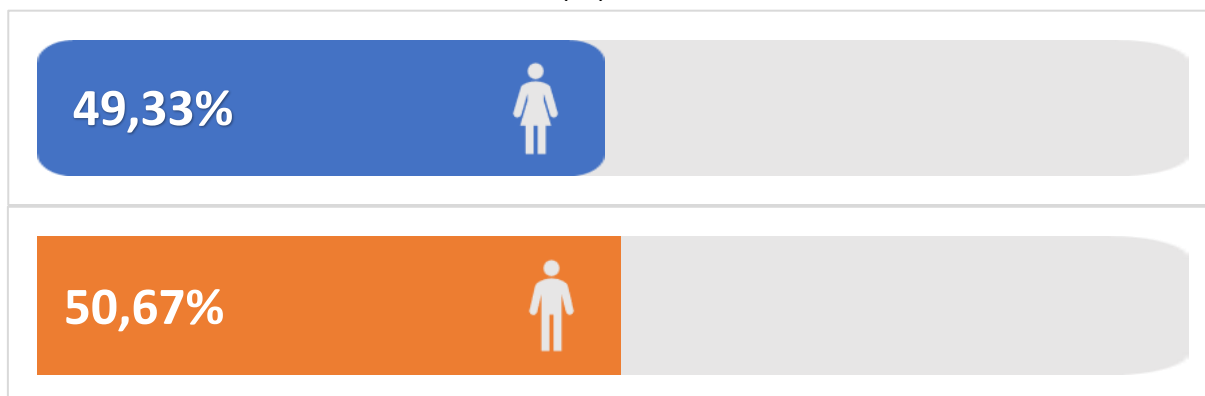


Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

2.1.2.2. Rasio Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pada Tahun 2024 proporsi penduduk laki-laki mencapai 50,67 persen atau setara dengan 761.740 jiwa, sementara penduduk perempuan mencapai 49,33 persen atau 741.490 jiwa. Angka tersebut membuat rasio jenis kelamin mencapai 102,73, menunjukkan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan. Struktur penduduk semacam ini sejalan dengan struktur penduduk Indonesia yang menurut BPS rasionya mengalami kenaikan setiap Tahun. Menurut BPS jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Bagi Nasional, rasio penduduk di atas 100 merupakan fenomena pergeseran demografi karena pada sensus Tahun 2010, angka rasio penduduk di bawah 100, menunjukkan penduduk Perempuan lebih dominan. Tapi bagi Provinsi Sulawesi Barat, angka tersebut sama kondisinya dengan sensus 2010, dimana saat itu rasio jenis kelamin mencapai 100,76 karena proporsi penduduk laki-laki 50,19 persen, sedangkan perempuan 49,81 persen.

Grafik 2.7 Proporsi Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 (%)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

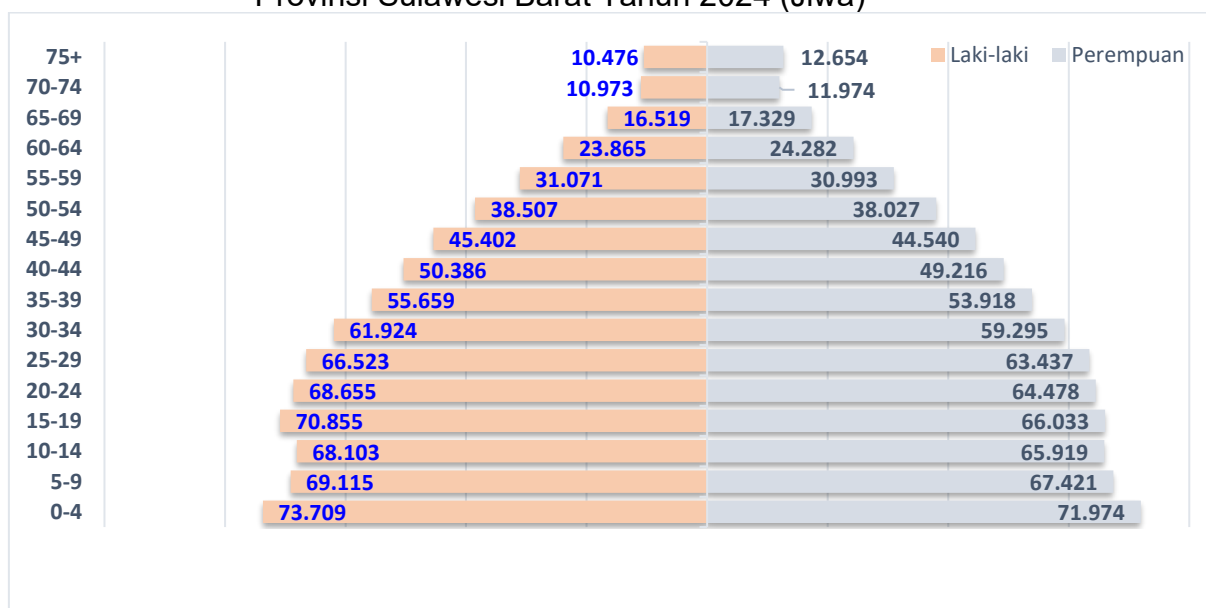
2.1.2.3. Bonus Demografi

Meski tak banyak berubah komposisi penduduk perempuan dan laki-laki, namun yang menarik dicermati oleh pemerintah daerah adalah penduduk berdasarkan usia karena dari komposisi inilah Provinsi Sulawesi Barat diklaim memasuki fase bonus demografi. Bonus demografi adalah situasi demografis yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 Tahun, usia belum produktif 0-14 Tahun, dan usia tidak produktif 65 Tahun ke atas. Besaran proporsi penduduk usia produktif dapat dilihat pada Gambar piramida penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang angkanya lebih besar di bagian tengah Gambar, sementara di bagian paling bawah dan paling puncak piramida jumlahnya relatif rendah. Semua akademisi dan peneliti sepakat bahwa negara/daerah yang memasuki fase bonus demografi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena mereka memiliki surplus faktor produksi tenaga kerja.

Tahun 2024, jumlah penduduk berusia belum produktif mencapai 416.241 jiwa, yang terdiri dari 210.927 jiwa penduduk laki-laki dan 205.314 jiwa penduduk Perempuan. Berdasarkan kelompok umur, jumlah populasi berusia 0-4 Tahun lebih banyak yaitu 145.683 jiwa, penduduk berusia 5-9 Tahun mencapai 136.536 jiwa, dan penduduk 10-14 Tahun sebanyak 134.022 jiwa. Jika diproporsikan dengan total penduduk Provinsi Sulawesi Barat, maka penduduk usia belum produktif 27,69 persen dari total populasi.

Jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah dari penduduk berusia belum produktif. Total penduduk usia tidak produktif Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 79.925 jiwa, 33.848 jiwa berusia 65-69 Tahun, 22.947 jiwa berada pada rentan usia 70-74 Tahun, dan 23.130 jiwa termasuk dalam kategori usia 75 Tahun ke atas. Jika di kelompok usia belum produktif, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak, di kelompok usia tidak produktif didominasi oleh penduduk perempuan, angkanya 5,32 persen dari total penduduk tidak produktif.

Grafik 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Jiwa)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2025

Penduduk usia produktif Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1.007.066 jiwa atau setara dengan 66,99 persen dari total populasi Provinsi Sulawesi Barat. Penduduk usia produksi Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk berusia 15-19 Tahun dan 20-24 Tahun, semakin bertambah usianya, semakin kecil jumlahnya. Komponen penduduk usia produktif yang lebih banyak pada usia sangat muda menunjukkan bahwa bonus demografi Provinsi Sulawesi Barat masih akan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan usia belum dan tidak produktif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya disebabkan karena angka beban tanggungan yang relatif rendah.

Upaya memaksimalkan pemanfaatan Bonus Demografi juga sangat terkait dengan konsep Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang dapat dicapai ketika Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1. Dalam hal ini diharapkan Provinsi Sulawesi Barat dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang ideal agar kuantitas penduduk terkendali sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara umum. Keseimbangan antara kuantitas (jumlah penduduk) dan peningkatan kualitasnya merupakan faktor pendukung utama dalam mendorong keberhasilan Pembangunan.

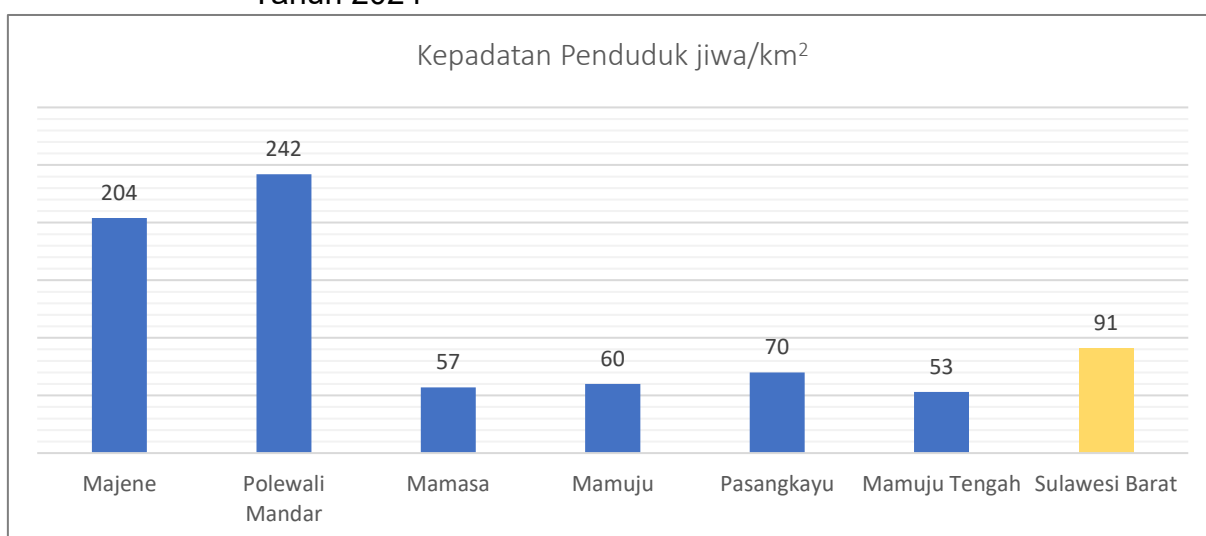
2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/ Juni menunjukkan sebanyak 1.503.232 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 761.740 jiwa penduduk laki-laki dan 741.490 jiwa penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2024 tercatat sebesar 1,53 persen dengan kepadatan penduduk 91 penduduk per km².

Ditinjau dari persebaran penduduk di masing-masing Kabupaten pada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar memiliki persentase penduduk sebesar 33,35 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat dengan kepadatan penduduk sebesar 242 jiwa per km². Sama halnya dengan kepadatan penduduk. Sebaliknya, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan persentase penduduk yang paling rendah yaitu sebesar 9,65 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 53 jiwa per km².

Grafik 2.9 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka Tahun 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

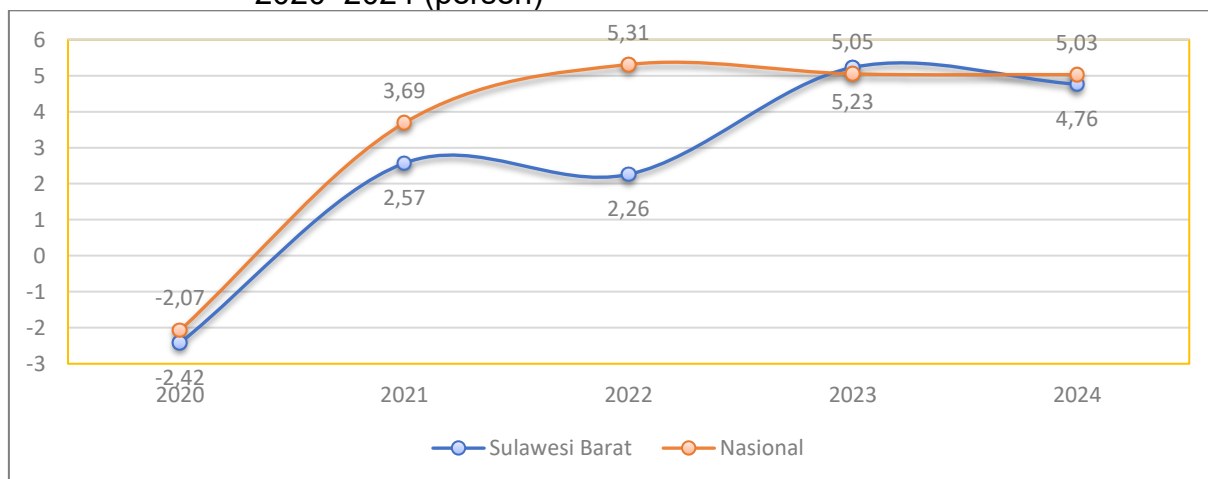
Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi Nasional yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan Indikator PDRB. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: Pertumbuhan Ekonomi, struktur perekonomian, inflasi, pendapatan per kapita serta produktivitas tenaga kerja.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi

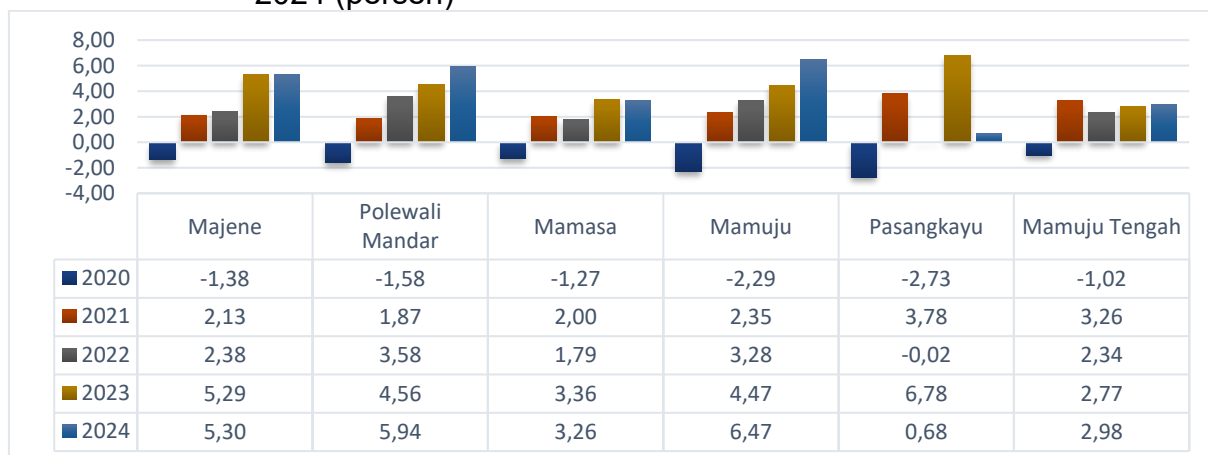
dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2024 berada di 4,76 persen, capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 5,23 persen.

Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen)



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi hingga Tahun 2024, meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Mamuju dengan tingkat pertumbuhan yang paling meningkat dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 6,47 persen Tahun 2024. Diikuti oleh kabupaten lainnya yang mengalami perbaikan ekonomi dengan peningkatan yang positif. Pertumbuhan terendah berada pada Kabupaten Pasangkayu dimana hanya tumbuh sebesar 0,68 persen.

Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	1,16	3,31	4,04	4,78
Pertambangan dan Penggalian	-4,90	9,08	0,58	4,67	9,71
Industri Pengolahan	-3,51	5,89	-0,64	14,41	-1,69
Pengadaan Listrik dan Gas	6,85	2,20	7,13	10,08	9,65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	1,63	-0,31	-0,25	4,95	6,07
Konstruksi	-13,31	11,63	-1,60	3,75	6,51
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,66	3,57	1,68	5,50	6,01
Transportasi dan Pergudangan	-7,00	1,69	8,38	10,28	8,50
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	-7,19	4,45	11,89	10,47	7,23
Informasi dan Komunikasi	5,73	-0,39	2,37	9,48	6,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,76	6,01	-1,26	-4,13	2,90
Real Estate	1,90	-1,27	5,24	5,00	7,95
Jasa Perusahaan	-5,42	1,47	4,11	7,81	8,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	0,13	1,68	1,57	4,03
Jasa Pendidikan	-6,65	-1,80	3,34	2,82	6,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	-0,28	7,84	0,70	9,28
Jasa Lainnya	-5,08	3,58	5,04	4,80	5,86
PERTUMBUHAN PDRB	-2,34	2,57	2,26	5,23	4,76

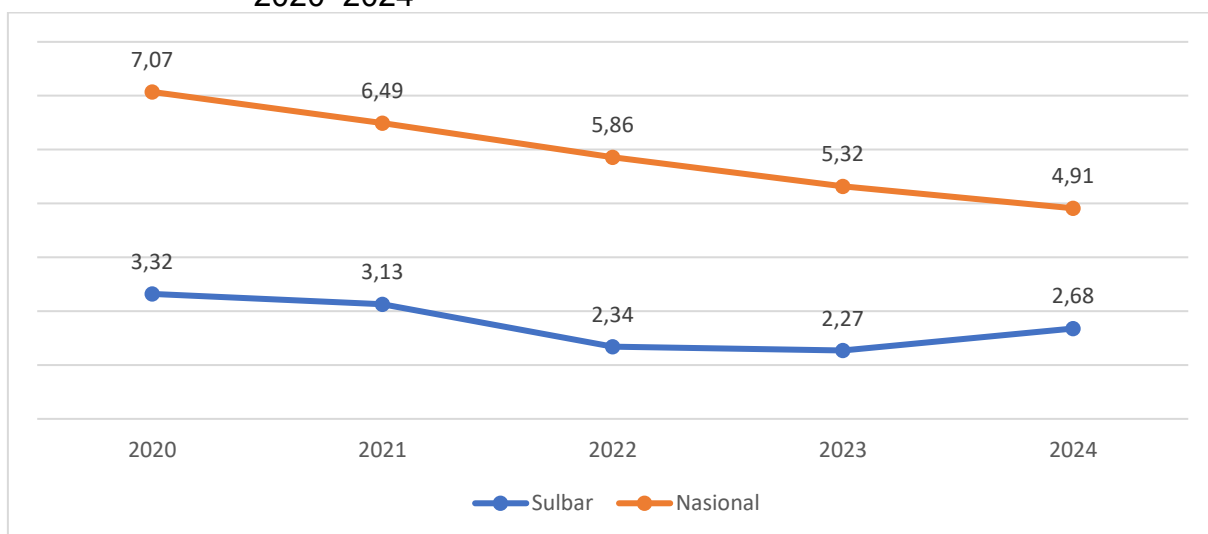
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 4,78 persen pada Tahun 2024, mengalami peningkatan dari Tahun 2023. Pada Tahun 2024 hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya disebabkan oleh berputarnya perekonomian. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,71 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,65 persen dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,28 persen.

2.2.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

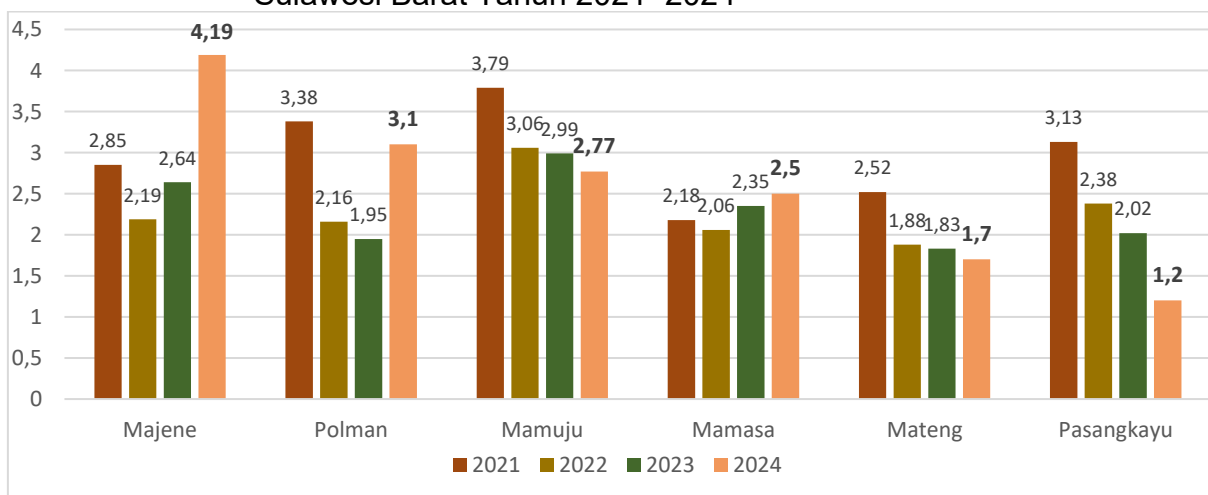
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada Tahun 2023 yakni sebesar 2,23 persen dan tertinggi berada pada Tahun 2020 sebesar 3,32 persen. meski kembali naik di Tahun 2024 sebesar 2,68 persen. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 4,91 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional.

Grafik 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	991.723	1.008.650	1.026.627	1.070.098	1.090.111
Bekerja	672.986	686.540	731.902	743.007	757.507
Pengangguran	23.132	22.210	17.545	17.273	20.876
Angkatan Kerja	692.118	708.750	749.447	760.280	778.383
Bukan Angkatan Kerja	295.605	299.900	277.180	309.818	311.728
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,34	3,13	2,34	2,27	2,68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,19	70,27	73,00	71,05	71,40

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021–2025

Rendahnya angka TPT di Sulawesi barat menunjukkan rendahnya angka pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,49 persen di Tahun 2023 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di pekerjaan informal yang diberi upah rendah.

2.2.2.2. Laju Inflasi

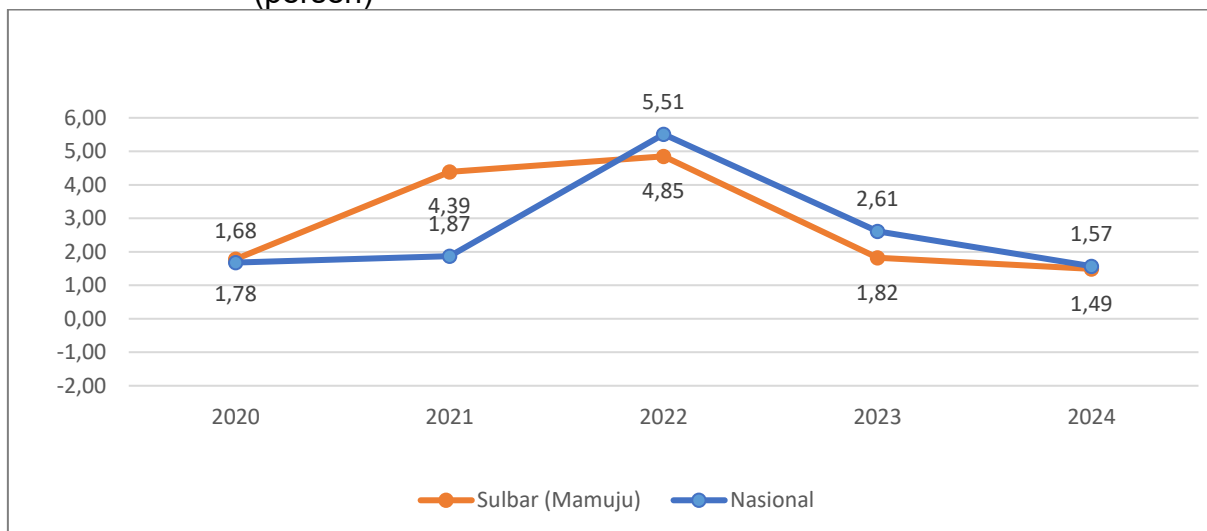
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, di mana Cenderung menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh: 1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen. 2) Inflasi Non-Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor fundamental di antaranya: 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik, Tarif Angkutan, dll).

Laju inflasi secara umum di Kota Mamuju pada Tahun 2024 adalah 1,49 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran dengan laju yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,08 persen dan disusul oleh, laju inflasi pada kelompok pendidikan mencapai 2,94 persen

Dari seluruh kelompok pengeluaran, kelompok kesehatan, transportasi, dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2024. Tercatat, pada tahun 2024 laju deflasi terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 1,20 persen.

Perkembangan inflasi Tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada Tahun 2019 inflasi Sulawesi Barat sebesar 1,43 persen berada di bawah rata-rata nasional sebesar 2,72 persen. Inflasi mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2022 yang sebesar 4,85 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51 persen. Selanjutnya pada Tahun 2023 inflasi Tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,82 persen berada di bawah angka nasional sebesar 2,61 persen.

Grafik 2.14 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

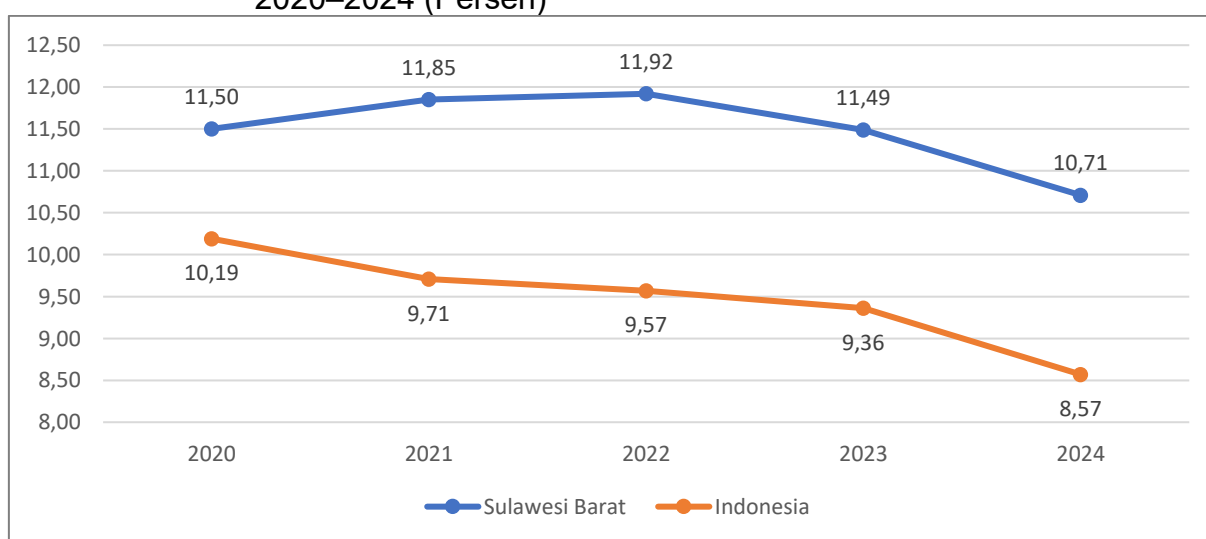
2.2.2.3. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di antara berbagai sektor. Kemajuan pembangunan suatu daerah sangat terkait dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi kunci utama. Namun, pertumbuhan tersebut perlu disertai dengan upaya pemerataan pendapatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan faktor-faktor seperti pendidikan rendah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang kurang memadai. Upaya pengentasan kemiskinan yang berhasil harus melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya dengan keterpaduan di antara mereka, dapat dihasilkan solusi yang efektif. Keseluruhan, penanganan kemiskinan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitasnya, bersama dengan komitmen untuk menciptakan perubahan positif melalui upaya bersama yang holistik.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun yaitu 11,50 persen pada (September) Tahun 2020 menjadi 11,92 persen pada Tahun 2022 (Maret) dan pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 10,71 persen atau menurun 0,78 persen poin. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen pada Tahun 2024. Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,79 poin persentase per Tahun sedangkan nasional sebesar 0,05 poin persentase per Tahun.

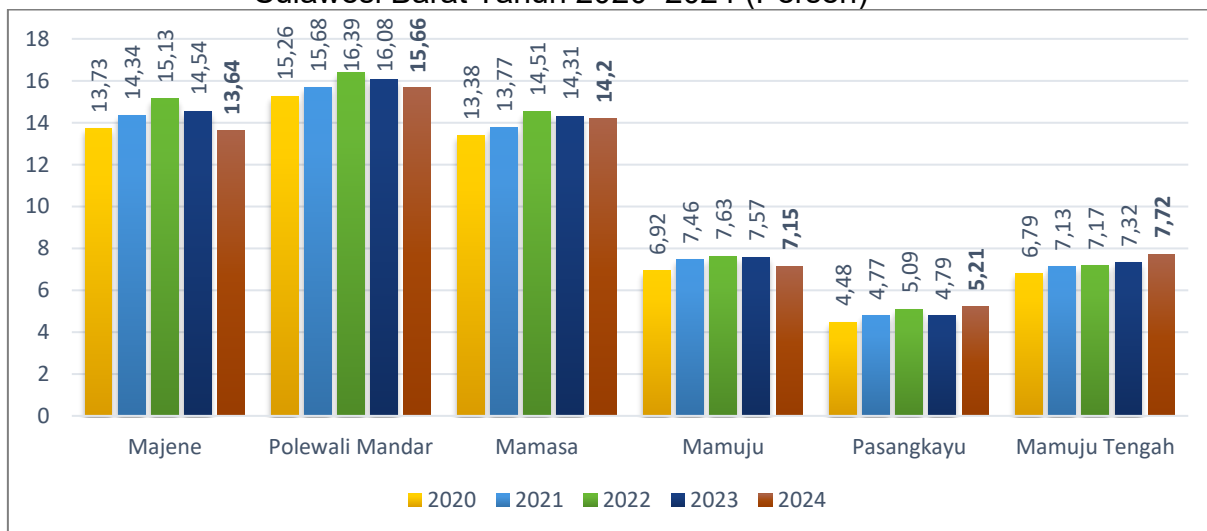
Grafik 2.15 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber: BPS, bps.go.id, diakses Tahun 2025

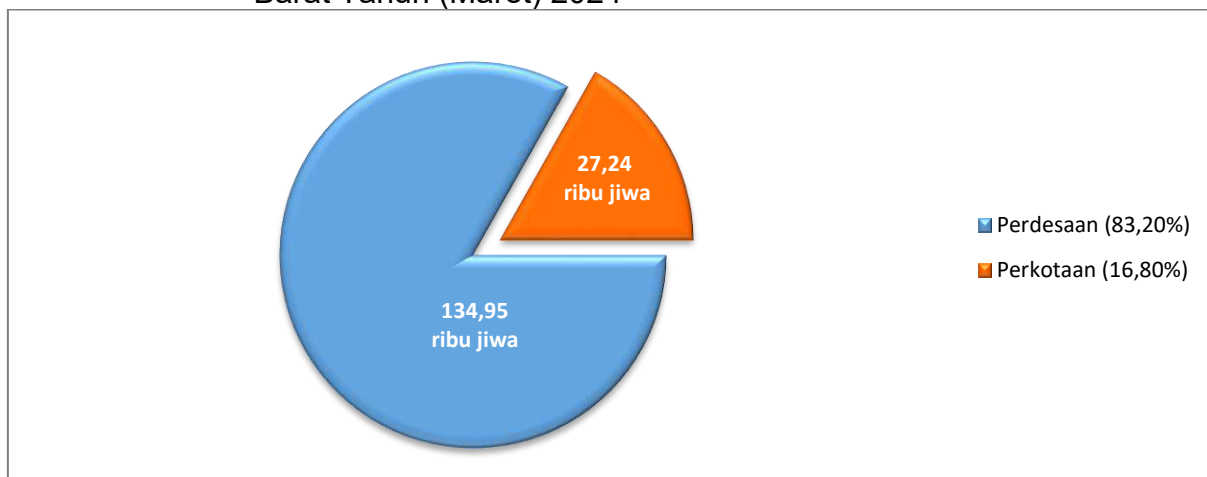
Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat sudah mengarah ke perbaikan tingkat kesejahteraan, data Tahun 2024 menunjukkan ada 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum optimal dan belum terintegrasi sehingga perlu membangun model pembangunan kemiskinan secara bottom up sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Sulawesi Barat dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar dilakukan secara nyata lintas sektor dan terintegrasi. Pembangunan Kemiskinan diharapkan fokus kepada wilayah perdesaan tanpa mengabaikan kemiskinan pada wilayah perkotaan karena 18 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat berada pada wilayah perkotaan.

Grafik 2.16 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Grafik 2.17 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (Maret) 2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat (Maret 2024) didominasi oleh penduduk miskin pedesaan sebesar 134,95 ribu jiwa atau sekitar 83,20 persen dan penduduk miskin perkotaan sebesar 27,24 ribu jiwa atau sekitar 16,80 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Pedesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Ribu)

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	Mar' 2024
Majene	24,12	25,01	26,62	25,80	24,41
Polewali Mandar	68,18	69,32	72,87	71,92	70,42
Mamasa	21,86	22,29	23,70	23,58	23,61
Mamuju	20,65	22,30	23,26	23,50	22,64
Pasangkayu	7,95	8,53	9,30	8,94	9,95
Mamuju Tengah	9,25	9,74	9,98	10,39	11,16
Sulawesi Barat	152,02	157,19	165,72	164,14	162,19

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (persen)

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	Mar' 2024
Majene	13,73	14,34	15,13	14,54	13,64
Polewali Mandar	15,26	15,68	16,39	16,08	15,66
Mamasa	13,38	13,77	14,51	14,31	14,2
Mamuju	6,92	7,46	7,63	7,57	7,15
Pasangkayu	4,48	4,77	5,09	4,79	5,21
Mamuju Tengah	6,79	7,13	7,17	7,32	7,72
Sulawesi Barat	10,87	11,29	11,75	11,49	11,21

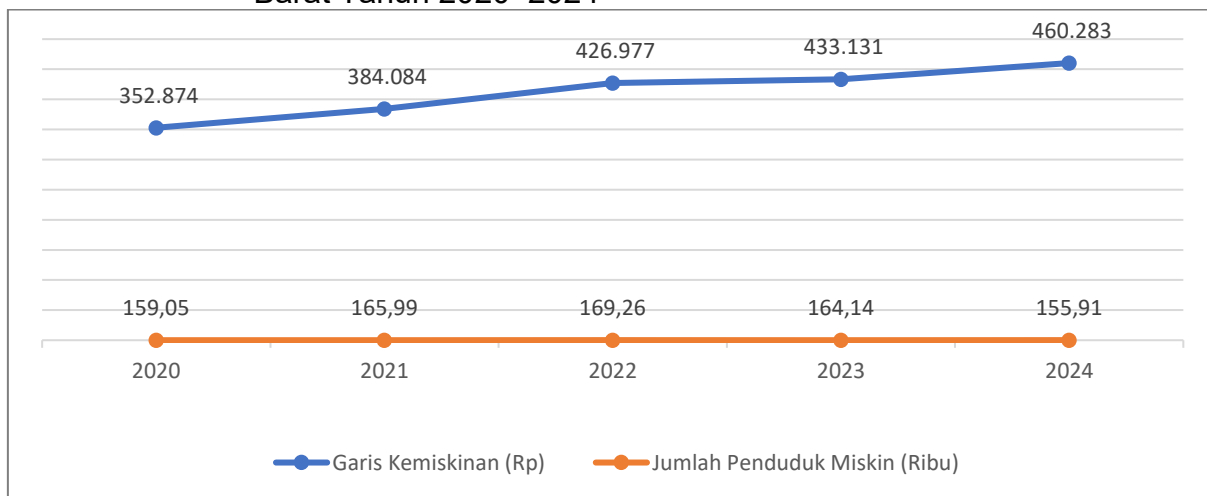
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tabel 2.21 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	384.344	399.350	433.111	461.255	482.173
Polewali Mandar	401.057	416.443	452.836	482.658	507.347
Mamasa	273.513	283.758	312.206	329.768	347.008
Mamuju	277.078	287.896	319.586	340.795	356.903
Pasangkayu	354.115	367.941	404.318	432.269	453.038
Mamuju Tengah	255.440	265.413	290.030	309.227	324.888
Sulawesi Barat	352.874	364.251	405.187	433.131	454.879

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

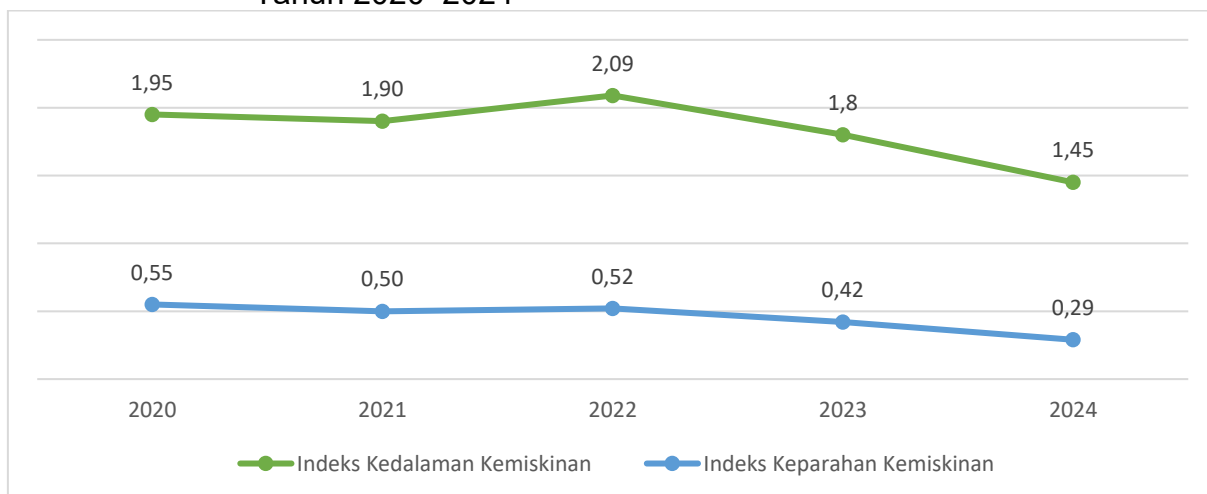
Grafik 2.18 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020 garis kemiskinan sebesar 352.874 rupiah per kapita per bulan, naik pada Tahun 2024 sebesar 460.283 rupiah per kapita per bulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari Tahun 2020 sebesar 159,05 ribu jiwa menjadi 155,91 ribu jiwa pada Tahun 2024. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum membaik selama masa endemi covid-19.

Grafik 2.19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

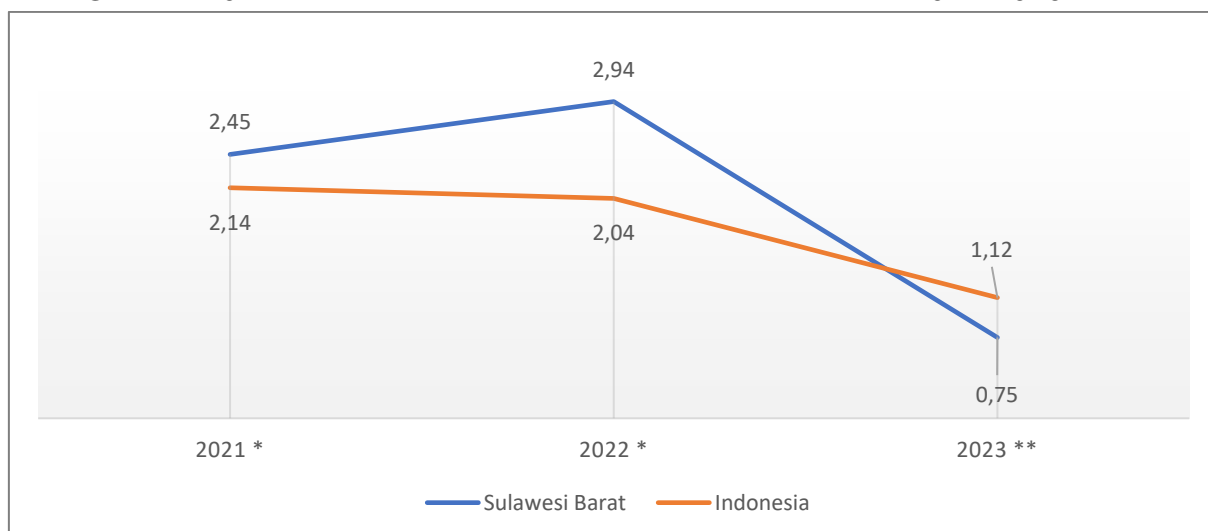


Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,45 atau naik 0,35 poin dibandingkan tahun 2023, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,29 naik 0,13 poin dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 2024 dengan turunnya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan, dan juga dengan turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin besar.

Persentase penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat pertama kali muncul di Tahun 2021 dengan Persentase 2,45 Persen yang masih berada di atas Persentase Nasional. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,94 Persen dengan jumlah Peningkatan 0,49 Persen, tetapi pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan persentase 0,75 Persen dengan jumlah penurunan 2,19 Persen lebih rendah dibandingkan dengan persentase Nasional.

Grafik 2.20 Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

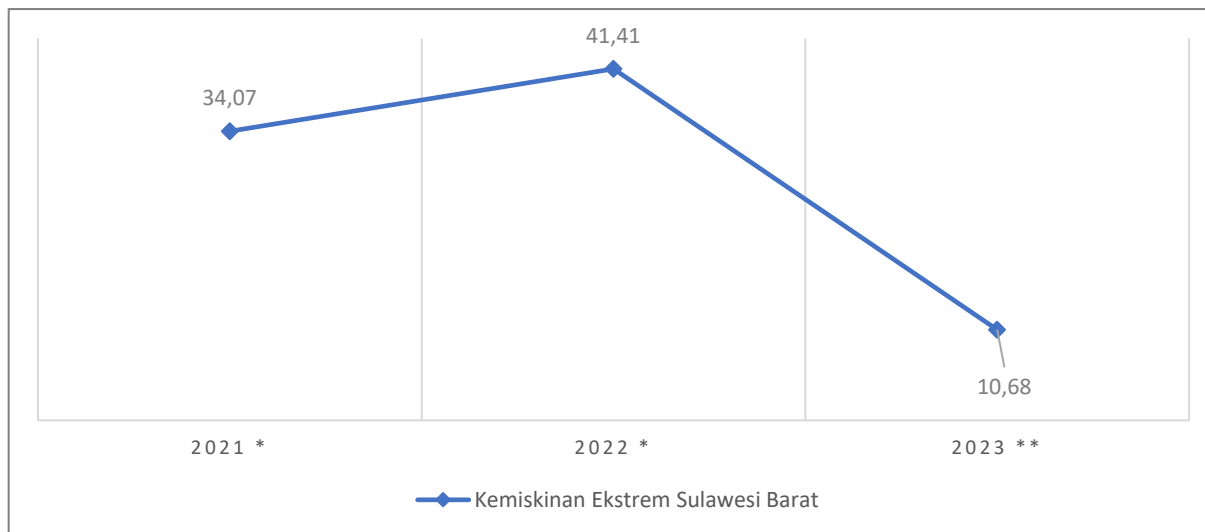


Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik

** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

Jumlah penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2021 dengan Jumlah 34,07 Ribu Jiwa, yang mengalami Peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 41,41 Ribu Jiwa. Namun Pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan Jumlah 10,68 Ribu Jiwa.

Grafik 2.21 Jumlah Penduduk Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)



Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik

** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

Kinerja penurunan kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat sudah sangat baik, berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan hanya ada 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin Ekstrem lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2.22 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Persen)



Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik

** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

Grafik 2.23 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Ribu Jiwa)

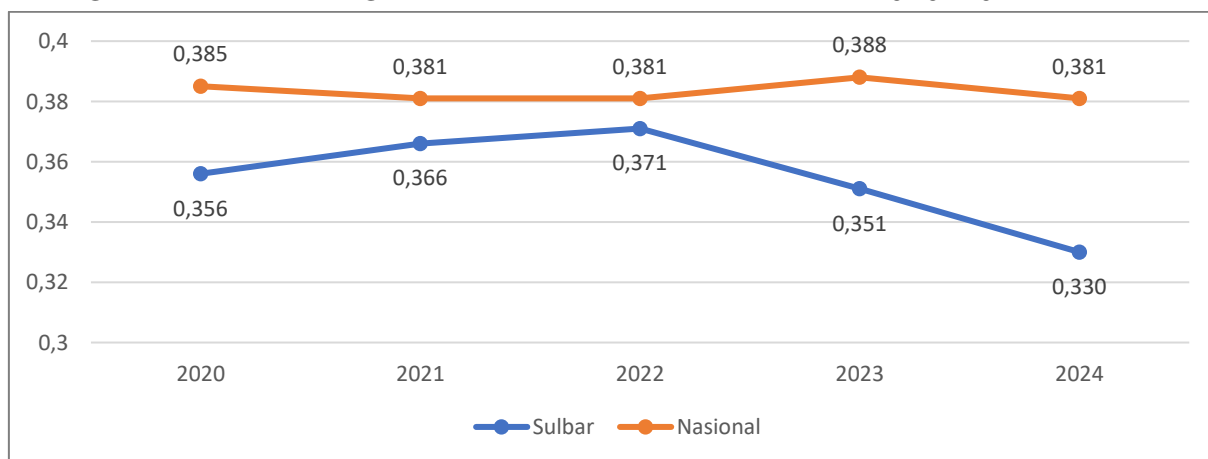


Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik
** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

2.2.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,330 angka ini naik sebesar 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2023 yang sebesar 0,351, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi peningkatan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

Grafik 2.24 Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

2.2.2.5. Prevalensi Stunting

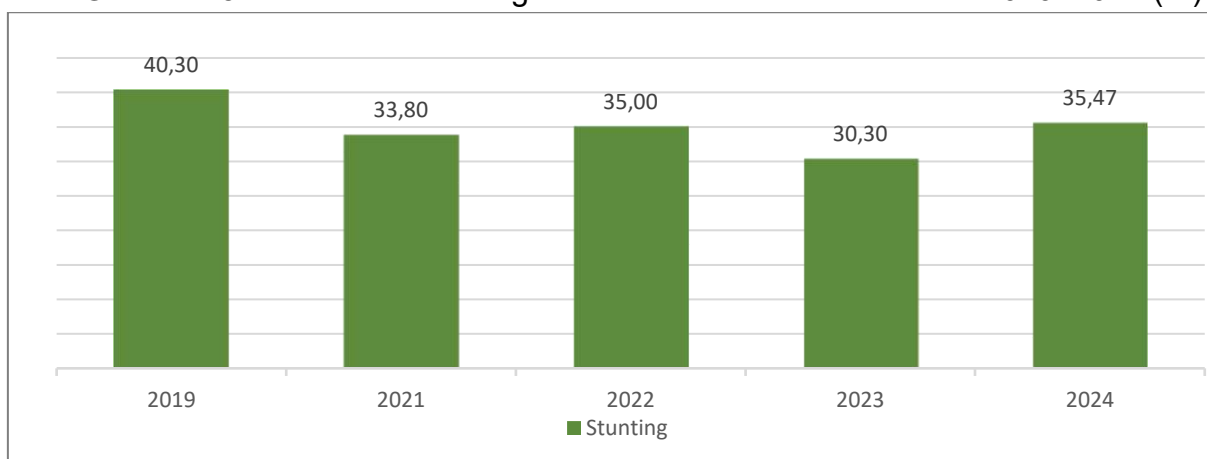
Penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional dan masih tetap menjadi prioritas dalam jangka panjang. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 30,8 persen pada

Tahun 2008 menjadi 19,00 persen pada Tahun 2024. Namun demikian, dalam Musrenbang RKP 2021 pada Bulan April 2020, Presiden menargetkan penurunan stunting ke angka 14 persen pada Tahun 2024. Stunting juga masuk dalam prioritas pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Dalam upaya penanganan stunting, Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang menjadi prioritas Nasional karena angka prevalensi stunting-nya termasuk salah satu yang paling tinggi secara Nasional. Berdasarkan hasil SSGI, Tahun 2019, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat sempat mencapai angka 40,30 persen, menunjukkan bahwa dari 100 orang balita di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 40 orang yang mengalami stunting. Angka itu mengalami penurunan Tahun 2021 menjadi 33,80 persen. Penurunan tersebut tak berlanjut di Tahun 2022, karena alih-alih turun, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat justru mengalami kenaikan menjadi 35 persen sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 30% persen

Salah satu penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah tingginya pernikahan dini. Menurut pemerintah dan pemerintah daerah, angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun masih tinggi. Data terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkawinan anak usia 15 hingga 19 Tahun mencapai 1.347 kasus, pada periode Januari hingga Mei 2023. Angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat kini mencapai 17,71 persen, jauh di atas rata-rata Nasional sebesar 9 persen. Dengan demikian, hampir seperlima anak perempuan usia 15 hingga 19 Tahun menikah sebelum usia dewasa, 19 Tahun ke atas.

Grafik 2.25 Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024 (%)

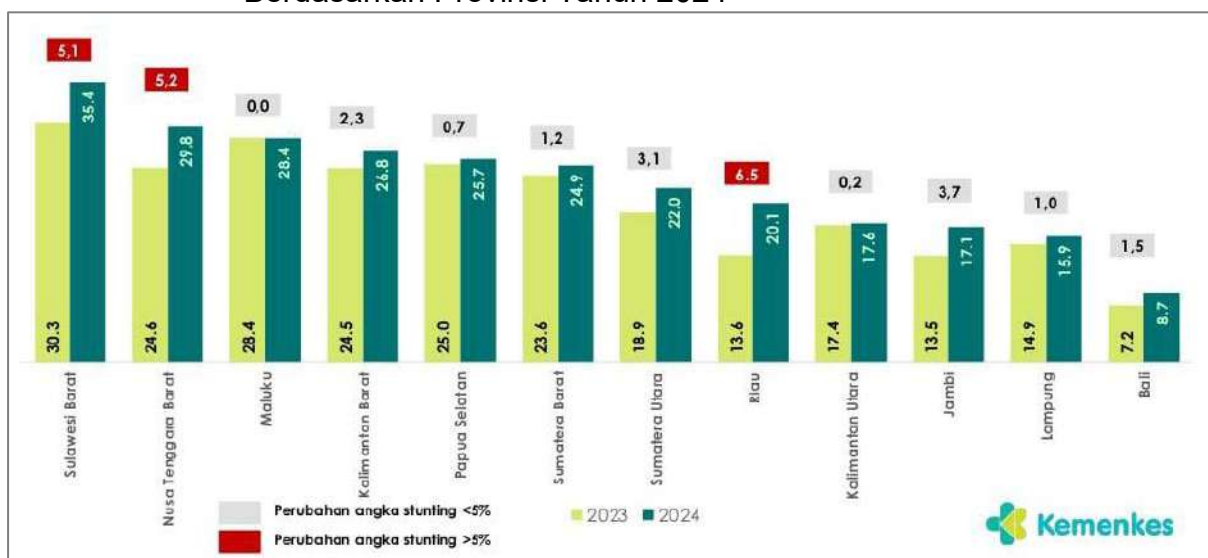


Sumber: Hasil SSGI

Angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat jauh di atas angka Nasional yaitu 21,5 persen. Berdasarkan data SSGI Kementerian Kesehatan ditahun 2024 prevalensi stunting di Sulawesi Barat naik menjadi 35,4 persen dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 30,30 persen, kenaikan tersebut yang tertinggi selama 5

tahun terakhir dan menempatkan Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 3 dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

Grafik 2.26 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber: Hasil SSGI

Pemerintah dalam Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) menyebutkan dua intervensi penting untuk penanganan stunting yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Umumnya, intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan. Dalam intervensi ini, ada tiga kelompok intervensi yaitu Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas; Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan, yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi; dan Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi, termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat).

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Ketahanan pangan (Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan); (b) Peningkatan akses pangan bergizi; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan (d) Peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan. Selain dua intervensi tersebut, bersinergi dalam penanganan stunting juga tak kalah penting. Selama ini penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif mulai dari pusat, daerah hingga tingkat desa belum konvergen, baik dari proses perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Hal itu disebabkan salah satunya karena lemahnya sinergi antar stakeholders.

2.2.3. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.3.1. Indeks Keluarga Sehat

Menurut World Health Organization (WHO), keluarga sehat merupakan keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Untuk mengukur capaian keluarga sehat, Kementerian Kesehatan menyusun Indeks Keluarga Sehat (IKS). Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 indikator keluarga sehat mencakup: 1). keluarga mengikuti program KB, 2). ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3). bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, 4). bayi mendapat ASI eksklusif, 5). balita mendapat pemantauan pertumbuhan, 6). penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, 7). penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, 8). penderita gangguan jiwa tidak terlanter dan mendapat pengobatan, 9). anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10). keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional, 11). keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, 12). keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Namun, data Indeks Keluarga Sehat belum tersedia di level kabupaten/kota.

Pada Tahun 2023, Indeks keluarga sehat Provinsi Sulawesi Barat adalah 0,190 artinya hanya 19 persen keluarga sehat di Sulawesi Barat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat atau masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Secara keseluruhan baik pada level Provinsi maupun Kabupaten masih berada pada kategori keluarga tidak sehat.

Tabel 2.22 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)

NO	INDIKATOR	MAMUJU UTARA	MAMUJU	MAMASA	POLEWALI MANDAR	MAJENE	MAMUJU TENGAH	CAKUPAN PROVINSI SULAWESI BARAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Keluarga mengikuti program KB *)	37,98	47,14	74,65	28,50	37,89	51,97	43,29
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	90,32	74,64	94,01	79,95	87,16	90,43	83,80
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	89,26	83,74	97,37	89,11	89,78	91,42	89,59
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	81,65	76,69	88,42	86,76	88,34	83,27	84,22
5	Pertumbuhan Balita dipantau	88,63	72,91	93,64	87,66	88,89	83,05	85,37
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	35,73	39,95	44,03	46,33	49,49	38,59	43,46
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	21,62	29,43	33,78	23,06	33,11	31,60	27,60

NO	INDIKATOR	MAMUJU UTARA	MAMUJU	MAMASA	POLEWALI MANDAR	MAJENE	MAMUJU TENGAH	CAKUPAN PROVINSI SULAWESI BARAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	03,68	12,89	04,22	21,92	20,60	08,47	08,43
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	39,82	41,25	51,48	50,28	50,18	43,41	47,01
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	55,98	48,64	61,13	55,77	61,87	46,37	55,17
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	80,04	87,75	93,76	90,94	95,54	81,60	89,24
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	82,17	74,84	81,01	85,59	86,63	83,17	82,56
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,147	0,142	0,263	0,184	0,239	0,169	0,190
Σ Keluarga dengan IKS > 0,800		4436	6724	10355	16866	8476	4586	51443
Σ Keluarga		30205	47210	39299	91685	35420	27202	271021

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2024

2.2.3.2. Indeks Kualitas Keluarga

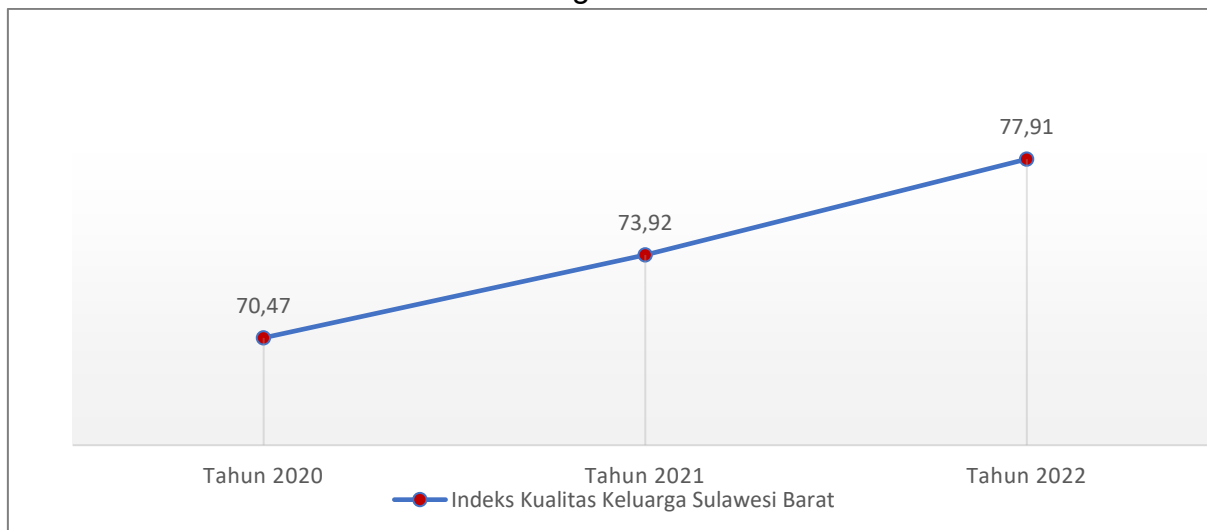
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesejahteraan keluarga. Hasil dari IKK digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan keluarga di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan memahami dan memperbaiki indikator-indikator ini, kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Indeks Kualitas Keluarga dibentuk untuk mengukur capaian kualitas keluarga. Terdapat lima dimensi dan 25 indikator yang membentuk IKK, yaitu:

1. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), terdiri dari dua indikator, yaitu memiliki akta kelahiran dan keluarga tinggal Bersama
2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri dari enam indikator, yaitu makan makanan sehat dan bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu
3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas enam indikator, yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja

4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas lima indikator, yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator double untuk ayah dan ibu)
5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB) terdiri atas enam indikator, yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, pada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan mengakses internet bersama anak dan orang tua

Pada periode Tahun 2020 hingga 2022, terjadi tren positif dalam Indeks Kualitas Keluarga Sulawesi Barat. Dimulai dari nilai Tahun 2020 sebesar 70,47, terjadi peningkatan hingga mencapai 73,92 pada Tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga Tahun 2022, di mana indeks mencapai nilai sebesar 77,91. Hal ini menunjukkan pertumbuhan dan perbaikan yang konsisten dalam kualitas keluarga di Sulawesi Barat.

Grafik 2.27 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Publikasi Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023

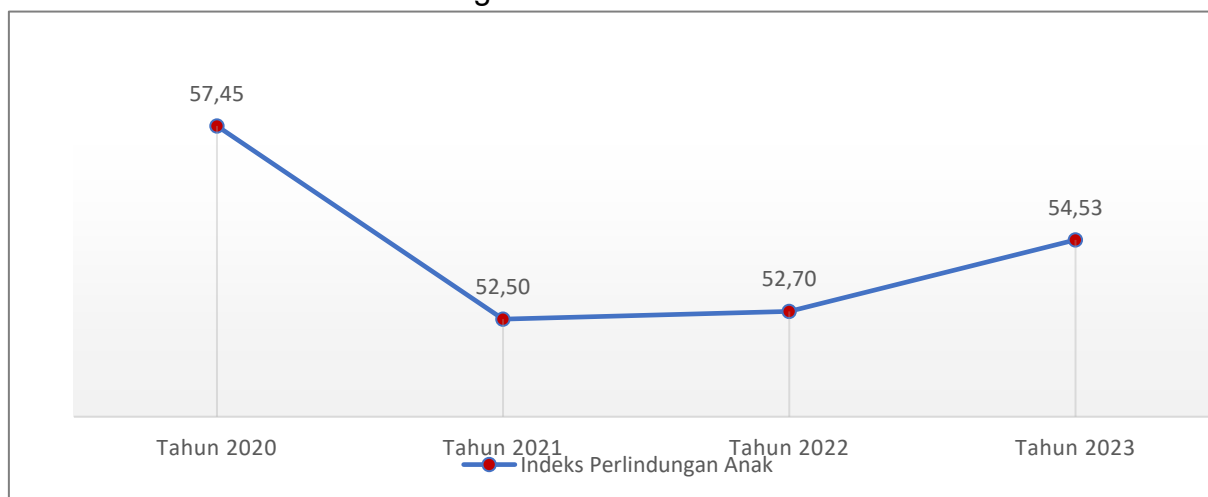
2.2.3.3. Indeks Perlindungan Anak

Anak merupakan aset bangsa, tetapi terkadang posisinya lemah sehingga mesti mendapatkan perlindungan dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Pasalnya, seringkali anak menjadi korban, baik dari keluarga sendiri maupun dari pihak lain di luar keluarganya. Untuk mengukur capaian perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terdapat lima kluster indikator yang membentuk IPA, yaitu 1). hak sipil dan kebebasan, 2). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3). kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4). pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5). perlindungan sosial. Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

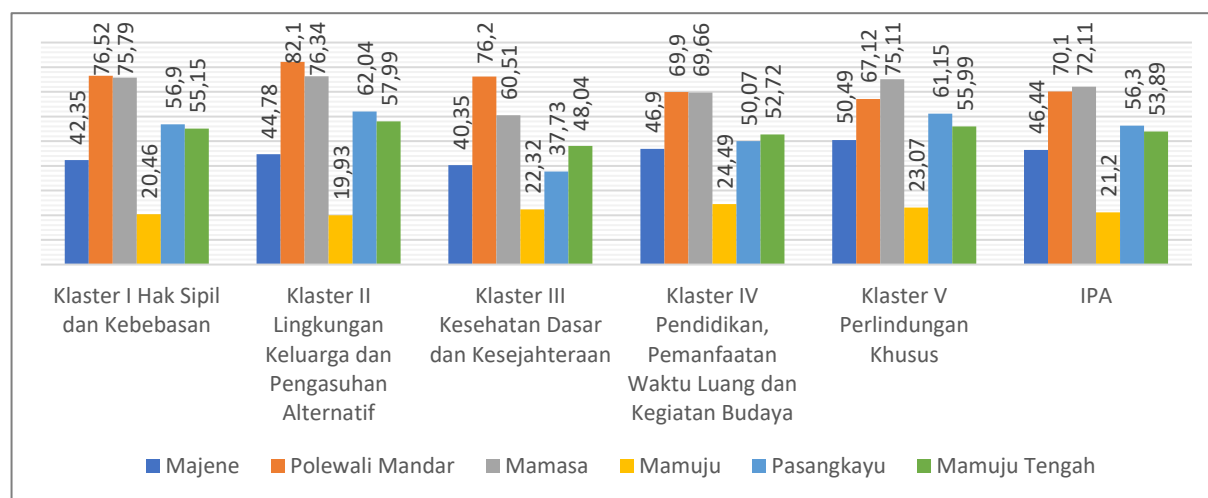
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa sebanyak 13 provinsi pada Tahun 2021 memiliki capaian IPA diatas nasional, sementara Tahun 2022, terdapat 15 provinsi yang memiliki capaian IPA di atas capaian nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2021, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, hanya berbeda pada urutan. Provinsi D.I. Yogyakarta berada pada urutan teratas dengan capaian 71,08, kemudian DKI Jakarta (69,12), dan Jawa Timur (66,10). Sementara itu, provinsi dengan capaian IPA terendah selama Tahun 2021-2022 masih didominasi oleh ditempati oleh wilayah Indonesia bagian Timur, dengan tiga terendah pada Tahun 2022, yaitu Papua (43,43), Nusa Tenggara Timur (50,87), dan Sulawesi Barat (52,70).

Grafik 2.28 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023



Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025

Grafik 2.29 Hasil capaian IPA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2023

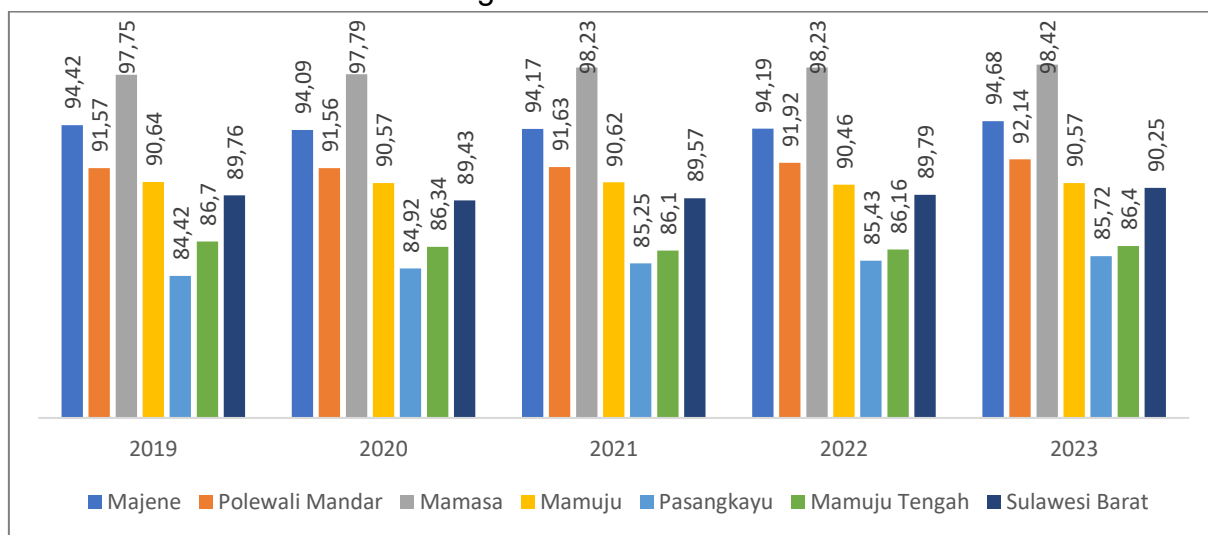


Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/ Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu ukuran Tingkat keberhasilan capaian Pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Isu terkait gender menjadi perhatian Masyarakat terutama yang berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh Perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan Perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data dari BPS, angka IPG Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sebesar 90,25. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pembangunan Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat masih berada dibawah laki-laki meskipun demikian perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir mengalami tren yang meningkat.

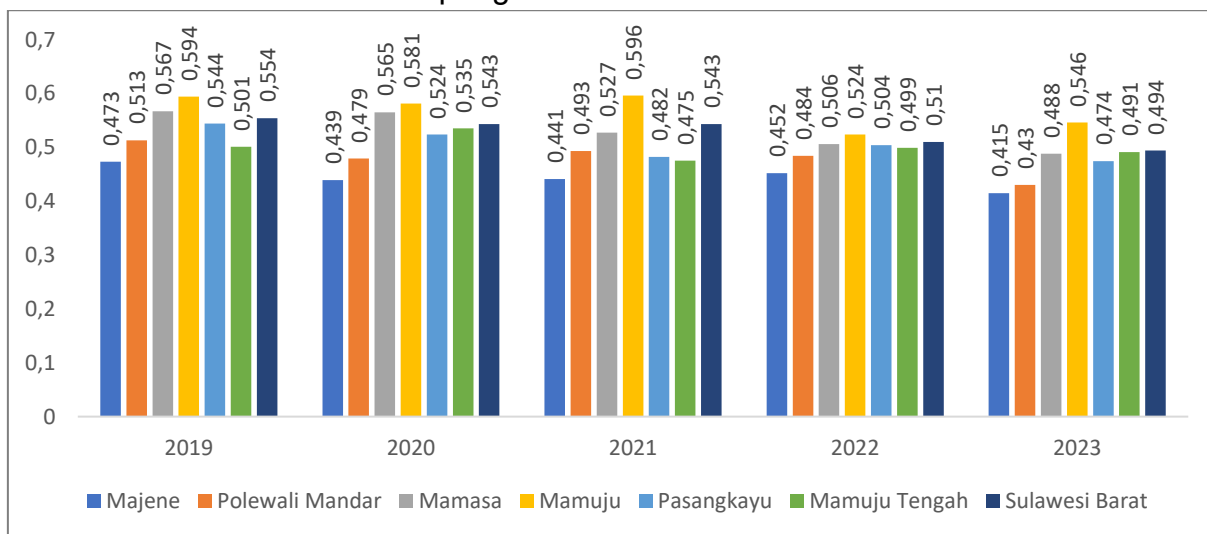
Grafik 2.30 Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Menurut data yang bersumber BPS indeks ketimpangan gender (IKG) di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dengan IKG Tahun 2023 sebesar 0,494 yang menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender.

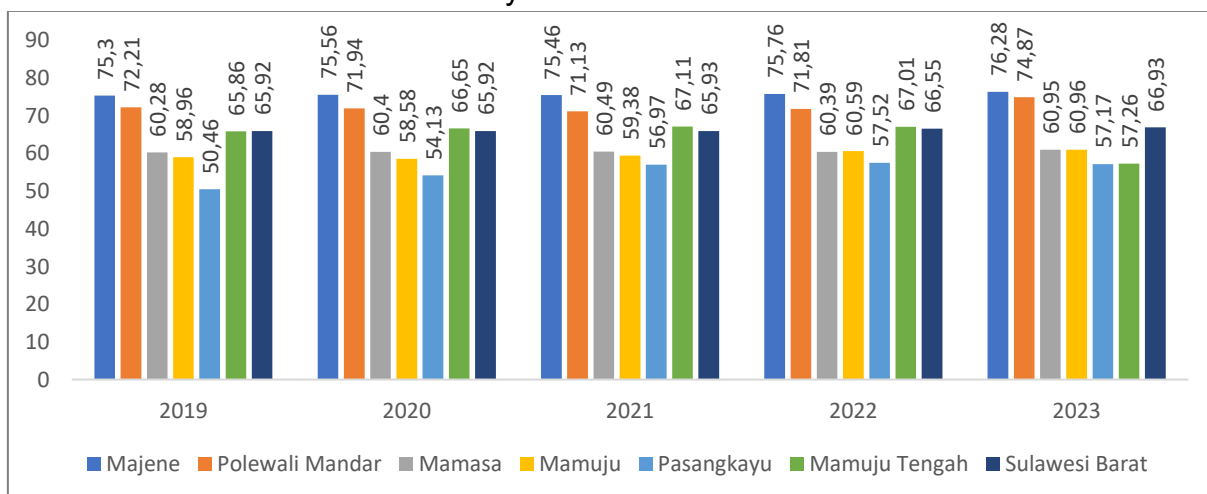
Grafik 2.31 Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun (2019–2023) mengalami Peningkatan dan ini menunjukkan bahwa Perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan Ekonomi dan Politik, dan indikator inilah yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

Grafik 2.32 Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

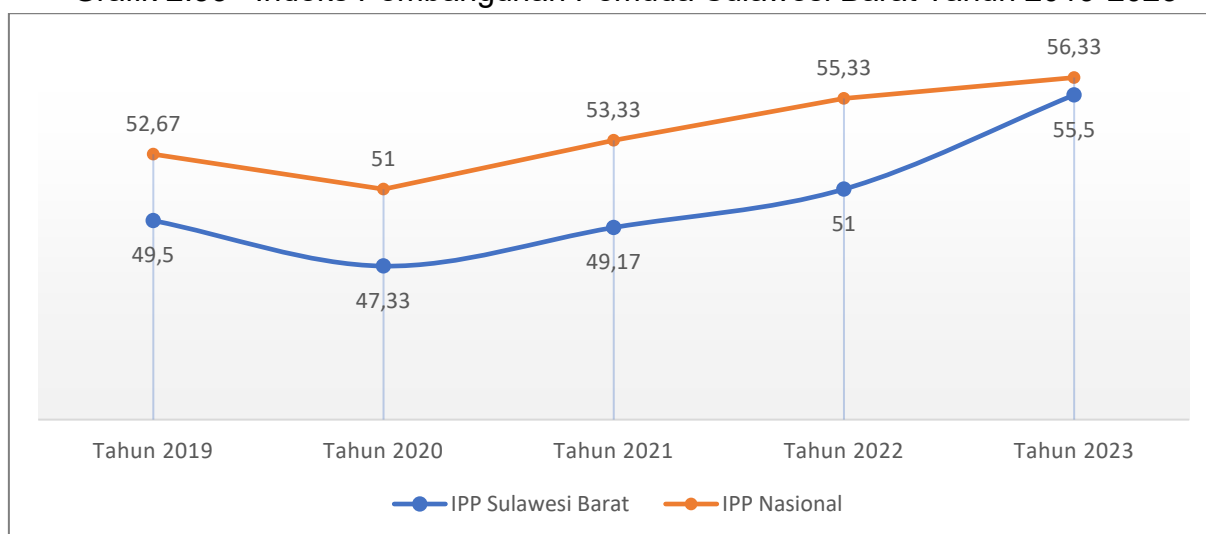
2.2.3.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik

yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan. Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 aspek, yaitu: 1). pembangunan individu, 2). pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan (3) partisipasi dan diskriminasi

Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2023, IPP Sulawesi Barat masih mengalami Fluktuasi. Pada Tahun 2019 IPP Sulawesi Barat sebesar 49,5 mengalami penurunan menjadi 47,33 pada Tahun 2020 dan merupakan angka terendah dalam 5 Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, IPP Sulawesi Barat kembali mengalami Kenaikan menjadi 55,5 Poin pada Tahun 2023. Meskipun mengalami kenaikan, angka IPP Sulawesi Barat masih berada dibawah Nasional yang sebesar 56,33 Poin.

Grafik 2.33 Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber: <https://ipp.sarikata.com/>, Diakses Tahun 2025

2.2.3.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dirancang berdasarkan kerangka kerja Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah.

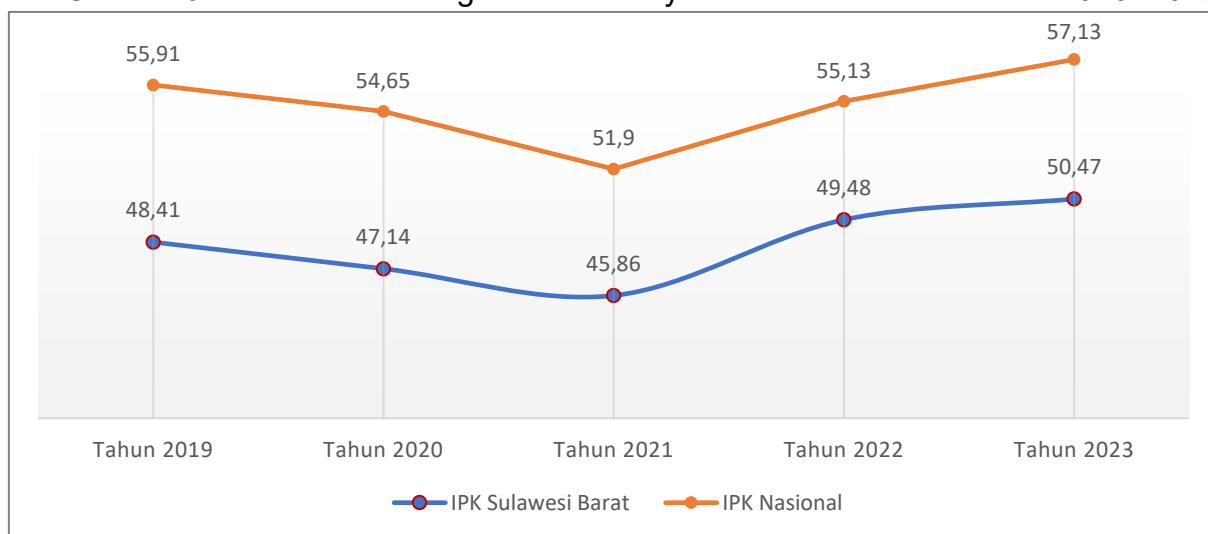
Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek bahwa Skor IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari 46,90 Poin di 2018 menjadi 48,41 Poin di 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan hampir seluruh dimensi, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan dari 59,19 Poin ke 57,46 Poin. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memiliki skor tertinggi. Sebaliknya, Dimensi Ekonomi Budaya menjadi yang terendah.

Pada periode Pandemi Covid-19, Nilai IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dua Tahun berturut-turut hingga titik terendahnya di Tahun 2021, dengan nilai IPK menjadi 45,86 Poin. Selama periode Covid, beberapa dimensi masih mampu untuk tumbuh di 2020. Bahkan, peningkatan skor Dimensi Budaya Literasi mampu tumbuh lebih dari 3 poin. Lain halnya Dimensi Pendidikan yang sejak awal pandemi mengalami penurunan dari 66,72 Poin menjadi 61,63 Poin. Di Tahun 2021, mayoritas dimensi mengalami kontraksi. Dimensi Ekspresi Budaya turun lebih dari 12 poin. Dimensi Warisan Budaya menjadi salah satu komponen IPK yang tetap tumbuh bersama dengan Dimensi Ekonomi Budaya.

Skor IPK Sulawesi Barat pada 2023 mengalami peningkatan menjadi 50,47 Poin dan menjadi skor tertinggi pada periode Tahun 2019–2023. Seluruh dimensi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan adalah Dimensi Ekspresi Budaya yang naik lebih dari 10 poin dari tahun 2022 ke 2023. Sejak Tahun pertama IPK dirilis, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memimpin skor tertinggi. Hal tersebut konsisten hingga Tahun kelima perhitungan IPK. Secara keseluruhan IPK Sulawesi Barat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 selalu berada dibawah Nasional.

Grafik 2.34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, diakses Tahun 2025

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat menurut Dimensi Tahun 2019–2023

Kode	Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023
D1	Ekonomi Budaya	4,83	1,81	7,03	21,41	10,12
D2	Pendidikan	66,72	61,63	61,22	62,13	64,56
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78,28	79,4	71,52	73,00	74,54
D4	Warisan Budaya	31,49	29,87	35,84	37,75	29,54
D5	Ekspresi Budaya	34,13	34,14	21,88	30,29	40,57
D6	Budaya Literasi	47,71	51,07	47,61	50,90	32,01
D7	Gender	57,46	55,25	53,97	55,11	54,68
IPK Provinsi		46,90	46,9	48,41	47,14	50,47

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, diakses Tahun 2025

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

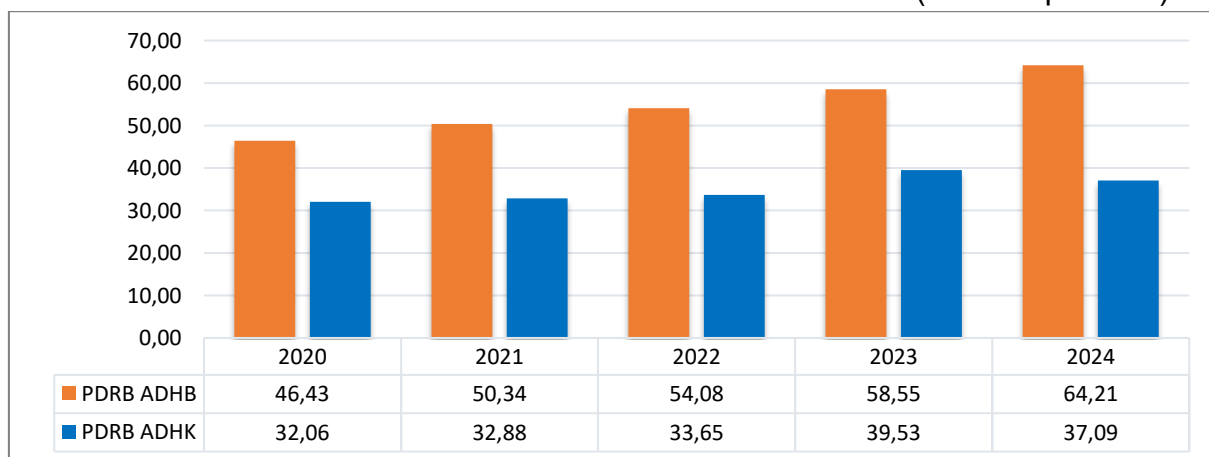
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi gambaran makro mengenai kemajuan suatu wilayah adalah dengan memperhatikan perubahan PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Seiring dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Tahun ke Tahun. Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat 2024 yang diukur dengan PDRB ADHB mencapai Rp 64,21 Triliun dan PDRB ADHK mencapai Rp 37,09 Triliun.

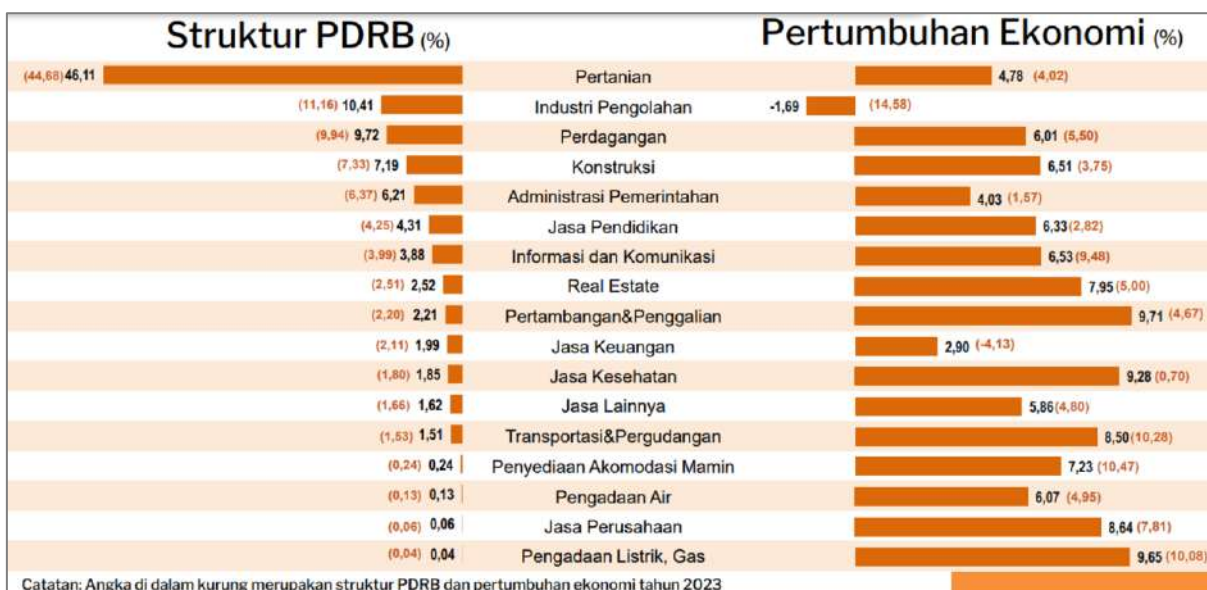
Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan perkembangan aktivitas perekonomian di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Akan tetapi tingginya capaian pertumbuhan ekonomi hendaknya dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama 5 Tahun terakhir menunjukkan perkembangan aktivitas perekonomian yang semakin baik.

Grafik 2.35 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (dalam Rp Triliun)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

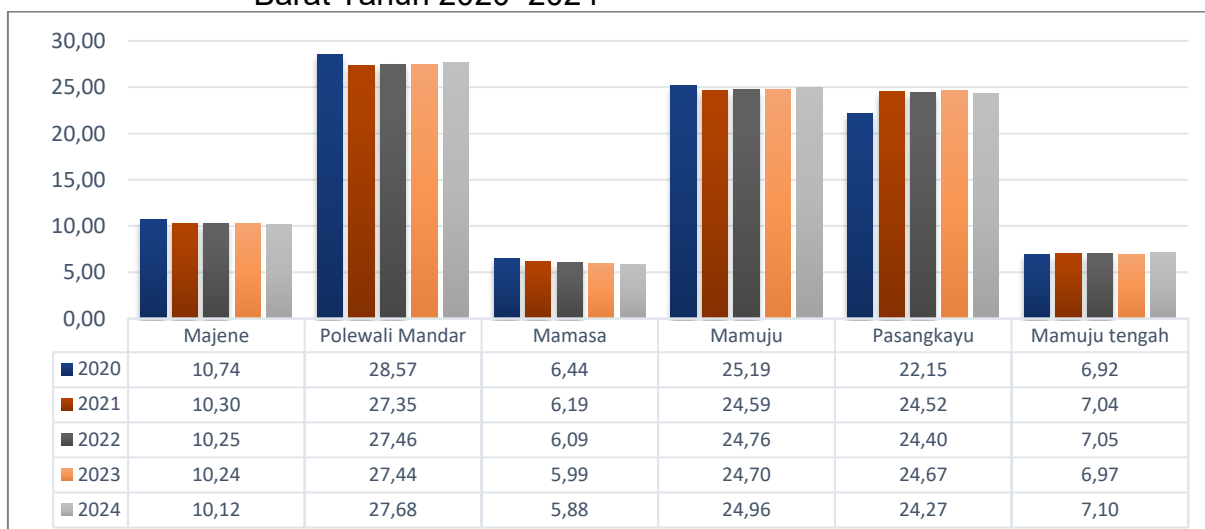
Grafik 2.36 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Di Tahun 2024, struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,11 persen, industri pengolahan sebesar 10,41 persen, dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,72 persen. Sedangkan pertumbuhan terbesar ada pada Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 9,71 persen, disusul oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,65 Persen.

Grafik 2.37 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

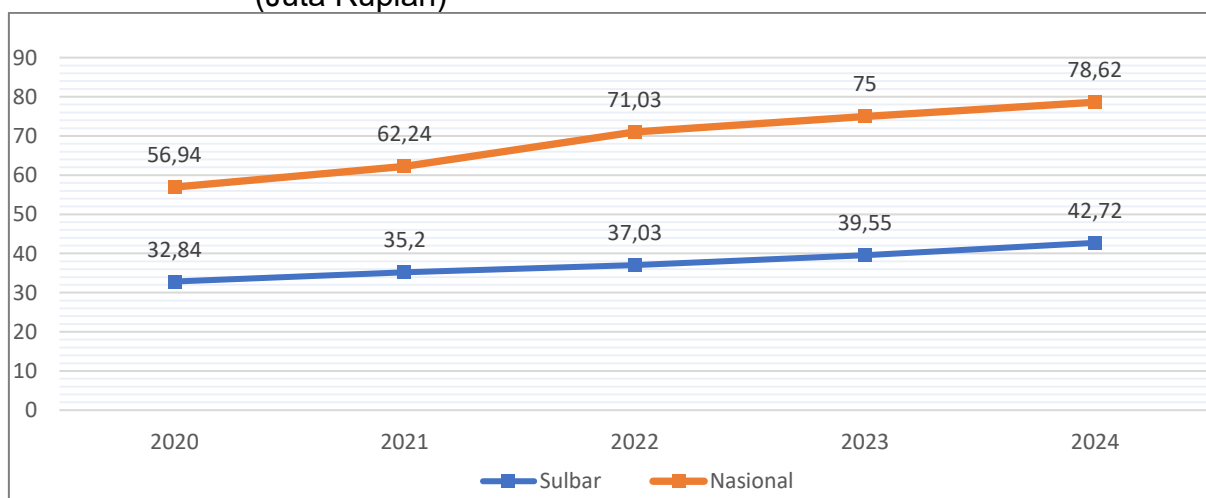
Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Kabupaten Polewali Mandar,

Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju merupakan tiga kabupaten yang paling besar menopang perekonomian Sulawesi Barat. Peranan ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian Sulawesi Barat pada Tahun 2023 masing-masing sebesar 27,46 persen; 24,69 persen dan 24,67 persen. Setiap kabupaten memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Menguat atau melemahnya perekonomian Sulawesi Barat di suatu Tahun tidak serta merta selalu diikuti oleh menguat atau melemahnya perekonomian di semua kabupatennya. Di Tahun tersebut akan ada kemungkinan beberapa kabupaten mengikuti arah yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, namun bisa juga tidak demikian.

2.3.1.2. Pendapatan Per Kapita

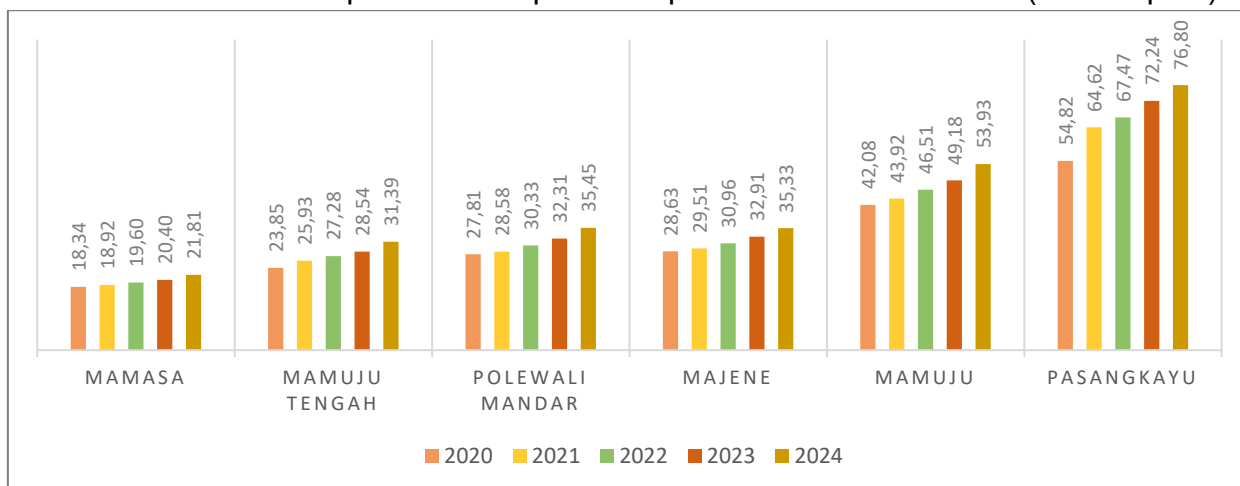
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Grafik 2.38 Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021–2025

Grafik 2.39 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)



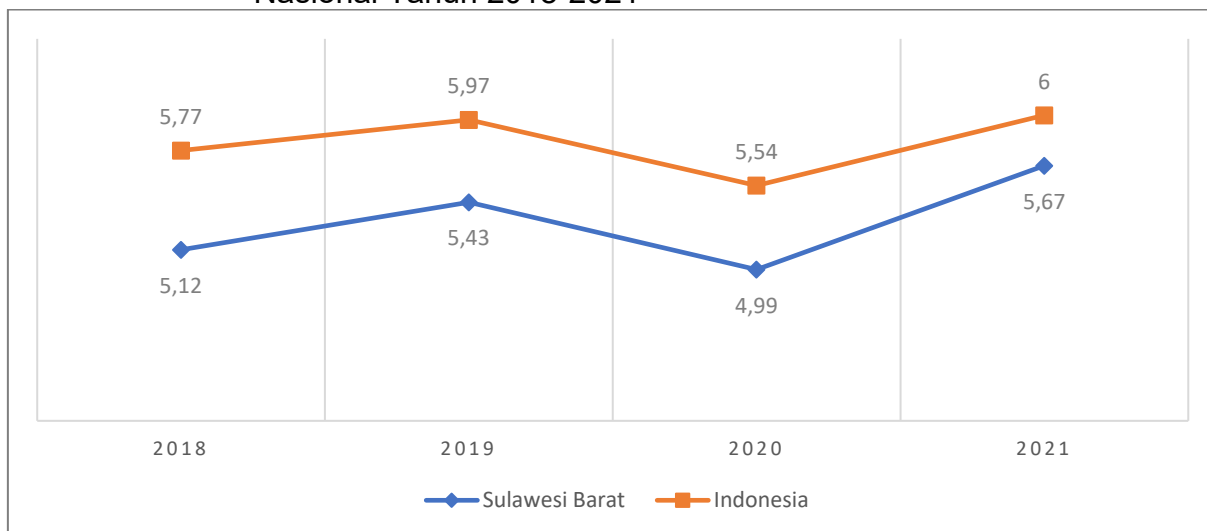
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2020 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 32,84 juta meningkat sebesar 42,72 juta pada Tahun 2024 masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 78,62 juta. Untuk wilayah kabupaten pada Tahun 2024, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten di mana Pasangkayu sebesar 76,80 juta dan Mamasa hanya sebesar 21,81 juta rupiah. Tingginya pendapatan per kapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.1.3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks ini mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari tiga pilar dan delapan sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Grafik 2.40 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018-2021



Sumber: Bappenas

Jika merujuk pada data yang tersedia, pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat cenderung semakin inklusif. Setidaknya ini bisa diamati dari Indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat yang terus meningkat. Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021, indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat baru mencatat angka 5,12 pada Tahun 2018 kemudian bergerak naik menjadi 5,67 pada Tahun 2021. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah angka Nasional yang telah mencatat angka 6,00 pada Tahun 2021.

2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada Tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Pada Tahun 2019, Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat berada di angka 1,79 Persen. Pada Tahun berikutnya, 2020, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 2,10 Persen, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode lima Tahun ini. Namun, pada Tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di 1,18 Persen. Pada Tahun 2022, indeks sedikit menurun menjadi 1,11 Persen, sebelum akhirnya naik kembali ke 1,76 Persen pada Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan fluktuasi dalam aktivitas kewirausahaan selama lima Tahun terakhir, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan.

Grafik 2.41 Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



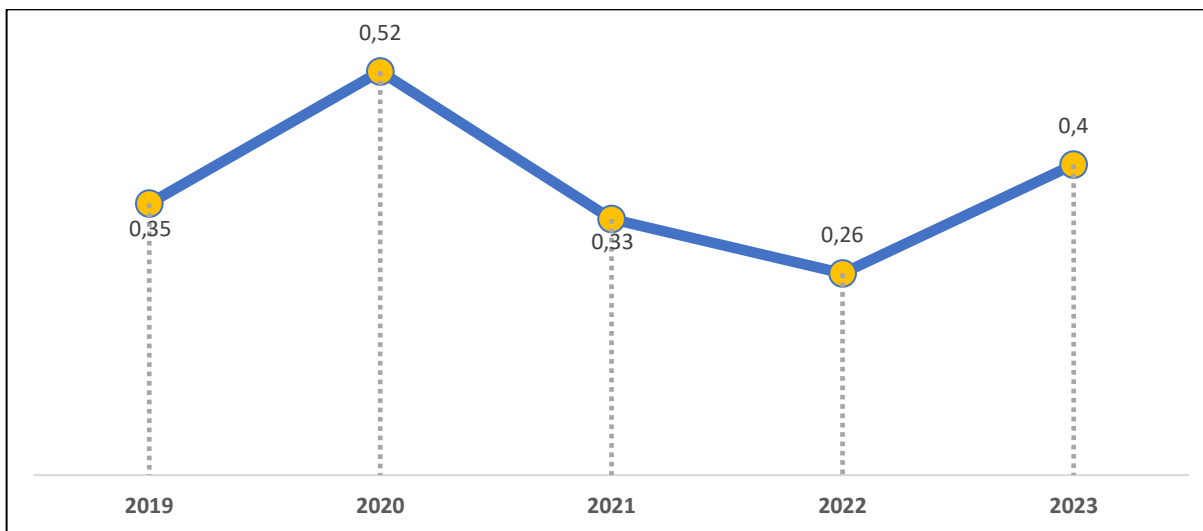
Sumber: *sulbar.bps.go.id*, diakses Tahun 2024, diolah

2.3.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indeks Williamson sering digunakan dalam studi ekonomi regional untuk memahami seberapa besar kesenjangan pembangunan antara wilayah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah. Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Indeks ini memiliki arti jika nilai indeks $< 0,39$ termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilai indeks sebesar $0,4 - 0,69$ masuk dalam kategori ketimpangan sedang, dan jika nilai Indeks Williamson mendekati 0 artinya ketimpangan kecil atau lebih merata.

Berdasarkan hasil perhitungan angka indeks Williamson, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019 sampai 2023 masih berfluktuasi dan termasuk dalam kategori Ketimpangan rendah dan ketimpangan sedang. Pada Tahun 2019, nilai indeks Williamson Sulawesi Barat sebesar 0,35 atau dalam keadaan ketimpangan yang rendah. Pada Tahun 2020 naik menjadi ketimpangan sedang dengan angka 0,52 disebabkan karena pendapatan per kapita di setiap kabupaten berbeda beda-khususnya di kabupaten pasangkayu dan mamuju lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, dan kemampuan wilayah kabupaten di provinsi Sulawesi Barat memiliki kemampuan yang berbeda beda pada sektor PDRB. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, nilai indeks Williamson sebesar 0,33 Poin dan 0,26 Poin atau masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, namun pada Tahun 2023, Indeks Williamson kembali naik ke angka 0,4 atau kembali masuk pada kategori ketimpangan sedang yang menandakan tantangan baru atau perubahan yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Sulawesi Barat.

Grafik 2.42 Indeks Williamson Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: *sulbar.bps.go.id*, diakses Tahun 2024, diolah

2.3.2. Daya Saing SDM

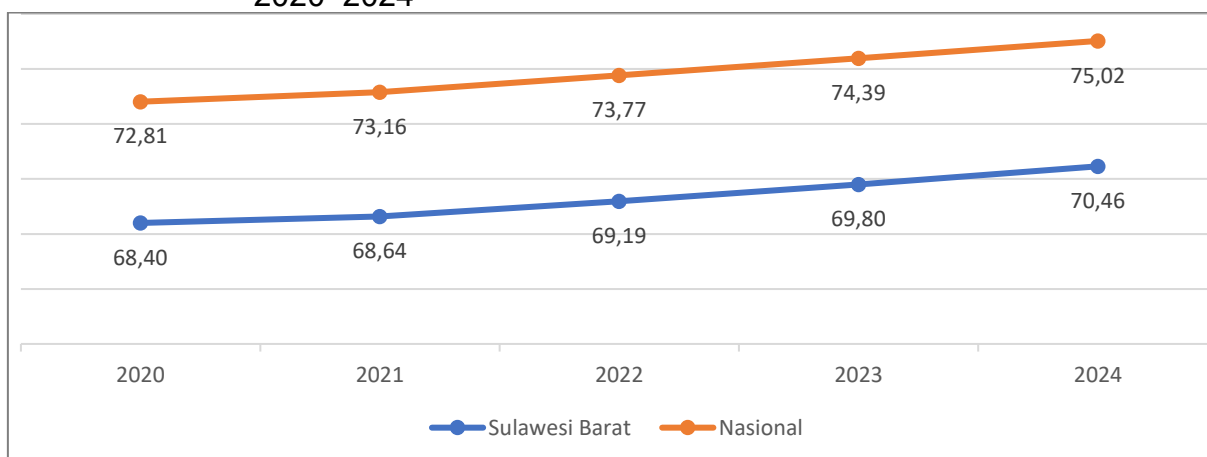
2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk melakukan akselerasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Fase bonus demografi yang saat ini dinikmati oleh Provinsi Sulawesi Barat tidak akan bermanfaat bagi pembangunan daerah jika sebagian besar populasinya tidak memiliki kualitas mumpuni untuk berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Justru, jika mayoritas penduduknya tak berkualitas, maka bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi di masa depan. Agar Provinsi Sulawesi Barat bisa memanfaatkan momentum bonus demografi, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam 5 Tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Barat belum menunjukkan kinerja baik, terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung meningkat di lima tahun terakhir. Secara nominal, IPM Provinsi Sulawesi Barat memang meningkat. Tahun 2020, IPM Provinsi Sulawesi Barat sudah berada di angka 68,4 mengalami kenaikan pada Tahun 2024 sebesar 70,46.

Capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu 70,46 masih termasuk kategori IPM “tinggi”, hanya sedikit diatas 0,46 poin dari tingkat IPM “sedang”. Status IPM sedang belum cukup mampu membuat Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan momentum bonus demografi karena pada level ini masih banyak penduduk usia sekolah yang belum bersekolah, derajat kesehatan masyarakat masih relatif rendah, dan tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk masih pada taraf rata-rata. Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan IPM kategori “sangat tinggi” agar bonus demografi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Grafik 2.43 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka Tahun 2021–2025

Laju pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Barat tentu tak lepas dari kinerja pertumbuhan masing-masing kabupaten. Kinerja pertumbuhan IPM semua kabupaten mengalami fluktuasi, namun dilihat dari data Tahun 2020 hingga 2024, semua kabupaten mengalami peningkatan IPM.

Tabel 2.24 IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

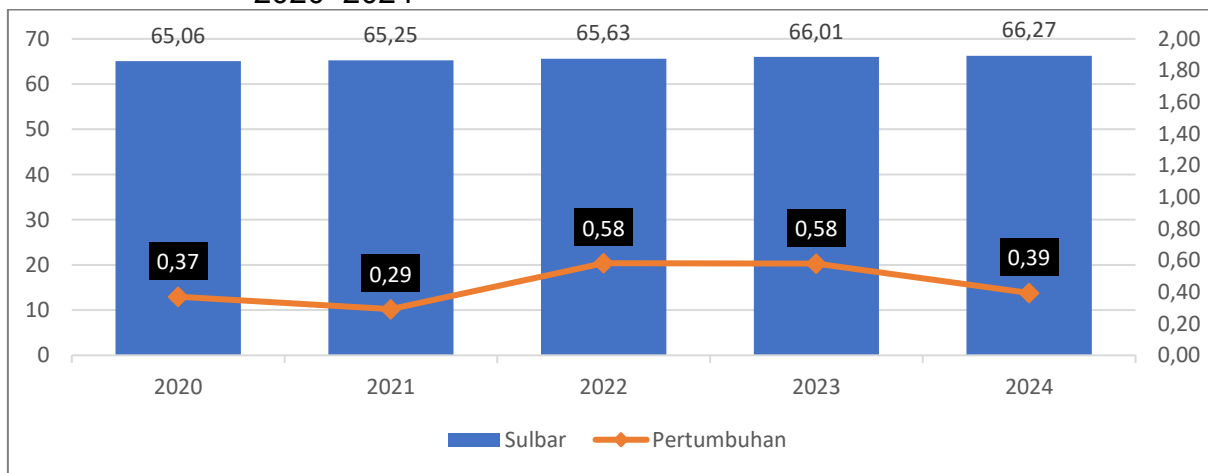
Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	70,71	71,1	71,64	72,44	73,25
Polewali Mandar	67,47	67,85	68,42	69,24	69,88
Mamasa	66,36	66,97	67,53	68,14	68,68
Mamuju	69,64	69,8	70,35	71,07	71,86
Pasangkayu	69,12	69,37	69,94	70,42	71,04
Mamuju Tengah	65,92	66,38	67,07	67,63	68,53

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Kinerja pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Barat tertinggal dari IPM Indonesia, meski pertumbuhan IPM Indonesia sebenarnya lebih lambat dari Provinsi Sulawesi Barat (dalam 5 Tahun pertumbuhannya selalu di bawah 1 persen) namun IPM Provinsi Sulawesi Barat selalu berada di bawah IPM Indonesia. Saat IPM Provinsi Sulawesi Barat masih berada di angka 60-an, IPM Indonesia sudah mencapai angka 70-an, hingga Tahun 2024 baru di angka 70,46. Ketertinggalan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari Nasional sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan IPM yang lebih progresif dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui 3 pendekatan dimensi yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Adapun komponen IPM adalah Angka Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

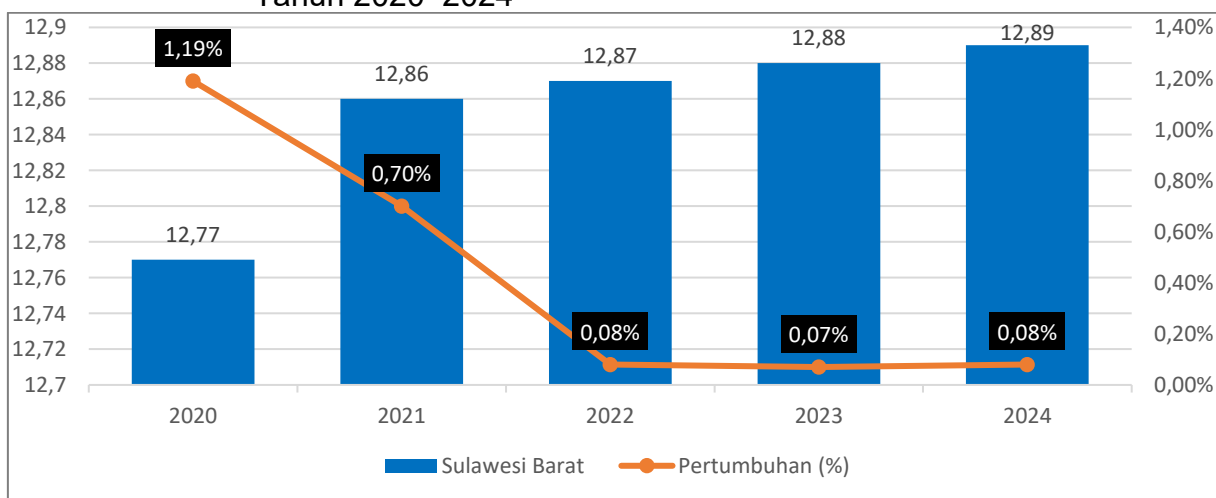
Grafik 2.44 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tahun 2020 hingga 2024, Perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat cenderung meningkat, namun pertumbuhan Usia Harapan Hidup berada pada 1 persen dari Tahun 2020–2024.

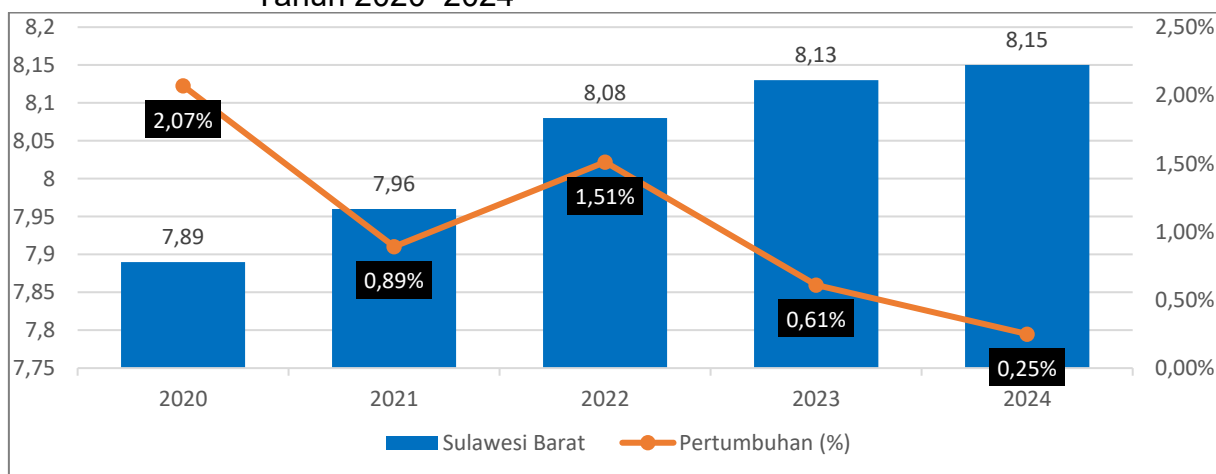
Grafik 2.45 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Perkembangan Harapan Lama sekolah 5 Tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 sebesar 12,77 meningkat menjadi 12,89 di Tahun 2024.

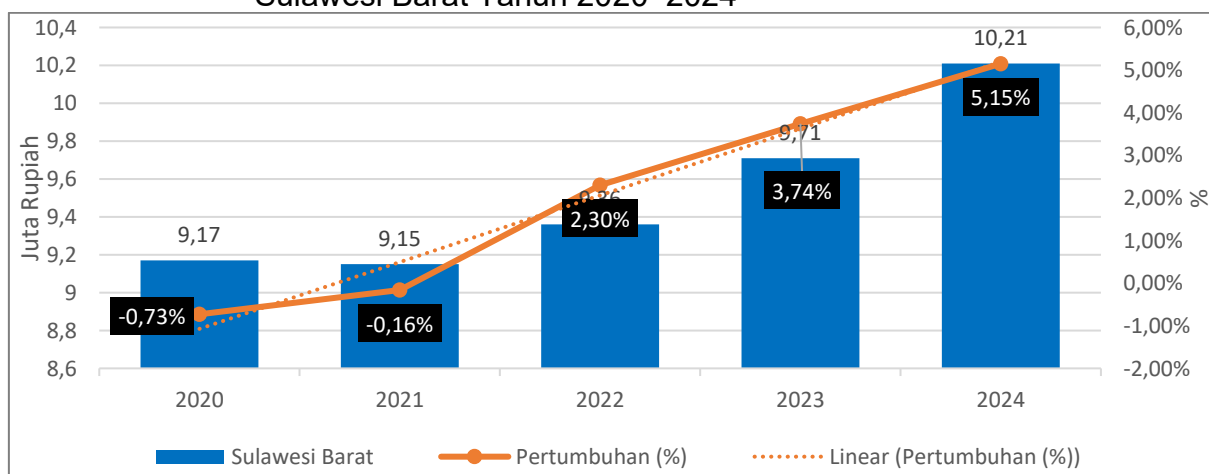
Grafik 2.46 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Barat relatif lebih dibandingkan HLS-nya, meski angka pertumbuhannya juga masih lambat. Jika dilihat tren pertumbuhan RLS, dalam 5 Tahun terakhir cenderung meningkat. Hanya beberapa Tahun saja angka pertumbuhannya di bawah 1 persen yaitu Tahun 2021 sebesar 0,89 persen, Tahun 2023 sebesar 0,61 persen dan Tahun 2024 sebesar 0,25 persen. Beberapa Tahun lainnya mencatat pertumbuhan RLS di atas 1 persen yaitu di Tahun 2020, dan 2022. Tahun 2024, RLS Provinsi Sulawesi Barat mencapai 8,15 Tahun, menunjukkan bahwa penduduk usia 25 Tahun ke atas rata rata hanya mengenyam pendidikan SMP/Sederajat kelas II.

Grafik 2.47 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tren perkembangan aspek kesejahteraan yang diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan juga masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, meski kecenderungannya menaik dalam 5 Tahun terakhir. Kinerja pertumbuhan terbaik

pengeluaran per kapita riil disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat terjadi di Tahun 2021 hingga 2024, karena dalam periode ini Gambar pertumbuhan menanjak naik dengan mencatat angka pertumbuhan 5,15 persen. Namun Tahun 2020 hingga 2021, menjadi periode terburuk karena pengeluaran per kapita riil mencatat pertumbuhan negatif akibat dampak pasca pandemi Covid-19. Tahun 2024, pertumbuhannya rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat naik 5,15 persen hingga mencapai angka Rp 10,21 juta.

**Tabel 2.25 Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	77,07	78,75	78,88	80,73	82,52
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	72,75	78,35	78,98	79,86	80,14
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	15,88	12,22	12,45	8,71	16,64
Morbiditas (Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir (Persen))	%	26,29	25,86	29,53	24,83	Belum rilis
Morbiditas (Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir (Persen))	Nasional	30,96	27,23	29,94	26,27	Belum rilis
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	Na	83,24	88,84	89,50	Belum rilis
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	Na	91,28	93,77	94,56	Belum rilis
Dimensi Pengetahuan						
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	98,33	98,19	98,40	98,31	98,49
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	90,07	90,12	89,39	89,47	91,24
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	69,84	71,22	70,85	71,57	72,09
Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun	%	23,24	23,80	23,43	23,98	25,32
Dimensi Standar Hidup Layak						
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	32.675	35.192	37.070	39.533	42.718
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	Na	22.896	23.073	23.919	Belum rilis
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	672.986	686.544	731.902	743.007	757.507
Persentase Pekerja Formal	%	27,37	27,20	22,75	26,13	Belum rilis

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pekerja Informal	%	72,63	72,80	77,25	73,87	Belum rilis
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rupiah	2.068.690	2.200.963	2.340.502	2.367.534	Belum rilis
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Penduduk Miskin	ribu orang	152,02	157	166	164,14	162,19
Persentase Penduduk Miskin	%	10,87	11,29	11,75	11,49	10,71
Gini Rasio	Rasio	0,364	0,356	0,362	0,351	0,330

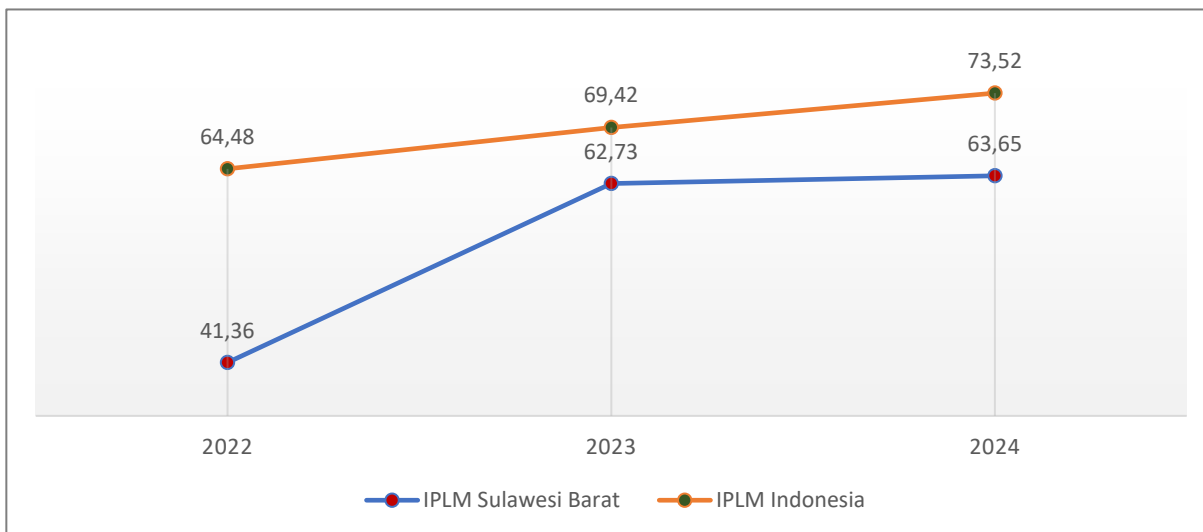
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional menggambarkan usaha yang telah dilaksanakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM nasional akan menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam meningkatkan pembangunan literasi Masyarakat. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan.

Pada Tahun 2022, IPLM Sulawesi Barat berada di angka 41,36 poin (Kategori rendah). Pada Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan di Sulawesi Barat dengan IPLM mencapai 63,65 Poin atau masuk dalam kategori sedang namun masih dibawah capaian Nasional yaitu 73,52 poin. Peningkatan yang lebih tajam di Sulawesi Barat menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan literasi di wilayah tersebut, meskipun masih ada kesenjangan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dan potensi untuk terus meningkatkan literasi di masa depan.

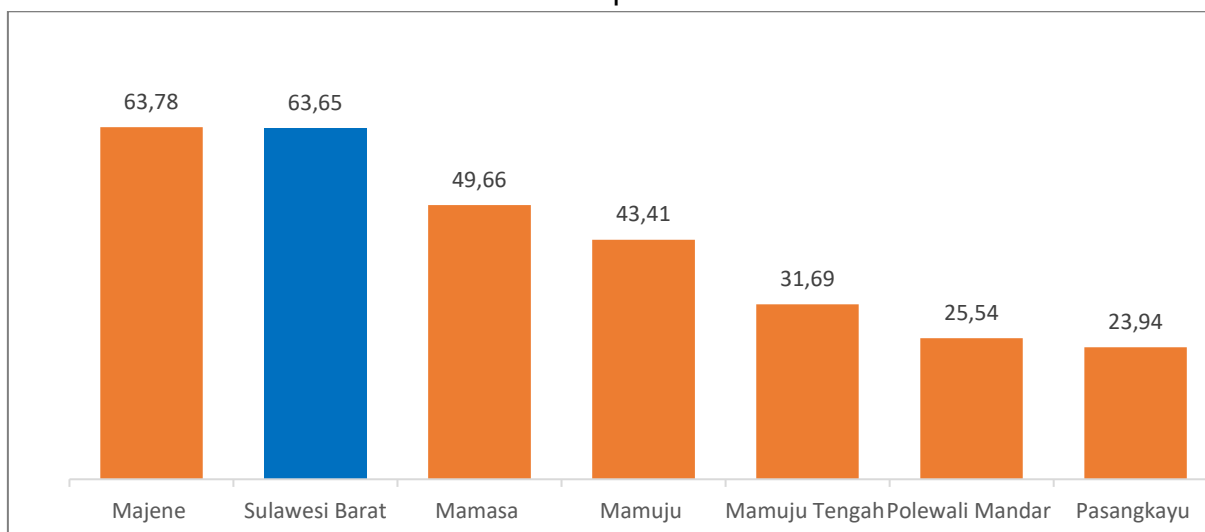
Grafik 2.48 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Barat Tahun 2022–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 berdasarkan kabupaten menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten. Kabupaten Majene Menunjukkan capaian tertinggi dengan skor 73,78 poin mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan literasi di wilayah ini. Sedangkan Kabupaten Pasangkayu Memiliki skor 23,94 poin yang merupakan skor terendah di antara kabupaten lainnya, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya peningkatan literasi.

Grafik 2.49 Skor IPLM menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

2.3.2.3. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan aman. Di Indonesia, pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan empat pilar utama yaitu Digital Skill (Keterampilan Digital), Digital Ethics (Etika Digital), Digital Safety (Keamanan Digital), dan Digital Culture (Budaya Digital). Setiap pilar memiliki peran penting dalam membentuk literasi digital yang komprehensif:

1. Keterampilan Digital: Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital dan aplikasi untuk berbagai keperluan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi.
2. Etika Digital: Menilai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi, termasuk privasi, hak cipta, dan perilaku online yang baik.
3. Keamanan Digital: Mengukur kesadaran dan tindakan individu dalam menjaga keamanan data pribadi dan menghindari ancaman cyber.
4. Budaya Digital: Menilai sejauh mana teknologi digital telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 0,24 poin pada Tahun 2021. Meskipun demikian, provinsi ini tetap berupaya meningkatkan literasi digital masyarakatnya melalui berbagai program dan inisiatif. Penurunan skor ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Barat dalam meningkatkan literasi digital mereka. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan ini termasuk akses yang terbatas ke teknologi, kurangnya pelatihan dan pendidikan digital, serta kesadaran yang rendah tentang pentingnya keamanan digital.

Tabel 2.26 15 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022

Peringkat	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55

Peringkat	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2021	3,54	Skor Indeks 2022	3,49

Sumber: Kominfo, Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2021-2022

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) dalam kegiatan produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif, sehingga semakin besar potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja Sulawesi Barat berada di angka 70,19 Persen. Pada Tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 70,27 Persen, menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah orang yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Puncak partisipasi angkatan kerja terjadi pada Tahun 2022, di mana angkanya mencapai 73 Persen. Ini mungkin mencerminkan kebijakan ekonomi yang efektif atau perubahan demografis yang mendorong lebih banyak orang untuk bekerja. Namun, pada Tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 71,40 Persen, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi atau sosial. Perubahan ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir.

Grafik 2.50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



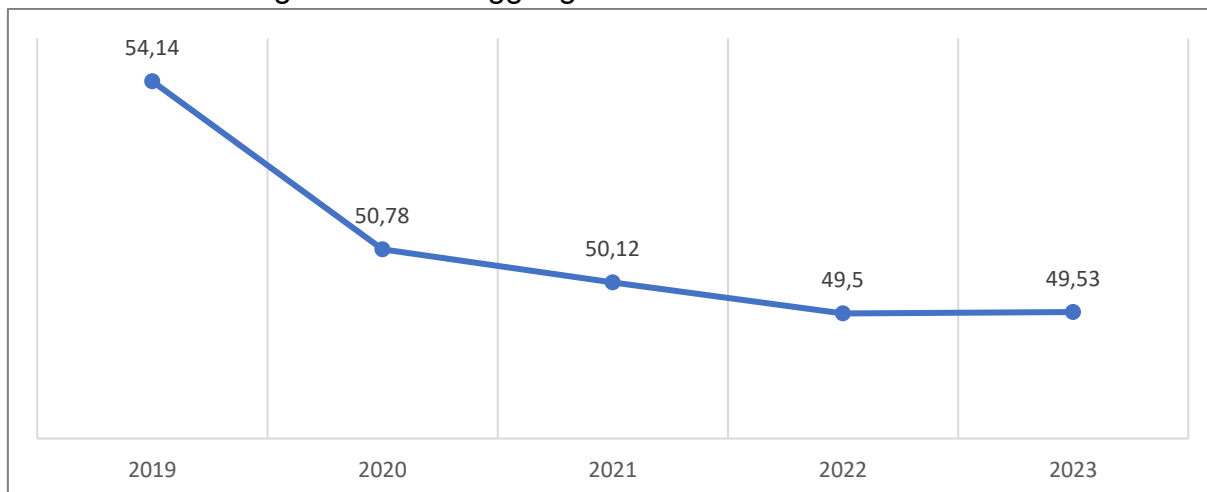
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

2.3.2.5. Angka Ketergantungan

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 Tahun dan 65 Tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 Tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung

kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif. Tahun 2019, Provinsi Sulawesi Barat mencatat angka beban tanggungan yang cukup tinggi mencapai 54,14 persen, menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, angka beban tanggungan jadi 50,78 persen Tahun 2020, Tahun 2021, dan 2022 menjadi 49,50 persen namun Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 49,53 persen.

Grafik 2.51 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan oleh semua negara/daerah karena itu menunjukkan bahwa ada proporsional lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat mendukung penduduk yang belum atau tak lagi bekerja (pensiun). Hal ini pada gilirannya menguntungkan sistem perawatan kesehatan dan program pensiun negara-negara dengan beban ketergantungan rendah. Selain itu, beban tanggungan juga berbanding terbalik dengan produktivitas penduduk usia kerja, semakin rendah beban tanggungan maka semakin tinggi produktivitas

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur

Secara konseptual, Indeks Infrastruktur diperoleh dari lima indikator komposit, yaitu persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet), dan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi. Di dalam perhitungan Indeks Infrastruktur, semua indikator memiliki bobot yang sama sehingga nilai Indeks Infrastruktur diperoleh dari penjumlahan angka kelima indikator lalu kemudian dibagi lima.

Selama periode 2020–2024, Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan secara konsisten. Indeks Infrastruktur bergerak naik dari

69,05 pada Tahun 2020 menjadi 79,84 pada Tahun 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada Tahun 2021 akibat adanya peningkatan berarti pada beberapa indikator, yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet).

Tabel 2.27 Indeks Infrastruktur menurut Komposit Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

No	Indikator Infrastruktur	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber data
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	38,58	42,18	41,37	45,84	46,89	Dinas PUPR Prov. Sulbar
2	Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum layak	75,79	78,35	78,98	79,86	80,14	BPS Sulawesi Barat
3	Persentase RT yang memiliki akses terhadap listrik	87,80	99,14	99,32	98,71	99,99	Dinas ESDM Prov. Sulbar
4	Persentase RT yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet)	66,03	75,32	82,09	84,56	89,67	Buku Statistik Indonesia
5	Persentase RT yang memiliki sanitasi	77,07	80,12	78,88	80,73	82,52	BPS Sulawesi Barat
Indeks Infrastruktur		69,05	75,02	76,128	77,94	79,84	

Catatan: Indeks Infrastruktur dihitung oleh Tim Penyusun

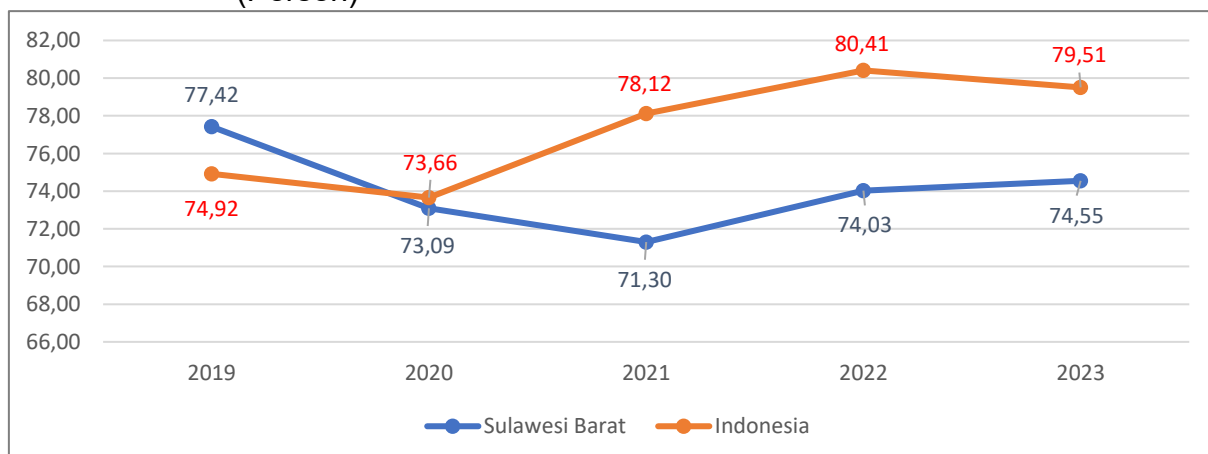
Masih rendahnya Indeks Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat terutama disebabkan oleh rendahnya indikator persentase panjang jalan dalam kondisi mantap yang baru mencapai 46,89 persen pada Tahun 2024, yang juga sekaligus menjadi indikator dengan nilai terendah dari lima indikator komposit. Sedangkan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik merupakan indikator dengan kinerja terbaik, yaitu mencapai 99,99 persen pada Tahun 2024.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat demokrasi dalam sebuah negara. Indeks ini menggambarkan seberapa baik sebuah negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan sipil, proses pemilihan umum yang adil, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan media, dan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 2023 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Naik menjadi 74,55 Poin dari 74,03 poin dari Tahun 2022 atau naik sebesar 0,53 Poin. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat merupakan gambaran kondisi demokrasi Indonesia melalui 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Grafik 2.52 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019–2023 (Persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak Tahun 2009 (IDI 2009). Pada Tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial.

Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:

1. IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)
2. IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga)
3. IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat)

IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1. Aspek Kebebasan (7 indikator); 2. Aspek Kesetaraan (7 indikator); 3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). IDI dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu Kategori Tinggi (>80), Kategori Sedang (60-80), dan Kategori Rendah (<60).

Tabel 2.28 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2019–2023

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kebebasan Politik	81.58	86.38	67,24	67,78	74,87
Hak-Hak Politik	70.22	61.09	81,75	83,46	81,68
Lembaga Demokrasi	83.60	75.45	62,80	68,90	65,72
Indeks Keseluruhan	77.42	73.09	71,30	74,03	74,55

Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

Tabel ini menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019 hingga 2023, berdasarkan beberapa aspek: Kebebasan Politik, Hak-Hak Politik, Lembaga Demokrasi, dan Indeks Keseluruhan. Pada aspek

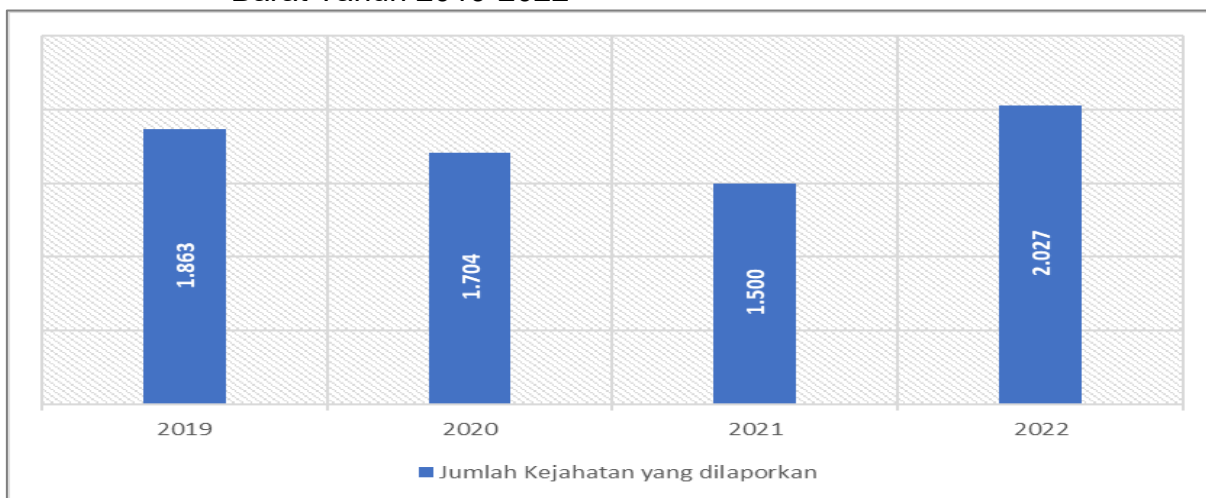
Kebebasan Politik, Pada Tahun 2019, indeks ini berada di angka 81,58. Pada Tahun 2020, meningkat menjadi 86,38, namun mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 menjadi 67,24. Pada Tahun 2022, indeks ini sedikit naik menjadi 67,78 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 74,87. Pada aspek Hak-Hak Politik, Indeks ini dimulai dari 70,22 pada Tahun 2019, turun menjadi 61,09 pada Tahun 2020, kemudian naik signifikan pada Tahun 2021 menjadi 81,75. Pada Tahun 2022, indeks ini mencapai 83,46 dan sedikit menurun menjadi 81,68 pada Tahun 2023. Pada aspek Lembaga Demokrasi, Pada Tahun 2019, indeks ini berada di angka 83,60. Pada Tahun 2020, turun menjadi 75,45 dan terus menurun pada Tahun 2021 menjadi 62,80. Pada Tahun 2022, indeks ini naik menjadi 68,90 dan sedikit menurun menjadi 65,72 pada Tahun 2023.

Indeks Demokrasi secara keseluruhan dimulai dari 77,42 pada Tahun 2019, turun menjadi 73,09 pada Tahun 2020, dan terus menurun menjadi 71,30 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, indeks ini naik menjadi 74,03 dan sedikit meningkat menjadi 74,55 pada Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika demokrasi di Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir, dengan fluktuasi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan sosial.

2.3.4.2. Angka Kriminalitas

Kriminalitas termasuk bagian dalam aspek daya saing yang berkaitan dengan variabel-variabel pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dari Universitas Gadjah Mada dan Diky Bintang Prakoso dari Institut Pertanian Bogor menemukan kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, kemiskinan dan aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sementara pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, dan pelaporan dan penanganan polisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas (Kurniawan, 2020). Temuan Diky Bintang Prakoso (2016) mencatat bahwa provinsi dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, variabel tingkat ketidakamanan, PDRB perkapita konstan dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap angka kriminalitas sedangkan persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan untuk kelompok provinsi dengan ketimpangan tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pada kelompok provinsi dengan ketimpangan pendapatan rendah, variabel tingkat ketidakamanan dan PDRB per kapita konstan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas sedangkan variabel persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap angka kriminalitas pada kelompok provinsi ini.

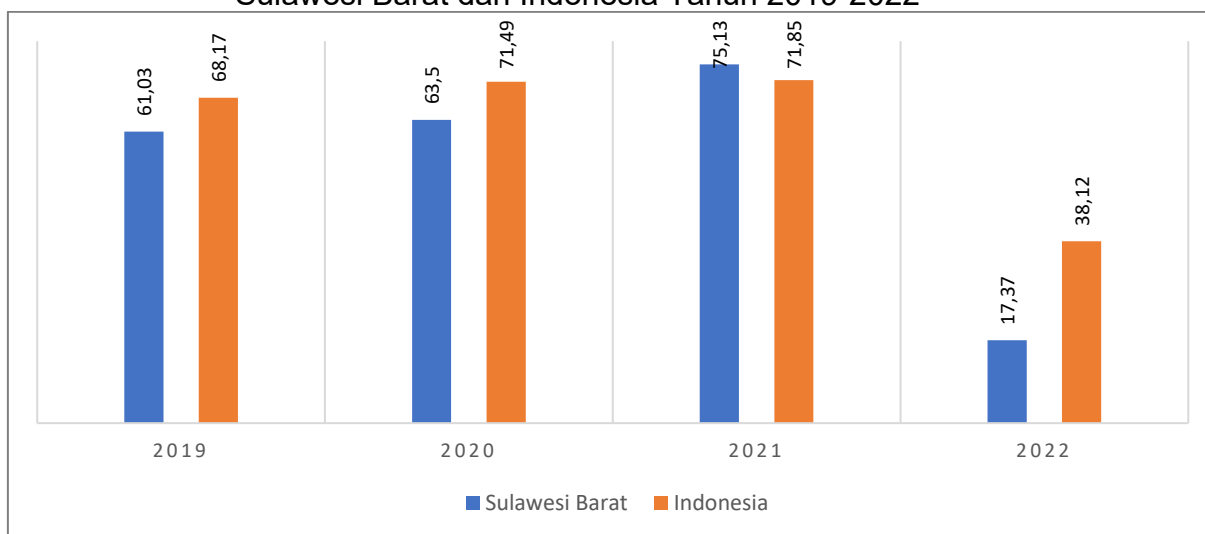
Grafik 2.53 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Publikasi Statistik Kejahatan yang diterbitkan oleh BPS mencatat jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2019 sebanyak 1.863 laporan, tapi dua Tahun setelahnya stabil mengalami penurunan masing-masing di Tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah laporan sebanyak 1.704 laporan dan 1.500 laporan. Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 termasuk tiga terendah di Indonesia bersama dengan Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Pada Tahun 2022 Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2.027 Laporan. Secara Nasional, Sulawesi Barat merupakan salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit.

Grafik 2.54 Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Dari total kejahatan yang dilaporkan, sebagian besar sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat dari indikator persentase penyelesaian kejahatan (clearance rate) di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2019 hingga 2021, tingkat penyelesaian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan walaupun masih berada dibawah Nasional. menunjukkan bahwa lebih dari setengah laporan kejahatan yang masuk di kantor polisi berhasil diselesaikan. namun pada Tahun 2022 baik secara Nasional maupun Sulawesi Barat mengalami penurunan. Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas plichtmatigheid (kewajiban berdasarkan
4. Kewenangan hukum);
5. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;
6. Tersangka meninggal dunia;
7. Kasus kadaluwarsa.

Tabel 2.29 Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022

No	Klasifikasi Kejahatan	Jumlah Kejahatan	Persentase
1	Kejahatan terhadap Nyawa	5	0,47
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	287	27,00
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	40	3,76
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	9	0,85
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	4	0,38
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	434	40,83
7	Kejahatan Terkait Narkotika	138	12,98
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	146	13,73
	Total Kejahatan	1063	100,00

Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

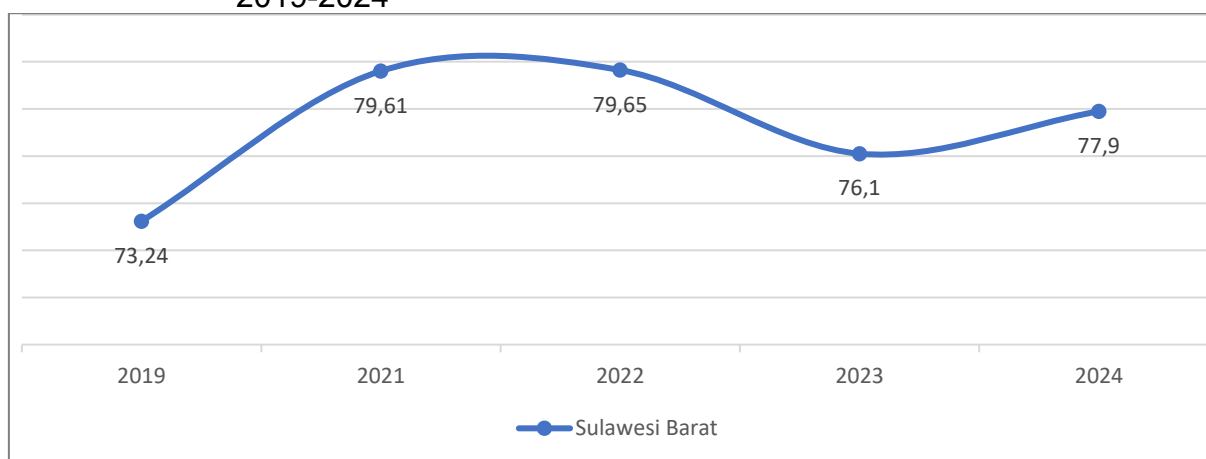
Sebagian besar kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat merupakan kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (Senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (Sajam). Tahun 2022, proporsi kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan mencapai 40,83 persen dari total kasus kejadian kejahatan atau setara dengan 1063 kejadian kejahatan. Tiga kasus kejahatan yang proposinya

juga relatif tinggi adalah kejahatan terhadap fisik/badan, penipuan, penggelapan, dan korupsi, dan Narkotika. Ketiga kasus ini berkontribusi masing-masing 27 persen, 13,73 persen, dan 12,98 persen terhadap total kejadian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat.

2.3.4.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dalam kurun Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat masih berfluktuatif. Pada Tahun 2018, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat mencapai puncaknya dengan nilai sekitar 74,88 Poin. Pada Tahun 2019, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai nilai sekitar 73,24 Poin. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Barat. Pada Tahun 2020, data tidak ditampilkan dikarenakan data Nasional tidak tersedia. Pada Tahun 2021, indeks ini mulai menunjukkan peningkatan kembali dengan nilai sekitar 79,61 Poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kerukunan antar umat beragama. Pada Tahun 2022, Indeks Kerukunan Umat Beragama terus meningkat menjadi 79,65 Poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Barat mulai membuahkan hasil yang positif. Pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 76,1 Poin. Selama kurun waktu 2018 hingga 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat stabil dalam kategori tinggi.

Grafik 2.55 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2024



Sumber: Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, 2025

2.3.4.4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen yang dirancang oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengukur daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan utama dari IDSD adalah untuk memperoleh ukuran yang komprehensif mengenai produktivitas dan kemampuan suatu daerah

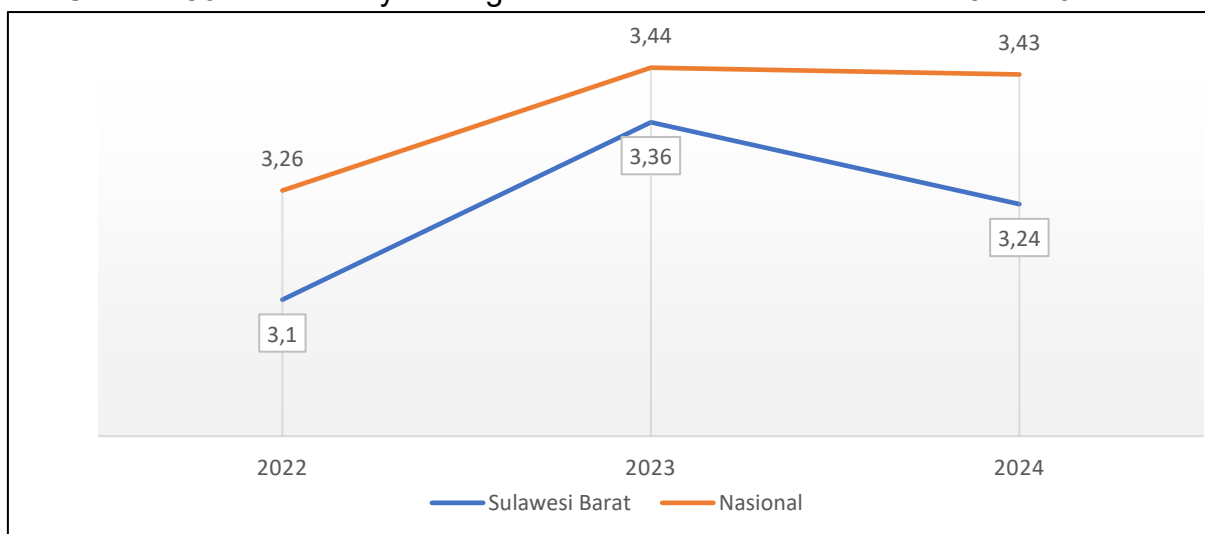
dalam bersaing, baik di tingkat nasional maupun global. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran dari Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dikembangkan oleh World Economic Forum (WEF). IDSD terdiri dari empat komponen utama yang membentuk daya saing daerah, yaitu:

1. Lingkungan Pendukung: Infrastruktur, institusi, dan stabilitas makroekonomi yang mendukung aktivitas ekonomi.
2. Sumber Daya Manusia: Kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja.
3. Pasar: Efisiensi pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan.
4. Ekosistem Inovasi: Kemampuan daerah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi.

Dengan mengukur keempat komponen ini, IDSD dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan suatu daerah, serta potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saingnya.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu Lingkungan Pendukung, Pasar, Sumber Daya Manusia dan Ekosistem Inovasi. IDSD dihitung menggunakan 12 Pilar, Provinsi Sulawesi Barat memiliki skor IDSD 3,24 Tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 yang sebesar 3,36; namun masih berada di bawah skor nasional 3,43. Pilar yang memiliki skor di atas nasional antara lain: Pilar 1. Institusi; Pilar 3. Adopsi TIK, Pilar 4. Kestabilan Ekonomi Makro, Pilar 7. Pasar Produk, dan Pilar 8. Pasar Tenaga Kerja. Sedangkan Pilar yang memiliki skor di bawah nasional yaitu Pilar 2. Infrastruktur; Pilar 5. Kesehatan, Pilar 6. Keterampilan (Pendidikan), Pilar 9. Sistem Keuangan, Pilar 10. Ukuran Pasar, Pilar 11. Dinamika Bisnis, Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Indeks Daya Saing Daerah di targetkan Tahun 2025 sebesar 3,82 poin dan di Tahun 2029 sebesar 5,05 poin.

Grafik 2.56 Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022–2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tabel 2.30 Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7	PILAR 8	PILAR 9	PILAR 10	PILAR 11	PILAR 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Sulawesi Barat	4,23	2,59	3,08	3,99	3,42	4,24	3,07	2,66	2,42	3,83	2,73	2,58	3,24
Majene	-	2,89	3,92	3,55	3,13	4,24	4,72	4,02	2,22	3,68	4,43	3,17	-
Polewali Mandar	4,62	2,96	3,81	3,80	3,19	4,18	2,96	3,60	2,08	4,11	4,62	2,48	3,53
Mamasa	4,04	2,54	3,55	3,75	3,88	3,87	5,00	3,06	2,39	3,46	2,68	1,82	3,34
Mamuju	4,27	2,95	3,57	3,95	3,64	4,01	4,50	3,84	2,95	4,06	3,06	2,36	3,60
Pasangkayu	4,20	3,04	3,92	3,03	3,53	4,01	1,63	3,14	1,58	4,00	4,40	0,74	3,10
Mamuju Tengah	4,12	2,64	3,44	4,03	3,70	4,11	1,60	3,46	2,53	3,47	3,68	1,31	3,18

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Keterangan:

Pilar 1 : Institusi

Pilar 2 : Infrastruktur

Pilar 3 : Adopsi TIK

Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5 : Kesehatan

Pilar 6 : Keterampilan

Pilar 7 : Pasar Produk

Pilar 8 : Pasar tenaga kerja

Pilar 9 : Sistem Keuangan

Pilar 10 : Ukuran pasar

Pilar 11 : Dinamisme bisnis

Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan isu yang santer digaungkan pasca reformasi, saat Indonesia tengah melakukan reformasi terhadap semua aspek bernegara. Para pengusung reformasi setuju bahwa birokrasi termasuk salah satu aspek yang mesti direformasi karena tata Kelola pada masa Orde Baru sangat buruk. Birokrasi pada masa itu mengabaikan praktik tata Kelola pemerintahan baik (good governance), sehingga dampaknya terlihat dari maraknya kasus korupsi, pelayanan publik yang lambat di daerah akibat pola pengambilan keputusan yang tersentralisasi, dll. Pemerintah pasca reformasi berulang-ulang menyebutkan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas aparatur negara melalui reformasi birokrasi. Hal itu mulai menjadi perhatian pemerintah Tahun 2004, sehingga Tahun ini disebut sebagai Tahun yang menandai gelombang pertama reformasi birokrasi Indonesia.

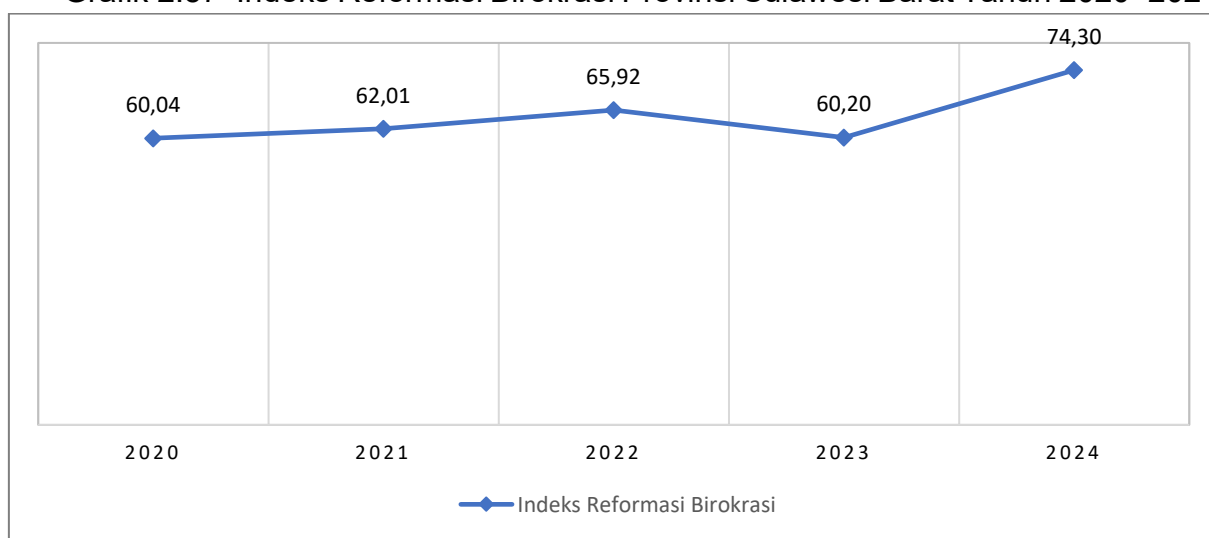
Agar reformasi birokrasi berjalan sistematis dan dilaksanakan oleh semua level pemerintahan, Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika berhasil menerapkan reformasi birokrasi dengan baik, maka pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; dapat menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Namun, kegagalan penerapan reformasi birokrasi akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi untuk mengatasi kompleksitas abad ke-21, trauma, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan Nasional.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi, baik pada level pemerintah maupun pemerintah daerah adalah indeks reformasi birokrasi (IRB).

Grafik 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat

Dalam lima Tahun terakhir, IRB Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau berfluktuasi dengan angka indeks tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 65,92, dan Tahun 2024 yaitu sebesar 74,30, ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam lingkup pemerintah provinsi terus berproses tapi masih tetap pada kategori “BB”. Berdasarkan Penilaian dari Kementerian PANRB, IRB

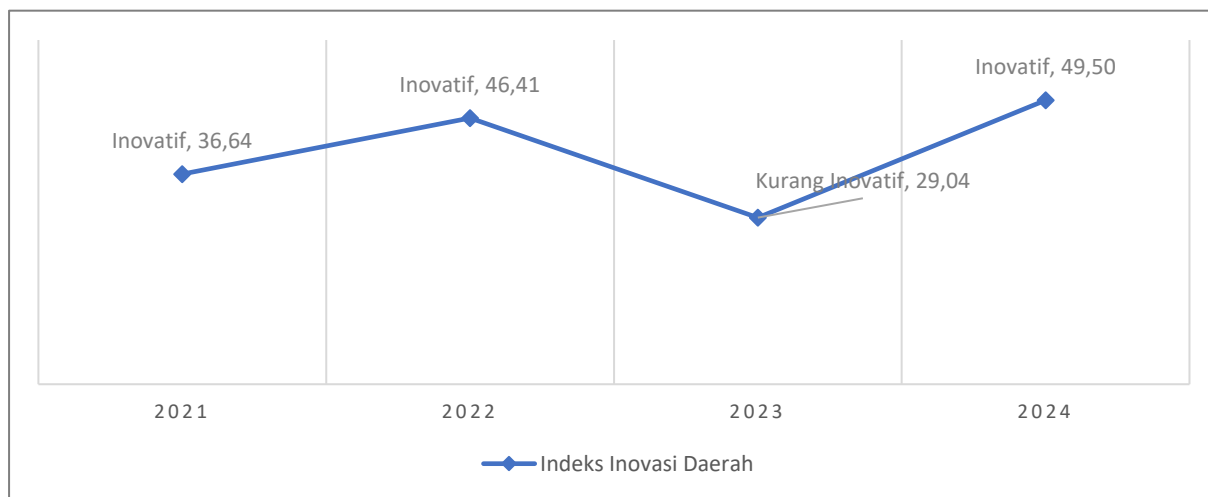
Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan ke angka 60,20 di Tahun 2023 namun tetap pada level kategori “baik”. Pada level ini pemerintah provinsi sudah memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Meski begitu sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Perubahan IRB dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah kemampuan daerah dalam berinovasi dan kemampuan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Bersama dengan banyak variabel lain, kedua indikator tersebut termasuk bagian reformasi birokrasi general (RB General) yang termasuk masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.

2.4.2. Indeks Inovasi Daerah

Dalam konteks pemerintah daerah, selain urgensi inovasi dalam pelayanan publik, pemerintah daerah juga diwajibkan oleh regulasi. Setidaknya ada dua regulasi teknis yang mengatur tentang inovasi di tingkat pemerintah daerah yaitu PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Tujuan utama inovasi daerah dalam peraturan perundang-undangan adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka inovasi daerah diarahkan pada tiga hal yaitu peningkatan Pelayanan Publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Grafik 2.58 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024



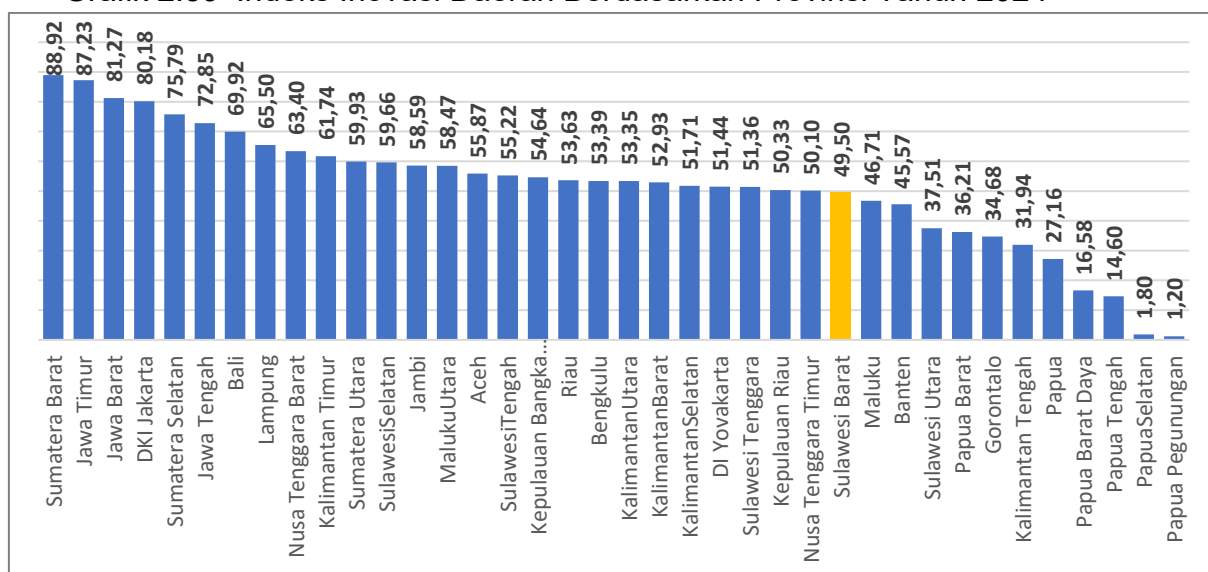
Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi diukur menggunakan indeks inovasi daerah (IID). Indeks ini pertama kali diuji coba Tahun 2019, namun ada beberapa daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat yang belum memenuhi kebutuhan data sehingga tak dapat nilai IID. Tahun 2020, nilai IID sebesar 794 atau termasuk

pada kategori Inovatif. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat IID sebesar 36,64 atau masuk dalam kategori inovatif. Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat nilai IID sebesar 46,41 atau naik 9,77 poin, tapi masih berada pada kategori inovatif.

Meski mengalami kenaikan Tahun 2022, tapi IID Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan pada Tahun 2023 yaitu menjadi 29,04 dengan status Provinsi yang kurang inovatif. Dengan nilai tersebut, Provinsi berada pada urutan ke-32 dari 38 Provinsi di Indonesia. Untuk Tahun 2024 hasil penilaian IID Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat nilai sebesar 49,50 kembali meraih predikat Inovatif dan berada pada urutan ke 27 dari 38 provinsi.

Grafik 2.59 Indeks Inovasi Daerah Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Andjar Prasetyo dkk (2023), ada beberapa dimensi yang mempengaruhi inovasi di tingkat daerah yaitu kepemimpinan, visi, dan misi; tingkat pendapatan dan belanja modal regional; tata kelola transparan dan mekanisme akuntabilitas; lingkungan regulasi; dan penyampaian layanan yang efisien. Temuan ini sejalan dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam menilai IID pemerintah daerah yang didalamnya juga terdapat visi kepala daerah tentang inovasi, dukungan anggaran, regulasi tentang inovasi daerah, ketersediaan sumberdaya manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah provinsi perlu mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang masih lemah dalam pencapaian IID dan kemudian melakukan perbaikan pada indikator tersebut.

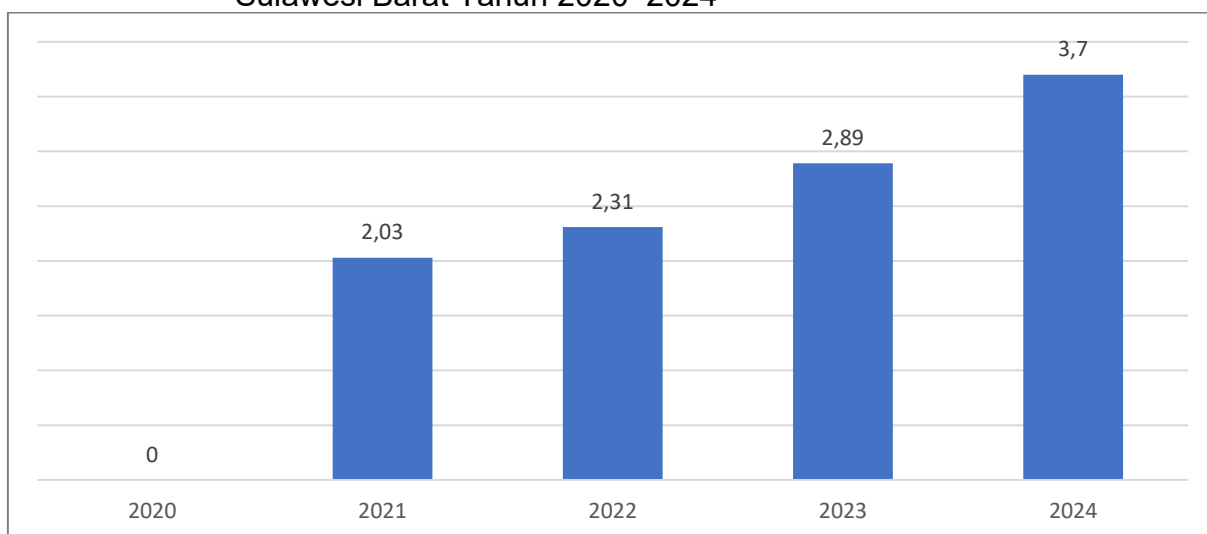
2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Menurut Kemenpan RB, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara Nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kehadiran SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Tahun 2021, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat hanya diganjar nilai indeks 2,03 atau masuk dalam kategori “cukup”. Kenaikan kategori nilai indeks terjadi di Tahun 2021 menjadi 2,03. Kenaikan nilai indeks berlanjut di Tahun 2022 dengan mencatatkan angka 2,31 atau naik 0,27 poin. Angka tersebut berhasil melampaui target RPD sebesar 2,20. Angka Tahun 2024 masih termasuk dalam kategori nilai indeks “sangat baik” yaitu 3,7. Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat lebih tinggi dari nilai indeks SPBE Nasional 3,12 dengan kategori nilai “baik”.

Grafik 2.60 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: PANRB, Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024, diakses Tahun 2025

Menurut Dinas Kominfo Persandian Statistik Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab implementasi SPBE dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Barat. Faktor pertama adalah digital mindset penyelenggara pemerintahan masih kurang. Selama bertahun-tahun, ASN bekerja dalam sistem konvensional, sehingga cara berpikir mereka dalam memberikan pelayanan ke Masyarakat masih sama atau sulit diubah menjadi digital mindset. Faktor kedua adalah SPBE belum menjadi prioritas kebijakan dan kurang diperhatikan para pimpinan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa reformasi

birokrasi dalam perspektif para pengambil kebijakan masih diletakkan pada kategori penting tapi tidak mendesak. Hal itu menyebabkan faktor ketiga yaitu Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan digitalisasi. Akibat dari keterbatasan anggaran adalah faktor keempat yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas SDM TIK serta tidak fokusnya pekerjaan tenaga yang ditunjuk. Faktor kelima atau terakhir adalah masih kuatnya ego sektoral dalam lingkup pemerintah provinsi dan belum optimalnya sinergitas antar stakeholder.

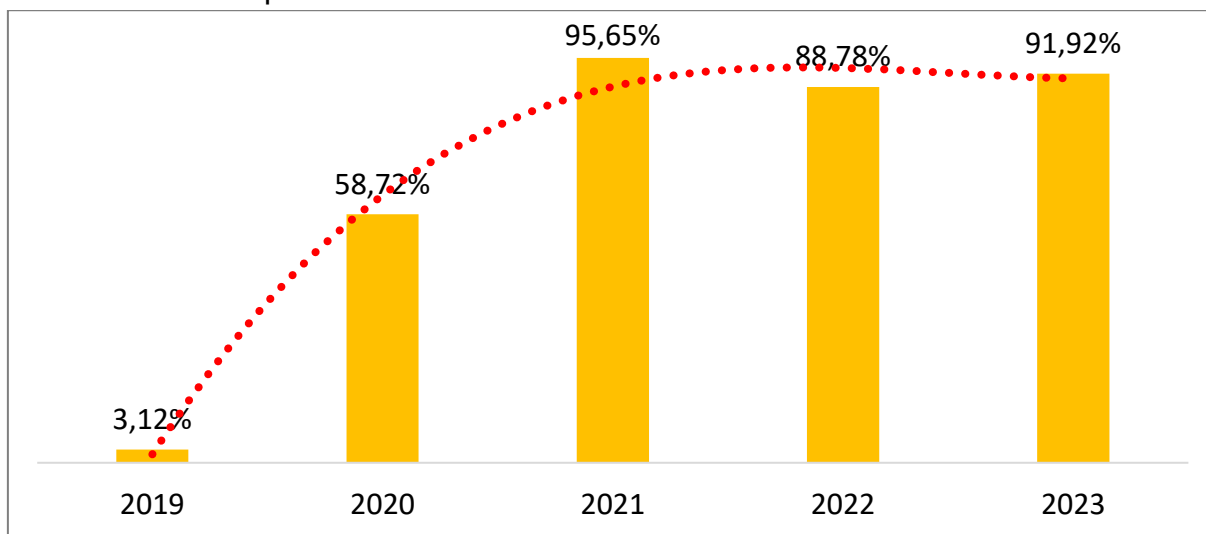
2.4.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Barat dalam lima Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019, capaian SPM Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,12 persen meningkat hingga Tahun 2021 menjadi 95,65 persen, namun mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 88,78 persen, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 91,92 persen pada Tahun 2023.

Grafik 2.61 Capaian SPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

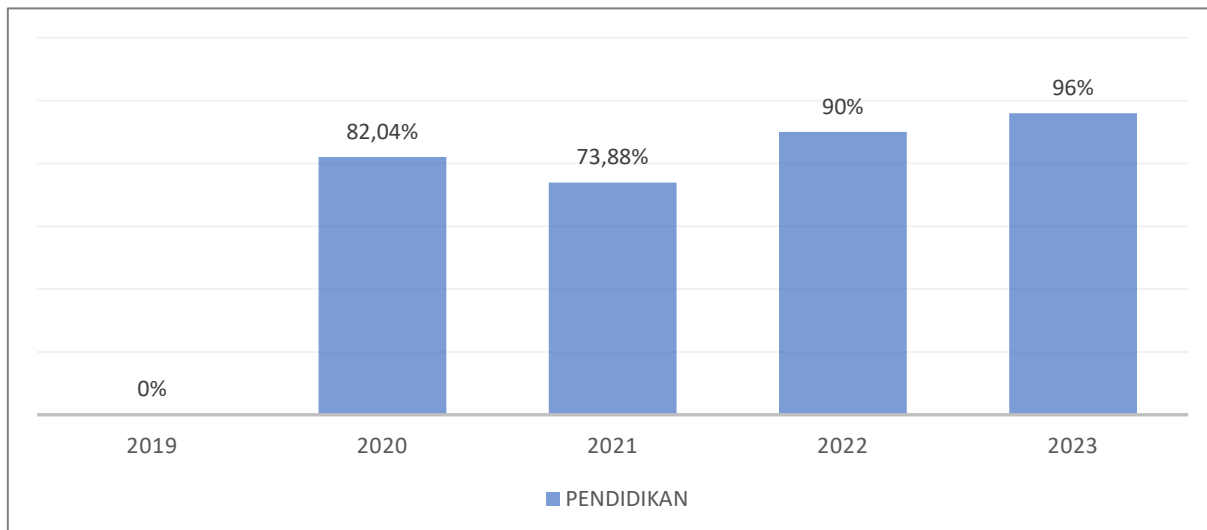
Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.4.1. Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang setiap warga berhak peroleh secara minimal. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan urusan wajibnya. Peraturan ini diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Dalam konteks pendidikan, SPM ditetapkan oleh Permendikbud Ristek RI nomor 32 Tahun 2022, yang mengatur jenis layanan dasar, mutu layanan, pencapaian SPM, serta proses pelaporan dan evaluasi.

Secara umum SPM pendidikan dalam kurun waktu lima Tahun terakhir mengalami kenaikan yang stabil dan hanya pada Tahun 2021 mengalami penurunan, pada Tahun 2019 SPM capaian SPM Pendidikan sebesar 0 persen dikarenakan masalah pelaporan. Tahun 2023, Capaian SPM Pendidikan sebesar 96 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam lima Tahun terakhir.

Grafik 2.62 Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



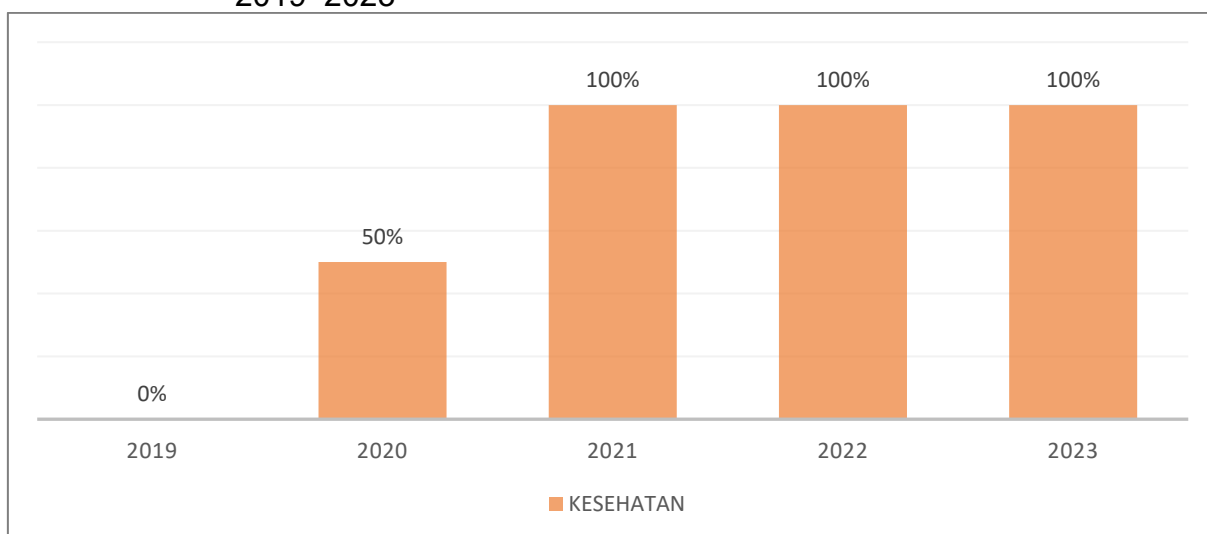
Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

2.4.4.2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis pelayanan dasar dalam SPM Kesehatan Provinsi meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Grafik 2.63 Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

Secara umum SPM Kesehatan dalam kurun waktu lima Tahun terakhir mengalami kenaikan yang stabil, pada Tahun 2019 SPM capaian SPM Kesehatan sebesar 0 persen dikarenakan masalah pelaporan. Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, Capaian SPM Kesehatan sebesar 100 persen.

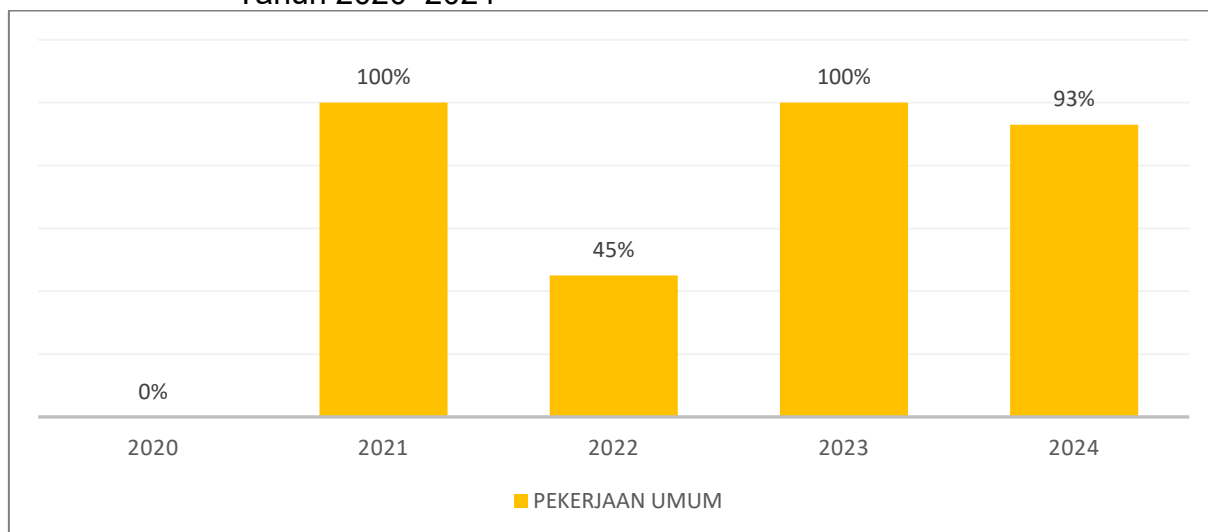
2.4.4.3. Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum Provinsi meliputi:

1. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota
2. Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten

Secara umum SPM Pekerjaan Umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir masih bergerak secara fluktuatif, pada Tahun 2020 SPM capaian SPM Pekerjaan Umum sebesar 0 persen dikarenakan masalah pelaporan. Pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 100 persen, pada Tahun 2022 mengalami menurun menjadi 45 persen, Tahun 2023 sebesar 100 persen kemudian menurun di Tahun 2024 sebesar 93 persen.

Grafik 2.64 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

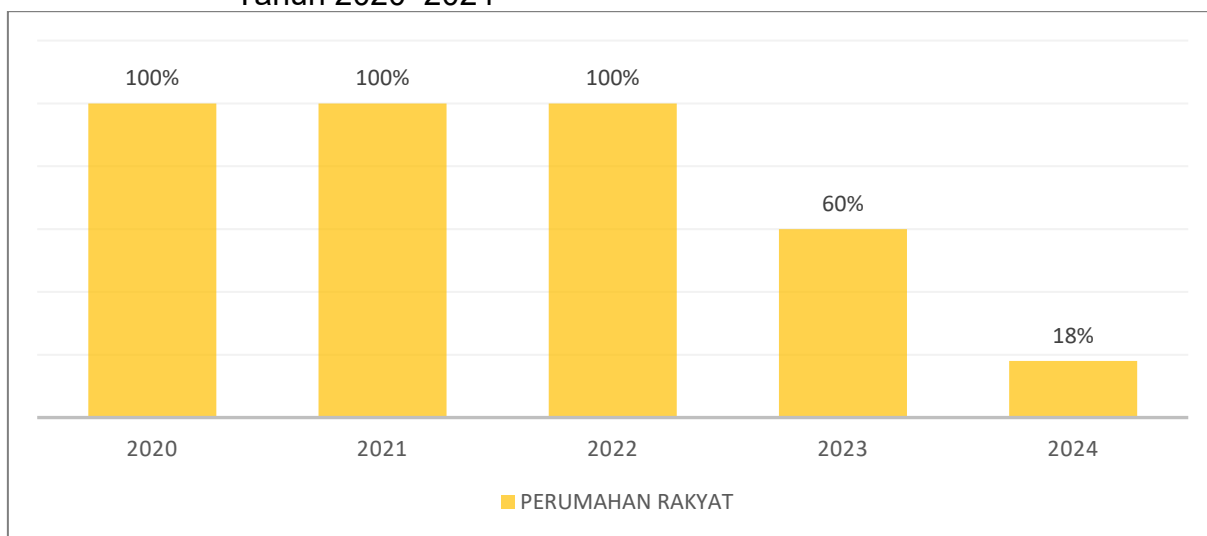
2.4.4.4. Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar dalam SPM Perumahan Rakyat Provinsi meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

SPM Perumahan Rakyat pada Tahun 2020 hingga 2022 capaian SPM Perumahan rakyat sebesar 100 persen namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 60 persen dan Tahun 2024 sebesar 18 persen karena masalah pada pelaporan.

Grafik 2.65 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

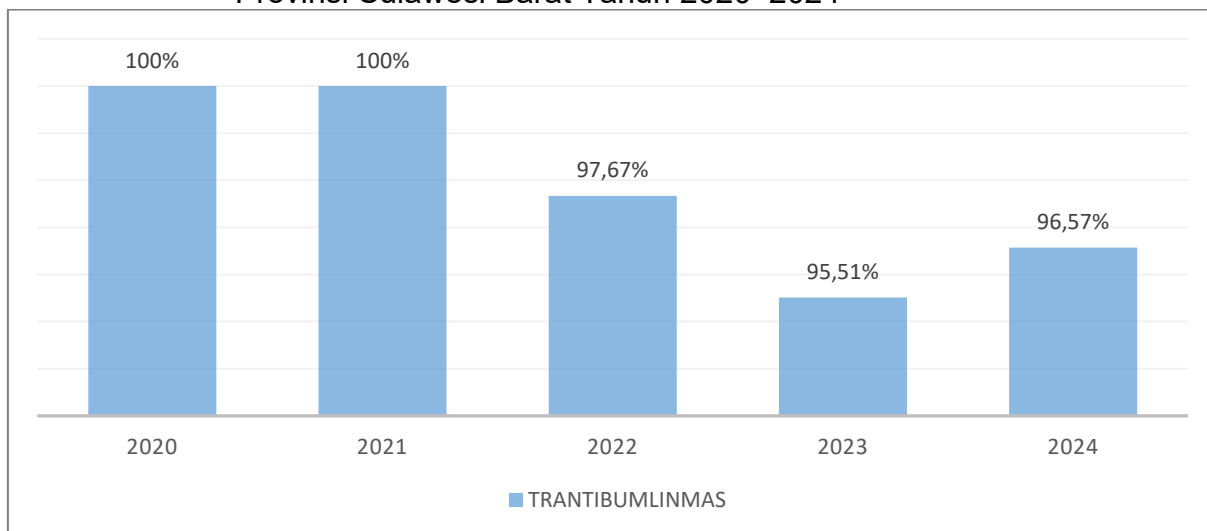
2.4.4.5. ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 0 persen karena masalah pelaporan. Pada Tahun 2023 sebesar 95,51 persen mengalami penurunan jika dibandingkan pada 4 Tahun sebelumnya.

Grafik 2.66 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

Agar mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum dapat tercapai secara maksimal, idealnya keempat faktor tersebut harus disiapkan secara terintegrasi atau bersama-sama. Artinya, mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

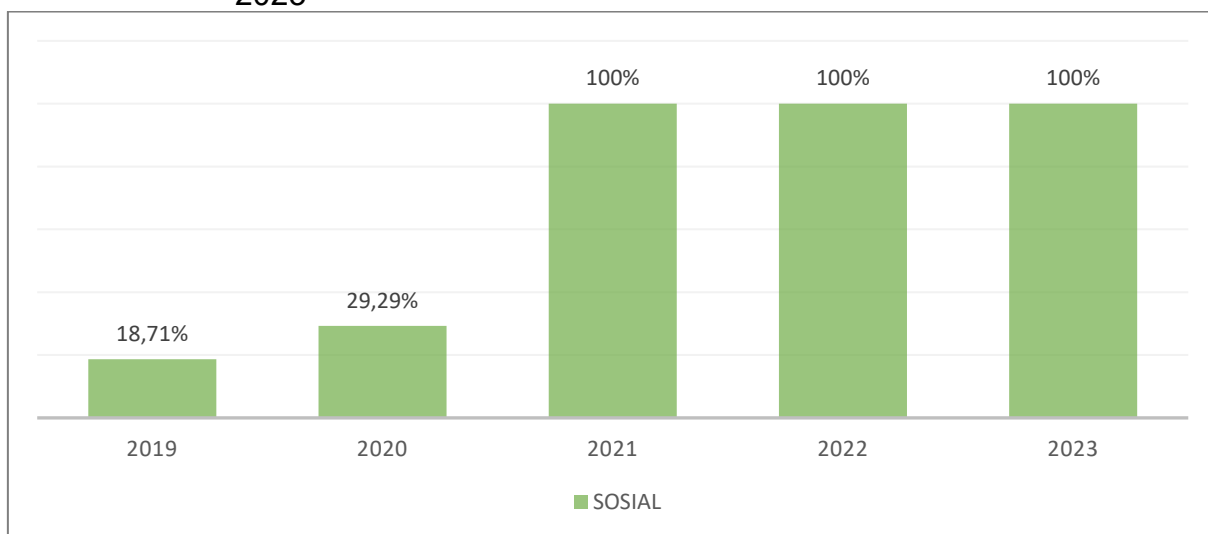
Diharapkan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi dapat melakukan Proses perencanaan yang sepenuhnya berbasis SPM, Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan SPM, Menjadikan prioritas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Membuat pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran dan Membuat pemetaan kawasan atau daerah terdampak atas penegakan perda.

2.4.4.6. Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial diatur sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar dalam SPM Bidang Sosial Provinsi meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Grafik 2.67 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

SPM Sosial secara umum mengalami peningkatan dalam lima Tahun terakhir. Pada Tahun 2019 capaian SPM sosial sebesar 18,71 perse mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 29,29 persen. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 secara konstan capaian SPM sosial sebesar 100 persen.

2.4.5. Capaian Penyelenggaraan Urusan

2.4.5.1. Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam dan Undang Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 Tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 Tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
2024	104,78	82,07	86,07
2023	104,23	84,95	89,18
2022	106,08	84,58	87,86
2021	105,09	85,27	87,81
2020	106,05	84,67	84,36

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

Pada Tahun 2020–2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat mengalami penurunan di setiap jenjang Pendidikan. Terjadinya penurunan APK pada setiap jenjang tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah karena APM setiap jenjang pun mengalami peningkatan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan Data BPS Tahun 2023 APM SD mencapai 95,92, untuk SMP/ sederajat mencapai 72,39 sedangkan untuk jenjang sekolah menengah mencapai 61,17.

Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan Tahun 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMU
2024	96,82	71,77	62,10
2023	95,92	72,39	61,17
2022	95,81	70,34	60,24
2021	95,68	70,03	59,77
2020	95,80	69,98	58,05

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang masing-masing. Meskipun APM masih di bawah seratus persen, mengindikasikan adanya anak-anak usia sekolah yang kesulitan bersekolah tepat waktu, perkembangan APM pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan, terutama di Sekolah Dasar. Data juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam APM SMP dan SMU dari Tahun 2020 hingga 2024, hasil dari intervensi pendidikan, termasuk program kembali bersekolah yang diinisiasi oleh Pemerintah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, memberikan harapan bahwa lebih banyak anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara optimal di Sulawesi Barat.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Berdasarkan data beberapa Tahun terakhir angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang usia sekolah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada jenjang SD (7-12 Tahun) dengan angka sebesar 98,49 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah dasar atau yang berusia 7-12 Tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada jenjang usia 19-24 Tahun atau perguruan tinggi. Ini mengindikasikan

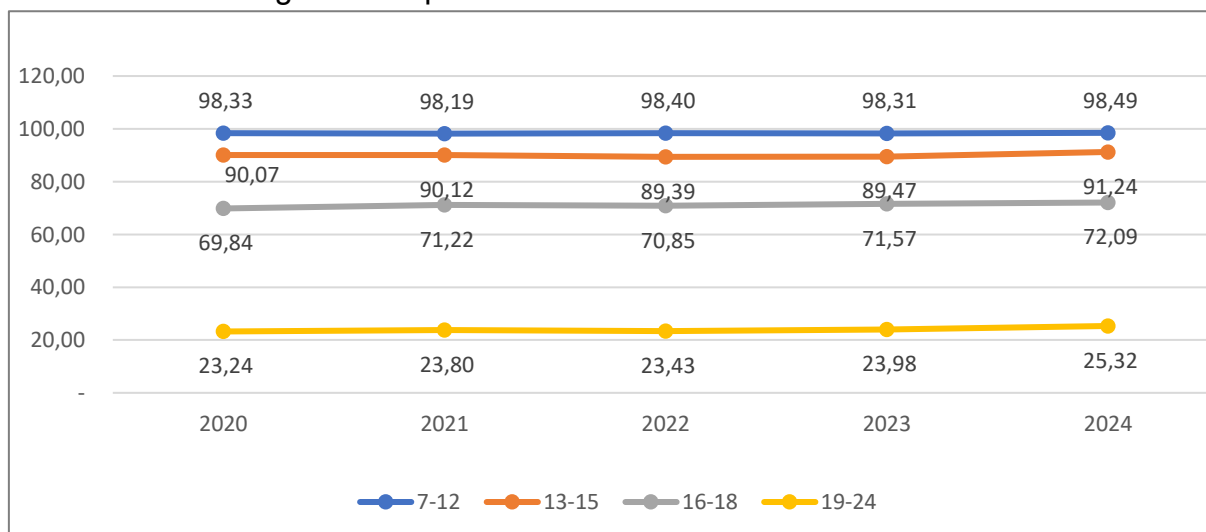
semakin tinggi jenjang Pendidikan maka Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang, ini terlihat dari selisih APS jenjang Pendidikan SD berbanding jenjang Perguruan tinggi yang selisih hingga 72,09 persen, berarti peluang anak usia 7–12 Tahun untuk melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 28 persen. Data dari tabel di bawah juga menunjukkan terjadi selisih yang cukup besar antara jenjang SMP dan SMA yang berarti menunjukkan tingginya anak putus sekolah di jenjang tersebut. Adapun faktor penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak sekolah yang jauh, kemiskinan dan pernikahan dini.

Tabel 2.33 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	7-12	13-15	16-18	19-24
2024	98,49	91,24	72,09	25,32
2023	98,31	89,47	71,57	23,98
2022	98,40	89,39	70,85	23,43
2021	98,19	90,12	71,22	23,80
2020	98,33	90,07	69,84	23,24

Sumber: BPS, bps.go.id diakses Tahun 2025

Grafik 2.68 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, bps.go.id diakses Tahun 2025

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan dasar dan menengah.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah karena jumlah sekolah menjadi

kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Berdasarkan Neraca pendidikan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Tahun 2024 ketersediaan satuan Pendidikan di jenjang pendidikan dasar semakin Tahun semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari jumlah satuan Pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA.

Tabel 2.34 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	172	19.905	2.323	8,57	115,73
Polewali Mandar	333	42.369	3.839	11,04	127,23
Mamasa	260	15.808	3.174	4,98	60,80
Mamuju	311	31.856	3.044	10,47	102,43
Pasangkayu	136	18.849	1.472	12,81	138,60
Mamuju Tengah	116	14.660	1.308	11,21	126,38
Sulawesi Barat	1.328	143.447	15.160	9,46	108,02

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel di atas menggambarkan rasio murid dengan ketersediaan sekolah SD pada lima kabupaten masih cukup tersedia kecuali di Kabupaten Mamasa. Kondisi ini disebabkan jumlah sekolah yang tersedia di jenjang SD berada hampir di setiap desa, ketersediaan sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor tingginya angka Angka Partisipasi Sekolah di jenjang sekolah Dasar.

Tabel 2.35 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	40	6.691	868	7,71	167,28
Polewali Mandar	85	15.071	1.519	9,92	177,31
Mamasa	101	7.952	1.358	5,86	78,73
Mamuju	65	10.224	930	10,99	157,29
Pasangkayu	54	7.086	668	10,61	131,22
Mamuju Tengah	37	4.514	547	8,25	122,00
Sulawesi Barat	382	51.538	5.890	8,75	134,92

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Pada jenjang sekolah menengah pertama rasio murid dan sekolah menunjukkan rasio yang cukup tinggi yaitu sebesar 177,31 untuk Tahun 2024 ini berarti jumlah sekolah berbanding murid belum mencukupi. Rendahnya APS SMP di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sekolah, sehingga dari jumlah murid SD sebanyak 143.447 yang melanjutkan di tingkat SMP hanya sebanyak 91.909. Olehnya itu pemerintah berupaya menaikkan akses masyarakat terhadap Pendidikan menengah pertama dengan membangun satuan Pendidikan dan penambahan ruang kelas baru. Dalam 5 Tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah

satuan pendidikan maupun ruang kelas baru pada jenjang SMP. Pada Tahun 2023 jumlah SMP hanya sebanyak 378 Di Tahun 2024 jumlahnya meningkat sebanyak 382. Penambahan tersebut tentu saja berkontribusi pada peningkatan APS SMP di Sulawesi Barat.

Tabel 2.36 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	16	4.525	472	9,59	282,81
Polewali Mandar	28	7.832	737	10,63	279,71
Mamasa	36	3.508	498	7,04	97,44
Mamuju	21	4.047	432	9,37	192,71
Pasangkayu	15	2.361	250	9,44	157,40
Mamuju Tengah	12	1.273	160	7,96	106,08
Sulawesi Barat	128	23.546	2.549	9,24	183,95

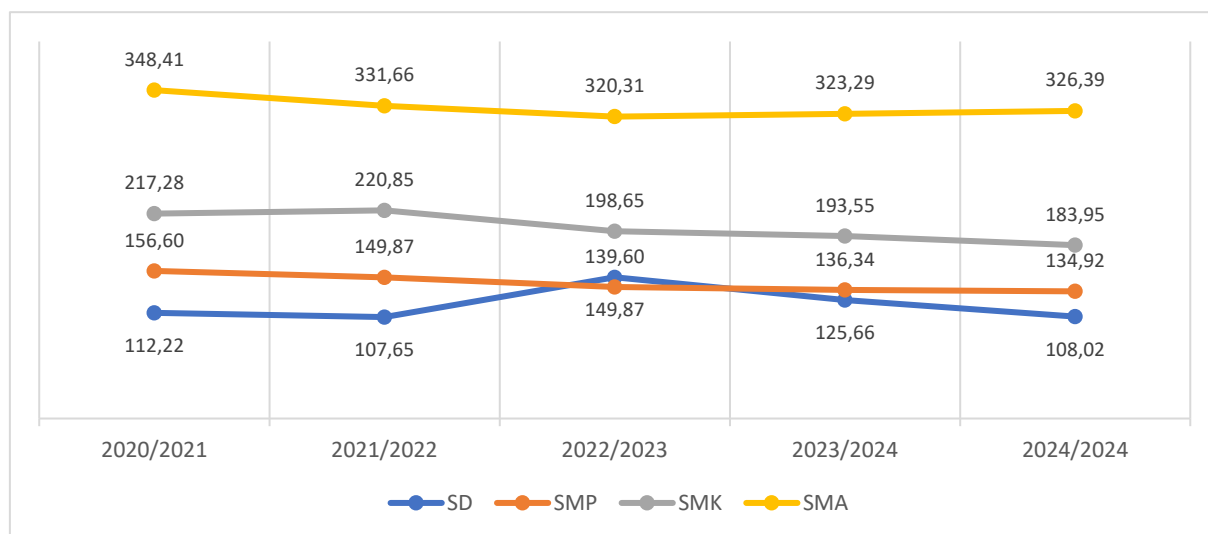
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.37 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2024/2025)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	7	4.112	311	13,22	587,43
Polewali Mandar	17	8.591	642	13,38	505,35
Mamasa	22	3.762	436	8,63	171,00
Mamuju	23	6.661	509	13,09	289,61
Pasangkayu	13	4.142	335	12,36	318,62
Mamuju Tengah	11	3.136	247	12,70	285,09
Sulawesi Barat	93	30.354	2.480	12,24	326,39

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Grafik 2.69 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2020/2021–2024/2025



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik di atas Rasio kebutuhan sekolah berbanding murid di jenjang SMA/SMK masih perlu ditingkatkan, terutama di level SMA di mana rasio murid berbanding sekolah di atas 326,39 persen. Tingginya minat siswa bersekolah di SMA tidak berbanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Sebaliknya SMK dengan jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu sebesar 128 mampu menampung sebanyak 23.546 siswa.

Selain SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Barat di sektor pendidikan, SLB juga merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Berdasarkan data neraca Pendidikan Tahun 2020 jumlah SLB sebanyak 25 sekolah menampung 1,308 peserta didik. Tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat bukan hanya disebabkan oleh pernikahan dini tetapi juga banyak disumbang oleh anak disabilitas. Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak disabilitas karena malu dan keterbatasan sarana dan prasarana SLB menjadi salah satu penyebab banyak anak disabilitas tidak mendapatkan hak Pendidikan mereka.

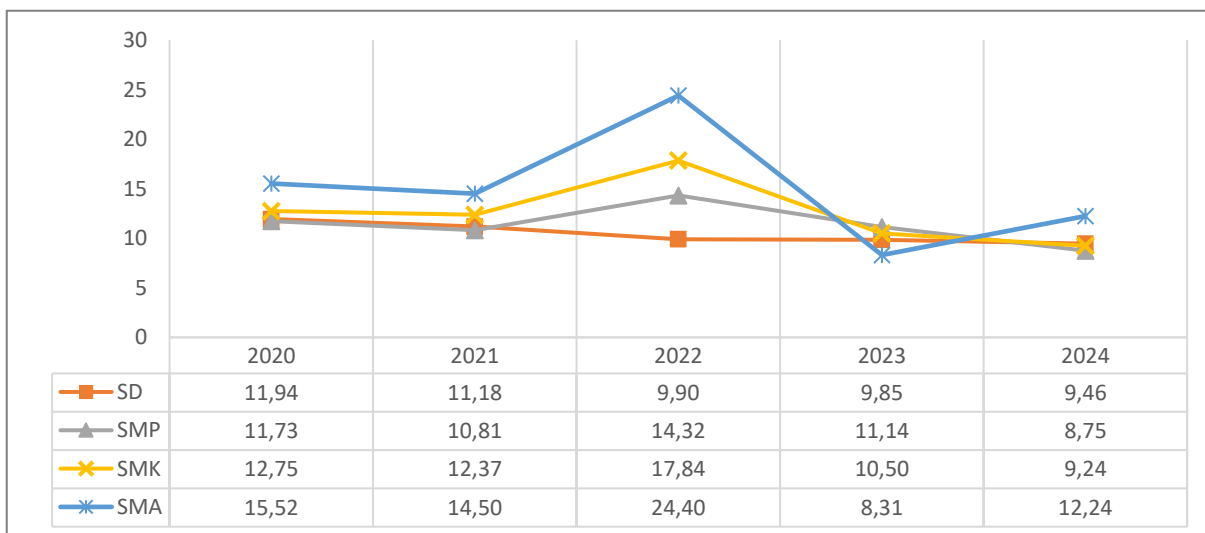
e. Rasio Murid Per Guru

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidik. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan data neraca Pendidikan Tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang Pendidikan dasar dan menengah cukup berimbang. Untuk jenjang Pendidikan SD rasio guru dan murid berbanding 1 : 13, SMP 1 : 13 , SMA 1 : 30 , SMK 1 : 13 dan SLB 1 : 5. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio ketersediaan guru di Sulawesi Barat cukup baik . Akan tetapi Sebagian besar guru terutama di jenjang menengah

lebih banyak diajar oleh tenaga GTT. Sulawesi Barat kekurangan guru PNS terutama di jenjang menengah dengan rasio 1 : 58. Artinya dalam 1 guru PNS mengajar 58 siswa, padahal berdasarkan PP N0 74 Tahun 2008 perbandingan guru yang mengajar di jenjang SMA adalah 1 : 20 dan SMK adalah 1 : 15. Untuk menutupi kekurangan guru maka Sebagian sekolah merekrut tenaga GTT. Dalam lima Tahun ke depan Sulawesi Barat akan mengalami kekurangan guru di setiap jenjang disebabkan Sebagian guru yang berstatus PNS akan pensiun. Sebagai gambaran kekurangan guru di jenjang SD sebanyak 170 guru, SMP sebanyak 1867, SMA sebanyak 368 guru dan SMK sebanyak 1377 sedangkan yang akan pensiun dalam lima Tahun diantaranya SD sebanyak 873, SMP sebanyak 246, SMA sebanyak 81 dan SMK sebanyak 41. Olehnya itu kebijakan pemerintah dengan merekrut tenaga PPPK akan sangat membantu menutupi kekurangan guru di Sulawesi Barat dan melalui pelatihan dan Pendidikan yang intens yang dilakukan akan membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Grafik 2.70 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2020/2021–2024/2025



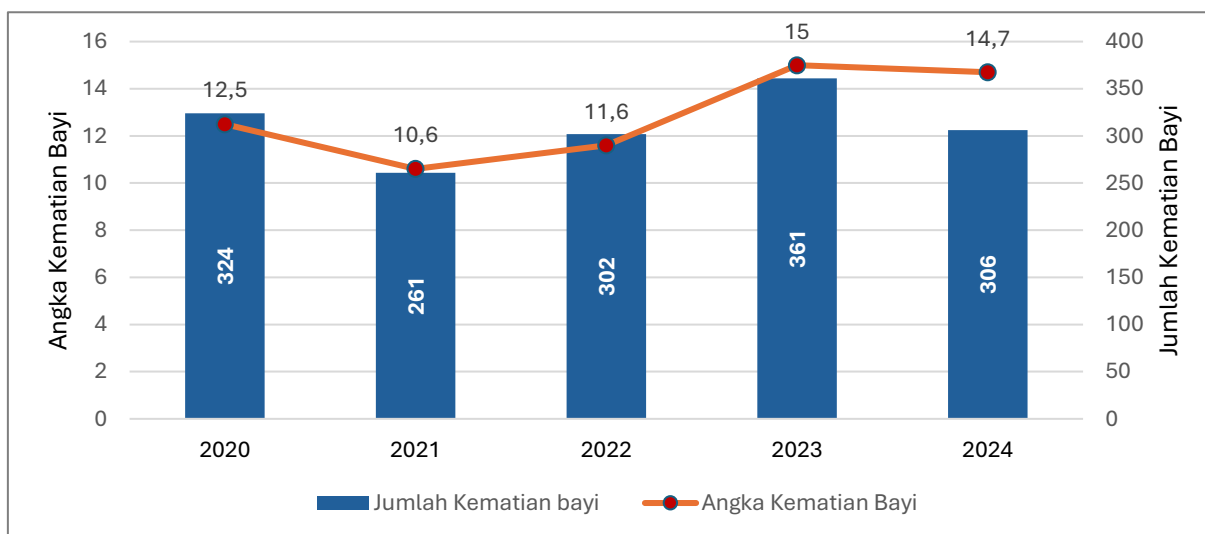
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

2.4.5.2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Indikator angka kematian bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam melihat kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian. Gambaran perkembangan angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh Tahun terakhir. Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.71 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2020–2024



Sumber: Buku Data Statistik Sektorial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

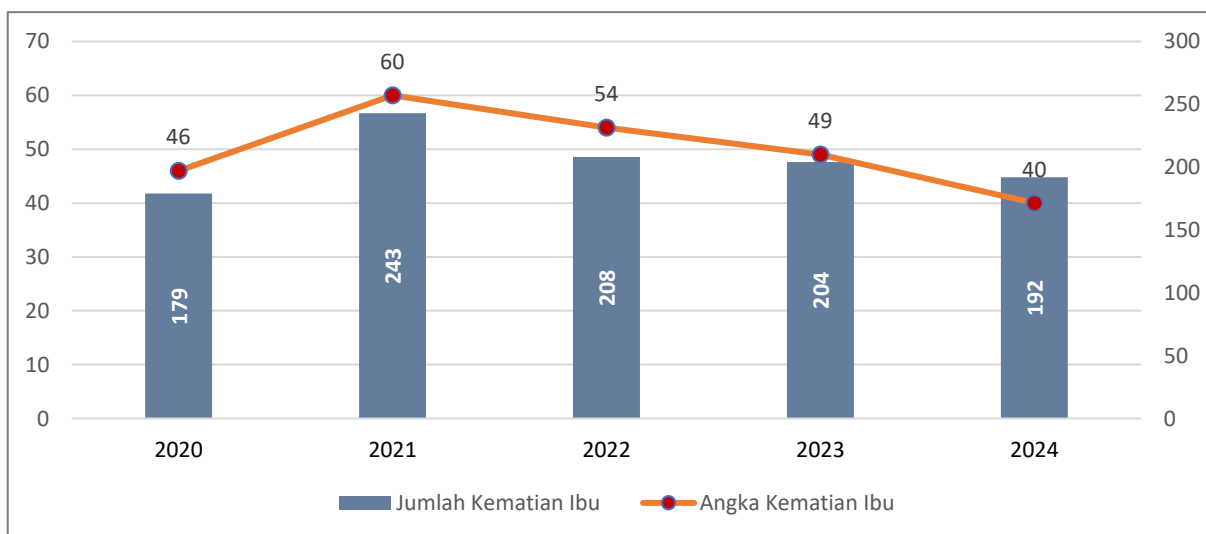
Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 sebesar 12,5/1000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 10,6/1000 Kelahiran hidup namun kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 menjadi 15/1000 kelahiran hidup hingga di Tahun 2024 menjadi 14,7/1000. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 324 bayi meninggal menjadi 306 bayi meninggal pada Tahun 2024.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (still birth) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

Grafik 2.72 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024



Sumber: Buku Data Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu dalam beberapa lima Tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap Tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2020 angka kematian ibu di Sulawesi Barat dan mengalami fluktuasi hingga Tahun 2024. Dalam lima Tahun terakhir angka kematian Ibu tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 243/100.000 sedangkan angka kematian Ibu terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 179/100.000, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.

Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada Tahun 2020 sebesar 46 kasus, naik menjadi 60 kasus di Tahun 2021 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 54 kasus, kembali turun pada Tahun 2023 menjadi sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 40 kasus di Tahun 2024.

c. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

Tabel 2.38 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2024

Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	12
Rumah Sakit Bersalin	0
Poliklinik	18
Puskesmas	100
Puskesmas Pembantu	344
Apotek	98
Posyandu	2047 (2023)

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025 Dinkes Prov. Sulbar 2025

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada Tahun 2024, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 12 Rumah Sakit. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 100, Posyandu sebanyak 2.047. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Tabel 2.39 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Jumlah
Tenaga Kesehatan Lingkungan	228
Tenaga Gizi	343
Ahli Teknologi Laboratorium	235
Tenaga Kesehatan Masyarakat	594
Apotek dan Kefarmasian	539
Bidan	3.709
Perawat	3.732
Dokter Gigi	106
Dokter	323

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada Tahun 2023, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 323 orang dan 106 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 3.709 orang, perawat sebanyak 3.732 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 539 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2023

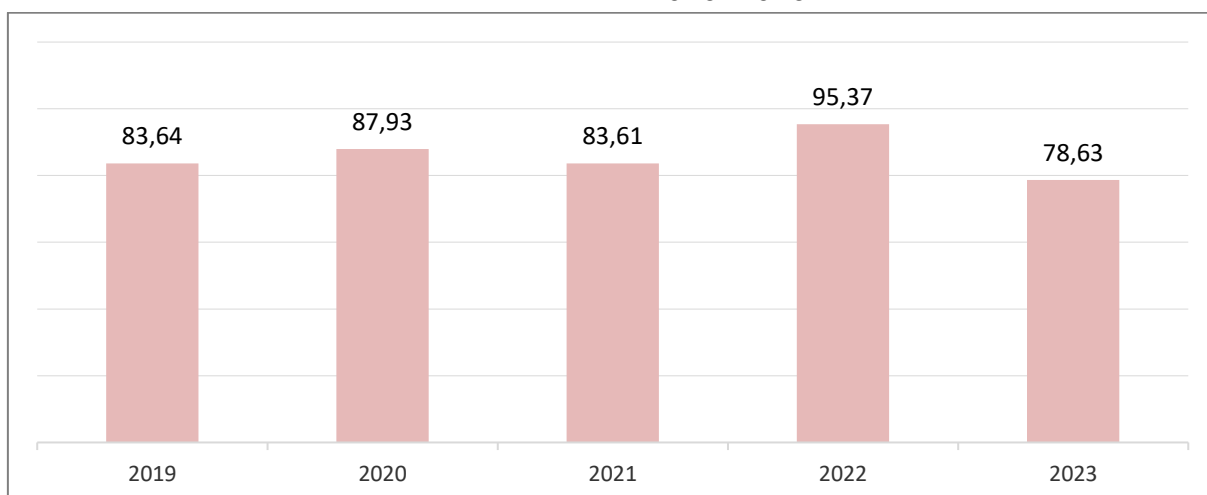
Jumlah Fasyankes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kes-Mas	Kes-Ling	Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
103	22,0	7,2	254,5	252,9	23,3	40,5	15,5	23,4	16,0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

d. **Kepesertaan Jaminan Kesehatan**

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada Tahun 2019 mencapai 83,64 persen mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2023 sebesar 78,63 persen.

Grafik 2.73 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2019–2023



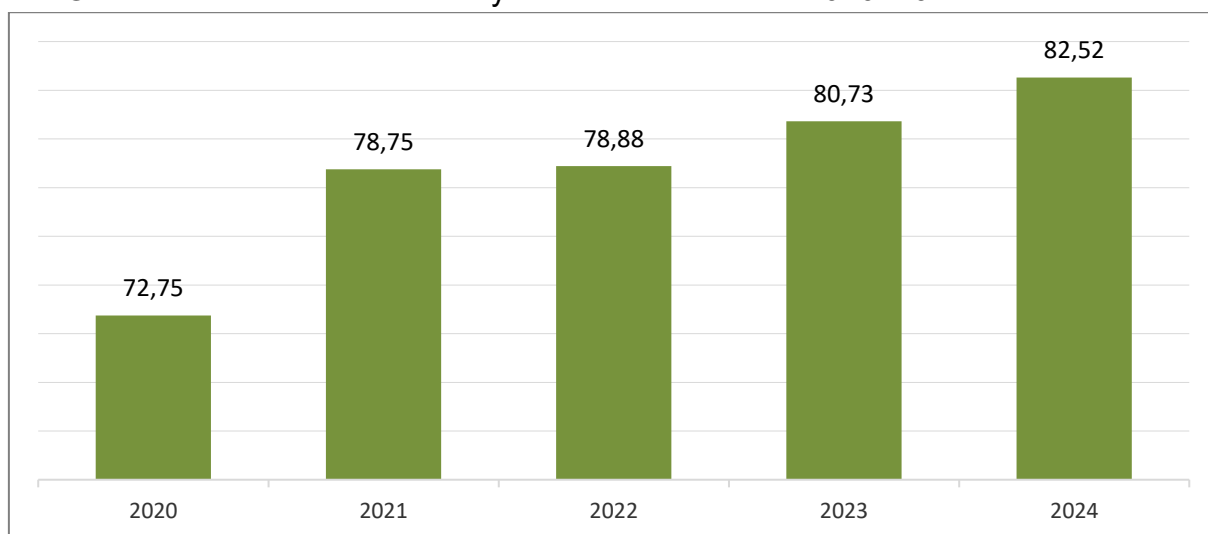
Ket: Target Nasional Pada Tahun 2019 telah UHC = 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

e. **Akses Sanitasi Layak**

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020 akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 72,75 persen mengalami peningkatan menjadi 78,75 persen di Tahun 2021 kemudian meningkat secara pada Tahun 2023 menjadi sebesar 80,73 persen dan di Tahun 2024 berada pada angka 82,52 persen. Meskipun demikian, pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat yaitu sebesar 100 persen.

Grafik 2.74 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.41 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2019–2023

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelangsungan Hidup bayi	987,40	988,2	985,07	990,54	990,7
Persentase balita gizi Buruk (%)			24,7	19,00	18,10
Rasio Posyandu Per Satuan balita (balita/posyandu)	13	13	16,36	16,36	13
Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk (penduduk/puskesmas/poliklinik)	0,60	0,60	0,31	0,60	0,60
Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan Penduduk (Penduduk/dokter)	0,16	0,16	0,23	0,31	0,16
Rasio tenaga Medis per satuan Penduduk (Penduduk/tenaga medis)	0,16	0,16	0,23	0,31	0,16
cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	77,5	66,9	71,83	72	69,9
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	81,4	76,8	80,44	81,44	78,98
Cakupan Desa/Kelurahan universal Child Immunization (UCI)	81,4	76,8	78,43	78,57	78,98
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	N/A	N/A	76	76	89,17
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	N/A	N/A	25	30	27,32
Cakupan Kunjungan bayi	N/A	N/A	86,98	88	88,31
Cakupan Puskesmas	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
Cakupan Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	37
Angka Kematian Bayi (%)	12,6	11,8	14,93	12,4	9,3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

2.4.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

a. Sub Urusan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:

- a. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- b. Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
- c. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.42 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
Kabupaten Mamasa	
DI. Aralle	2.330
DI. Mambi	2.728
DI. Messawa	1.562
DI. Pana	1.334
DI. Rantebulahan Timur	1.400
DI. Tandukkalua	2.170
Kabupaten Mamuju	
DI. Papalang - Sampaga	2.245
Kabupaten Mamuju Tengah	
DI. Tobadak	1.880

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
Kabupaten Pasangkayu	
DI. Bantalaka	1.200
Kabupaten Polewali Mandar	
DI. Lakejo	1.265
DI. Tandung	1.000
Sulawesi Barat 2023	19.114

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015

Tabel 2.43 Panjang Dan Kondisi Irigasi Teknis Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No	Kabupaten	Primer		Sekunder		Tersier	
		Baik	Jumlah	Baik	Jumlah	Baik	Jumlah
1	Mamuju	33	58	2.055	2.605	0	0
2	Majene	0	0	0	0	0	0
3	Polewali Mandar	320	400	7.217	7.317	36.260	76.520
4	Mamasa	97	117	919	964	0	0
5	Pasangkayu	1.570	1.600	3.972	4.407	0	0
6	Mamuju Tengah	54	54	2.397	2.397	0	0
	Sulawesi Barat	2.074	2.229	16.560	17.690	36.260	76.520

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa.

b. Sub Urusan Keciptakarya

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2023 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan Tahun sebelumnya.

Tabel 2.44 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Ledeng	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	5,131	13,25	51,19	7,55	NA
Polewali Mandar	6,56	25,32	22,88	18,19	3,181
Mamasa	7,15	1,481	NA	NA	2,951
Mamuju	10,97	12,79	29,75	17,64	3,96
Pasangkayu	NA	13,44	55,26	19,65	2,441
Mamuju Tengah	8,17	17,81	40,33	13,10	7,20
Sulawesi Barat	6,75	15,95	31,13	14,43	3,29

Lanjutan Tabel di atas

Kabupaten	Mata Air Terlindung	Mata Air tak Terlindung	Jumlah
Majene	21,97	NA	100,00
Polewali Mandar	11,09	12,79	100,00
Mamasa	27,44	60,35	100,00
Mamuju	14,68	10,22	100,00
Pasangkayu	4,71	4,041	100,00
Mamuju Tengah	5,73	7,66	100,00
Sulawesi Barat	13,63	14,81	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Jumlah
Majene	86,15	4,18	0,11	4,33	5,23	100,00
Polewali Mandar	83,51	6,99	2,46	0,86	6,19	100,00
Mamasa	73,84	3,68	7,02	8,48	6,97	100,00
Mamuju	82,55	4,77	2,91	-	9,77	100,00
Pasangkayu	81,79	6,91	1,18	2,55	7,57	100,00
Mamuju Tengah	89,69	5,11	1,13	-	4,07	100,00
Sulawesi Barat	83,36	5,04	2,07	2,80	6,74	100,00

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, di akses Tahun 2025

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2023, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 83,36 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.

c. Sub Urusan Jalan

Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir Tahun 2023 dengan panjang 528,31 km, di mana terdapat 45,84 persen dalam kondisi mantap, dan 54,16 persen dalam kondisi tidak mantap.

Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Sulawesi Barat, terutama infrastruktur Jalan dan konektivitas karena suatu infrastruktur diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing dalam upaya meningkatkan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

Tabel 2.46 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (km)

Kabupaten	Panjang Jalan/Kewangan			
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Majene	104,39	60,46	625,21	788,97
Polewali Mandar	90,67	114,61	922,26	1.126,65
Mamasa	126,25	94,79	425,90	696,29
Mamuju	194,83	211,22	526,17	886,76
Pasangkayu	155,13	22,05	1.410,11	1.577,40
Mamuju Tengah	96,90	25,20	442,18	572,09
Sulawesi Barat	768,17	528,33	4.351,83	5.648,16

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.47 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2024

No	No Ruas			Nama Ruas	Panjang (KM)		JKP-1
					Panjang Ruas	JAP	
1	1			Surumana (BTS prov. Sulteng) - Pasangkayu	51,53	51,53	
2	2			Pasangkayu - Baras	55,03	55,03	
3	3			Baras - Karossa	48,57	48,57	
4	4			Karossa - Topoyo	55,00	55,00	
5	5			Topoyo - Tarailu	41,90	41,90	
6	6			Tarailu - Kalukku	43,90	43,90	
7	7			Kalukku - BTS. Kota Mamuju	30,04	30,04	
8	8			BTS. Kota Mamuju - BTS. Kota Majene	37,29	37,29	
9	8	15	K	Jln. Gatot Subroto (Mamuju)	1,31	1,31	
10	8	16	K	Jln.R.E. Martadinata (Mamuju)	1,30	1,30	
11	8	17	K	Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (mamuju)	0,92	0,92	
12	8	18	K	Jln. Martadinata	0,60	0,60	
13	8	19	K	Jln. Martadinata (akses Pelabuhan Penyeberangan Mamuju)	0,73	0,73	
14	8	20	K	Mamuju Arterial Road (Mamuju)	3,13	3,13	
15	8	21	K	Jln. Yos Sudarso (Mamuju)	1,08	1,08	
16	9			BTS. Kabupaten Mamuju - Tameroddo	51,34	51,34	
17	10			Tameroddo - BTS. Kota Majene	43,32	43,32	
18	10	11	K	Jln. Ahmad Yani (Majene)	3,87	3,87	
19	10	12	K	Jln. Gatot Subroto (Majene)	1,35	1,35	
20	11			BTS. Kota Majene - BTS Kota Polewali	43,25	43,25	
21	11	11	K	Jln. Sudirman (Majene)	2,37	2,37	
22	11	12	K	Jln. Hasanuddin (Majene)	2,14	2,14	
23	11	13	K	Jln. MR Moh. Yamin (Polewali)	2,82	2,82	
24	12			BTS Kota Polewali - BTS Prov Sulsel	14,30	14,30	
25	12	11	K	Jln. Andi Depu (Polewali)	3,48	3,48	

No	No Ruas			Nama Ruas	Panjang (KM)		JKP-1
					Panjang Ruas	JAP	
26	12	12	K	Jln. Teuku Umar (Polewali)	3,74	3,74	
27	12	13	K	Jln. Ahmad Yani (polewali)	1,79	1,79	
28	13			Kalukku - Salubatu	28,34		28,34
29	14			Salubatu - Mambi	44,27		44,27
30	15			Mambi - Malabo	26,05		26,05
31	16			malabo - Mamasa	12,90		12,90
32	17			Mamasa - Tabang (BTS. Prov Sulsel)	36,71		36,71
33	18			Malabo - Tabone	26,69		26,69
34	19			Tabone - Polewali	45,19		45,19
35	20			Akses Pelabuhan Belang-Belang	0,72	0,72	-
36	21			Akses Bandara Udara Tampa Padang	1,20	1,20	
Total Panjang Jalan Nasional Prov Sulbar					768,17	548,02	220,15

Sumber: Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satu fokusnya adalah jalan dan konektivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/688/Sulbar/X/2015 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 349,67 km, selain jalan provinsi, di Sulawesi Barat juga terdapat jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut tabel panjang jalan dan nama ruas jalan berdasarkan tingkat kewenangan pada setiap kabupaten di Sulawesi Barat:

Ketersediaan infrastruktur tentu saja harus didukung dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik atau mantap karena dengan demikian akan memaksimalkan fungsi dan daya ungkit terhadap pertumbuhan yang inklusif. Gambaran kondisi infrastruktur di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Mantap (Km)	687,79	687,77	701,09	718,78	699,27
Kondisi Mantap (%)	90,12	90,12	91,87	93,57	91,03
Kondisi Tidak Mantap (Km)	75,38	75,4	62,08	49,4	68,89
Kondisi Tidak Mantap (%)	9,88	9,88	8,13	6,43	8,97
Jumlah (Km)	763,17	763,17	763,17	768,17	768,17

Sumber: BPJN Sulawesi Barat, 2025

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020 sekitar 763,17 km, dengan kondisi mantap 687,79 km, dan kondisi tidak mantap 75,38 km. Kondisi mantap jalan nasional di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2024, dengan total mantap jalan sebesar 699,27 km atau 91,03 persen dari panjang total 768,17 Km dimana peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan panjang jalan yang disebabkan pengalihan kewenangan.

Tabel 2.49 Kondisi Jalan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Mantap (Km)	138,41	147,51	218,56	242,18	247,716
Kondisi Mantap (%)	39,58	42,18	41,37	45,84	46,89
Kondisi Tidak Mantap (Km)	211,26	202,16	309,75	286,13	279,29
Kondisi Tidak Mantap (%)	60,42	57,81	58,63	54,16	52,87
Jumlah (Km)	349,67	349,67	528,31	528,31	528,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2025

Kondisi jalan provinsi Tahun 2020 dengan kondisi Mantap sebesar 39,58 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat jika dilihat dari persentasenya sebesar 46,89 persen pada akhir Tahun 2024. Pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana panjang jalan dengan kondisi mantap sejauh 247,716 Km, sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penanganan terhadap infrastruktur jalan. Penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat yang Direhabilitasi dan Dipelihara Tahun 2020–2024

Tahun	Panjang Jalan Provinsi					
	Direhabilitasi/ direkonstruksi	Seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi	Persentase (%)	Dipelihara	Seharusnya dipelihara	Persentase (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
2020	9,80	40,16	24,40	9,70	255,54	3,80
2021	64,13	51,6	124,28	16,20	137,59	11,77
2022	9,41	64,47	14,59	17,20	137,59	12,50
2023	8,59	16,02	53,62	101,61	204,48	49,69
2024	7,04	16,03	43,92	115,39	245,43	47,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan jalan provinsi terus dilakukan setiap Tahunnya, meskipun besarnya fluktuatif namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun

2020 menjadi Tahun terberat bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, hal ini disebabkan dengan adanya wabah global yaitu pandemik corona virus yang melanda dunia. Hal tersebut mengakibatkan beban anggaran terfokus pada penanganan pandemik dan memaksa pembangunan sektoral dalam hal infrastruktur jalan juga terdampak sangat berat. Tabel berikut kita dapat melihat capaian kinerja pembangunan daerah sub bidang jalan. Berikut adalah kondisi ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Tabel 2.51 Kondisi ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

NO	NAMA RUAS JALAN PROVINSI	PANJANG JALAN PROVINSI (KM)	MANTAP JALAN PROVINSI (KM)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Ruas Jalan Salubatu - Bonehau	28,48	17,410
2	- Ruas Jalan Bonehau - Kalumpang	22,20	3,540
3	- Ruas Jalan Kalumpang - Batuisi	17,00	5,190
4	- Ruas Jalan Kalumpang - Bts. Luwu Utara	39,23	0,000
5	- Ruas Jalan Batuisi - Bts. Toraja	47,35	0,000
6	- Ruas Jl. Abd. Malik Pattana Endeng - Sumare (Rangas) – Bts. Tapalang Barat	20,60	16,540
7	- Ruas Jalan Tappalang Barat – Bts. Tapalang (desa Tappalang)	35,00	17.222
8	- Jl. Arteri depan Kantor Gubernur Sulbar – Simpang Empat Pelabuhan Fery Mamuju	1,35	1,350
9	- Ruas Jalan Salutambung - Urekang	36,46	18.775
10	- Ruas Jalan Pallang Pallang – Bts. Tibung	14,00	0,280
11	- Ruas Jalan Lombongan - Petabeang	10,00	1,220
12	- Ruas Jalan Lampa (Mapilli) - Matangnga	45,68	44,390
13	- Ruas Jalan Alu – Pao Pao (Kantor Desa)	6,00	5,657
14	- Ruas Jalan Tinambung - Alu	14,79	14,130
15	- Ruas Jalan Mapilli - Piriang	48,14	40,760
16	- Ruas Jalan Urekang - Mambi	16,00	0,255
17	- Ruas Jalan Matangnga - Keppe	31,58	8,500
18	- Ruas Jalan Tabone - Nosu	27,20	11,480
19	- Ruas Jalan Nosu - Pana	19,00	1,290
20	- Ruas Jalan Bandara Sumarorong	1,00	0,960
21	- Ruas Jalan Tikke - Bts. Sulteng	8,75	8,335
22	- Ruas Jalan Pelabuhan Pasangkayu	13,30	11.800
23	- Ruas Jalan Tobadak II – Gerbang Tobadak VIII	17,00	10.682
24	- Ruas Jalan Akses Pelabuhan Budong – Budong (Polohu – Babana – Pelabuhan)	8,20	7,950
	Total Panjang Jalan	528,31	247,716
	Panjang jalan kew. provinsi yang mantap ----- X 100%	247,716 ----- x 100%	
	Panjang jalan keseluruhan kew. provinsi	528,31	
	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2024	46,89%	

Sumber: Dinas PUPR Sulawesi Barat, Tahun 2025

d. Sub Urusan Penataan Ruang

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang mana setiap pemerintah kabupaten harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun RDTR nya. Adapun Progres revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait Penataan Ruang Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 2.52 Tabel Progres Penyusunan RTRW Kabupaten

NO	NAMA RTRW	DAERAH	TAHAPAN			KET.
			PK	REVISI	CATATAN	
1.	Perda No. 1 Tahun 2014	Sulawesi Barat	Tahun 2019	Dilaksanakan Tahun 2024	Direncanakan di Perdakan tahun 2025	Proses Revisi (Pemprov)
2	Perda Nomor 10 Tahun 2019 2019 - 2039	Mamuju	Dilaksanakan Tahun 2023	Dilaksanakan Tahun 2024	Surat Permohonan Revisi Akan Diajukan Di Tahun 2024	Proses Revisi (Pemkab)
3	Perda Nomor 12 Tahun 2012 2012 - 2032	Majene	-	-	Direncanakan Dianggarkan Di Tahun 2025	Belum Revisi (Pemkab)
4	Perda Nomor 2 Tahun 2013 2013 - 2033	Polewali Mandar	Sk Bupati No. 358 Thn 2018 Pelaksanaan & Tim Pk	Sk Bupati No. 494 Thn 2018 Rekom Hasil Pk	Revisi - Telah Mendapatkan Ba Fpr Prov. Namun Perlu Mendapatkan Ba Fpr Ulang	Proses Revisi (Pemkab & Pemprov)
5	Perda Nomor 1 Tahun 2015 2015 - 2035	Mamasa	Surat Bupati No. 188.7/257/Set/Iv/2021, Permohonan Pk Rtrw	Rekom Atr No. Pk.01/447-200/Ix/2021, Rekom Pk & Revisi Rtrw Mamasa	Telah Melaksanakan Konsultasi Publik li	Proses Revisi (Pemkab & Prov Sulbar)
6	Perda Nomor 1 Tahun 2014 2014 - 2034	Pasangkayu	Sk Bupati No. 92 Thn 2018 Pelaksanaan & Tim Pk	Sk Bupati No. 508 Thn 2018 Rekom Hasil Pk	Ditetapkan Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 24 Oktober 2024	Perda
7	Perda Nomor 3 Tahun 2017 2017 - 2037	Mamuju Tengah	Surat Bupati No. 1250/009.8/Iii/2022, Permohonan Revisi Rtrw	Rekom Atr No. Pk.01/297-200/Iv/2022, Rekom Pk & Revisi Rtrw Mateng	Telah Menyelesaikan Penyusunan Dokumen Matek Dan Draf Ranperda	Proses Revisi (Pemkab)

Sumber: Dinas PUPR Sulawesi Barat, Tahun 2025

Tabel 2.53 Tabel Progres Penyusunan RDTR

NO	NAMA RDTR	KABUPATEN	TAHAPAN			KET.
			TINGKAT KAB	TINGKAT PUSAT	CATATAN	
1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 - Kawasan Perkotaan Majene	Majene (Banggae - Banggae Timur)	-	-	Telah Disesuaikan Dengan Oss	Perda
2	Perbup Nomor 15 Tahun 2023 - Wilayah Perencanaan Mamuju	Mamuju (Mamuju - Simboro)	Surat Bupati No.: 009/667/iii/2023 Tgl 7 Maret 2023	Persub Nomor: Pb.05.01/516-200/iv/2023 Tanggal 27 April 2023	-	Perbup
3	Perbup Nomor 26 Tahun 2023 - Kawasan Perkotaan Tobadak	Mamuju Tengah (Topoyo - Tobadak)	Surat Bupati No.: 3231/009.8/V/2023 Tgl 12 Mei 2023	Persub Nomor: Pb.05.01/1091-200/vii/2023 Tanggal 05 Juli 2023	-	Perbup
4	Kawasan Perkotaan Mamasa	Mamasa	Penyusunan Dokumen	-	Telah Menyelesaikan Penyusunan Ranperbup Serta Matek, Telah Melaksanakan Validasi Klhs Rdtr	Pemkab
5	Kawasan Perkotaan Polewali	Polewali Mandar	-	-	Telah Disusun Tahun 2013, Perlu Penyusunan Dokumen Baru	Pemkab
6	Kawasan Perkotaan Wonomulyo	Polewali Mandar	-	-	Telah Disusun Tahun 2014, Perlu Penyusunan Dokumen Baru	Pemkab
7	Kawasan Perkotaan Campalagian	Polewali Mandar	-	-	Telah Disusun Tahun 2014, Perlu Penyusunan Dokumen Baru	Pemkab
9	Kawasan Perkotaan Pasangkayu	Pasangkayu	-	-	Telah Melaksanakan Konsultasi Publik I Dan li Dokumen Rdtr, Dan Telah Menyelesaikan Dokumen Klhs Rdtr	Pemkab
10	Kawasan Perkotaan Tikke Raya	Pasangkayu	-	-	Telah Melaksanakan Konsultasi Publik I Dokumen Rdtr Dan Konsultasi Publik I Dokumen Klhs Rdtr	Pemkab
8	Kawasan Perkotaan Tinambung	Polewali Mandar	Rencana Baru	-	-	Pemkab
11	Perbup Nomor 8 Tahun 2024 - Kawasan Perkotaan Bulu Taba	Pasangkayu	Surat Bupati Nomor 103/91/Dpupr Tanggal 15 Januari 2024	Surat Kemen Atr Nomor 12/Und-200.Pb.01/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024	Disusun Oleh Kementerian Atr Bersama Pemkab. Pasangkayu	Perbup

NO	NAMA RDTR	KABUPATEN	TAHAPAN			KET.
			TINGKAT KAB	TINGKAT PUSAT	CATATAN	
12	Kawasan Perkotaan Baru Mambi	Mamasa	-	-	-	-
13	Perbup Nomor 9 Tahun 2024 - Kawasan Perkotaan Kalumpang	Mamuju	Surat Bupati Nomor 650/378/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Surat Kemen Atr Nomor 12/Und-200.Pb.01/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024	Disusun Oleh Kementerian Atr Bersama Pemkab. Mamuju	Perbup
14	Kawasan Pesisir Barat Pulau Karampuang	Mamuju	Rencana Baru	-	-	-
15	Kawasan Perkotaan Hinterland Mamuju	Mamuju	Rencana Baru	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Sulawesi Barat, Tahun 2025

e. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Bidang jasa konstruksi merupakan bagian strategis yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan program pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai sektor yang menunjang pembangunan infrastruktur, jasa konstruksi memainkan peran vital dalam mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan dan program jasa konstruksi tidak hanya memastikan penyelesaian proyek infrastruktur secara tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi tenaga konstruksi lokal. Komitmen ini ditujukan untuk menciptakan pembangunan berkeadilan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Tabel 2.54 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Pelatihan Ahli

No	Tahun	Jumlah Tenaga Ahli	Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli di Wilayah Provinsi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi
1	2020	394	1.500	26,27%
2	2021	424	1.500	28,27%
3	2022	484	1.500	32,27%
4	2023	529	1.184	44,67%
5	2024	682	1.184	57,60%

Sumber: Dinas PUPR Sulawesi Barat, Tahun 2025

2.4.5.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak,

karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni “Rumah yang Layak”, terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya.

Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap Tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah, menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya. Rumah atau tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan Backlog rumah.

Tabel 2.55 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Milik	Jumlah Rumah Tangga Milik	Backlog Kepemilikan Rumah
	(Jiwa)	(unit)	(%)	(unit)	(unit)
2020	1.419.229	315.443	87,56	276.202	39.241
2021	1.436.842	349.375	89,72	313.459	35.916
2022	1.458.606	333.038	92,51	308.093	24.945
2023	1.481.077	345.369	93,35	322.427	22.969
2024	1.525.335	347.213	94,20	327.075	20.138

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.56 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2024

Tahun	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas Lainnya	Jumlah
Majene	95,25	NA	4,52	NA	100,00
Polewali Mandar	97,59	NA	2,171	–	100,00
Mamasa	91,84	NA	7,26	NA	100,00
Mamuju	94,46	0,761	3,68	1,101	100,00
Pasangkayu	86,33	1,421	8,11	4,13	100,00
Mamuju Tengah	95,67	NA	3,94	NA	100,00
Sulawesi Barat	94,20	0,51	4,38	0,91	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.57 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit Rumah)	Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	Persentase Rumah Layak Huni (%)
2020	1,419,229	315.443	159.772	155.671	50,65
2021	1,369,842	349.375	200.052	149.323	57,26
2022	1,458,606	333.038	184.403	148.635	55,37
2023	1.481.077	345.396	204.750	140.645	59,28
2024	1.525.335	347.213	208.154	139.059	59,95

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2025

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di Tahun 2024 mencapai 59,95 persen Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat tercapai. Rumah Layak huni mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta pasca gempa bumi di Sulawesi Barat maka di Tahun 2022 mengalami lonjakan penurunan yang sangat signifikan.

Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	77,78	94,96	94,59	96,50	98,50
Polewali Mandar	87,64	83,47	86,18	84,67	83,60
Mamasa	58,74	32,42	35,07	31,47	36,70
Mamuju	72,66	81,06	82,14	85,87	84,36
Pasangkayu	78,29	88,56	86,81	89,19	87,28
Mamuju Tengah	72,64	77,42	78,23	77,88	81,48
Sulawesi Barat	77,07	76,67	78,98	79,86	80,14

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Sejak Tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 mencapai 77,07 persen menjadi 80,14 persen di Tahun 2024.

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	86,66	79,48	83,26	83,45	84,52
Polewali Mandar	79,63	85,73	83,61	85,87	87,73
Mamasa	26,00	64,30	64,73	66,11	67,57
Mamuju	80,70	80,43	74,58	78,51	81,46
Pasangkayu	75,93	79,15	81,17	80,63	83,63
Mamuju Tengah	72,05	81,21	83,63	82,84	82,89
Sulawesi Barat	72,75	78,75	78,88	80,73	82,52

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Surat Keputusan Bupati dari 6 (enam) Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, status per 31 Desember 2024, Luas Kawasan kumuh di Sulawesi Barat adalah seluas 714,16 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.60 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Jumlah Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Majene	14	187,13
2	Polewali Mandar	18	160,54
3	Mamasa	17	193,01
4	Mamuju	7	65,68
5	Mamuju Tengah	5	75,17
6	Pasangkayu	3	32,63
Total Sulbar		64	714,16

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Dari 73 Lokasi Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud diatas, kawasan kumuh yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (luas diatas 10 – dibawah 15 Ha) adalah sebanyak 11 Kawasan, dengan total luas 128,55 Ha, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2.61 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Uraian	<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	Total
1	Luas (Ha)	164,81	128,55	420,53	714,16
2	Jumlah Kawasan	35	11	18	64

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Tabel 2.62 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Kawasan 10 -15 Ha	
		Jumlah	Luas (Ha)
1	Majene	2	26,09
2	Polewali Mandar	2	23,46
3	Mamasa	2	23,17
4	Mamuju	3	33,01
5	Mamuju Tengah	1	10,26
6	Pasangkayu	1	12,56
Total Sulbar		11	128,55

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat telah dan sedang dilaksanakan, baik melalui pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun Loan melalui Program-program Nasional, seperti Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kementerian PUPR. Namun demikian, dari 6 (enam) Kabupaten tersebut, baru terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang secara rutin melakukan evaluasi perhitungan capaian penanganan permukiman kumuh setiap Tahun. Kabupaten tersebut adalah Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa.

Dari Total 703,63 Ha Luas Kawasan kumuh di 3 Kabupaten tersebut pada Akhir Tahun 2021, berdasarkan Perhitungan Pengurangan Kumuh yang menerapkan instrumen yang sama (Permen PUPR No. 14/PRT/M/ 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan hasil pengurangan sebanyak 109,51 Ha. Dengan demikian capaian pengurangan kumuh di 3 Kabupaten dimaksud baru mencapai 16 persen, yang jika digabung menjadi capaian Pengurangan Kawasan kumuh Provinsi Sulawesi Barat, baru mencapai 12 persen. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, di tengah pertumbuhan permukiman yang semakin tinggi, terutama di Kawasan Permukiman Perkotaan.

Tabel 2.63 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Uraian	<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	Total
Luas Kumuh Awal (Ha)	148.41	178.04	608.76	935.21
Luas Kumuh Akhir (Ha)	164,81	128,55	420,53	714,16
Capaian Pengurangan Kumuh SULBAR				221,05

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Selain capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah, dari kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah berjalan, dari 7 (tujuh) Aspek kekumuhan, kegiatan masih dominan pada penanganan aspek Jalan lingkungan dan Drainase Lingkungan, sedangkan 5 (lima) lainnya, seperti Kondisi Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Bangunan Gedung dan Proteksi Kebakaran masih belum tertangani dengan maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh kurang terlihat merubah wajah kawasan permukiman, karena kegiatan tidak dilaksanakan secara tuntas pada suatu kawasan tertentu pada semua aspek kekumuhan.

2.4.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Tabel 2.64 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2022–2024

Kabupaten	2022		2023		2024	
	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)
Majene	1094	8	1300	8	1286	8
Polewali Mandar	2454	16	3000	16	2724	16
Mamasa	1123	17	1400	17	1400	17
Mamuju	1514	11	2248	11	1672	11
Pasangkayu	437	12	1240	12	1240	12
Mamuju Tengah	714	5	1000	5	821	5

Kabupaten	2022		2023		2024	
	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)
SULAWESI BARAT	7336	69	10188	69	9143	69

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.65 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Polisi Pamong Praja	129	127	127	121	118
Jumlah Penduduk	1.419.229	1.506.307	1.540.772	1.460.753	1.451.830
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,91	0,84	0,82	0,83	0,81

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.66 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Diklat Satpol PP	50	59	64	30	0

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Pada Tahun 2024 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP.

Tabel 2.67 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	168	62	172	87	103
Jumlah Pelanggaran K3	168	62	172	88	107
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	99%	96%

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Bidang ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penegakan PERDA	17	23	146	152	136
- Jumlah penyelesaian penegakan perda	17	23	146	152	136
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	0,34%	0,34%	0,34%	0,32%	0,35%
- Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan))	58	58	58	55	60
- Luas Wilayah Kabupaten (Km2)	17062,64km	17062,64km	17062,64km	17075,21 km	17075,21 km
- Jumlah mobil pemadam kebakaran	0	0	0	0	
- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.419.229	1.506.307	1.540.772	1.460.753	1.451.830
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Wmk) Menurut Kabupaten Di Provinsi	89,83%	71,91%	67,06%	84,39%	94,79%
- Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	192	64	57	146	91
- Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	120	89	85	173	96
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	0	0	0	0	0

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.6. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

Tabel 2.69 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat

No	Data PPKS	Populasi Tahun 2023	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar (jiwa)	N/A	56	40	N/A	N/A	N/A
2	Anak Terlantar (jiwa)	449	1.390	320	234	1.676	120
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum (jiwa)	N/A	120	50	72	65	N/A
4	Anak Jalanan (jiwa)	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitas (jiwa)	N/A	N/A	145	N/A	269	N/A
6	Anak Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	N/A	120	50	72	65	N/A
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (jiwa)	N/A	120	50	72	65	N/A
8	Lanjut Usia Terlantar (jiwa)	944	1.015	595	600	6	60
9	Penyandang Disabilitas (jiwa)	1.419	198	3.519	325	30	98
10	Tuna Susila (jiwa)	50	N/A	N/A	45	1	35
11	Gelandangan (jiwa)	54	N/A	N/A	5	11	54
12	Pengemis (jiwa)	54	N/A	N/A	5	11	54
13	Pemulung (jiwa)	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kelompok Minoritas (jiwa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (jiwa)	N/A	15	5	N/A	N/A	N/A
16	Orang Dengan HIV/AIDS (jiwa)	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa)	N/A	30	40	N/A	N/A	N/A
18	Korban Trafficking (jiwa)	79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Data PPKS	Populasi Tahun 2023	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa)	24	10	10	N/A	5	24
21	Korban Bencana Alam (jiwa)	17.715	15.000	410	92.776	9.238	5.808
22	Korban Bencana Sosial (jiwa)	621	300	5.662	92.776	1.128	389
23	Perempuan Rawan Sosial (jiwa)	N/A	60	40	N/A	N/A	N/A
24	Fakir Miskin (KK)	261.765	1.500	71.591	97.628	97.856	164.931
25	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	N/A	50	50	N/A	N/A	N/A
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	N/A	60	30	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2024

Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format di atas tidak ada anggaran.

2.4.5.7. Urusan Ketenagakerjaan

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada keadaan Tahun 2024 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 358,03 ribu orang atau 46,34 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 129,67 ribu orang atau sekitar 17,11 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 121,75 ribu orang atau sekitar 16,07 persen.

Tabel 2.70 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama					
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Jumlah
Majene	26.677	5.483	14.837	12.104	19.910	79.011
Polewali Mandar	99.861	34.128	46.521	33.611	36.562	251.424
Mamasa	60.262	3.150	7.297	10.831	13.469	95.009
Mamuju	74.399	9.853	24.690	14.803	32.335	156.375
Pasangkayu	49.252	7.618	19.299	9.513	17.908	105.178
Mamuju Tengah	40.577	3.536	9.108	6.772	9.432	70.510
Sulawesi Barat	351.028	63.768	121.752	87.634	129.616	757.507

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

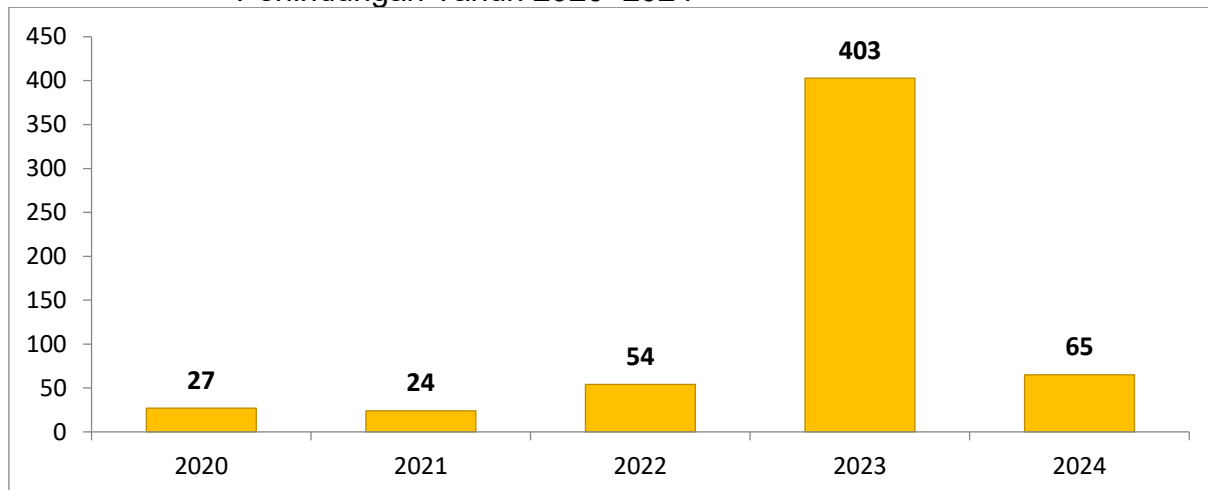
Tabel 2.71 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	497.049	505.226	514.488	542.178	552.383
Perempuan	494.674	503.425	512.139	527.920	537.728
Jumlah	991.723	1.008.651	1.026.627	1.070.098	1.090.111

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020 didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Sementara di tahun 2024 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 50,67 persen dibandingkan jenis kelamin perempuan sebesar 49,33 persen.

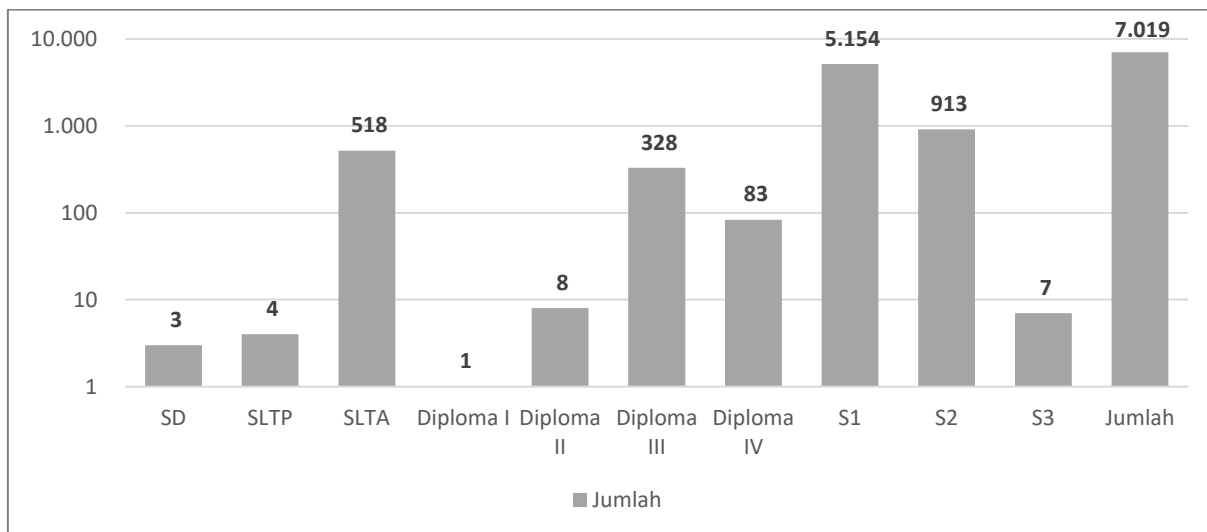
Grafik 2.75 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan dari Tahun 2020 sebanyak 27 Perusahaan meningkat menjadi 65 perusahaan pada Tahun 2024. Tidak terdapat Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan Pemda pada Tahun N dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Grafik 2.76 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025

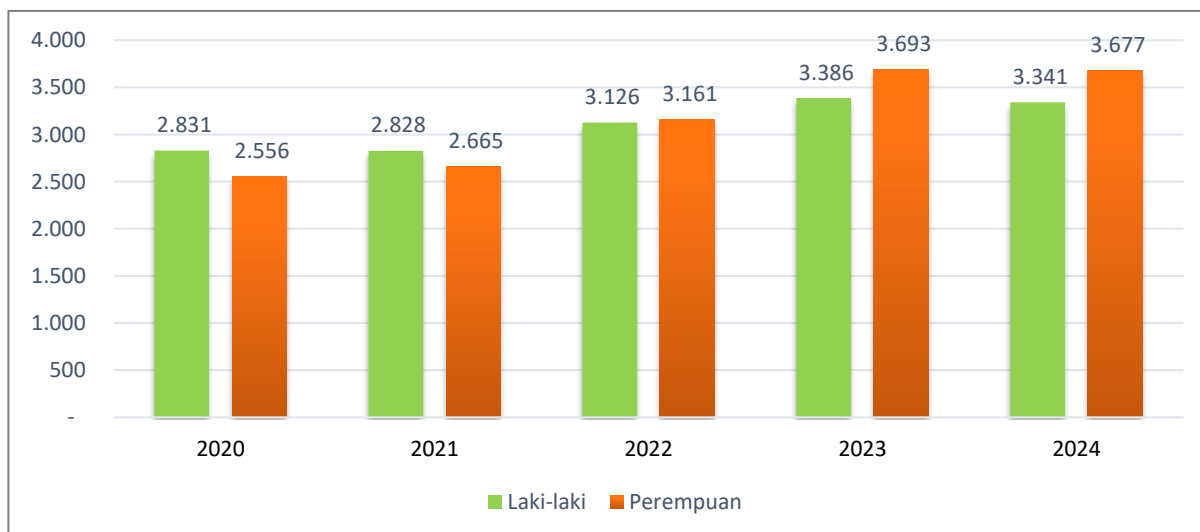
Jumlah total Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 7.019. Mayoritas PNS di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 merupakan lulusan universitas sebanyak 86,53 persen dari jumlah keseluruhan PNS.

2.4.5.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan Perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Untuk Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya perbedaan jumlah 0,04 persen pada Tahun 2019 dan 2020. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.77 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025

Berdasarkan Tabel di atas, Jumlah Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 sebesar 7.018 orang dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 3.341 dan Perempuan sebanyak 3.677. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 7.079 dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 3.386 dan Perempuan sebanyak 3.693 orang pada Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Jika melihat tren perkembangannya bahwa partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan terjadi peningkatan yang signifikan. Tren Perkembangan dimaksud adalah masyarakat pada umumnya sudah melihat partisipasi perempuan di kancah publik sudah mayoritas ada dan mampu melakukan perubahan yang memadai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan khususnya peningkatan peranan perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan melibatkan secara penuh baik holistic dan integrative dan dalam kesetaraan pembangunan.

b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Terlepas dari Peranan Perempuan dalam Penataan kesejahteraan sosial merupakan cara sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yaitu pemenuhan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Perempuan dan Laki-laki dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun Progres terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengukur IPG dan IDG adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup		Pengeluaran per Kapita		IPM	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Majene	9,59	9,31	13,55	14,14	61,05	64,82	13.417	9.779	71,72	68,25
Polewali Mandar	8,06	7,41	13,24	13,89	61,61	65,4	13.141	8.106	69,72	64,32
Mamasa	8,37	8,13	12,18	13,16	69,64	73,62	9.231	8.116	69,47	68,34
Mamuju	8,73	8,11	12,65	13,78	67,09	71,05	13.760	7.255	73,16	66,52
Pasangkayu	8,39	8,13	12,08	12,28	65,72	69,69	18.642	6.844	74,11	63,84
Mamuju Tengah	8,16	7,84	12,64	13,21	67,76	71,7	14.023	5.748	72,92	63,25
Sulbar	8,37	8,05	12,78	13,29	64,37	68,27	14.556	7.612	71,99	65,22

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id diakses pada Tahun 2025

Berdasarkan Data BPS Tahun 2023 bahwa Pencapaian Komponen IPM Tahun 2024 tercatat mengalami Peningkatan kecuali Komponen Pengeluaran per Kapita hanya disesuaikan. Untuk Angka Harapan Hidup yakni yang baru lahir di Tahun 2024 tercatat memiliki peluang Hidup hingga 71,03 Tahun lebih lama 0,27 Tahun dibandingkan Tahun 2023. Sementara Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Anak-anak yang pada Tahun 2024 berusia 7 Tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,89 Tahun lebih lama 0,01 Tahun dibandingkan Tahun 2023. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah yaitu Penduduk yang berusia 25 Tahun keatas pada Tahun 2024 secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,15 Tahun lebih lama 0,02 Tahun dibandingkan Tahun 2023. Untuk Tahun 2024 masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 10,21 juta rupiah per Tahun, naik 450 ribu dibandingkan Tahun 2023.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Perkembangan IDG di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dan masih mengalami perkembangan yang memadai antara Tahun 2020–2024 dimana di Tahun 2020 capaiannya adalah 65,92 persen menjadi 67,16 persen di Tahun 2024. Pencapaian IDG ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1). Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2). Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan 3). Sumbangan Pendapatan Perempuan. Di Tahun 2024, keterlibatan perempuan di parlemen/Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebesar 11,11 persen yang tidak sesuai target sebesar 30 persen. Perempuan sebagai tenaga profesional di Tahun 2024 sebesar 55,48 persen sedangkan sumbangan pendapatan perempuan di Tahun 2024 sebesar 37,66 persen. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 2.73 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Polewali Mandar	17,78	17,78	17,78	20,00	20,00
Mamasa	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33
Mamuju	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Pasangkayu	13,33	16,67	16,67	16,67	16,67
Mamuju Tengah	24,00	24,00	24,00	24,00	12,00
Sulawesi Barat	11,11	11,11	11,36	11,11	11,11

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, 2025, di akses Tahun 2025

Tabel 2.74 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	53,55	52,42	54,80	55,40	55,24
Polewali Mandar	57,01	60,35	59,36	47,49	55,53
Mamasa	47,60	47,63	54,43	50,53	50,81
Mamuju	56,42	51,04	51,80	49,29	53,47
Pasangkayu	46,54	55,42	53,48	56,38	62,33
Mamuju Tengah	52,05	49,45	51,64	51,31	61,60
Sulawesi Barat	53,26	53,65	54,82	50,90	55,48

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, 2025, di akses Tahun 2025

Tabel 2.75 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2020–2024

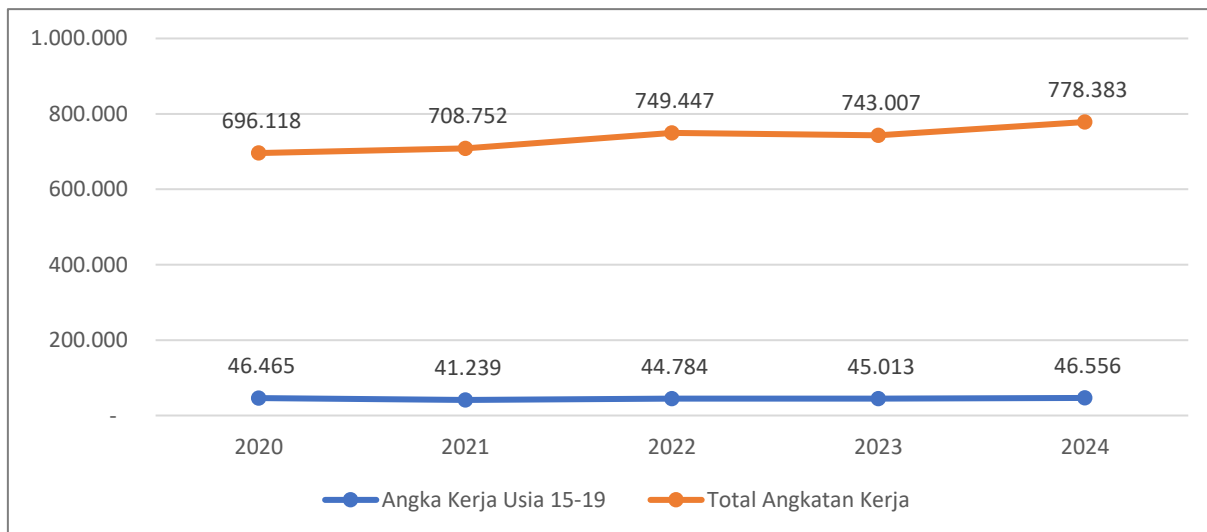
Kabupaten	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	39,47	39,50	38,84	41,15	42,13
Polewali Mandar	37,63	37,64	37,34	38,12	38,75
Mamasa	26,15	26,21	25,48	26,67	26,38
Mamuju	28,59	28,61	29,42	30,17	29,51
Pasangkayu	19,42	19,42	19,58	19,41	19,67
Mamuju Tengah	22,72	22,68	22,70	22,98	23,32
Sulawesi Barat	36,57	36,59	36,51	37,30	37,66

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, 2025, di akses Tahun 2025

c. Angkatan Kerja Di bawah Umur

Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar 46.465 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 46.556 jiwa dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur yang bekerja.

Grafik 2.78 Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



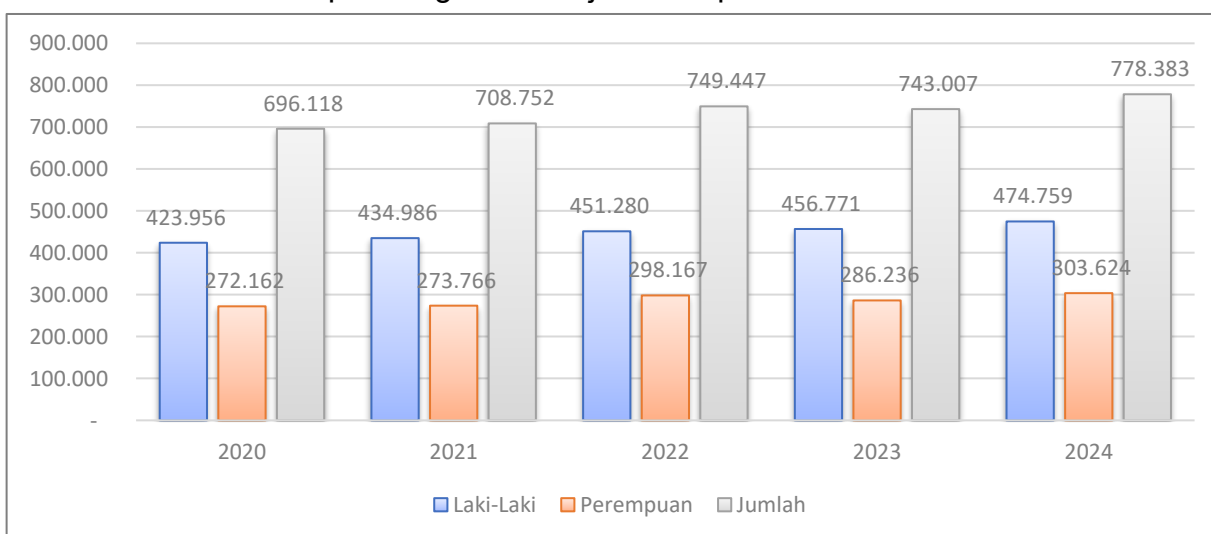
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengetahui gambaran penduduk secara ekonomi, maka digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif baik yang bekerja, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan usaha. Sedangkan gambaran TPAK Perempuan merupakan ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan dan bertujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan seperti pada Tabel berikut ini.

Grafik 2.79 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

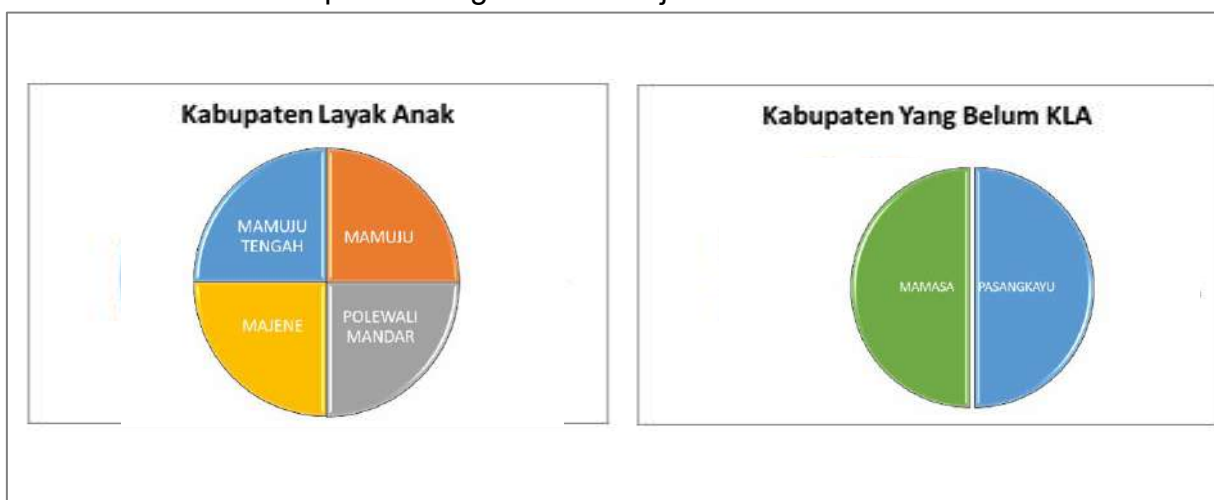
Berdasarkan data yang ada jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, di Tahun 2020 berjumlah 272.162 orang sedangkan di Tahun 2021 berjumlah 273.766 orang, di Tahun 2022 sebanyak 298.167 orang dan di Tahun 2023 sebanyak 286.236 orang dan di Tahun 2024 sebanyak 303.624 orang, ada selisih kenaikan Angkatan Kerja Perempuan dari Tahun 2023 ke 2024 sejumlah 17.388 orang. Hal ini disebabkan meningkatnya angkatan kerja dari Tahun sebelumnya meskipun di Sulawesi Barat pengelolaan UMKM Mandiri berbasis Rumah Tangga cukup tinggi oleh perempuan. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga oleh Perempuan yang merupakan faktor tingginya Angkatan Kerja Perempuan.

e. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Adapun beberapa tahap percepatan KLA telah dilakukan diantaranya mulai dari Deklarasi (komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk percepatan KLA di 6 Kabupaten), Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Percepatan KLA. Pencapaian Untuk Kabupaten yang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak di Tahun 2024 ada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan progres sebesar 33,3 persen dengan Predikat Pratama dan diharapkan sesuai Janji Kerja Gubernur agar 4 Kabupaten lainnya melakukan percepatan Penyusunan KLA seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.80 Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2025

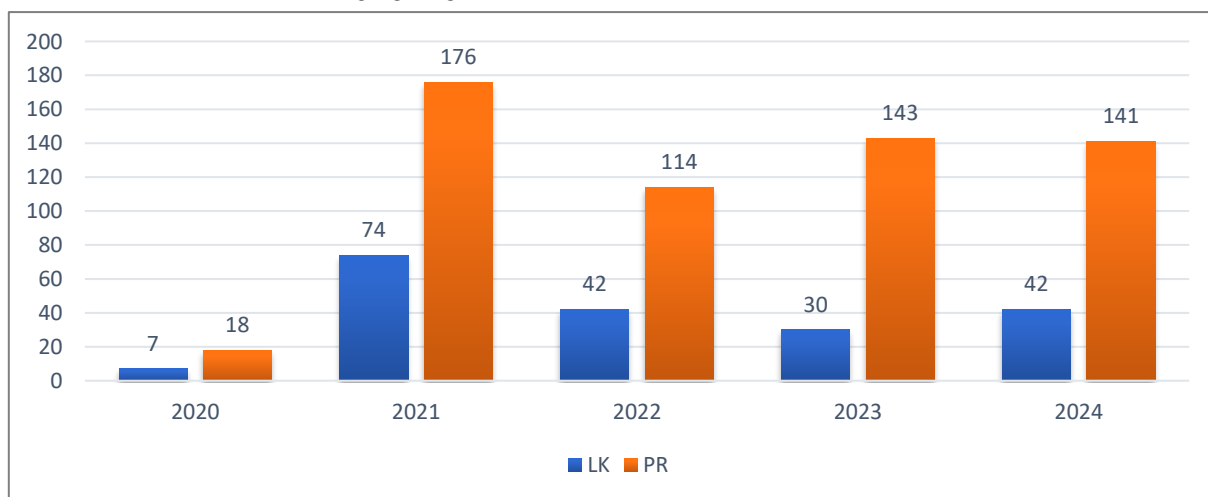
f. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan.

Pada aspek penanganan terhadap Kekerasan terhadap perempuan, anak serta perdagangan manusia, hal-hal yang memerlukan perbaikan antara lain melakukan perbaikan layanan dengan meningkatkan efektivitas, prosedur yang jelas dalam menangani kasus sehingga korban tidak merasa didiskriminasi. Adapun Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 berdasarkan Data Simfoni PPA seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.81 Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



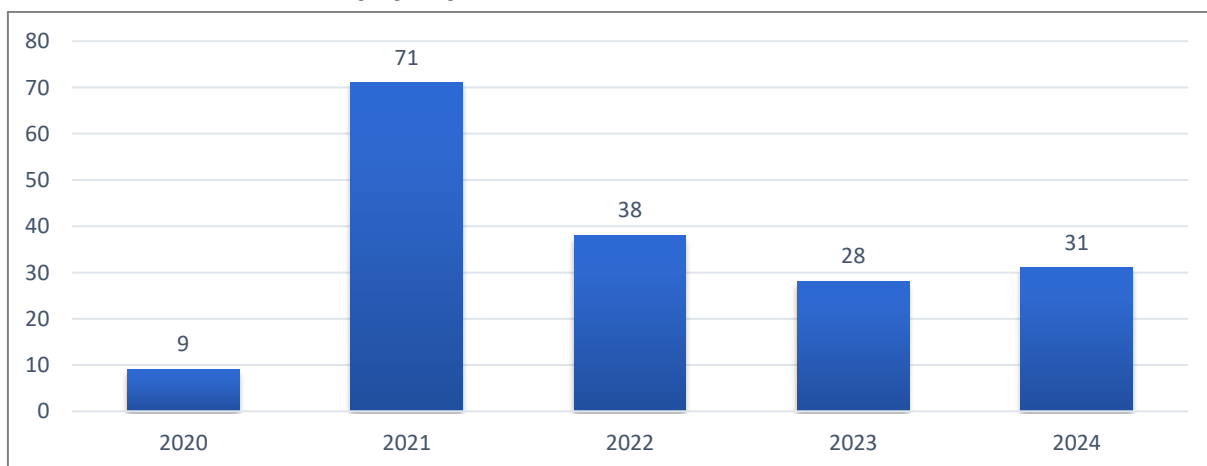
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 jumlah kekerasan yang terdapat di data simfoni adalah sebanyak 25 kasus namun pada Tahun 2024 jumlah kekerasan naik menjadi 183 kasus.

g. Jumlah Penanganan Laporan KDRT

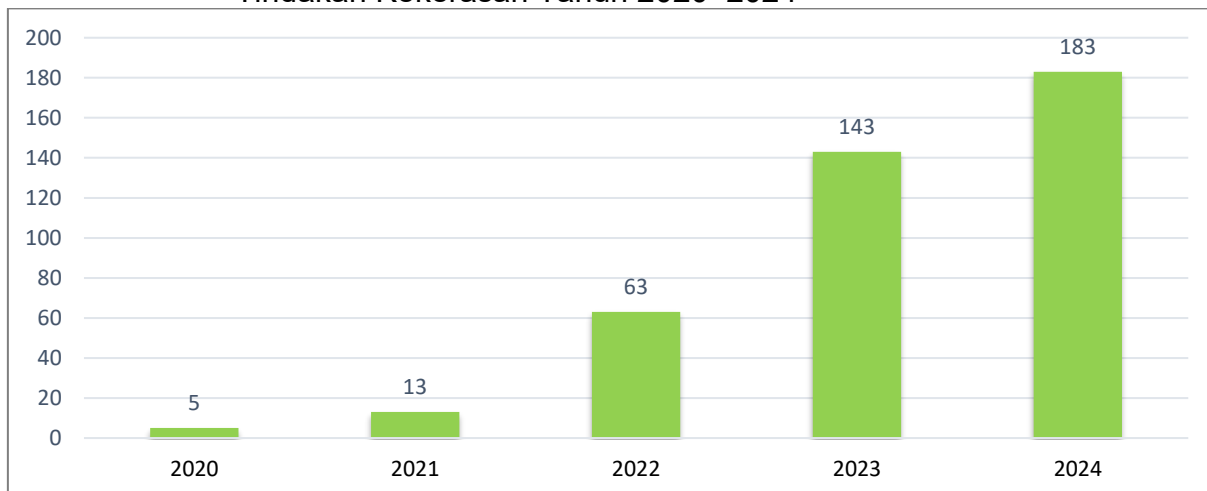
Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun ke Tahun. Meskipun terjadi penurunan hal ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Grafik 2.82 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2025

Grafik 2.83 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2025

h. Indeks Pembangunan Gender

Isu-isu tentang penyetaraan gender memang akan selalu menjadi perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek

kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 2.76 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	94,09	94,17	94,19	94,68	95,16
Polewali Mandar	91,56	91,63	91,92	92,14	92,25
Mamasa	97,79	98,23	98,23	98,42	98,37
Mamuju	90,57	90,62	90,46	90,57	90,92
Pasangkayu	84,92	85,25	85,43	85,72	86,14
Mamuju Tengah	86,34	86,10	86,16	86,40	86,74
Sulawesi Barat	89,43	89,57	89,79	90,25	90,60

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2025

Tabel 2.77 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	75,56	75,46	75,76	76,28	76,96
Polewali Mandar	71,94	71,13	71,81	74,87	75,38
Mamasa	60,40	60,49	60,39	60,95	61,09
Mamuju	58,58	59,38	60,59	60,96	60,61
Pasangkayu	54,13	56,97	57,52	57,17	56,06
Mamuju Tengah	66,56	67,11	67,01	57,26	55,84
Sulawesi Barat	65,92	65,93	66,55	66,93	67,16

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2025

Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan Pada Tahun 2020 nilai IPG sebesar 89,43 persen, terus meningkat hingga Tahun 2024 menjadi 90,60 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun

ketimpangan tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG Sulawesi Barat Tahun 2024 sebesar 67,16 persen, salah satu komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Sulawesi Barat.

2.4.5.9. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat subsistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat;
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2020–2024 mengalami peningkatan seperti pada Tabel di bawah. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Tabel 2.78 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Padi (Ton GKG)	345.050,37	323.426,53	364.683,16	294.026,68	318.876,59
Produksi Beras (Kg)	197.150,28	184.795,11	209.446,73	168.866,86	301,785
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.419.229	1.436.842	1.458.606	1.481.077	1.466.741
Konsumsi Per kapita (Kg/Thn)	111,9	112,1	112,2	116,8	112,6
Kebutuhan Beras (Kg)	N/A	115.259,70	162.722,00	178.659,00	N/A
Surplus Beras (Kg)	N/A	21.480,61	58.112,00	12.451,00	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.79 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang tanah berkulit, Kacang tanah lepas kulit, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023 (juta ton)

URAIAN	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kedelai	6.216,00	7.392,00	11.003,00	6.691,00
Kacang hijau	193,00	412,00	368,00	505,00
Kacang tanah berkulit	737,00	500,00	526,00	-
Kacang tanah lepas kulit	589	670	750	515
Ubi jalar	3.339,00	5.312,00	5.338,00	6.441,00
Gula pasir	37.607,00	12.000,00	12.500,00	11.360,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Ket: 2024 Belum Rilis

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2020, yaitu ketersediaan energi 3.498 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 76 gram/kap/hari. Dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 3.821 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,73 gram/kap/hari.

Tabel 2.80 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023

URAIAN	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Daging sapi	1.501,00	1.310,00	1.293,00	1.020,00
Daging kerbau	17,00	145,00	164,00	129,00
Daging kambing	18,00	105,00	103,00	105,00
Daging kuda	-	-	-	-
daging babi	569,00	1.079,00	862,00	981,00
Daging ayam buras	2.060,00	5.184,00	5.039,00	5.078,00
Daging ayam ras	2.091,00	2.750,00	5.087,00	5.396,80
Daging itik	30,00	246,00	147,00	146,00
Susu	11,00	2.750,00	3.500,00	2.779,00
Telur	8.265,00	12.574,00	17.541,00	5.530,00
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2020–2023 (k.kal/kap/hr)	3.498	3.055	3.055	3.821
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2020–2023 (gram/kap/hari)	76	111,42	111,42	113,73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar 2025

Ket: Data 2024 belum Rilis

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2020–2024 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.81 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Kelompok Pangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,00
Umbi-umbian	0,9	1,2	1,0	1,1	1,08
Pangan Hewani	15,1	15,9	16,7	14,8	15,19
Minyak & lemak	4,7	5,0	4,8	5,0	4,79
Buah/biji berminyak	0,6	0,7	0,6	0,6	,58
Kacang-kacangan	2,6	2,9	3,5	3,7	3,62
Gula	2,0	2,1	1,9	1,9	1,86
Sayur & buah	27,1	21,7	22,6	22,7	28,22
Lain-lain	-	-	-	-	-
Skor PPH Sulbar	7.797.521	74,56	76,02211	74,7	80,34
Skor PPH Nasional					95,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.82 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beras (Kg/Kap/Th)	111,9	112,1	112,2	116,8	112,6
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	9,7	13,7	10,8	11,4	12,4
Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	40,2	41,5	43,1	39,9	43
Minyak dan Lemak (Kg/Kap/Th)	8,0	8,9	8,2	8,6	8,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.83 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	1.393,00	1.384,30	1384,3	1412	1.368,20
Umbi-umbian	37,1	51,3	45	44	45,51
Pangan Hewani	158,2	167,4	173,9	155	159,52
Minyak & lemak	196,5	218,9	197,3	210	201,23
Buah/biji berminyak	26,5	29	16,4	25	24,42
Kacang-kacangan	27,7	30,9	37,5	39	37,97
Gula	84,4	87,3	80,4	78	77,92
Sayur & buah	113,7	91,1	94,2	95	118,52
Lain-lain	37,8	38,3	44,7	42	35,41
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari	2.074,90	2.098,50	2.073,70	2.100,00	2.068,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.10. Urusan Pertanahan

Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk. Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Indikator	Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan	78,65 %
Persentase luas lahan bersertifikat	64,54 % dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara	3 Kasus

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.85 Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021

URAIAN	Luas Tanah (m ²)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	2.856.945	5.345.913	11.009.810	4.571.316	4.896.269
Polewali Mandar	11.026.804	21.906.890	135.072.234	14.523.620	13.727.031
Mamasa	8.937.469	11.381.662	30.297.679	8.117.147	6.332.578
Mamuju	12.613.207	23.214.211	33.531.476	4.721.064	15.451.546
Pasangkayu	31.457.503	36.712.008	39.061.146	6.745.017	7.645.617
Mamuju Tengah	13.058.521	28.404.141	45.310.765	14.524.788	7.799.551
Total	79.950.449	126.964.825	294.283.110	53.202.952	55.852.592

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.5.11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Mangrove

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.86 Sebaran Eksisting Mangrove per kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Dalam Kawasan			Jumlah dalam kawasan	Luar Kawasan			Jumlah luar kawasan	Jumlah Total (ha)
	Jarang	Sedang	Lebat		Jarang	Sedang	Lebat		
Majene	6,7	1,7	10,2	18,6	40,3	8,3	76,9	125,5	144,1
Mamuju	87,3	7,6	246,3	341,1	76,9	15,2	530,3	622,3	963,5
Mamuju Tengah	26,7	2,3	244,9	273,8	147,8	24,7	343,2	515,8	789,6
Pasangkayu	101,8	39,0	379,3	520,0	141,1	106,4	551,2	798,7	1.318,7
Polewali Mandar	4,5	-	6,8	11,3	88,9	2,1	172,4	263,4	274,7
Sulawesi Barat (Total)	226,9	50,6	887,5	1.164,9	494,9	156,7	1.674,0	2.325,6	3.490,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

b. Terumbu Karang

Terumbu karang di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai luas 8049.26 Ha, dengan rincian kondisi buruk sebanyak 15.34%, kondisi sedang 37,25%. Kawasan yang memiliki kondisi buruk sampai kondisi sedang merata di seluruh kawasan ekosistem terumbu karang di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan yang tergolong berkondisi baik hanya terdapat di banggae timur, mamuju, Pulau Karampuang dan Kepulauan Bala-Balakang. Beberapa hasil survei lapangan menunjukkan hasil kondisi tutupan karang seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.87 Kondisi tutupan karang di Perairan Sulawesi Barat

No	Lokasi	% Tutupan Karang	Kategori
1	Gusung Toraja	55	Baik
2	Polewali	38	Sedang
3	Campalagian	40	Sedang
4	Banggae Timur	56	Baik
5	Banggae	39	Sedang
6	Tubo Sendana	40	Sedang
7	Pulau Karampuang	52	Baik
8	Mamuju	50	Baik
9	Topoyo	34	Sedang
10	Pulau Kambunong	47	Baik
11	Pasangkayu	42	Baik
12	Bambalamotu	38	Sedang
13	Bambaira	35	Sedang

Sumber: Survei Lapangan, 2022 (dok. RZWP3K)

Kondisi terumbu karang di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar umumnya berprofil landai, sedangkan di Kabupaten Majene dan Mamuju umumnya berprofil terjal dan bahkan banyak kawasannya yang memiliki dinding (wall atau drop off), selain itu semua kawasan terumbu karang di Sulawesi

Barat umumnya terumbu karang tepi yang landai, termasuk terumbu karang di Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang. Kawasan ini cocok dikembangkan obyek wisata bawah air snorkeling dan diving. Kondisi profil terumbu karang yang berupa dinding (wall atau drop off) sangat cocok dikembangkan sebagai objek wisata alam bawah laut (diving), khususnya penyelaman dalam (Deep Dive). Kawasan wisata selam di Perairan Sulawesi Barat dialokasikan pada ekosistem terumbu karang yang tersebar di Pulau Karampuang, Pulau Idaman, Pulau Labuang dan Pulau Salama, dan Kepulauan Bala-Balakang. Luas zona pemanfaatan umum untuk sub zona wisata alam bawah laut (selam) tersebut adalah 4,19 km². Beberapa terumbu karang yang ber kondisi rusak direkomendasikan dan dialokasikan sebagai kawasan rehabilitasi terumbu karang (zona lainnya pada kawasan konservasi), sedangkan yang ber kondisi sedang sampai baik di Pulau Kamarian Kecil, Pulau Sumanga besar, dan Pulau Sumanga Kecil, Kepulauan Bala-Balakang akan dijadikan zona inti pada alokasi ruang Kawasan Konservasi.

c. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan serta penanaman tanaman semusim.

Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air.

Tabel 2.88 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Hektar)

Daerah	Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	848,04	3.515,79	41.438,86	5.873,80	0,00
Polewali Mandar	2.895,52	7.459,89	66.974,18	16.914,34	144,38
Mamasa	11.781,11	40.570,77	135.615,07	5.102,30	7.399,22
Mamuju	21.819,37	103.639,93	200.924,90	9.266,29	642,55
Pasangkayu	10.125,55	73.183,77	72.324,18	5.571,59	742,64
Mamuju Tengah	26.390,41	101.576,22	83.686,86	544,17	57,94
Sulawesi Barat	73.860,00	329.946,37	600.964,05	43.272,49	8.986,73

Lanjutan Tabel di atas

Daerah	Bukan Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	3.976,90	6.287,85	25.721,20	1.912,38	30,68
Polewali Mandar	33.659,93	17.255,18	54.354,78	7.897,74	264,46
Mamasa	9.294,99	7.404,28	66.480,91	10.281,38	3.808,74
Mamuju	25.693,50	18.352,14	66.814,94	8.269,24	63,49
Pasangkayu	36.756,90	63.034,45	24.943,75	536,62	538,36
Mamuju Tengah	34.772,37	21.364,34	40.589,34	1.107,95	119,87
Sulawesi Barat	144.154,59	133.698,24	278.904,92	30.005,31	4.825,60

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

d. Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, adanya perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup setiap Tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan kualitas udara. Terkait dengan indikator IKLH mulai Tahun 2021 sudah menggunakan 4 indikator/sector sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan, bahwa untuk indikator IKLH terdiri dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL yakni: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 4) Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.89 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	N/A	61,43	61,11	66,00	70,00
Kab. Polewali Mandar	50,00	52,35	50,80	61,35	55,91
Kab. Mamasa	51,82	54,76	55,71	58,57	56,67
Kab. Mamuju	N/A	63,33	60,00	55,67	53,89
Kab. Pasangkayu	N/A	55,33	61,52	60,27	59,68
Kab. Mamuju Tengah	N/A	67,50	63,33	54,44	50,00
Prov. Sulawesi Barat	53,00	56,04	56,41	58,82	55,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.90 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	86,87	88,16	86,90	88,95	92,76
Kab. Polewali Mandar	85,51	88,56	90,76	92,87	89,96
Kab. Mamasa	91,48	92,80	92,53	94,71	91,53
Kab. Mamuju	92,88	92,96	94,19	94,89	88,96
Kab. Pasangkayu	92,94	94,24	95,16	96,51	93,26
Kab. Mamuju Tengah	88,62	89,13	91,73	92,08	92,29
Prov. Sulawesi Barat	89,72	90,97	91,88	93,33	91,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.91 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Provinsi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	58,90	64,04	64,00	64,00	65,63
Polewali Mandar	40,77	44,41	44,40	44,40	49,80
Mamasa	70,50	74,32	74,10	74,10	76,30
Mamuju	82,61	83,25	83,20	83,20	83,88
Pasangkayu	63,17	65,39	65,40	65,40	67,33
Mamuju Tengah	80,13	81,05	81,00	81,00	78,27
Sulawesi Barat	70,52	72,66	71,88	71,88	73,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.92 Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021–2024

Tahun	Nilai IKAL	Predikat Kriteria
2021	81,52	Baik
2022	87,92	Baik
2023	83,88	Baik
2024	84,94	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.

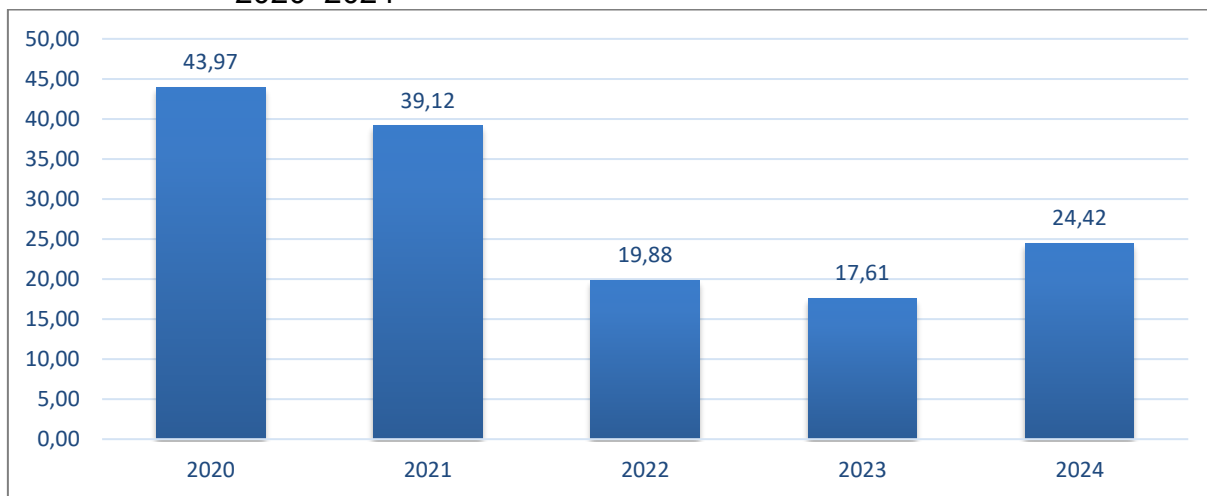
Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2019–2024

Tahun	Nilai IKAL	Predikat Kriteria
2019	67,79	Cukup Baik
2020	74,91	Baik
2021	75,72	Baik
2022	76,77	Baik
2023	84,57	Baik
2024	76,33	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

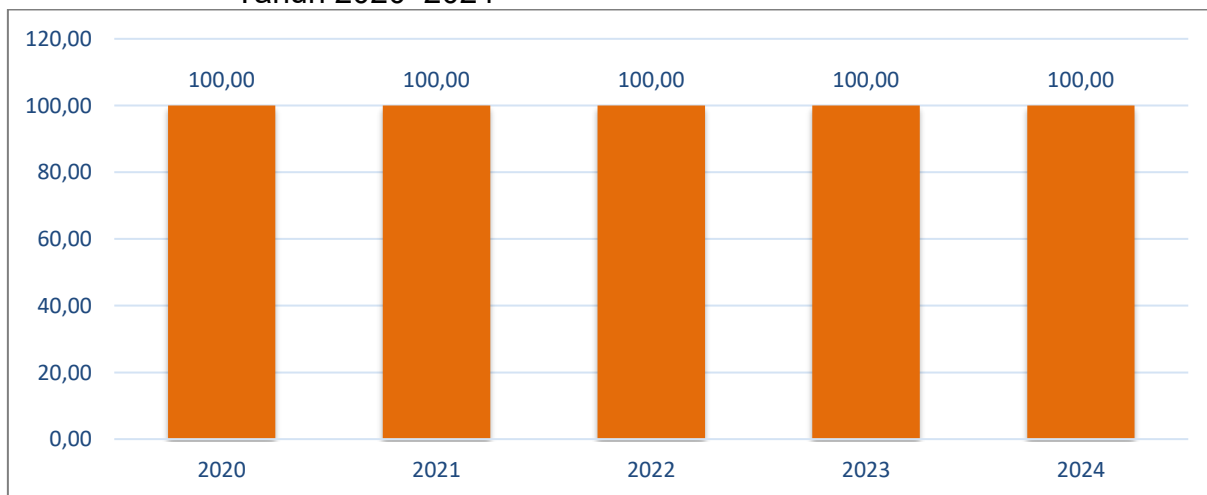
Indikator kinerja penanganan sampah atau sampah yang terkelola di Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap Tahunnya. Tahun 2020 persentase penanganan sampah tercatat 43,97 persen, akan tetapi hingga Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 24,42 persen. Persentase penanganan sampah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.84 Persentase Sampah yang Terkelola di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

Grafik 2.85 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk, Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, dan Kepemilikan KTP. Adapun capaian indikator tersebut dalam lima Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

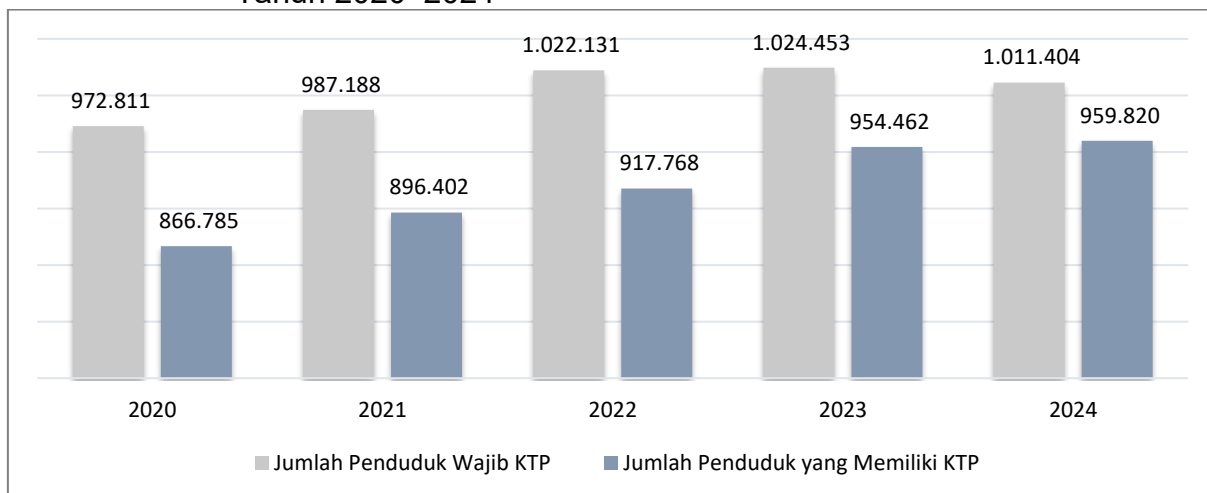
Tabel 2.94 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020–2024

INDIKATOR	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk	866.785	89	896.402	91	917.768	90	939.050	92	959.820	95
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	10.322	93	11.578	96	15.845	97	14.942	96	13.868	96
Rasio Pasangan Berakte Nikah	172.776	28	206.700	33	244.023	39	258.599	42	281.515	45
Kepemilikan KTP	972.811	89	896.402	91	917.768	90	939.050	92	959.820	95
Kepemilikan Akte Kelahiran/1000 Penduduk	626.493	43,55	594.954	38	626.493	43	776.537	53	812.377	55
Kependudukan Skala Provinsi	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tertibnya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah salah satunya dalam bentuk kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada grafik berikut.

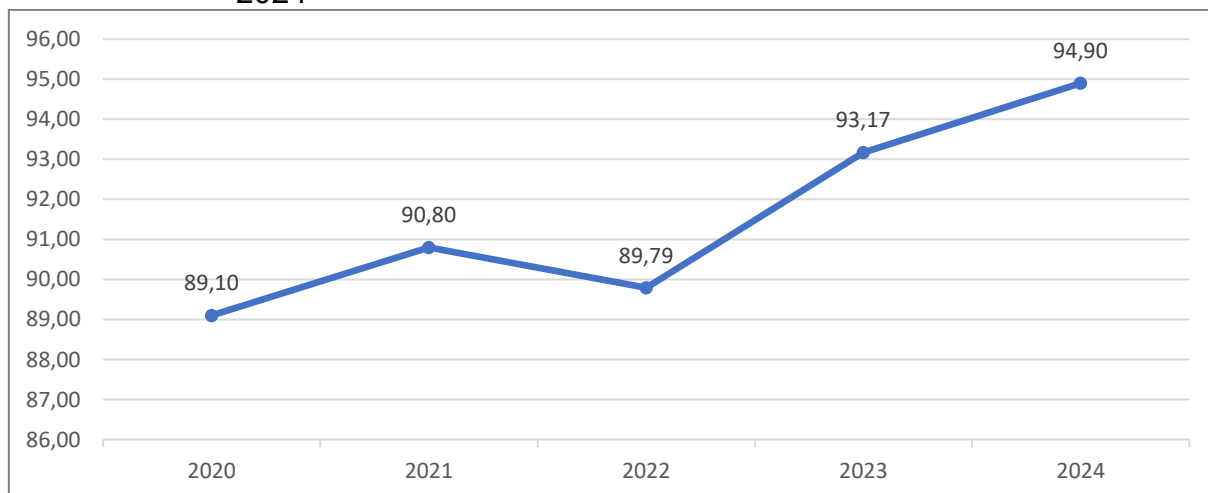
Grafik 2.86 Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2025

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 89,80 persen pada Tahun 2020 menjadi 94,90 persen pada Tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 5,80 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif.

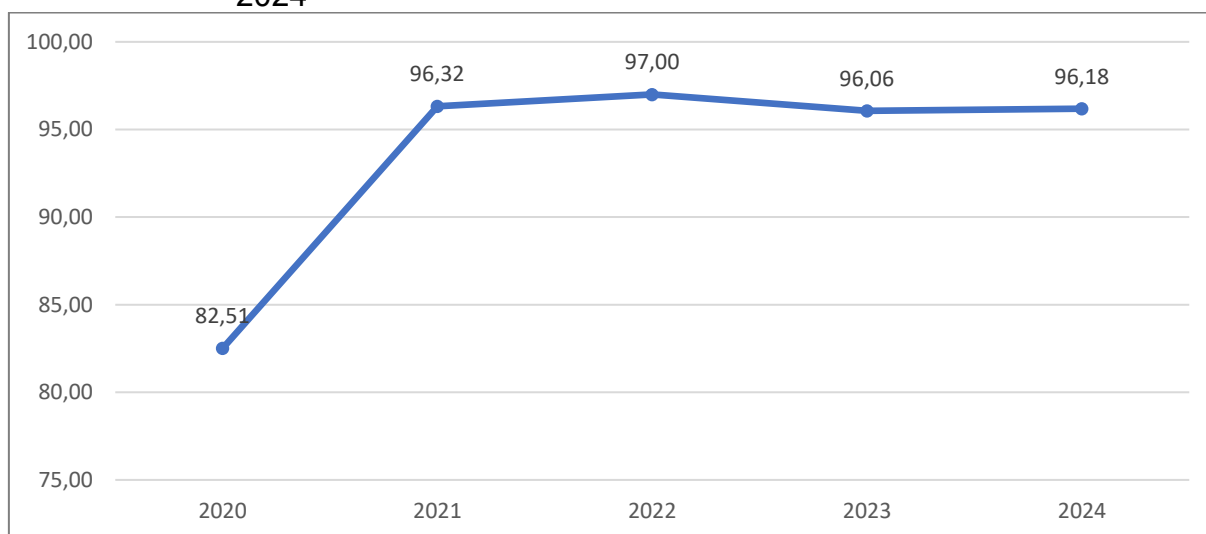
Grafik 2.87 Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2025

Selain KTP, kepemilikan akta kelahiran juga sangat penting. Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Grafik 2.88 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

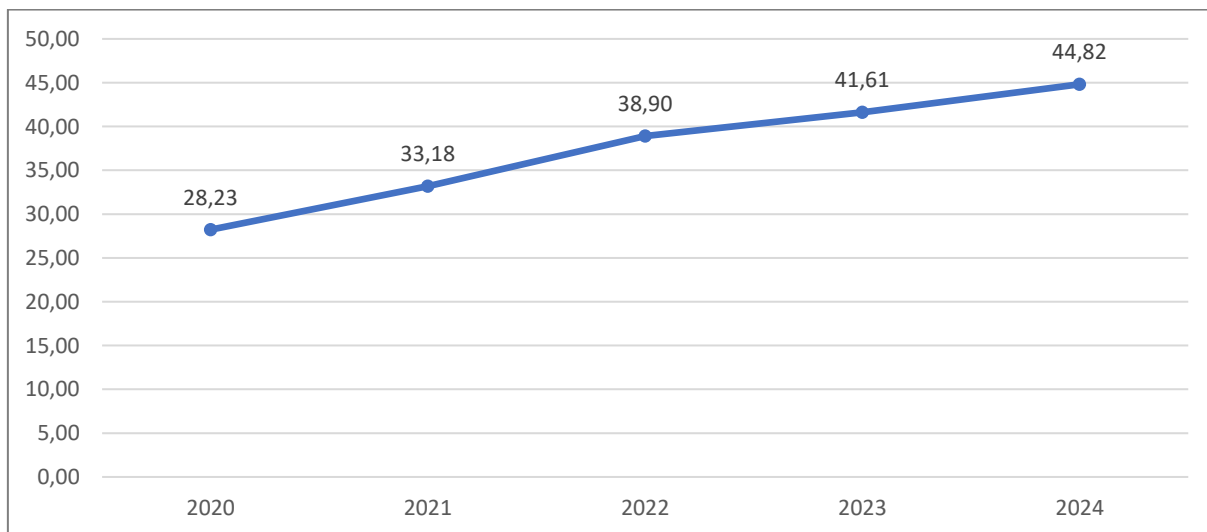


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2025

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 Tahun di Sulawesi Barat dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 mengalami peningkatan dari 82,51 persen menjadi 96,18 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan asas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu Tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan lainnya).

Indikator lain yang capaiannya masih sangat rendah pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu rendahnya rasio Pasangan Berakte Nikah. Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Grafik 2.89 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa di Sulawesi Barat kepemilikan akta perkawinan masih sangat rendah. Walaupun mengalami tren peningkatan yang cukup baik namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk non muslim.

2.4.5.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan kemandirian desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, dapat diharapkan terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya.

Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal

dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018 tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

Tabel 2.95 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020–2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	81,04	98,09	98,26	98,61	98,96
- Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	466	564	565	567	569
- Jumlah seluruh kantor pemerintahan desa	575	575	575	575	575
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	87	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7,21	7,21	N/A	N/A	N/A
-Jumlah kelompok binaan PKK	9.993	9.993	N/A	N/A	N/A
-Jumlah PKK	511	521	521	537	540
LPM berprestasi					
- Jumlah LPM	241	241	239	231	226
Persentase PKK aktif	82,58	81,00	83,11	81,56	89,63
- Jumlah PKK Aktif	422	422	433	438	484
Persentase Posyandu aktif	58,89	55,32	60,51	98,90	100,00
- Jumlah Posyandu aktif	1.169	1.169	1.293	2.151	2.189
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa

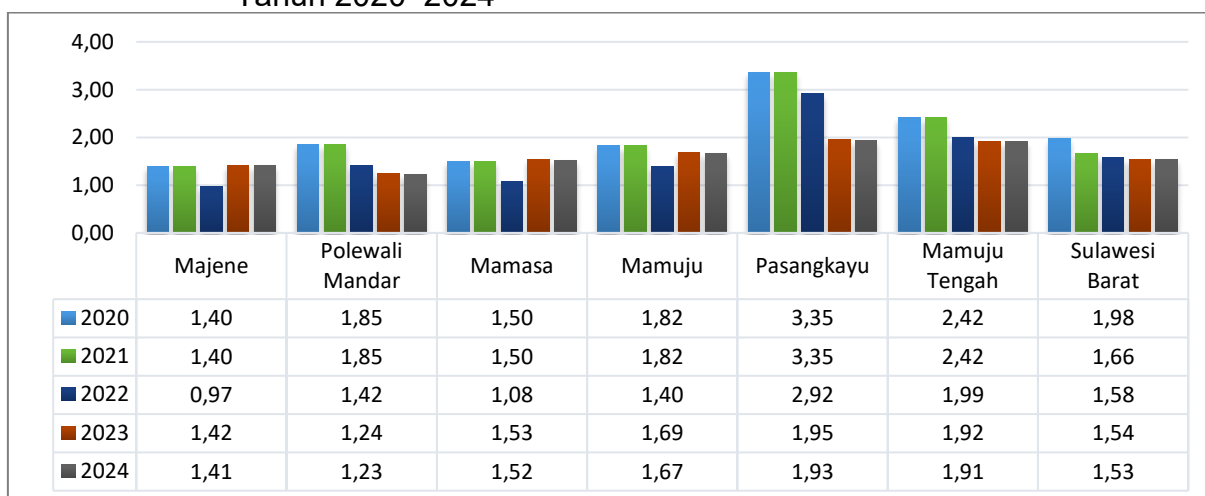
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak dibentuk pada Tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan ke depan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 1,98 persen turun menjadi 1,66 persen pada Tahun 2021. Dan hingga Tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat menurun sebesar 1,53 persen.

Grafik 2.90 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 197 jiwa/km².

Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.481.077 jiwa terdiri dari penduduk laki - laki sebanyak 750.773 jiwa dan perempuan sebanyak 730.304 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.54 persen.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya, di mana untuk Sulawesi Barat angka TFR Tahun 2021 sebesar 2,69 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 6 (enam) dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR (Age Specific Fertility Rate) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu Tahun tertentu per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, di mana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 37 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 Tahun dan merupakan angka tertinggi ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah terdapat pada D.I Yogyakarta (9 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 Tahun).

Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilisasi. Disamping itu faktor sosial budaya juga berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Tabel 2.96 Age Specific Fertility Rate/ASFR (Jumlah Kelahiran per-1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) di Provinsi Sulawesi Barat (Persen), 2020–2024

Tahun	Age Specific Fertility Rate (ASFR)
2020	54,4
2021	37,3
2022	42,6
2023	37,4
2024	39,1

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang sangat penting.

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data Tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 terjadi persentase yang fluktuatif. Namun demikian pada Tahun 2020 dan 2023 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari Tahun ke Tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.97 Rasio Akseptor Baru KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH AKSEPTOR BARU KB	18.803	N/A	11.312	24.227	21.863
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR	196.227	186.406	178.742	205.833	07.558
RASIO AKSEPTOR BARU KB	9,58	N/A	6,13	11,77	10,53

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi di mana pada Tahun 2020 sebesar 77,92 persen mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 49,90 persen, hingga di Tahun 2023 menjadi 64,64 persen dan mengalami penurunan kembali pada Tahun 2024 menjadi 61,01 sebagaimana tabel di bawah ini. Penurunan pada Tahun 2021 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, di samping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

Tabel 2.98 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peserta KB Aktif	152.895	93.021	97.908	133.059	126.636
Jumlah Pasangan Usia Subur	196.227	186.406	178.742	205.833	207.558
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	77.92	49.90	54.78	64.64	61,01

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

2.4.5.15. Urusan Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, di mana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar serta tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel 2.99 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024

Tipe Terminal	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Tipe A	2	2	2	2	2
Terminal Tipe B	-	-	-	-	-
Terminal Tipe C	3	2	2	2	2
Terminal Pembantu	3	4	4	4	4
Jumlah	8	8	8	8	8

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.100 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

NO	NAMA TERMINAL	TYPE	KETERANGAN
I	KABUPATEN MAMUJU		
a.	Simbuang	A	Berfungsi
b.	Pasar Sentral Mamuju	C	Tidak Berfungsi
c.	Tarailu	C	Berfungsi
d.	Tasiu	TP	Berfungsi
II	KABUPATEN MAJENE		
a.	Lutang	TP	Berfungsi
b.	Ammana Wewang	C	Berfungsi
III	KABUPATEN POLMAN		
a.	Tipalayo	A	Berfungsi
b.	Polewali	TP	Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2025

b. Perhubungan Udara

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.101 Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2024

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	2500 m x 45 m
Landas Hubung (Taxiway)	75 m x 18 m
Landas Parkir (Apron)	20.400 m ²
Overrun	2 x 30 m x 30 m
Bahu (Shoulder)	2 x 60 m x 2.500 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampa Padang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada Tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2020 hingga sekarang. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tampa Padang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boeing sekelas Garuda.

Tabel 2.102 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2024

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	1.200 m x 30 m
Landas Hubung (Taxiway)	80 m x 15 m
Landas Parkir (Apron)	60 m x 40 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2025

c. Perhubungan Laut

Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktivitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat.

Tabel 2.103 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2024

URAIAN	DIMENSI
DERMAGA – 1 (Deep = -9 M)	62 X 15 M ²
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M)	101 X 15 M ²
DERMAGA – 3 (2015)	100 X 15 M ²
LAPANGAN PENUMPUKAN	108 M2
GUDANG	850 M2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.104 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2020–2024

Indikator Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan	2020	2021	2022	2023	2024
Perhubungan					
Jumlah arus penumpang angkutan umum	882.387	426.262	2.084.773	2,098,639	2,020,685
Jumlah penumpang yang tiba (masuk)	698.333	448.699	214.041	1,058,598	1,010,597
Jumlah penumpang yang berangkat (keluar)	700.861	433.688	212.221	1,040,041	1,010,088
Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C	23,47	22,44	22,18		17,75
Rasio Izin Trayek	0	0	0	0	0
- Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan Darat	159.620	100.569	187.649	169,456	155,973
Jumlah angkutan Darat yang tiba (Masuk)	79.360	50.441	93.761	92,219	78,250
Jumlah angkutan Darat yang berangkat (Keluar)	80.260	50.128	93.888	77,237	77,723

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat pedesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Tabel 2.105 Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat

Kabupaten	Jumlah Layanan Internet Desa					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Majene	5	-	-	1	-	6
Polewali Mandar	7	-	-	2	-	9
Mamasa	8	1	-	1	1	11
Mamuju	4	1	2	-	1	8
Pasangkayu	4	-	-	1	-	5
Mamuju Tengah	1	-	-	1	-	2
Total	29	2	2	6	2	41

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2025

KIM adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat, dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan Informasi.

Tabel 2.106 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

NO	Kabupaten	Jumlah KIM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mamuju	14	0	1	-	16
2	Majene	99	112	112	4	6
3	Polewali Mandar	1	4	2	5	2
4	Mamasa	50	121	123	117	34
5	Pasangkayu	3	11	11	-	1
6	Mamuju Tengah	4	6	6	6	6
	Sulawesi Barat	171	254	254	132	65

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten Mamasa mengalami Peningkatan sebanyak 2 Kelompok Informasi Masyarakat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Artinya Masyarakat pada daerah tertentu secara khusus mengelola kelompok informasi yang bertujuan untuk memperlancar informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi.

Untuk Pengguna Pemprov dan OPD jumlah Portal/Website yang Aktif sebanyak 40 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 2 Portal/Website dan untuk Non OPD yang Aktif sebanyak 11 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 3 Portal/Website.

Tabel 2.107 Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Portal dan Website		Sesuai
		Alamat Website	Status Update Data dan Informasi	
1	Biro Umum Sekretariat Daerah	https://biroumum.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah	https://birohukum.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
3	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	https://biroorganisasi.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	https://ukpbj.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
5	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	https://biroekbang.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
6	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	https://biropemkesra.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	https://dprd.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
8	Inspektorat Daerah	https://inspektorat.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	https://dikbud.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
10	Dinas Kesehatan Daerah	https://dinkes.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	https://pupr.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	https://perumkin.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
13	Dinas Sosial Daerah	https://dinsos.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
14	Dinas Tenaga Kerja Daerah	https://disnaker.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	https://dp3ap2kb.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
16	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	https://distapang.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
17	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	https://dlh.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	https://dukcapil.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah	https://dpmd.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar

No	Perangkat Daerah	Portal dan Website		Sesuai
		Alamat Website	Status Update Data dan Informasi	
20	Dinas Perhubungan Daerah	https://dishub.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	https://kominfo.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	https://dpmpstpsulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	https://dispora.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	https://perpusda.sulbarprov.go.id/v2/	Aktif	Sesuai Standar
25	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	https://dkp.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
26	Dinas Pariwisata Daerah	https://dispar.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	https://dtphp.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
28	Dinas Kehutanan Daerah	https://dishut.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	https://esdm.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
30	Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	https://daggerinkopukm.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
31	Dinas Transmigrasi Daerah	https://transmigrasi.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
32	Dinas Perkebunan Daerah	https://disbun.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	https://satpolpp.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	https://bapperida.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	https://bpkpd.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
36	Badan Kepegawaian Daerah	https://bkd.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	https://bpsdm.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
39	Badan Penghubung Daerah	https://badanpenghubung.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
41	Rumah Sakit Umum Daerah	https://rsud.sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.108 WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Portal dan Website		Sesuai
		Alamat Website	Status Update Data dan Informasi	
1	Provinsi Sulawesi Barat	https://sulbarprov.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
2	Kabupaten Majene	https://majenekab.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
3	Kabupaten Polewali Mandar	https://polmankab.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
4	Kabupaten Mamasa	https://mamasakab.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
5	Kabupaten Mamuju	https://mamujukab.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
6	Kabupaten Pasangkayu	https://pasangkayu.go.id/	Aktif	Sesuai Standar
7	Kabupaten Mamuju Tengah	https://mamjutengahkab.go.id/	Aktif	Sesuai Standar

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.17. Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan nonbank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada Tahun 2024 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 1.276 unit. Terdiri dari 889 koperasi aktif dan 387 koperasi tidak aktif.

Tabel 2.109 Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Keaktifan		Jumlah	Pesentase Koperasi Aktif (%)
	Aktif	Tidak Aktif		
Majene	124	15	139	89,21
Polewali Mandar	130	136	266	48,87
Mamasa	158	52	210	75,24
Mamuju	298	16	314	94,90
Pasangkayu	115	50	165	69,70
Mamuju Tengah	64	118	182	35,16
Sulawesi Barat	889	387	1.276	69,67

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan, Sumber informasi yang terbatas, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

Tabel 2.110 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten	Kategori Usaha				
	Mikro	Kecil	Menengah	Industri Besar	Jumlah
Majene	18.476	2.812	23	0	21.311
Polewali Mandar	18.748	1.987	10	0	20.745
Mamasa	20.284	4.817	33	0	25.134
Mamuju	8.694	1.781	3	0	10.478
Pasangkayu	11.377	1.769	6	0	13.152
Mamuju Tengah	11.848	1.246	8	0	13.102
Jumlah	89.427	14.412	83		103.922

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.111 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

URAIAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif (unit)	70,03	71,96	78,21	78,21	69,67
Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non BPR/LKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	5 UKM	5 UKM	5 UKM	5 UKM	5 UKM

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.18. Urusan Penanaman Modal

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

Ditahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor usaha baik dalam maupun luar negeri. Di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dan puncak peningkatan tertinggi di tahun 2022 disebabkan peningkatan stabilitas ekonomi, DPMPSTSP juga melakukan upaya pengawasan, pembinaan, dan pengendalian permasalahan hambatan yang dialami oleh pelaku usaha. Peningkatan Investasi dapat memberikan yang signifikan terhadap perekonomian daerah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerapan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2023 dan 2024 peningkatan investasi meningkat secara nilai realisasi setiap tahunnya. Beberapa perusahaan masih belum mempunyai kesadaran untuk memberikan LKPM karena selain enggan untuk memberikan data realisasinya secara riil juga karena belum ada penerapan pemberian sanksi yang tegas. Penyebab

penurunan lainnya adalah tidak ada perusahaan yang menambah modal ataupun aset yang juga turut dilaporkan dalam LKPM.

Indeks Nilai Pelayanan Publik merupakan penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Tahun 2021-2022 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), di tahun 2023 dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan tahun 2024 kembali dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang meliputi 9 unsur umum penilaian, 2 tahun terakhir (2023-2024) DPMPTSP mampu meningkatkan nilai SKM, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya.

Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan rekapitulasi jumlah investasi yang berhasil direalisasikan oleh perusahaan asing dan perusahaan domestik di Provinsi Sulawesi Barat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan setiap 4 bulan sekali (triwulanan). Nilai Realisasi Penanaman Modal mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dari 346 Milyar di tahun 2020 dan 2,9 Triliun pada tahun 2024 karena pada tahun tersebut perusahaan yang berinvestasi adalah yang berskala besar dibandingkan dengan tahun 2020-2022 dan jumlah investasi rata – rata berskala besar. Data tersebut berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi kewajiban setiap perusahaan secara berkala.

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing. Pada kurun waktu 2020–2024, jumlah investor mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun khususnya pada Tahun 2023 bertambah hingga mencapai 1.276 investor sedangkan Tahun 2024 sebanyak 1.036 investor.

Tabel 2.112 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Uraian	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Sulawesi Barat (Persen)	-74,09	38,85	256	37,87	23,43
Indeks Nilai Pelayanan Publik (Poin)	-	3.50 B (Baik dengan Catatan)	3.83 (Baik)	88.10 (Baik/Hijau)	3.61 (Baik)
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Poin)	88.25 (Baik)	87.00 (Baik)	83.61 (Baik)	88.67 A (Sangat Baik)	95.45 (Sangat Baik)
Nilai Realisasi PMA/PMDN	346 Milyar	481 Milyar	1,7 Triliun	2,3 Triliun	2,9 Triliun
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	116 Investor	486 Investor	447 Investor	1.276 Investor	1.036 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	347 M	482 M	1.719 M	2,37 T	2,93 T
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	218	501	20.800	1.376	1.376 (2023)
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,91	3,21	5,70	21,34	1,85
Lama Proses Perizinan (Rata-rata)	3 Hari	3 Hari	3–6 Hari	3–5 Hari	3–5 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha	-	-	1 Pergub	1 Draf Pergub	-

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.113 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	(4 = (2-3)/2*100)
2020	93.980,18	152.017,49	-38,18
2021	86.449,51	93.980,18	-8,01
2022	405.898,25	86.449,51	369,52
2023	359.254,88	405.898,25	-11,49
2024	32.794,13	359.254,88	-90,87

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.114 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024

Tahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	$(4 = (2-3)/2 \times 100)$
2020	252.945,10	1.187.236,90	-78,69
2021	395.275,40	252.945,10	56,27
2022	1.313.346,20	395.275,40	232,26
2023	2.011.094,30	1.313.346,20	53,13
2024	2.892.957,40	2.011.094,30	43,85

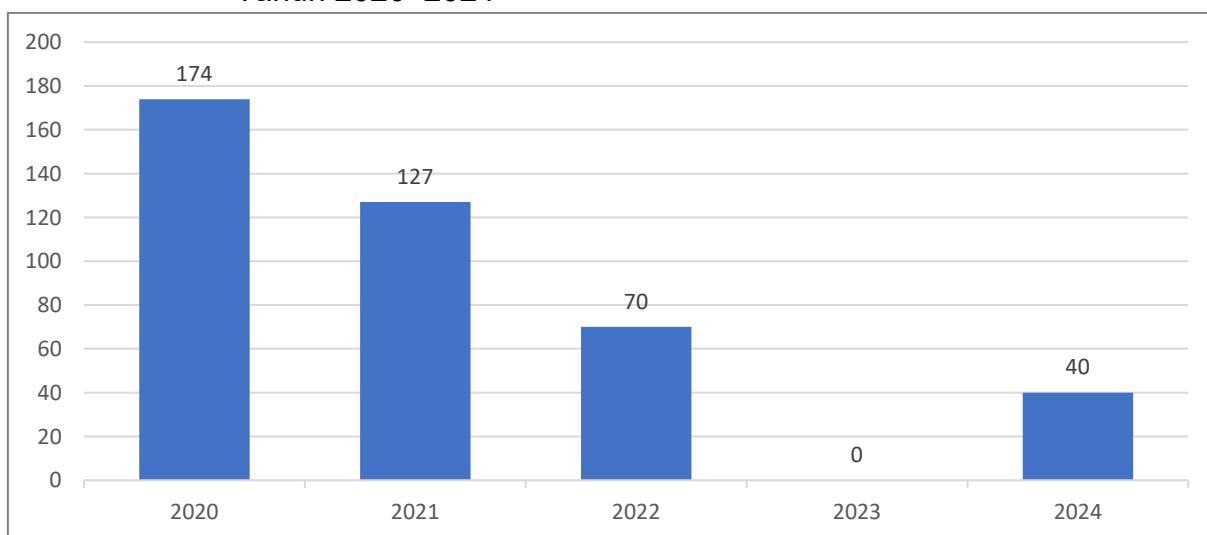
Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda dari Tahun 2020 sebesar 174 Organisasi Kepemudaan turun menjadi 40 Organisasi Kepemudaan pada Tahun 2024. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Grafik 2.91 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, 2025

Tabel 2.115 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

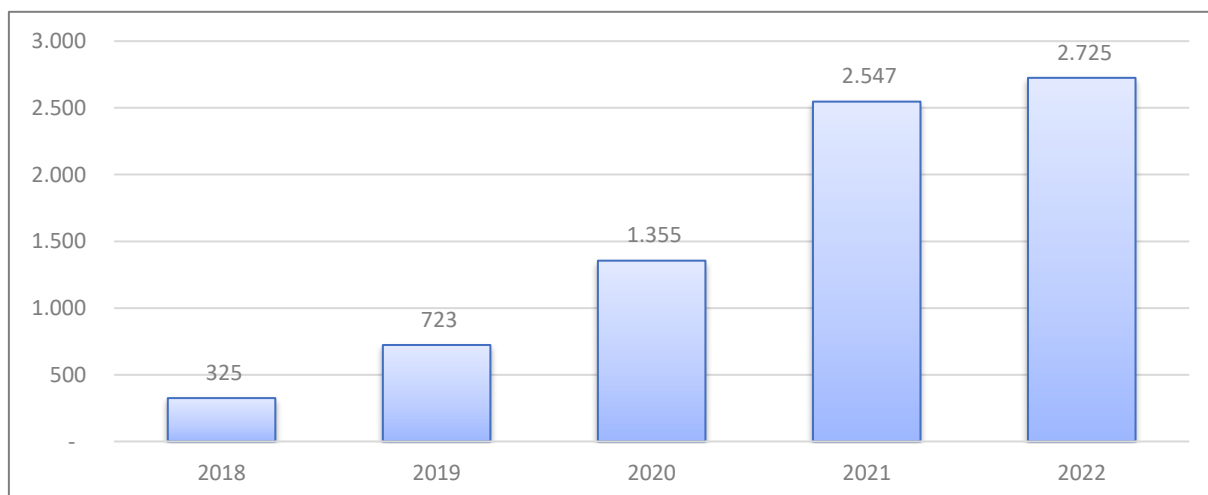
No.	Kabupaten	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)
1	Mamuju	21	0	21	100.00
2	Majene	21	110	131	16.03
3	Polewali Mandar	328	122	450	72.89
4	Mamasa	29	66	95	30.53
5	Pasangkayu	25	38	63	39.68
6	Mamuju Tengah	77	0	77	100.00
Sulawesi Barat		70	0	70	100.00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

b. Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Wirausahawan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 325 dan meningkat pada Tahun 2022 sebesar 2.725. Untuk meningkatkan kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.

Grafik 2.92 Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

c. Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga Pada tabel di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina sejak Tahun 2020–2024 sebanyak 3 Cabang Olahraga dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar sebanyak 34 Cabang Olahraga di Tahun 2024. Terdapat peningkatan cabang olahraga yang terdaftar hal ini dikarenakan bertambahnya cabang olahraga yang terdaftar pada KONI

Sulawesi Barat sedangkan jumlah cabang yang dibina tidak mengalami penambahan karena adanya kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.116 Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Persentase (%)
2020	3	33	9,09
2021	4	33	12,12
2022	3	33	9,09
2023	3	34	8,82
2024	3	34	8,82

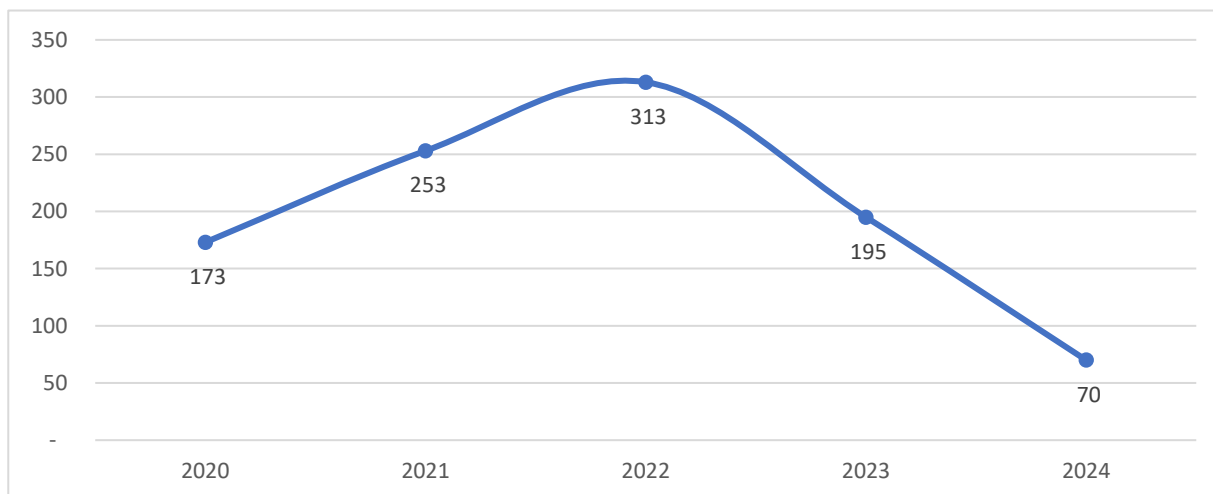
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada Tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada Tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai Tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.

d. Pelatih Bersertifikasi

Pada grafik di bawah ini menunjukkan pada Tahun 2020-2022 terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelatih bersertifikat. Akan tetapi terjadi penurunan yang cukup besar dalam jumlah pelatih bersertifikat di tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, penurunan minat dalam profesi pelatih, atau masalah dalam proses sertifikasi.

Grafik 2.93 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 18 atlet. Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak Tahun 2012-2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak; dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada bidang keolahragaan masih sangat minim.

Pembinaan atlet pelajar tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2015-2020, namun pada Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah atlet hal ini dikarenakan jumlah kuota atlet pelajar merupakan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga kegiatan ini bersifat rutin dengan sumber dana dekonsentrasi. Atlet yang menjadi binaan merupakan kategori usia pelajar berdasarkan hasil seleksi setiap Tahun sesuai dengan jadwal Tahun ajaran sesuai kebutuhan jumlah atlet yang telah lulus pada jenjang SMA dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2022 terdapat pengurangan Atlet cabang olahraga Takraw sebanyak 12 Atlet, sehingga hanya tersisa 18 Atlet dengan 3 Cabang Olahraga. Pada tahun 2024 Atlet binaan hanya berjumlah 12 orang yang terbagi pada 3 cabang yaitu Panahan sebanyak 3 Orang, Karate sebanyak 3 orang, dan Dayung sebanyak 6 orang.

Tabel 2.117 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina (Orang)
2020	38
2021	30
2022	18
2023	18
2024	12

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

f. Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga

Perolehan medali ditingkat Nasional mengalami banyak kemajuan, banyak atlet yang memiliki bakat dan kemampuan luar biasa, medali ini diperoleh dari beberapa kejuaraan perorangan dan beregu antara lain: Kejurnas PPLP di Mamuju, Kejuaraan Indonesia Taekwondo FUN (ITF) HAYONO ISMAN CUP II di Lampung, Kejuaraan Taekwondo Indonesia Championship di Bali, Kejuarnas PPLP di Manado, Kejuaraan nasional Karate Tako Indonesia di Makassar, Kejuaraan Antar PPLP di Samarinda, Kejurnas Antar PPLP, Kejuaraan Indonesia National Championship, 21 ASEAN Universitas Games Surabaya 2024, Indonesia U-18 Open Championship, Kejuaraan Pencak Silat Remaja 2024 di Semarang, PEPARNAS XVII di Solo, Kejuaraan Dunia Karate di Dubai.

Tabel 2.118 Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Atlet Yang Memenangi Kejuaraan			Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah
2020	0	-	0	0	0	0
2021	2	0	2	2	0	2
2022	39	0	39	3	0	3
2023	20	0	20	5	0	5
2024	55	1	56	5	0	5

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.119 Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten	Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara					Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polewali Mandar	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Mamasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Kabupaten	Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara					Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah Pemuda Pelopor yang dapat Mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam berbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumber daya lokal Pemilihan pemuda pelopor mencakup 5 (lima) bidang kepeloporan pemuda yaitu: Pendidikan; (2) Agama, Sosial, dan Budaya; (3) Pengelolaan Sumber daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata; (4) Pangan dan (5) Inovasi Teknologi dan mengacu pada Undang- Undang No. 40 Tahun 2009 dengan rentan usia 16 - 30 Tahun.

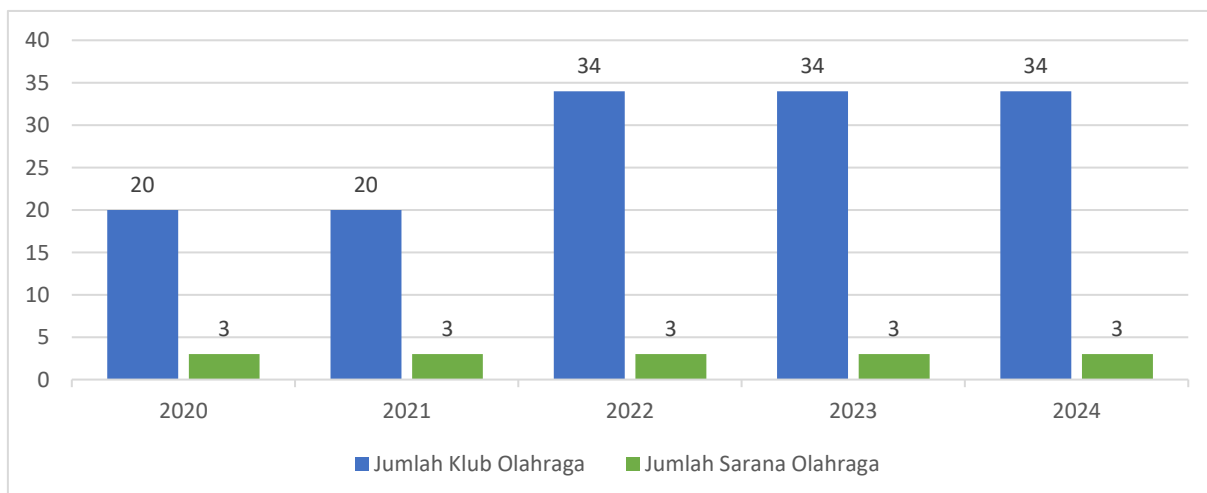
Tabel 2.120 Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Pemuda Pelopor di Bidang							Jumlah
	Pendidikan	Agama	Sosial dan Budaya	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Lingkungan dan Pariwisata	Pangan	Teknologi Tepat Guna	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	0	0	0	0	0	0	1
2022	1	0	0	0	0	0	0	1
2023	1	0	1	0	1	1	0	4
2024	4	0	1	1	1	2	1	10

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

g. Sarana dan Prasarana Olahraga

Grafik 2.94 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2025

Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulawesi Barat yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu kano) dan olahraga takraw.

2.4.5.20. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang reliable, up to date, dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengembangkan program Satu Data Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral perangkat daerah dalam aplikasi SAPOTA yang merupakan System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi Sapota ini diluncurkan di awal Tahun 2022.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Capaian kinerja sejak Tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku data sektoral Provinsi Sulawesi Barat.

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di provinsi Sulawesi Barat serta buku PDRB yang dituangkan dalam buku seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.121 Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2020–2024

No	Kabupaten	Buku Daerah Dalam Angka (Ada/Tidak)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.122 Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020–2024

No	Kabupaten	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ada/Tidak)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.123 Jumlah Dataset Statistik Sektorial Yang Dipublikasikan Menurut Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Dataset), 2020–2024

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	0	20	18	21	27
2	Dinas Kesehatan Daerah	25	18	19	70	57
3	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	6	6	6	12	14
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	5	10	11	10	9
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah	3	6	6	7	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	1	2	7	11	11
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	4	11	21	0
8	Dinas Sosial Daerah	3	9	9	9	13
9	Dinas Tenaga Kerja Daerah	3	12	13	19	18
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	7	6	13	22	18
11	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	3	3	10	16	15
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	9	12	12	22	23
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	33	36	36	41	42
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	6	7	9	16	15
15	Dinas Perhubungan Daerah	4	4	6	16	12
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	11	12	12	25	28
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah	3	3	5	18	16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	3	4	9	13	13
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	5	8	9	10	5
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2	7	6	11	19
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	14	10	13	29	31
22	Dinas Pariwisata Daerah	3	6	6	9	10

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data				
		2020	2021	2022	2023	2024
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	15	12	14	18	20
24	Dinas Perkebunan Daerah	3	16	5	5	5
25	Dinas Kehutanan Daerah	6	6	6	2	13
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	6	6	6	5	9
27	Dinas Transmigrasi Daerah	3	0	3	0	0
28	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	5	7	4	3	4
29	Biro Hukum Sekretariat Daerah	1	2	2	3	3
30	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	1	1	1	4	5
31	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	0	1	8	7
32	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	2	3	4	4	6
33	Biro Umum Sekretariat Daerah	1	1	3	3	3
34	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat	5	6	7	10	6
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	4	4	13
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	9	11	17	18
37	Badan Kepegawaian Daerah	7	7	7	43	46
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	3	3	7	8
39	Badan Penghubung	3	4	4	0	3
40	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	0	0	3	3	10
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5	6	10	10	4
JUMLAH		229	298	344	577	579

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.124 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan, Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2024

Tahun	Jumlah OPD	Jumlah OPD Yang Memiliki Data Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik
2019	41	16	39,02
2020	41	40	97,56
2021	41	39	95,12
2022	42	42	100
2023	42	40	95,24
2024	41	38	92,68

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa periode 2019–2024 menjadi tonggak penting dalam transformasi penyelenggaraan statistik sektoral. Capaian yang signifikan terlihat baik dari sisi jumlah dataset yang dipublikasikan maupun persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam siklus kebijakan, OPD yang menggunakan data statistik didefinisikan sebagai OPD yang menyampaikan data statistik sektoralnya kepada walidata. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan juga mengalami peningkatan drastis, dimana Tahun 2019 hanya 39,02% OPD, Tahun 2020 meningkat

menjadi 97,56%, Tahun 2022 mencapai 100% dan Tahun 2024 tetap tinggi di angka 92,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa Hampir seluruh OPD kini menjadikan data sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan, Budaya kerja berbasis data telah tertanam kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Sistem statistik sektoral telah bertransformasi dari hanya sebagai pelengkap administrasi menjadi alat utama evaluasi pembangunan.

2.4.5.21. Urusan Persandian

Sesuai dengan UU 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar. Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

2.4.5.22. Urusan Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59 persen), Toraja (13,95 persen), Bugis (10,79 persen), Jawa (5,38 persen), Suku Mandar (49,15 persen), dan suku lainnya (19,15 persen).

Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya termuat dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

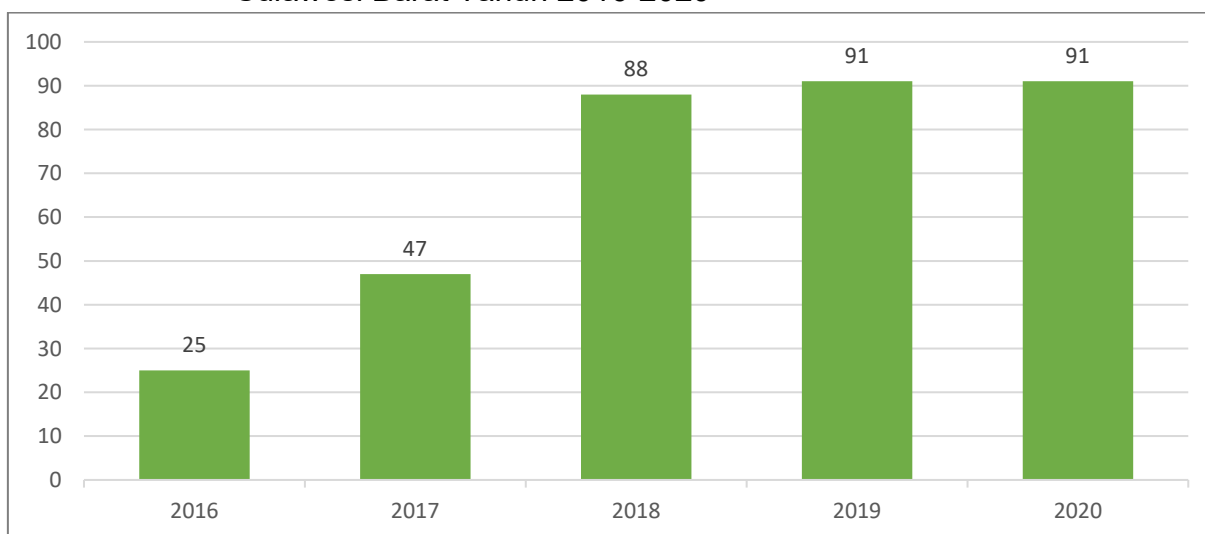
Tabel 2.125 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Keterangan	Tahun	
	2017	2018
Jumlah grup kesenian (Grup)	176	185
Jumlah Gedung (Buah)	3	3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	11
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.	10	34
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 25 hingga pada Tahun 2020 sebesar 91. Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

Grafik 2.95 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi

nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.126 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
2011		SANDEQ KATINTING	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	Ditetapkan
2013	201300046	SAIYYANG PATTU'DU	Seni Pertunjukan	Ditetapkan
2014	201400156	PASSAYANG-SAYANG	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Ditetapkan
2014	201400157	SANDEQ	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	Ditetapkan
2015	201500278	LOKA SATTAI /LOKA RO'DO /LOKA ANJOROI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2015	201500279	KAIN TENUN SUKOMANDI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600413	MANGARO	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600414	PERKAWINAN ADAT MANDAR	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600417	MASOSSOR MANURUNG /MANOSSOR MANURUNG	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600415	KEKE/ PAKEKE	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600416	CALONG	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2017	201700568	LIPA SAQBE MANDAR	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2018	201800794	MAPPATAMMAQ AL-QURAN	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800795	MAULIDAN SALABOSE	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800796	PUPU	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.5.23. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat, namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di

Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan.

Tabel 2.127 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

No.	Kabupaten	Jumlah kunjungan	Jumlah rata-rata pengunjung	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
1	Majene	9.955	830	1,1
2	Polewali Mandar	6.039	503	0,6
3	Mamasa	910	76	1
4	Mamuju	NA	NA	1,7
5	Pasangkayu	581	49	0,9
6	Mamuju Tengah	510	43	0,9
JUMLAH		29.492	1.501	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah kunjungan paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Majene yang mencapai 9.955 orang pada Tahun 2023, namun jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah kunjungan pada Tahun 2022 yang mencapai 11.350 orang, sedangkan di Kabupaten Mamuju tidak memiliki data pengunjung perpustakaan selama Tahun 2023.

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah se-Sulawesi Barat pada Tahun 2024 mencapai 75.323 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak 102.743 buku, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data Tahun sebelumnya.

Tabel 2.128 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2024

Kabupaten	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah			Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Majene	6.780	6.872	6.983	17.731	17.830	18.180
Polewali Mandar	8.821	9.614	10.637	24.257	22.503	24.915
Mamasa	1.500	800	6.043	750	1.661	2.189
Mamuju	6.563	NA	11.517	16.463	NA	23.034
Pasangkayu	1.886	5.617	6.242	25.272	25.272	26.691
Mamuju Tengah	251	1.166	1.166	6.134	7.734	7.734
Jumlah	25.801	54.794	75.323	90.607	75.000	102.743

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah judul buku paling banyak ketersediaannya di Kabupaten Mamuju yang mencapai 11.517 judul buku pada Tahun 2024, sedangkan di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi jumlah judul buku paling sedikit yakni 1.166 judul buku, sedangkan jumlah koleksi buku yang tersedia paling banyak di Kabupaten Pasangkayu yang mencapai 26.691 buku. Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan buku di Tahun 2024 untuk tiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.129 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio (x1000)
1	2020	1.807	1.438.674	1,26
2	2021	1.807	1.442.225	1,25
3	2022	2.533	1.450.610	1,75
4	2023	1.185	1.446.186	0,82
5	2024	1.696	1.466.741	1,16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2025 dan BPS (diolah)

Jumlah perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 mencapai 1.696 unit, sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.466.741 orang. Dengan demikian, menunjukkan rasio perpustakaan persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1,16.

Tabel 2.130 Jumlah Pustakawan Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

No	Provinsi dan Kabupaten	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		S1	DIII	DII	DI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Majene	21	1	16	0	38
2	Polewali Mandar	10	1	3	0	14
3	Mamasa	5	0	0	0	5
4	Mamuju	6	0	9	0	15
5	Pasangkayu	0	0	8	0	8
6	Mamuju Tengah	4	0	3	0	7
7	Provinsi Sulawesi Barat	6	1	0	0	7
Jumlah		52	3	39	0	94

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.5.24. Urusan Kearsipan

Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong

dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparat pemerintah sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien.

a. Tenaga Kearsipan

Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal, tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim dan sangat terbatas, di mana dari seluruh kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil.

b. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Tabel 2.131 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021

Lembaga Kearsipan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kebutuhan	Tingkat Ketersediaan
LKD Provinsi Sulawesi Barat	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju	0	1	0
LKD Kabupaten Majene	0	1	0
LKD Kabupaten Polewali Mandar	0	1	0
LKD Kabupaten Mamasa	0	1	0
LKD Kabupaten Pasangkayu	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju Tengah	0	1	0
Jumlah	0	7	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan ketersediaan record center, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, record center hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Tabel 2.132 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022

Tahun	Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah PD	Persentase (%)	Keterangan
2018	1	41	2,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2019	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah
2020	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah
2021	4	42	9,52	Biro Umum, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah
2022	2	42	4,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 OPD pada Tahun 2021 yaitu Biro Umum, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah. Tetapi diantara 4 OPD ini ada beberapa yang menerapkan arsip baku dan berdasarkan TND. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan 3 OPD lainnya walaupun belum

begitu sesuai dengan standar pengelolaan arsip tetapi sudah bisa dikategorikan ke dalam pengelolaan arsip secara baku.

Tabel 2.133 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
1	2018	1
2	2019	2
3	2020	0
4	2021	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

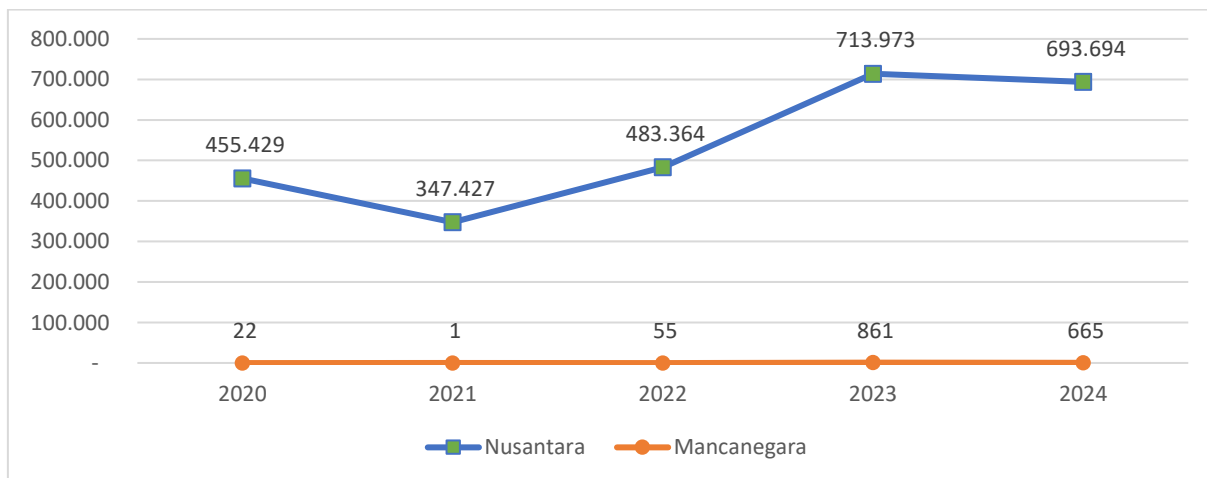
Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 belum dilaksanakan dikarenakan anggaran pelaksanaan kegiatan dikenakan refocusing akibat pandemi. Sedangkan pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 sudah dilaksanakan satu kali kegiatan dan Tahun 2019 dilaksanakan dua kali kegiatan, sementara di Tahun 2021 dilaksanakan hanya sekali.

2.4.5.25. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.

Terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sejak Tahun 2020 data memperlihatkan mengalami penurunan seiring menurunnya juga jumlah pergerakan orang di Tahun 2021. Jumlah wisatawan nusantara pada Tahun 2020 sebesar 455.429 pergerakan meskipun turun di Tahun 2021 menjadi 347.427 pergerakan kemudian naik kembali di Tahun 2024 menjadi 693.694. Turunnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara di Tahun 2020 disebabkan diterapkannya pembatasan pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena pandemi yang terjadi di seluruh wilayah.

Grafik 2.96 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.134 Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Hotel	Tingkat Penghuni Kamar	
		Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2019	152	46,76	17,78
2020	170	22,78	13,19
2021	143	27,77	16,86
2022	154	29,34	21,79
2023	157	37,58	19,41
2024	179	32,66	18,43

Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025*

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada Tahun 2020, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 170 unit hingga pada Tahun 2024 telah mencapai 179 unit. Hal itu menjadi indikator bahwa pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kondisi yang belum membaik.

Tabel 2.135 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2020–2024

Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	96	96	96	96	122
Polewali Mandar	64	67	65	102	100
Mamasa	88	114	114	120	98
Mamuju	340	319	352	379	381
Pasangkayu	80	81	81	81	105

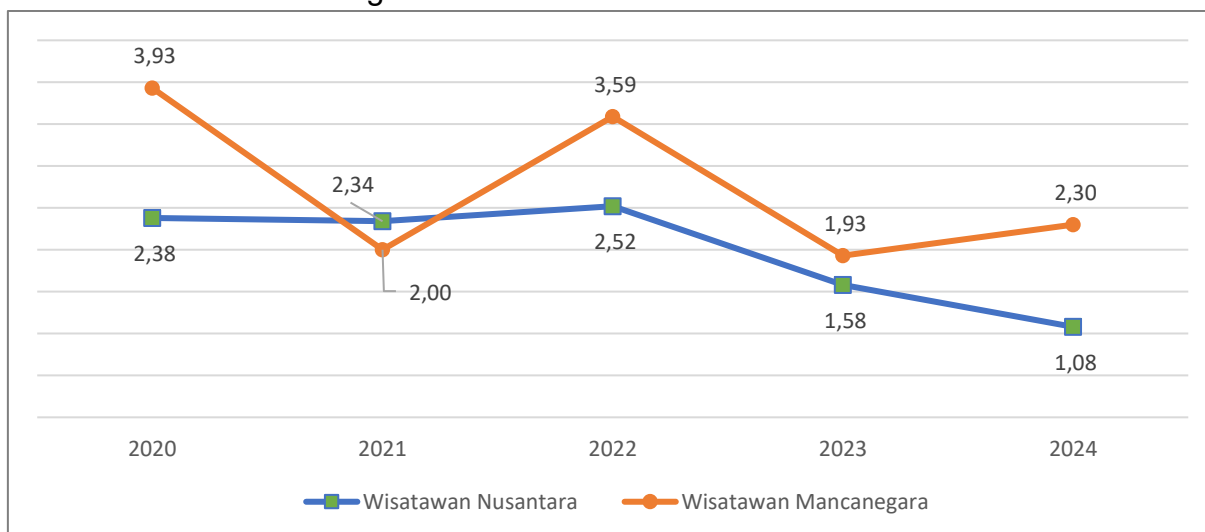
Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	47	63	64	96	96
Sulawesi Barat/Total	715	740	772	874	902

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan nusantara dan mancanegara.

Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya event Sandeq Race dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 Tahun belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamuju.

Grafik 2.97 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing maupun nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap Tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan

kepariwisataan yang ditata dengan baik. Adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi, belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi stakeholders, belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan, Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal; dan masih kurangnya investasi sektor pariwisata.

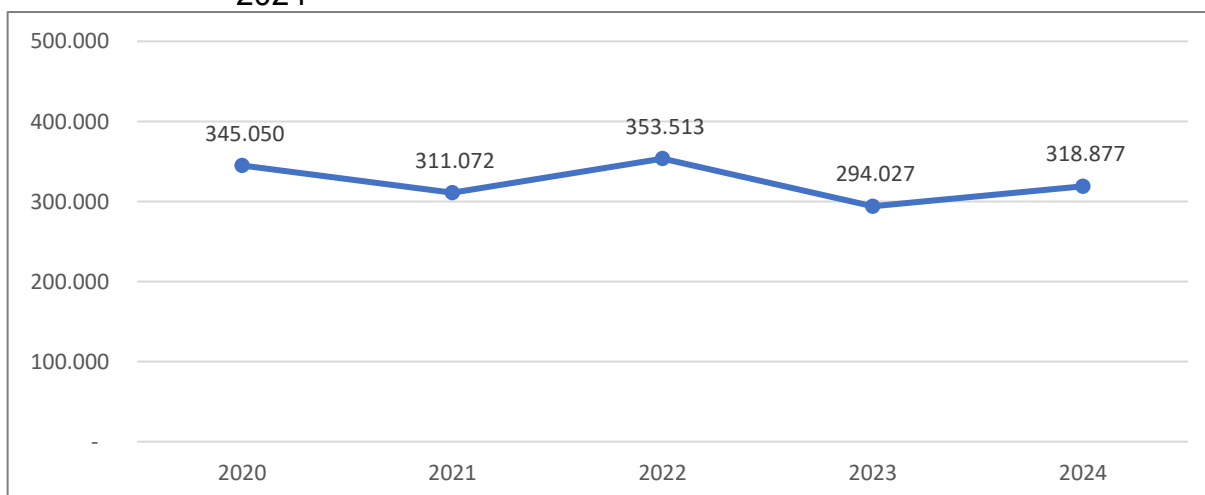
2.4.5.26. Urusan Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kedepannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

a. Tanaman Pangan

Perkembangan produksi padi di Sulawesi Barat menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Dimulai dengan 345.050 ton pada tahun 2020, produksi sempat menurun ke 311.072 ton pada tahun 2021 sebelum mencapai puncaknya di 353.513 ton pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 294.027 ton, sebelum akhirnya kembali mengalami peningkatan menjadi 318.877 ton pada tahun 2024, seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 2.98 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

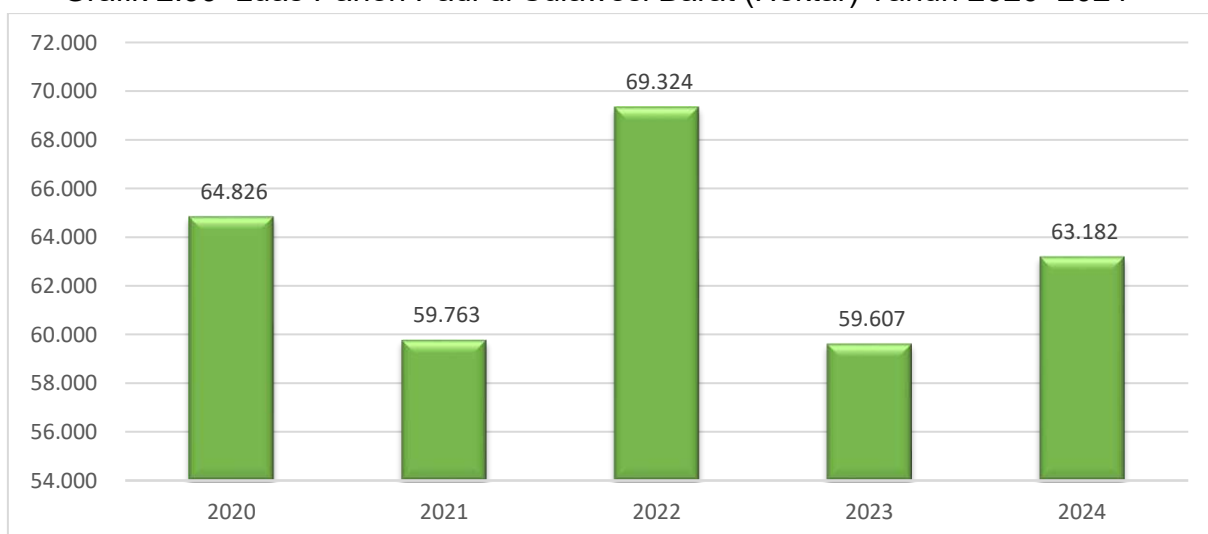
Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap Tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.136 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Komoditas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Padi					
Luas Panen (ha)	64.826,18	59.763,18	70.847,00	58.796,37	63.181,59
Produksi (ton)	345.050,37	311.072,46	362.386,00	294.026,68	318.876,59
Produktivitas (ku/ha)	53,23	52,05	51,03	50,01	50,47
2. Jagung					
Luas Panen (ha)	94.396,90	44.912,80	59.832,50	37.234,72	42.029,30
Produksi (ton)	461.254,11	218.156,22	283.021,00	189.871,46	220.761,31
Produktivitas (ku/ha)	48,86	48,57	51,78	50,99	52,53
3. Ubi Kayu					
Luas Panen (ha)	1.121,00	1.049,20	1.802,00	798,55	947,60
Produksi (ton)	32.885,62	23.890,53	40.523,18	15.707,73	18.716,27
Produktivitas (ku/ha)	293,36	227,70	224,88	196,70	197,51
4. Ubi Jalar					
Luas Panen (ha)	394,70	354,70	463,00	401,52	405,35
Produksi (ton)	7.148,36	5.312,01	4.929,92	6.239,38	5.928,80
Produktivitas (ku/ha)	181,11	149,76	106,48	155,39	146,26
5. Kacang Tanah					
Luas Panen (ha)	201,50	248,00	274,00	257,21	248,40
Produksi (ton)	419,98	285,03	292,84	420,27	421,60
Produktivitas (ku/ha)	20,84	11,49	10,69	16,34	16,97
6. Kedelai					
Luas Panen (ha)	3.658,90	1.466,10	50,73	35,75	443,60
Produksi (ton)	4.470,96	2.288,29	90,43	31,96	194,93
Produktivitas (ku/ha)	12,22	15,61	17,83	8,94	4,39
7. Kacang Hijau					
Luas Panen (ha)	465,70	410,00	364,00	323,38	292,85
Produksi (ton)	954,21	411,70	345,46	480,19	473,21
Produktivitas (ku/ha)	20,49	60,08	10,04	14,85	16,16

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Grafik 2.99 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021–2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap Tahunnya cakupan luas panen padi di Sulawesi Barat selalu mengalami fluktuasi, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari Tahun 2020. Hal berbeda terjadi pada Tahun 2022, di mana luas area panen padi pada Tahun tersebut justru mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, di mana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

b. Peternakan

Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 81.756 ekor, populasi kambing sekitar 126.489 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam ras pedaging sekitar 5.326.000 ekor.

Tabel 2.137 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1. Populasi (ekor)					
Sapi Potong	113.380	115.090	114.251	70.357	81.756
Kerbau	8.948	9.351	9.506	3.638	4.960
Kuda	1.367	1.297	1.358	246	312
Kambing	196.680	199.150	200.866	80.882	126.489
Babi	169.308	170.251	170.091	59.728	61.353
Ayam Buras	4.986.648	4.655.054	4.688.045	609.621	2.089.520
Ayam Ras Pedaging	2.620.177	2.281.047	3.789.466	4.031.232	5.326.000
Ayam Ras Petelur	416.095	338.492	331.880	115.342	168.828
Itik	335.788	360.064	194.798	192.444	77.655
2. Produksi (kg)					
Daging Sapi Potong	1.740.881	1.636.874	1.337.009	1.087.818	1.460.474
Daging Kerbau	201.903	231.913	181.382	124.063	121.970
Daging Kuda	-	-	-	-	-
Daging Kambing	160.453	149.865	154.469	59.123	53.495
Daging Babi	917.065	1.284.075	1.385.881	879.153	797.291
Daging Ayam Kampung	5.375.604	5.018.147	5.053.713	657.171	2.252.502
Daging Ayam Ras Pedaging	2.160.337	1.880.724	3.124.415	4.703.984	6.214.830
Daging Ayam Ras Petelur	207.778	247.978	243.135	84.500	123.683
Daging Itik	210.540	225.761	122.140	127.013	51.252

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, 2025

c. Perkebunan

Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi dan Produktivitas berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.138 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Ton)

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	8.188		228	5.725
Polewali Mandar	20.094	909	832	36.590
Mamasa	9		3.486	5.190
Mamuju	3.056	26.546	183	5.385
Pasangkayu	4.430	141.563	3	5.892
Mamuju Tengah	923	72.053	14	8.392
Sulawesi Barat	36.699	241.071	4.747	67.173

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.139 Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (ton/ha)

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	1.154	-	640	904
Polewali Mandar	1.160	1.037	786	879
Mamasa	567	-	678	561
Mamuju	963	3.499	570	623
Pasangkayu	989	3.746	843	731
Mamuju Tengah	1.049	2.474	683	812
Sulawesi Barat	1.113	3.198	687	797

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Salah satu komoditas potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Pada Tahun 2024, produksi Kelapa Sawit Sulawesi Barat mencapai 241.071 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 141.563 ton dan 72.053 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari Tahun sebelumnya, yang berakibat menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstabilkan harga.

Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao. Pada Tahun 2023, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 73.591 ton. Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 36.563 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamuju yang sebesar 12.721 ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang

cukup dan pengembangannya masih dapat dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.140 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Ha)

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	8.735	68	1.014	11.919
Polewali Mandar	23.142	1.951	2.270	48.930
Mamasa	30	-	12.567	13.262
Mamuju	4.587	10.400	787	39.047
Pasangkayu	4.753	59.933	28	12.804
Mamuju Tengah	1.453	36.159	33	14.806
Sulawesi Barat	42.699	108.512	16.699	140.768

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

d. Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari Tahun 2021–2024, beberapa komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.141 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021		2022		2023		2024	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Majene:								
Bawang Merah	61	236,3	76	473,2	78	616,8	81	573,3
Cabai Besar	39	124,0	90	935,8	87	744,8	74	487,0
Cabai Keriting	16	72,1	38	290,5	46,5	476,5	46,5	255,2
Cabai Rawit	66	347,3	83	1.144,9	89,5	749,0	70	770,4
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	61	101,9	93	446,4	50	241,5	56,5	146,2
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	57	56,5	42	49,5	35	47,2	33,5	43,5
Kacang Panjang	55	91,8	48	119,7	24,5	72,2	28,5	38,9
Bawang Daun	17	18,7	-	-	-	-	15	27,3
Bayam	66	56,3	58	67,6	27,5	31,9	36	49,0
Buncis	-	-	-	-	0,5	2,2	-	-
Ketimun	26	29,4	28	45,0	9	30,5	12,75	27,9
Labu Siam	-	-	-	-	-	-	-	-
Petsai	6	3,8	8	22,3	5	7,0	6	5,4
Terung	39	71,3	39	113,2	25	76,4	23,5	47,8
Wortel	-	-	-	-	-	-	-	-
Polewali Mandar								
Bawang Merah	163	165,4	134	60,0	51,65	25,7	39,7	18,7
Cabai Besar	126	171,3	103	117,6	96,75	124,0	70,36	122,6
Cabai Keriting	17	10,6	76	54,4	91,93	70,4	69,62	99,5
Cabai Rawit	66	108,7	83	81,3	135,4	120,7	88,76	137,8
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten	2021		2022		2023		2024	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	82	112,7	75	92,6	93	112,3	77	122,8
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	100	67,5	123	73,2	94,75	54,6	108	46,4
Kacang Panjang	101	119,7	93	87,5	86,75	80,9	73,16	71,5
Bawang Daun	13	7,4	12	4,6	18,5	6,4	19	7,1
Bayam	43	32,7	69	48,2	52,75	32,4	58,3	32,9
Buncis	9	6,3	3	1,0	-	-	0,7	0,3
Ketimun	21	24,8	30	30,8	21,16	23,1	13,65	16,3
Labu Siam	2	1,7	11	19,2	24,10	23,7	9,5	11,8
Petsai	36	37,7	45	19,0	38,5	14,7	54,7	21,9
Terung	86	109,7	88	88,9	81,92	71,6	58	74,8
Wortel	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
Mamasa								
Bawang Merah	46	234,0	22	106,0	51	324,8	28	175,0
Cabai Besar	-	-	-	-	6	4,5	11	10,8
Cabai Keriting	-	-	3	1,6	-	-	3	1,8
Cabai Rawit	36	34,8	38	30,6	55	72,9	50	68,6
Kentang	12	101,3	7	70,0	3	30,0	9	80,2
Kubis	2	2,0	10	9,4	7	7,0	12	10,9
Tomat	55	71,1	34	43,1	17	59,1	15	40,2
Bawang Putih	11	36,0	11	48,0	2	8,0	-	-
Kangkung	72	112,1	48	70,3	41	55,3	29	42,7
Kacang Panjang	55	87,9	47	63,9	37	70,0	21	38,5
Bawang Daun	33	31,2	35	38,0	26	30,0	14	13,3
Bayam	95	60,9	58	33,1	45	26,4	30	18,0
Buncis	41	39,1	25	17,7	16	11,7	5	3,5
Ketimun	-	-	1	0,5	1	0,6	1	1,5
Labu Siam	-	-	-	-	6	20,5	9	18,5
Petsai	173	176,5	97	95,4	134	138,5	140	138,1
Terung	5	4,0	4	2,2	1	0,8	2	2,0
Wortel	3	8,0	10	8,8	3	2,2	6	5,5
Mamuju								
Bawang Merah	213	47,1	350	72,0	315	91,3	341	100,2
Cabai Besar	3925	1321,9	4230	1.465,0	4516	1.975,1	4068	1707,3
Cabai Keriting	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabai Rawit	3975	2020,3	4320	1.465,0	4506	1.871,0	3981	1693,8
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	4825	730,1	4630	996,0	4752	1.733,1	3917	1626,1
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	4825	1423,9	4845	1.518,0	4768	1.688,8	4034	1622,3
Kacang Panjang	4598	1395,9	4590	1.475,0	4732	1.902,1	3929	1615,4
Bawang Daun	390	124,5	415	128,5	445	158,6	357	112,1
Bayam	4860	1056,8	4865	896,5	489	1.669,0	3795	1543,3
Buncis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun	4710	765,7	4725	1.017,5	4897	1.859,3	4006	1658,5
Labu Siam	385	123,1	465	149,0	400	157,0	432	163,4
Petsai	2865	326,2	3040	328,0	2920	694,0	2518	674,4
Terung	4535	712,8	4550	982,0	4421	1.710,0	3890	1637,9
Wortel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasangkayu								
Bawang Merah	2	10,3	7	35,9	4	17,1	3	14,7

Kabupaten	2021		2022		2023		2024	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Cabai Besar	1	4,4	-	-	1	10,9	5	23,0
Cabai Keriting	62	558,3	59	564,7	36,5	497,8	44,5	316,7
Cabai Rawit	72	584,5	68	633,3	55	723,9	70,5	492,7
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	1	6,5
Tomat	26	253,2	27	289,0	25,5	370,9	39,5	324,5
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	44	42,0	43	58,1	19	15,0	15	20,6
Kacang Panjang	46	445,0	46	514,8	34	438,6	42	368,0
Bawang Daun	2	6,9	2	9,4	2	8,7	2,5	15,7
Bayam	47	44,5	52	57,0	33	27,2	32	36,2
Buncis	-	-	-	-	-	-	1	5,0
Ketimun	18	180,0	8	94,1	7,5	55,2	5,5	71,5
Labu Siam	-	-	-	-	-	-	-	-
Petsai	-	-	-	-	4	5,3	3	11,2
Terung	31	392,1	28	351,9	18,5	290,3	24	111,6
Wortel	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamuju Tengah								
Bawang Merah	-	-	1	1,0	-	-	-	-
Cabai Besar	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabai Keriting	61	203,2	55	172,8	44	121,5	49	125,5
Cabai Rawit	76	240,1	53	140,8	62	172,4	52	112,0
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	57	214,0	34	99,6	29	92,5	9	22,8
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	93	175,1	68	116,9	73	126,7	74	100,9
Kacang Panjang	80	269,4	51	130,2	62	161,0	60	101,6
Bawang Daun	53	56,9	23	23,2	25	27,4	21	14,0
Bayam	65	120,6	43	72,2	47	78,5	58	81,4
Buncis	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Ketimun	59	263,5	41	149,8	45	161,1	41	100,9
Labu Siam	-	-	-	-	-	-	-	-
Petsai	68	88,6	55	55,8	58	59,4	54	42,7
Terung	58	231,9	34	123,2	44	150,5	50	123,4
Wortel	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, 2025

2.4.5.27. Urusan Kehutanan

Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Berdasarkan SK. 862/Menhut-II/2014 yang dimutakhirkan dalam SK. 6625/MenLHK-PKTL/Pla.2/10/2021 sampai Tahun 2024, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat berkisar 1.068.125,43 ha atau seluas 64,34% dari luasan administratif Provinsi Sulawesi Barat.

Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 60 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan Suaka Alam, sementara sisanya merupakan kawasan hutan produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu kayu bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada

Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 2.142 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

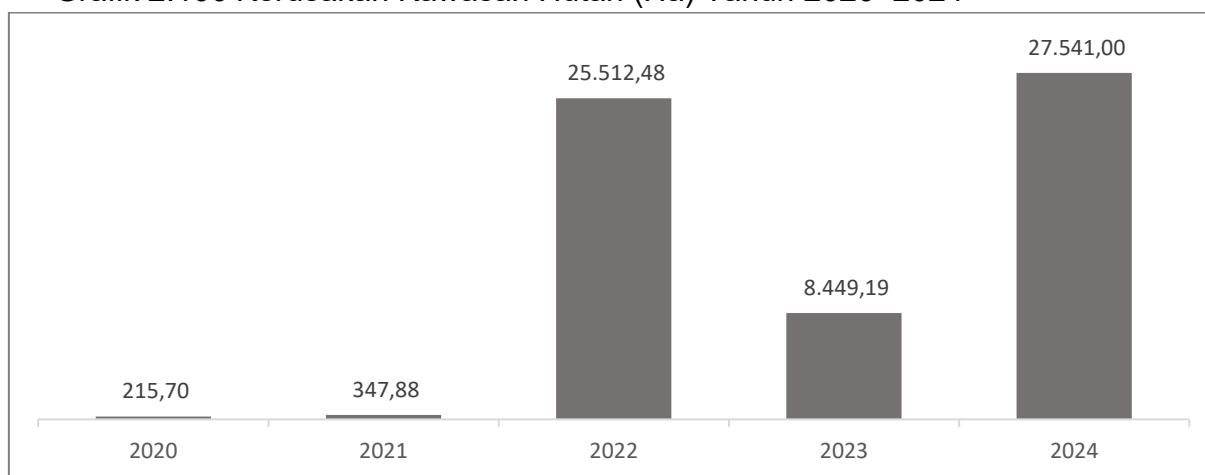
Kabupaten	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Jumlah
Majene	44.405,18	0	7.590,28	6,33	0	52.001,79
Polewali Mandar	70.217,27	778,98	23.030,94	0	0	94.027,19
Mamasa	86.308,93	68.047,54	49.359,56	0	417,12	204.133,15
Mamuju	140.509,00	74.646,67	101.749,70	44.282,62	10.801,76	371.989,75
Pasangkayu	98.283,37	195,43	55.463,11	2.335,02	8.795,10	165.072,03
Mamuju Tengah	16.583,79	44.449,35	94.432,83	24.319,73	1.224,38	181.010,08
2024	456.307,54	188.117,97	331.626,42	70.943,70	21.238,36	1.068.233,99
2023	456.307,54	188.117,97	331.626,42	70.943,70	21.238,36	1.068.233,99
2022	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2021	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2020	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2020 sebanyak 215,70 Hektar naik menjadi 27.541,00 Hektar karena aktivitas Illegal Logging dan kebakaran hutan yang meningkat pada Tahun 2024.

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari Tahun 2020 sebesar 0,33 persen meningkat menjadi 0,35 persen pada Tahun 2024.

Grafik 2.100 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2020–2024

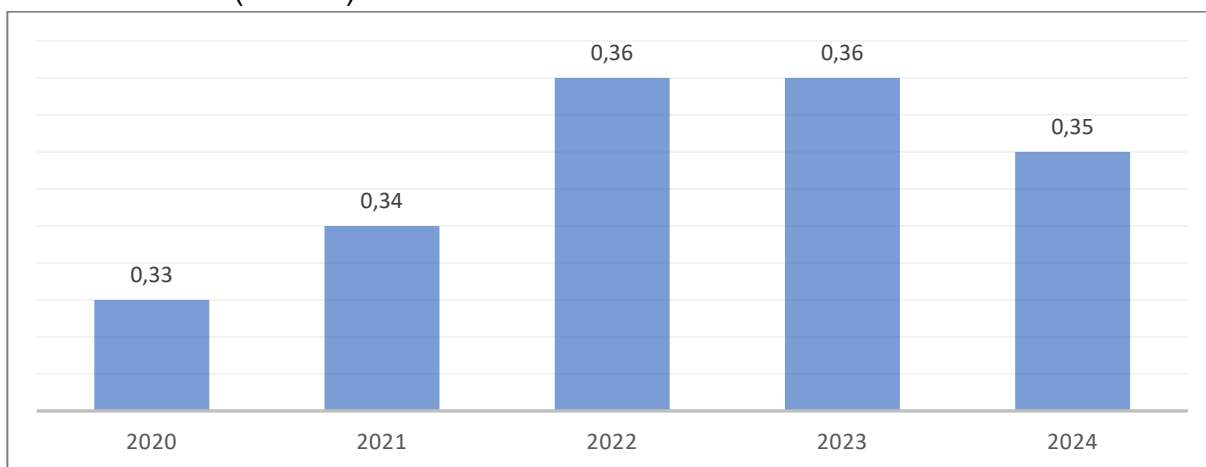


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga saat ini setidaknya telah membentuk 12 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan 1 unit Taman Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan

prioritas kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

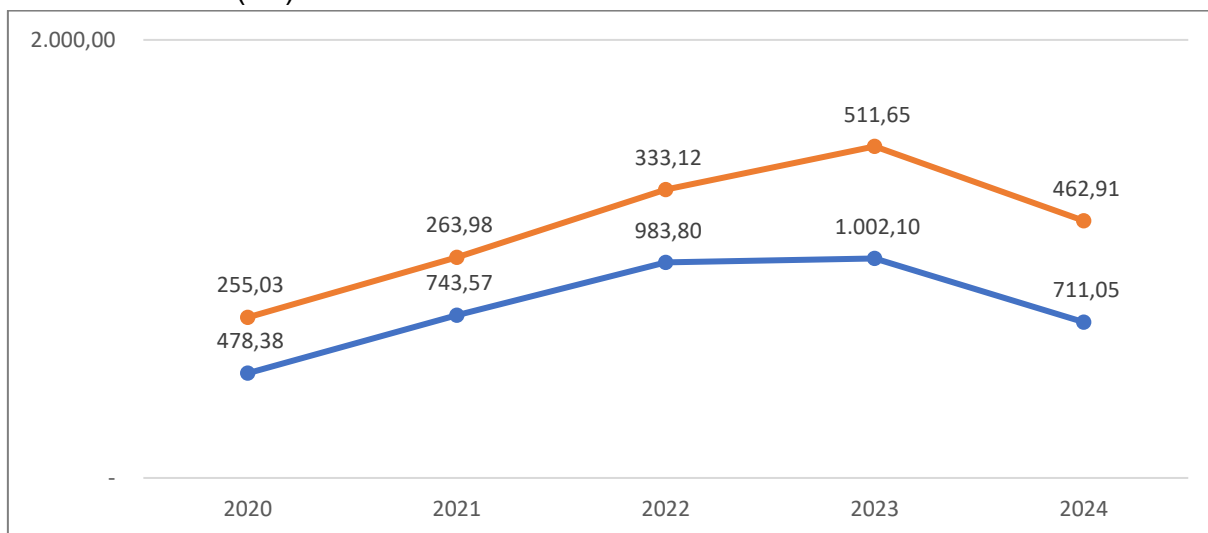
Grafik 2.101 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2020–2024
(Persen)



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari Tahun 2020 sebesar 0,33 persen meningkat menjadi 0,36 persen pada Tahun 2024.

Grafik 2.102 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024
(m³)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

Memperkuat Hutan dan Ekonomi Lokal: Peran Vital Kelompok Tani Hutan (KTH) Teregistrasi di Sulawesi Barat. Permasalahan di bidang kehutanan seringkali kompleks, mulai dari deforestasi hingga degradasi lahan. Namun, salah satu solusi paling efektif yang diterapkan oleh dinas kehutanan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif strategis ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan komunitas yang bergantung padanya. Landasan hukum pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan urusan kehutanan sebagai kewenangan daerah provinsi. Dengan demikian, pemerintah provinsi memiliki mandat penuh untuk mengembangkan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan secara konkret diwujudkan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang secara aktif mengelola usaha di bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Peran dan operasional KTH ini diperkuat oleh regulasi spesifik, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Peraturan ini menjadi acuan utama bagi dinas kehutanan dalam membimbing KTH, memastikan mereka beroperasi sesuai standar dan memberikan kontribusi maksimal.

Salah satu amanat krusial dari Peraturan P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 adalah kewajiban bagi setiap KTH untuk melakukan registrasi di Dinas Kehutanan tingkat provinsi. Proses registrasi ini bukan sekadar formalitas administrasi; ia memberikan dasar hukum yang kokoh bagi KTH untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan dan mengakses dukungan dari pemerintah. KTH yang telah teregistrasi diakui secara resmi dan memiliki legitimasi untuk menjalankan berbagai aktivitas kehutanan. Mereka memiliki peran sentral dalam mendorong pengelolaan lahan secara berkelanjutan, yang mencakup praktik-praktik konservasi tanah, pengelolaan air, dan pemilihan jenis tanaman yang tepat. Lebih dari itu, KTH teregistrasi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan erosi tanah, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menjaga fungsi ekologis hutan. Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup anggota KTH serta komunitas di sekitarnya.

Salah satu contoh paling konkret dari pemberdayaan masyarakat melalui KTH teregistrasi adalah implementasi agroforestri. Sistem pertanian inovatif ini

menggabungkan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan tanaman hutan dalam satu lahan yang sama. Di dalam kawasan hutan, kegiatan agroforestri seringkali dilakukan melalui skema perhutanan sosial, memungkinkan masyarakat untuk mengelola sebagian areal hutan negara secara lestari sambil memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, di luar kawasan hutan, KTH terlibat dalam pengembangan hutan rakyat dan berbagai kegiatan pembangunan kehutanan lainnya, seperti penanaman pohon buah, budidaya madu, atau pengembangan hasil hutan bukan kayu. Agroforestri tidak hanya memaksimalkan pemanfaatan lahan tetapi juga menciptakan sistem produksi yang lebih stabil dan berkelanjutan, mengurangi risiko kegagalan panen dan meningkatkan pendapatan petani.

Keberadaan KTH teregistrasi sangatlah fundamental karena mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, KTH teregistrasi mampu menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang, meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pertanian, serta mempertahankan keanekaragaman hayati di hutan. Ini adalah pendekatan yang win-win solution, di mana kebutuhan manusia terpenuhi tanpa mengorbankan integritas lingkungan. KTH teregistrasi juga merupakan penyokong utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, sebuah cita-cita penting yang berkontribusi pada kemandirian daerah. Lebih jauh lagi, peran strategis mereka menyokong visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, khususnya misi ke-4 yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kelestarian lingkungan hidup. KTH teregistrasi secara nyata telah menjadi penggerak perekonomian pedesaan yang vital di Sulawesi Barat, menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan hutan yang lestari, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Di Provinsi Sulawesi Barat, dedikasi terhadap pemberdayaan KTH teregistrasi ini terwujud dalam struktur yang terorganisir. Sampai saat ini Terdapat 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten utama: Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Keberadaan UPTD ini memastikan bahwa pendampingan dan dukungan teknis dapat diberikan secara lebih dekat dan efektif kepada KTH di wilayah-wilayah tersebut. Dengan jaringan yang kuat ini, KTH teregistrasi di Sulawesi Barat terus berinovasi dan berkontribusi, menjadikan mereka aktor kunci dalam mewujudkan masa depan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera di Bumi Mandar.

Tabel 2.143 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
1	MAPILI	UNIT XI	KPH L	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor. 91 Tahun 2010	SK. 651/Menhut-II/2010	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2016	SKPD	77,196	Rotan, murbei, aren, damar	Wisata Bahari Palippis dan Labuang, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka, air terjun Kunyi, Air terjun Limbong, Agrowisata, calon Tahura Indorannuang
2	MAMASA TENGAH	Unit VIII	KPH L	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Peraturan Bupati Mamasa Nomor. 8 Tahun 2010	SK. 340/Menhut-II/2011	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	37,962	Getah Pinus, Rotan, Bambu, Tanaman Seong, Aren, Alpukat, Markisa, Terong Belanda	Air Panas Belerang Kanan, Air Terjun Solokan, Air Terjun Mambuliling, Wisata Rohani Pena, Wisata Budaya Kuburan Tedong Tedong, Wisata Budaya Batu Kumila, Gua Kelelawar di Desa Pasapa Mambu
3	MAMASA BARAT	Unit VII	KPH P	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 341/Menhut-II/2011	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	53,555	Getah Pinus, Rotan, Bamboo, Nilam, Siong	Air Terjun Sambabo, Permandian Air Panas di Desa Uhelanu, Aliran Sungai Deras Untuk Arum Jeram
4	BONEHAU KALUMPANG	Unit XII	KPH L	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7e Tahun 2013	SK. 441/Menhut-II/2012	SK.6227/MENLHK - KPHL/PKPHL/DA S.3/7/2019 10 Juli 2018	UPTD	81,624	Rotan, Damar, Madu, Getah, Nilam	Perdagangan Karbon, Wisata Air Terjun Di Hulu Sungai Kinatang, Wisata Alam Pendakian Di Desa Tabulahan, Wisata Religi Dan Wisata Budaya Pada Situs Budaya Tabulahan Di Kab. Mamasa, Situs Kamasi Di Kalumpang Dan Situs Palembang Di Kalumpang, Pemanfaatan Air Untuk Produksi Air Kemasan Di Desa Kinatang
5	MALUND A	Unit X	KPH L	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Peraturan Bupati Majene Nomor. 1 Tahun 2012	SK. 753/Menhut-II/2012		UPTD	52,071	Rotan, Gaharu, Lebah Madu	Permandian Air Panas Tallum Banua, Wisata Alam Arung Jeram Bambangan, Wisata Alam Air Terjun Sambabo, Hutan Pendidikan Baruga Dua, Pengembangan Kegiatan Religi Tallum Banua
6	BUDONG - BUDONG	Unit V	KPH P	SK.799/MENHUT- T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 996/Menhut-II/2013	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/ 2015	UPTD	167,243	Rotan, Damar, Madu	Pemandangan Alam, Air Terjun, Sungai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
				T-II/2009							
7	LARIANG	Unit II	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 15 Tahun 2011	SK. 60/Menhut-II/2011	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	57,916	Rotan, Coklat, Sawit	
8	KAROSSA	UNIT IV	KPH P	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK.305/MENLHK.KPHP/ PKP HP/HPL.0/2/2018	UPTD	63,110	rotan, getah getahan, buah buahan, madu lebah	wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, perdagangan karbon
9	KARAMA	UNIT VI	KPH P	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK. 3/PHPL-KPHP/ PKPHP/ HPL.0/12/2016	UPTD	156,918	rotan, damar, madu	pemandangan alam, air terjun, sungai
10	MAMASA TIMUR	UNIT IX	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	SK. 4809/MENLHK-KPHL/ PKPHL/DAS.3/2019	UPTD	51,086		
11	PASANG KAYU	UNIT I	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.730/MENLHK /SETJEN/PLA.0 /12/2017	SK.10753/MENLHK.KPHL/ PK HPL/DAS.3/12 2019	UPTD	25,662		
12	SARUDU	UNIT III	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.80/MENLHK / SETJEN/PLA.0/ I/2019	SK. 3575/MENLHK - KPHL/ PKPHL /DAS.3/4/2019	UPTD	68,384		

Tabel 2.144 Daftar Kelompok Tani Hutan Teregister Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

1) UPTD KPH MAMASA TENGAH

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	8
KECAMATAN: SUMARORONG						
1	SALUBALO	KADA SITURU'	2018	19 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-KS.001/2018
2	SALUBALO	BAKTI RIMBA	2018	21 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-BR.002/2018
3	SALUBALO	SIPAKASALLE	2018	17 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SPK.003/2018
4	SALUBALO	ANGGREK LENTERA	2018	23 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-AL.004/2018
5	SALUBALO	MESA PENAWA	2018	18 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-MP.005/2018
6	SALUBALO	MESAKADA SALUBULUNG	2018	20 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-MS.006/2018
7	SALUBALO	BINA LESTARI	2018	20 orang	Agroforestry dan Produksi Kopi Bubuk Kemasan	76/03/06/2008/KTH-BL.007/2018
8	SALUBALO	SULIO	2018	23 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah Trigona	76/03/06/2008/KTH-SL.008/2018
9	SALUBALO	KARTIKA JAYA SALUBULUNG	2018	20 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-KJS.009/2018
10	SALUBALO	SINAR BARU RANTELIWAK	2018	18 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SBR.010/2018
11	SALUBALO	SINAR KASIH	2018	17 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SK.011/2018
12	SALUBALO	WANATANI	2018	18 orang	Agroforestry dan Produksi Keripik Merk Keris	76/03/06/2008/KTH-WT.012/2018
13	SASAKAN	DADEKO	2019	21 orang	Agroforestry	76/03/06/2004/KTH-DD.013/2019
14	SASAKAN	BINA BERSAMA	2020	53 orang	Agroforestry, Budidaya Lebah dan Agrofisleri	76/03/06/2004/KTH-BB.014/2020
15	RANTEKAMASE	TUNAS BARU	2018	16 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-TB.015/2018
16	RANTEKAMASE	SATO' TALLANG	2018	17 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-ST.016/2018
17	RANTEKAMASE	TENDAN SITURU'	2018	15 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah Trigona	76/03/06/2010/KTH-TS.017/2018
18	RANTEKAMASE	RANTERANO	2018	27 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-RR.018/2018
19	RANTEKAMASE	TUNAS MUDA	2018	15 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-TM.019/2018
20	RANTEKAMASE	SARASSA' HIJAU	2020	60 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah	76/03/06/2010/KTH-SH.020/2020
KECAMATAN : MAMASA						
21	OSANGO	GUNUNG LESTARI	2018	16 orang	Agroforestry dan Pembibitan Tanaman Produktif/Tanaman Kehutanan	76/03/03/2003/KTH-GL.001/2018

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	8
22	TAUPE	BATU MA'ILLONG	2022	40 orang	Budidaya Lebah Madu Trigona dan Kerajinan Tangan	76/03/03/2006/KTH-BM.002/2022
23	TAUPE	PERMAI	2020	22 orang	Agroforestry	76/03/03/2006/KTH-PM.003/2020
24	PEBASSIAN	SALUMAYANG	2013	30 orang	Agroforestry	76/03/03/2006/KTH-S.004/2020
25	PEBASSIAN	BATU MEBALI	2013	30 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/03/2006/KTH-BM.005/2020
KECAMATAN: BALLA						
26	BALLA TUMUKA	TOSARAPU BUNTU MUSSA	2021	35 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-TBM.001/2021
27	BALLA TUMUKA	BUNTU MUSSA	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-BM.002/2021
28	BALLA TUMUKA	BALLA PEU	2021	38 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-BP.003/2021
29	BALLA TUMUKA	SIKAMASE	2021	35 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-SM.004/2021
30	BALLA TUMUKA	PADAOKKO PADAKEDE	2021	34 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-PP.005/2021
31	PIDARA	HARAPAN BARU	2016	25 orang	Kopi	76/03/12/2004/KTH-HB.006/2021
32	PIDARA	BAMBA SOLO	2011	30 orang	Kopi	76/03/12/2004/KTH-BS.007/2021
33	BALLA SATANETEEAN	KASARAPUAN	2013	23 orang	Getah pinus, Madu, Kopi, Jasling	76/03/12/2004/KTH-K.008/2021
KECAMATAN: MESSAWA						
34	PASMA MAMBU	PATANGLAOAN	2020	45 orang	Agroforestry dan Jasa Lingkungan	76.03.07/DPM/KTH-PL.001/2020
35	MALIMBONG	ORONG	2020	46 orang	Agroforestry dan Jasa Lingkungan	76/03/07/2005/KTH-OR.002/2020
36	SEPANG	SERUMPUN	2021	25 orang	Agroforestry	76/03/07/2004/KTH-SR.003/2021
37	SEPANG	BUTTU TALOBO	2022	30 orang	RHL	76/03/07/2004/KTH-BT.004/2022
38	SEPANG	KADA SITURU'	2022	45 orang	KBR	76/03/07/2004/KTH-KS.005/2022
39	SEPANG	BATU MEMBALI	2022	23 orang	KTA	76/03/07/2004/KTH-BM.006/2022
KECAMATAN: TANDUKKALUA						
40	MANNABABA	BINA TANI	2021	22 orang	KTA	76/03/09/2008/KTH-BT.001/2021
41	MANNABABA	CITRA ULUMEA	2021	21 orang	Agroforestry	76/03/09/2008/KTH-CU.002/2021
42	MANNABABA	TUNAS BARU	2021	19 orang	KTA	76/03/09/2008/KTH-TB.003/2021
43	MANABABA	BUNTU PARAWAN	2022	53 orang	RHL	76/03/09/2008/KTH-BP.004/2022
44	MESAKADA	RANTEKALUA	2019	37 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/09/2008/KTH-Rk.005/2022
45	MESAKADA	TORADA	2019	45 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/09/2008/KTH-Tr.006/2022

2) UPTD KPH MAPILLI

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN BINUANG						
46	Kaleok	Siparampe	2005	25	Agroforestry	76/04/06/2008/KTH-S.001/2005
47	Kaleok	Kayu Colo	2005	25	Agroforestry	76/04/06/2008/KTH-KC.002/2005
48	Amola	Batu Sambuah	2009	25	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-BS.003/2009
49	Amola	Mase mase	2006	21	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-MM.004/2006
50	Amola	Tondok Tanete	2012	22	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-TT.005/2012
51	Amola	Buttu Bandera	2019	27	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-BB.006/2019
52	Paku	Manyang Sallimbo	2014	20	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-MS.007/2014
53	Paku	Samalimbong	2000	26	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-S.008/2000
54	Paku	Kamiri II	2001	20	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-K.009/2001
55	Mirring	Trisetia	1998	26	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-T.010/1998
56	Mirring	Rano	2010	21	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-R.011/2010
57	Mirring	Buttu Puang	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-BP.012/2012
58	Amassangan	Buttu Te'neng	2015	25	Mangrove	76/04/06/1005/KTH-BT.013/2015
59	Amassangan	Batu tandakan	2015	18	Agroforestry	76/04/06/1005/KTH-BT.014/2015
60	Amassangan	Sehati	2009	15	Agroforestry	76/04/06/1005/KTH-S.015/2009
61	Batetangnga	Samaturu	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.016/2012
62	Batetangnga	Siajo	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.017/2012
63	Batetangnga	Salu sitammu	2012	20	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.018/2012
64	Rea	Pantai Hijau	2018	17	Mangrove	76/04/06/2010/KTH-PH.019/2018
65	Kuajang	Kuajang	2001	25	Agroforestry	76/04/06/2002/KTH-K.020/2001
66	Tonyaman	Siamasei	2017	20	Agroforestry	76/04/06/2001/KTH-S.021/2017
67	Mammi	Lestari	2019	25	Agroforestry	76/04/06/2007/KTH-L.022/2019
68	Mammi	Batu Milan	2009	10	Agroforestry	76/04/06/2007/KTH-BM.023/2009
KECAMATAN ANREAPI						
69	Kunyi	Pangngulu Gigi	2015	42	Agroforestry	76/04/13/2005/KTH-PG.001/2015
70	Kunyi	Tappang Indah	2009	27	Agroforestry	76/04/13/2005/KTH-TI.002/2009
KECAMATAN MATAKALI						
71	Barumbung	Salinduk	1995	30	Agroforestry	76/04/14/2003/KTH-S.001/1995
72	Indo Makkombong	Mesakada	2011	30	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-M.002/2011
73	Indo Makkombong	Tammalate	2009	25	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-T.003/2009
74	Indo Makkombong	Bukit Hijau Tada 2	2005	30	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-BHT.004/2005
75	Indo Makkombong	Semangat Baru	2019	47	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-SB.005/2019

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
76	Pasiang	Kayuangen	2009	22	Agroforestry	76/04/14/2004/KTH-KA.006/2009
77	Pasiang	Messa Gau	2009	27	Agroforestry	76/04/14/2004/KTH-MG.007/2009
KECAMATAN TAPANGO						
78	Tuttula	Siammasei	2004	25	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-S.001/2004
79	Tuttula	Mala Pao	2014	15	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-MP.002/2014
80	Tuttula	Embun Pagi	2015	18	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-EP.003/2015
81	Tuttula	Bina Bersama	2014	15	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-BB.004/2014
82	Tuttula	Cinna Situru	2014	25	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-CS.005/2014
83	Kurrak	Suka Maju	2010	26	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-SM.006/2010
84	Kurrak	Batu Sangbua Bersatu	2012	24	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-BSB.007/2012
85	Kurrak	Malik Siparappe	2011	19	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-MS.008/2011
86	Kurrak	Hutan Lestari	2011	25	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-HL.009/2011
87	Kalimbua'	Limbong Miala	2007	21	Agroforestry	76/04/07/2013/KTH-LM.010/2007
88	Kalimbua'	Tunas Muda	2015	16	Agroforestry	76/04/07/2013/KTH-TM.011/2015
89	Bussu	Batu Sitodong	2015	18	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-BS.012/2015
90	Bussu	Sejahtera	2015	26	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-S.013/2015
91	Bussu	Tabulahang	2015	19	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-T.014/2015
92	Tapango Barat	Sejati	2015	26	Agroforestry	76/04/07/2008/KTH-S.015/2015
93	Jambu Malea	Bukit Indah	2007	23	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-BI.016/2007
94	Jambu Malea	Tamangingi	2007	30	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-T.017/2007
95	Jambu Malea	Cahaya Berkah	2016	30	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-CB.018/2016
96	Palatta	Samaturu	2009	19	Agroforestry	76/04/07/2007/KTH-S.019/2009
97	Riso	Tondo Pata	2015	23	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-TP.020/2015
98	Riso	Sarambu Indah	2015	30	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-SI.021/2015
99	Riso	Bukit Harapan	2009	25	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-BH.022/2009
KECAMATAN WONOMULYO						
100	Nepo	Pantai Lestari	2018	27	Mangrove	76/04/03/2007/KTH-PL.001/2018
101	Galeso	Sipatuo			Mangrove, Sylvofishre	76/04/03/2014/KTH-TM.002/20
102	Galeso	Perempuan Kreatif	2019	15	Tepung Mangrove	76/04/03/2014/KTH-TM.003/20
103	Galeso	Sahabat Penyus	2016	15	Mangrove dan Penyus	76.04.03/DM/KTH-SP.004/2016
KECAMATAN LUYO						
104	Pussui	Tanreangin	1990	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-T.001/1990
105	Pussui	Mesa Ate	2008	27	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-MA.002/2008
106	Pussui	Batu Sisoppo	2008	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-BS.003/2008

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
107	Pussui	Bura Pammase	2013	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-BP.004/2013
108	Tenggelang	Siamasei	2005	25	Agroforestry	76/04/10/2002/KTH-S.005/2005
109	Tenggelang	Buttu Salili	2008	25	Agroforestry	76/04/10/2002/KTH-BS.006/2008
110	Sambali-bali	Bunga Manyang	2007	25	Agroforestry	76/04/10/2007/KTH-BM.007/2007
KECAMATAN ALLU						
111	Sayoang	Siarioi	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2007/KTH-S.001/2004
112	Sarangiang	Dakko Pute	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-DP.002/2004
113	Sarangiang	Pao Asso	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-PA.003/2004
114	Sarangiang	Sure'Tammalele	2011	23	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-S.004/2011
115	Sarangiang	Tunas Kelapa	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-TK.005/2008
116	Sarangiang	Bukit Emas	2019	21	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-BE.006/2019
117	Puppuuring	Tammedingin	1999	25	Agroforestry	76/04/15/2005/KTH-T.007/1999
118	Puppuuring	Sululoppo	2012	20	Agroforestry	76/04/15/2005/KTH-S.008/2012
119	Alu	Bocco Tallu	1993	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-BT.009/1993
120	Alu	Malilu Sipkainga	1996	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-MS.010/1996
121	Alu	Ratte Lanu	2014	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-RL.011/2014
122	Alu	Galung-Galung	1996	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-GG.012/1996
123	Alu	Buttu Kaiyyang	2014	19	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-BK.013/2014
124	Alu	Alu Hijau	2019	16	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-AH.014/2019
125	Alu	Sabar Menunggu				
126	Kalumammang	Mesa Akkatta	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-MA.016/2008
127	Kalumammang	Uwai Tumbur	2014	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-UT.017/2014
128	Kalumammang	Sipaingarang	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-S.018/2010
129	Kalumammang	Lambe Mamea	2015	34	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-LM.019/2015
130	Kalumammang	Tunas Baru	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-TB.020/2010
131	Kalumammang	Batu sambua	2017	35	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-BS.021/2017
132	Pao-Pao	Alalang Mannannungan	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-AM.022/2008
133	Pao-Pao	Lolong Gimbal	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-LG.023/2010
134	Pao-Pao	Mannanungan	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-M.024/2010
135	Pao-Pao	Lembang Maissang	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-PLM.025/2004
136	Pao-Pao	Pummeawan	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-PMW.026/2004
137	Pao-Pao	Buttu Combong	2008	20	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-BC.027/2004
138	Pao-Pao	Tibusan	2011	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-T.028/2004
139	Pao-Pao	Uai Matama	2013	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-UM.029/2004

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
140	Pao-Pao	Padada	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-Pdd.030/2004
KECAMATAN LIMBORO						
141	Renggeang	Batu Mengnganga	2014	20	Sutera Alam	76/04/11/2008/KTH-BM.001/2014
142	Renggeang	Renggeang Mandiri	2014	20	Sutera Alam	76/04/11/2008/KTH-RM.002/2014
143	Tandasura	Taerumakka	2003	17	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-T.003/2014
144	Tandasura	Daun Merandang	2008	24	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-DM.004/2014
145	Tandasura	Sinar Pukkopo	2010	25	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-SP.005/2014
146	Tangan Baru	Idola	2011	25	Agroforestry	76/04/11/2010/KTH-I.006/2014
147	Tangan Baru	Paraita	2015	21	Agroforestry	76/04/11/2010/KTH-P.007/2014
148	Salarri	Bukit Tandur	2008	20	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-BT.008/2014
149	Salarri	Bukit Gading	2016	20	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-BG.009/2014
150	Salarri	Mese Ate	1999	23	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-MA.010/2014
151	Napo	Samaturu	2005	23	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-S.011/2014
152	Napo	Suka Maju	2005	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-SM.012/2014
153	Napo	Siamasei	2005	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-S.013/2014
154	Napo	Bukit Todilaling	2001	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-BT.014/2014
155	Todang-todang	Wai Tirattis	2011	25	Agroforestry	76/04/11/2006/KTH-WT.015/2014
156	Todang-todang	Sale'ah	2017		Agroforestry	76/04/11/2006/KTH-S.016/2014
157	Pendulangan	Sisenga	2008	25	Agroforestry	76/04/11/2007/KTH-S.017/2014
KECAMATAN TUTAR						
158	Taloba	Tajang Pammase	2002	25	Agroforestry	76/04/05/2008/KTH-TP.001/2002
159	Taloba	Meriha Bersatu	2011	25	Agroforestry	76/04/05/2008/KTH-MB.002/2011
160	Arabua	Sisenga Sisalili	2009	25	Agroforestry	76/04/05/2010/KTH-SS.003/2018
KECAMATAN CAMPALAGIAN						
161	Laliko	Bukit Pasir Mangrove	2017	25	Konservasi dan Wisata	76/04/05/2002/KTH-BPM.001/2017

3) UPTD KPH MALUNDA

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN SENDANA						
162	Binanga	Rimba Mangrove	2015	25	Konservasi dan Wisata Pendidikan Mangrove	76/05/03/2016/KTH-RM.001/2015
163	Totolisi	Mangrove Lestari	2012	25	Konservasi dan Pembibitan	76/05/03/2004/KTH-ML.002/2012
164	Pundau	Pundo Sipatuo	2011	20	Agroforestry dan Peternakan	76/05/03/2020/KTH-PS.003/2011
165	Pundau	Batu Meana	2012	20	Agroforestry dan Peternakan	76/05/03/2020/KTH-BM.004/2012
KECAMATAN TUBO						
166	Tubo Tengah	Mangrove Tosalama	2017	25	Konservasi	76.04.05/DTT/KTH-MT.001/2017
KECAMATAN BANGGAE DAN BANGGAE TIMUR						
167	Totoli	Lestari	2015	25	Agroforestry	76.05.01.1009/KTH-L.001/2015
168	Baurung	Kobar Lestari	2020	15	Penyu dan Mangrove	76.05.08.1001/DB/KTH-KL.002/2020

4) UPTD KPH KARAMA

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN KALUKKU						
169	Guliling	Guliling Selatan	2011	25	Agroforestry	76/02/03/2010/KTH-GS.001/2011
170	Bebanga	Bunga Karang	2016	15	Konservasi dan Wisata Pendidikan Mangrove	76.02/01/111/KTH-BK.001/2016
171	Belang belang	Pasir Putih	2017	19	Konservasi dan Wisata	76/02/03/2006/KTH-PP.003/2017
172	Tadui	Ecoturism Green Tadui	2019	16	Konservasi dan Wisata Mangrove	76/02/01/2010/KTH-EGT.004/2019
173	Belang belang	Siarloi	2020	19	Agroforestry	76/02/01/2006/KTH-Sr.005/2020
174	Belang belang	Sipatuo	2020	27	Agroforestry	76/02/01/2006/KTH-St.006/2020
175	Bebanga	Lembbang Golla	2020	23	Agroforestry	76.02/01/111/KTH-LG.002/2020

5) UPTD KPH MAMASA TIMUR

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN : SESENAPADANG						
176	Orobua	To'Mamesa	2020	34 orang	Agroforestry	76/03/08/2002/KTH-TM.001/2020

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
177	Malimbong	Barana	2021	17 orang	agroforestry	76/03/08/2013/KTH-BR.002/2021
178	Malimbong	Kasarapuan	2021	15 orang	Agroforestry	76/03/08/2013/KTH-KSP.003/2021
179	Orobua Timur	Pelita Timur	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/08/2004/KTH-PT.004/2021
180	Orobua Timur	Serumpun Salukanan	2021	28 orang	Agroforestry	76/03/08/2004/KTH-SP.005/2021
181	Malimbong	Suren	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/08/2013/KTH-SR.006/2021
KECAMATAN : SUMARORONG						
182	Banea	Buttu Sareong	2021	29 orang	Agroforestry	76/03/06/2009/KTH-BS.001/2021
183	Banea	Tunas Muda	2021	23 orang	agroforestry	76/03/06/2009/KTH-TM.002/2021
KECAMATAN : BALLA						
184	Balla	Bukit Batu	2019	20 orang	Agroforestry, Tenun Tradisional, Kopi	76/03/12/2004/KTH.008/2021
185	Balla Sataneatean	Tondon Saruran	2013	15 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH.008/2021

6) UPTD KPH MAMASA BARAT

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN : MAMBI						
186	SALUBANUA	GAPOKTANHUT POANG BANUA	2021	125	Agroforestry	76/03/01/2016/KTH-BT.001/2021
187	RANTEBULAHAN	KTH TUNAS MUDA	2019	23	Agroforestry	76/03/01/2004/KTH-TM.001/2019
188	SALUMAKAK	RANTEKAMIRI	2019	19	Agroforestry	76/03/01/2025/KTH-R.002/2019
189	SALUMAKAK	KTH RUKUN DAMAI	2021	22 orang	Agroforestry dan Sylvopastory	76/03/01/2025/KTH-RD.003/2021
190	SALUDURIAN	KTH MEKAR INDAH	2021	20 orang	Agroforestry dan Sylvopastory	76/03/01/2030/KTH-MI.004/2021
KECAMATAN : BAMBANG						
191	SALUDENGEN	GAPOKTANHUT LESTARI ALAM SALUDENGEN	2020	28 orang	Agroforestry dan Sylvofishery	76/03/11/2012/KTH-MI.004/2020
192	SIKAMASE	KTH PAKLINDUAN	2020	30 orang	Agroforestry dan Sylposatory	76/03/11/2016/KTH-P.001/2020
193	SIKAMASE	RANTEKALUAK	2020	41 orang	Agroforestry dan Sylposatory	76/03/01/2030/KTH-R.002/2020
KECAMATAN : MEHALAAN						
194	MEHALAAN BARAT	KTH SADANDANGAN	2019	25 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/17/2005/KTH-S.001/2019
195	BOTTENG	MAWAR INDAH	2019	25 orang	Agroforestry & Kopi	76/03/17/2005/KTH-MI.002/2019

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
KECAMATAN : RANTEBULAHAN TIMUR						
196	SALUMOKANAN	KTH PENGUSAHA KOPI	2018	16 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/15/2001/KTH-PK.001/2018
197	SALUMOKANAN	KTH BANGABOSA	2020	15 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/15/2001/KTH-B.002/2020
198	SALUMOKANAN BARAT	SASAKE	2021	25 orang	Agroforestry	76/03/15/2003/KTH-S.003/2021
199	SALUMOKANAN	RIMBA HIJAU	2020	30 orang	Agroforestry	76/03/15/2001/KTH-RH.004/2020
200	SALUMOKANAN UTARA	RANTE LESTARI	2020	30 orang	Agroforestry	76/03/15/2008/KTH-RL.005/2020
KECAMATAN : BUMAL						
201	SALUTAMBUN BARAT	LOMBA	2020	23 orang	Agroforestry	76/03/16/2007/KTH-L.001/2020
KECAMATAN : TABULAHAN						
202	LAKAHANG	TANETE KAMANDE	2020		Agroforestry & SILVOPASTURE	76/03/05/1001/KTH-TK.001/2020
203	LAKAHANG	LANGSANG	2020	23 orang	Agroforestry & SILVOPASTURE	76/03/05/1001/KTH-L.002/2020

7) UPTD KPH BUDONG-BUDONG

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
KECAMATAN : TOBADAK						
204	Tobadak 6	Sumber Rejeki			HHBK Nilam	76/06/01/2003/KTH-SR.001/
205	Tobada 4	Alam Subur			HHBK Nilam	76/06/01/2003/KTH-AS.002/
KECAMATAN : TOPOYO						
206	Tabolang	Magbul Camb	2017	25 orang	HHBK Lebah Madu	76/06/04/2007/KTH.001/2017
207	Salupangka	Passari	2017	25 orang	HHBK Aren	76/06/04/2009/KTH.002/2017
208	Bamba Manurung	Sipalamban	2017	25 orang	Sengon	76/06/04/2012/KTH.003/2017
209	Salu Le'bok	Sipamse	2017	25 orang	Agroforestry	76/06/04/2013/KTH.004/2017
KECAMATAN : BUDONG-BUDONG						
210	Lumu	Pantai Indah	2018	25 orang	Mangrove	76/06/03/2002/KTH.001/2018
211	Salumanurung	Sehati 2	2017	25 orang	Agroforestry	76/06/03/2007/KTH.002/2017
KECAMATAN : KAROSSA						
212	Kambunong	Tanete Rea	2018	25 orang	Mangrove	76/06/05/2009/KTH.001/2018
KECAMATAN : KAROSSA						
213	Leling	Wana Bakti			Agroforestry	

Kelompok Tani Hutan Teregister (KTH Teregister) adalah sebuah kelompok tani yang berfokus pada kegiatan pertanian di hutan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat atau instansi terkait. KTH Teregister beroperasi di hutan dengan tujuan mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu contoh KTH Teregister adalah kelompok tani yang melakukan kegiatan agroforestri di hutan. Agroforestri merupakan sistem pertanian yang menggabungkan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan tanaman hutan di satu lahan. KTH Teregister yang menjalankan agroforestri biasanya mengelola kebun-kebun atau ladang-ladang yang terletak di dalam hutan atau di sekitar hutan.

Keberadaan KTH Teregister penting karena mereka berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Dengan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, KTH Teregister dapat menjaga produktivitas lahan pertanian, meminimalisir erosi tanah, serta mempertahankan keanekaragaman hayati di hutan.

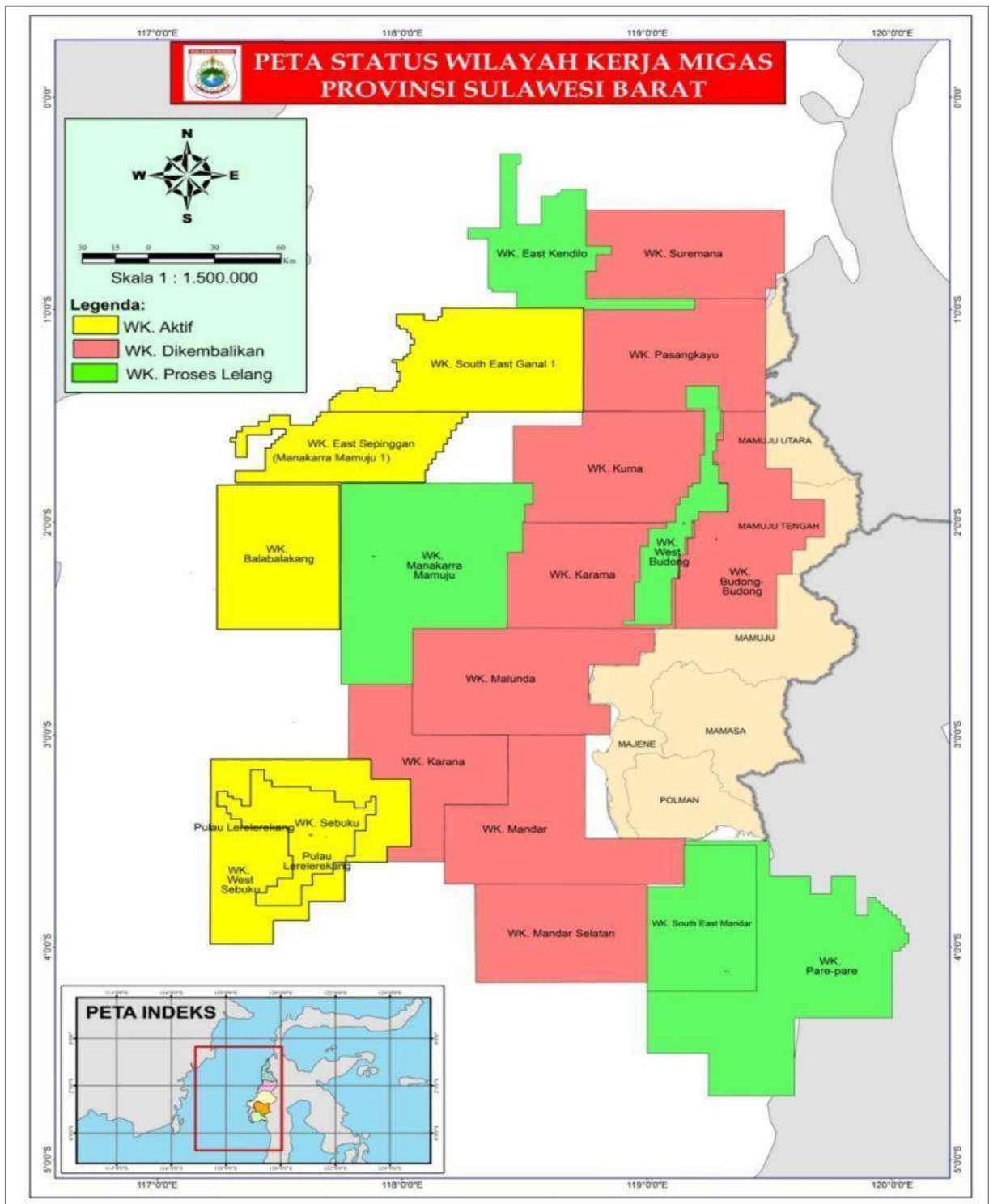
Di Provinsi Sulawesi Barat Kelompok Tani Hutan Teregister terdapat 7 UPTD di 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah.

2.4.5.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, bijih besi, sulfida, serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, di mana menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radioaktif atau uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di mana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan Internasional, baik offshore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada Tahun 2013–2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/Tahun. Menurut standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/Tahun dan untuk para pekerja adalah 20 mSv/Tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

Gambar 2.11 Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional. Adapun kontraktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.145 Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MUBADALA PETROLIUM	SEBUKU	Majene	2,344.9 km ²	Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013 Kegiatan Proses Penyertaan Modal/Participating Interest antara Kalsel dan Sulbar	Aktif (Produksi) Periode Efektif: 22 Sept 1997 – 21 Sept 2027
MUBADALA PETROLIUM	WEST SEBUKU	Majene	4,933 km ²	PSC Kontrak Tahun 2012 Study Geology	Aktif (Eksplorasi) Tanggal efektif KKS: 19 Des 2011
KRISENERGY BV. (BALA BALAKANG)	BALA-BALAKANG	Mamuju	4.190,96 km ²	Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km ² 2014 Pergantian nama blok sesuai dengan SK Kem ESDM No.15.K/13/DJM.E/ 2015	Aktif (Eksplorasi)
ENI INDONESIA. LTD	EAST SEPINGGAN (MANAKARR A MAMUJU 1)	Mateng, Pasangkayu		Pemprov Sulbar telah diusulkan penggantian nama WK menjadi Blok Manakarra Mamuju 1	Aktif (Eksplorasi)
NIKO RECOURCES LIMITED	SOUTHEAST GANAL 1	Matra & Mateng	Luas Wilayah:		Aktif (Eksplorasi)
	PARE PARE	Polewali, Pinrang, Pare-pare	8.373 km ²		Proses Lelang
	MANAKARR A MAMUJU	Mamuju, Mateng	6.995 km ²		Lelang Reguler 2016
	WEST BUDONG	Mamuju, Mateng, Matra	1.723 km ²		Proses Lelang
	EAST KENDILO	Matra		Pemprov Sulbar mengusulkan penggantian Nama WK menjadi Blok Sendana 1	Proses Lelang
	SOUTHEAST MANDAR	Polewali		Konsulda WK Baru Migas berlangsung pd 17 Maret 2016	Lelang Reguler 2016
	SUREMANA 1	Matra		Lelang Reguler Tahun 2016	Lelang Reguler 2016
Pearl Oil	KARANA	Majene	5.389,68 Km ²	Survey 2D (2008)	Telah dikembalikan ke Pemerintah Tahun 2013
STATOIL	KARAMA	Mamuju, Mateng	4.287,37 Km ²	Sumur Eksplorasi Karama-1&Karama-2	Telah dikembalikan ke Pemerintah Tahun 2013

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
CONOCO PHILIPS	KUMA	Mateng, Matra	5086 Km2	Sumur Eksplorasi Kalukku-1	sda
EXXON	MANDAR	Majene, Polewali Mandar	4.196,25 Km2	Kris-1 32,30 mill laut Putera-1 26,04 mil laut Sultan-1 25,35 mill	sda
MARATHON	PASANG KAYU	Pasangkayu	4.707,63 Km2	Sumur Eksplorasi Bravo-1 Romeo-1	sda
EXXON	SUREMANA	Pasangkayu	5.339,63 Km2	Sumur Eksplorasi Rangkong-1	Sda
HARVEST BUDONG-BUDONG B.V.	BUDONG-BUDONG	Mamuju, Mateng & Matra	Tanggal efektif KKS: 16 Jan 2007 Luas Wilayah Kerja: 2.476,45 km ²	Proses Terminasi/ Pengembalian Blok Migas Ke pemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Tanggal 5 Juni 2014.	Telah dikembalikan ke Pemerintah Tahun 2014

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian, Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.146 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
Majene			
1. Ulumanda			
- Desa Sambabo	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Sungai Urekang	Panas Bumi	-	-
2. Pamboang			
- Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Siang	Panas Bumi	-	-
- Desa S. Loppa	Panas Bumi	-	-
3. Sendana			
- Desa Limboro	Panas Bumi	64.531.353 ton	4.287
- Desa Ulidang	Batu Bara	(Hipotesa)	
Polewali Mandar			
1. Tapango			
- Desa Tapango	Bijih Besi (Fe)	163.823,83 ton	5,
- Desa Lapejang	Bijih Besi (Fe)	-	707
- Desa Simbalutung	Bijih Besi (Fe)	-	300
- Desa Bussu	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Desa Takaturung	Bijih Besi (Fe)	-	1.500
- Desa Riso/Kalimbua	Panas Bumi	41 MWe	-
2. Anreapi			
- Desa Pasiang dan Desa Papandangan	Bijih Besi (Fe)	328.525 ton	8
- Desa Ulugalung	Logam Galena (Pb)	-	1.750
- Desa Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan		1.500 ton	199

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
3. Binuang - Desa Mammi - Desa Kurma - Desa Batetangnga	Bijih Besi (Fe) Logam Emas (Au) Logam Galena (Pb)	6.044,04 ton - -	2.445 3000 2.000
4. Matakali - Desa Barumbung	Bijih Besi (Fe)	-	912
5. Campalagian - Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	-
6. Mapilli - Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa - Desa Batupanga Daala - Desa Andau	Logam Emas (Au) Panas Bumi Panas Bumi	- - -	5.000 - -
7. Bulu - Desa Sapporakki	Panas Bumi	292 Mwe	-
8. Matangnga - Desa Matangnga	Panas Bumi	115 Mwe	-
9. Balanipa - Desa Bala	Panas Bumi	-	-
10. Alu - Desa Pao-Pao	Panas Bumi		-
Mamasa			
1. Messawa - Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-
2. Pana - Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken - Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu) Logam Seng (Zn)	- -	- -
3. Tabulahan - Desa Talopak - Desa Tarinding, Talopak	Bijih Besi (Fe) Logam Emas Primer (Au)	Hipotesa -	888 -
4. Sumarorong - Desa Ratta Bo'te	Bijih Besi (Fe)	Hipotesa	-
5. Aralle - Desa Salu Kaiyyang	Bijih Besi (Fe) Logam Mangan (Mn)	- -	- -
6. Mamasa - Desa Makuang Pebassian - Desa Sipai Pebassian - Desa Usango, Rambusaratu, Makau, Salu Mokanan Utara, Lindu Hahangan, Uhailano, Rantetangnga, Salu Kanan, Mungin, Rantekatoang, Indobanua, Rantekamiri, Tamalatik, Timbu Kanan, Malimbong	Logam Mangan (Mn) Logam Pasir Besi Panas Bumi	Hipotesa 900 -	- - -
7. Tabang - Desa Baka Disura'	Logam Emas Primer (Au)	-	5.327
Mamuju			
1. Bonehau - Bonehau - Desa Buttu Ada - Desa Tamalea	Batu Bara Logam Emas (Au) Logam Mangan (Mn) Logam Emas Primer (Au)	3.593.642 ton - - 1.073.570 ton	1,6 - - -

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
2. Kalumpang			
- Desa Karataun	Logam Emas Placer	-	-
	Logam Emas Primer (Au)	-	-
- Desa Bulu	Logam Tembaga (Cu)	-	-
3. Tapalang			
- Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-
4. Tapalang Barat			
- Desa Tapalang	Panas Bumi	30 Mwe	-
5. Simboro			
- Desa Karema	Panas Bumi	10 Mwe	-
6. Kalukku			
- Ampallas	Panas Bumi	40 Mwe	-
- Desa Kona Kaiyyang	Panas Bumi	10 MWe	-
Pasangkayu			
1. Tikke			
- Desa S. Lariang	Logam Emas Placer	103.896	-
2. Dapurang			
- Desa Masabo, Tarakedo	Logam Emas (Au)	-	-
	Logam Tembaga (Cu)	-	-
3. Baras	Batu Bara	-	-
4. Sarudu	Batu Bara	-	-
- Doda	Panas Bumi	-	-
Mamuju Tengah			
1. Topoyo			
- Desa Tabolang	Logam Seng (Zn)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-
2. Karossa			
- Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au)	-	-
	Bijih Besi (Fe)	-	-
	Logam Tembaga (Cu)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
	Logam Seng (Zn)	-	-
	Logam Galena (PbS)	-	-
3. Tobadak			
- Desa S. Andeang	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-
- Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Panasuan	Panas Bumi	-	-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Untuk sebaran lokasi pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat bahwa terdapat 138 jumlah titik/lokasi dengan total luasan lokasi aktivitas pertambangan 4.615,65 hektar. Kabupaten Mamuju merupakan tempat terluas aktivitas pertambangan dimana terdapat 45 titik/lokasi dengan luasan 2.303,3 hektar, luasan terkecil berada pada Kabupaten Majene terdapat 7 titik/lokasi dengan luasan 156,6 hektar.

Tabel 2.147 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2024

Kabupaten	Jumlah Titik/ Lokasi			Tahapan	Luasan Lokasi aktivitas Pertambangan (ha)		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Mamuju	14	31	45	15 Eksp, 9 OP, 7 SIPB	11025,690	1761,23	2303,3
Majene	6	6	7	3 Eksp, 2 OP, 1 SIPB	123,080	151,73	156,6
Polewali Mandar	20	28	26	13 Eksp, 14 OP, 1 SIPB	2110,580	2217,8	401,6

Kabupaten	Jumlah Titik/ Lokasi			Tahapan	Luasan Lokasi aktivitas Pertambangan (ha)		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Mamasa	6	3	3	2 Eksp, 1 OP	13,000	7,54	7,54
Pasangkayu	11	16	23	5 Eksp, 7 OP, 3 SIPB	1136,320	1182,14	1315,61
Mamuju Tengah	19	27	34	10 Eksp, 9 OP, 8 SIPB	268,530	337,19	431
Sulawesi Barat	76	111	138	48 Eksp, 41 OP, 20 SIPB	14.677,20	5.657,63	4.615,65

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2025

Jumlah Desa/Kelurahan yang teraliri listrik dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu desa/kelurahan yang teraliri listrik, desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan sambungan listrik terbatas waktu. Pada Tahun 2020 terdapat 648 desa/kelurahan yang teraliri listrik dan 40 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik tetapi disediakan sambungan listrik terbatas waktu sebanyak 19 desa/kelurahan, sedangkan pada Tahun 2024 secara keseluruhan terdapat 648 desa/kelurahan yang teraliri listrik, 19 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu. Kondisi di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 terdapat 90 desa/kelurahan yang teraliri listrik dan terdapat 11 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu, Pada Tahun 2024 di Kabupaten Mamasa masih terdapat 12 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan 169 desa/kelurahan yang sudah teraliri listrik.

Tabel 2.148 Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

KAB	KEC.	KEL/ DESA	DESA BELUM BERLISTRIK					RATIO DESA BERLISTRIK (%)					PERTUMB. RD BERLISTRIK 2020–2024
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Majene	8	82	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0,00
Polman	16	167	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0,00
Mamasa	17	181	25	21	15	12	8	86,2	88,4	91,71	93,89	95,58	2,62
Mamuju	11	101	15	15	14	11	11	85,1	85,15	86,14	89,11	89,11	1,17
Pasangkayu	12	63	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0,00
Mateng	5	54	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0,00
JUMLAH	69	648	40	36	29	23	19	93,8	94,46	95,52	96,45	97,07	0,86

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.149 Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023

No	Kabupaten	Sambungan Listrik Terbatas Waktu				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mamuju	12	15	15	14	11
2	Majene	0	0	0	0	0
3	Polewali Mandar	0	0	0	0	0
4	Mamasa	24	25	21	16	12
5	Pasangkayu	0	0	0	0	0
6	Mamuju Tengah	0	0	0	0	0
	Sulawesi Barat	36	40	36	30	23

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Barat mendekati 100 persen pada 2025 Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS, PLTM dan jaringan listrik rumah tangga pada daerah terpencil. Melaksanakan program listrik hemat dan murah sebesar 24.000 RTS Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (on grid). Pengembangan pembangkit sistem Hybrid (PLTD & PLTS), pembangunan PLTMH di daerah-daerah terpencil untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 2.150 Ratio Elektrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

KAB	RASIO ELEKTRIFIKASI (RE)					PELANGGAN AN PLN(RT)	NON- PLN (RT)	BELUM BERLISTRIK (RT)
	2020	2021	2022	2023	2024			
Majene	94,37	94,37	98,06	98,11	99,99	36.350	1.971	738
Polman	99,61	99,61	99,84	99,85	99,99	113.257	5.892	181
Mamasa	94,86	94,86	96,62	96,77	99,99	24.713	17.976	1.423
Mamuju	96,99	96,99	98,84	98,85	99,99	63.471	6.692	776
Pasangkayu	96,45	96,45	98,56	98,6	99,99	33.202	1.963	499
Mamuju Tengah	93,58	93,58	97,67	97,73	99,99	31.893	440	751
JUMLAH	96,95	96,95	98,67	98,71	99,99	302.886	34.934	4.368

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2025

Penggunaan Energi/konsumsi energi final di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2023, masih didominasi Minyak Bumi untuk menunjang kebutuhan energi sektor transportasi, dan disusul Batubara memenuhi kebutuhan PLTU, sedangkan saat ini pasokan EBT mendekati target nasional sebesar 23 persen pada Tahun 2025.

Tabel 2.151 Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2023

ENERGI PRIMER	Definisi	2022		2023	
		MTOE	%	MTOE	%
Minyak Bumi	Total Pasokan Minyak Bumi	0.24	51.95	0.20	45.93
Batubara	Total Pasokan Batubara	0.12	21.68	0.13	31.44
Gas Bumi	Total Pasokan Gas Bumi	-	0	-	0
EBT	Total Pasokan EBT	0.10	21.68	0.10	22.63
TOTAL		0.42	100	0.43	100

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Ketergantungan akan energi bahan bakar fosil menjadi masalah utama bangsa Indonesia, pemanfaatan energi daerah masih didominasi ketergantungan pada energi fosil khususnya pada sektor transportasi, industri maupun konsumen pengguna tertentu sejalan dengan gerak laju Pembangunan.

Tabel 2.152 Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM

Produk	Tahun (KL)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Premium	93.299	84.052	67.416	13.312		
Pertalite	35.232	63.860	45.536	107.733	134.603	134.181
Pertamax	699	1.177	3.813	5.175	7360	4.267
Pertamax Turbo	16	21	444	636		112
Solar/Bio Solar	56.588	57.503	47.994	48.815	109.402.70	65.285
Dexlite	64	362	969	1.711	1600,67	926
Pertamina Dex	-	-	48	260	15.46	18
Minyak Tanah	16	-				-
Total	185,914	149,501				
Pertumbuhan (%)	5.99	-24.36				

Sumber: PT. Pertamina

Pola Suplai penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat berasal dari TBBM Parepare dan Donggala Jumlah Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak yang berada di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak Solar (APMS), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan Agen Minyak Tanah (AMT) dengan rincian:

Tabel 2.153 Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Kabupaten	LEMBAGA PENYALUR				
	SPBU Reguler	SPBU Mini	SPBU Kompak (ex-APMS)	SPBU Nelayan	Prestashop
Polewali Mandar	5			1	5
Mamasa	1		1		1
Majene	2	1	1	1	7
Mamuju	6			1	3
Mamuju Tengah	3			1	3
Pasangkayu	4		2	1	2
TOTAL	21	1	4	5	21

Sumber: PT. Pertamina

Kebutuhan BBM Provinsi Sulawesi Barat setiap Tahun semakin meningkat sehingga perlu disikapi dengan mendorong kebijakan dan peluang daerah untuk melakukan Konservasi energi BBM ke BBN, dengan mengoptimalkan potensi pemanfaatan tanaman sawit yang sangat besar di Provinsi Sulawesi Barat.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2022 terdapat luas area penambangan yang liar seluas 88,00 hektar yang telah dilakukan penertiban terhadap penambangan liar tersebut seluas 29,30 hektar dengan persentase 33,30 persen penambangan liar yang diterbitkan pada Tahun 2022.

Tabel 2.154 Persentase Pertambangan Tanpa Izin Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022

No	Tahun	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan (Ha)	Luas Area Penambangan yang liar (Ha)	Persentase (%)
1	2018	115,8	41,09	281,82
2	2019	17,14	31,32	54,73
3	2020	16,54	21,28	77,73
4	2021	38,80	88,00	44,09
5	2022	29,30	88,00	33,30

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2023

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menurut jenis komoditas di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 jumlah IUP mencapai 95 dan WIUP seluas 19.796,26 hektar dan pada Tahun 2022 jumlah IUP sebesar 76 dengan WIUP seluas 14.665,34 hektar. Jumlah IUP pada jenis komoditas batuan yang terbanyak, baik itu pada Tahun 2021 sebanyak 86 dan pada Tahun 2022 sebanyak 70. Jumlah IUP untuk komoditas logam pada 2022 sebanyak 5 izin dan luas wilayah mencapai 3.367,02 hektar. Pada Tahun 2022, persentase IUP berdasarkan jenis komoditas terbesar pada komoditas batuan yang mencapai 92,11 persen sedangkan persentase WIUP terbesar pada komoditas Non Logam yang mencapai 63,09 persen.

Tabel 2.155 Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2024

Komoditas	2021				2022			
	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)
Logam	6	6,32	3.656,26	17,83	5	6,58	3.367,06	22,96
Non Logam	2	2,11	14.051,00	68,54	1	1,32	9.252,00	63,09
Batu Bara	1	1,05	98,00	0,48	0	0,00	0,00	0,00
Batuan	86	90,53	2.695,35	13,15	70	92,11	2.046,28	13,95
Jumlah	95	100,00	20.500,61	100,00	76	100,00	14.665,34	100,00

Lanjutan Tabel diatas

Komoditas	2023				2024			
	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)
Logam	3	2,75	1918,1	33,92	3	2%	1.918,06	29%
Non Logam	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Batu Bara	1	0,92	98,00	1,73	1	1%	98,00	1%
Batuan	105	96,33	3.639,12	64,35	138	97%	4.615,54	70%
Jumlah	109	100,00	5.655,22	100,00	142	100%	6.631,60	100%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2025

Catatan:

- IUP = Izin Usaha Pertambangan,
- WIUP = Wilayah Izin Usaha Pertambangan

2.4.5.29. Urusan Perdagangan

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekspor yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa Tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama Tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

Untuk Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal Terlihat bahwa data cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tidak tersedia dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, pada tahun 2022, terdapat 40 pelaku usaha yang tercakup dalam program binaan, dan angka ini meningkat signifikan menjadi 134 pelaku usaha pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan upaya pembinaan dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2.156 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal

Indikator	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	N/A	N/A	N/A	40 Pelaku Usaha	134 Pelaku Usaha

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2024

2.4.5.30. Urusan Perindustrian

a. Jumlah Industri dan tenaga kerja

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut.

Tabel 2.157 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja			
	Perusahaan		Tenaga Kerja	
	Mikro dan kecil	Industri Besar dan Sedang	Mikro dan kecil	Industri Besar dan Sedang
Majene	1.924		3.373	
Polewali Mandar	15.098	13	29.250	469
Mamasa	2.533		3.455	
Mamuju	3.528	2	6.818	131
Pasangkayu	2.586	7	4.305	905
Mamuju Tengah	2.223	4	3.714	447
Sulawesi Barat	27.892	26	50.915	1.952

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

b. Kawasan Industri

Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Namun ke depan telah direncanakan untuk membangun kawasan industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku, rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 2.158 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	99 IKM	9 IKM	61 IKM

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2024

2.4.5.31. Urusan Transmigrasi

Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman (2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009), UPT Botteng Pasembuk Kab. Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.

Penetapan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah direncanakan sejak Tahun 2012, dimana tahun 2024 telah ditetapkan oleh

Kementerian Bappenas RI dan Kementraian Transmigrasi RI 5 (Lima) kabupaten di Sulawesi Barat sebagai Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional mendukung Ketahanan Pangan dan IKN di Kalimantan yakni Kawasan Tubbi Taramanuk Kabupaten Polman, Kawasan Sarudu Baras Kabupaten Pasangkayu, Kawasan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Mehalaan Mambi Kabupaten Mamasa, Kawasan Ulumanda Kabupaten Majene dan Kawasan Prioritas Kementerian yakni Kawasan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Transmigrasi memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru/Klaster Pertanian/Perkebunan /Perikanan/usaha lainnya mendukung pendapatan Asli Daerah di 221 Desa Kawasan Transmigrasi di Sulawesi Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Pengembangan dan Pembanginan Kawasan Transmigrasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42 Ha;
2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77 Ha;
3. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha.
4. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas Penetapan kawasan 31.150 Ha;
5. Kawasan Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan 24.947,19 Ha;
6. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

Daftar Lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat:

1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
SKP A	13.207,54	APL	10.258,70	Budong-budong	Desa Babana	Berkembang			Pertanian : Ubi Jalar, Padi, jagung
		HP	62,12	Karossa	Desa Kambunong	Tertinggal		Pugar	
		HPT	2.470,81	Tobadak	Desa Tobadak	Berkembang			
		Tubuh Air	180,65	Topoyo	Desa Tumbu	Tertinggal			
					Desa Kabubu	Berkembang		Pugar	
					Desa Tangkou	Tertinggal			
					Desa Bambamanurung	Tertinggal			
					Desa Tabolang	Tertinggal			
					Desa Topoyo	Berkembang	PUSAT SKP	Tempatan	
					Desa Salupangkang IV	Tertinggal		Pugar	
					Desa Tappilina	Tertinggal			
					Desa Paraili	Berkembang			
					Desa Salupangkang	Tertinggal		Pugar	
					Desa Sinabatta	Sangat Tertinggal		Pugar Baru	
SKP B	17.362,54	APL	16.492,26	Budong-budong	Desa Waeputeh	Tertinggal			Perkebunan : Pisang, Rambutan, Jeruk, Kelapa, Coklat
		HL	0,00		Desa Babana	Tertinggal			
		HP	16,81	Tobadak	Desa Pasappa	Berkembang		Baru	
		HPT	306,25		Desa Salu Adak	Tertinggal		Pugar	
		Tubuh Air	339,71		Desa Mahaha	Berkembang			
					Desa Bambadaru	Tertinggal		Pugar	
					Desa Sulobaja	Berkembang			
					Desa Palongan	Berkembang			
					Desa Batu Parigi	Tertinggal		Pugar	
					Desa Tobadak	Berkembang	PUSAT SKP	Tempatan	
				Topoyo	Desa Tabolang	Tertinggal			
					Desa Salulekko	Sangat Tertinggal		Baru	
					Desa Tinali	Berkembang			
					Desa Salumanurung	Berkembang			
					Desa Pasappa	Sangat Tertinggal			
SKP C	16.516,34	APL	16.122,48	Budong-budong	Desa Kiro	Berkembang			Peternakan : Ayam, Babu, Itik, Sapi, Kambing
		HP	83,45		Desa Salupangkang	Sangat Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	
		HPT	240,65		Desa Salogatta	Tertinggal		Pugar	
		Tubuh Air	204,44		Desa Babana	Berkembang			
					Desa Lembah Hada	Sangat Tertinggal		Baru	
					Desa Bojo	Tertinggal		Pugar	
					Desa Pontanakayang	Berkembang			
				Pangale	Desa Polo Lereng	Tertinggal		Pugar	
					Desa Polocamba	Tertinggal		Pugar	
					Desa Kuo	Tertinggal			
				Tobadak	Desa Sulobaja	Berkembang			
					Desa Tobadak	Berkembang			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016
Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - SK Menteri Nakertrans Nomor 293/MEN/X/2009 Tanggal 29 September 2009 Tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi

2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
KPB	1,788.72	APL	1,733.88	Lariang	Desa Bambakoro	Sangat Tertinggal	Pusat KPB	Baru	Kecamatan Lariang
		TUBUH AIR	54.84						Tanaman Pangan : Jagung
SKP A	7,810.64	APL	6,376.92	Baras	Desa Towoni	Sangat Tertinggal		Baru	Hortikultura : Jeruk Manis
		HPK	1,433.72		Desa Bulu Parigi	Berkembang	Pusat SKP	Pugar	Perkebunan : Kelapa Sawit
					Desa Balanti	Tertinggal		Baru	Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Buras
SKP B	12,840.42	APL	10,762.41	Baras	Desa Motu	Berkembang		Pugar	
		HPK	2,078.01		Desa Baras		Pusat SKP		Kecamatan Baras
					Desa Kasano	Tertinggal		Baru	Tanaman Pangan : Jagung
SKP C	5,709.98	APL	5,709.98	Lariang	Desa Singgani	Berkembang		Pugar	Hortikultura : Tomat
					Desa Parabu	Berkembang	Pusat SKP	Pugar	Perkebunan : Kelapa Sawit
					Desa Kulu	Tertinggal		Baru	Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Potong
		TUBUH AIR	83.38		Desa Batu Matoru	Tertinggal		Baru	
					Desa Kenangan	Tertinggal		Baru	Kecamatan Bulu Taba
					Desa Bajawali	Tertinggal		Baru	Tanaman Pangan : Padi
SKP D	8,753.01	APL	8,753.01	Bulu Taba	Desa Sumber Sari	Tertinggal			Hortikultura : Durian
					Desa Lilimori	Berkembang	Pusat SKP	Pugar	Perkebunan : Kelapa Sawit
					Desa Kasta Buana	Berkembang		Pugar	Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Buras
		TUBUH AIR	184.24		Desa Karave	Berkembang		Pugar	
					Desa Bukit Harapan	Tertinggal		Baru	
					Desa Lelejae	Berkembang		Pugar	

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 3 November 2017
Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - Surat Usulan Bupati Kabupaten Mamuju Utara kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 100/1039/VII/2017 Tanggal 9 Juni 2017

Daftar Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat:

1. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Nama SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status				
KPB	239.01	APL	172.06	Ulumanda	Desa Sambabo	Tertinggal	Pusat KPB	Pugar		Pertanian : Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai dan Ubi Kayu
		HL	0.00							
		HPT	53.95		Desa Sambabo	Tertinggal		Pugar	Taukang	
		Tubuh Air	13.76							
SKP A	8,237.32	APL	8,178.70		Desa Popenga	Tertinggal		Pugar	SP 3 Paku	
		HL	0.00		Desa Sambabo	Tertinggal	Pusat SKP A	Baru		
		Tubuh Air	58.62		Desa Ulumanda	Sangat Tertinggal		Baru	Tasambulung	
					Desa Panggalo	Sangat Tertinggal		Baru	SP 4	
					Desa Tandeallo	Sangat Tertinggal		Baru	SP 2 Tamajannang	
					Desa Sulai					
					Desa Kabiraan					
					Desa Salutambung					
					Desa Sambalo					Peternakan : Sapi, Kerbau, ayam
SKP B	7,327.60	APL	7,276.62	Tameroddo	Desa Tallambalao			Pugar	SP 2 Ratapadang	
		HPT	23.41		Desa Awo	Tertinggal				
		Tubuh Air	21.77		Desa Ulidang					
					Desa Manyamba	Tertinggal		Pugar	SP 1 Seppong	
					Desa Seppong	Tertinggal	Pusat SKP B			
					Desa Tameroddo Utara					
					Desa Talu Barua Utara	Berkembang		Tempatan	SP 3 Limboro	
					Desa Tameroddo					
SKP C	14,245.02	APL	6,946.75	Malunda	Desa Malunda	Tertinggal	Pusat SKP C	Pugar		
		HL	0.00		Desa Lamungan Batu					
		HP	14.96		Desa Kayu Angin					
		HPT	7,076.90		Desa Lombong					
		Tubuh Air	206.41		Desa Lombong Timur					
					Desa Mekkatia Selatan					
					Desa Bambang					
					Desa Salutahongan	Tertinggal		Pugar	SP 2	
					Desa Malaya					
					Desa Lombong	Tertinggal		Pugar	SP 1 Panappo	
					Desa Lombong Timur	Tertinggal		Pugar	SP 3 Tabolo	

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017
Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - Surat Usulan Bupati Majene kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 580/2. a/2016
- Surat Usulan Bupati Majene kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 580/2. b/2016
- Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 590/40/2016 Tentang Wilayah Perencanaan untuk Calon Kawasan Transmigrasi seluas 37.649 Ha yang Terletak di Wilayah Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan Tameroddo Kabupaten Majene Tanggal 23 Juni 2016
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Majene bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050/125/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 003/7/2515/SET Tanggal 10 Oktober 2017

2. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas Penetapan kawasan 31.150 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok	
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status				
KPB	250.00	APL	489.27	Mambi	Desa Sendana	Tertinggal	PUSAT KPB		Pertanian : Padi Ladang dan Jagung	
SKP A	6,250.00	TUBUH AIR	14.23	Tabulahan	Desa Lakahang	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan		
		HL	28.72		Desa Lakahang Utama	Tertinggal				
		HPT	52.05		Desa Burana	Sangat Tertinggal	Pugar			
		KSA/KPA	0.01		Desa Gandang Dewata	Sangat Tertinggal	Tempatan			
		TUBUH AIR	53.39		Desa Malatiro	Tertinggal				
					Desa Saluleang	Sangat Tertinggal	Pugar			
					Desa Talopak	Sangat Tertinggal				
					Desa Tampak Kurra	Tertinggal	Pugar			
									Pugar	Tempatan
						Buntu Malangka	Desa Timoro	Tertinggal		
SKP B	7,500.00			Aralle	Desa Taora	Sangat Tertinggal			Perikanan : Budidaya	
					Desa Salurinduk	Tertinggal				
					Desa Buntu Malangka	Sangat Tertinggal	Pugar			
					Desa Kebango	Sangat Tertinggal				
					Desa Ranteberang	Sangat Tertinggal				
		APL	8,939.66		Desa Aralle	Tertinggal	PUSAT SKP			
		HPT	132.93		Desa Paneteian	Sangat Tertinggal	Tempatan			
		TUBUH AIR	86.03		Desa Kalabe	Sangat Tertinggal				
					Desa Aralle Utara	Tertinggal				
					Desa Mahangan	Sangat Tertinggal				
		Desa Aralle Timur	Sangat Tertinggal							
		Desa Aralle Selatan	Tertinggal							
		Desa Ralleanak Utara	Sangat Tertinggal							
		Desa Ralleanak	Sangat Tertinggal	Pugar						
		Desa Uhalanu	Tertinggal							
		Desa Baruru	Sangat Tertinggal							
		Desa Uhaidao	Sangat Tertinggal							
		Desa Pamosiang	Sangat Tertinggal	Tempatan						

SKP B				Buntu Malangka	Desa Kabae	Sangat Tertinggal			Perikanan : Budidaya Mas, Nila dan Lele
					Desa Taora	Sangat Tertinggal			
					Desa Salutambun Barat	Sangat Tertinggal			
					Desa Salutambun	Tertinggal			
				Mambi	Desa Salutambun Timur	Sangat Tertinggal			Perkebunan : Kopi Arabika dan Kakao
					Desa Tapalinnu	Tertinggal		Tempatan	
					Desa Bujung Manurung	Tertinggal			
					Desa Indobanua	Sangat Tertinggal			
				Rantebulahan Timur	Desa Taliputti	Sangat Tertinggal			Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Sondonglajuk	Tertinggal			
					Desa Saludurian	Sangat Tertinggal		Pugar	
					Desa Salualo	Sangat Tertinggal			
SKP C	9,000.00	APL	9,038.83	Bambang	Desa Salumakak	Sangat Tertinggal		Tempatan	Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Salubanua	Sangat Tertinggal			
					Desa Buangin	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	
					Desa Bambang Buda	Tertinggal			
				Mehalaan	Desa Leko	Sangat Tertinggal		Tempatan	Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Salumokanan Barat	Sangat Tertinggal			
					Desa Salumokanan	Tertinggal			
					Desa Kirak	Sangat Tertinggal			
				Bambang	Desa Salumokanan Utara	Sangat Tertinggal			Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Sampale	Sangat Tertinggal			
					Desa Bambang	Tertinggal			
					Desa Bambang Timur	Tertinggal			
SKP D	8,150.00	APL	9,229.26	Mehalaan	Desa Ulumambi Barat	Sangat Tertinggal		Tempatan	Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Ulumambi	Sangat Tertinggal			
					Desa Salubulo	Sangat Tertinggal			
					Desa Balatana	Sangat Tertinggal			
				Mehalaan	Desa Mehalaan	Sangat Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Mehalaan Barat	Sangat Tertinggal			
					Desa Leko Sukamaju	Sangat Tertinggal			
					Desa Salubanua Selatan	Sangat Tertinggal		Tempatan	
				Mehalaan	Desa Katakata	Sangat Tertinggal			Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
					Desa Salubulo	Sangat Tertinggal		Tempatan	
					Desa Batteng	Sangat Tertinggal		Tempatan	
					Desa Kondo	Sangat Tertinggal		Pugar	

Aspek Legal Kawasan	: - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016
Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	: - Surat Usulan Bupati Mamasa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan - Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 471.2/KPTS.220/XI/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Wilayah Perencanaan Untuk - Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Mamasa bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan - Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 596/1263/SET Tanggal 9

3. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan 24.947,19 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
SKP A	7.215.90	APL	7.182.25	Tubbi Taramanu	Desa Taloba	Tertinggal	PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Ladang Perkebunan : Kakao, Langsung dan Durian Peternakan : Sapi dan Kambing
		HL	13.81		Desa Pollewani	Tertinggal			
		HPT	112.04		Desa Tubbi	Tertinggal			
		TUBUH AIR	41.18		Desa Besoangin Utara	Tertinggal			
					Desa Piriang Tapiko	Tertinggal			
SKP B	5.658.03	APL	4.871.74	Luyo	Desa Besoangin	Tertinggal	PUSAT SKP	Pugar	Perikanan : Budidaya Tambak Pertanian : Padi Sawah
		HL	862.42		Desa Ratte	Sangat Tertinggal			
		TUBUH AIR	30.04		Desa Batupanga Daala	Tertinggal			
					Desa Ratte	Sangat Tertinggal			
					Desa Peburu	Tertinggal			
SKP C	4.699.48	APL	4.614.67	Luyo	Desa Poda	Tertinggal	PUSAT SKP	Pugar	Perkebunan : Kakao dan Langsung Perikanan : Budidaya Tambak
		HL	177.45		Desa Taramanu Tua	Sangat Tertinggal			
		TUBUH AIR	1.22		Desa Pollewani	Tertinggal			
					Desa Arabua	Tertinggal			
					Desa Taramanu	Sangat Tertinggal			
SKP D	7.373.78	APL	4.436.25	Bulo	Desa Ambopadang	Tertinggal	PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Sawah Perkebunan : Kakao dan Langsung Perikanan : Budidaya Tambak
		HL	3.060.58		Desa Pussui	Tertinggal			
		TUBUH AIR	20.32		Desa Pussui Barat	Tertinggal			
					Desa Batupanga	Tertinggal			
					Desa Batupanga Daala	Tertinggal			

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016
Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - Surat Usulan Bupati Polewali Mandar kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang
- Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/595/652/HUK Tanggal 09 November 2015 Tentang Wilayah Perencanaan
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 596/1263/SET Tanggal 9

4. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
SKP A	5.743.34	APL	21.637.51	Kalukku	Desa Sinyoyoi	Sangat Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Pertanian : Padi Sawah Perkebunan : Cabai Rawit, Jeruk, Langsung, Kelapa, Lada, Kakao, Kemiri, Sagu
		HPK	8.445.88		Desa Beru-Beru	Berkembang			
					Desa Kalukku Barat	Berkembang			
		TUBUH AIR	334.63		Desa Pammulukang	Tertinggal			
		HPT	15.179.93		Desa Bebanga	Sangat Tertinggal			
SKP B	5.061.57	APL	6.258.09	Simboro	Desa Bebanga	Sangat Tertinggal	Pusat KPB	Baru	Peternakan : Sapi dan Ayam Pertanian : Padi Sawah
		HPK	90.71		Desa Kalukku	Sangat Tertinggal			
					Desa Pokkang	Tertinggal			
		TUBUH AIR	137.75		Desa Kabuloang	Berkembang			
					Desa Gulling	Sangat Tertinggal			
SKP C	7.018.81	APL	43.221.63	Papalang	Desa Sondang	Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Perkebunan : Kakao, Kelapa Dalam, Sawit, Kemiri, Kopi
		HPK	46.075.23		Desa Botteng (UPT Bina)	Tertinggal			
		TUBUH AIR	885.42		Desa Botteng (UPT Bina)	Tertinggal			
					Desa Botteng Utara	Tertinggal			
					Desa Pati'di	Berkembang			
SKP D	7.865.27	APL	37.831.04	Bonehau	Desa Takandeang	Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Pertanian : Padi, Jagung Perkebunan : Kakao, Kopi dan Pala Pertambangan : Emas
		HPK	38.286.82		Desa Galung	Sangat Tertinggal			
		TUBUH AIR	785.15		Desa Galung	Sangat Tertinggal			
					Desa Orobato	Tertinggal			
					Desa Tampalang	Tertinggal			

Aspek Legal Kawasan

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi:

- Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 3 November 2017
- SK Bupati Kabupaten Mamuju tentang Wilayah Perencanaan Calon Kawasan Transmigrasi Nomor 188.45/737/KPTS/XI/2015 Tanggal 16 November 2015
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Mamuju bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050/353/XI/2015/BAPPEDA Bulan November 2015
- Surat Usulan Bupati Mamuju kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 188.45/826/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 553.73/2667/SET Tanggal 10 November 2016

Sumber: Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2022

**Tabel 2.159 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina
Tahun 2017 – 2024**

PENEMPATAN DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI			JUMLAH						POLA/JENIS TRANS MIGRASI
TAHUN	LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI		TPS		TPA		KK	TOTAL JIWA	
			KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2017	1	PIRIANG TAPIKO KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR	15	60	10	38	25	98	TU/TPLK
	2	UPT. RANO SP. 2 KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA	40	16	35	110	75	126	TU/TPLK
	JUMLAH		55	76	45	148	100	224	TU/TPLK
2018	1	UPT. TAMMAJANNANG KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE	15	60	8	27	23	87	TU/TPLK
	2	UPT. RANO SP. 2 KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA	20	80	15	50	35	130	TU/TPLK
	3	UPT. SALUANDEANG KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	20	80	20	69	40	149	TU/TPLK
	4	UPT. TANJUNG CINA KECAMATAN BAMBAKORO KABUPATEN PASANGKAYU	15	60	10	27	25	87	TAMBAK
	JUMLAH		70	280	53	173	123	453	TU/TPLK
2019	1	UPT. SALUANDEANG KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	45	117	70	218	115	335	TU/TPLK
	JUMLAH		45	117	70	218	115	335	TU/TPLK
2021	1	UPT. RANO SP. 2 KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA	11	43	0	0	11	43	TU/TPLK
	2	UPT. SALUANDEANG KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	35	97	13	47	48	144	TU/TPLK
	3	UPT. SALULISU KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	30	74	8	23	38	97	TU/TPLK
	JUMLAH		11	43	0	0	11	43	TU/TPLK
2022	1	UPT. RANO SP. 2 KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA	10	30	13	45	31	75	TU/TPLK

PENEMPATAN DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI			JUMLAH						POLA/JENIS TRANS MIGRASI
TAHUN	LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI		TPS		TPA		KK	TOTAL JIWA	
			KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	2	UPT. TANJUNG CINA KECAMATAN BAMBAKORO KABUPATEN PASANGKAYU	30	147	20	49	50	196	TAMBAK
	3	UPT. RATTE KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR	19	104	0	0	19	104	TU/TPLK
	4	UPT. SALUANDEANG KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	10	40	24	96	34	136	TU/TPLK
	5	UPT. SALULISU KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	11	44	7	22	18	66	TU/TPLK
	JUMLAH		80	365	64	212	152	577	TU/TPLK
2023	1	UPT. SALULISU KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	8	40	10	45	18	85	TU/TPLK
	2	UPT. TANJUNG CINA KECAMATAN BAMBAKORO KABUPATEN PASANGKAYU	10	40	5	49	15	89	TAMBAK
	JUMLAH		18	80	15	94	33	174	TU/TPLK
2024	1	UPT. SALUANDEANG KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	10	34	8	32	18	66	TU/TPLK
	2	UPT. SALULISU KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH	1	4	-	-	1	4	TU/TPLK
	3	UPT. TANJUNG CINA KECAMATAN BAMBAKORO KABUPATEN PASANGKAYU	4	17	6	23	10	40	TAMBAK
	JUMLAH		15	55	14	55	29	110	TU/TPLK

Sumber: Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.160 Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2024

Uraian	Tahun (Persen)						
	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024
Persentase Transmigran Swakarsa	27,19	54,84	62,31	54,84	62,31	39,13	63,00

Sumber: Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.32. Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km². Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/Tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas

24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut. Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

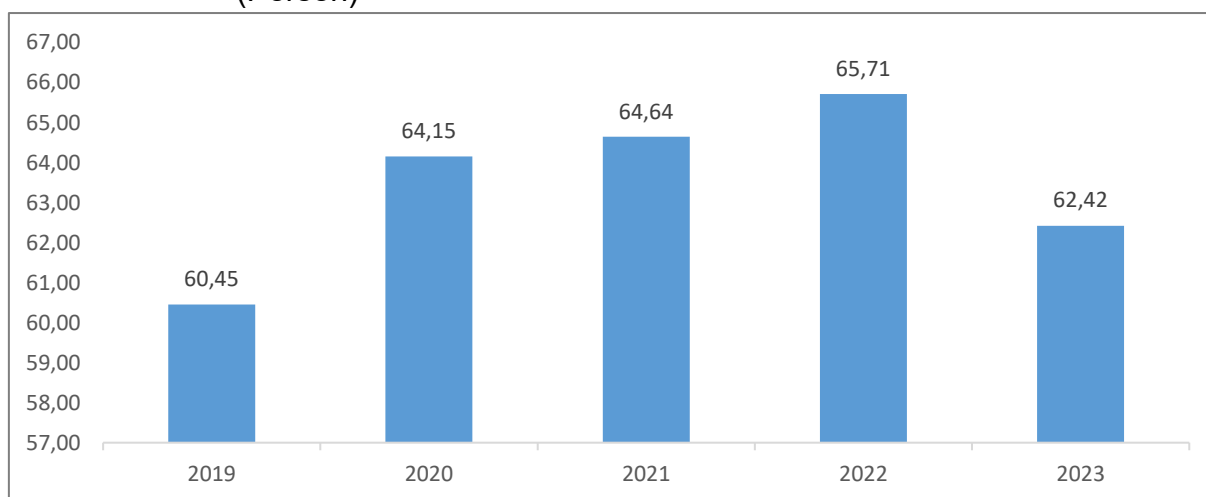
Tabel 2.161 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat (Kg) Tahun 2022-2023

Kabupaten	2022			2023		
	Laut	Tambak	Kolam	Laut	Tambak	Kolam
Majene	-	330.038	96.240	-	560.019	165.970
Polewali mandar	14.702.683	17.696.696	15.423.015	14.702.448	17.696.991	15.423.159
Mamasa	-	-	3.931.940	-	-	4.008.184
Mamuju	1.868.788	7.674.426	12.380.507	25.620.000	9.265.362	293.667
Pasangkayu	-	7.654.450	1.873.000	-	7.441.200	1.765.740
Mamuju Tengah	9.688	2.998.204	120.792	4.856	3.067.065	116.060
Sulawesi Barat	16.581.159	36.353.814	33.825.494	40.327.304	36.692.837	21.772.780

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

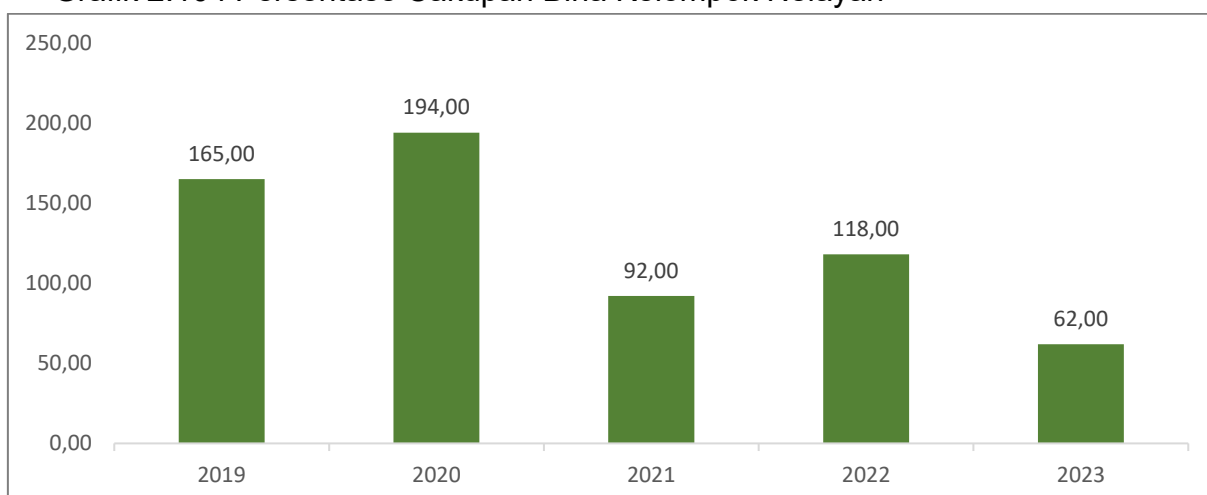
Pada Tahun 2023, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 98 ribu ton meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang sebanyak 86 ribu ton. Produksi pada Tahun 2023 tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 40 ribu ton, air payau 36 ribu ton dan di air tawar 21 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan yang signifikan pada hasil pembudidayaan di laut, sedangkan hasil budidaya air tawar mengalami penurunan.

Grafik 2.103 Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)



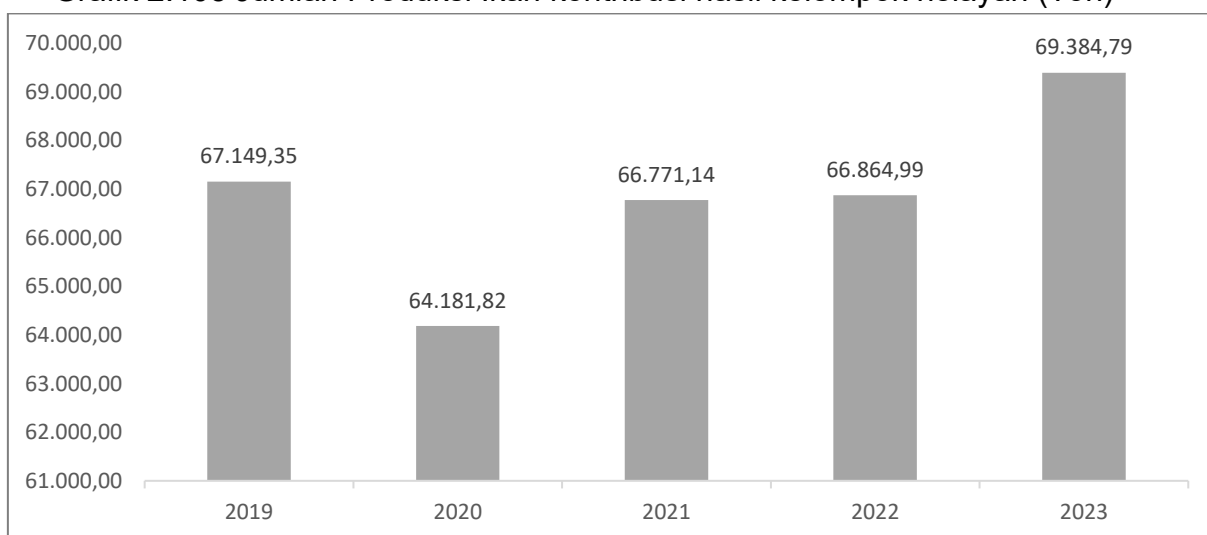
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2023

Grafik 2.104 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Grafik 2.105 Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Tabel 2.162 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023

INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	67,149	64,182	66,771	66,865	65,781
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105,554	133,569	132,911	80,511	100,131
Produksi Olahan (Ton)	3,226.42	3,270.55	3,270.69	3,287.04	
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Konsumsi Ikan (Kg)	52,83	53,38	65,41	65,73	66,10
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)	1,00	7,00	7,00	15,00	8,00
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org)	177.63 (NTN)	118.51 (NTN)	117,54 (NTN)	104,96 (NTN)	102,33
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org)	N/A	N/A	N/A	N/A	118,06
Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Konservasi (Ha)	149,000	149,000	184,682	184,682	184.682
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)	5.00	5.00	5.00	21.00	41
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel & Tepat Waktu (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

2.4.5.33. Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top-down process*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function menjadi money follow program adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 2.163 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan pembangunan					
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	90,97	99,43	99,43	99,43	99,43
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	252	175	139	139	139
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	277	175	175	175	175
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	252	175	175	175	175
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	209	174	174	174	174
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.4.5.34. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.164 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Keuangan							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2025

2.4.5.35. Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (strategic human resource management).

Tabel 2.165 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2023

Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
Jabatan Pimpinan Tertinggi	36	46	5
Jabatan Administrator	202	214	12
Jabatan Pengawas	248	264	16
Jabatan Pelaksana	1.723	0	1.723
Jabatan Fungsional	3.196	0	3.196
Jumlah	5.410	524	4.952

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (unified system). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

Tabel 2.166 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	JUMLAH PESERTA PELATIHAN TEKNIS DAN SOSIAL KULTURAL (Jam)	JUMLAH RATA-RATA JAM PELAJARAN PER PESERTA
2020	30	50
2021	321	162
2022	253	113
2023	341	326
2024	370	314

Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.167 Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2019		2020		2021	
		PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA
1	KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	324	1.378	40	830	601	647
	DIKLATPIM	50	867	40	830	-	-
	PRAJABATAN/LATSAR CPNS	274	511	-	-	601	647
	DIKLAT P2UPD	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT SATPOL PP	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA	-	-	-	-	-	-
	ORIENTASI PPPK	-	-	-	-	-	-
2	KOMPETENSI TEKNIS	-	-	-	-	321	162
	DIKLAT TOC	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENGADAAN BARANG JASA	-	-	-	-	40	39
	DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2019		2020		2021	
		PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA
	DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
	GOVERNMENT TRANSFORMATION ACADEMY (GTA)	-	-	-	-	201	40
	DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)	-	-	-	-	40	27
	DIKLAT TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	40	56
	BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH PRODUK HUKUM	-	-	-	-	-	-
	WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN, STANDAR KEPUASAN MASYARAKAT DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	-	-	-	-	-	-
3	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	30	50	30	50	-	-
	DIKLAT REVOLUSI MENTAL	30	50	30	50	-	-
	PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	-	-	-	-	-	-
4	KOMPETENSI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-
	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		354	1.428	70	880	922	809

Lanjutan Tabel di atas

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2022		2023		2024	
		PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA
1	KOMPETENSI MANAJERIAL	655	647	40	60	1.760	921
	DIKLAT PIM	-	-	-	-	39	905
	PRAJABATAN/LATSAR CPNS	655	647	-	-	-	-
	DIKLAT P2UPD	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT SATPOL PP	-	-	40	60	-	-
	DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA	-	-	-	-	-	-
	ORIENTASI PPPK	-	-	-	-	1.721	16
2	KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	253	113	341	326	370	314
	DIKLAT TOC	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENGADAAN BJ	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
	GOVERNMENT TRANSFORMATION ACADEMY (GTA)	133	50	106	162	200	218
	DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	80	80	40	40
	BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH PRODUK HUKUM	40	27	-	-	-	-

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2022		2023		2024	
		PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA	PESERTA	JP/ PESERTA
	WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN, STANDAR KEPUASAN MASYARAKAT DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	80	36	-	-	-	-
	STUDI BANDING (BENCHMARKING)	-	-	15	5	-	-
	ORIENTASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	-	-	80	60	-	-
	OUTBOUND PENYELENGGARA DIKLAT	-	-	60	19	-	-
	BIMTEK, TRYOUT dan UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG dan JASA PEMERINTAH LEVEL-1	-	-	-	-	40	18
	PELATIHAN JURNALISTIK UNTUK ASN	-	-	-	-	40	18
	WORKSHOP PENYELENGGARA TENAGA PELATIHAN	-	-	-	-	50	20
3	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	-	-	-	-	-	-
	DIKLAT REVOLUSI MENTAL	-	-	-	-	-	-
	PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	-	-	-	-	-	-
4	KOMPETENSI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-
	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	908	760	381	386	2.130	1.235

Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2024

Jumlah jabatan struktural berdasarkan kondisi struktur organisasi dan tata kerja yang ada dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana yang terisi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Berdasarkan data kelembagaan pada Tahun 2024 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 524 jabatan, sedangkan menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 471 jabatan. Kemudian Jumlah ASN berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 6.547 jabatan yang terdiri dari 1.682 fungsional umum dan 4.865 fungsional teknis.

Tabel 2.168 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Tahun	Data Kelembagaan (Eselon)					Jabatan Menurut Kelompok Jabatan (Eselon)					Jabatan Fungsional		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total I	Umum	Teknis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2020	1	47	225	646	919	1	44	202	611	858	2.133	2.396	4.529
2021	1	47	225	646	919	1	42	223	634	900	2.524	2.069	4.593
2022	1	47	225	646	919	1	46	208	625	880	2.539	2.120	4.659
2023	1	45	214	264	524	1	43	209	248	501	2.241	2.828	5.069
2024	1	45	214	264	524	0	36	192	243	471	1.682	4.865	6.547

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan sistem melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, objektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Tabel 2.169 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil terhadap Kebutuhan
2020	5.387	8.220	Kurang	65,54
2021	5.493	8.220	Kurang	66,82
2022	6.287	8.220	Kurang	76,48
2023	7.079	8.220	Kurang	86,12
2024	7.018	8.220	Kurang	85,38

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025

Tabel 2.170 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat Tahun 2019–2023

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
3.1	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal (orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%)	6,76	1,47	11,39	7,87	7,03

2.4.5.36. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang bersinergi dengan propemperda (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam menindaklanjuti program legislasi daerah.

Tabel 2.171 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020–2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2024) Provinsi Sulbar

2.4.5.37. Urusan Pengawasan

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

2.4.5.38. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitas sekretariat DPRD. Dimana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri. Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (*good Governance*).

2.4.5.39. Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik, dan juga di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada Tahun 2024 jumlah ormas yang aktif di Sulawesi Barat sebanyak 260 sedangkan jumlah ormas yang tidak aktif sebanyak 221 dari 372 ormas yang terdaftar. Berdasarkan tingkat keaktifan ormas, kabupaten Polewali Mandar mencapai jumlah tertinggi yaitu 72 ormas.

Tabel 2.172 Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Ormas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Majene	35	20	55
2.	Polewali Mandar	72	58	130
3.	Mamasa	3	0	3
4.	Mamuju	53	58	111
5.	Pasangkayu	37	4	41
6.	Mamuju Tengah	21	11	32
Sulawesi Barat		221	151	372

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2025

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD adalah proses penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini menghasilkan informasi kinerja yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat dan mendukung. Dengan adanya evaluasi, program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif, serta memiliki akuntabilitas yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran di semua tingkat pelaksanaan pembangunan dapat diukur dengan indikator kinerja yang telah didefinisikan sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Utama, yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu.

Hasil evaluasi kinerja tahun lalu, selain mereview RPD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.173 EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Semua Bidang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12.263.835.182				2.109.488.742				3.787.061.096							2.603.933.534						3.641.769.040						12.142.252.412						99,01%						12.142.252.412						0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)				Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			I		II			III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
			8	9	10	11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	19	35.500.000	4	-	5	9.341.171	4	8.959.333	5	17.194.000	18	35.494.504	94,74%	99,98%	18,00	35.494.504	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.482.200	-	1.474.000	-	1.474.000	-	1.474.000	-	20.000	-	4.442.000	0,00%	99,10%	0,00	4.442.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.482.200	-	1.474.000	-	1.474.000	-	1.474.000	-	20.000	-	4.442.000	0,00%	99,10%	0,00	4.442.000	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup Bappeda (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	200.762.900	-	11.566.982	-	27.753.964	-	20.924.099	-	140.359.110	-	200.604.155	0,00%	99,92%	0,00	200.604.155	0,00%	0,00%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	66	66.250.000	-	-	-	-	-	-	66	66.150.000	66	66.150.000	100,00%	99,85%	66,00	66.150.000	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	83.895.900	-	11.566.982	-	27.753.964	-	20.924.099	1	23.617.585	1	83.862.630	100,00%	99,96%	1,00	83.862.630	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	50.617.000	-	-	-	-	-	-	4	50.591.525	4	50.591.525	100,00%	99,95%	4,00	50.591.525	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	840.937.345	-	133.025.823	-	175.794.902	-	153.311.144	-	376.269.556	-	838.401.425	0,00%	99,70%	0,00	838.401.425	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	9	7.139.000	4	1.442.000	5	2.667.000	-	2.990.000	-	39.786	9	7.138.786	100,00%	100,00%	9,00	7.138.786	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	83.635.630	5	12.614.036	5	15.880.198	5	11.089.649	10	44.031.070	10	83.614.953	100,00%	99,98%	10,00	83.614.953	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	6	56.581.426	3	3.200.000	4	14.918.126	4	10.175.495	6	28.287.518	6	56.581.139	100,00%	100,00%	6,00	56.581.139	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	13	13.636.142	-	-	-	-	13	11.643.500	-	-	13	11.643.500	100,00%	85,39%	13,00	11.643.500	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	591.906.767	-	108.769.787	-	127.809.578	-	104.562.500	1	250.282.795	1	591.424.660	100,00%	99,92%	1,00	591.424.660	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	88.038.380	-	7.000.000	-	14.520.000	-	12.850.000	10	53.628.387	10	87.998.387	1000,00%	99,95%	10,00	87.998.387	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	272.245.233	-	-	-	-	-	104.700.000	-	155.317.400	-	260.017.400	0,00%	95,51%	0,00	260.017.400	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	18	272.245.233	-	-	7	-	-	104.700.000	11	155.317.400	18	260.017.400	100,00%	95,51%	18,00	260.017.400	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	496.656.304	-	99.044.986	-	122.798.309	-	132.877.174	-	124.162.424	-	478.882.893	0,00%	96,42%	0,00	478.882.893	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	105.828.000	-	17.654.000	-	23.250.000	-	20.250.000	1	29.674.000	1	90.828.000	100,00%	85,83%	1,00	90.828.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	176.901.664	-	42.476.791	-	48.589.454	-	63.085.244	1	19.986.272	1	174.137.761	100,00%	98,44%	1,00	174.137.761	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	213.926.640	-	38.914.195	-	50.958.855	-	49.541.930	1	74.502.152	1	213.917.132	100,00%	100,00%	1,00	213.917.132	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	710.573.600	-	108.883.800	-	147.693.618	-	117.694.892	-	326.167.702	-	700.440.012	0,00%	98,57%	0,00	700.440.012	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	19	411.960.000	5	93.293.800	5	132.873.618	5	84.969.838	4	91.528.264	19	402.665.520	100,00%	97,74%	19,00	402.665.520	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	242.333.600	-	-	-	-	-	22.311.000	2	219.249.438	2	241.560.438	100,00%	99,68%	2,00	241.560.438	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	61	56.280.000	10	15.590.000	35	14.820.000	10	10.414.054	6	15.390.000	61	56.214.054	100,00%	99,88%	61,00	56.214.054	0,00%	0,00%	
																		106,35%	99,01%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			I			II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
			8			9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	7.892.016	-	-	-	-	1	1.458.640	-	6.311.860	1	7.770.500	100,00%	98,46%	1,00	7.770.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.816.733	-	-	-	-	-	-	1	5.743.000	1	5.743.000	100,00%	98,73%	1,00	5.743.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.322.145	-	-	-	-	-	-	1	8.120.000	1	8.120.000	100,00%	97,57%	1,00	8.120.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	3.769.402	1	916.540	1	283.260	-	-	-	2.465.520	2	3.665.320	100,00%	97,24%	2,00	3.665.320	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	158.131.965	1	20.721.364	1	43.868.580	1	37.602.010	1	54.176.080	4	156.368.034	100,00%	98,88%	4,00	156.368.034	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD (Persen 96 Persen)	0,00	-	0,00	-	72	30.647.981.025	-	5.084.133.131	-	8.987.308.976	-	7.384.883.824	-	9.019.209.076	-	30.475.535.007	0,00%	99,44%	0,00	30.475.535.007	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	162	30.211.603.470	486	5.012.774.191	486	8.877.780.950	486	7.274.216.594	486	8.877.014.624	1.944	30.041.786.359	1200,00%	99,44%	1944,00	30.041.786.359	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	150.669.218	3	18.393.460	3	37.519.796	3	26.730.210	3	67.479.920	12	150.123.386	100,00%	99,64%	12,00	150.123.386	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	47.797.100	3	15.863.600	3	15.194.000	3	14.127.000	1	1.928.000	10	47.112.600	83,33%	98,57%	10,00	47.112.600	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	37.614.074	1	12.051.000	-	20.761.700	-	4.450.480	-	80.000	1	37.343.180	100,00%	99,28%	1,00	37.343.180	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	27.780.580	1	2.769.300	1	2.338.080	1	15.743.600	1	6.706.820	4	27.557.800	100,00%	99,20%	4,00	27.557.800	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	61.531.609	2	10.711.580	5	11.639.200	5	37.190.640	2	1.778.900	14	61.320.320	100,00%	99,66%	14,00	61.320.320	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	110.984.974	1	11.570.000	1	22.075.250	1	12.425.300	1	64.220.812	4	110.291.362	100,00%	99,38%	4,00	110.291.362	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup BPKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	29.856.007	-	8.450.000	-	4.806.700	-	11.739.100	-	4.589.600	-	29.585.400	0,00%	99,09%	0,00	29.585.400	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	29.856.007	3	8.450.000	3	4.806.700	3	11.739.100	2	4.589.600	11	29.585.400	91,67%	99,09%	11,00	29.585.400	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup BPKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	278.008.288	-	57.239.368	-	56.738.610	-	36.047.435	-	122.211.480	-	272.236.893	0,00%	97,92%	0,00	272.236.893	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	168.455.650	2	41.416.248	3	46.343.570	1	29.859.795	1	45.404.200	7	163.023.813	100,00%	96,78%	7,00	163.023.813	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	109.552.638	-	15.823.120	-	10.395.040	-	6.187.640	1	76.807.280	1	109.213.080	100,00%	99,69%	1,00	109.213.080	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	915.971.498	-	82.881.550	-	128.519.439	-	411.625.845	-	287.471.436	-	910.498.270	0,00%	99,40%	0,00	910.498.270	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	58.685.256	-	3.546.700	1	45.531.350	-	580.000	-	8.708.250	1	58.366.300	100,00%	99,46%	1,00	58.366.300	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	152.069.131	1	33.676.050	1	41.288.270	-	38.275.640	-	38.715.000	2	151.954.960	100,00%	99,92%	2,00	151.954.960	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	399.179.000	1	13.750.000	1	7.610.800	1	330.192.000	1	45.244.500	4	396.797.300	100,00%	99,40%	4,00	396.797.300	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	45	306.038.111	6	31.908.800	9	34.089.019	20	42.578.205	10	194.803.686	45	303.379.710	100,00%	99,13%	45,00	303.379.710	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	931.480.000	-	-	-	524.064.500	-	-	-	388.076.000	-	912.140.500	0,00%	97,92%	0,00	912.140.500	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	26	931.480.000	-	-	26	524.064.500	-	-	-	388.076.000	26	912.140.500	100,00%	97,92%	26,00	912.140.500	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	739.036.068	-	114.034.187	-	209.646.896	-	205.383.326	-	187.079.420	-	716.143.829	0,00%	96,90%	0,00	716.143.829	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	51.678.068	3	13.626.760	3	11.942.100	3	13.453.000	3	12.216.580	12	51.238.440	100,00%	99,15%	12,00	51.238.440	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	72	687.358.000	12	100.407.427	24	197.704.796	24	191.930.326	12	174.862.840	72	664.905.389	100,00%	96,73%	72,00	664.905.389	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.070.921.603	-	327.084.030	-	141.617.945	-	122.752.842	-	460.028.400	-	1.051.483.217	0,00%	98,18%	0,00	1.051.483.217	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	31	419.815.000	8	140.257.080	12	55.054.745	2	84.244.342	9	132.666.132	31	412.222.299	100,00%	98,19%	31,00	412.222.299	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	108.657.822	-	14.306.950	-	34.097.400	-	29.108.500	3	30.901.668	3	108.414.518	100,00%	99,78%	3,00	108.414.518	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	261.000.000	1	170.000.000	1	40.935.800	-	-	-	50.000.000	2	260.935.800	100,00%	99,98%	2,00	260.935.800	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	55	281.448.781	12	2.520.000	15	11.530.000	12	9.400.000	16	246.460.600	55	269.910.600	100,00%	95,90%	55,00	269.910.600	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	1050,68%	99,29%						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
			5	6		7	8	9	10	11	12	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	0,00%	5,88%	0,00	100.000	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	305.735.737	-	35.168.437	-	75.951.453	-	92.875.446	-	97.845.007	-	301.840.343	0,00%	98,73%	0,00	301.840.343	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	10.000.000	2	1.760.600	-	-	-	6.375.100	-	1.855.100	2	9.990.800	20,00%	99,91%	2,00	9.990.800	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	300	35.050.000	50	4.841.500	-	6.675.000	-	10.495.500	-	13.036.000	50	35.048.000	16,67%	99,99%	50,00	35.048.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	80	10.400.000	20	2.600.000	-	1.000.000	-	4.200.000	-	2.600.000	20	10.400.000	25,00%	100,00%	20,00	10.400.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	60	63.325.583	10	11.821.468	-	15.236.863	-	16.565.062	-	16.148.604	10	59.771.997	16,67%	94,39%	10,00	59.771.997	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	70	145.666.520	10	12.608.309	-	49.129.500	-	48.824.220	-	35.008.563	10	145.570.592	14,29%	99,93%	10,00	145.570.592	0,00%	0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	5.081.474	-	-	-	1.671.050	-	3.404.544	-	-	-	5.075.594	0,00%	99,88%	0,00	5.075.594	0,00%	0,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	36.212.160	-	1.536.560	-	2.239.040	-	3.011.020	-	29.196.740	-	35.983.360	0,00%	99,37%	0,00	35.983.360	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			-	-	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	55.179.168	-	9.450.000	-	16.828.332	-	16.200.970	-	12.558.420	-	55.037.722	0,00%	99,74%	0,00	55.037.722	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	55.179.168	-	9.450.000	-	16.828.332	-	16.200.970	-	12.558.420	-	55.037.722	0,00%	99,74%	0,00	55.037.722	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	58.300.000	-	-	-	14.957.701	-	27.151.190	-	13.925.540	-	56.034.431	0,00%	96,11%	0,00	56.034.431	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	58.300.000	-	-	-	14.957.701	-	27.151.190	-	13.925.540	-	56.034.431	0,00%	96,11%	0,00	56.034.431	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																7,78%	98,97%						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-	-	-	952.247.201	-	144.895.648	-	165.011.688	-	234.067.183	-	398.917.915	-	942.892.434	-	942.892.434	99,02%	-	942.892.434	0,00%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
		5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11.03 Poin 21,17 Poin 24,47 Bop)	0,00	-	0,00	-	10,67	109.220.320	-	25.241.560	-	14.113.980	-	27.295.000	-	41.657.280	-	108.307.820	0,00%	99,16%	0,00	108.307.820	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	50.255.520	1	9.150.000	1	5.600.000	-	12.595.000	-	22.805.520	2	50.150.520	66,67%	99,79%	2,00	50.150.520	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.606.840	1	5.856.840	-	2.500.000	-	1.250.000	-	-	1	9.606.840	100,00%	100,00%	1,00	9.606.840	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.158.040	-	-	-	-	-	3.750.000	-	7.408.040	-	11.158.040	0,00%	100,00%	0,00	11.158.040	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.734.720	1	2.734.720	-	-	-	-	-	-	1	2.734.720	100,00%	100,00%	1,00	2.734.720	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.546.720	-	-	-	-	-	-	-	2.546.720	-	2.546.720	0,00%	100,00%	0,00	2.546.720	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	32.918.480	-	7.500.000	-	6.013.980	-	9.700.000	-	8.897.000	-	32.110.980	0,00%	97,55%	0,00	32.110.980	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	2.197.536	-	-	-	-	-	-	-	2.197.536	-	2.197.536	0,00%	100,00%	0,00	2.197.536	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.197.536	-	-	-	-	-	-	-	2.197.536	-	2.197.536	0,00%	100,00%	0,00	2.197.536	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengisian Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	104.482.300	-	23.260.000	-	9.450.940	-	42.330.000	-	26.402.860	-	101.443.800	0,00%	97,09%	0,00	101.443.800	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	76.941.800	-	11.700.000	-	9.450.940	-	27.049.500	-	26.402.860	-	74.603.300	0,00%	96,96%	0,00	74.603.300	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	27.540.500	2	11.560.000	3	-	1	15.280.500	-	-	6	26.840.500	60,00%	97,46%	6,00	26.840.500	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab				
			6			I		II		III		IV			12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			5			7	8	9	10	11		12	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K
3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	470.000.012	-	81.112.088	-	66.858.612	-	118.236.233	-	201.775.431	-	467.982.364	0,00%	99,57%	0,00	467.982.364	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	85.376.000	1	10.628.800	-	7.100.000	-	23.791.300	-	43.849.000	1	85.369.100	50,00%	99,99%	1,00	85.369.100	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	4.840.000	-	-	-	-	-	-	-	4.840.000	-	4.840.000	0,00%	100,00%	0,00	4.840.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	56.655.100	1	12.365.148	-	6.644.652	-	17.008.253	-	20.609.091	1	56.627.144	50,00%	99,95%	1,00	56.627.144	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	323.128.912	1	58.118.140	1	53.113.960	-	77.436.680	-	132.477.340	2	321.146.120	100,00%	99,39%	2,00	321.146.120	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	101.509.033	-	-	-	56.708.000	-	-	-	42.400.000	-	99.108.000	0,00%	97,63%	0,00	99.108.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	101.509.033	5	-	1	56.708.000	-	-	-	42.400.000	6	99.108.000	100,00%	97,63%	6,00	99.108.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	164.838.000	-	15.282.000	-	17.880.156	-	46.205.950	-	84.484.808	-	163.852.914	0,00%	99,40%	0,00	163.852.914	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	122.910.000	1	11.800.000	1	14.980.156	1	42.802.950	-	52.568.308	3	122.151.414	75,00%	99,38%	3,00	122.151.414	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	18.540.000	1	-	-	2.900.000	-	1.800.000	-	13.680.000	1	18.380.000	50,00%	99,14%	1,00	18.380.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	23.388.000	1	3.482.000	1	-	-	1.603.000	-	18.236.500	2	23.321.500	66,67%	99,72%	2,00	23.321.500	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	59.180.042	1	-	-	13.645.856	-	25.693.016	-	19.823.335	1	59.162.207	100,00%	99,97%	1,00	59.162.207	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	21.273.616	1	12.462.287	-	-	-	-	-	8.790.258	1	21.252.545	100,00%	99,90%	1,00	21.252.545	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	37.733.235	-	-	-	14.220.885	-	-	1	23.334.108	1	37.554.993	100,00%	99,53%	1,00	37.554.993	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	40.073.461	2	8.375.581	-	9.169.331	-	5.810.052	-	16.680.586	2	40.035.550	100,00%	99,91%	2,00	40.035.550	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	335.179.475	3	35.513.905	2	80.013.665	1	120.239.255	1	95.068.361	7	330.835.186	100,00%	98,70%	7,00	330.835.186	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	17	-	26	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	31.894.287.818	33	5.793.125.861	32	10.982.048.360	-	6.985.289.536	-	7.828.930.617	65	31.589.394.374	64,51%	99,04%	64,51	31.589.394.374	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	3420	29.905.804.365	900	5.387.736.656	900	10.547.702.451	910	6.500.029.239	750	7.172.308.416	3.460	29.607.776.762	101,17%	99,00%	3460,00	29.607.776.762	0,00%	0,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	220.038.017	3	35.631.150	-	62.834.964	-	54.024.955	-	63.534.230	3	216.025.299	100,00%	98,18%	3,00	216.025.299	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11000	1.198.478.369	2.500	254.651.956	2.500	274.790.854	2.350	353.535.010	2.700	314.537.155	10.050	1.197.514.975	91,36%	99,92%	10050,00	1.197.514.975	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	337.613.019	1	54.100.750	-	59.176.480	-	49.126.820	-	173.801.460	1	336.205.510	100,00%	99,58%	1,00	336.205.510	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	46.513.768	2	7.579.920	-	4.052.100	-	5.159.000	-	29.681.000	2	46.472.020	100,00%	99,91%	2,00	46.472.020	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	133.282.390	2	42.740.911	1	23.470.183	2	15.287.512	-	51.736.856	5	133.235.462	100,00%	99,96%	5,00	133.235.462	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	52.557.890	4	10.684.518	4	10.021.328	4	8.127.000	4	23.331.500	16	52.164.346	100,00%	99,25%	16,00	52.164.346	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.127.851.034	21	794.933.948	27	1.058.587.667	-	1.295.981.019	-	2.957.168.312	-	6.106.670.946	0,00%	99,65%	0,00	6.106.670.946	0,00%	0,00%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	30	468.528.363	20	104.313.250	10	111.945.512	-	79.966.900	-	171.939.024	30	468.164.686	100,00%	99,92%	30,00	468.164.686	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	2.626.242.661	1	354.151.450	1	496.243.000	1	740.168.375	1	1.017.799.950	4	2.608.362.775	100,00%	99,32%	4,00	2.608.362.775	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	181.552.384	1	43.441.480	1	13.715.000	1	28.370.280	1	95.722.000	4	181.248.760	100,00%	99,83%	4,00	181.248.760	0,00%	0,00%	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	2.329.132.818	2	218.574.988	1	367.132.375	1	268.712.350	2	1.473.147.850	6	2.327.567.563	100,00%	99,93%	6,00	2.327.567.563	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	72	93.491.211	20	19.180.000	30	15.313.000	10	21.602.000	22	37.317.328	82	93.412.328	113,89%	99,92%	82,00	93.412.328	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	428.903.597	1	55.272.780	1	54.238.780	-	157.161.114	-	161.242.160	2	427.914.834	100,00%	99,77%	2,00	427.914.834	0,00%	0,00%	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-		0,00%	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	97.040.843	23	13.419.005	25	37.427.137	-	15.226.050	-	30.243.611	48	96.315.803	47,50%	99,25%	47,50	96.315.803	0,00%	0,00%	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	97.040.843	1	13.419.005	-	37.427.137	1	15.226.050	-	30.243.611	2	96.315.803	100,00%	99,25%	2,00	96.315.803	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.461.695.147	18	257.059.836	24	170.681.290	-	307.661.528	-	713.566.982	-	1.448.969.636	0,00%	99,13%	0,00	1.448.969.636	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	7	385.147.823	-	-	-	-	-	-	7	375.733.100	7	375.733.100	100,00%	97,56%	7,00	375.733.100	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	161.601.162	4	21.489.833	2	61.921.881	2	52.126.238	2	25.883.806	10	161.421.758	100,00%	99,89%	10,00	161.421.758	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	210.881.767	1	46.280.514	-	57.073.632	-	35.756.558	-	71.376.545	1	210.487.249	100,00%	99,81%	1,00	210.487.249	0,00%	0,00%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	165.382.977	3	12.999.489	2	45.809.975	1	19.648.079	1	85.662.271	7	164.119.814	100,00%	99,24%	7,00	164.119.814	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	38.565.418	-	-	1	1.295.802	-	36.693.605	1	487.500	2	38.476.907	100,00%	99,77%	2,00	38.476.907	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	120	500.116.000	55	176.290.000	45	4.580.000	11	163.437.048	8	154.423.760	119	498.730.808	99,17%	99,72%	119,00	498.730.808	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	11.910.280.014	18	1.667.525.210	28	2.306.995.266	-	3.889.762.907	-	4.040.332.828	-	11.904.616.211	0,00%	99,95%	0,00	11.904.616.211	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	1.535.533.767	4	454.560.670	-	344.452.070	-	198.961.380	-	537.517.290	4	1.535.491.410	100,00%	100,00%	4,00	1.535.491.410	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	656.143.526	4	181.023.801	-	141.650.401	-	98.246.027	-	234.779.600	4	655.699.829	100,00%	99,93%	4,00	655.699.829	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	4.285.276.179	2	423.718.520	-	415.863.880	-	2.674.775.320	-	770.891.810	2	4.285.249.530	100,00%	100,00%	2,00	4.285.249.530	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			6			I		II		III		IV			12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
			5	Rp		7	8	9	10	11	12	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	517.165.302	1	-	1	64.790.380	-	192.887.441	-	259.460.280	2	517.138.101	100,00%	99,99%	2,00	517.138.101	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.653.059.884	3	535.253.874	3	1.227.762.247	3	353.787.935	3	1.536.123.608	12	3.652.927.664	100,00%	100,00%	12,00	3.652.927.664	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.064.357.435	3	62.337.093	3	88.331.074	3	353.004.401	3	560.205.532	12	1.063.878.100	100,00%	99,95%	12,00	1.063.878.100	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	148.193.629	1	10.631.252	-	24.145.214	-	18.100.403	-	91.985.018	1	144.861.887	100,00%	97,75%	1,00	144.861.887	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	50.550.292	-	-	-	-	-	1	49.369.690	1	49.369.690	100,00%	97,66%	1,00	49.369.690	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	13.430.328.543	-	-	11	158.000.000	-	5.549.807.805	-	7.591.214.681	11	13.299.022.486	11,00%	99,02%	11,00	13.299.022.486	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-		-		0,00%			-		0,00%		
Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-		-		0,00%			-		0,00%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	600.776.000	-	-	-	-	-	3	600.349.236	3	600.349.236	100,00%	99,93%	3,00	600.349.236	0,00%	0,00%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	70	12.829.552.543	-	-	15	158.000.000	30	5.549.807.805	25	6.990.865.445	70	12.698.673.250	100,00%	98,98%	70,00	12.698.673.250	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.997.192.012	26	1.639.102.000	35	1.599.256.012	-	1.330.001.116	-	2.361.069.734	-	6.929.428.862	0,00%	99,03%	0,00	6.929.428.862	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	390.108.606	3	100.170.107	3	67.256.061	3	96.819.174	3	124.403.983	12	388.649.325	100,00%	99,63%	12,00	388.649.325	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.357.258.406	3	788.437.843	3	792.758.441	3	853.313.192	3	881.707.061	12	3.316.216.537	100,00%	98,78%	12,00	3.316.216.537	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.249.825.000	1	750.494.050	-	739.241.510	-	379.868.750	-	1.354.958.690	1	3.224.563.000	100,00%	99,22%	1,00	3.224.563.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	9.710.321.826	25	2.148.175.928	32	1.347.230.681	-	2.488.716.857	-	3.662.071.866	-	9.646.195.332	0,00%	99,34%	0,00	9.646.195.332	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	1.013.923.311	5	184.861.721	10	283.485.204	2	157.548.946	3	387.889.479	20	1.013.785.350	100,00%	99,99%	20,00	1.013.785.350	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	120	3.782.442.038	34	690.603.457	25	451.824.990	46	1.242.459.801	17	1.336.628.687	122	3.721.516.935	101,67%	98,39%	122,00	3.721.516.935	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	170	1.505.510.557	35	416.659.750	44	230.460.987	63	306.031.350	44	549.299.400	186	1.502.451.487	109,41%	99,80%	186,00	1.502.451.487	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	3.408.445.920	3	856.051.000	3	381.459.500	3	782.676.760	3	1.388.254.300	12	3.408.441.560	100,00%	100,00%	12,00	3.408.441.560	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)				SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	19.165.000	-	3.750.000	-	2.850.000	-	2.500.000	-	10.064.200	-	19.164.200	0,00%	100,00%	0,00	19.164.200	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.109.680	1	3.750.000	-	4.600.000	-	2.500.000	-	9.259.400	1	20.109.400	100,00%	100,00%	1,00	20.109.400	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	18.052.481	-	3.750.000	-	2.500.000	-	3.650.000	-	8.150.600	-	18.050.600	0,00%	99,99%	0,00	18.050.600	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	16.559.856	1	3.750.000	1	2.500.000	-	3.400.000	-	6.909.000	2	16.559.000	50,00%	99,99%	2,00	16.559.000	0,00%	0,00%							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	18.884.400	2	3.750.000	2	2.900.000	-	3.600.000	-	8.633.500	4	18.883.500	57,14%	100,00%	4,00	18.883.500	0,00%	0,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	11.530.407.968	25	3.531.641.352	25	2.434.083.677	-	1.718.869.083	-	3.754.075.871	50	11.438.669.983	50,00%	99,20%	50,00	11.438.669.983	0,00%	0,00%							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	97	11.478.863.504	24	3.520.391.352	24	2.426.083.677	-	1.711.369.083	-	3.729.282.571	48	11.387.126.683	49,48%	99,20%	48,00	11.387.126.683	0,00%	0,00%							
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.794.464	1	3.750.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	7.044.300	1	15.794.300	100,00%	100,00%	1,00	15.794.300	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	35.750.000	-	7.500.000	1	5.500.000	-	5.000.000	-	17.749.000	1	35.749.000	50,00%	100,00%	1,00	35.749.000	0,00%	0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	25	-	25	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%								
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	118.819.120	25	4.300.000	25	5.550.000	-	72.831.000	-	35.698.600	50	118.379.600	50,00%	99,63%	50,00	118.379.600	0,00%	0,00%							
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	66.484.600	-	-	1	-	-	65.135.000	-	939.600	1	66.074.600	100,00%	99,38%	1,00	66.074.600	0,00%	0,00%							
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	52.334.520	4	4.300.000	3	5.550.000	-	7.696.000	-	34.759.000	7	52.305.000	46,67%	99,94%	7,00	52.305.000	0,00%	0,00%							
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	657.049.361	25	72.637.220	25	93.156.900	-	108.354.620	-	382.277.241	50	656.425.981	50,00%	99,91%	50,00	656.425.981	0,00%	0,00%							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	5.678.746	-	-	-	1.742.000	-	2.364.400	-	1.474.600	-	5.581.000	0,00%	98,28%	0,00	5.581.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	72.682.256	-	11.381.000	-	11.410.000	-	15.193.000	-	34.697.700	-	72.681.700	0,00%	100,00%	0,00	72.681.700	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	60.183.228	-	11.348.650	-	7.140.000	-	21.500.000	-	20.193.000	-	60.181.650	0,00%	100,00%	0,00	60.181.650	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	23.640.000	-	-	-	660.000	-	660.000	-	22.320.000	-	23.640.000	0,00%	100,00%	0,00	23.640.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	124.532.331	-	25.085.000	-	23.569.800	-	30.780.000	-	45.097.000	-	124.531.800	0,00%	100,00%	0,00	124.531.800	0,00%	0,00%	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	342.132.800	-	24.822.570	-	48.635.100	-	37.857.220	-	230.294.941	-	341.609.831	0,00%	99,85%	0,00	341.609.831	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		28.200.000		-		-		-		28.200.000		28.200.000		100,00%		28.200.000		0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	103.989.589	25	-	25	84.700.000	-	-	-	18.279.100	50	102.979.100	50,00%	99,03%	50,00	102.979.100	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	103.989.589	-	-	-	84.700.000	-	-	-	18.279.100	-	102.979.100	0,00%	99,03%	0,00	102.979.100	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	298.972.349	25	71.296.578	25	51.530.787	-	45.625.996	-	130.458.133	50	298.911.494	50,00%	99,98%	50,00	298.911.494	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	37.596.459	3	8.000.000	-	6.700.000	-	6.350.000	-	16.546.000	3	37.596.000	25,00%	100,00%	3,00	37.596.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	102.746.600	3	21.558.578	2	21.080.787	-	15.575.996	-	44.475.933	5	102.691.294	41,67%	99,95%	5,00	102.691.294	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	158.629.290	-	41.738.000	-	23.750.000	-	23.700.000	-	69.436.200	-	158.624.200	0,00%	100,00%	0,00	158.624.200	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	807.252.800	25	25.795.777	25	120.815.665	-	243.091.630	-	416.248.669	50	805.951.741	50,00%	99,84%	50,00	805.951.741	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	43.440.000	-	10.846.635	-	13.945.392	-	10.009.564	-	8.462.179	-	43.263.770	0,00%	99,59%	0,00	43.263.770	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
		5	Rp	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	170.480.000	-	13.274.142	-	78.079.823	-	22.599.566	-	56.509.709	-	170.463.240	0,00%	99,99%	0,00	170.463.240	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	543.465.300	-	-	-	26.190.450	-	196.223.500	-	319.943.901	-	542.357.851	0,00%	99,80%	0,00	542.357.851	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	49.867.500	-	1.675.000	-	2.600.000	-	14.259.000	-	31.332.880	-	49.866.880	0,00%	100,00%	0,00	49.866.880	0,00%	0,00%	
																		43,43%	99,30%					
																</								

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8	9			10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	102	90.772.818	25	-	15	34.395.800	-	11.143.500	-	36.672.600	40	82.211.900	39,22%	90,57%	40,00	82.211.900	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	250.953.489	3	28.000.000	2	51.645.000	-	68.866.200	-	61.988.700	5	210.499.900	41,67%	83,88%	5,00	210.499.900	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	136.683.241	3	-	2	24.550.000	-	22.395.000	-	57.588.000	5	104.533.000	41,67%	76,48%	5,00	104.533.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	95.103.260	1	-	-	47.543.800	-	-	-	30.925.000	1	78.468.800	100,00%	82,51%	1,00	78.468.800	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	59.341.303	1	-	-	24.768.000	-	-	-	29.563.000	1	54.331.000	50,00%	91,56%	1,00	54.331.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	13	105.413.082	3	-	2	21.191.500	-	18.935.000	-	30.530.000	5	70.656.500	38,46%	67,03%	5,00	70.656.500	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	76.559.491	3	-	2	14.481.800	-	14.460.600	-	33.188.600	5	62.131.000	41,67%	81,15%	5,00	62.131.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	882.365.012	-	-	-	-	-	105.702.900	-	763.294.000	-	868.996.900	0,00%	98,48%	0,00	868.996.900	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	321	168.263.120	-	-	-	-	-	-	-	164.990.000	-	164.990.000	0,00%	98,05%	0,00	164.990.000	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	714.101.892	-	-	-	-	-	105.702.900	-	598.304.000	-	704.006.900	0,00%	98,59%	0,00	704.006.900	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	12.036.210.311	-	687.928.842	-	1.299.536.739	-	4.254.608.555	-	2.581.462.677	-	8.823.536.813	0,00%	73,31%	0,00	8.823.536.813	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	550.954.968	2	-	-	30.000.000	-	205.590.000	-	80.100.000	2	315.690.000	25,00%	57,30%	2,00	315.690.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	674.312.033	-	-	1	69.333.200	-	230.500.000	-	200.000.000	1	499.833.200	20,00%	74,12%	1,00	499.833.200	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	6	6.731.258.575	1	76.000.000	1	607.549.672	-	2.490.557.173	-	1.208.348.200	2	4.382.455.045	33,33%	65,11%	2,00	4.382.455.045	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	199.420.643	1	-	-	-	-	80.157.459	-	40.628.420	1	120.785.879	33,33%	60,57%	1,00	120.785.879	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.166.852	-	-	-	-	-	2.166.800	-	-	-	2.166.800	0,00%	100,00%	0,00	2.166.800	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	274.749.436	1	-	-	33.034.974	-	47.709.300	-	24.319.000	0	105.063.274	25,00%	38,24%	0,25	105.063.274	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				5				6		7		8		9		10		11		K			Rp	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	102	3.603.347.804	26	611.928.842	10	559.618.893	-	1.197.927.823	-	1.028.067.057	36	3.397.542.615	35,29%	94,29%	36,00	3.397.542.615	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengalokasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.868.987.520	-	-	-	107.200.000	-	346.210.000	-	411.519.000	-	864.929.000	0,00%	46,28%	0,00	864.929.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	391.609.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	18	711.639.832	2	-	10	72.200.000	-	138.160.000	-	152.754.000	12	363.114.000	66,67%	51,02%	12,00	363.114.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	383	765.738.168	-	-	1	35.000.000	-	208.050.000	-	258.765.000	1	501.815.000	0,26%	65,53%	1,00	501.815.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.859.069.885	-	689.357.557	-	831.393.757	-	1.248.881.755	-	773.715.831	-	3.543.348.900	0,00%	72,92%	0,00	3.543.348.900	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	107.012.300	3	-	2	9.049.659	-	26.732.000	-	10.800.000	5	46.581.659	41,67%	43,53%	5,00	46.581.659	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.925.010.616	3	246.382.274	2	264.337.510	-	449.065.160	-	223.044.077	5	1.182.829.021	41,67%	61,45%	5,00	1.182.829.021	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.827.046.969	3	442.975.283	2	558.006.588	-	773.084.595	-	539.871.754	5	2.313.938.220	41,67%	81,85%	5,00	2.313.938.220	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.032.533.620	-	141.143.167	-	435.036.019	-	897.692.115	-	438.700.746	-	1.912.572.047	0,00%	63,07%	0,00	1.912.572.047	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	546.759.264	1	-	2	94.100.000	-	68.789.714	-	14.278.528	3	177.168.242	30,00%	32,40%	3,00	177.168.242	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	104	1.187.704.872	15	37.993.167	3	159.387.419	-	300.026.401	-	318.807.218	18	816.214.205	17,31%	68,72%	18,00	816.214.205	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	1.041.639.564	1	103.150.000	1	153.663.600	-	352.683.750	-	105.115.000	2	714.612.350	40,00%	68,60%	2,00	714.612.350	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	108.099.360	8	-	-	-	-	80.827.250	-	-	8	80.827.250	26,67%	74,77%	8,00	80.827.250	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	148.330.560	9	-	-	27.885.000	-	95.365.000	-	500.000	9	123.750.000	30,00%	83,43%	9,00	123.750.000	0,00%	0,00%	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Respon)	0,00	-	0,00	-	100	25.483.884.055	-	5.069.182.296	-	6.001.329.621	-	7.617.121.771	-	4.330.011.880	-	23.017.645.568	0,00%	90,32%	0,00	23.017.645.568	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	45	22.444.846.447	45	5.069.182.296	45	5.997.626.321	-	5.069.124.621	-	3.932.371.880	23	20.068.305.118	50,00%	89,41%	22,50	20.068.305.118	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	225	2.851.250.000	-	-	-	-	-	2.466.866.000	-	367.640.000	-	2.834.506.000	0,00%	99,41%	0,00	2.834.506.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	0,00	-	0,00	-	45	187.787.608	-	-	-	3.703.300	-	81.131.150	-	30.000.000	-	114.834.450	0,00%	61,15%	0,00	114.834.450	0,00%	0,00%	
Layanan Administrasi DPRD	Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.177.178.368	-	1.211.702.000	-	1.481.155.580	-	1.404.371.000	-	668.382.500	-	4.765.611.080	0,00%	77,15%	0,00	4.765.611.080	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	45	1.889.329.387	15	208.920.000	5	338.340.000	-	347.950.000	-	198.100.000	20	1.093.310.000	44,44%	57,87%	20,00	1.093.310.000	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	186.232.618	-	-	2	44.742.480	-	39.790.000	-	12.935.000	2	97.467.480	25,00%	52,34%	2,00	97.467.480	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	90	774.377.173	20	66.250.000	10	177.475.100	-	199.361.000	-	186.497.500	30	629.583.600	33,33%	81,30%	30,00	629.583.600	0,00%	0,00%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	3.327.239.190	2	936.532.000	-	920.598.000	-	817.270.000	-	270.850.000	2	2.945.250.000	40,00%	88,52%	2,00	2.945.250.000	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43,65%	81,81%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.516.756.913		2.378.963.304		4.468.871.826		2.971.148.706		3.636.147.405		13.455.131.241		99,54%		13.455.131.241		0,00%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	141.647.155	23	10.375.000	45	46.205.400	68	30.275.800	100	53.620.400	236	140.476.600	236,36%	99,17%	236,36	140.476.600	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	65.799.080	1	3.200.000	1	35.157.600	1	11.200.000	1	16.205.800	4	65.763.400	100,00%	99,95%	4,00	65.763.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	12.701.979	1	2.800.000	2	4.200.000	1	1.400.000	1	4.295.200	5	12.695.200	100,00%	99,95%	5,00	12.695.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	12.064.470	-	-	-	-	1	6.463.400	-	5.600.000	1	12.063.400	100,00%	99,99%	1,00	12.063.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	9.607.296	1	1.937.500	2	1.937.500	1	2.953.200	1	2.400.000	5	9.228.200	100,00%	96,05%	5,00	9.228.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	13.196.120	-	-	-	-	1	-	-	13.034.100	1	13.034.100	100,00%	98,77%	1,00	13.034.100	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	21.850.944	1	2.437.500	-	4.910.300	-	4.875.000	1	9.085.300	2	21.308.100	100,00%	97,52%	2,00	21.308.100	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	6.427.266	-	-	-	-	2	3.384.200	2	3.000.000	4	6.384.200	100,00%	99,33%	4,00	6.384.200	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				6			I		II		III		IV		12		13=12/nx100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				5	Rp		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	11.565.559.834	20	2.191.404.225	47	4.056.764.402	73	2.517.859.598	100	2.760.279.772	241	11.526.307.997	240,88%	99,66%	240,88	11.526.307.997	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	150	11.484.040.589	30	2.175.269.357	40	4.031.703.602	40	2.500.906.598	40	2.737.138.772	38	11.445.018.329	25,00%	99,66%	37,50	11.445.018.329	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	9.369.879	3	1.065.772	3	4.859.600	3	-	3	3.369.000	12	9.294.372	100,00%	99,19%	12,00	9.294.372	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	7.519.656	1	5.289.096	-	2.214.000	-	-	-	-	1	7.503.096	100,00%	99,78%	1,00	7.503.096	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	6.605.036	-	-	2	2.937.200	2	3.283.000	2	335.000	6	6.555.200	100,00%	99,25%	6,00	6.555.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	58.024.674	3	9.780.000	3	15.050.000	3	13.670.000	3	19.437.000	12	57.937.000	100,00%	99,85%	12,00	57.937.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.174.448	-	-	-	-	-	3.676.000	100	480.000	100	4.156.000	100,00%	99,56%	100,00	4.156.000	0,00%	0,00%	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.174.448	-	-	-	-	1	3.676.000	-	480.000	1	4.156.000	100,00%	99,56%	1,00	4.156.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	346.788.072	5	21.957.500	36	62.976.000	66	121.097.250	100	130.572.750	207	336.603.500	207,14%	97,06%	207,14	336.603.500	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	164.132.728	3	21.957.500	3	39.426.000	3	44.926.250	3	47.723.750	12	154.033.500	100,00%	93,85%	12,00	154.033.500	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	44	182.655.344	-	-	14	23.550.000	14	76.171.000	16	82.849.000	44	182.570.000	100,00%	99,95%	44,00	182.570.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	837.979.660	17	91.072.075	39	92.557.200	74	160.707.870	100	492.454.823	230	836.791.968	230,43%	99,86%	230,43	836.791.968	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	227.581.780	-	-	-	-	-	-	1	227.008.170	1	227.008.170	100,00%	99,75%	1,00	227.008.170	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	189.862.720	2	26.025.000	2	51.950.000	2	50.711.000	2	61.144.000	8	189.830.000	100,00%	99,98%	8,00	189.830.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	7.759.900	-	-	1	870.000	3	6.110.000	1	600.000	5	7.580.000	100,00%	97,68%	5,00	7.580.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	100.962.449	-	13.786.720	-	10.065.200	1	38.191.400	-	38.842.000	1	100.885.320	100,00%	99,92%	1,00	100.885.320	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	311.812.811	2	51.260.355	2	29.672.000	2	65.695.470	2	164.860.653	8	311.488.478	100,00%	99,90%	8,00	311.488.478	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	22.221.760	-	-	-	-	-	-	100	22.220.000	100	22.220.000	100,00%	99,99%	100,00	22.220.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	22.221.760	-	-	-	-	-	-	2	22.220.000	2	22.220.000	100,00%	99,99%	2,00	22.220.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	234.764.224	25	32.452.774	50	66.490.524	75	54.762.063	100	71.752.969	250	225.458.330	250,00%	96,04%	250,00	225.458.330	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	8.401.956	1	840.000	1	2.800.000	1	2.520.000	1	2.230.000	4	8.390.000	100,00%	99,86%	4,00	8.390.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	86.380.080	3	18.812.774	3	18.726.530	3	17.911.563	3	25.577.469	3	81.028.336	25,00%	93,80%	3,00	81.028.336	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	139.982.188	1	12.800.000	1	44.963.994	1	34.330.500	1	43.945.500	1	136.039.994	25,00%	97,18%	1,00	136.039.994	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	363.621.760	23	31.701.730	46	143.878.300	71	82.770.125	100	104.766.691	240	363.116.846	239,58%	99,86%	239,58	363.116.846	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	333.550.000	7	25.061.730	7	131.528.300	8	81.370.125	8	95.266.691	30	333.226.846	100,00%	99,90%	30,00	333.226.846	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	18	30.071.760	4	6.640.000	4	12.350.000	4	1.400.000	6	9.500.000	18	29.890.000	100,00%	99,40%	18,00	29.890.000	0,00%	0,00%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		35,02%	99,54%					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.972.611.471			684.604.453		1.300.806.985		1.026.155.713		917.083.675		3.928.650.826		98,89%		3.928.650.826		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	94.139.652	25	10.980.000	25	49.040.800	-	14.106.250	-	18.652.400	50	92.779.450	50,00%	98,56%	50,00	92.779.450	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	37.219.147	2	4.878.000	2	32.103.000	-	-	-	-	4	36.981.000	100,00%	99,36%	4,00	36.981.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.494.287	-	266.000	1	1.183.723	-	-	-	-	1	1.449.723	100,00%	97,02%	1,00	1.449.723	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.410.286	-	-	-	-	-	-	1	1.259.400	1	1.259.400	100,00%	89,30%	1,00	1.259.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	18.437.284	1	3.066.000	-	3.959.777	-	5.550.000	-	5.600.000	1	18.175.777	100,00%	98,58%	1,00	18.175.777	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.331.387	-	-	-	-	-	-	1	1.193.000	1	1.193.000	100,00%	89,61%	1,00	1.193.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	18.651.991	-	2.770.000	1	4.405.400	-	5.556.250	-	5.600.000	1	18.331.650	100,00%	98,28%	1,00	18.331.650	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				5	6			7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16							
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	15.595.270	1	-	-	7.388.900	-	3.000.000	-	5.000.000	1	15.388.900	100,00%	98,68%	1,00	15.388.900	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.305.407.394	29	604.403.284	29	1.165.845.752	-	725.837.875	-	789.970.480	58	3.286.057.391	58,00%	99,41%	58,00	3.286.057.391	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	29	3.300.436.908	29	604.403.284	29	1.164.345.752	29	725.011.531	29	787.640.780	116	3.281.401.347	400,00%	99,42%	116,00	3.281.401.347	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.105.528	-	-	-	-	-	-	1	829.700	1	829.700	100,00%	75,05%	1,00	829.700	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.864.958	1	-	-	1.500.000	-	826.344	1	1.500.000	2	3.826.344	200,00%	99,00%	2,00	3.826.344	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	34.039.016	-	-	-	50.500	-	30.600.000	-	-	-	30.650.500	0,00%	90,05%	0,00	30.650.500	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	30	34.039.016	-	-	-	50.500	30	30.600.000	-	-	30	30.650.500	100,00%	90,05%	30,00	30.650.500	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	446.672.889	15	60.816.169	10	59.730.140	-	228.680.088	-	78.644.295	25	427.870.692	25,00%	95,79%	25,00	427.870.692	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	137.773.197	-	-	-	28.000	5	123.530.000	-	-	5	123.558.000	100,00%	89,68%	5,00	123.558.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	37.941.217	1	4.255.000	-	11.325.000	1	12.525.000	1	9.722.000	3	37.827.000	100,00%	99,70%	3,00	37.827.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	7	12.161.227	1	1.100.000	2	4.425.000	2	1.480.000	2	4.190.000	7	11.195.000	100,00%	92,05%	7,00	11.195.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	60	20.807.306	-	-	30	8.097.000	10	5.541.900	20	4.312.400	60	17.951.300	100,00%	86,27%	60,00	17.951.300	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	237.989.942	8	55.461.169	5	35.855.140	7	85.603.188	10	60.419.895	30	237.339.392	100,00%	99,73%	30,00	237.339.392	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	9.276.736	12	1.110.000	5	3.089.000	-	2.544.500	-	2.528.500	17	9.272.000	17,00%	99,95%	17,00	9.272.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.509.368	-	1.110.000	-	740.000	-	1.370.000	1	1.287.000	1	4.507.000	100,00%	99,95%	1,00	4.507.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.767.368	-	-	-	2.349.000	-	1.174.500	1	1.241.500	1	4.765.000	100,00%	99,95%	1,00	4.765.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	83.075.784	15	7.295.000	10	23.050.793	-	24.387.000	-	27.288.000	25	82.020.793	25,00%	98,73%	25,00	82.020.793	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	67.589.432	-	5.450.000	-	21.320.793	-	20.112.000	2	19.776.000	2	66.658.793	100,00%	98,62%	2,00	66.658.793	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	35	15.486.352	8	1.845.000	-	1.730.000	8	4.275.000	19	7.512.000	35	15.362.000	100,00%	99,20%	35,00	15.362.000	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
									Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								349,34%	98,89%							
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						9.976.446.402		1.317.158.549		3.794.728.624		1.744.657.310		3.063.395.284		9.919.939.767		99,43%		9.919.939.767		0,00%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	80	157.398.840	-	26.902.028	-	37.294.520	-	39.893.128	-	53.064.378	-	157.154.054	0,00%	99,84%	0,00	157.154.054	0,00%	0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	86.488.150	1	17.908.162	1	33.350.836	-	14.275.128	-	20.810.978	2	86.345.104	100,00%	99,83%	2,00	86.345.104	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.823.384	1	2.754.016	-	-	-	-	-	69.000	1	2.823.016	100,00%	99,99%	1,00	2.823.016	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.180.270	-	-	-	2.400.000	-	450.000	1	1.328.300	1	4.178.300	100,00%	99,95%	1,00	4.178.300	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.927.280	1	-	-	-	-	505.000	-	2.422.000	1	2.927.000	100,00%	99,99%	1,00	2.927.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.512.270	-	-	-	-	-	-	1	4.507.500	1	4.507.500	100,00%	99,89%	1,00	4.507.500	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	46.728.544	-	3.150.000	-	423.384	-	22.498.000	2	20.564.600	2	46.635.984	100,00%	99,80%	2,00	46.635.984	0,00%	0,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	9.738.942	-	3.089.850	-	1.120.300	-	2.165.000	1	3.362.000	1	9.737.150	100,00%	99,98%	1,00	9.737.150	0,00%	0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	7.582.780.569	-	1.097.418.044	-	2.968.697.478	-	1.518.583.569	-	1.967.004.421	-	7.551.703.512	0,00%	99,59%	0,00	7.551.703.512	0,00%	0,00%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	74	7.541.723.745	74	1.090.278.044	74	2.962.705.478	74	1.508.535.569	74	1.949.142.521	74	7.510.661.612	100,00%	99,59%	74,00	7.510.661.612	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.782.344	-	1.100.000	-	-	-	750.000	1	3.927.900	1	5.777.900	100,00%	99,92%	1,00	5.777.900	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	35.274.480	1	6.040.000	1	5.992.000	1	9.298.000	1	13.934.000	4	35.264.000	100,00%	99,97%	4,00	35.264.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	75	39.787.696	-	835.000	-	9.601.400	-	10.781.018	-	17.908.900	-	39.126.318	0,00%	98,34%	0,00	39.126.318	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	38.410.160	4	835.000	2	8.721.400	4	10.295.018	2	17.897.900	12	37.749.318	100,00%	98,28%	12,00	37.749.318	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	1.377.536	-	-	-	880.000	-	486.000	4	11.000	4	1.377.000	100,00%	99,96%	4,00	1.377.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	402.612.246	-	50.175.006	-	84.533.354	-	34.518.500	-	223.902.157	-	393.129.017	0,00%	97,64%	0,00	393.129.017	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	36	113.400.000	12	4.931.000	-	16.431.000	12	15.151.000	12	76.886.000	36	113.399.000	100,00%	100,00%	36,00	113.399.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	65	85.745.246	20	3.896.400	-	16.734.750	-	5.953.000	45	59.157.040	65	85.741.190	100,00%	100,00%	65,00	85.741.190	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	203.467.000	15	41.347.606	-	51.367.604	-	13.414.500	15	87.859.117	30	193.988.827	100,00%	95,34%	30,00	193.988.827	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	883.989.843	-	-	-	483.064.021	-	-	-	397.025.000	-	880.089.021	0,00%	99,56%	0,00	880.089.021	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	883.989.843	-	-	10	483.064.021	-	-	-	397.025.000	10	880.089.021	100,00%	99,56%	10,00	880.089.021	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	80	486.722.000	-	76.786.289	-	121.872.085	-	47.490.319	-	231.462.671	-	477.611.364	0,00%	98,13%	0,00	477.611.364	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.523.384	3	1.000.000	3	750.000	3	660.000	3	1.113.000	12	3.523.000	100,00%	99,99%	12,00	3.523.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	155.231.376	4	34.786.289	2	37.338.585	2	24.546.819	4	52.453.627	12	149.125.320	100,00%	96,07%	12,00	149.125.320	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	327.967.240	4	41.000.000	2	83.783.500	2	22.283.500	4	177.896.044	12	324.963.044	100,00%	99,08%	12,00	324.963.044	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	423.155.208	-	65.042.182	-	89.665.766	-	93.390.776	-	173.027.757	-	421.126.481	0,00%	99,52%	0,00	421.126.481	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	219.990.000	5	37.285.182	5	64.894.205	5	27.062.076	5	90.748.537	5	219.990.000	100,00%	100,00%	5,00	219.990.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	54.878.400	5	13.679.500	-	3.134.000	5	10.064.500	5	26.010.600	15	52.888.600	100,00%	96,37%	15,00	52.888.600	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	26	18.401.600	10	3.588.500	-	661.780	-	1.919.200	16	12.231.120	26	18.400.600	100,00%	99,99%	26,00	18.400.600	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	113.623.808	1	8.289.000	-	19.600.000	-	46.586.000	1	39.143.500	2	113.618.500	100,00%	100,00%	2,00	113.618.500	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	55	16.261.400	20	2.200.000	10	1.375.781	10	7.759.000	15	4.894.000	55	16.228.781	100,00%	99,80%	55,00	16.228.781	0,00%	0,00%	
																		100,00%	99,43%					
																</								

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	99.360.191	-	32.000.000	-	16.050.000	-	35.306.200	-	16.000.000	-	99.356.200	0,00%	100,00%	0,00	99.356.200	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	252.179.882	-	58.925.564	-	60.255.500	-	124.716.289	-	8.237.990	-	252.135.343	0,00%	99,98%	0,00	252.135.343	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	32.161.530	-	11.304.000	-	8.370.000	-	12.487.530	-	-	-	32.161.530	0,00%	100,00%	0,00	32.161.530	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				7				8		9		10										11		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	12.827.900	-	4.809.778	-	190.000	-	-	-	7.827.990	-	12.827.768	0,00%	100,00%	0,00	12.827.768	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	22	127.051.945	-	19.230.810	-	26.565.500	-	80.809.735	-	410.000	-	127.016.045	0,00%	99,97%	0,00	127.016.045	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	80.138.507	-	23.580.976	-	25.130.000	-	31.419.024	-	-	-	80.130.000	0,00%	99,99%	0,00	80.130.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	210.900.800	-	177.099.000	-	4.432.500	-	29.040.000	-	-	-	210.571.500	0,00%	99,84%	0,00	210.571.500	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	181.880.800	-	148.099.000	-	4.432.500	-	29.020.000	-	-	-	181.551.500	0,00%	99,82%	0,00	181.551.500	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	29.020.000	-	29.000.000	-	-	-	20.000	-	-	-	29.020.000	0,00%	100,00%	0,00	29.020.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	401.575.600	-	108.224.560	-	117.378.682	-	82.900.203	-	36.633.437	-	345.136.882	0,00%	85,95%	0,00	345.136.882	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	56.450.000	-	12.000.000	-	13.200.000	-	21.800.000	-	9.450.000	-	56.450.000	0,00%	100,00%	0,00	56.450.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	115.501.600	-	17.024.560	-	15.770.682	-	19.934.203	-	11.283.437	-	64.012.882	0,00%	55,42%	0,00	64.012.882	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	229.624.000	-	79.200.000	-	88.408.000	-	41.166.000	-	15.900.000	-	224.674.000	0,00%	97,84%	0,00	224.674.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	8.917.594	-	-	-	2.340.000	-	6.527.594	-	50.000	-	8.917.594	0,00%	100,00%	0,00	8.917.594	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	8.917.594	-	-	-	2.340.000	-	6.527.594	-	50.000	-	8.917.594	0,00%	100,00%	0,00	8.917.594	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	-	0.00	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	-	0.00	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	-	0.00	-	2	2.207.985	-	-	-	300.000	-	-	-	1.900.000	-	2.200.000	0.00%	99.64%	0.00	2.200.000	0.00%	0.00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	326.335.125	-	-	-	75.663.156	-	34.281.394	-	171.361.830	-	281.306.380	0.00%	86.20%	0.00	281.306.380	0.00%	0.00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	25	32.518.491	-	-	10	4.994.000	5	1.575.150	10	13.837.421	25	20.406.571	100.00%	62.75%	25.00	20.406.571	0.00%	0.00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	25	29.000.000	-	-	10	9.918.052	5	572.084	10	17.907.227	25	28.397.363	100.00%	97.92%	25.00	28.397.363	0.00%	0.00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	218.453.234	-	-	-	55.151.104	-	26.534.160	1	107.517.182	1	189.202.446	100.00%	86.61%	1.00	189.202.446	0.00%	0.00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	46.363.400	-	-	-	5.600.000	-	5.600.000	-	32.100.000	-	43.300.000	0.00%	93.39%	0.00	43.300.000	0.00%	0.00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	50.457.999	-	-	-	45.863.198	-	1.373.874	-	-	-	47.237.072	0.00%	93.62%	0.00	47.237.072	0.00%	0.00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	5	10.020.000	-	-	1	8.133.198	-	-	-	-	1	8.133.198	20.00%	81.17%	1.00	8.133.198	0.00%	0.00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	-	0.00	-	6	40.437.999	-	-	-	37.730.000	-	1.373.874	-	-	-	39.103.874	0.00%	96.70%	0.00	39.103.874	0.00%	0.00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	54.065.574	-	9.200.000	-	10.450.000	-	13.092.036	-	20.852.488	-	53.594.524	0.00%	99.13%	0.00	53.594.524	0.00%	0.00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	53.258.000	-	9.200.000	-	10.450.000	-	13.092.036	1	20.187.000	1	52.929.036	100.00%	99.38%	1.00	52.929.036	0.00%	0.00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	807.574	-	-	-	-	-	-	1	665.488	1	665.488	100.00%	82.41%	1.00	665.488	0.00%	0.00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	139.200.000	-	4.800.000	-	25.517.992	-	20.565.145	-	77.330.808	-	128.213.945	0.00%	92.11%	0.00	128.213.945	0.00%	0.00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	-	0.00	-	1	44.700.000	-	-	-	20.447.992	-	11.924.767	1	10.447.164	1	42.819.923	100.00%	95.79%	1.00	42.819.923	0.00%	0.00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0.00	-	0.00	-	10	87.790.000	-	4.800.000	-	3.200.000	-	6.662.000	10	64.055.644	10	78.717.644	100.00%	89.67%	10.00	78.717.644	0.00%	0.00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	-	0.00	-	5	6.710.000	-	-	-	1.870.000	-	1.978.378	5	2.828.000	5	6.676.378	100.00%	99.50%	5.00	6.676.378	0.00%	0.00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.877.760	-	-	-	-	213.000	-	2.959.100	-	705.088	-	3.877.188	0,00%	99,99%	0,00	3.877.188	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	19.059.740	-	4.300.000	-	4.271.000	-	5.220.000	-	5.263.876	-	19.054.876	0,00%	99,97%	0,00	19.054.876	0,00%	0,00%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	134.327.400	-	33.381.723	-	32.409.479	-	48.573.500	-	19.953.000	-	134.317.702	0,00%	99,99%	0,00	134.317.702	0,00%	0,00%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	11	5.320.000	-	5.320.000	-	-	-	-	-	-	-	5.320.000	0,00%	100,00%	0,00	5.320.000	0,00%	0,00%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	129.007.400	-	28.061.723	-	32.409.479	-	48.573.500	-	19.953.000	-	128.997.702	0,00%	99,99%	0,00	128.997.702	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Persen)	0,00	-	0,00	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	335.885.080	-	66.406.090	-	57.212.902	-	75.134.027	-	115.592.265	-	314.345.284	0,00%	93,59%	0,00	314.345.284	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	120.031.080	-	19.206.090	-	24.662.902	-	21.208.027	-	33.936.265	-	99.013.284	0,00%	82,49%	0,00	99.013.284	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	215.854.000	-	47.200.000	-	32.550.000	-	53.926.000	-	81.656.000	-	215.332.000	0,00%	99,76%	0,00	215.332.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Masa Layak Pakai Kendaraan Dinas (Persen)	0,00	-	0,00	-	60	91.494.000	-	20.006.892	-	43.968.757	-	15.783.501	-	11.179.400	-	90.938.550	0,00%	99,39%	0,00	90.938.550	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	91.494.000	-	20.006.892	-	43.968.757	-	15.783.501	-	11.179.400	-	90.938.550	0,00%	99,39%	0,00	90.938.550	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	98,82%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.736.217.891		1.035.255.785		1.886.959.612		1.223.920.879		-		4.146.136.276		72,28%		4.146.136.276		0,00%		DINAS TRANSMIGRASI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi (Poin)	0,00	-	0,00	-	25,68	215.981.800	-	45.197.800	-	38.500.000	-	32.324.000	-	-	-	116.021.800	0,00%	53,72%	0,00	116.021.800	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	39.382.000	2	17.082.000	-	12.600.000	-	4.200.000	-	-	2	33.882.000	100,00%	86,03%	2,00	33.882.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	38.584.000	-	-	-	-	-	11.224.000	-	-	-	11.224.000	0,00%	29,09%	0,00	11.224.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	31.715.800	2	14.015.800	-	8.400.000	-	2.800.000	-	-	2	25.215.800	100,00%	79,51%	2,00	25.215.800	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	30.700.000	-	-	-	-	-	5.600.000	-	-	-	5.600.000	0,00%	18,24%	0,00	5.600.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	44.000.000	1	9.000.000	1	10.500.000	1	7.500.000	1	-	1	27.000.000	50,00%	61,36%	1,00	27.000.000	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	31.600.000	2	5.100.000	4	7.000.000	4	1.000.000	4	-	4	13.100.000	57,14%	41,46%	4,00	13.100.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.748.308.793	-	861.137.857	-	1.663.400.329	-	1.056.975.081	-	-	-	3.581.513.267	0,00%	75,43%	0,00	3.581.513.267	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV												
				6				7		8		9		10										
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	42	4.632.793.593	42	841.420.257	42	1.640.900.329	-	1.025.677.481	-	-	21	3.507.998.067	50,00%	75,72%	21,00	3.507.998.067	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	57.207.600	-	12.217.600	1	11.250.000	1	13.940.000	1	-	1	37.407.600	50,00%	65,39%	1,00	37.407.600	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	58.307.600	3	7.500.000	7	11.250.000	7	17.357.600	7	-	7	36.107.600	50,00%	61,93%	7,00	36.107.600	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	110.350.600	-	5.000.000	-	38.331.700	-	9.824.400	-	-	-	53.156.100	0,00%	48,17%	0,00	53.156.100	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	50.080.800	1	5.000.000	1	14.056.400	1	9.824.400	1	-	1	28.880.800	50,00%	57,67%	1,00	28.880.800	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	7	60.269.800	-	-	2	24.275.300	2	-	2	-	2	24.275.300	28,57%	40,28%	2,00	24.275.300	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	297.975.460	-	76.611.947	-	41.120.678	-	57.957.020	-	-	-	175.689.645	0,00%	58,96%	0,00	175.689.645	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	14.978.060	3	14.977.900	3	-	-	-	-	-	6	14.977.900	200,00%	100,00%	6,00	14.977.900	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	60.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	-	10.875.000	-	-	2	35.875.000	50,00%	59,79%	1,50	35.875.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	12.000.000	3	3.000.000	3	4.750.000	-	1.940.000	-	-	2	9.690.000	50,00%	80,75%	1,50	9.690.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	36.823.700	12	11.636.200	12	8.000.000	12	9.750.000	12	-	12	29.386.200	40,00%	79,80%	12,00	29.386.200	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	90	92.111.000	40	36.997.847	40	13.370.678	75	35.392.020	75	-	75	85.760.545	83,33%	93,11%	75,00	85.760.545	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	82.062.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	34.180.000	-	-	-	33.760.000	-	-	-	-	-	33.760.000	0,00%	98,77%	0,00	33.760.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	34.180.000	20	-	-	33.760.000	-	-	-	-	20	33.760.000	100,00%	98,77%	20,00	33.760.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	219.461.238	-	30.599.619	-	52.032.089	-	45.275.218	-	-	-	127.906.926	0,00%	58,28%	0,00	127.906.926	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	138.541.238	6	18.500.000	6	28.787.500	6	28.200.000	6	-	6	75.487.500	25,00%	54,49%	6,00	75.487.500	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	80.920.000	6	12.099.619	6	23.244.589	6	17.075.218	6	-	6	52.419.426	25,00%	64,78%	6,00	52.419.426	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	109.960.000	-	16.708.562	-	19.814.816	-	21.565.160	-	-	-	58.088.538	0,00%	52,83%	0,00	58.088.538	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	109.960.000	2	16.708.562	2	19.814.816	2	21.565.160	2	-	2	58.088.538	20,00%	52,83%	2,00	58.088.538	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		48,74%	72,28%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sedang					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6.398.626.383		1.217.860.418		2.183.279.619		1.098.955.352		-		4.500.095.389			70,33%		4.500.095.389		0,00%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	-	0,00%		
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	18	24.716.696	-	12.400.000	-	3.664.512	-	423.384	-	-	-	16.487.896	0,00%		0,00	-	0,00%		
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	66,71%	0,00	16.487.896	0,00%	0,00%	
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	-	0,00%		
	Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	-	0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	24.716.696	2	12.400.000	-	3.664.512	-	423.384	-	-	2	16.487.896	50,00%	66,71%	2,00	16.487.896	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV												
				5				6		7		8		9										
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	-	
	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	5.051.265.302	-	953.143.795	-	1.814.310.632	-	728.646.420	-	-	-	3.496.100.847	0,00%	69,21%	0,00	3.496.100.847	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	40	5.051.265.302	40	953.143.795	40	1.814.310.632	-	728.646.420	-	-	80	3.496.100.847	200,00%	69,21%	80,00	3.496.100.847	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	133.755.000	-	-	-	47.205.150	-	78.915.380	-	-	-	126.120.530	0,00%	94,29%	0,00	126.120.530	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	116	66.680.000	-	-	-	-	-	66.600.000	-	-	-	66.600.000	0,00%	99,88%	0,00	66.600.000	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	67.075.000	-	-	4	47.205.150	-	12.315.380	-	-	4	59.520.530	66,67%	88,74%	4,00	59.520.530	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	631.315.745	-	131.623.991	-	156.397.339	-	223.491.056	-	-	-	511.512.386	0,00%	81,02%	0,00	511.512.386	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	136.939.160	-	-	-	-	-	114.150.000	-	-	-	114.150.000	0,00%	83,36%	0,00	114.150.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	50	53.800.544	-	-	-	19.980.000	-	33.100.000	-	-	-	53.080.000	0,00%	98,66%	0,00	53.080.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	55.245.000	1	10.437.000	2	9.947.000	-	7.566.000	-	-	3	27.950.000	75,00%	50,59%	3,00	27.950.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	14.039.000	-	-	3	2.500.000	-	3.100.000	-	-	3	5.600.000	30,00%	39,89%	3,00	5.600.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	21.100.000	1	6.750.000	1	4.500.000	-	4.600.000	-	-	2	15.850.000	100,00%	75,12%	2,00	15.850.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	40	38.700.001	15	7.502.279	10	6.612.099	-	11.517.436	-	-	25	25.631.814	62,50%	66,23%	25,00	25.631.814	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		K		Rp		K		Rp		K		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	278.972.040	10	106.934.712	7	102.058.240	-	39.757.620	-	-	17	248.750.572	85,00%	89,17%	17,00	248.750.572	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	32.520.000	-	-	3	10.800.000	-	9.700.000	-	-	3	20.500.000	75,00%	63,04%	3,00	20.500.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	390.023.240	-	68.240.042	-	112.126.792	-	42.853.414	-	-	-	223.220.248	0,00%	57,23%	0,00	223.220.248	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	321.900.000	1	58.600.000	1	94.700.000	-	34.400.000	-	-	2	187.700.000	40,00%	58,31%	2,00	187.700.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	40.591.240	1	7.115.042	1	11.039.792	-	5.293.414	-	-	2	23.448.248	50,00%	57,77%	2,00	23.448.248	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	27.532.000	1	2.525.000	1	6.387.000	-	3.160.000	-	-	2	12.072.000	50,00%	43,85%	2,00	12.072.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	167.550.400	100	52.452.590	100	49.575.194	-	24.625.698	-	-	200	126.653.482	200,00%	75,59%	200,00	126.653.482	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	167.550.400	10	52.452.590	7	49.575.194	-	24.625.698	-	-	17	126.653.482	85,00%	75,59%	17,00	126.653.482	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	169,06%	70,33%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		0,00%			0,00%			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
								I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				5				6		7		8		9		10		11		12		K	Rp		K	Rp
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			0,00%					0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			0,00%					0,00%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00		0,00		24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00		0,00		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			0,00%					0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00		0,00		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			0,00%					0,00%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
			5	6		7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%								
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	1.170.986.629	-	289.383.614	-	325.405.397	-	260.464.913	-	293.153.341	-	1.168.407.265	0,00%	99,78%	0,00	1.168.407.265	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	10	1.162.134.886	-	289.383.614	-	324.035.397	-	259.505.913	-	286.655.841	-	1.159.580.765	0,00%	99,78%	0,00	1.159.580.765	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.192.215	-	-	-	-	-	-	4.183.500	-	4.183.500	0,00%	99,79%	0,00	4.183.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	4.659.528	-	-	-	1.370.000	-	959.000	-	2.314.000	-	4.643.000	0,00%	99,65%	0,00	4.643.000	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	104.250.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	4.200.000	-	104.200.000	0,00%	99,95%	0,00	104.200.000	0,00%	0,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	104.250.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	4.200.000	-	104.200.000	0,00%	99,95%	0,00	104.200.000	0,00%	0,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																0,00%					0,00%		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	409.800.000	-	206.925.000	-	1.000.000	-	-	-	201.725.000	-	409.650.000	0,00%	99,96%	0,00	409.650.000	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	409.800.000	-	206.925.000	-	1.000.000	-	-	-	201.725.000	-	409.650.000	0,00%	99,96%	0,00	409.650.000	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	814.153.715	-	123.965.396	-	149.394.685	-	141.013.739	-	397.812.700	-	812.186.520	0,00%	99,76%	0,00	812.186.520	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	7	17.184.150	-	3.200.000	-	4.800.000	-	5.040.000	-	4.144.000	-	17.184.000	0,00%	100,00%	0,00	17.184.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	29.163.480	-	7.331.000	-	6.874.000	-	7.589.000	-	7.365.000	-	29.159.000	0,00%	99,98%	0,00	29.159.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	127.069.000	-	26.090.000	-	34.810.000	-	33.200.000	-	32.963.600	-	127.063.600	0,00%	100,00%	0,00	127.063.600	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	52.893.800	-	11.240.000	-	4.240.000	-	13.150.000	-	24.263.000	-	52.893.000	0,00%	100,00%	0,00	52.893.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	21.235.293	-	3.828.000	-	4.214.000	-	6.848.000	-	6.293.000	-	21.183.000	0,00%	99,75%	0,00	21.183.000	0,00%	0,00%	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	140.304.000	-	23.900.000	-	36.100.000	-	34.180.503	-	46.099.482	-	140.279.985	0,00%	99,98%	0,00	140.279.985	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	31	396.903.992	-	48.376.396	-	47.556.685	-	39.506.236	-	259.584.618	-	395.023.935	0,00%	99,53%	0,00	395.023.935	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	29.400.000	-	-	-	10.800.000	-	1.500.000	-	17.100.000	-	29.400.000	0,00%	100,00%	0,00	29.400.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	110.684.760	-	-	-	96.580.000	-	-	-	-	-	96.580.000	0,00%	87,26%	0,00	96.580.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	110.684.760	-	-	-	96.580.000	-	-	-	-	-	96.580.000	0,00%	87,26%	0,00	96.580.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	70,75	650.948.100	-	42.408.898	-	163.218.844	-	149.197.088	-	280.558.026	-	635.382.856	0,00%	97,61%	0,00	635.382.856	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	83.912.500	-	13.200.000	-	22.149.000	-	17.352.000	-	28.749.000	-	81.450.000	0,00%	97,07%	0,00	81.450.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	150.929.600	-	29.208.898	-	42.783.848	-	33.559.088	-	32.737.026	-	138.288.860	0,00%	91,62%	0,00	138.288.860	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	416.106.000	-	-	-	98.285.996	-	98.286.000	-	219.072.000	-	415.643.996	0,00%	99,89%	0,00	415.643.996	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penghubung (Poin)	0,00	-	0,00	-	74,5	1.187.447.000	-	184.741.483	-	253.860.599	-	270.940.154	-	477.524.562	-	1.187.066.798	0,00%	99,97%	0,00	1.187.066.798	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	399.460.000	-	70.273.684	-	109.361.190	-	92.207.816	-	127.592.276	-	399.434.966	0,00%	99,99%	0,00	399.434.966	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	559.075.000	-	92.157.799	-	113.321.409	-	114.040.338	-	239.499.286	-	559.018.832	0,00%	99,99%	0,00	559.018.832	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	61.512.000	-	3.110.000	-	2.378.000	-	6.980.000	-	49.035.000	-	61.503.000	0,00%	99,99%	0,00	61.503.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	167.400.000	-	19.200.000	-	28.800.000	-	57.712.000	-	61.398.000	-	167.110.000	0,00%	99,83%	0,00	167.110.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	87.126.080	1	6.600.000	1	8.900.000	-	9.900.000	-	4.300.000	2	29.700.000	66,67%	34,09%	2,00	29.700.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-		-		0,00%			-		0,00%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Lingkup OPD (Pegawai))	0,00	-	0,00	-	100	94.103.000	-	4.400.000	11	5.800.000	-	7.400.000	-	61.282.355	11	78.882.355	10,84%	83,83%	10,84	78.882.355	0,00%	0,00%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	26.450.000	1	4.400.000	-	5.800.000	-	7.400.000	-	2.200.000	1	19.800.000	100,00%	74,86%	1,00	19.800.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	67.653.000	-	-	-	-	-	-	-	59.082.355	-	59.082.355	0,00%	87,33%	0,00	59.082.355	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				6				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				5	Rp			8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum (Lingkup OPD (Persen))	0,00	-	0,00	-	100	510.488.884	-	70.452.716	42	146.283.781	-	79.441.129	-	56.406.177	42	352.583.803	41,82%	69,07%	41,82	352.583.803	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	73.129.554	-	-	3	63.540.049	-	-	-	-	3	63.540.049	100,00%	86,89%	3,00	63.540.049	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	114.251.767	1	25.969.000	3	17.685.000	-	29.120.000	-	-	4	72.774.000	80,00%	63,70%	4,00	72.774.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	9.500.000	-	-	2	3.270.000	-	-	-	-	2	3.270.000	50,00%	34,42%	2,00	3.270.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	36.297.143	-	6.416.036	1	7.238.412	-	8.464.336	-	7.911.792	0	30.030.576	25,00%	82,74%	0,25	30.030.576	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	60	205.759.464	15	38.067.680	15	42.250.320	-	29.556.793	-	36.194.385	30	146.069.178	50,00%	70,99%	30,00	146.069.178	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.180.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	60.370.000	-	-	1	12.300.000	-	12.300.000	-	12.300.000	1	36.900.000	100,00%	61,12%	1,00	36.900.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	8.347.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	8.347.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	202.069.392	-	32.989.254	71	32.044.993	-	37.485.212	-	10.172.456	71	112.691.915	70,72%	55,77%	70,72	112.691.915	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	24.040.000	3	2.000.000	3	1.500.000	-	1.000.000	-	-	6	4.500.000	50,00%	18,72%	6,00	4.500.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	100.059.392	12	25.989.254	12	24.294.993	-	26.862.712	-	8.922.456	6	86.069.415	50,00%	86,02%	6,00	86.069.415	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	77.970.000	-	5.000.000	1	6.250.000	-	9.622.500	-	1.250.000	0	22.122.500	25,00%	28,37%	0,25	22.122.500	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	319.318.749	-	28.935.000	16	43.460.000	-	67.055.540	-	-	16	139.450.540	15,91%	43,67%	15,91	139.450.540	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	13.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	141.120.001	6	28.935.000	6	38.000.000	-	15.650.000	-	-	3	82.585.000	50,00%	58,52%	3,00	82.585.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	-	-	4	5.460.000	-	1.440.000	-	-	4	6.900.000	33,33%	46,00%	4,00	6.900.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	150.148.748	-	-	-	-	-	49.965.540	-	-	-	49.965.540	0,00%	33,28%	0,00	49.965.540	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		70,73%	83,65%			
																		Predikat Kinerja		Sedang	Tinggi			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							16.575.572.144		2.858.775.758		5.484.145.693		3.716.345.434		4.266.031.900		16.325.298.785		98,49%		16.325.298.785		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Poin 6 Poin 11 Poin 17 dan 22 Bas-100 Daerah)	0,00	-	0,00	-	11,5	250.153.972	-	72.447.305	-	51.798.653	-	47.535.584	-	77.847.800	-	249.629.342	0,00%	99,79%	0,00	249.629.342	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	125.182.769	-	59.467.707	1	27.205.400	-	13.786.887	1	24.513.600	2	124.973.594	100,00%	99,83%	2,00	124.973.594	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	6.825.718	1	-	1	-	1	3.174.091	3	3.650.000	6	6.824.091	120,00%	99,98%	6,00	6.824.091	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	6.947.917	-	-	-	-	5	1.822.500	-	5.068.200	5	6.890.700	100,00%	99,18%	5,00	6.890.700	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	7.323.423	-	-	-	-	-	-	3	7.321.000	3	7.321.000	100,00%	99,97%	3,00	7.321.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	7.733.928	-	-	-	-	-	-	3	7.729.500	3	7.729.500	100,00%	99,94%	3,00	7.729.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	58.357.969	3	7.500.000	3	15.569.993	3	12.550.000	3	22.686.000	12	58.305.993	100,00%	99,91%	12,00	58.305.993	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	37.782.248	-	5.479.598	-	9.023.260	-	16.202.106	-	6.879.500	-	37.584.464	0,00%	99,48%	0,00	37.584.464	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	93	13.992.056.252	-	2.563.156.985	-	4.950.865.936	-	3.094.018.576	-	3.330.986.343	-	13.939.027.840	0,00%	99,62%	0,00	13.939.027.840	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	145	13.824.687.096	145	2.539.283.985	145	4.910.723.436	145	3.053.029.076	145	3.268.695.343	145	13.771.731.840	100,00%	99,62%	145,00	13.771.731.840	0,00%	0,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	145	983.000	-	323.000	-	660.000	-	-	-	-	-	983.000	0,00%	100,00%	0,00	983.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2500	958.000	-	-	-	958.000	-	-	-	-	-	958.000	0,00%	100,00%	0,00	958.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	24	148.540.194	-	19.500.000	-	37.220.500	-	37.560.000	-	54.214.500	-	148.495.000	0,00%	99,97%	0,00	148.495.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	9.921.962	-	4.050.000	-	1.304.000	-	-	-	4.545.000	-	9.899.000	0,00%	99,77%	0,00	9.899.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	1.036.500	-	-	-	-	-	-	-	1.031.500	-	1.031.500	0,00%	99,52%	0,00	1.031.500	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	5.929.500	-	-	-	-	-	3.429.500	-	2.500.000	-	5.929.500	0,00%	100,00%	0,00	5.929.500	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	10.912.350	-	2.317.000	-	1.470.000	-	5.578.625	-	1.500.000	-	10.865.625	0,00%	99,57%	0,00	10.865.625	0,00%	0,00%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.432.350	-	-	-	-	-	1.928.625	-	1.500.000	-	3.428.625	0,00%	99,89%	0,00	3.428.625	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	7.480.000	-	2.317.000	-	1.470.000	1	3.650.000	-	-	1	7.437.000	100,00%	99,43%	1,00	7.437.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	193.864.237	-	24.615.000	-	53.088.000	-	36.551.200	-	70.741.800	-	184.996.000	0,00%	95,43%	0,00	184.996.000	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	170.442.000	-	21.400.000	-	47.583.000	-	32.600.000	4	64.383.000	4	165.966.000	100,00%	97,37%	4,00	165.966.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	19.159.380	-	3.215.000	-	5.505.000	1	3.951.200	-	6.104.800	1	18.776.000	100,00%	98,00%	1,00	18.776.000	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	4.262.857	-	-	-	-	-	-	-	254.000	-	254.000	0,00%	5,96%	0,00	254.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum (Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	872.454.552	-	86.906.374	-	223.530.465	-	172.554.536	-	331.750.390	-	814.741.765	0,00%	93,39%	0,00	814.741.765	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	5.371.858	-	260.000	-	2.042.000	-	84.000	-	2.969.000	-	5.355.000	0,00%	99,69%	0,00	5.355.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	18.603.353	-	480.000	-	4.671.500	3	6.784.000	-	6.629.000	3	18.564.500	100,00%	99,79%	3,00	18.564.500	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	167.820.000	-	17.704.000	-	42.011.016	2	22.564.000	-	84.180.000	2	166.459.016	100,00%	99,19%	2,00	166.459.016	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	22.441.646	-	500.000	-	9.951.000	1	4.300.000	-	7.689.900	1	22.440.900	100,00%	100,00%	1,00	22.440.900	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	108.427.571	-	16.500.500	-	21.143.000	-	22.463.000	1	4.831.600	1	64.938.100	100,00%	59,89%	1,00	64.938.100	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	519.701.297	3	48.006.495	3	135.961.949	3	115.859.536	3	207.154.890	3	506.982.870	25,00%	97,55%	3,00	506.982.870	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	30.088.827	3	3.455.379	3	7.750.000	3	500.000	3	18.296.000	3	30.001.379	25,00%	99,71%	3,00	30.001.379	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	220.319.298	-	-	-	15.830.000	-	130.225.000	-	63.019.201	-	209.074.201	0,00%	94,90%	0,00	209.074.201	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	10.808.070	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000	-	10.800.000	0,00%	99,93%	0,00	10.800.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	16	183.690.304	-	-	16	5.550.000	-	130.225.000	-	36.819.201	16	172.594.201	100,00%	93,96%	16,00	172.594.201	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	25	25.820.924	-	-	25	10.280.000	-	-	-	15.400.000	25	25.680.000	100,00%	99,45%	25,00	25.680.000	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	254.069.272	-	51.448.094	-	39.937.364	-	65.472.458	-	81.876.332	-	238.734.248	0,00%	93,96%	0,00	238.734.248	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	37.506.972	-	5.500.000	-	8.000.000	-	9.992.000	12	13.974.000	12	37.466.000	100,00%	99,89%	12,00	37.466.000	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	216.562.300	3	45.948.094	3	31.937.364	3	55.480.458	3	67.902.332	3	201.268.248	25,00%	92,94%	3,00	201.268.248	0,00%	0,00%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	781.742.211	-	57.885.000	-	147.625.275	-	164.409.455	-	308.310.034	-	678.229.764	0,00%	86,76%	0,00	678.229.764	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	34	276.190.000	-	27.350.000	-	68.249.314	-	45.629.202	34	134.104.031	34	275.332.547	100,00%	99,69%	34,00	275.332.547	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	168.038.531	-	-	-	-	-	57.317.253	20	19.777.400	20	77.094.653	100,00%	45,88%	20,00	77.094.653	0,00%	0,00%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	233.233.680	-	28.995.000	-	63.683.761	-	44.113.000	2	86.836.053	1	223.627.814	25,00%	95,88%	0,50	223.627.814	0,00%	0,00%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	104.280.000	5	1.540.000	5	15.692.200	5	17.350.000	5	67.592.550	5	102.174.750	45,45%	97,98%	5,00	102.174.750	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	93,76%	98,49%								
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6.090.245.724		1.073.350.239		2.056.508.629		1.319.127.567		1.567.858.297		6.016.844.732		98,79%		6.016.844.732		0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	65	34.820.000	-	8.530.000	-	6.600.000	-	6.600.000	-	13.050.000	-	34.780.000	0,00%	99,89%	0,00	34.780.000	0,00%	0,00%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	17.330.000	1	8.530.000	1	6.600.000	1	2.200.000	1	-	1	17.330.000	100,00%	100,00%	1,00	17.330.000	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	17.490.000	-	-	-	-	1	4.400.000	1	13.050.000	2	17.450.000	200,00%	99,77%	2,00	17.450.000	0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
								I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				5				6		7		8		9		10		11		12		K	Rp		K	Rp
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	5.444.537.998	-	965.608.466	-	1.915.573.843	-	1.207.340.537	-	1.308.957.819	-	5.397.480.665	0,00%	99,14%	0,00	5.397.480.665	0,00%	0,00%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	45	5.408.496.798	45	960.008.466	48	1.907.173.843	48	1.198.340.537	48	1.295.916.619	47	5.361.439.465	105,00%	99,13%	47,25	5.361.439.465	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	18.641.200	-	-	-	-	1	5.600.000	1	13.041.200	1	18.641.200	0,00%	100,00%	1,00	18.641.200	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	17.400.000	1	5.600.000	1	8.400.000	1	3.400.000	1	-	4	17.400.000	400,00%	100,00%	4,00	17.400.000	0,00%	0,00%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	40.200.000	-	-	-	-	-	-	-	39.838.000	-	39.838.000	0,00%	99,10%	0,00	39.838.000	0,00%	0,00%			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	75	40.200.000	-	-	-	-	-	-	75	39.838.000	75	39.838.000	100,00%	99,10%	75,00	39.838.000	0,00%	0,00%			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	275.495.150	-	58.066.700	-	80.330.280	-	45.205.430	-	91.652.395	-	275.254.805	0,00%	99,91%	0,00	275.254.805	0,00%	0,00%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	58.132.300	1	8.720.000	1	7.375.000	1	11.000.000	1	31.010.000	4	58.105.000	400,00%	99,95%	4,00	58.105.000	0,00%	0,00%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	11.000.000	1	-	1	857.000	1	-	1	10.100.000	4	10.957.000	400,00%	99,61%	4,00	10.957.000	0,00%	0,00%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.050.000	-	-	-	-	-	1	3.050.000	1	3.050.000	100,00%	100,00%	1,00	3.050.000	0,00%	0,00%				
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	53.357.855	1	600.000	1	19.153.400	1	5.397.100	1	28.078.400	4	53.228.900	400,00%	99,76%	4,00	53.228.900	0,00%	0,00%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	149.954.995	7	48.746.700	12	52.944.880	8	28.808.330	3	19.413.995	30	149.913.905	100,00%	99,97%	30,00	149.913.905	0,00%	0,00%			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	162.752.576	-	22.108.300	-	30.214.480	-	22.040.400	-	65.341.992	-	139.705.172	0,00%	85,84%	0,00	139.705.172	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	146.013.840	1	21.458.800	1	26.450.000	1	19.775.000	1	55.701.790	1	123.385.590	100,00%	84,50%	1,00	123.385.590	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.500.000	-	514.300	-	1.394.480	1	1.202.400	1	1.973.202	2	5.084.382	200,00%	92,44%	2,00	5.084.382	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	11.238.736	1	135.200	1	2.370.000	1	1.063.000	-	7.667.000	3	11.235.200	300,00%	99,97%	3,00	11.235.200	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	132.440.000	-	19.036.773	-	23.790.026	-	37.941.200	-	49.018.091	-	129.786.090	0,00%	98,00%	0,00	129.786.090	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	132.440.000	5	19.036.773	5	23.790.026	5	37.941.200	5	49.018.091	5	129.786.090	25,00%	98,00%	5,00	129.786.090	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																		110,14%	98,79%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						352.803.248.594		46.759.106.238		119.798.199.940		67.515.208.194		55.295.080.204		289.367.594.576		82,02%		289.367.594.576		0,00%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	247.822.233	-	-	-	54.220.714	-	23.856.000	-	6.570.000	-	84.646.714	0,00%	34,16%	0,00	84.646.714	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	67.165.136	1	-	-	27.400.000	-	7.400.000	1	-	2	34.800.000	100,00%	51,81%	2,00	34.800.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	46.229.890	1	-	-	11.429.890	-	8.400.000	-	4.200.000	1	24.029.890	100,00%	51,98%	1,00	24.029.890	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.613.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.024.940	1	-	-	11.024.940	-	-	-	-	1	11.024.940	100,00%	100,00%	1,00	11.024.940	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.104.152	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	9.018.656	-	-	-	1.500.000	-	-	1	-	1	1.500.000	100,00%	16,63%	1,00	1.500.000	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	92.665.884	3	-	-	2.865.884	-	8.056.000	1	2.370.000	4	13.291.884	100,00%	14,34%	4,00	13.291.884	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	350.971.168.199	-	46.759.106.238	-	119.345.534.023	-	67.174.077.882	-	55.235.721.663	-	288.514.439.806	0,00%	82,20%	0,00	288.514.439.806	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	3180	350.914.371.713	3.180	46.759.106.238	3.180	119.324.534.023	3.180	67.161.477.882	3.180	55.231.521.663	12.720	288.476.639.806	400,00%	82,21%	12720,00	288.476.639.806	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	38.403.280	3	-	-	14.000.000	-	8.400.000	-	2.800.000	3	25.200.000	25,00%	65,62%	3,00	25.200.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	18.393.206	-	-	-	7.000.000	-	4.200.000	-	1.400.000	-	12.600.000	0,00%	68,50%	0,00	12.600.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	153.683.760	-	-	-	24.810.000	-	23.186.000	-	2.800.000	-	50.796.000	0,00%	33,05%	0,00	50.796.000	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	47.404.776	-	-	-	10.810.000	-	7.736.000	-	-	-	18.546.000	0,00%	39,12%	0,00	18.546.000	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	106.278.984	-	-	-	14.000.000	-	15.450.000	-	2.800.000	-	32.250.000	0,00%	30,34%	0,00	32.250.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	221.610.036	-	-	-	4.881.136	-	56.429.000	-	22.500.000	-	83.810.136	0,00%	37,82%	0,00	83.810.136	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	54.718.136	-	-	-	4.881.136	-	24.127.000	-	22.500.000	-	51.508.136	0,00%	94,13%	0,00	51.508.136	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		K		Rp		K		Rp		K		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	166.891.900	-	-	-	-	-	32.302.000	-	-	-	32.302.000	0,00%	19,36%	0,00	32.302.000	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	893.309.326	-	-	-	313.745.802	-	197.879.687	-	25.083.000	-	536.708.489	0,00%	60,08%	0,00	536.708.489	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	85.530.800	2	-	-	38.710.000	-	660.000	-	562.000	1	39.932.000	25,00%	46,69%	0,50	39.932.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	50.924.000	2	-	-	700.000	-	3.326.400	-	-	2	4.026.400	100,00%	7,91%	2,00	4.026.400	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	65.256.518	4	-	-	13.250.238	-	2.362.330	-	-	1	15.612.568	25,00%	23,92%	1,00	15.612.568	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	647.686.500	4	-	-	261.085.564	-	191.530.957	-	24.521.000	1	477.137.521	25,00%	73,67%	1,00	477.137.521	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	791.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	43.120.000	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	52.461.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	52.461.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	31.847.760	-	-	-	3.631.625	-	1.126.625	-	-	4.758.250	0,00%	14,94%	0,00	4.758.250	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.101.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	28.746.000	-	-	-	3.631.625	-	1.126.625	-	-	4.758.250	0,00%	16,55%	0,00	4.758.250	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	231.346.000	-	-	-	51.376.640	-	38.653.000	-	2.405.541	-	92.435.181	0,00%	39,96%	0,00	92.435.181	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	165.600.000	30	-	-	26.376.640	-	30.703.000	-	-	30	57.079.640	100,00%	34,47%	30,00	57.079.640	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	19	43.440.000	19	-	-	25.000.000	-	7.950.000	-	-	5	32.950.000	25,00%	75,85%	4,75	32.950.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	22.306.000	-	-	-	-	-	-	-	2.405.541	-	2.405.541	0,00%	10,78%	0,00	2.405.541	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		398,05%	82,02%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tingg					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7.280.186.733		1.164.231.007		2.223.940.405		1.642.166.508		2.177.094.539		7.207.432.459		99,00%		7.207.432.459		0,00%		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		24,51		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		21,21				-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		9,5	60.239.844	-	13.821.000		12.300.000		12.989.000		21.091.000		60.201.000	0,00%	99,94%	0,00	60.201.000	0,00%	0,00%	
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		21		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Persen)	0,00		0,00		100		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	27.004.467	-	6.650.000	1	6.600.000	-	7.131.000	-	6.600.000	1	26.981.000	50,00%	99,91%	1,00	26.981.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	17.759.307	7	5.000.000	-	4.200.000	-	4.358.000	-	4.200.000	7	17.758.000	100,00%	99,99%	7,00	17.758.000	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.476.070	3	2.171.000	1	1.500.000	-	1.500.000	-	10.291.000	4	15.462.000	33,33%	99,91%	4,00	15.462.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00		0,00		95		-		17		-		-		17		18,39%		17,47		0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	6.019.522.380	-	1.077.431.502	17	2.112.879.428	-	1.325.693.902	-	1.476.401.748	-	5.992.406.580	0,00%	99,55%	0,00	5.992.406.580	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	53	5.994.914.016	53	1.072.631.502	53	2.108.079.428	53	1.320.627.902	53	1.466.496.748	53	5.967.835.580	100,00%	99,55%	53,00	5.967.835.580	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	24.608.364	-	4.800.000	-	4.800.000	-	5.066.000	-	9.905.000	-	24.571.000	0,00%	99,85%	0,00	24.571.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	346.716.899	100	21.379.768	100	43.603.980	-	65.453.667	-	215.879.325	-	346.316.740	0,00%	99,88%	0,00	346.316.740	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	13.172.370	1	1.440.000	1	2.730.000	1	2.022.000	1	6.951.000	1	13.143.000	100,00%	99,78%	1,00	13.143.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	143.407.890	3	6.820.000	3	5.050.000	3	1.763.000	3	129.604.000	3	143.237.000	100,00%	99,88%	3,00	143.237.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	10.048.000	2	50.000	2	2.000.000	2	4.100.000	2	3.750.000	2	9.900.000	100,00%	98,53%	2,00	9.900.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	25.985.029	2	-	2	-	2	13.711.000	2	12.229.000	2	25.940.000	100,00%	99,83%	2,00	25.940.000	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	32	154.103.610	-	13.069.768	6	33.823.980	-	43.857.667	-	63.345.325	6	154.096.740	18,75%	100,00%	6,00	154.096.740	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	206.381.490	-	-	-	-	-	169.500.000	-	34.020.000	-	203.520.000	0,00%	98,61%	0,00	203.520.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	206.381.490	-	-	-	-	-	169.500.000	-	34.020.000	-	203.520.000	0,00%	98,61%	0,00	203.520.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	261.615.100	100	32.762.000	100	41.985.000	-	44.140.000	-	129.695.000	-	248.582.000	0,00%	95,02%	0,00	248.582.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	4.872.000	3	4.872.000	1	-	-	-	-	-	4	4.872.000	33,33%	100,00%	4,00	4.872.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	256.743.100	3	27.890.000	1	41.985.000	-	44.140.000	-	129.695.000	4	243.710.000	33,33%	94,92%	4,00	243.710.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	385.711.020	100	18.836.737	100	13.171.997	-	24.389.939	-	300.007.466	-	356.406.139	0,00%	92,40%	0,00	356.406.139	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	31	138.156.600	31	18.836.737	31	13.171.997	31	14.456.549	31	91.394.200	31	137.859.483	100,00%	99,78%	31,00	137.859.483	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	247.554.420	-	-	-	-	-	9.933.390	-	208.613.266	-	218.546.656	0,00%	88,28%	0,00	218.546.656	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		88,98%	99,00%					
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)				SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16										
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	33.599.200	15	5.497.000	15	2.573.500	-	-	-	-	25.500.000	-	33.570.500	0,00%	99,91%	0,00	33.570.500	0,00%	0,00%										
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	33.599.200	1	5.497.000	-	2.573.500	-	-	-	-	25.500.000	1	33.570.500	50,00%	99,91%	1,00	33.570.500	0,00%	0,00%										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	458.961.873	16	78.381.982	29	99.007.485	-	143.499.746	-	122.594.739	-	443.483.952	0,00%	96,63%	0,00	443.483.952	0,00%	0,00%											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	3.872.473	1	608.000	-	-	-	-	-	3.196.000	0	3.804.000	25,00%	98,23%	0,25	3.804.000	0,00%	0,00%											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	13.300.000	2	10.000.000	-	-	-	-	-	2.850.000	2	12.850.000	100,00%	96,62%	2,00	12.850.000	0,00%	0,00%											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	32.270.000	-	4.770.000	-	5.355.000	-	4.375.000	-	15.090.000	-	29.590.000	0,00%	91,70%	0,00	29.590.000	0,00%	0,00%											
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	10.000.000	2	130.000	-	3.614.500	-	4.250.000	-	1.025.000	1	9.019.500	25,00%	90,20%	0,50	9.019.500	0,00%	0,00%											
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	157.728.000	3	13.330.000	3	39.330.000	-	52.830.000	-	52.230.000	2	157.720.000	50,00%	99,99%	1,50	157.720.000	0,00%	0,00%											
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	35.000.000	2	6.947.000	-	8.426.500	-	7.809.500	-	9.389.500	1	32.572.500	25,00%	93,06%	0,50	32.572.500	0,00%	0,00%											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	206.791.400	15	42.596.982	21	42.281.485	-	74.235.246	-	38.814.239	36	197.927.952	72,00%	95,71%	36,00	197.927.952	0,00%	0,00%											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	268.551.382	21	63.282.246	33	68.078.900	-	60.703.258	-	56.808.442	-	248.872.846	0,00%	92,67%	0,00	248.872.846	0,00%	0,00%											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	143.472.650	2	24.395.000	2	34.508.500	-	34.783.000	-	35.733.000	4	129.419.500	33,33%	90,20%	4,00	129.419.500	0,00%	0,00%											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	61.063.732	1	27.872.246	1	17.630.400	-	9.970.258	-	1.875.442	1	57.348.346	50,00%	93,92%	0,50	57.348.346	0,00%	0,00%											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	64.015.000	2	11.015.000	1	15.940.000	-	15.950.000	-	19.200.000	3	62.105.000	25,00%	97,02%	3,00	62.105.000	0,00%	0,00%											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	247.661.000	7	18.736.000	56	179.617.050	-	23.639.248	-	18.391.125	-	240.383.423	0,00%	97,06%	0,00	240.383.423	0,00%	0,00%											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	34	28.000.000	6	7.835.000	-	4.974.050	-	4.486.020	-	4.792.500	6	22.087.570	17,65%	78,88%	6,00	22.087.570	0,00%	0,00%											

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				6			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				5	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	216.561.000	1	10.521.000	-	174.643.000	-	18.287.000	-	12.887.000	1	216.338.000	100,00%	99,90%	1,00	216.338.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	3.100.000	2	380.000	-	-	-	866.228	-	711.625	2	1.957.853	13,33%	63,16%	2,00	1.957.853	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																		50,72%	96,70%					
																		Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						8.435.225.079		1.467.768.210		3.286.309.292		1.430.160.344		-		6.184.237.846		73,31%		6.184.237.846		0,00%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	141.580.811	-	17.823.836	-	5.600.000	-	45.031.975	-	-	-	68.455.811	0,00%	48,35%	0,00	68.455.811	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	55.586.235	1	3.000.000	1	5.600.000	-	9.329.235	-	-	2	17.929.235	50,00%	32,25%	2,00	17.929.235	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	51.223.836	1	11.223.836	-	-	1	24.000.000	-	-	2	35.223.836	100,00%	68,76%	2,00	35.223.836	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	34.770.740	1	3.600.000	-	-	1	11.702.740	-	-	2	15.302.740	50,00%	44,01%	2,00	15.302.740	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (Angka OPD Bersih)	0,00	-	0,00	-	100	7.358.219.876	-	1.340.206.574	-	3.120.587.526	-	1.095.004.972	-	-	-	5.555.799.072	0,00%	75,50%	0,00	5.555.799.072	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	70	7.287.680.339	66	1.334.606.574	66	3.096.984.757	66	1.077.806.704	-	-	50	5.509.398.035	70,71%	75,60%	49,50	5.509.398.035	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)				Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab											
			I		II			III		IV		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																	
			8	9	10	11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
3	4	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13	K	Rp	14	K	Rp	15	K	Rp	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestaran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	70.539.537	3	5.600.000	3	23.602.769	1	17.198.268	-	-	7	46.401.037	58,33%	65,78%	7,00	46.401.037	0,00%	0,00%												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%													
Pengadaan Pakiaa Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaab Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	281.363.728	-	7.505.000	-	44.529.500	-	118.793.527	-	-	-	170.828.027	0,00%	60,71%	0,00	170.828.027	0,00%	0,00%												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	35.061.728	2	7.505.000	2	6.752.000	1	9.376.700	-	-	1	23.633.700	62,50%	67,41%	1,25	23.633.700	0,00%	0,00%												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	246.302.000	-	-	10	37.777.500	20	109.416.827	-	-	30	147.194.327	60,00%	59,76%	30,00	147.194.327	0,00%	0,00%												
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	110.594.418	-	-	-	17.785.530	-	8.186.068	-	-	-	25.971.598	0,00%	23,48%	0,00	25.971.598	0,00%	0,00%												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		76.735.520		-		-		-		-		-	0,00%			-	0,00%													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	33.858.898	-	-	1	17.785.530	-	8.186.068	-	-	1	25.971.598	50,00%	76,71%	1,00	25.971.598	0,00%	0,00%												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	305.813.403	-	35.115.163	-	55.354.749	-	83.292.674	-	-	-	173.762.586	0,00%	56,82%	0,00	173.762.586	0,00%	0,00%												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	49.170.000	15	2.500.000	15	10.000.000	10	17.815.000	-	-	40	30.315.000	40,00%	61,65%	40,00	30.315.000	0,00%	0,00%												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	99.324.544	2	19.615.163	2	9.354.749	1	37.677.674	-	-	1	66.647.586	62,50%	67,10%	1,25	66.647.586	0,00%	0,00%												

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penaltan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penaltan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	87.179.864	3	6.600.000	3	26.400.000	1	18.200.000	-	-	2	51.200.000	58,33%	58,73%	1,75	51.200.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	70.138.995	3	6.400.000	3	9.600.000	1	9.600.000	-	-	7	25.600.000	58,33%	36,50%	7,00	25.600.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	237.652.843	-	67.117.637	-	42.451.987	-	79.851.128	-	-	-	189.420.752	0,00%	79,70%	0,00	189.420.752	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	220.600.712	2	67.117.637	3	32.996.576	2	77.185.128	-	-	7	177.299.341	70,00%	80,37%	7,00	177.299.341	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	17.052.131	-	-	1	9.455.411	-	2.666.000	-	-	1	12.121.411	100,00%	71,08%	1,00	12.121.411	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	69,03%	73,31%				
																		Predikat Kinerja	Sedang	Sedang				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																								DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Poin 6 Poin 11 Poin 17 Poin 22 Poin 100 Bersen)	0,00	-	0,00	-	78	279.175.220	20	47.587.500	40	64.675.000	55	86.500.000	78	56.975.000	78	255.737.500	100,00%	91,60%	78,00	255.737.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	271.175.220	1	45.587.500	1	64.675.000	1	86.500.000	1	50.975.000	1	247.737.500	100,00%	91,36%	1,00	247.737.500	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	0,00	-	0,00	-	97	6.659.934.434	20	1.243.143.549	40	2.300.169.217	65	1.486.128.915	97	963.477.050	97	5.992.918.731	100,00%	89,98%	97,00	5.992.918.731	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	68	6.508.088.434	18	1.219.681.049	40	2.262.698.217	54	1.451.816.415	68	942.139.550	68	5.876.335.231	100,00%	90,29%	68,00	5.876.335.231	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	151.846.000	-	23.462.500	1	37.471.000	-	34.312.500	1	21.337.500	2	116.583.500	100,00%	76,78%	2,00	116.583.500	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	72.801.000	-	-	-	72.801.000	-	-	-	-	72.801.000	0,00%	100,00%	0,00	72.801.000	0,00%	0,00%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	72.801.000	1	-	1	72.801.000	-	-	-	-	2	72.801.000	100,00%	100,00%	2,00	72.801.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	517.129.940	20	97.130.824	40	146.432.127	60	112.777.608	85	106.730.621	85	463.071.180	100,00%	89,55%	85,00	463.071.180	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	115.845.000	-	-	1	91.425.000	-	-	1	-	2	91.425.000	100,00%	78,92%	2,00	91.425.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	70.477.520	1	13.766.000	1	4.514.000	1	25.979.000	1	21.162.095	1	65.421.095	100,00%	92,83%	1,00	65.421.095	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	232.364.020	1	34.561.824	1	32.993.127	1	72.298.608	1	74.568.526	1	214.422.085	100,00%	92,28%	1,00	214.422.085	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	98.443.400	-	48.803.000	1	17.500.000	-	14.500.000	1	11.000.000	2	91.803.000	100,00%	93,25%	2,00	91.803.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	88	100.000.000	20	-	40	98.958.438	60	665.000	88	-	88	99.623.438	100,00%	99,62%	88,00	99.623.438	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	1	98.958.438	-	665.000	-	-	1	99.623.438	100,00%	99,62%	1,00	99.623.438	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	82	360.012.017	20	59.099.227	35	69.009.197	65	75.862.203	82	49.647.451	202	253.618.078	246,34%	70,45%	202,00	253.618.078	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	150.975.000	1	19.762.500	1	31.337.500	1	29.762.500	1	20.287.500	1	101.150.000	100,00%	67,00%	1,00	101.150.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	77.387.017	1	14.036.727	1	8.871.697	1	15.009.703	1	8.049.951	1	45.968.078	100,00%	59,40%	1,00	45.968.078	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	16.450.000	1	6.100.000	1	-	1	690.000	1	2.110.000	1	8.900.000	100,00%	54,10%	1,00	8.900.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	115.200.000	1	19.200.000	1	28.800.000	1	30.400.000	1	19.200.000	1	97.600.000	100,00%	84,72%	1,00	97.600.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	83	213.760.000	20	37.532.600	35	38.804.204	65	48.820.000	83	7.735.000	83	132.891.804	100,00%	62,17%	83,00	132.891.804	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)				SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	263.384.000	30	37.610.006	-	60.369.300	-	67.483.300	-	29.586.200	-	195.048.806	0,00%	74,05%	0,00	195.048.806	0,00%	0,00%							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	21.400.000	1	2.500.000	2	3.750.000	2	6.750.000	2	3.500.000	2	16.500.000	50,00%	77,10%	2,00	16.500.000	0,00%	0,00%							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	241.984.000	3	35.110.006	3	56.619.300	3	60.733.300	3	26.086.200	3	178.548.806	100,00%	73,79%	3,00	178.548.806	0,00%	0,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	654.598.220	30	85.579.300	-	151.326.000	-	123.263.700	-	92.499.900	-	452.668.900	0,00%	69,15%	0,00	452.668.900	0,00%	0,00%							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	72.850.360	1	4.700.000	1	10.144.900	1	17.343.100	1	15.599.100	1	47.787.100	100,00%	65,60%	1,00	47.787.100	0,00%	0,00%							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	196.610.900	3	20.496.300	3	54.674.600	3	26.736.600	3	4.064.800	3	105.972.300	100,00%	53,90%	3,00	105.972.300	0,00%	0,00%							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	385.136.960	1	60.383.000	1	86.506.500	1	79.184.000	1	72.836.000	1	298.909.500	100,00%	77,61%	1,00	298.909.500	0,00%	0,00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		99,32%	88,98%											
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tingg											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.864.162.160		1.030.809.089		2.036.325.621		1.148.104.832		1.583.882.376		5.799.121.918		98,89%		5.799.121.918		0,00%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		30		24		24		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%									
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		30	195.210.000	19	33.400.000	19	39.300.000	-	36.400.000	-	86.110.000	-	195.210.000	0,00%	100,00%	0,00	195.210.000	0,00%	0,00%							
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		15		15		15		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%									
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		25		19		19		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%									
	Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		75		76		76		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	19.230.000	-	4.800.000	1	-	-	4.800.000	1	9.630.000	2	19.230.000	100,00%	100,00%	2,00	19.230.000	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	33.630.000	1	5.600.000	-	8.400.000	-	5.600.000	-	14.030.000	1	33.630.000	100,00%	100,00%	1,00	33.630.000	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	16.830.000	-	2.800.000	-	4.200.000	-	2.800.000	1	7.030.000	1	16.830.000	100,00%	100,00%	1,00	16.830.000	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	30.030.000	1	5.000.000	-	7.500.000	-	5.000.000	-	12.530.000	1	30.030.000	100,00%	100,00%	1,00	30.030.000	0,00%	0,00%							
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	60.030.000	-	10.000.000	-	15.000.000	-	10.000.000	1	25.030.000	1	60.030.000	100,00%	100,00%	1,00	60.030.000	0,00%	0,00%							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	26.430.000	-	5.200.000	-	4.200.000	-	5.200.000	2	11.830.000	2	26.430.000	100,00%	100,00%	2,00	26.430.000	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	9.030.000	3	-	-	-	-	3.000.000	1	6.030.000	4	9.030.000	100,00%	100,00%	4,00	9.030.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	0,00	-	0,00	-	90	4.752.052.599	49	899.559.704	47	1.685.245.238	-	1.012.593.156	-	1.102.613.263	96	4.700.011.361	107,06%	98,90%	96,35	4.700.011.361	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	42	4.677.022.599	42	887.059.704	42	1.666.495.238	42	1.000.093.156	42	1.073.833.263	42	4.627.481.361	100,00%	98,94%	42,00	4.627.481.361	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	75.030.000	-	12.500.000	-	18.750.000	-	12.500.000	1	28.780.000	1	72.530.000	100,00%	96,67%	1,00	72.530.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	4.350.000	-	-	-	2.262.000	-	-	-	2.088.000	-	4.350.000	0,00%	100,00%	0,00	4.350.000	0,00%	0,00%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.350.000	-	-	1	2.262.000	-	-	-	2.088.000	1	4.350.000	100,00%	100,00%	1,00	4.350.000	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	279.403.996	-	56.126.745	-	85.949.743	-	53.233.916	-	82.374.376	-	277.684.780	0,00%	99,38%	0,00	277.684.780	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	3.484.200	-	696.000	1	-	-	704.000	-	2.060.000	1	3.460.000	100,00%	99,31%	1,00	3.460.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	33.169.600	-	-	1	29.481.600	-	-	-	3.154.000	1	32.635.600	100,00%	98,39%	1,00	32.635.600	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.828.000	-	1.260.000	-	5.403.000	-	540.000	1	8.589.000	1	15.792.000	100,00%	99,77%	1,00	15.792.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	12.022.568	-	-	-	3.975.000	1	3.950.000	-	4.084.368	1	12.009.368	100,00%	99,89%	1,00	12.009.368	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	810.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	0,00%	3,70%	0,00	30.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	19.979.633	1	19.979.431	-	-	-	-	-	-	1	19.979.431	100,00%	100,00%	1,00	19.979.431	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	177.184.100	-	34.191.314	1	47.090.143	-	48.039.916	1	47.531.408	2	176.852.781	100,00%	99,81%	2,00	176.852.781	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			I			II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
			8	9		10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	16.925.895	-	-	-	-	1	16.925.600	1	16.925.600	100,00%	100,00%	1,00	16.925.600	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	93.655.320	-	16.732.640	-	23.238.640	-	15.242.760	-	38.320.544	-	93.534.584	0,00%	99,87%	0,00	93.534.584	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	63.000.000	-	10.000.000	-	16.500.000	-	10.750.000	1	25.750.000	1	63.000.000	100,00%	100,00%	1,00	63.000.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	30.655.320	-	6.732.640	-	6.738.640	-	4.492.760	1	12.570.544	1	30.534.584	100,00%	99,61%	1,00	30.534.584	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	539.490.245	-	24.990.000	-	200.330.000	-	30.635.000	-	272.376.193	-	528.331.193	0,00%	97,93%	0,00	528.331.193	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	460.420.000	2	12.190.000	7	181.130.000	-	17.835.000	1	238.106.693	10	449.261.693	100,00%	97,58%	10,00	449.261.693	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	79.070.245	-	12.800.000	1	19.200.000	-	12.800.000	-	34.269.500	1	79.069.500	100,00%	100,00%	1,00	79.069.500	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,99%	98,89%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.482.205.233		3.598.929.912		7.019.893.656		4.541.131.649		5.217.867.159		20.377.822.376		99,49%		20.377.822.376		0,00%		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	284.340.074	1	34.498.144	1	99.703.680	1	57.657.468	1	88.526.892	4	280.386.184	4,08%	98,61%	4,00	280.386.184	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	171.521.288	1	30.564.960	1	75.250.000	1	22.650.000	1	42.336.960	4	170.801.920	100,00%	99,58%	4,00	170.801.920	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.383.184	-	1.433.184	-	1.375.000	-	2.525.000	1	-	1	5.333.184	100,00%	99,07%	1,00	5.333.184	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.919.118	-	-	-	-	-	-	1	3.872.036	1	3.872.036	100,00%	98,80%	1,00	3.872.036	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.678.680	-	-	-	3.178.680	-	-	1	1.900.000	1	5.078.680	100,00%	89,43%	1,00	5.078.680	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.552.744	-	-	-	-	-	-	1	4.532.744	1	4.532.744	100,00%	99,56%	1,00	4.532.744	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	5.370.500	-	-	-	-	-	3.120.500	2	-	2	3.120.500	100,00%	58,10%	2,00	3.120.500	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	87.914.560	1	2.500.000	1	19.900.000	1	29.361.968	1	35.885.152	4	87.647.120	100,00%	99,70%	4,00	87.647.120	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	18.702.149.801	25	3.399.923.704	25	6.559.044.084	25	4.166.076.014	25	4.499.590.273	100	18.624.634.075	100,00%	99,59%	100,00	18.624.634.075	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	192	18.572.339.456	192	3.376.970.627	192	6.527.777.256	192	4.141.078.014	192	4.449.010.923	768	18.494.836.820	400,00%	99,58%	768,00	18.494.836.820	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	50.649.600	3	6.653.960	3	14.450.000	3	7.758.000	3	21.781.000	12	50.642.960	100,00%	99,99%	12,00	50.642.960	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	35.126.423	3	7.136.423	3	7.500.000	3	9.400.000	3	11.090.000	12	35.126.423	100,00%	100,00%	12,00	35.126.423	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	27.643.094	-	9.162.694	-	3.750.000	-	3.750.000	1	10.980.000	1	27.642.694	100,00%	100,00%	1,00	27.642.694	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.997.472	-	-	-	2.727.072	-	-	1	3.268.350	1	5.995.422	100,00%	99,97%	1,00	5.995.422	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	10.393.756	3	-	3	2.839.756	3	4.090.000	3	3.460.000	12	10.389.756	100,00%	99,96%	12,00	10.389.756	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	45.074.736	25	-	25	44.574.736	25	-	25	-	100	44.574.736	100,00%	98,89%	100,00	44.574.736	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	78	45.074.736	-	-	-	44.574.736	-	-	78	-	78	44.574.736	100,00%	98,89%	78,00	44.574.736	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	497.701.685	25	29.517.250	25	75.291.250	25	101.732.955	25	281.523.111	100	488.064.566	100,00%	98,06%	100,00	488.064.566	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	2.890.948	1	1.150.000	1	1.546.000	1	-	2	-	5	2.696.000	100,00%	93,26%	5,00	2.696.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	150.771.088	-	-	1	5.076.000	2	-	2	145.494.000	5	150.570.000	100,00%	99,87%	5,00	150.570.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	63.710.000	-	9.025.000	-	16.935.500	-	14.131.165	1	23.580.000	1	63.671.665	100,00%	99,94%	1,00	63.671.665	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	22.720.328	1	1.288.750	1	5.670.000	1	14.522.128	1	1.239.385	4	22.720.263	100,00%	100,00%	4,00	22.720.263	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	26	73.330.101	6	11.943.500	6	18.913.000	7	20.169.300	7	22.176.000	26	73.201.800	100,00%	99,83%	26,00	73.201.800	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	184.279.220	-	6.110.000	-	27.150.750	-	52.910.362	1	89.033.726	1	175.204.838	100,00%	95,08%	1,00	175.204.838	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-	0,00%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	675.702.947	25	111.930.694	25	172.006.442	25	168.150.012	25	212.680.046	100	664.767.194	100,00%	98,38%	100,00	664.767.194	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	116.531.711	25	13.600.000	25	33.650.000	25	27.150.000	25	39.317.850	100	113.717.850	100,00%	97,59%	100,00	113.717.850	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	314.481.476	-	68.476.894	1	73.678.942	1	79.220.012	1	87.550.940	3	308.926.788	100,00%	98,23%	3,00	308.926.788	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	244.689.760	-	29.853.800	1	64.677.500	2	61.780.000	2	85.811.256	5	242.122.556	100,00%	98,95%	5,00	242.122.556	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	277.235.990	25	23.060.120	25	69.273.464	25	47.515.200	25	135.546.837	100	275.395.621	100,00%	99,34%	100,00	275.395.621	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	82	277.235.990	20	23.060.120	20	69.273.464	21	47.515.200	21	135.546.837	82	275.395.621	100,00%	99,34%	82,00	275.395.621	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		372,03%	99,49%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-		-		7.876.646.025		1.353.240.850		2.483.665.977		2.110.963.673		1.735.743.407		7.683.613.907		97,55%		7.683.613.907		0,00%	DINAS SOSIAL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	100	137.645.344	25	49.642.308	50	39.379.840	75	8.651.940	100	39.097.780	100	136.771.868	100,00%	99,37%	100,00	136.771.868	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	64.507.524	2	33.987.888	2	24.900.000	3	3.789.940	4	1.700.000	4	64.377.828	100,00%	99,80%	4,00	64.377.828	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV												
				5	6			7	8	9	10	11	12	13=12/x100%	14 = 6 + 12									
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.556.874	1	9.533.432	-	-	-	-	-	-	1	9.533.432	100,00%	99,75%	1,00	9.533.432	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	9.414.282	-	-	-	-	-	-	2	9.412.660	2	9.412.660	100,00%	99,98%	2,00	9.412.660	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	6.146.822	1	6.120.988	-	-	-	-	-	-	1	6.120.988	100,00%	99,58%	1,00	6.120.988	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	6.468.942	-	-	-	-	-	-	2	6.468.120	2	6.468.120	100,00%	99,99%	2,00	6.468.120	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	6.828.840	-	-	4	6.802.840	-	-	-	-	4	6.802.840	100,00%	99,62%	4,00	6.802.840	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	34.722.060	-	-	2	7.677.000	1	4.862.000	3	21.517.000	6	34.056.000	100,00%	98,08%	6,00	34.056.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.327.133.009	25	1.174.590.108	50	2.235.638.267	75	1.389.787.855	100	1.359.061.672	100	6.159.077.902	100,00%	97,34%	100,00	6.159.077.902	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	64	6.300.987.205	64	1.170.993.108	64	2.229.380.267	64	1.386.156.611	61	1.346.424.272	253	6.132.954.258	395,31%	97,33%	253,00	6.132.954.258	0,00%	0,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	150	3.599.496	150	3.597.000	-	-	-	-	-	-	150	3.597.000	100,00%	99,93%	150,00	3.597.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	3.470.228	-	-	-	-	5	1.181.484	7	2.270.000	12	3.451.484	100,00%	99,46%	12,00	3.451.484	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.829.840	-	-	-	-	-	-	1	4.829.400	1	4.829.400	100,00%	99,99%	1,00	4.829.400	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	14.246.240	-	-	1	6.258.000	1	2.449.760	-	5.538.000	2	14.245.760	100,00%	100,00%	2,00	14.245.760	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	9.999.534	-	-	50	4.148.775	100	4.146.280	100	1.701.440	100	9.996.495	100,00%	99,97%	100,00	9.996.495	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	4.999.720	-	-	1	-	-	3.298.280	1	1.701.440	2	4.999.720	100,00%	100,00%	2,00	4.999.720	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	4.999.814	-	-	4	4.148.775	1	848.000	-	-	5	4.996.775	100,00%	99,94%	5,00	4.996.775	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	153.109.129	40	-	80	24.598.314	100	110.042.148	100	17.189.597	100	151.830.059	100,00%	99,16%	100,00	151.830.059	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	64	105.038.520	-	-	-	-	64	103.950.000	-	143.520	64	104.093.520	100,00%	99,10%	64,00	104.093.520	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.999.609	-	-	-	2.835.314	1	3.092.148	1	3.072.147	2	8.999.609	100,00%	100,00%	2,00	8.999.609	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	39.071.000	-	-	1	21.763.000	1	3.000.000	2	13.973.930	2	38.736.930	100,00%	99,14%	2,00	38.736.930	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	558.600.533	25	90.262.218	50	122.442.515	75	110.222.940	100	231.310.456	100	554.238.129	100,00%	99,22%	100,00	554.238.129	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	9.772.000	3	5.151.000	-	1.880.000	1	1.500.000	1	1.241.000	5	9.772.000	100,00%	100,00%	5,00	9.772.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	55.643.520	1	16.073.000	-	14.569.820	-	12.940.000	-	12.060.000	1	55.642.820	100,00%	100,00%	1,00	55.642.820	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	13.445.000	1	2.222.900	-	3.843.400	-	1.700.000	-	5.670.000	1	13.436.300	50,00%	99,94%	1,00	13.436.300	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	33.846.133	1	6.853.035	-	6.651.175	-	13.295.920	-	7.022.768	1	33.822.898	100,00%	99,93%	1,00	33.822.898	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	326.593.880	30	59.962.283	41	58.498.120	10	51.037.020	19	156.566.688	100	326.064.111	100,00%	99,84%	100,00	326.064.111	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	119.300.000	-	-	3	37.000.000	2	29.750.000	-	48.750.000	5	115.500.000	62,50%	96,81%	5,00	115.500.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	342.771.997	-	-	100	-	-	312.805.000	-	20.857.000	100	333.662.000	100,00%	97,34%	100,00	333.662.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	342.771.997	-	-	-	-	8	312.805.000	-	20.857.000	8	333.662.000	100,00%	97,34%	8,00	333.662.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	79.896.079	25	19.461.954	50	12.907.776	75	26.307.767	100	20.431.012	100	79.108.509	100,00%	99,01%	100,00	79.108.509	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	79.896.079	1	19.461.954	-	12.907.776	1	26.307.767	1	20.431.012	3	79.108.509	100,00%	99,01%	3,00	79.108.509	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	267.490.400	-	19.284.262	100	44.550.490	-	148.999.743	-	46.094.450	100	258.928.945	100,00%	96,80%	100,00	258.928.945	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	47.443.400	-	5.000.000	-	10.000.000	-	24.011.880	-	6.428.250	-	45.440.130	0,00%	95,78%	0,00	45.440.130	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	64.290.000	4	9.919.262	18	34.550.490	19	8.352.450	19	5.131.700	19	57.953.902	63,33%	90,14%	19,00	57.953.902	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	21.160.000	5	4.365.000	-	-	-	2.150.000	-	14.585.000	5	21.100.000	50,00%	99,72%	5,00	21.100.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	134.597.000	-	-	-	-	2	114.485.413	-	19.949.500	2	134.434.913	100,00%	99,88%	2,00	134.434.913	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	334,55%	97,55%						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			6			I		II		III		IV		12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
			7	8		9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	629.692.868	-	207.643.816	-	94.010.800	-	138.487.000	-	175.853.650	-	615.995.266	0,00%	97,82%	0,00	615.995.266	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	19	15.848.059	15	7.800.000	-	-	-	8.047.000	-	-	15	15.847.000	78,95%	99,99%	15,00	15.847.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	93.127.965	1	25.500.000	-	25.500.000	-	25.500.000	-	16.437.000	1	92.937.000	20,00%	99,79%	1,00	92.937.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	29.959.015	-	7.500.000	-	5.500.800	-	7.500.000	-	6.000.000	-	26.500.800	0,00%	88,46%	0,00	26.500.800	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	163.618.252	-	19.500.000	-	8.000.000	-	69.230.000	-	66.807.000	-	163.537.000	0,00%	99,95%	0,00	163.537.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	70.818.291	-	36.000.000	-	-	-	18.000.000	-	16.761.350	-	70.761.350	0,00%	99,92%	0,00	70.761.350	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	70	256.321.286	15	111.343.816	-	55.010.000	-	10.210.000	-	69.848.300	15	246.412.116	21,43%	96,13%	15,00	246.412.116	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	183.254.222	-	153.540.000	-	-	-	16.000.000	-	-	-	169.540.000	0,00%	92,52%	0,00	169.540.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	153.734.298	-	153.540.000	-	-	-	-	-	-	-	153.540.000	0,00%	99,87%	0,00	153.540.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	21.236.388	-	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000	0,00%	75,34%	0,00	16.000.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	8.283.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	456.102.349	-	82.726.558	-	80.388.008	-	75.330.534	-	107.154.158	-	345.599.258	0,00%	75,77%	0,00	345.599.258	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	232.007.982	-	55.300.000	-	48.068.000	-	51.550.000	-	53.651.200	-	208.569.200	0,00%	89,90%	0,00	208.569.200	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	36	192.099.406	-	25.026.558	-	29.920.008	-	23.780.534	-	40.175.158	-	118.902.258	0,00%	61,90%	0,00	118.902.258	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	31.994.961	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	13.327.800	-	18.127.800	0,00%	56,66%	0,00	18.127.800	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	309.595.660	-	110.677.063	-	29.831.000	-	44.427.000	-	51.948.000	-	236.883.063	0,00%	76,51%	0,00	236.883.063	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	170.062.000	7	50.986.903	-	14.731.000	-	33.227.000	-	39.348.000	7	138.292.903	35,00%	81,32%	7,00	138.292.903	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	139.533.660	1	59.690.160	-	15.100.000	-	11.200.000	-	12.600.000	1	98.590.160	100,00%	70,66%	1,00	98.590.160	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		43,43%	94,40%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	85	136.524.100	-	16.491.350	-	37.378.150	-	14.225.000	-	38.245.000	-	106.339.500	0,00%	77,89%	0,00	106.339.500	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	60.049.100	-	8.991.350	-	20.053.150	-	6.725.000	-	15.545.000	-	51.314.500	0,00%	85,45%	0,00	51.314.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	70.600.000	-	7.500.000	-	17.325.000	-	7.500.000	-	22.700.000	-	55.025.000	0,00%	77,94%	0,00	55.025.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	4.166.734.399	-	739.881.764	-	1.448.843.101	-	614.902.308	-	1.212.621.319	-	4.016.248.492	0,00%	96,39%	0,00	4.016.248.492	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	1	4.086.401.899	-	729.881.764	-	1.431.680.601	-	605.777.308	-	1.189.683.819	-	3.957.023.492	0,00%	96,83%	0,00	3.957.023.492	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	76.672.500	-	10.000.000	-	17.162.500	-	9.125.000	-	22.937.500	-	59.225.000	0,00%	77,24%	0,00	59.225.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	96.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	96.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	690.898.400	-	86.862.483	-	90.430.529	-	67.396.738	-	263.891.024	-	508.580.774	0,00%	73,61%	0,00	508.580.774	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	35.050.000	-	8.710.000	-	8.710.000	-	2.814.000	-	9.159.000	-	29.393.000	0,00%	83,86%	0,00	29.393.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	17.680.000	-	3.738.000	-	2.787.600	-	3.650.000	-	1.482.000	-	11.657.600	0,00%	65,94%	0,00	11.657.600	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	39.337.626	-	8.974.208	-	7.066.729	-	1.173.563	-	16.038.852	-	33.253.352	0,00%	84,53%	0,00	33.253.352	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	45	440.095.494	-	65.440.275	-	68.716.200	-	59.759.175	-	230.911.172	-	424.826.822	0,00%	96,53%	0,00	424.826.822	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	158.735.280	-	-	-	3.150.000	-	-	-	6.300.000	-	9.450.000	0,00%	5,95%	0,00	9.450.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	197.480.000	-	195.600.000	-	-	-	-	-	-	-	195.600.000	0,00%	99,05%	0,00	195.600.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			6			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	197.480.000	-	195.600.000	-	-	-	-	-	195.600.000	0,00%	99,05%	0,00	195.600.000	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	401.559.800	-	66.195.901	-	87.573.962	-	51.670.882	-	118.252.431	-	323.693.176	0,00%	80,61%	0,00	323.693.176	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	342.475.000	-	56.435.500	-	77.310.500	-	48.350.000	-	101.371.000	-	283.467.000	0,00%	82,77%	0,00	283.467.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	59.084.800	-	9.760.401	-	10.263.462	-	3.320.882	-	16.881.431	-	40.226.176	0,00%	68,08%	0,00	40.226.176	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	207.210.000	-	7.270.000	-	8.189.600	-	6.575.000	-	77.915.000	-	99.949.600	0,00%	48,24%	0,00	99.949.600	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	207.210.000	-	7.270.000	-	8.189.600	-	6.575.000	-	77.915.000	-	99.949.600	0,00%	48,24%	0,00	99.949.600	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	89,04%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Tinggi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-			4.464.304.381		716.730.137		1.528.683.284		980.773.028		722.893.356		3.949.079.805		88,46%		3.949.079.805		0,00%	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	90	57.202.184	25	1.400.000	-	11.150.000	-	21.650.000	-	14.660.000	25	48.860.000	27,78%	85,42%	25,00	48.860.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	31.172.184	-	-	1	4.800.000	-	14.700.000	1	8.410.000	2	27.910.000	100,00%	89,53%	2,00	27.910.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	18.580.000	-	1.400.000	2	5.600.000	-	4.200.000	-	4.050.000	2	15.250.000	100,00%	82,08%	2,00	15.250.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	7.450.000	-	-	-	750.000	1	2.750.000	1	2.200.000	2	5.700.000	100,00%	76,51%	2,00	5.700.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.481.647.341	25	631.668.362	-	1.219.909.200	-	759.161.217	-	500.714.656	25	3.111.453.435	25,00%	89,37%	25,00	3.111.453.435	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	32	3.413.347.341	32	626.068.362	32	1.197.509.200	32	742.361.217	32	489.194.656	32	3.055.133.435	100,00%	89,51%	32,00	3.055.133.435	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	17.580.000	-	1.400.000	-	5.600.000	-	4.200.000	-	2.800.000	-	14.000.000	0,00%	79,64%	0,00	14.000.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	50.720.000	1	4.200.000	1	16.800.000	1	12.600.000	-	8.720.000	3	42.320.000	75,00%	83,44%	3,00	42.320.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	-	0,00	-	100	16.990.000	20	1.400.000	-	5.600.000	-	4.200.000	-	2.990.000	20	14.190.000	20,00%	83,52%	20,00	14.190.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	-	0,00	-	1	16.990.000	-	1.400.000	-	5.600.000	-	4.200.000	1	2.990.000	1	14.190.000	100,00%	83,52%	1,00	14.190.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	-	0,00	-	100	25.382.000	20	-	-	2.400.000	-	3.000.000	-	16.680.000	20	22.080.000	20,00%	86,99%	20,00	22.080.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	-	0,00	-	1	25.382.000	-	-	-	2.400.000	-	3.000.000	1	16.680.000	1	22.080.000	100,00%	86,99%	1,00	22.080.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	-	0,00	-	100	164.844.364	25	11.899.250	-	46.578.800	-	20.376.890	-	25.213.550	25	104.068.490	25,00%	63,13%	25,00	104.068.490	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	-	0,00	-	2	51.300.000	-	1.940.000	1	13.863.300	-	8.155.890	1	19.374.200	2	43.333.390	100,00%	84,47%	2,00	43.333.390	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	-	0,00	-	2	8.205.000	-	-	1	1.820.000	-	1.950.000	1	1.948.350	2	5.718.350	100,00%	69,69%	2,00	5.718.350	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Bahan/Material	0,00	-	0,00	-	1	30.000.000	-	3.769.250	-	12.015.500	1	10.271.000	-	3.891.000	1	29.946.750	100,00%	99,82%	1,00	29.946.750	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	-	0,00	-	12	75.339.364	1	6.190.000	4	18.880.000	-	-	-	-	5	25.070.000	41,67%	33,28%	5,00	25.070.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	-	0,00	-	100	471.860.452	20	67.786.656	-	193.062.691	-	118.261.336	-	35.950.879	20	415.061.562	20,00%	87,96%	20,00	415.061.562	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	-	0,00	-	1	3.940.500	-	1.500.000	-	350.000	-	1.096.000	1	986.500	1	3.932.500	100,00%	99,80%	1,00	3.932.500	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	-	0,00	-	2	104.981.952	-	27.386.656	1	24.137.691	-	12.527.336	1	18.964.379	2	83.016.062	100,00%	79,08%	2,00	83.016.062	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	-	0,00	-	1	362.938.000	-	38.900.000	-	168.575.000	-	104.638.000	1	16.000.000	1	328.113.000	100,00%	90,40%	1,00	328.113.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	-	0,00	-	100	246.378.040	20	2.575.869	-	49.982.593	-	54.123.585	-	126.684.271	20	233.366.318	20,00%	94,72%	20,00	233.366.318	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	40.940.000	-	1.325.869	1	25.613.493	-	9.835.000	-	3.650.000	1	40.424.362	100,00%	98,74%	1,00	40.424.362	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	-	0,00	-	10	193.560.000	-	1.250.000	6	20.552.900	2	39.886.185	2	119.667.671	10	181.356.756	100,00%	93,70%	10,00	181.356.756	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	6.556.840	-	-	-	1.866.200	-	1.072.400	1	3.366.600	1	6.305.200	100,00%	96,16%	1,00	6.305.200	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	5.321.200	-	-	1	1.950.000	1	3.330.000	-	-	2	5.280.000	100,00%	99,23%	2,00	5.280.000	0,00%	0,00%	
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																		98,34%	88,46%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						675.291.516		146.972.755		123.835.050		182.054.043		220.851.350		673.713.198		99,77%		673.713.198		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	0,00	-	0,00	-	10,67	138.660.964	25	29.549.500	-	28.190.900	-	29.587.500	-	51.323.350	25	138.651.250	234,30%	99,99%	25,00	138.651.250	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	31.255.880	1	4.814.850	-	7.418.000	-	7.400.000	1	11.617.300	2	31.250.150	100,00%	99,98%	2,00	31.250.150	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	12.302.840	1	2.702.650	-	3.200.000	-	3.200.000	-	3.200.000	1	12.302.650	100,00%	100,00%	1,00	12.302.650	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.412.160	-	-	-	-	-	-	1	2.411.600	1	2.411.600	100,00%	99,98%	1,00	2.411.600	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.414.120	1	-	-	2.413.350	-	-	-	-	1	2.413.350	100,00%	99,97%	1,00	2.413.350	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.495.664	-	-	-	-	-	-	1	2.494.950	1	2.494.950	100,00%	99,97%	1,00	2.494.950	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	85.254.540	-	20.890.350	-	15.159.550	-	18.987.500	2	30.216.100	2	85.253.500	100,00%	100,00%	2,00	85.253.500	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	2.525.760	1	1.141.650	-	-	-	-	3	1.383.400	4	2.525.050	100,00%	99,97%	4,00	2.525.050	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	38.502.920	25	3.805.325	-	5.670.425	-	9.940.250	-	19.080.750	25	38.496.750	25,00%	99,98%	25,00	38.496.750	0,00%	0,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.247.720	-	-	-	-	-	2.246.950	1	-	1	2.246.950	100,00%	99,97%	1,00	2.246.950	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.494.312	-	-	-	-	-	3.493.300	1	-	1	3.493.300	100,00%	99,97%	1,00	3.493.300	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.082.120	-	300.000	-	765.100	-	-	1	2.016.250	1	3.081.350	100,00%	99,98%	1,00	3.081.350	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	23.504.460	-	2.800.000	-	4.200.000	-	4.200.000	1	12.302.100	1	23.502.100	100,00%	99,99%	1,00	23.502.100	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.882.120	-	-	-	-	-	-	1	2.881.350	1	2.881.350	100,00%	99,97%	1,00	2.881.350	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	3.292.188	-	705.325	-	705.325	-	-	3	1.881.050	3	3.291.700	100,00%	99,99%	3,00	3.291.700	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	2.176.192	25	486.000	-	-	-	550.000	-	1.089.600	25	2.125.600	25,00%	97,68%	25,00	2.125.600	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.176.192	-	486.000	-	-	-	550.000	1	1.089.600	1	2.125.600	100,00%	97,68%	1,00	2.125.600	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	30.590.812	25	4.482.200	-	6.000.000	-	9.550.000	-	10.547.650	25	30.579.850	25,00%	99,96%	25,00	30.579.850	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	30.590.812	-	4.482.200	-	6.000.000	-	9.550.000	1	10.547.650	1	30.579.850	100,00%	99,96%	1,00	30.579.850	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	314.821.388	30	95.101.230	-	60.900.325	-	72.987.293	-	85.243.100	30	314.231.948	30,00%	99,81%	30,00	314.231.948	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	41.400.000	-	5.000.000	-	2.800.000	-	11.000.000	1	22.600.000	1	41.400.000	100,00%	100,00%	1,00	41.400.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	7.570.000	-	800.000	-	-	-	2.809.300	2	3.461.700	2	7.071.000	100,00%	93,41%	2,00	7.071.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	42.425.000	1	41.200.000	-	-	-	730.000	-	495.000	1	42.425.000	100,00%	100,00%	1,00	42.425.000	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	80	180.907.908	12	44.517.480	23	46.136.825	29	48.052.993	20	42.171.050	84	180.878.348	105,00%	99,98%	84,00	180.878.348	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	42.518.480	-	3.583.750	-	11.963.500	-	10.395.000	1	16.515.350	1	42.457.600	100,00%	99,86%	1,00	42.457.600	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	37.900.000	-	-	-	-	-	37.900.000	-	-	-	37.900.000	0,00%	100,00%	0,00	37.900.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	37.900.000	-	-	-	-	10	37.900.000	-	-	10	37.900.000	100,00%	100,00%	10,00	37.900.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.846.984	25	1.058.500	-	2.574.400	-	696.000	-	2.517.100	25	6.846.000	25,00%	99,99%	25,00	6.846.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	6.846.984	-	1.058.500	-	2.574.400	-	696.000	1	2.517.100	1	6.846.000	100,00%	99,99%	1,00	6.846.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	105.792.256	15	12.490.000	-	20.499.000	-	20.843.000	-	51.049.800	15	104.881.800	15,00%	99,14%	15,00	104.881.800	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	74.240.000	2	12.135.000	4	17.066.000	2	12.575.000	3	31.797.000	11	73.573.000	100,00%	99,10%	11,00	73.573.000	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	19.900.000	1	355.000	5	1.603.000	2	4.135.800	5	13.562.800	13	19.656.600	100,00%	98,78%	13,00	19.656.600	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	7.100.000	-	-	2	-	-	2.050.000	3	5.050.000	5	7.100.000	100,00%	100,00%	5,00	7.100.000	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	4.552.256	-	-	2	1.830.000	3	2.082.200	1	640.000	6	4.552.200	100,00%	100,00%	6,00	4.552.200	0,00%	0,00%		
									Rate-Rate Capaian Kinerja (%)								101,34%	99,77%							
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						499.170.610		42.378.143		131.141.207		121.840.410		197.001.732		492.361.492		98,64%		492.361.492		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	0,00	-	0,00	-	10,67	99.002.500	-	13.187.500	-	20.452.500	-	24.307.500	-	40.212.000	-	98.159.500	0,00%	99,15%	0,00	98.159.500	0,00%	0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	31.382.500	-	4.475.000	-	7.500.000	-	7.890.000	-	11.480.000	-	31.345.000	0,00%	99,88%	0,00	31.345.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.020.000	-	1.000.000	-	1.020.000	-	-	-	-	-	2.020.000	0,00%	100,00%	0,00	2.020.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.020.000	-	-	-	-	480.000	-	1.540.000	-	2.020.000	0,00%	100,00%	0,00	2.020.000	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.020.000	-	1.000.000	-	1.020.000	-	-	-	-	-	2.020.000	0,00%	100,00%	0,00	2.020.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.020.000	-	-	-	-	-	-	2.020.000	-	2.020.000	0,00%	100,00%	0,00	2.020.000	0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	16.845.000	-	2.237.500	-	3.412.500	-	3.637.500	-	7.520.000	-	16.807.500	0,00%	99,78%	0,00	16.807.500	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	42.695.000	-	4.475.000	-	7.500.000	-	12.300.000	-	17.652.000	-	41.927.000	0,00%	98,20%	0,00	41.927.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.137.200	-	-	-	380.000	-	480.000	-	3.277.200	-	4.137.200	0,00%	100,00%	0,00	4.137.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.117.200	-	-	-	-	-	-	-	2.117.200	-	2.117.200	0,00%	100,00%	0,00	2.117.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	2.020.000	-	-	-	380.000	-	480.000	-	1.160.000	-	2.020.000	0,00%	100,00%	0,00	2.020.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	279.360.910	-	20.475.000	-	86.434.300	-	62.099.045	-	109.245.880	-	278.254.225	0,00%	99,60%	0,00	278.254.225	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	70.800.000	-	15.955.000	-	19.555.000	-	18.310.000	-	16.980.000	-	70.800.000	0,00%	100,00%	0,00	70.800.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	10.698.400	-	1.100.000	-	3.360.000	-	3.018.000	-	3.220.400	-	10.698.400	0,00%	100,00%	0,00	10.698.400	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	30	70.786.145	-	-	-	61.209.300	-	-	-	9.061.000	-	70.270.300	0,00%	99,27%	0,00	70.270.300	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	127.076.365	-	3.420.000	-	2.310.000	-	40.771.045	-	79.984.480	-	126.485.525	0,00%	99,54%	0,00	126.485.525	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.020.000	-	-	-	500.000	-	980.000	-	1.540.000	-	3.020.000	0,00%	100,00%	0,00	3.020.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	3.020.000	-	-	-	500.000	-	980.000	-	1.540.000	-	3.020.000	0,00%	100,00%	0,00	3.020.000	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	113.650.000	-	8.715.643	-	23.374.407	-	33.973.865	-	42.726.652	-	108.790.567	0,00%	95,72%	0,00	108.790.567	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	57.320.000	-	7.840.643	-	12.159.357	-	12.008.865	-	21.743.000	-	53.751.865	0,00%	93,78%	0,00	53.751.865	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	56.330.000	-	875.000	-	11.215.050	-	21.965.000	-	20.983.652	-	55.038.702	0,00%	97,71%	0,00	55.038.702	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	98,64%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4.514.838.597		830.161.193		1.576.606.592		1.010.570.980		1.050.614.049		4.467.952.814		98,96%		4.467.952.814		0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	25	18.846.000	-	3.619.000	-	5.250.000	-	4.258.000	-	5.719.000	-	18.846.000	0,00%	100,00%	0,00	18.846.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	13.708.000	1	3.150.000	-	3.150.000	-	4.258.000	-	3.150.000	1	13.708.000	50,00%	100,00%	1,00	13.708.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.569.000	1	469.000	-	2.100.000	-	-	-	-	1	2.569.000	100,00%	100,00%	1,00	2.569.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.569.000	-	-	-	-	-	-	-	2.569.000	-	2.569.000	0,00%	100,00%	0,00	2.569.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	4.119.833.865	-	753.534.638	-	1.460.459.331	-	898.312.847	-	968.050.729	-	4.080.357.545	0,00%	99,04%	0,00	4.080.357.545	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	34	4.118.693.865	-	752.402.638	-	1.460.459.331	-	898.312.847	-	968.050.729	-	4.079.225.545	0,00%	99,04%	0,00	4.079.225.545	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	1.140.000	1	1.132.000	-	-	-	-	-	-	1	1.132.000	50,00%	99,30%	1,00	1.132.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.962.000	-	1.460.000	-	4.502.000	-	500.000	-	500.000	-	6.962.000	0,00%	100,00%	0,00	6.962.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	6.962.000	3	1.460.000	-	4.502.000	-	500.000	-	500.000	3	6.962.000	25,00%	100,00%	3,00	6.962.000	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	251.661.394	-	41.780.000	-	81.638.652	-	79.970.583	-	44.861.370	-	248.250.605	0,00%	98,64%	0,00	248.250.605	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	350	23.500.000	70	5.481.000	-	6.451.000	-	7.035.000	-	4.489.000	70	23.456.000	20,00%	99,81%	70,00	23.456.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	22.118.400	1	4.080.000	-	5.574.000	-	6.668.400	-	5.796.000	1	22.118.400	20,00%	100,00%	1,00	22.118.400	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
			5	6		7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	16								
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	20.634.411	10	-	-	19.237.500	-	-	-	10	19.237.500	100,00%	93,23%	10,00	19.237.500	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	157.158.583	3	25.119.000	-	43.326.152	-	59.217.183	-	27.976.370	3	155.638.705	25,00%	99,03%	3,00	155.638.705	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	28.250.000	-	7.100.000	-	7.050.000	-	7.050.000	-	6.600.000	-	27.800.000	0,00%	98,41%	0,00	27.800.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	33.315.338	-	13.422.515	-	4.089.950	-	6.908.350	-	8.532.050	-	32.952.865	0,00%	98,91%	0,00	32.952.865	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	7.697.100	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000	-	2.691.200	-	7.691.200	0,00%	99,92%	0,00	7.691.200	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	19	14.577.900	3	382.485	-	2.089.950	-	5.908.350	-	5.840.850	3	14.221.635	15,79%	97,56%	3,00	14.221.635	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	11.040.338	1	11.040.030	-	-	-	-	-	-	1	11.040.030	100,00%	100,00%	1,00	11.040.030	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	84.220.000	-	16.345.040	-	20.666.659	-	20.621.200	-	22.950.900	-	80.583.799	0,00%	95,68%	0,00	80.583.799	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	50.300.000	-	11.741.940	-	12.166.659	-	11.572.000	-	14.810.900	-	50.291.499	0,00%	99,98%	0,00	50.291.499	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	12.040.000	3	1.853.100	-	1.284.000	-	2.849.200	-	2.430.000	3	8.416.300	20,00%	69,90%	3,00	8.416.300	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	88	21.880.000	10	2.750.000	-	7.216.000	-	6.200.000	-	5.710.000	10	21.876.000	11,36%	99,98%	10,00	21.876.000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																2,19%	98,96%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-		-	18.637.899.851		3.748.092.194		5.973.792.134		-		6.758.092.695		16.479.977.023		88,42%		16.479.977.023		0,00%	DINAS KESEHATAN	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan (Persen Poin)	0,00	-	0,00	-	80	210.013.250	17	50.715.751	-	25.200.000	-	-	-	72.440.995	17	148.356.746	21,74%	70,64%	17,39	148.356.746	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	6.871.000	-	-	-	-	-	-	-	6.865.995	-	6.865.995	0,00%	99,93%	0,00	6.865.995	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	37.591.250	-	13.945.707	-	8.400.000	-	-	-	15.200.000	-	37.545.707	0,00%	99,88%	0,00	37.545.707	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8				9		10		11		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	45.532.300	-	-	-	-	-	-	-	13.200.000	-	13.200.000	0,00%	28,99%	0,00	13.200.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	12.244.400	-	12.022.840	-	-	-	-	-	-	12.022.840	0,00%	98,19%	0,00	12.022.840	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.479.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	75.183.750	-	20.268.130	-	16.800.000	-	-	-	29.500.000	-	66.568.130	0,00%	88,54%	0,00	66.568.130	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	23.110.950	-	4.479.074	-	-	-	-	-	7.675.000	-	12.154.074	0,00%	52,59%	0,00	12.154.074	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	17.011.071.699	17	3.418.242.013	-	5.679.724.523	-	-	-	6.146.323.805	17	15.244.290.341	17,93%	89,61%	17,39	15.244.290.341	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	132	16.937.614.799	-	3.417.021.513	-	5.670.007.523	-	-	-	6.102.955.345	-	15.189.984.381	0,00%	89,68%	0,00	15.189.984.381	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.771.750	-	-	-	-	-	-	-	890.800	-	890.800	0,00%	23,62%	0,00	890.800	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	11.439.250	-	1.220.500	-	-	-	-	-	9.000.000	-	10.220.500	0,00%	89,35%	0,00	10.220.500	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	34.456.000	-	-	-	9.717.000	-	-	-	22.280.000	-	31.997.000	0,00%	92,86%	0,00	31.997.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	23.789.900	-	-	-	-	-	-	-	11.197.660	-	11.197.660	0,00%	47,07%	0,00	11.197.660	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	33.671.500	30	14.837.000	60	1.500.000	75	-	90	13.277.200	255	29.614.200	283,33%	87,95%	255,00	29.614.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	27.081.500	-	14.837.000	-	1.500.000	-	-	-	9.520.000	-	25.857.000	0,00%	95,48%	0,00	25.857.000	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	6.590.000	-	-	-	-	-	-	-	3.757.200	-	3.757.200	0,00%	57,01%	0,00	3.757.200	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	18.988.000	-	-	-	13.233.910	-	-	-	4.125.000	-	17.358.910	0,00%	91,42%	0,00	17.358.910	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	18.988.000	-	-	-	13.233.910	-	-	-	4.125.000	-	17.358.910	0,00%	91,42%	0,00	17.358.910	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	331.819.140	-	78.195.670	-	21.679.500	-	-	-	165.546.262	-	265.421.652	0,00%	79,99%	0,00	265.421.652	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	10.670.400	-	5.413.000	-	-	-	-	-	5.413.000	-	5.413.000	0,00%	50,73%	0,00	5.413.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	29.841.560	-	8.932.020	-	3.160.000	-	-	-	7.151.000	-	19.243.020	0,00%	64,48%	0,00	19.243.020	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	74.680.000	-	14.584.500	-	6.929.500	-	-	-	8.748.500	-	30.262.500	0,00%	40,52%	0,00	30.262.500	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	5.943.500	-	-	-	-	-	-	-	3.835.300	-	3.835.300	0,00%	64,53%	0,00	3.835.300	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.180.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	0,00%	99,11%	0,00	20.000.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	27.396.650	-	14.471.920	-	-	-	-	-	12.032.375	-	26.504.295	0,00%	96,74%	0,00	26.504.295	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	163.107.030	-	34.794.430	-	11.590.000	-	-	-	113.779.107	-	160.163.537	0,00%	98,20%	0,00	160.163.537	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	93	45.265.200	-	-	-	-	-	-	-	29.890.000	-	29.890.000	0,00%	66,03%	0,00	29.890.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	45.265.200	-	-	-	-	-	-	-	29.890.000	-	29.890.000	0,00%	66,03%	0,00	29.890.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	725.123.140	-	145.699.730	-	143.091.685	-	-	-	287.783.581	-	576.574.996	0,00%	79,51%	0,00	576.574.996	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	149.322.640	-	27.950.000	-	31.250.000	-	-	-	53.939.000	-	113.139.000	0,00%	75,77%	0,00	113.139.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	464.156.500	-	112.749.730	-	93.984.725	-	-	-	172.520.167	-	379.254.622	0,00%	81,71%	0,00	379.254.622	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	111.644.000	-	5.000.000	-	17.856.960	-	-	-	61.324.414	-	84.181.374	0,00%	75,40%	0,00	84.181.374	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	93	261.947.922	-	40.401.830	-	89.362.516	-	-	-	38.705.832	-	168.470.178	0,00%	64,31%	0,00	168.470.178	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	76.500.000	-	15.089.230	-	27.791.176	-	-	-	9.534.534	-	52.414.940	0,00%	68,52%	0,00	52.414.940	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	111.080.450	-	6.770.600	-	14.853.340	-	-	-	27.771.298	-	49.395.238	0,00%	44,47%	0,00	49.395.238	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	-	0.00	-	5	13.570.000	-	3.590.000	-	1.150.000	-	-	-	1.400.000	-	6.140.000	0.00%	45,25%	0.00	6.140.000	0.00%	0.00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	-	0.00	-	1	60.797.472	-	14.952.000	-	45.568.000	-	-	-	-	-	60.520.000	0.00%	99.54%	0.00	60.520.000	0.00%	0.00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				7				8		9		10										11		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	6.426.160	-	-	-	-	-	-	-	5.840.000	-	5.840.000	0,00%	90,88%	0,00	5.840.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	10.552.416	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	-	9.500.000	0,00%	90,03%	0,00	9.500.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian lingkup SKPD (persen)	0,00	-	0,00	-	100	45.815.154	-	-	-	-	-	1.500.000	-	43.095.032	-	44.595.032	0,00%	97,34%	0,00	44.595.032	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	45.815.154	-	-	-	-	-	1.500.000	-	43.095.032	-	44.595.032	0,00%	97,34%	0,00	44.595.032	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	596.722.078	-	14.842.000	-	246.692.852	-	135.463.489	-	198.484.141	-	595.482.482	0,00%	99,79%	0,00	595.482.482	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	5.036.448	-	-	-	1.307.500	-	1.204.300	-	2.335.700	-	4.847.500	0,00%	96,25%	0,00	4.847.500	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	45.930.740	1	7.142.000	1	10.180.740	1	10.269.000	1	17.728.104	1	45.319.844	50,00%	98,67%	1,00	45.319.844	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	76.090.194	1	2.000.000	2	36.950.237	2	3.893.372	2	33.244.855	2	76.088.464	50,00%	100,00%	2,00	76.088.464	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	469.664.696	1	5.700.000	1	198.254.375	1	120.096.817	1	145.175.482	1	469.226.674	20,00%	99,91%	1,00	469.226.674	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	517.052.653	-	89.873.760	-	77.547.130	-	129.681.973	-	202.322.944	-	499.425.807	0,00%	96,59%	0,00	499.425.807	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	34	400.758.569	10	89.162.500	15	69.491.750	15	97.768.104	15	134.238.215	15	390.660.569	44,12%	97,48%	15,00	390.660.569	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	68.910.400	-	711.260	-	1.115.380	-	27.113.869	-	32.511.225	-	61.451.734	0,00%	89,18%	0,00	61.451.734	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	42.738.480	-	-	-	6.640.000	-	3.500.000	-	32.546.800	-	42.686.800	0,00%	99,88%	0,00	42.686.800	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	4.645.204	-	-	-	300.000	-	1.300.000	-	3.026.704	-	4.626.704	0,00%	99,60%	0,00	4.626.704	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perset)	0,00	-	0,00	-	100	210.278.044	-	38.013.500	-	48.703.822	-	40.229.184	-	61.549.372	-	188.495.878	0,00%	89,64%	0,00	188.495.878	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	155.638.860	3	28.413.500	8	40.301.822	8	28.300.000	8	38.524.912	8	135.540.234	57,14%	87,09%	8,00	135.540.234	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	54.639.184	-	9.600.000	-	8.402.000	-	11.929.184	-	23.024.460	-	52.955.644	0,00%	96,92%	0,00	52.955.644	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		45,69%	98,21%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6.491.927.816		1.202.303.031		2.144.389.043		1.496.315.238		1.633.999.932		6.476.007.244						0,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	24	168.397.748	-	84.983.052	-	22.790.000	-	24.556.000	-	36.009.696	-	168.338.748	0,00%	99,96%	0,00	168.338.748	0,00%	0,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	84.260.956	2	61.740.956	3	3.890.000	3	8.056.000	4	10.570.000	4	84.256.956	100,00%	100,00%	4,00	84.256.956	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.327.048	1	1.247.048	1	1.080.000	1	-	1	-	1	2.327.048	100,00%	100,00%	1,00	2.327.048	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	419.848	-	-	-	-	-	-	1	419.848	1	419.848	100,00%	100,00%	1,00	419.848	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.247.048	1	1.247.048	-	-	-	-	-	-	1	1.247.048	100,00%	100,00%	1,00	1.247.048	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	419.848	-	-	-	-	-	-	1	419.848	1	419.848	100,00%	100,00%	1,00	419.848	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	55.483.000	1	17.528.000	1	11.100.000	1	10.800.000	2	16.000.000	2	55.428.000	100,00%	99,90%	2,00	55.428.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	24.240.000	2	3.220.000	2	6.720.000	2	5.700.000	4	8.600.000	4	24.240.000	100,00%	100,00%	4,00	24.240.000	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	5.514.211.621	-	963.613.777	-	1.949.162.833	-	1.249.600.902	-	1.336.604.485	-	5.498.981.997	0,00%	99,72%	0,00	5.498.981.997	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	53	5.480.539.861	53	958.013.777	53	1.940.762.833	53	1.241.200.902	53	1.325.332.725	53	5.465.310.237	100,00%	99,72%	53,00	5.465.310.237	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	33.671.760	1	5.600.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	11.271.760	1	33.671.760	100,00%	100,00%	1,00	33.671.760	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	74.969.212	-	12.000.000	-	17.000.000	-	2.550.000	-	43.419.212	-	74.969.212	0,00%	100,00%	0,00	74.969.212	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya (Paket)	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	48	34.144.212	-	-	-	-	-	-	48	34.144.212	48	34.144.212	100,00%	100,00%	48,00	34.144.212	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	40.825.000	1	12.000.000	5	17.000.000	5	2.550.000	8	9.275.000	8	40.825.000	100,00%	100,00%	8,00	40.825.000	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	376.294.167	-	69.359.129	-	60.583.209	-	128.779.408	-	117.572.421	-	376.294.167	0,00%	100,00%	0,00	376.294.167	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	31.283.000	1	710.000	3	8.000.000	3	5.750.000	7	16.823.000	7	31.283.000	87,50%	100,00%	7,00	31.283.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	22	25.593.079	-	-	10	8.890.757	16	8.679.740	22	8.022.582	22	25.593.079	100,00%	100,00%	22,00	25.593.079	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	319.418.088	3	68.649.129	15	43.692.452	15	114.349.668	25	92.726.839	25	319.418.088	83,33%	100,00%	25,00	319.418.088	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	174.374.008	-	32.258.048	-	41.801.263	-	43.673.532	-	56.117.577	-	173.850.420	0,00%	99,70%	0,00	173.850.420	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	90.678.200	-	13.390.000	-	23.650.000	-	21.300.000	1	31.925.000	1	90.265.000	100,00%	99,54%	1,00	90.265.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	83.695.808	6	18.868.048	12	18.151.263	18	22.373.532	21	24.192.577	21	83.585.420	87,50%	99,87%	21,00	83.585.420	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	95	183.681.060	-	40.089.025	-	53.051.738	-	46.155.396	-	44.276.541	-	183.572.700	0,00%	99,94%	0,00	183.572.700	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	138.290.000	2	34.451.725	3	32.148.038	3	38.078.696	3	33.522.541	3	138.201.000	42,86%	99,94%	3,00	138.201.000	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	10.260.000	-	-	-	1.000.000	1	6.501.700	2	2.739.000	2	10.240.700	100,00%	99,81%	2,00	10.240.700	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	19.903.760	-	-	1	19.903.700	1	-	1	-	1	19.903.700	100,00%	100,00%	1,00	19.903.700	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	15.227.300	2	5.637.300	4	-	6	1.575.000	8	8.015.000	20	15.227.300	222,22%	100,00%	20,00	15.227.300	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98,03%	99,75%								
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.772.202.586		1.016.883.512		1.911.802.671		839.096.660		1.251.450.560		5.019.233.403		86,96%		5.019.233.403		0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	0,00	-	0,00	-	28	135.826.768	-	23.454.080	-	71.854.600	-	11.300.000	-	10.425.000	-	117.033.680	0,00%	86,16%	0,00	117.033.680	0,00%	0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	77.755.928	1	12.368.080	1	60.045.800	-	1.500.000	-	-	2	73.913.880	100,00%	95,06%	2,00	73.913.880	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	29.650.720	-	7.243.000	1	7.500.000	-	5.000.000	-	4.875.000	1	24.618.000	100,00%	83,03%	1,00	24.618.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	24.343.720	-	3.843.000	-	3.200.000	1	4.800.000	-	4.800.000	1	16.643.000	100,00%	68,37%	1,00	16.643.000	0,00%	0,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	4.076.400	2	-	2	1.108.800	-	-	-	750.000	1	1.858.800	50,00%	45,60%	1,00	1.858.800	0,00%	0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	4.553.897.138	15	816.110.613	23	1.596.378.360	-	691.671.968	-	985.902.823	-	4.090.063.764	0,00%	89,81%	0,00	4.090.063.764	0,00%	0,00%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	42	4.426.118.962	42	796.883.409	42	1.556.914.744	42	669.755.968	42	959.917.023	42	3.983.471.144	100,00%	90,00%	42,00	3.983.471.144	0,00%	0,00%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	67.655.640	1	5.200.000	1	20.368.616	1	9.200.000	1	12.086.800	1	46.855.416	100,00%	69,26%	1,00	46.855.416	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	60.122.536	3	14.027.204	3	19.095.000	3	12.716.000	3	13.899.000	12	59.737.204	100,00%	99,36%	12,00	59.737.204	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	66.558.800	97	10.303.308	97	19.800.000	-	14.800.000	-	12.000.000	49	56.903.308	50,00%	85,49%	48,50	56.903.308	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	66.558.800	1	10.303.308	1	19.800.000	1	14.800.000	1	12.000.000	1	56.903.308	100,00%	85,49%	1,00	56.903.308	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sublar (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	523.076.058	97	116.831.884	97	122.399.629	-	76.430.488	-	74.931.838	49	390.593.839	50,00%	74,67%	48,50	390.593.839	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	108.000.000	1	19.853.952	1	19.971.440	1	8.550.400	1	22.384.928	1	70.760.720	100,00%	65,52%	1,00	70.760.720	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.365.000	1	1.178.000	1	1.120.000	1	2.080.000	1	6.199.794	1	10.577.794	100,00%	68,84%	1,00	10.577.794	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	66.522.586	1	16.494.052	1	1.400.000	1	15.757.800	1	22.051.000	1	55.702.892	100,00%	83,74%	1,00	55.702.892	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	56	310.478.472	20	79.305.840	15	99.908.189	10	50.042.288	-	24.296.116	45	253.552.433	80,36%	81,67%	45,00	253.552.433	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	22.710.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	225.593.822	97	39.434.037	97	47.916.386	-	28.029.204	-	47.813.024	49	163.192.651	50,00%	72,34%	48,50	163.192.651	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	94.520.000	1	23.371.537	1	16.748.586	1	4.457.204	1	17.215.724	1	61.793.051	100,00%	65,38%	1,00	61.793.051	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	131.073.822	1	16.082.500	1	31.167.800	1	23.572.000	1	30.597.300	1	101.399.600	100,00%	77,36%	1,00	101.399.600	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	267.250.000	97	10.749.590	97	53.453.696	-	16.865.000	-	120.377.875	49	201.446.161	50,00%	75,38%	48,50	201.446.161	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	69.640.000	1	2.378.000	1	11.334.147	1	11.850.000	1	31.903.604	1	57.465.751	100,00%	82,52%	1,00	57.465.751	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	174.170.000	12	7.101.590	12	35.598.337	12	4.760.000	12	73.217.100	12	120.677.027	100,00%	69,29%	12,00	120.677.027	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	23.440.000	5	1.270.000	5	6.521.212	5	255.000	5	15.257.171	20	23.303.383	100,00%	99,42%	20,00	23.303.383	0,00%	0,00%	
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																98,91%		86,96%						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi		Tinggi						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		24		25		25		25		25		25		104,17%		25,00		0,00%		
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		19	225.477.800	25	94.005.200	25	39.237.100	25	35.877.500	25	56.358.000	25	225.477.800	131,58%	100,00%	25,00	225.477.800	0,00%	0,00%	
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		10		14		14		14		14		14		140,00%		14,00		0,00%		
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		12		19		19		19		19		19		158,33%		19,00		0,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	133.378.100	3	79.663.600	3	14.782.200	-	12.132.300	-	26.800.000	6	133.378.100	100,00%	100,00%	6,00	133.378.100	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.613.500	-	-	-	-	506.300	1	1.107.200	1	1.613.500	100,00%	100,00%	1,00	1.613.500	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.613.500	-	-	-	-	506.300	-	1.107.200	1	1.613.500	100,00%	100,00%	1,00	1.613.500	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	903.400	1	903.400	-	-	-	-	-	1	903.400	100,00%	100,00%	1,00	903.400	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	987.000	-	-	-	-	143.400	-	843.600	1	987.000	100,00%	100,00%	1,00	987.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	75.878.700	-	12.500.000	-	19.599.900	-	18.778.800	1	25.000.000	1	75.878.700	100,00%	100,00%	1,00	75.878.700	0,00%	0,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	11.103.600	3	938.200	2	4.855.000	1	3.810.400	1	1.500.000	7	11.103.600	100,00%	100,00%	7,00	11.103.600	0,00%	0,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPPTSP	0,00		0,00		99	6.303.995.904	99	1.133.283.210	62	2.204.014.310	70	1.387.198.899	100	1.553.005.070	100	6.277.501.489	100,87%	99,58%	99,86	6.277.501.489	0,00%	0,00%	
	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00		0,00		99		16		48		71		100		100		100,65%		99,64		0,00%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	50	6.166.206.204	49	1.110.813.210	50	2.169.103.510	50	1.352.543.799	50	1.507.251.270	50	6.139.711.789	100,00%	99,57%	50,00	6.139.711.789	0,00%	0,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	106.010.800	-	17.470.000	-	27.410.800	-	26.130.000	1	35.000.000	1	106.010.800	100,00%	100,00%	1,00	106.010.800	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	753.800	-	-	-	-	-	-	1	753.800	1	753.800	100,00%	100,00%	1,00	753.800	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV												
				5	6			7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12									
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	31.025.100	-	5.000.000	-	7.500.000	1	8.525.100	-	10.000.000	1	31.025.100	100,00%	100,00%	1,00	31.025.100	0,00%	0,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMTSP (Parsen)	0,00	-	0,00	-	90	13.198.200	14	2.800.000	36	4.200.000	53	3.398.200	100	2.800.000	100	13.198.200	111,11%	100,00%	100,00	13.198.200	0,00%	0,00%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	13.198.200	-	2.800.000	-	4.200.000	1	3.398.200	-	2.800.000	1	13.198.200	100,00%	100,00%	1,00	13.198.200	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup DPMTSP (Parsen)	0,00	-	0,00	-	97	635.548.000	15	5.308.100	63	213.393.700	81	63.418.400	100	353.413.800	100	635.534.000	103,09%	100,00%	100,00	635.534.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	82	53.973.200	-	-	4	71.700	78	53.901.500	-	-	82	53.973.200	100,00%	100,00%	82,00	53.973.200	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	40.016.900	8	5.000.000	15	8.300.000	30	9.516.900	40	17.200.000	93	40.016.900	232,50%	100,00%	93,00	40.016.900	0,00%	0,00%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	50	893.800	-	-	-	-	-	-	50	893.800	50	893.800	100,00%	100,00%	50,00	893.800	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	78	540.664.100	-	308.100	31	205.022.000	-	-	50	335.320.000	81	540.650.100	103,85%	100,00%	81,00	540.650.100	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMTSP (Parsen)	0,00	-	0,00	-	96	332.822.685	23	46.072.166	67	90.588.641	89	44.632.360	100	151.515.795	100	332.808.962	104,17%	100,00%	100,00	332.808.962	0,00%	0,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	1.715.700	-	-	1	1.715.700	-	-	-	1	1.715.700	100,00%	100,00%	1,00	1.715.700	0,00%	0,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	30.546.700	1	3.081.700	-	10.715.000	-	13.960.000	-	2.790.000	1	30.546.700	100,00%	100,00%	1,00	30.546.700	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.396.700	-	-	1	6.780.000	-	1.800.000	-	6.816.700	1	15.396.700	100,00%	100,00%	1,00	15.396.700	0,00%	0,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	45.068.297	1	1.380.000	-	10.178.200	-	20.041.079	-	13.469.018	1	45.068.297	100,00%	100,00%	1,00	45.068.297	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	200.914.488	7	41.610.466	24	61.199.741	3	8.831.281	34	89.259.277	68	200.900.765	340,00%	99,99%	68,00	200.900.765	0,00%	0,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	39.180.800	-	-	-	-	-	1	39.180.800	1	39.180.800	100,00%	100,00%	1,00	39.180.800	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Parsen)	0,00	-	0,00	-	85	87.400.000	-	53	49.400.000	100	38.000.000	100	-	100	87.400.000	117,65%	100,00%	100,00	87.400.000	0,00%	0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	21	87.400.000	-	-	18	49.400.000	3	38.000.000	-	-	21	87.400.000	100,00%	100,00%	21,00	87.400.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Parsen)	0,00	-	0,00	-	90	441.311.408	17	78.251.789	39	98.182.200	62	102.906.387	100	161.971.032	100	441.311.408	111,11%	100,00%	100,00	441.311.408	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	87.788.700	1	14.925.100	-	21.236.800	-	21.626.800	-	30.000.000	1	87.788.700	100,00%	100,00%	1,00	87.788.700	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	106.681.208	3	26.885.489	3	25.536.100	3	27.468.887	3	26.790.732	3	106.681.208	100,00%	100,00%	3,00	106.681.208	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	246.841.500	4	36.441.200	-	51.409.300	-	53.810.700	-	105.180.300	4	246.841.500	100,00%	100,00%	4,00	246.841.500	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	498.206.326	34	186.319.257	42	41.007.445	78	195.874.852	100	74.563.272	100	497.764.826	117,65%	99,91%	100,00	497.764.826	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	233.779.057	1	182.484.057	-	12.630.000	-	11.836.000	-	26.774.000	1	233.724.057	100,00%	99,98%	1,00	233.724.057	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	51.989.845	2	3.415.300	7	22.072.445	6	9.001.000	8	17.114.600	23	51.603.345	230,00%	99,26%	23,00	51.603.345	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	22	26.489.900	-	299.900	17	6.305.000	-	860.000	16	19.025.000	33	26.489.900	150,00%	100,00%	33,00	26.489.900	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	185.947.524	-	120.000	-	-	1	174.177.852	-	11.649.672	1	185.947.524	100,00%	100,00%	1,00	185.947.524	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	107,46%	99,68%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						110.912.588.734		5.244.896.090		51.442.828.851		10.345.961.124		38.303.567.609		105.337.253.674		94,97%		105.337.253.674		0,00%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	47.195.318.066	-	5.244.896.090	-	19.714.290.899	-	10.345.961.124	-	11.576.174.949	-	46.881.323.062	0,00%	99,33%	0,00	46.881.323.062	0,00%	0,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	348	47.195.318.066	348	5.244.896.090	348	19.714.290.899	348	10.345.961.124	348	11.576.174.949	348	46.881.323.062	100,00%	99,33%	348,00	46.881.323.062	0,00%	0,00%	
Peningkatan Pelayanan BLUD						63.717.270.668		-		31.728.537.952		-		26.727.392.660		58.455.930.612		91,74%		58.455.930.612		0,00%		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	-	0,00	-	90	63.717.270.668	20	-	28	31.728.537.952	20	-	22	26.727.392.660	90	58.455.930.612	100,13%	91,74%	90,12	58.455.930.612	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,08%	94,97%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						175.209.007.524		-		2.805.759.917		60.986.265.028		25.751.085.595		89.543.110.540		51,11%		89.543.110.540		0,00%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	80.218.839.104	-	-	-	1.707.661.161	-	29.529.640.510	-	10.508.655.793	-	41.745.957.464	0,00%	52,04%	0,00	41.745.957.464	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	8	3.035.110.000	-	-	-	-	805.900.673	-	1.166.224.234	-	1.972.124.907	0,00%	64,98%	0,00	1.972.124.907	0,00%	0,00%		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	9	1.115.171.840	-	-	-	-	278.190.000	-	500.742.000	-	778.932.000	0,00%	69,85%	0,00	778.932.000	0,00%	0,00%		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/nx100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				5	6			7	8	9	10	11	12	13=12/nx100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16							
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	1.933.380.800	-	-	-	-	610.974.770	-	371.612.339	-	982.587.109	0,00%	50,82%	0,00	982.587.109	0,00%	0,00%		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun (Paket)	0,00	-	0,00	-	11	3.546.389.540	-	-	-	-	1.501.716.519	-	1.151.397.051	-	2.653.113.570	0,00%	74,81%	0,00	2.653.113.570	0,00%	0,00%		
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	186.131.370	-	-	-	-	11.233.200	-	165.119.216	-	176.352.416	0,00%	94,75%	0,00	176.352.416	0,00%	0,00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	10	1.577.230.000	-	-	-	-	394.307.500	-	709.753.500	-	1.104.061.000	0,00%	70,00%	0,00	1.104.061.000	0,00%	0,00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	423.497.000	-	-	-	-	105.874.250	-	190.573.650	-	296.447.900	0,00%	70,00%	0,00	296.447.900	0,00%	0,00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	2	417.374.000	-	-	-	-	104.343.500	-	187.818.300	-	292.161.800	0,00%	70,00%	0,00	292.161.800	0,00%	0,00%		
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	36	2.220.811.414	-	-	-	-	-	-	1.957.599.100	-	1.957.599.100	0,00%	88,15%	0,00	1.957.599.100	0,00%	0,00%		
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	582.446.644	-	-	-	-	-	-	574.350.000	-	574.350.000	0,00%	98,61%	0,00	574.350.000	0,00%	0,00%		
Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	2.316.100.000	-	-	-	-	97.097.000	-	372.000.000	-	469.097.000	0,00%	20,25%	0,00	469.097.000	0,00%	0,00%		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	2200	3.227.589.000	-	-	-	547.886.000	-	513.787.000	-	169.336.000	-	1.231.009.000	0,00%	38,14%	0,00	1.231.009.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	213	479.999.981	-	-	-	70.000.000	-	318.060.400	-	15.000.000	-	403.060.400	0,00%	83,97%	0,00	403.060.400	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	296.496.000	-	-	-	11.658.000	-	-	-	-	11.658.000	0,00%	3,93%	0,00	11.658.000	0,00%	0,00%		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	180	649.634.032	-	-	-	113.779.692	-	209.210.940	180	199.900.000	180	522.890.632	100,00%	80,49%	180,00	522.890.632	0,00%	0,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	25	428.927.760	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	88	49.546.840.000	-	-	88	-	22.425.775.963	-	-	88	22.425.775.963	100,00%	45,26%	88,00	22.425.775.963	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0,00	-	0,00	-	19	212.500.000	-	-	-	-	-	-	212.500.000	-	212.500.000	0,00%	100,00%	0,00	212.500.000	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV												
				6				7		8		9		10										
3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	1.236.225.105	2	-	-	427.392.949	-	240.731.250	-	63.137.500	2	731.261.699	50,00%	59,15%	2,00	731.261.699	0,00%	0,00%	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	990.003.848	2	-	-	536.944.520	-	408.104.900	-	1.730.000	2	946.779.420	66,67%	95,63%	2,00	946.779.420	0,00%	0,00%	
Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	11	135.187.000	-	-	-	-	-	134.500.000	-	-	-	134.500.000	0,00%	99,49%	0,00	134.500.000	0,00%	0,00%	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	301.294.560	-	-	-	-	-	-	-	152.000.000	-	152.000.000	0,00%	50,45%	0,00	152.000.000	0,00%	0,00%	
Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0,00	-	0,00	-	1	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	560.793.000	-	-	-	-	-	177.903.895	-	202.391.153	-	380.295.048	0,00%	67,81%	0,00	380.295.048	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	9	3.485.033.580	-	-	-	-	-	870.210.000	-	1.566.378.000	-	2.436.588.000	0,00%	69,92%	0,00	2.436.588.000	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	721.422.630	-	-	-	-	-	179.968.750	-	323.943.750	-	503.912.500	0,00%	69,85%	0,00	503.912.500	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0,00	-	0,00	-	2	567.000.000	-	-	-	-	-	141.750.000	-	255.150.000	-	396.900.000	0,00%	70,00%	0,00	396.900.000	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Pangan)	0,00	-	0,00	-	100	87.595.788.439	-	-	-	1.035.588.756	-	28.391.872.615	-	14.876.257.145	-	44.303.728.516	0,00%	50,58%	0,00	44.303.728.516	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	2	2.124.662.940	-	-	-	-	-	525.222.000	-	-	-	525.222.000	0,00%	24,72%	0,00	525.222.000	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	31	11.457.475.771	-	-	-	-	-	2.810.671.500	-	-	-	2.810.671.500	0,00%	24,53%	0,00	2.810.671.500	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	446.838.730	-	-	-	-	-	86.798.200	-	-	-	86.798.200	0,00%	19,42%	0,00	86.798.200	0,00%	0,00%	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	2.888.848.653	-	-	-	12.018.000	-	319.143.500	-	567.087.960	-	898.249.460	0,00%	31,09%	0,00	898.249.460	0,00%	0,00%	
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	427.096.020	-	-	-	-	-	33.688.500	-	121.506.502	-	155.195.002	0,00%	36,34%	0,00	155.195.002	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	46	1.642.838.826	-	-	-	-	-	-	46	1.377.920.000	46	1.377.920.000	100,00%	83,87%	46,00	1.377.920.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	582.446.644	-	-	-	-	-	1	574.350.000	1	574.350.000	100,00%	98,61%	1,00	574.350.000	0,00%	0,00%		
Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	13.868.700.000	-	-	-	-	-	8	11.984.320.300	8	11.984.320.300	100,00%	86,41%	8,00	11.984.320.300	0,00%	0,00%		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	1300	1.826.560.000	-	-	271.511.000	-	230.187.500	-	-	-	501.698.500	0,00%	27,47%	0,00	501.698.500	0,00%	0,00%		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	126	472.679.747	-	-	223.625.812	-	128.764.006	126	14.937.500	126	367.327.318	100,00%	77,71%	126,00	367.327.318	0,00%	0,00%		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	259.999.760	-	-	-	-	199.200.000	-	-	-	199.200.000	0,00%	76,62%	0,00	199.200.000	0,00%	0,00%		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	13	337.684.000	-	-	-	-	-	13	89.162.379	13	89.162.379	100,00%	26,40%	13,00	89.162.379	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	136	43.645.830.000	-	-	136	-	19.093.189.159	-	-	136	19.093.189.159	100,00%	43,75%	136,00	19.093.189.159	0,00%	0,00%		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	0,00	-	0,00	-	150	399.233.020	-	-	236.914.384	-	19.130.000	150	-	150	256.044.384	100,00%	64,13%	150,00	256.044.384	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0,00	-	0,00	-	150	60.000.000	-	-	-	-	-	150	59.970.000	150	59.970.000	100,00%	99,95%	150,00	59.970.000	0,00%	0,00%		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	419.000.168	-	-	119.250.000	-	115.088.000	60	13.688.000	60	248.026.000	100,00%	59,19%	60,00	248.026.000	0,00%	0,00%		
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	4.162.234.000	-	-	-	-	-	4.162.110.000	-	-	-	4.162.110.000	0,00%	100,00%	0,00	4.162.110.000	0,00%	0,00%	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	386.679.560	-	-	-	172.279.560	-	214.400.000	-	-	-	386.679.560	0,00%	100,00%	0,00	386.679.560	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0,00	-	0,00	-	260	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	243.353.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	686.433.000	-	-	-	-	-	171.608.250	-	-	-	171.608.250	0,00%	25,00%	0,00	171.608.250	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	7	1.230.944.300	-	-	-	-	-	282.672.000	-	73.314.504	-	355.986.504	0,00%	28,92%	0,00	355.986.504	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Layanan Pendidikan Khusus yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	7.394.379.981	-	-	-	62.500.000	-	3.064.751.903	-	366.172.657	-	3.493.424.560	0,00%	47,24%	0,00	3.493.424.560	0,00%	0,00%	
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	332.846.644	-	-	-	-	-	-	4	324.000.000	4	324.000.000	100,00%	97,34%	4,00	324.000.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
		5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	535	560.118.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0,00	-	0,00	-	186	458.874.657	-	-	-	62.500.000	-	278.520.000	186	42.172.657	186	383.192.657	100,00%	83,51%	186,00	383.192.657	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	25	6.042.540.000	-	-	25	-	-	2.786.231.903	-	6	2.786.231.903	25,00%	46,11%	6,25	2.786.231.903	0,00%	0,00%		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	*Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								65,75%	51,11%							
								Predikat Kinerja								Sedang	Rendah							
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								-					-					0,00%				0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Menengah SMA/SMK (Pasren)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0,00	-	0,00	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Khusus (Pasren)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%							
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah							
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						239.787.824	-			67.500.000		41.140.000		13.700.000		122.340.000		51,02%		122.340.000		0,00%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang terpenuhi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	239.787.824	-	-	67.500.000	-	41.140.000	-	13.700.000	-	122.340.000	0,00%	51,02%	0,00	122.340.000	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab				
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	180.141.128	-	-	-	67.500.000	-	41.140.000	-	13.700.000	-	122.340.000	0,00%	67,91%	0,00	122.340.000	0,00%	0,00%	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	59.646.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	51,02%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah				
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA																								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina, dikembangkan dan dilindungi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah Yang Tersusun (Kamus)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)	0,00	-	0,00	-	3530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						31.924.080.317		517.471.912		7.039.072.334		-		13.741.426.227		21.297.970.473		66,71%		21.297.970.473		0,00%		DINAS KESEHATAN
Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% (Bersyarat (Skor 75 - 89) Nilai 12 Kali 25,7 Pers)		0,00	-	0,00	-	89	7.980.697.109	-	69.777.000	-	2.924.531.500	-	-	-	1.602.994.438	-	4.597.302.938	0,00%	57,61%	0,00	4.597.302.938	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	4.318.490.667	-	45.200.000	-	487.800.000	-	-	-	753.719.517	-	1.286.719.517	0,00%	29,80%	0,00	1.286.719.517	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	114.945.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan dan Berkualitas (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	13.821.724	-	7.311.000	-	2.400.000	-	-	-	-	-	9.711.000	0,00%	70,26%	0,00	9.711.000	0,00%	0,00%	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	303.227.106	-	17.266.000	-	31.998.000	-	-	-	163.227.000	-	212.491.000	0,00%	70,08%	0,00	212.491.000	0,00%	0,00%	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	3.230.211.962	-	-	-	2.402.333.500	-	-	-	686.047.921	-	3.088.381.421	0,00%	95,61%	0,00	3.088.381.421	0,00%	0,00%	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80% Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80% Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak kri (j)	0,00	-	0,00	-	0	23.893.156.184	-	432.916.912	-	4.103.020.334	-	-	-	12.130.262.189	-	16.666.199.435	0,00%	69,75%	0,00	16.666.199.435	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	846.939.888	-	91.150.000	-	352.733.436	-	-	-	92.323.000	-	536.206.436	0,00%	63,31%	0,00	536.206.436	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	500	111.580.248	-	-	-	-	-	-	-	28.640.000	-	28.640.000	0,00%	25,67%	0,00	28.640.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				8	9			10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	724.284.048	-	-	-	278.461.000	-	-	-	353.652.212	-	632.113.212	0,00%	87,27%	0,00	632.113.212	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	15	2.796.435.831	-	154.161.000	-	729.339.398	-	-	-	1.181.440.205	-	2.064.940.603	0,00%	73,84%	0,00	2.064.940.603	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	277.663.248	-	-	-	23.788.000	-	-	-	203.954.980	-	227.742.980	0,00%	82,02%	0,00	227.742.980	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	1.271.286.346	-	5.000.000	-	35.450.000	-	-	-	1.055.185.948	-	1.095.635.948	0,00%	86,18%	0,00	1.095.635.948	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	2.651.286.216	-	89.610.000	-	108.762.000	-	-	-	1.192.241.844	-	1.390.613.844	0,00%	52,45%	0,00	1.390.613.844	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	27.732.616	-	11.018.000	-	3.600.000	-	-	-	10.939.000	-	25.557.000	0,00%	92,16%	0,00	25.557.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	13.671.803.234	-	14.412.712	-	2.282.832.000	-	-	-	7.568.032.000	-	9.865.276.712	0,00%	72,16%	0,00	9.865.276.712	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	909.592.420	-	24.893.000	-	14.480.000	-	-	-	318.123.000	-	357.496.000	0,00%	39,30%	0,00	357.496.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	308.398.318	-	15.151.200	-	115.566.500	-	-	-	69.820.000	-	200.537.700	0,00%	65,03%	0,00	200.537.700	0,00%	0,00%	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	27.613.016	-	11.503.000	-	11.969.000	-	-	-	630.000	-	24.102.000	0,00%	87,28%	0,00	24.102.000	0,00%	0,00%	
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	13.866.308	-	-	-	-	-	-	-	3.658.000	-	3.658.000	0,00%	26,38%	0,00	3.658.000	0,00%	0,00%	
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	240.726.079	-	16.018.000	-	139.220.000	-	-	-	44.570.000	-	199.808.000	0,00%	83,00%	0,00	199.808.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit	0,00	-	0,00	-	2	13.948.368	-	-	-	6.819.000	-	-	-	7.052.000	-	13.871.000	0,00%	99,45%	0,00	13.871.000	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu (Persen)	0,00	-	0,00	-	12,38	36.366.696	54	7.339.000	-	9.258.500	-	-	-	8.169.600	54	24.767.100	436,19%	68,10%	54,00	24.767.100	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				7				8		9		10		11		K		Rp		K	Rp	K	Rp		K
3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	36.366.696	-	7.339.000	-	9.258.500	-	-	-	8.169.600	-	24.767.100	0,00%	68,10%	0,00	24.767.100	0,00%	0,00%		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi (Persen 100 Persen)	0,00	-	0,00	-	492	13.860.328	-	7.439.000	-	2.262.000	-	-	-	-	-	9.701.000	0,00%	69,99%	0,00	9.701.000	0,00%	0,00%		
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	13.860.328	-	7.439.000	-	2.262.000	-	-	-	-	-	9.701.000	0,00%	69,99%	0,00	9.701.000	0,00%	0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	66,71%							
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							238.194.644		60.250.098		87.723.000		-		44.780.000		192.753.098		80,92%		192.753.098		0,00%	DINAS KESEHATAN	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar (Persen 75 Persen)	0,00	-	0,00	-	71	27.580.724	-	-	-	19.098.000	-	-	-	5.740.000	-	24.838.000	0,00%	90,06%	0,00	24.838.000	0,00%	0,00%		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	27.580.724	-	-	-	19.098.000	-	-	-	5.740.000	-	24.838.000	0,00%	90,06%	0,00	24.838.000	0,00%	0,00%		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya (Persen)	0,00	-	0,00	-	69	210.613.920	-	60.250.098	-	68.625.000	-	-	-	39.040.000	-	167.915.098	0,00%	79,73%	0,00	167.915.098	0,00%	0,00%		
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	183.032.000	-	60.250.098	-	68.625.000	-	-	-	12.500.000	-	141.375.098	0,00%	77,24%	0,00	141.375.098	0,00%	0,00%		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	27.581.920	-	-	-	-	-	-	-	26.540.000	-	26.540.000	0,00%	96,22%	0,00	26.540.000	0,00%	0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	80,92%							
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi							
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							77.182.332	-	-	-	-	-	-	36.546.000	-	36.546.000	47,35%		36.546.000		0,00%		DINAS KESEHATAN		
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	49.479.616	-	-	-	-	-	-	22.007.000	-	22.007.000	0,00%	44,48%	0,00	22.007.000	0,00%	0,00%			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Diendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan (Saraga)	0,00	-	0,00	-	6	49.479.616	-	-	-	-	-	-	22.007.000	-	22.007.000	0,00%	44,48%	0,00	22.007.000	0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Transfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Transfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% (Bersyarat (Skor 75 - 89) Nilai 12 Kali 25.7 Pers)	0,00	-	0,00	-	0	11.890.808.107	-	-	-	-	-	5.339.119.545	-	3.831.953.383	-	9.171.072.928	0,00%	77,13%	0,00	9.171.072.928	0,00%	0,00%		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	1.692.528.718	-	-	-	-	-	2	90.076.500	2	523.728.303	4	613.804.803	100,00%	36,27%	4,00	613.804.803	0,00%	0,00%	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipekan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	5.633.495.017	-	-	-	-	-	4	4.137.284.600	1	1.293.781.770	5	5.431.066.370	100,00%	96,41%	5,00	5.431.066.370	0,00%	0,00%	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	236.106.435	-	-	-	-	-	1	138.500.000	1	91.500.000	2	230.000.000	100,00%	97,41%	2,00	230.000.000	0,00%	0,00%	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	4.328.677.937	-	-	-	-	-	2	973.258.445	1	1.922.943.310	3	2.896.201.755	100,00%	66,91%	3,00	2.896.201.755	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu (Person)	0,00	-	0,00	-	0	481.815.649	-	-	-	-	-	-	141.972.500	-	162.502.900	-	304.475.400	0,00%	63,19%	0,00	304.475.400	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	481.815.649	1	-	-	-	-	1	141.972.500	-	162.502.900	2	304.475.400	200,00%	63,19%	2,00	304.475.400	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi (Persen 100 Persen)	0,00	-	0,00	-	492	835.169.453	-	-	-	-	-	-	10.519.485	-	300.835.513	-	311.354.998	0,00%	37,28%	0,00	311.354.998	0,00%	0,00%		
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	36.821.143	3	-	-	-	-	1	10.519.485	-	-	4	10.519.485	100,00%	28,57%	4,00	10.519.485	0,00%	0,00%		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	0,00	-	0,00	-	37	798.348.310	-	-	-	-	-	-	37	300.835.513	37	300.835.513	100,00%	37,68%	37,00	300.835.513	0,00%	0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								103,65%	74,10%								
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sedang								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.341.404.728		120.300.000		173.000.000		303.728.496		440.128.894		1.037.157.390		77,32%		1.037.157.390		0,00%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar (Batas 75 Persen)	0,00	-	0,00	-	71	817.594.000	-	120.300.000	-	173.000.000	-	235.495.000	-	180.337.500	-	709.132.500	0,00%	86,73%	0,00	709.132.500	0,00%	0,00%			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	817.594.000	2	120.300.000	2	173.000.000	2	235.495.000	2	180.337.500	8	709.132.500	400,00%	86,73%	8,00	709.132.500	0,00%	0,00%			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya (Persen)	0,00	-	0,00	-	69	523.810.728	-	-	-	-	-	68.233.496	-	259.791.394	-	328.024.890	0,00%	62,62%	0,00	328.024.890	0,00%	0,00%			
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Maninopkat (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	523.810.728	-	-	-	-	-	68.233.496	-	259.791.394	-	328.024.890	0,00%	62,62%	0,00	328.024.890	0,00%	0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								243,80%	77,32%								
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						5.060.233.204		44.720.000		448.310.620		1.302.886.120		2.327.762.024		4.123.678.764		81,49%		4.123.678.764		0,00%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara (Hektar 2050 Hektar)	0,00	-	0,00	-	260	5.060.233.204	-	44.720.000	-	448.310.620	-	1.302.886.120	-	2.327.762.024	-	4.123.678.764	0,00%	81,49%	0,00	4.123.678.764	0,00%	0,00%			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (DAK) (Meter)	0,00	-	0,00	-	3	4.013.646.000	-	29.105.000	-	41.625.000	3	1.126.895.810	-	1.894.936.509	3	3.092.562.319	100,00%	77,05%	3,00	3.092.562.319	0,00%	0,00%			
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Bendung)	0,00	-	0,00	-	5	1.046.587.204	-	15.615.000	-	406.685.620	-	175.990.310	5	432.825.515	5	1.031.116.445	100,00%	98,52%	5,00	1.031.116.445	0,00%	0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	81,49%								

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
			8	9		10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene (20,08 Persen)	0,00	-	0,00	-	0	263.670.000	-	29.139.380	-	56.593.820	-	43.941.657	-	49.897.300	-	179.572.157	0,00%	68,10%	0,00	179.572.157	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	263.670.000	-	29.139.380	-	56.593.820	1	43.941.657	-	49.897.300	1	179.572.157	100,00%	68,10%	1,00	179.572.157	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (13 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	6.318.565.200	-	20.195.900	-	460.729.576	-	4.552.497.311	-	1.177.076.974	-	6.210.499.761	0,00%	98,29%	0,00	6.210.499.761	0,00%	0,00%	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	6.318.565.200	-	20.195.900	-	460.729.576	-	4.552.497.311	5	1.177.076.974	5	6.210.499.761	100,00%	98,29%	5,00	6.210.499.761	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	2.340.234.584	-	37.094.137	-	835.046.450	-	389.592.115	-	98.566.771	-	1.360.299.473	0,00%	58,13%	0,00	1.360.299.473	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.340.234.584	-	37.094.137	-	835.046.450	-	389.592.115	1	98.566.771	1	1.360.299.473	100,00%	58,13%	1,00	1.360.299.473	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi/terekonstruksi akibat bencana (31.09 Kilometer 74 Kilometer)	0,00	-	0,00	-	90	44.855.376.443	-	302.339.600	-	8.942.584.547	-	10.819.614.423	90	24.069.890.178	90	44.134.428.748	100,00%	98,39%	90,00	44.134.428.748	0,00%	0,00%	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,00	-	0,00	-	3	24.225.221.000	-	38.650.000	-	5.884.470.820	2	4.254.027.618	2	13.729.676.327	3	23.906.824.765	101,67%	98,69%	3,05	23.906.824.765	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	0,00	-	0,00	-	90	1.433.068.125	-	95.520.000	-	330.667.536	-	753.579.983	90	239.181.500	90	1.418.949.019	100,00%	99,01%	90,00	1.418.949.019	0,00%	0,00%	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0,00	-	0,00	-	318	19.197.087.318	-	168.169.600	-	2.727.446.191	318	5.812.006.822	-	10.101.032.351	318	18.808.654.964	100,00%	97,98%	318,00	18.808.654.964	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,90%	98,39%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							115.000.000		19.779.200		20.513.304		13.466.512		57.957.927		111.716.943		97,15%		111.716.943		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	115.000.000	-	19.779.200	-	20.513.304	-	13.466.512	-	57.957.927	-	111.716.943	0,00%	97,15%	0,00	111.716.943	0,00%	0,00%	
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	1	115.000.000	-	19.779.200	-	20.513.304	-	13.466.512	1	57.957.927	1	111.716.943	100,00%	97,15%	1,00	111.716.943	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	97,15%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							468.510.000		38.058.048		71.276.000		104.176.182		205.635.170		419.145.400		89,46%		419.145.400		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	468.510.000	-	38.058.048	-	71.276.000	-	104.176.182	-	205.635.170	-	419.145.400	0,00%	89,46%	0,00	419.145.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	468.510.000	-	38.058.048	-	71.276.000	-	104.176.182	1	205.635.170	1	419.145.400	100,00%	89,46%	1,00	419.145.400	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	89,46%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							847.714.156		16.948.385		96.796.141		608.645.868		114.134.420		836.524.814		98,68%		836.524.814		0,00%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya pendataan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Pangan)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tertaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang/ Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	100	120.965.070	-	1.560.000	-	43.129.627	-	-	-	71.341.646	-	116.031.273	0,00%	95,92%	0,00	116.031.273	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	120.965.070	-	1.560.000	50	43.129.627	50	-	50	71.341.646	50	116.031.273	100,00%	95,92%	50,00	116.031.273	0,00%	0,00%	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tertaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	726.749.086	-	15.388.385	-	53.666.514	-	608.645.868	-	42.792.774	-	720.493.541	0,00%	99,14%	0,00	720.493.541	0,00%	0,00%	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	30	726.749.086	-	15.388.385	-	53.666.514	-	608.645.868	-	42.792.774	-	720.493.541	0,00%	99,14%	0,00	720.493.541	0,00%	0,00%	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-	0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								14,27%	98,68%						
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
																								DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit)	0,00	-	0,00	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%						
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																								DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Kawasan permukiman PSU (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	10.842.296.518	-	85.315.160	-	523.876.318	-	1.809.657.339	-	8.389.401.853	-	10.808.250.670	0,00%	99,69%	0,00	10.808.250.670	0,00%	0,00%	
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	673.867.850	-	5.895.000	-	46.417.000	-	17.505.900	-	600.110.378	-	669.928.278	0,00%	99,42%	0,00	669.928.278	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				I				II		III		IV		12											13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	60	9.720.680.926	-	-	10	302.346.850	10	1.767.207.171	10	7.633.011.475	10	9.702.565.496	16,67%	99,81%	10,00	9.702.565.496	0,00%	0,00%								
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	447.747.742	-	79.420.160	-	175.112.468	-	24.944.268	-	156.280.000	-	435.756.896	0,00%	97,32%	0,00	435.756.896	0,00%	0,00%								
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	14,94%	99,69%											
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN							
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah																						0,00%	0,00%								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%											
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																															
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.224.808.447		561.212.250		790.511.703		840.575.461		1.008.870.000		3.201.169.414		99,27%		3.201.169.414		0,00%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.052.877.359	13	512.957.250	23	760.454.261	47	786.584.025	93	971.188.750	177	3.031.184.286	176,66%	99,29%	176,66	3.031.184.286	0,00%	0,00%								
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	1.081.209.652	1	188.655.000	1	264.331.250	-	262.388.525	-	359.963.750	2	1.075.338.525	100,00%	99,46%	2,00	1.075.338.525	0,00%	0,00%								
Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada(Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.009.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	228.460.551	1	57.363.500	-	57.167.611	1	55.108.500	-	54.346.000	2	223.985.611	100,00%	98,91%	2,00	223.985.611	0,00%	0,00%	
Pencegahan Gangguan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	25	1.729.245.240	6	266.938.750	6	438.955.400	6	467.487.000	7	549.050.000	25	1.722.431.150	100,00%	99,61%	25,00	1.722.431.150	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	10.952.348	-	-	-	-	8	1.600.000	18	7.829.000	26	9.429.000	86,67%	86,09%	26,00	9.429.000	0,00%	0,00%	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	171.931.088	29	48.255.000	50	30.057.442	71	53.991.436	100	37.681.250	250	169.985.128	250,00%	98,87%	250,00	169.985.128	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	25.495.772	-	17.300.000	-	7.194.052	-	-	1	1.000.000	1	25.494.052	100,00%	99,99%	1,00	25.494.052	0,00%	0,00%	
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	65.866.884	4	21.080.000	2	8.419.640	2	19.744.244	2	16.595.000	10	65.838.884	100,00%	99,96%	10,00	65.838.884	0,00%	0,00%	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	80.568.432	-	9.875.000	1	14.443.750	1	34.247.192	1	20.086.250	3	78.652.192	100,00%	97,62%	3,00	78.652.192	0,00%	0,00%	
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																		99,80%	99,27%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							164.483.456		25.391.880		46.721.265		62.307.657		25.525.250		159.946.052		97,24%		159.946.052		0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	164.483.456	-	25.391.880	-	46.721.265	67	62.307.657	100	25.525.250	167	159.946.052	166,67%	97,24%	166,67	159.946.052	0,00%	0,00%	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	22.816.164	-	-	-	3.160.000	1	19.634.397	-	-	1	22.794.397	100,00%	99,90%	1,00	22.794.397	0,00%	0,00%	
Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	119.404.068	-	25.391.880	-	35.652.265	-	29.708.260	1	24.145.250	1	114.897.655	100,00%	96,23%	1,00	114.897.655	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	22.263.224	-	-	-	7.909.000	1	12.965.000	-	1.380.000	1	22.254.000	100,00%	99,96%	1,00	22.254.000	0,00%	0,00%	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	97,24%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-		-	3.594.000.000		106.091.145		1.156.034.017		1.215.345.403		654.194.502		3.131.665.067		87,14%		3.131.665.067		0,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,00	-	0,00	-	100	3.114.000.000	20	100.066.145	-	1.085.046.887	-	1.129.939.743	-	421.098.502	20	2.736.151.277	20,00%	87,87%	20,00	2.736.151.277	0,00%	0,00%	
	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	0,00	-	0,00	-	620	3.114.000.000	50	100.066.145	300	1.085.046.887	120	1.129.939.743	60	421.098.502	530	2.736.151.277	85,48%	87,87%	530,00	2.736.151.277	0,00%	0,00%	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana (Pegangan)	0,00	-	0,00	-	100	350.000.000	15	6.025.000	-	32.556.630	-	67.595.660	-	163.844.000	15	270.021.290	15,00%	77,15%	15,00	270.021.290	0,00%	0,00%	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	350.000.000	-	6.025.000	1	32.556.630	1	67.595.660	1	163.844.000	3	270.021.290	100,00%	77,15%	3,00	270.021.290	0,00%	0,00%	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Pegangan)	0,00	-	0,00	-	100	130.000.000	20	-	-	38.430.500	-	17.810.000	-	69.252.000	20	125.492.500	20,00%	96,53%	20,00	125.492.500	0,00%	0,00%	
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Diajukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	130.000.000	-	-	-	38.430.500	-	17.810.000	1	69.252.000	1	125.492.500	100,00%	96,53%	1,00	125.492.500	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		87,42%	87,14%					
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			-		-	142.796.972		12.380.000		12.292.428		108.510.000		9.250.000		142.432.428		99,74%		142.432.428		0,00%		DINAS SOSIAL
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Pegangan)	0,00	-	0,00	-	100	24.769.132	50	12.380.000	100	3.872.428	100	8.510.000	100	-	100	24.762.428	100,00%	99,97%	100,00	24.762.428	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	24.769.132	2	12.380.000	-	3.872.428	-	8.510.000	-	-	2	24.762.428	50,00%	99,97%	2,00	24.762.428	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial (Persen)	0,00	-	0,00	-	50	118.027.840	-	-	50	8.420.000	-	100.000.000	-	9.250.000	50	117.670.000	100,00%	99,70%	50,00	117.670.000	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (Lembaga)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	5	118.027.840	-	-	-	8.420.000	5	100.000.000	-	9.250.000	5	117.670.000	100,00%	99,70%	5,00	117.670.000	0,00%	0,00%	
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																		91,33%	99,74%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		-	-	-	-	2.371.466.620		185.078.300		539.487.502		1.191.473.198		386.395.000		2.302.434.000		97,09%		2.302.434.000		0,00%		DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlarut di dalam Panti	Persentase Penyanggah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	650.660.642	5	45.310.000	70	193.033.102	90	278.351.670	100	130.470.000	100	647.164.772	100,00%	99,46%	100,00	647.164.772	0,00%	0,00%	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	90	125.756.380	-	-	-	-	90	114.674.130	-	10.000.000	90	124.674.130	100,00%	99,14%	90,00	124.674.130	0,00%	0,00%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	409.334.602	25	45.310.000	25	193.033.102	25	90.344.500	25	80.290.000	100	408.977.602	100,00%	99,91%	100,00	408.977.602	0,00%	0,00%	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	115.569.660	-	-	-	-	-	73.333.040	10	40.180.000	10	113.513.040	100,00%	98,22%	10,00	113.513.040	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di Dalam Panti	Persentase Anak Terlarut yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.007.456.246	20	84.050.000	70	113.610.000	90	611.386.236	100	194.540.000	100	1.003.586.236	100,00%	99,62%	100,00	1.003.586.236	0,00%	0,00%	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	70	95.000.000	-	-	-	-	70	94.712.346	-	-	70	94.712.346	100,00%	99,70%	70,00	94.712.346	0,00%	0,00%	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	290.229.008	-	37.500.000	-	56.250.000	60	121.081.672	-	75.000.000	60	289.831.672	100,00%	99,86%	60,00	289.831.672	0,00%	0,00%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	200	505.095.738	-	26.400.000	-	57.360.000	200	365.489.718	-	52.800.000	200	502.049.718	100,00%	99,40%	200,00	502.049.718	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di dalam Panti (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	117.131.500	-	20.150.000	-	-	2	30.102.500	-	66.740.000	2	116.992.500	100,00%	99,88%	2,00	116.992.500	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarut di Dalam Panti	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	410.991.012	5	12.800.000	75	75.802.200	95	251.150.472	100	54.155.000	100	393.907.672	100,00%	95,84%	100,00	393.907.672	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	161.297.812	-	12.800.000	-	19.200.000	-	66.600.472	-	46.840.000	-	145.440.472	0,00%	90,17%	0,00	145.440.472	0,00%	0,00%	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	81.560.000	-	-	-	-	-	81.560.000	-	-	-	81.560.000	0,00%	100,00%	0,00	81.560.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	168.133.200	-	-	100	56.602.200	-	102.990.000	-	7.315.000	100	166.907.200	33,33%	99,27%	100,00	166.907.200	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	52.358.720	-	-	100	-	-	3.328.720	-	5.140.000	100	8.468.720	100,00%	16,17%	100,00	8.468.720	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	52.358.720	-	-	-	-	-	3.328.720	-	5.140.000	-	8.468.720	0,00%	16,17%	0,00	8.468.720	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	250.000.000	50	42.918.300	50	157.042.200	-	47.256.100	-	2.090.000	-	249.306.600	0,00%	99,72%	0,00	249.306.600	0,00%	0,00%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	250.000.000	35	42.918.300	-	157.042.200	-	47.256.100	-	2.090.000	35	249.306.600	70,00%	99,72%	35,00	249.306.600	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	79,66%	97,09%				
																		Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			-		-	1.970.016.774		97.879.900		158.711.585		703.693.782		749.599.033		1.709.884.300		86,80%		1.709.884.300		0,00%		DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran DTKS (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.970.016.774	20	97.879.900	35	158.711.585	95	703.693.782	100	749.599.033	100	1.709.884.300	100,00%	86,80%	100,00	1.709.884.300	0,00%	0,00%	
Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	100	614.514.102	-	20.790.000	-	52.079.408	-	416.364.000	-	109.761.455	-	598.994.863	0,00%	97,47%	0,00	598.994.863	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	118000	1.043.288.202	-	61.383.400	-	103.172.177	-	185.777.076	-	587.261.578	-	937.594.231	0,00%	89,87%	0,00	937.594.231	0,00%	0,00%	
Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	2000	312.214.470	-	15.706.500	-	3.460.000	-	101.552.706	-	52.576.000	-	173.295.206	0,00%	55,51%	0,00	173.295.206	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	86,80%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			-		-	658.533.380		15.128.000		300.648.392		234.119.000		21.393.000		571.288.392		86,75%		571.288.392		0,00%		DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	658.533.380	45	15.128.000	100	300.648.392	100	234.119.000	100	21.393.000	100	571.288.392	100,00%	86,75%	100,00	571.288.392	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	1000	396.158.380	150	15.128.000	-	224.615.792	-	129.119.000	-	21.393.000	150	390.255.792	15,00%	98,51%	150,00	390.255.792	0,00%	0,00%	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	1000	262.375.000	-	-	150	76.032.600	-	105.000.000	-	-	150	181.032.600	15,00%	69,00%	150,00	181.032.600	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	15,00%	86,75%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			-		-	75.793.656		-		7.280.000		14.000.000		54.513.280		75.793.280		100,00%		75.793.280		0,00%		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	75.793.656	-	-	15	7.280.000	40	14.000.000	100	54.513.280	100	75.793.280	100,00%	100,00%	100,00	75.793.280	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	0,00	-	0,00	-	2	75.793.656	-	-	-	7.280.000	1	14.000.000	-	54.513.280	1	75.793.280	50,00%	100,00%	1,00	75.793.280	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,00%	100,00%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							5.012.459.513		1.403.790.720		1.358.592.086		1.027.107.670		1.131.555.843		4.921.046.319		98,18%		4.921.046.319		0,00%	DINAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan klasterkompetensi (Orang)	0,00	-	0,00	-	640	5.012.459.513	-	1.403.790.720	-	1.358.592.086	-	1.027.107.670	-	1.131.555.843	-	4.921.046.319	0,00%	98,18%	0,00	4.921.046.319	0,00%	0,00%	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	0,00	-	0,00	-	576	4.353.294.907	128	1.253.220.720	160	1.059.092.086	-	916.107.670	-	1.088.955.843	288	4.317.376.319	50,00%	99,17%	288,00	4.317.376.319	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana pelatihan Kerja (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	659.164.606	5	150.570.000	-	299.500.000	-	111.000.000	-	42.600.000	5	603.670.000	100,00%	91,58%	5,00	603.670.000	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	56,58%	98,18%				
																		Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							17.784.829.144		25.589.150		8.176.494.910		4.221.401.120		4.168.209.665		16.591.694.845		93,29%		16.591.694.845		0,00%	DINAS TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang dilayani penempatannya (Orang)	0,00	-	0,00	-	1000	17.784.829.144	-	25.589.150	-	8.176.494.910	-	4.221.401.120	-	4.168.209.665	-	16.591.694.845	0,00%	93,29%	0,00	16.591.694.845	0,00%	0,00%	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0,00	-	0,00	-	4200	17.784.829.144	200	25.589.150	2.000	8.176.494.910	-	4.221.401.120	-	4.168.209.665	2.200	16.591.694.845	52,38%	93,29%	2200,00	16.591.694.845	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	52,38%	93,29%				
																		Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Tinggi				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							669.993.782		244.920.382		128.377.008		149.786.048		86.838.742		609.922.180		91,03%		609.922.180		0,00%	DINAS TENAGA KERJA
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Perselisihan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	299.999.696	-	140.257.648	-	94.990.000	-	63.756.048	-	600.000	-	299.603.696	0,00%	99,87%	0,00	299.603.696	0,00%	0,00%	
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi (Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	60	299.999.696	30	140.257.648	-	94.990.000	-	63.756.048	-	600.000	30	299.603.696	50,00%	99,87%	30,00	299.603.696	0,00%	0,00%	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Upah Minimum yang di Tetapkan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	369.994.086	-	104.662.734	-	33.387.008	-	86.030.000	-	86.238.742	-	310.318.484	0,00%	83,87%	0,00	310.318.484	0,00%	0,00%	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	0,00	-	0,00	-	1	369.994.086	-	104.662.734	-	33.387.008	-	86.030.000	-	86.238.742	-	310.318.484	0,00%	83,87%	0,00	310.318.484	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	22,39%	91,03%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							103.494.216		13.620.000		10.320.000		39.200.000		40.000.000		103.140.000		99,66%		103.140.000		0,00%	DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan (420 Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	0	103.494.216	-	13.620.000	-	10.320.000	-	39.200.000	-	40.000.000	-	103.140.000	0,00%	99,66%	0,00	103.140.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	165	103.494.216	-	13.620.000	-	10.320.000	-	39.200.000	-	40.000.000	-	103.140.000	0,00%	99,66%	0,00	103.140.000	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	99,66%								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							53.177.586						14.838.000		38.002.640		52.840.640		99,37%		52.840.640		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)	0,00	-	0,00	-	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	25	53.177.586	-	-	-	-	-	14.838.000	-	38.002.640	-	52.840.640	0,00%	99,37%	0,00	52.840.640	0,00%	0,00%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	25	53.177.586	-	-	-	-	-	14.838.000	25	38.002.640	25	52.840.640	100,00%	99,37%	25,00	52.840.640	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,37%								
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							327.591.500						94.874.086		119.990.236		110.106.357		324.970.679		99,20%		324.970.679	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT (6 Kabupaten)	0,00	-	0,00	-	0	85.500.000	-	-	-	-	33.600.000	-	44.200.000	-	7.700.000	-	85.500.000	0,00%	100,00%	0,00	85.500.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	85.500.000	-	-	-	33.600.000	1	44.200.000	-	7.700.000	1	85.500.000	100,00%	100,00%	1,00	85.500.000	0,00%	0,00%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan (6 Kabupaten)	0,00	-	0,00	-	0	242.091.500	-	-	-	61.274.086	-	75.790.236	-	102.406.357	-	239.470.679	0,00%	98,92%	0,00	239.470.679	0,00%	0,00%	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	43.731.500	-	-	10	41.297.086	9	1.360.236	10	1.016.357	29	43.673.679	290,00%	99,87%	29,00	43.673.679	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Layanan)	0,00	-	0,00	-	7	198.360.000	-	-	4	19.977.000	3	74.430.000	7	101.390.000	14	195.797.000	200,00%	98,71%	14,00	195.797.000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		185,91%	99,20%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi (6 Kabupaten)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							589.106.880		7.795.000		133.775.436		59.437.900		387.679.926		588.688.262		99,93%		588.688.262		0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
			I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
			5		6		7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	58.140.000	-	-	-	-	-	-	1	58.140.000	1	58.140.000	100,00%	100,00%	1,00	58.140.000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	100,00%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				-		-	2.407.567.700		455.605.000		900.523.068		144.469.523		813.049.151		2.313.646.742		96,10%		2.313.646.742		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhi Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah (Dokumen Laporan Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.027.567.700	-	455.605.000	-	819.859.296	-	89.484.572	-	588.599.632	-	1.953.548.500	0,00%	96,35%	0,00	1.953.548.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.814.567.700	-	440.605.000	-	697.293.000	-	62.474.572	1	542.135.500	1	1.742.508.072	100,00%	96,03%	1,00	1.742.508.072	0,00%	0,00%	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	120.000.000	-	-	-	108.630.384	-	5.140.000	-	6.229.372	-	119.999.756	0,00%	100,00%	0,00	119.999.756	0,00%	0,00%	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	7.500.000	-	5.000.000	-	14.370.000	1	21.220.760	1	48.090.760	100,00%	96,18%	1,00	48.090.760	0,00%	0,00%	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	43.000.000	-	7.500.000	-	8.935.912	-	7.500.000	1	19.014.000	1	42.949.912	100,00%	99,88%	1,00	42.949.912	0,00%	0,00%	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (TON)	0,00	-	0,00	-	22	80.000.000	-	-	-	-	-	8.907.672	-	54.573.155	-	63.480.827	0,00%	79,35%	0,00	63.480.827	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	0,00	-	0,00	-	1235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	0,00	-	0,00	-	1	80.000.000	-	-	-	-	-	8.907.672	-	54.573.155	-	63.480.827	0,00%	79,35%	0,00	63.480.827	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditepatkan oleh Pemerintah Pusat	Informasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	0,00	-	0,00	-	1	300.000.000	-	-	-	80.663.772	-	46.077.279	-	169.876.364	-	296.617.415	0,00%	98,87%	0,00	296.617.415	0,00%	0,00%	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	482.673	-	-	-	98.531.292	-	99.013.965	0,00%	99,01%	0,00	99.013.965	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	150.000.000	-	-	-	68.081.099	-	38.577.279	1	41.741.840	1	148.400.218	100,00%	98,93%	1,00	148.400.218	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	12.100.000	-	7.500.000	1	29.603.232	1	49.203.232	100,00%	98,41%	1,00	49.203.232	0,00%	0,00%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								87,54%	96,10%						
									Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Tinggi						
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			-		-		125.000.000		-		6.386.243		116.774.361		1.762.500		124.923.104		99,94%		124.923.104		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Data Daerah Rawan Pangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	25.000.000	-	-	-	1.076.243	-	22.158.000	-	1.762.500	-	24.996.743	0,00%	99,99%	0,00	24.996.743	0,00%	0,00%	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	25.000.000	-	-	-	1.076.243	-	22.158.000	-	1.762.500	-	24.996.743	0,00%	99,99%	0,00	24.996.743	0,00%	0,00%	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	100.000.000	-	-	-	5.310.000	-	94.616.361	-	-	-	99.926.361	0,00%	99,93%	0,00	99.926.361	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	5.310.000	-	94.616.361	-	-	-	99.926.361	0,00%	99,93%	0,00	99.926.361	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	99,94%						
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			-		-		97.039.766		7.500.000		16.922.166		39.297.040		26.144.000		89.863.206		92,60%		89.863.206		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%							
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan (Persen 30 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	97.039.766	-	7.500.000	-	16.922.166	-	39.297.040	-	26.144.000	-	89.863.206	0,00%	92,60%	0,00	89.863.206	0,00%	0,00%		
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	0,00	-	0,00	-	15	62.639.766	-	7.500.000	-	16.362.752	-	15.822.602	15	20.757.000	15	60.442.354	100,00%	96,49%	15,00	60.442.354	0,00%	0,00%		
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	14.400.000	-	-	-	-	-	14.398.438	-	-	-	14.398.438	0,00%	99,99%	0,00	14.398.438	0,00%	0,00%		
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.000.000	-	-	-	559.414	-	9.076.000	-	5.387.000	-	15.022.414	0,00%	75,11%	0,00	15.022.414	0,00%	0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								64,55%	92,60%							
									Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																									
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							39.053.846.729		27.579.038.305		5.467.264.355		596.801.580		5.343.999.383		38.987.103.623		99,83%		38.987.103.623		0,00%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	39.053.846.729	-	27.579.038.305	-	5.467.264.355	-	596.801.580	-	5.343.999.383	-	38.987.103.623	0,00%	99,83%	0,00	38.987.103.623	0,00%	0,00%		
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (100,00 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	39.053.846.729	68	27.579.038.305	70	5.467.264.355	70	596.801.580	70	5.343.999.383	70	38.987.103.623	70,00%	99,83%	70,00	38.987.103.623	0,00%	0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								70,00%	99,83%							
									Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																									
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							269.989.631		2.500.000		5.090.000		14.160.000		248.039.631		269.789.631		99,93%		269.789.631		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Cakupan Dokumen Pengendalian RPPLH Yang Tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	39.673.535	-	2.500.000	-	5.090.000	-	3.750.000	-	28.233.535	-	39.573.535	0,00%	99,75%	0,00	39.573.535	0,00%	0,00%		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	39.673.535	-	2.500.000	-	5.090.000	-	3.750.000	-	28.233.535	-	39.573.535	0,00%	99,75%	0,00	39.573.535	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	230.316.096	-	-	-	-	-	10.410.000	-	219.806.096	-	230.216.096	0,00%	99,96%	0,00	230.216.096	0,00%	0,00%		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	230.316.096	-	-	-	-	-	10.410.000	-	219.806.096	-	230.216.096	0,00%	99,96%	0,00	230.216.096	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			8	9			10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	0,00	-	0,00	-	15	33.580.208	2	6.410.000	5	11.418.000	8	7.380.000	10	8.372.208	10	33.580.208	66,67%	100,00%	10,00	33.580.208	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		66,67%	100,00%			
																		Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Tinggi			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.006.151.366			84.914.781		228.371.004		456.117.400		230.756.864		1.000.160.049		99,40%		1.000.160.049		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project (Lembaga Masyarakat)	0,00	-	0,00	-	2	1.006.151.366	-	84.914.781	-	228.371.004	-	456.117.400	-	230.756.864	-	1.000.160.049	0,00%	99,40%	0,00	1.000.160.049	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	15	1.006.151.366	2	84.914.781	6	228.371.004	10	456.117.400	13	230.756.864	13	1.000.160.049	86,67%	99,40%	13,00	1.000.160.049	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,67%	99,40%			
																		Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA (Kabupaten)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						30.987.528			6.040.000		9.030.000		5.520.000		10.397.528		30.987.528		100,00%		30.987.528		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang tertangani (Pengaduan)	0,00	-	0,00	-	5	30.987.528	-	6.040.000	-	9.030.000	-	5.520.000	-	10.397.528	-	30.987.528	0,00%	100,00%	0,00	30.987.528	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	0,00	-	0,00	-	5	30.987.528	1	6.040.000	2	9.030.000	2	5.520.000	2	10.397.528	2	30.987.528	40,00%	100,00%	2,00	30.987.528	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,00%	100,00%			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Volume Timbunan Sampah Yang Tertangani/terkelola (TON)	0,00	-	0,00	-	96404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				I				II		III		IV		12											13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Disaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%											
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																															
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				-	-		350.000.000		119.067.000		45.311.895		114.929.000		46.488.536		325.796.431		93,08%		325.796.431		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	99.815.320	100	95.313.000	-	3.795.900	-	-	-	-	100	99.108.900	100,00%	99,29%	100,00	99.108.900	0,00%	0,00%								
Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	99.815.320	1	95.313.000	-	3.795.900	-	-	-	-	1	99.108.900	100,00%	99,29%	1,00	99.108.900	0,00%	0,00%								
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	200.184.680	15	23.754.000	10	41.515.995	-	78.515.000	-	36.227.700	25	180.012.695	25,00%	89,92%	25,00	180.012.695	0,00%	0,00%								
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	90.276.340	-	16.469.000	-	34.276.995	-	17.349.000	1	21.725.000	1	89.819.995	100,00%	99,49%	1,00	89.819.995	0,00%	0,00%								
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	109.908.340	-	7.285.000	-	7.239.000	1	61.166.000	-	14.502.700	1	90.192.700	100,00%	82,06%	1,00	90.192.700	0,00%	0,00%								
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	36.414.000	-	10.260.836	-	46.674.836	0,00%	93,35%	0,00	46.674.836	0,00%	0,00%								
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	1	36.414.000	-	10.260.836	1	46.674.836	100,00%	93,35%	1,00	46.674.836	0,00%	0,00%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	93,08%											
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				-	-		502.928.182		60.817.000		182.011.833		112.407.625		127.279.500		482.515.958		95,94%		482.515.958		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data atas peristiwa penting (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	502.928.182	18	60.817.000	22	182.011.833	-	112.407.625	-	127.279.500	40	482.515.958	40,00%	95,94%	40,00	482.515.958	0,00%	0,00%			
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	502.928.182	-	60.817.000	-	182.011.833	1	112.407.625	-	127.279.500	1	482.515.958	100,00%	95,94%	1,00	482.515.958	0,00%	0,00%			
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,94%							
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						76.213.693	-			76.032.400	-					76.032.400		99,76%		76.032.400		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	76.213.693	-	-	-	76.032.400	-	-	-	-	76.032.400	0,00%	99,76%	0,00	76.032.400	0,00%	0,00%				
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	76.213.693	-	-	1	76.032.400	-	-	-	-	1	76.032.400	100,00%	99,76%	1,00	76.032.400	0,00%	0,00%			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,76%							
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						24.530.664		6.660.000		5.600.000		10.992.800				23.252.800		94,79%		23.252.800		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Profil Kependudukan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	24.530.664	50	6.660.000	-	5.600.000	-	10.992.800	-	-	50	23.252.800	50,00%	94,79%	50,00	23.252.800	0,00%	0,00%			
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	24.530.664	1	6.660.000	-	5.600.000	1	10.992.800	-	-	2	23.252.800	100,00%	94,79%	2,00	23.252.800	0,00%	0,00%			
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,79%							
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
		5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																								DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah Posyandu Aktif (K emasyaraka tan 1722 Posyandu)	0,00		0,00		2191	4.003.520.000	2.150	384.413.682	-	682.265.721	-	647.816.183	-	891.491.540	-	2.605.987.126	0,00%	65,09%	0,00	2.605.987.126	0,00%	0,00%	
Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0,00		0,00		6	582.796.312	6	49.070.000	6	246.997.000	6	65.689.400	6	170.093.400	6	531.849.800	100,00%	91,26%	6,00	531.849.800	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (Lembaga)	0,00		0,00		240	3.420.723.688	60	335.343.682	60	435.268.721	60	582.126.783	60	721.398.140	240	2.074.137.326	100,00%	60,63%	240,00	2.074.137.326	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	65,09%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sedang							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk (6 Kabupaten)	0,00		0,00		0	759.888.660	-	152.034.900	-	251.226.344	-	160.052.350	-	183.264.200	-	746.577.794	0,00%	98,25%	0,00	746.577.794	0,00%	0,00%	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK (Laporan)	0,00		0,00		1	759.888.660	1	152.034.900	1	251.226.344	1	160.052.350	1	183.264.200	1	746.577.794	100,00%	98,25%	1,00	746.577.794	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	98,25%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (6 Kabupaten)	0,00	-	0,00	-	0	100.000.000	-	-	-	56.580.000	-	25.870.000	-	17.530.750	-	99.980.750	0,00%	99,98%	0,00	99.980.750	0,00%	0,00%		
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	25	100.000.000	-	-	25	56.580.000	-	25.870.000	-	17.530.750	25	99.980.750	100,00%	99,98%	25,00	99.980.750	0,00%	0,00%		
																		100,00%	99,98%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	99,98%							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				-			353.222.228			69.920.000		73.670.000		73.375.000		92.611.000		309.576.000		87,64%		309.576.000		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Perlekapan Jalan di Jalan Provinsi (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	35.051.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan			-		-		35.051.760		-		-		-		-		0,00%			-		0,00%			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B yang Terlelapa (Unit)	Jumlah Terminal Tipe B yang terlelapa (Unit)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	6	318.170.468	1	69.920.000	1	73.670.000	-	73.375.000	-	92.611.000	2	309.576.000	33,33%	97,30%	2,00	309.576.000	0,00%	0,00%		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	293.241.000	-	45.000.000	1	73.670.000	-	73.375.000	-	92.611.000	1	284.656.000	100,00%	97,07%	1,00	284.656.000	0,00%	0,00%		
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	24.929.468	1	24.920.000	-	-	-	-	-	-	1	24.920.000	100,00%	99,96%	1,00	24.920.000	0,00%	0,00%		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								-	-	-	-		-		-			0,00%		-		0,00%			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	0,00		0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	0,00		0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%		
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00		0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		90,08%	87,64%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				-	-	49.080.000		-		15.580.000		14.840.000		17.910.000		48.330.000		98,47%		48.330.000		0,00%		DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	0,00		0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	0,00		0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas (izin)	0,00		0,00	-	3	25.000.000	1	-	-	15.580.000	-	8.740.000	-	1	24.320.000	33,33%	97,28%	1,00	24.320.000	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)				SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	85	7.767.142.375	-	1.681.014.180	-	1.940.789.346	-	453.166.651	-	3.676.000.333	-	7.750.970.510	0,00%	99,79%	0,00	7.750.970.510	0,00%	0,00%							
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	22	27.000.000	5	-	5	17.500.000	7	9.500.000	5	-	22	27.000.000	100,00%	100,00%	22,00	27.000.000	0,00%	0,00%							
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	13	673.288.240	5	42.177.500	5	128.960.000	-	232.000.000	3	258.475.498	13	661.612.998	100,00%	98,27%	13,00	661.612.998	0,00%	0,00%							
Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media (Layanan)	0,00	-	0,00	-	50	4.232.153.836	25	370.600.000	15	479.552.450	5	201.100.651	5	3.176.800.735	50	4.228.053.836	100,00%	99,90%	50,00	4.228.053.836	0,00%	0,00%							
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	24	334.700.299	8	18.236.680	2	64.776.896	7	10.566.000	7	240.724.100	24	334.303.676	100,00%	99,88%	24,00	334.303.676	0,00%	0,00%							
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	2.500.000.000	-	1.250.000.000	1	1.250.000.000	-	-	-	-	1	2.500.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.500.000.000	0,00%	0,00%							
</																														

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
			I			II		III		IV		12			13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	393.529.850	1	-	2	58.451.464	3	23.781.676	1	311.090.475	7	393.323.615	100,00%	99,95%	7,00	393.323.615	0,00%	0,00%	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	446.850.000	1	38.100.000	1	75.450.000	1	75.450.000	1	257.850.000	4	446.850.000	100,00%	100,00%	4,00	446.850.000	0,00%	0,00%	
											</													

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab								
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							
									Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sedang						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																																
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				-	-		810.000.000			33.828.500			323.485.098			334.770.063			117.723.648			809.807.309		99,98%			809.807.309		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal (Persen)	0,00	-	0,00	-	55	310.000.000	-		23.273.500	-		125.137.236	-		63.605.263	63		97.792.129	63		309.808.128	113,64%	99,94%	62,50		309.808.128	0,00%	0,00%			
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	210.500.265	-		9.193.500	1		68.768.150	-		50.249.713	-		82.288.153	1		210.499.516	100,00%	100,00%	1,00		210.499.516	0,00%	0,00%			
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	99.499.735	-		14.080.000	-		56.369.086	-		13.355.550	1		15.503.976	1		99.308.612	100,00%	99,81%	1,00		99.308.612	0,00%	0,00%			
Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				-	-			-		-				-		-							0,00%			-		0,00%				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya (Persen)	0,00	-	0,00	-	20	500.000.000	-		10.555.000	-		198.347.862	-		271.164.800	60		19.931.519	60		499.999.181	300,00%	100,00%	60,00		499.999.181	0,00%	0,00%			
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				-	-			-		-				-		-							0,00%			-		0,00%				
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				-	-			-		-				-		-							0,00%			-		0,00%				
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	500.000.000	-		10.555.000	-		198.347.862	-		271.164.800	2		19.931.519	2		499.999.181	100,00%	100,00%	2,00		499.999.181	0,00%	0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,98%						
									Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-	-		1.492.135.171			64.278.559			197.418.412			241.938.200			983.802.814			1.487.437.985		99,69%			1.487.437.985		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (Persen)	0,00	-	0,00	-	20	1.492.135.171	60		64.278.559	80		197.418.412	100		241.938.200	120		983.802.814	120		1.487.437.985	600,00%	99,69%	120,00		1.487.437.985	0,00%	0,00%			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	1.492.135.171	1		64.278.559	1		197.418.412	1		241.938.200	1		983.802.814	4		1.487.437.985	100,00%	99,69%	4,00		1.487.437.985	0,00%	0,00%			
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				-	-			-		-				-		-							0,00%			-		0,00%				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,69%						
									Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				-	-		847.038.800			195.014.268			317.875.453			175.414.480			157.139.820			845.444.021		99,81%			845.444.021		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP (Persen)	0,00	-	0,00	-	80	847.038.800	100	195.014.268	100	317.875.453	100	175.414.480	100	157.139.820	100	845.444.021	125,00%	99,81%	100,00	845.444.021	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		0,00%				0,00%		
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	50	100.627.400	92	22.636.459	96	14.769.600	105	8.850.200	-	54.241.900	293	100.498.159	586,00%	99,87%	293,00	100.498.159	0,00%	0,00%	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	300	585.000.000	69	170.510.209	35	222.213.601	75	125.170.600	36	66.898.800	215	584.793.210	71,67%	99,96%	215,00	584.793.210	0,00%	0,00%	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0,00	-	0,00	-	150	161.411.400	69	1.867.600	35	80.892.252	75	41.393.680	36	35.999.120	215	160.152.652	143,33%	99,22%	215,00	160.152.652	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		146,43%	99,81%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							1.091.275.000		100.489.400		256.610.000		257.657.500		465.963.325		1.080.720.225		99,03%		1.080.720.225		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Persen 5 Orang/Per usahaan)	0,00	-	0,00	-	80	1.091.275.000	20	100.489.400	35	256.610.000	53	257.657.500	70	465.963.325	70	1.080.720.225	87,13%	99,03%	69,70	1.080.720.225	0,00%	0,00%	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	0,00	-	0,00	-	14	456.632.068	60	85.770.000	29	84.039.000	44	90.445.000	36	196.287.497	169	456.541.497	1207,14%	99,98%	169,00	456.541.497	0,00%	0,00%	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	0,00	-	0,00	-	10	169.961.257	1	-	5	63.211.000	5	5.490.000	4	97.080.128	15	165.781.128	150,00%	97,54%	15,00	165.781.128	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	312	464.681.675	60	14.719.400	60	109.360.000	120	161.722.500	90	172.595.700	330	458.397.600	105,77%	98,65%	330,00	458.397.600	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		573,52%	99,03%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							200.000.000		27.206.516		19.760.000		53.552.500		96.414.121		196.933.137		98.47%		196.933.137		0.00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi (Persen)	0.00		0.00		100	200.000.000	67	27.206.516	75	19.760.000	92	53.552.500	100	96.414.121	100	196.933.137	100,00%	98,47%	100,00	196.933.137	0,00%	0,00%	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0.00		0.00		2	200.000.000	-	27.206.516	-	19.760.000	1	53.552.500	1	96.414.121	2	196.933.137	100,00%	98,47%	2,00	196.933.137	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	98,47%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							1.576.807.000		117.860.186		130.077.348		187.281.993		239.489.370		674.708.897		42,79%		674.708.897		0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Daerah (Orang)	0.00		0.00		121	1.476.807.000	-	117.860.186	70	130.077.348	-	187.281.993	-	239.489.370	70	674.708.897	57,85%	45,69%	70,00	674.708.897	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	0.00		0.00		121	632.071.092	15	83.507.866	15	92.855.348	-	92.141.033	-	87.742.170	30	356.246.417	24,79%	56,36%	30,00	356.246.417	0,00%	0,00%	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0.00		0.00		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0.00		0.00		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	0.00		0.00		1	206.204.908	-	-	-	-	1	58.549.960	1	-	1	58.549.960	100,00%	28,39%	1,00	58.549.960	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase)	0.00		0.00		90	477.281.000	15	34.352.320	10	37.222.000	-	3.645.000	-	151.747.200	25	226.966.520	27,78%	47,55%	25,00	226.966.520	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	0.00		0.00		15	43.750.000	-	-	-	-	-	32.946.000	-	-	-	32.946.000	0,00%	75,31%	0,00	32.946.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi (Orang)	0.00		0.00		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	0,00	-	0,00	-	18	117.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah OKP yang Berpartisipasi pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepmudaan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	35	100.000.000	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-	100,00%	0,00%	35,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								31,42%	42,79%								
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						18.508.193.000		3.029.697.685		1.471.536.506		7.091.760.662		4.363.677.466		15.956.672.319		86,21%		15.956.672.319		0,00%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahragaoleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Orang 1 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	80	1.334.378.550	-	345.940.779	80	335.200.155	-	307.854.993	-	95.854.942	80	1.084.850.869	100,00%	81,30%	80,00	1.084.850.869	0,00%	0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Unit) Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Unit) Usaha	0,00	-	0,00	-	1	504.400.000	1	64.440.444	1	93.157.155	-	93.225.441	-	84.254.942	1	335.077.982	50,00%	66,43%	0,50	335.077.982	0,00%	0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	80	504.479.306	30	281.500.335	-	68.960.000	-	89.277.252	-	11.600.000	30	451.337.587	37,50%	89,47%	30,00	451.337.587	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	325.499.244	-	-	1	173.083.000	-	125.352.300	-	-	1	298.435.300	100,00%	91,69%	1,00	298.435.300	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Cabor yang diikuti dan di selenggarakan pada kejuaraan olahraga (Cabor)	0,00	-	0,00	-	8	3.343.672.610	-	183.756.906	8	636.336.351	-	952.394.236	-	256.680.816	8	2.029.168.309	100,00%	60,69%	8,00	2.029.168.309	0,00%	0,00%		
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	1.600.313.690	-	167.427.000	30	327.432.216	-	465.011.884	-	233.772.736	30	1.193.643.836	60,00%	74,59%	30,00	1.193.643.836	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			6			7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	110.000.000	-	-	-	108.863.548	-	-	-	-	108.863.548	0,00%	98,97%	0,00	108.863.548	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang diselenggarakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	2	1.633.358.920	-	16.329.906	1	200.040.587	-	487.382.352	-	22.908.080	1	726.660.925	50,00%	44,49%	1,00	726.660.925	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Jumlah Atlet yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (Orang Orang)	0,00	-	0,00	-	25	530.141.840	-	-	25	-	-	31.511.433	-	11.141.708	25	42.653.141	100,00%	8,05%	25,00	42.653.141	0,00%	0,00%	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	0,00	-	0,00	-	1	197.083.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	25	33.058.840	-	-	-	-	-	-	-	11.141.708	-	11.141.708	0,00%	33,70%	0,00	11.141.708	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	80.000.000	-	-	-	-	-	31.511.433	-	-	-	31.511.433	0,00%	39,39%	0,00	31.511.433	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	JJumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	13.300.000.000	-	2.500.000.000	2	500.000.000	-	5.800.000.000	-	4.000.000.000	2	12.800.000.000	66,67%	96,24%	2,00	12.800.000.000	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	13.300.000.000	-	2.500.000.000	1	500.000.000	-	5.800.000.000	-	4.000.000.000	1	12.800.000.000	100,00%	96,24%	1,00	12.800.000.000	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	85,60%	86,21%					
																	Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																		0,00%				0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan yang ikut serta dalam kegiatan Kepramukaan Tk. Provinsi dan Nasional (Orang)	0,00	-	0,00	-	120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	100,00%	0,00%	120,00	-	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							978.233.715		122.642.910		297.060.968		120.592.880		428.322.025		968.618.783		99,02%		968.618.783		0,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	978.233.715	-	122.642.910	-	297.060.968	-	120.592.880	-	428.322.025	-	968.618.783	0,00%	99,02%	0,00	968.618.783	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	944.233.715	-	122.642.910	20	297.060.968	-	110.484.880	22	404.465.798	42	934.654.556	100,00%	98,99%	42,00	934.654.556	0,00%	0,00%	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	34.000.000	-	-	-	-	38	10.108.000	-	23.856.227	38	33.964.227	90,48%	99,89%	38,00	33.964.227	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,67%	99,02%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				-	-		247.300.000		46.501.100		32.133.400		60.272.520		105.822.671		244.729.691		98,96%		244.729.691		0,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal (Persen)	0,00	-	0,00	-	40	247.300.000	-	46.501.100	-	32.133.400	-	60.272.520	-	105.822.671	-	244.729.691	0,00%	98,96%	0,00	244.729.691	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	1	26.535.100	-	11.855.200	-	33.158.120	-	26.633.560	1	98.181.980	100,00%	98,18%	1,00	98.181.980	0,00%	0,00%	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	5	147.300.000	-	19.966.000	3	20.278.200	-	27.114.400	2	79.189.111	5	146.547.711	100,00%	99,49%	5,00	146.547.711	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,96%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				-	-		5.345.963.668		-		597.404.437		1.063.639.923		147.199.050		1.808.243.410		33,82%		1.808.243.410		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.732.365.464	-	-	-	597.404.437	-	817.237.689	-	139.111.974	-	1.553.754.100	0,00%	32,83%	0,00	1.553.754.100	0,00%	0,00%	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Objek)	0,00	-	0,00	-	3	3.088.561.168	-	-	-	439.983.704	-	350.609.440	3	109.403.484	3	899.996.628	100,00%	29,14%	3,00	899.996.628	0,00%	0,00%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	350.064.480	-	-	-	62.500.000	-	233.405.938	-	10.000.000	-	305.905.938	0,00%	87,39%	0,00	305.905.938	0,00%	0,00%	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang disediakan dan dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	1.293.739.816	-	-	-	94.920.733	-	233.222.311	-	19.708.490	-	347.851.534	0,00%	26,89%	0,00	347.851.534	0,00%	0,00%	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah objek Budaya yang dikelola dan dikembangkan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	613.598.204	-	-	-	-	-	246.402.234	-	8.087.076	-	254.489.310	0,00%	41,47%	0,00	254.489.310	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab					
								I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			-		-		3.415.733.589		383.434.309		1.481.647.120		721.999.814		770.515.728		3.357.596.971		98,30%		3.357.596.971		0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	2.853.521.416	-	237.146.029	-	1.272.938.321	-	667.189.914	-	621.376.512	-	2.798.650.776	0,00%	98,08%	0,00	2.798.650.776	0,00%	0,00%						
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	734.431.881	-	9.203.900	-	470.921.600	-	193.445.820	-	46.760.800	-	720.332.120	0,00%	98,08%	0,00	720.332.120	0,00%	0,00%						
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Ditbina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	239.260.000	-	97.280.000	-	141.005.000	-	-	-	-	-	238.285.000	0,00%	99,59%	0,00	238.285.000	0,00%	0,00%						
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	0,00	-	0,00	-	100	737.156.379	25	130.662.129	-	168.047.458	-	179.894.094	-	254.470.212	25	733.073.893	25,00%	99,45%	25,00	733.073.893	0,00%	0,00%						
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksistensi)	0,00	-	0,00	-	3990	632.540.000	-	-	-	15.768.014	-	293.850.000	-	320.145.500	-	629.763.514	0,00%	99,56%	0,00	629.763.514	0,00%	0,00%						
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	510.133.156	-	-	-	477.196.249	-	-	-	-	-	477.196.249	0,00%	93,54%	0,00	477.196.249	0,00%	0,00%						
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelembagaan Perpustakaan oleh Masyarakat (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	562.212.173	-	146.288.280	-	208.708.799	-	54.809.900	-	149.139.216	-	558.946.195	0,00%	99,42%	0,00	558.946.195	0,00%	0,00%						
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	232.303.080	-	-	-	208.708.799	-	23.409.900	-	60.000	-	232.178.699	0,00%	99,95%	0,00	232.178.699	0,00%	0,00%						
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	182.526.900	-	-	-	-	-	31.400.000	-	149.079.216	-	180.479.216	0,00%	98,88%	0,00	180.479.216	0,00%	0,00%						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	4.865.295.111	-	124.807.367	-	433.400.641	-	1.633.248.084	-	2.191.456.092	0,00%	45,04%	0,00	2.191.456.092	0,00%	0,00%		
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	150	1.438.301.052	-	20.169.000	25	152.292.057	25	166.038.936	-	50	338.499.993	33,33%	23,53%	50,00	338.499.993	0,00%	0,00%	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	50	3.011.879.920	-	62.340.000	5	175.255.000	25	1.369.491.400	-	30	1.607.086.400	60,00%	53,36%	30,00	1.607.086.400	0,00%	0,00%	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	167.605.139	-	-	20	7.695.141	15	55.410.000	-	35	63.105.141	35,00%	37,65%	35,00	63.105.141	0,00%	0,00%	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	10	247.509.000	-	42.298.367	6	98.158.443	3	42.307.748	-	9	182.764.558	90,00%	73,84%	9,00	182.764.558	0,00%	0,00%	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								52,00%	48,90%						
								Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			-		-	9.341.828.300		31.840.912		141.452.163		5.405.347.641		-		5.578.640.716		59,72%		5.578.640.716		0,00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			-		-			-		-		-		-		0,00%		-		0,00%			
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				5				6		7		8		9		10		11		K		Rp			K
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT																			0,00%					0,00%	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0,00		0,00		500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dokumen)	0,00		0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi" (Persen)	0,00		0,00		100	9.341.828.300	-	31.840.912		141.452.163	-	5.405.347.641		-	-	5.578.640.716	0,00%	59,72%	0,00	5.578.640.716	0,00%	0,00%		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	0,00		0,00		5	8.881.626.000	-	-	2	59.902.260	1	5.213.903.454		-	3	5.273.805.714	60,00%	59,38%	3,00	5.273.805.714	0,00%	0,00%		
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	0,00		0,00		3	460.202.300	-	31.840.912	1	81.549.903	1	191.444.187		-	2	304.835.002	66,67%	66,24%	2,00	304.835.002	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	60,33%	59,72%					
																		Predikat Kinerja	Rendah	Rendah					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							3.854.346.120		48.770.397		310.985.839		1.254.517.475		-		1.614.273.711		41,88%		1.614.273.711		0,00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			0,00%				0,00%		
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0,00		0,00		5			-	-	-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Dokumen)	0,00		0,00		4			-	-	-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									-	-		-	-		-	-			0,00%			-		0,00%	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)	0,00		0,00		15			-	-	-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	0,00		0,00		50			-	-	-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat" (Persen)	0,00		0,00		100	3.854.346.120	-	48.770.397	-	310.985.839	-	1.254.517.475		-	-	1.614.273.711	0,00%	41,88%	0,00	1.614.273.711	0,00%	0,00%		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00		0,00		15	3.027.703.800		35.543.814	5	286.328.047	3	1.232.397.467		-	8	1.554.269.328	53,33%	51,33%	8,00	1.554.269.328	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	826.642.320	-	13.226.583	5	24.657.792	-	22.120.008	-	-	5	60.004.383	16,67%	7,26%	5,00	60.004.383	0,00%	0,00%	
																			</					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)				Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)				SKPD Penanggungjawab	
			6					I		II		III		IV			12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
			5		7			8		9		10		11			K		Rp			K		Rp			
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomen dasi)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomen dasi)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar* (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	15	940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	215.256.898	-	105.461.400	-	79.135.400	-	7.500.000	-	-	-	192.096.800	0,00%	89,24%	0,00	192.096.800	0,00%	0,00%	-	-		
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	172.096.800	-	102.961.400	2	69.135.400	-	-	-	-	2	172.096.800	100,00%	100,00%	2,00	172.096.800	0,00%	0,00%	-	-		
Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	5	43.160.098	-	2.500.000	2	10.000.000	1	7.500.000	-	-	3	20.000.000	60,00%	46,34%	3,00	20.000.000	0,00%	0,00%	-	-		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																								DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	0	1.866.115.953	-	648.585.134	-	207.290.210	-	615.931.195	-	374.811.400	-	1.846.617.939	0,00%	98,96%	0,00	1.846.617.939	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Destinasi Strategis Provinsi yang Diembanakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	1.866.115.953	-	648.585.134	-	207.290.210	-	615.931.195	-	374.811.400	-	1.846.617.939	0,00%	98,96%	0,00	1.846.617.939	0,00%	0,00%	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																		0,00%	98,96%					

II - 381

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Temak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Temak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	440.923.856	3	5.000.000	3	17.820.000	3	188.377.653	3	228.600.868	12	439.798.521	100,00%	99,74%	12,00	439.798.521	0,00%	0,00%		
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi (Hektar 70 Ekor)	0,00	-	0,00	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	100,00%	0,00%	1000,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	0,00	-	0,00	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	0,00	-	0,00	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	83,60%								
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							5.983.820.684		7.500.000		597.224.774		2.344.423.460		2.412.950.412		5.362.098.646		89,61%		5.362.098.646		0,00%	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	5.983.820.684	-	7.500.000	-	597.224.774	-	2.344.423.460	-	2.412.950.412	-	5.362.098.646	0,00%	89,61%	0,00	5.362.098.646	0,00%	0,00%		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	167.880.000	3	7.500.000	3	11.250.000	3	84.790.000	3	63.880.000	12	167.420.000	100,00%	99,73%	12,00	167.420.000	0,00%	0,00%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	5.815.940.684	-	-	-	585.974.774	-	2.259.633.460	3	2.349.070.412	3	5.194.678.646	100,00%	89,32%	3,00	5.194.678.646	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	89,61%								
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi								
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							476.394.431		29.010.000		241.073.395		73.025.316		126.814.040		469.922.751		98,64%		469.922.751		0,00%	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	153.169.085	-	21.510.000	-	50.424.000	-	54.843.668	100	24.554.040	100	151.331.708	100,00%	98,80%	100,00	151.331.708	0,00%	0,00%		
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	153.169.085	-	21.510.000	-	50.424.000	-	54.843.668	3	24.554.040	3	151.331.708	100,00%	98,80%	3,00	151.331.708	0,00%	0,00%		
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	292.443.162	-	2.500.000	-	183.149.395	-	9.899.464	-	92.260.000	-	287.808.859	0,00%	98,42%	0,00	287.808.859	0,00%	0,00%		
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	292.443.162	-	2.500.000	-	183.149.395	-	9.899.464	3	92.260.000	3	287.808.859	100,00%	98,42%	3,00	287.808.859	0,00%	0,00%		
Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	30.782.184	-	5.000.000	-	7.500.000	-	8.282.184	100	10.000.000	100	30.782.184	100,00%	100,00%	100,00	30.782.184	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
			6			7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)	0,00	-	0,00	-	1	30.782.184	-	5.000.000	-	7.500.000	-	8.282.184	1	10.000.000	1	30.782.184	100,00%	100,00%	1,00	30.782.184	0,00%	0,00%	
																		100,00%	98,64%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																								
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				-		-	3.890.026.460		245.333.100		716.717.960		902.182.300		862.119.300		2.726.352.660		70,09%		2.726.352.660		0,00%	DINAS KEHUTANAN
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dikelola (12 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	62.215.360	3	2.500.000	-	5.776.000	-	4.965.000	-	30.721.400	-	43.962.400	0,00%	70,66%	0,00	43.962.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	62.215.360	2	2.500.000	2	5.776.000	2	4.965.000	2	30.721.400	2	43.962.400	100,00%	70,66%	2,00	43.962.400	0,00%	0,00%	
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Izin pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (izin)	0,00	-	0,00	-	4	14.417.032	1	-	-	-	-	4.262.000	-	-	-	4.262.000	0,00%	29,56%	0,00	4.262.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	14.417.032	-	-	-	-	-	4.262.000	-	-	-	4.262.000	0,00%	29,56%	0,00	4.262.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara (Ha)	0,00	-	0,00	-	810	1.012.995.180	200	4.380.000	-	9.748.960	-	144.443.000	-	375.174.900	-	533.746.860	0,00%	52,69%	0,00	533.746.860	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	110.000.000	1	4.380.000	1	4.969.960	1	40.550.000	1	3.230.000	1	53.129.960	100,00%	48,30%	1,00	53.129.960	0,00%	0,00%	
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	0,00	-	0,00	-	30	413.936.480	30	-	30	1.119.000	30	103.893.000	30	206.989.000	30	312.001.000	100,00%	75,37%	30,00	312.001.000	0,00%	0,00%	
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			-		-		43.288.980		-		-		-		-		-	0,00%			-		0,00%	
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	191.302.520	-	-	-	-	-	-	-	30.063.900	-	30.063.900	0,00%	15,72%	0,00	30.063.900	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	57.394.500	3	-	3	3.660.000	3	-	3	-	3	3.660.000	25,00%	6,38%	3,00	3.660.000	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	0,00	-	0,00	-	8	197.072.700	-	-	-	-	-	-	-	134.892.000	-	134.892.000	0,00%	68,45%	0,00	134.892.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan (laporan)	0,00	-	0,00	-	36	2.734.040.000	8	238.453.100	-	688.693.000	-	741.732.300	-	446.648.000	-	2.115.526.400	0,00%	77,38%	0,00	2.115.526.400	0,00%	0,00%	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (Hektar)	0,00	-	0,00	-	800	2.710.766.800	800	238.453.100	800	685.720.000	800	741.732.300	800	446.648.000	800	2.112.553.400	100,00%	77,93%	800,00	2.112.553.400	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	23.273.200	-	-	6	2.973.000	6	-	6	-	6	2.973.000	100,00%	12,77%	6,00	2.973.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang difasilitasi dan diawasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	66.358.888	1	-	-	12.500.000	-	6.780.000	-	9.575.000	-	28.855.000	0,00%	43,48%	0,00	28.855.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				I				II				III				IV				12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				5				6		7		8		9		10		11		K		Rp			K		Rp		K	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	324.047.000	-	26.476.000	-	31.442.000	-	181.277.000	1	82.511.700	1	321.706.700	100,00%	99,28%	1,00	321.706.700	0,00%	0,00%							
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT (Persen)	0,00	-	0,00	-	5	25.953.000	-	-	-	-	-	-	-	20.563.000	-	20.563.000	0,00%	79,23%	0,00	20.563.000	0,00%	0,00%							
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	20.573.000	-	-	-	-	-	-	1	20.563.000	1	20.563.000	100,00%	99,95%	1,00	20.563.000	0,00%	0,00%							
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	98,46%	97,79%												
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						869.875.460		117.310.436		214.952.372		124.474.076		402.278.820		859.015.704		98,75%		859.015.704		0,00%			DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tingkat Ketataan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan (Persen)	0,00	-	0,00	-	25	140.228.000	-	575.640	-	3.115.336	-	17.769.344	-	115.351.948	-	136.812.268	0,00%	97,56%	0,00	136.812.268	0,00%	0,00%							
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	31.162.000	-	-	-	-	-	554.944	1	29.964.868	1	30.519.812	100,00%	97,94%	1,00	30.519.812	0,00%	0,00%							
Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	68.864.000	-	-	-	1.436.256	-	7.980.000	1	58.939.080	1	68.355.336	100,00%	99,26%	1,00	68.355.336	0,00%	0,00%							
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	40.202.000	-	575.640	-	1.679.080	-	9.234.400	1	26.448.000	1	37.937.120	100,00%	94,37%	1,00	37.937.120	0,00%	0,00%							
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Tingkat Ketataan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) (Persen)	0,00	-	0,00	-	25	637.843.020	-	100.580.306	-	186.620.204	-	95.156.080	-	251.673.248	-	634.029.838	0,00%	99,40%	0,00	634.029.838	0,00%	0,00%							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	70.000.000	-	49.332.387	-	9.094.204	-	-	1	11.218.200	1	69.644.791	100,00%	99,49%	1,00	69.644.791	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	312.337.000	-	21.857.919	7	137.666.000	1	38.986.080	2	113.337.400	10	311.847.399	100,00%	99,84%	10,00	311.847.399	0,00%	0,00%	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	255.506.020	-	29.390.000	-	39.860.000	-	56.170.000	1	127.117.648	1	252.537.648	100,00%	98,84%	1,00	252.537.648	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tingkat Kelataan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) (Persetan)	0,00	-	0,00	-	25	57.931.200	-	15.238.650	-	-	-	11.548.652	-	28.308.544	-	55.095.846	0,00%	95,11%	0,00	55.095.846	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	22.611.000	-	13.982.610	-	-	-	-	1	6.717.980	1	20.700.590	100,00%	91,55%	1,00	20.700.590	0,00%	0,00%	
Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	22.588.200	-	493.520	2	-	-	-	2	21.590.564	4	22.084.084	100,00%	97,77%	4,00	22.084.084	0,00%	0,00%	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	12.732.000	-	762.520	-	-	-	11.548.652	1	-	1	12.311.172	100,00%	96,69%	1,00	12.311.172	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	16	
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tingkat Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Persen)	0,00	-	0,00	-	10	33.873.240	-	915.840	-	25.216.832	-	-	-	6.945.080	-	33.077.752	0,00%	97,65%	0,00	33.077.752	0,00%	0,00%	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	33.873.240	-	915.840	-	25.216.832	-	-	1	6.945.080	1	33.077.752	100,00%	97,65%	1,00	33.077.752	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan (Persen)	0,00	-	0,00	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase pemilik usaha pertambangan terhadap aspek administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan (Persen)	0,00	-	0,00	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,75%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							670.000.000		131.210.595		60.016.900		48.285.300		409.999.510		649.512.305		96,94%		649.512.305		0,00%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Ketenikn (Persen)	0,00	-	0,00	-	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Pemilik instalasi Pembangkit Listrik Untuk kepentingan Sendiri yang Memenuhi Kewajiban aspek perizinan, Lingkungan Hidup dan Ketenikn (Persen)	0,00	-	0,00	-	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tingkat Keluasan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	-	0,00	-	0	670.000.000	-	131.210.595	-	60.016.900	-	48.285.300	-	409.999.510	-	649.512.305	0,00%	96,94%	0,00	649.512.305	0,00%	0,00%	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	-	0,00	-	1	107.000.000	-	80.361.595	1	20.489.000	-	-	-	-	1	100.850.595	100,00%	94,25%	1,00	100.850.595	0,00%	0,00%	
	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	-	0,00	-	120	463.000.000	-	20.455.000	-	14.750.900	-	25.357.800	120	388.530.510	120	449.094.210	100,00%	97,00%	120,00	449.094.210	0,00%	0,00%	
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	30.394.000	-	24.777.000	-	22.927.500	1	21.469.000	1	99.567.500	100,00%	99,57%	1,00	99.567.500	0,00%	0,00%	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	96,94%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																								
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																								DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																								
	Persentase Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Persen)	0,00	-	0,00	-	41	145.309.810	10	9.915.000	24	86.001.600	33	6.300.000	41	38.395.000	41	140.611.600	100,00%	96,77%	41,00	140.611.600	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	58.759.360	2	9.915.000	2	-	2	6.300.000	2	38.395.000	2	54.610.000	33,33%	92,94%	2,00	54.610.000	0,00%	0,00%	
Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	86.550.450	-	-	-	86.001.600	-	-	-	-	-	86.001.600	0,00%	99,37%	0,00	86.001.600	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		13,48%	96,77%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						547.492.786		56.301.691		100.404.425		81.568.406		64.926.280		303.200.802		55,38%		303.200.802		0,00%		DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	-	0,00	-	45	66.070.961	8	-	18	6.752.525	33	7.113.486	45	8.372.600	45	22.238.611	100,00%	33,66%	45,00	22.238.611	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	0,00	-	0,00	-	6	66.070.961	-	-	-	6.752.525	-	7.113.486	-	8.372.600	-	22.238.611	0,00%	33,66%	0,00	22.238.611	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Berdasarkan Komoditi Potensial Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	50	426.843.825	15	56.301.691	38	65.949.900	44	72.174.920	50	31.993.680	50	226.420.191	100,00%	53,05%	50,00	226.420.191	0,00%	0,00%	
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	0,00	-	0,00	-	1	426.843.825	-	56.301.691	-	65.949.900	-	72.174.920	-	31.993.680	-	226.420.191	0,00%	53,05%	0,00	226.420.191	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	-	0,00	-	35	54.578.000	7	-	15	27.702.000	25	2.280.000	35	24.560.000	35	54.542.000	100,00%	99,93%	35,00	54.542.000	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	54.578.000	-	-	-	27.702.000	-	2.280.000	-	24.560.000	-	54.542.000	0,00%	99,93%	0,00	54.542.000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	55,38%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah					
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						4.657.063.289		-		13.420.000		4.284.067.826		83.703.400		4.381.191.226		94,08%		4.381.191.226		0,00%		DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Persen)	0,00	-	0,00	-	14,9	4.657.063.289	4	-	15	13.420.000	-	4.284.067.826	-	83.703.400	-	4.381.191.226	0,00%	94,08%	0,00	4.381.191.226	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	0,00	-	0,00	-	220	4.657.063.289	-	-	-	13.420.000	-	4.284.067.826	-	83.703.400	-	4.381.191.226	0,00%	94,08%	0,00	4.381.191.226	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab							
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	94,08%						
								Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																															
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																									DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN						
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi (%)	0,00	-	0,00	-	67	990.037.920	15	115.454.750	35	262.357.790	55	97.706.800	67	367.497.490	67	843.016.830	100,00%	85,15%	67,00	843.016.830	0,00%	0,00%								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	175.544.770	-	89.754.750	-	81.465.500	-	2.230.000	-	-	-	173.450.250	0,00%	98,81%	0,00	173.450.250	0,00%	0,00%								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	100.325.880	-	-	-	55.950.000	-	11.060.000	-	27.226.000	-	94.236.000	0,00%	93,93%	0,00	94.236.000	0,00%	0,00%								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	676.561.780	-	25.700.000	-	120.862.290	-	80.426.800	-	333.147.489	-	560.136.579	0,00%	82,79%	0,00	560.136.579	0,00%	0,00%								
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	37.605.490	-	-	-	4.080.000	-	3.990.000	-	7.124.001	-	15.194.001	0,00%	40,40%	0,00	15.194.001	0,00%	0,00%								
		</																													

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	125.000.000	1	22.678.935	-	32.317.458	-	28.493.371	-	41.159.699	1	124.649.463	33,33%	99,72%	1,00	124.649.463	0,00%	0,00%	
Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	30.000.000	-	1.584.760	-	13.534.917	-	6.000.000	-	8.630.000	-	29.749.677	0,00%	99,17%	0,00	29.749.677	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	50.000.000	25	828.099	-	12.770.000	-	3.233.471	-	32.399.396	-	49.230.966	0,00%	98,46%	0,00	49.230.966	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	50.000.000	-	828.099	-	12.770.000	-	3.233.471	-	32.399.396	-	49.230.966	0,00%	98,46%	0,00	49.230.966	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	180.000.000	25	17.770.028	-	47.102.756	-	40.260.303	-	73.355.625	-	178.488.712	0,00%	99,16%	0,00	178.488.712	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	42.000.000	-	4.780.600	-	9.798.796	-	7.254.124	-	19.822.830	-	41.656.350	0,00%	99,18%	0,00	41.656.350	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	38.859.010	-	2.989.428	-	9.330.000	-	12.241.179	-	13.588.441	-	38.149.048	0,00%	98,17%	0,00	38.149.048	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	99.140.990	-	10.000.000	-	27.973.960	-	20.765.000	-	39.944.354	-	98.683.314	0,00%	99,54%	0,00	98.683.314	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	10,82%	99,25%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						149.172.500	37.003.288		22.801.732		24.792.488		63.886.236		148.483.744		99,54%			148.483.744		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pemb. Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	94.172.500	25	34.503.288	-	16.680.000	-	14.660.452	-	27.888.120	-	93.731.860	0,00%	99,53%	0,00	93.731.860	0,00%	0,00%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	46.000.000	-	20.503.828	-	8.340.000	-	6.038.452	-	10.813.200	-	45.695.480	0,00%	99,34%	0,00	45.695.480	0,00%	0,00%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	48.172.500	-	13.999.460	-	8.340.000	-	8.622.000	-	17.074.920	-	48.036.380	0,00%	99,72%	0,00	48.036.380	0,00%	0,00%	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	55.000.000	25	2.500.000	-	6.121.732	-	10.132.036	-	35.998.116	-	54.751.884	0,00%	99,55%	0,00	54.751.884	0,00%	0,00%	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	55.000.000	-	2.500.000	-	6.121.732	-	10.132.036	-	35.998.116	-	54.751.884	0,00%	99,55%	0,00	54.751.884	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,54%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						515.931.294	48.064.667		184.379.323		180.972.726		98.840.165		512.256.881		99,29%			512.256.881		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	0,00		0,00		46		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada (Persen)	0,00		0,00		85	217.670.778	-	20.961.422	-	94.232.920	-	91.752.498	-	10.659.000	-	217.605.840	0,00%	99,97%	0,00	217.605.840	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00		0,00		1	114.939.843	-	6.703.506	-	67.187.060	-	37.696.755	-	3.339.000	-	114.926.321	0,00%	99,99%	0,00	114.926.321	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota (Dokumen)	0,00		0,00		6	49.982.155	1	1.675.000	-	8.112.860	-	32.830.923	-	7.320.000	1	49.938.783	16,67%	99,91%	1,00	49.938.783	0,00%	0,00%	
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	0,00		0,00		3	52.748.780	1	12.582.916	-	18.933.000	-	21.224.820	-	-	1	52.740.736	33,33%	99,98%	1,00	52.740.736	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Pemprov. (Poin)	0,00		0,00		74		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada (Persen)	0,00		0,00		65	298.260.516	-	27.103.245	-	90.146.403	-	89.220.228	-	88.181.165	-	294.651.041	0,00%	98,79%	0,00	294.651.041	0,00%	0,00%	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (Dokumen)	0,00		0,00		8	59.628.796	-	-	-	37.965.796	-	9.833.508	-	11.676.880	-	59.476.184	0,00%	99,74%	0,00	59.476.184	0,00%	0,00%	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja (Dokumen)	0,00		0,00		7	51.805.163	2	15.037.186	-	22.220.000	-	10.171.000	-	4.370.000	2	51.798.186	28,57%	99,99%	2,00	51.798.186	0,00%	0,00%	
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja (Laporan)	0,00		0,00		1	50.264.298	-	5.729.000	-	7.120.607	-	25.914.000	-	11.199.060	-	49.962.667	0,00%	99,40%	0,00	49.962.667	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Tatalektasa Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan (Dokumen)	0,00		0,00		30	53.266.453	5	4.444.987	-	11.130.000	-	10.371.040	-	26.658.800	5	52.604.827	16,67%	98,76%	5,00	52.604.827	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik (Dokumen)	0,00		0,00		3	83.295.807	-	1.892.072	-	11.710.000	-	32.930.680	-	34.276.425	-	80.809.177	0,00%	97,01%	0,00	80.809.177	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	9,61%	99,29%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						719.196.956		137.078.440		207.051.366		127.813.206		234.606.788		706.549.800		98,24%		706.549.800		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia (Dokumen)	0,00		0,00		5	471.067.116	-	99.966.920	-	147.470.016	-	56.685.226	-	161.914.938	-	466.037.100	0,00%	98,93%	0,00	466.037.100	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	0,00		0,00		3	396.002.000	2	91.363.640	-	116.194.300	-	48.720.226	-	138.875.018	2	395.153.184	66,67%	99,79%	2,00	395.153.184	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	0,00		0,00		2	29.996.000	1	4.853.280	-	4.830.000	-	-	-	16.131.520	1	25.814.800	50,00%	86,06%	1,00	25.814.800	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	0,00		0,00		1	45.069.116	-	3.750.000	-	26.445.716	-	7.965.000	-	6.908.400	-	45.069.116	0,00%	100,00%	0,00	45.069.116	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia (Dokumen)	0,00		0,00		7	221.625.840	-	33.361.520	-	49.482.050	-	65.254.230	-	69.129.650	-	217.227.450	0,00%	98,02%	0,00	217.227.450	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	0,00		0,00		3	101.625.840	1	22.338.600	-	26.463.590	-	10.708.750	-	38.455.650	1	97.966.590	33,33%	96,40%	1,00	97.966.590	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	120.000.000	1	11.022.920	1	23.018.460	-	54.545.480	-	30.674.000	2	119.260.860	100,00%	99,38%	2,00	119.260.860	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	26.504.000	-	3.750.000	-	10.099.300	-	5.873.750	-	3.562.200	-	23.285.250	0,00%	87,86%	0,00	23.285.250	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	26.504.000	-	3.750.000	-	10.099.300	-	5.873.750	-	3.562.200	-	23.285.250	0,00%	87,86%	0,00	23.285.250	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		60,19%	98,24%					
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Tinggi					
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			-		-	12.401.731.203		82.020.000		2.057.130.012		3.494.386.798		4.345.981.927		9.979.518.737		80,47%		9.979.518.737		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	7.286.619.531	-	74.520.000	-	2.041.598.284	-	3.461.419.026	-	1.664.408.882	-	7.241.946.192	0,00%	99,39%	0,00	7.241.946.192	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	0,00	-	0,00	-	151	4.216.999.707	-	61.020.000	123	272.542.500	-	3.138.065.720	-	710.746.750	123	4.182.374.970	81,46%	99,18%	123,00	4.182.374.970	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	4	3.069.619.824	-	13.500.000	3	1.769.055.784	-	323.353.306	-	953.662.132	3	3.059.571.222	75,00%	99,67%	3,00	3.059.571.222	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	40.111.672	-	3.750.000	-	2.443.750	-	10.414.022	-	22.403.513	-	39.011.285	0,00%	97,26%	0,00	39.011.285	0,00%	0,00%	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	40.111.672	-	3.750.000	-	2.443.750	-	10.414.022	-	22.403.513	-	39.011.285	0,00%	97,26%	0,00	39.011.285	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayan Dasar	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.075.000.000	-	3.750.000	-	13.087.978	-	22.553.750	-	2.698.169.532	-	2.698.561.260	0,00%	53,17%	0,00	2.698.561.260	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.075.000.000	-	3.750.000	-	13.087.978	-	22.553.750	-	2.698.169.532	-	2.698.561.260	0,00%	53,17%	0,00	2.698.561.260	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		46,26%	80,47%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Tinggi					
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			-		-	724.911.844		165.633.570		112.253.840		157.652.985		285.467.284		721.007.679		99,46%		721.007.679		0,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	547.233.412	40	131.747.320	-	91.910.840	-	116.746.515	-	204.438.249	40	544.842.924	40,00%	99,56%	40,00	544.842.924	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	35	216.825.235	7	56.045.970	7	34.346.990	6	59.988.465	4	65.569.739	24	215.951.164	68,57%	99,60%	24,00	215.951.164	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	470	103.195.152	173	21.227.550	105	17.943.800	131	11.714.500	150	51.502.450	559	102.388.300	118,94%	99,22%	559,00	102.388.300	0,00%	0,00%	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	540	58.274.565	193	6.481.900	138	11.864.350	151	1.518.750	169	37.728.010	651	57.593.010	120,56%	98,83%	651,00	57.593.010	0,00%	0,00%	
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	135	168.938.460	43	47.991.900	27	27.755.700	34	43.524.800	44	49.638.050	148	168.910.450	109,63%	99,98%	148,00	168.910.450	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																								SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (Persen)	0,00		0,00		100	5.393.047.423	-	689.745.397	-	1.578.952.342	-	1.418.327.015	-	1.278.636.806	-	4.965.661.560	0,00%	92,08%	0,00	4.965.661.560	0,00%	0,00%	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		2	843.402.672	1	23.639.860	-	486.682.736	-	90.123.065	-	182.997.182	1	783.442.843	50,00%	92,89%	1,00	783.442.843	0,00%	0,00%	
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	0,00		0,00		6	3.243.745.583	2	666.105.537	2	857.789.706	-	1.068.464.150	-	539.274.960	4	3.131.634.353	66,67%	96,54%	4,00	3.131.634.353	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00		0,00		6	203.999.480	-	-	1	98.095.250	-	91.200.000	-	7.320.400	1	196.615.650	16,67%	96,38%	1,00	196.615.650	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00		0,00		6	926.918.996	-	-	-	136.384.650	-	11.080.800	-	541.781.064	-	689.246.514	0,00%	74,36%	0,00	689.246.514	0,00%	0,00%	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun (Dokumen)	0,00		0,00		0	174.980.692	-	-	-	-	-	157.459.000	-	7.263.200	-	164.722.200	0,00%	94,14%	0,00	164.722.200	0,00%	0,00%	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran (Persen)	0,00		0,00		100	4.793.803.480	-	-	-	1.094.180.452	-	1.583.917.397	-	608.239.125	-	3.286.336.974	0,00%	68,55%	0,00	3.286.336.974	0,00%	0,00%	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0,00		0,00		2	103.673.340	-	-	-	-	-	-	-	101.389.650	-	101.389.650	0,00%	97,80%	0,00	101.389.650	0,00%	0,00%	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00		0,00		2	96.335.140	-	-	-	-	-	8.500.000	-	84.658.350	-	93.158.350	0,00%	96,70%	0,00	93.158.350	0,00%	0,00%	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Laporan)	0,00		0,00		1	1.450.474.960	-	-	-	-	-	-	-	91.072.250	-	91.072.250	0,00%	6,28%	0,00	91.072.250	0,00%	0,00%	
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	0,00		0,00		1	1.574.127.280	-	-	-	-	-	1.171.646.015	-	299.678.875	-	1.471.324.890	0,00%	93,47%	0,00	1.471.324.890	0,00%	0,00%	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0,00		0,00		1	1.569.192.760	-	-	1	1.094.180.452	-	403.771.382	-	31.440.000	1	1.529.391.834	100,00%	97,46%	1,00	1.529.391.834	0,00%	0,00%	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persen)	0,00		0,00		100	3.845.073.432	-	1.143.277.325	-	1.681.345.425	-	661.044.590	-	87.709.550	-	3.573.376.890	0,00%	92,93%	0,00	3.573.376.890	0,00%	0,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0,00		0,00		2	600.640.580	2	483.455.105	-	8.834.000	-	44.817.125	-	12.695.000	2	549.801.230	100,00%	91,54%	2,00	549.801.230	0,00%	0,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00		0,00		2	641.018.432	1	312.888.680	2	231.273.440	-	60.119.200	-	1.966.150	3	606.247.470	150,00%	94,58%	3,00	606.247.470	0,00%	0,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0,00		0,00		2	642.597.400	1	174.627.340	1	194.446.000	-	223.725.940	-	11.403.900	2	604.203.180	100,00%	94,03%	2,00	604.203.180	0,00%	0,00%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00		0,00		2	726.927.492	1	172.306.200	1	334.656.480	-	145.557.875	-	7.452.400	2	659.972.955	100,00%	90,79%	2,00	659.972.955	0,00%	0,00%	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0,00		0,00		1	61.573.100	-	-	-	-	-	14.122.150	-	-	-	14.122.150	0,00%	22,94%	0,00	14.122.150	0,00%	0,00%	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	0,00		0,00		2	273.140.308	-	-	-	29.872.000	-	167.027.100	-	45.358.100	-	242.257.200	0,00%	88,69%	0,00	242.257.200	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	899.176.120	-	-	-	882.263.505	-	5.675.200	-	8.834.000	-	896.772.705	0,00%	99,73%	0,00	896.772.705	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Dalam TUPOKSI (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	8.260.040.892	-	55.000.000	-	1.497.784.800	-	2.669.749.560	-	1.761.162.358	-	5.983.696.718	0,00%	72,44%	0,00	5.983.696.718	0,00%	0,00%	
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.321.068.940	-	-	-	33.569.000	-	1.011.795.960	-	1.152.547.458	-	2.197.912.418	0,00%	94,69%	0,00	2.197.912.418	0,00%	0,00%	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0,00	-	0,00	-	28	1.400.167.440	28	-	28	497.000.000	-	504.000.000	-	98.000.000	14	1.099.000.000	50,00%	78,49%	14,00	1.099.000.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	336.223.440	8	-	8	105.000.000	-	112.000.000	-	28.000.000	4	245.000.000	50,00%	72,87%	4,00	245.000.000	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	733.000.304	1	55.000.000	2	104.113.200	-	242.802.000	-	153.048.300	3	554.963.500	50,00%	75,71%	3,00	554.963.500	0,00%	0,00%	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	89.968.040	-	-	-	-	-	-	-	73.605.000	-	73.605.000	0,00%	81,81%	0,00	73.605.000	0,00%	0,00%	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	3.379.612.728	2	-	1	758.102.600	-	799.151.600	-	255.961.600	3	1.813.215.800	50,00%	53,65%	3,00	1.813.215.800	0,00%	0,00%	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diserap dan Dihimpun oleh DPRD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	16.849.491.095	-	6.829.388.260	-	1.616.062.520	-	1.326.429.500	-	4.712.527.440	-	14.484.407.720	0,00%	85,96%	0,00	14.484.407.720	0,00%	0,00%	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	225	8.533.761.000	90	3.048.429.740	45	1.524.447.020	-	1.259.323.000	-	1.691.643.240	135	7.523.843.000	60,00%	88,17%	135,00	7.523.843.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	96.223.495	1	5.600.000	-	8.400.000	-	36.706.500	-	17.785.600	1	68.492.100	100,00%	71,18%	1,00	68.492.100	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	90	8.219.506.600	45	3.775.358.520	-	83.215.500	-	30.400.000	-	3.003.098.600	45	6.892.072.620	50,00%	83,85%	45,00	6.892.072.620	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	308.042.400	-	-	-	35.336.000	-	23.741.425	-	174.847.850	-	233.925.275	0,00%	75,94%	0,00	233.925.275	0,00%	0,00%	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	203.065.640	-	-	-	-	-	-	-	174.847.850	-	174.847.850	0,00%	86,10%	0,00	174.847.850	0,00%	0,00%	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	104.976.760	-	-	1	35.336.000	-	23.741.425	-	-	1	59.077.425	25,00%	56,28%	1,00	59.077.425	0,00%	0,00%	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Cakupan Kerja Sama Daerah Yang Diselesaikan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	355.535.791	-	-	-	25.244.700	-	134.240.500	-	77.987.000	-	237.472.200	0,00%	66,79%	0,00	237.472.200	0,00%	0,00%	
Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	201.138.000	-	-	-	-	-	82.900.000	-	27.725.000	-	110.625.000	0,00%	55,00%	0,00	110.625.000	0,00%	0,00%	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	154.397.791	1	-	-	25.244.700	-	51.340.500	-	50.262.000	1	126.847.200	50,00%	82,16%	1,00	126.847.200	0,00%	0,00%	
Facilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	11.519.339.476	-	463.709.930	-	2.052.187.841	-	4.032.869.419	-	1.137.860.358	-	7.686.627.548	0,00%	66,73%	0,00	7.686.627.548	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	94	8.898.238.746	45	347.653.830	-	1.039.531.115	-	2.856.858.938	-	954.351.525	45	5.198.395.408	47,87%	58,42%	45,00	5.198.395.408	0,00%	0,00%	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	51.468.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	332.373.072	-	-	1	327.145.340	-	-	-	-	1	327.145.340	50,00%	98,43%	1,00	327.145.340	0,00%	0,00%	
Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	60	2.072.239.284	10	44.504.300	20	608.203.586	-	1.176.010.481	-	176.418.833	30	2.005.137.200	50,00%	96,76%	30,00	2.005.137.200	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			6			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			5	Rp		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	213.410.330	-	34.146.396	-	25.730.508	-	55.432.837	-	97.281.800	-	212.591.541	0,00%	99,62%	0,00	212.591.541	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	0,00	-	0,00	-	4	118.247.400	1	2.500.000	1	4.472.400	1	25.172.161	1	85.303.800	4	117.448.361	100,00%	99,32%	4,00	117.448.361	0,00%	0,00%	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,00	-	0,00	-	17	10.804.930	4	-	4	9.950.000	4	150.000	5	700.000	17	10.800.000	100,00%	99,95%	17,00	10.800.000	0,00%	0,00%	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	84.358.000	3	31.646.396	6	11.308.108	6	30.110.676	4	11.278.000	19	84.343.180	100,00%	99,98%	19,00	84.343.180	0,00%	0,00%	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-		78.171.888		61.963.706		1.530.000		8.877.702		4.995.600		77.367.008		98,97%		77.367.008		0,00%	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0,00	-	0,00	-	2	33.606.388	-	17.707.760	-	1.530.000	-	8.877.702	2	4.995.600	2	33.111.062	100,00%	98,53%	2,00	33.111.062	0,00%	0,00%	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	44.565.500	-	44.255.946	-	-	-	-	2	-	2	44.255.946	100,00%	99,31%	2,00	44.255.946	0,00%	0,00%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								93,09%	99,52%						
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1.821.971.592		158.992.839		348.887.299		455.759.205		637.848.054		1.601.487.397		87,90%		1.601.487.397		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	578.971.212	-	91.600.370	-	72.396.243	-	201.886.157	-	210.027.558	-	575.910.328	0,00%	99,47%	0,00	575.910.328	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	27.080.000	-	26.700.000	-	180.000	-	-	2	-	2	26.880.000	100,00%	99,26%	2,00	26.880.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.508.830	-	1.490.000	-	-	-	-	1	-	1	1.490.000	100,00%	98,75%	1,00	1.490.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	21.222.170	-	-	-	7.740.000	-	-	1	13.478.000	1	21.218.000	100,00%	99,98%	1,00	21.218.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	86.258.810	-	8.259.580	-	26.065.405	-	22.208.216	2	28.497.757	2	85.030.958	50,00%	98,58%	2,00	85.030.958	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	9.812.820	-	-	-	-	-	9.575.225	2	-	2	9.575.225	100,00%	97,58%	2,00	9.575.225	0,00%	0,00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.695.680	-	2.920.000	-	1.020.000	-	400.000	1	340.000	1	4.680.000	100,00%	99,67%	1,00	4.680.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	29.261.640	-	-	-	-	-	15.560.000	1	13.696.600	1	29.256.600	100,00%	99,98%	1,00	29.256.600	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	399.131.262	-	52.230.790	-	37.390.838	-	154.142.716	2	154.015.201	2	397.779.545	50,00%	99,66%	2,00	397.779.545	0,00%	0,00%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	515.310.710	-	25.323.189	-	221.282.356	-	197.946.348	-	69.582.260	-	514.134.153	0,00%	99,77%	0,00	514.134.153	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	97.077.850	-	18.508.000	-	23.721.410	-	35.596.600	1	18.549.800	1	96.375.810	100,00%	99,28%	1,00	96.375.810	0,00%	0,00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	8.394.400	-	1.725.000	-	705.000	-	2.836.000	1	3.126.000	1	8.392.000	100,00%	99,97%	1,00	8.392.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	38.294.510	-	-	-	-	-	50.000	1	38.215.260	1	38.265.260	100,00%	99,92%	1,00	38.265.260	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	371.543.950	-	5.090.189	-	196.855.946	-	159.463.748	-	9.691.200	-	371.101.083	0,00%	99,88%	0,00	371.101.083	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	727.689.670	-	42.069.280	-	55.208.700	-	55.926.700	-	358.238.236	-	511.442.916	0,00%	70,28%	0,00	511.442.916	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	61.901.720	-	19.291.000	-	18.872.600	-	16.775.000	1	6.890.000	1	61.828.600	100,00%	99,88%	1,00	61.828.600	0,00%	0,00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.776.900	-	-	-	-	-	2.144.000	1	1.541.000	1	3.685.000	100,00%	97,57%	1,00	3.685.000	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	14.219.400	-	-	-	-	-	5.000.000	-	9.206.000	-	14.206.000	0,00%	99,91%	0,00	14.206.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.772.710	-	-	-	-	-	-	1	1.714.893	1	1.714.893	100,00%	96,74%	1,00	1.714.893	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	573.506.320	-	17.253.280	-	9.996.000	-	32.007.700	2	303.848.400	2	363.105.380	100,00%	63,31%	2,00	363.105.380	0,00%	0,00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.907.640	-	3.850.000	-	-	-	-	1	40.293	1	3.890.293	100,00%	99,56%	1,00	3.890.293	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	21.698.110	-	-	-	-	-	-	1	21.691.000	1	21.691.000	100,00%	99,97%	1,00	21.691.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	46.906.870	-	1.675.000	-	26.340.100	-	-	1	13.306.650	1	41.321.750	100,00%	88,09%	1,00	41.321.750	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																65,51%	87,90%							
Predikat Kinerja																Sedang	Tinggi							
KEUANGAN																								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD (Rencana)	0,00	-	0,00	-	100	1.414.043.638	-	213.104.790	-	219.801.654	-	164.584.925	-	801.243.322	-	1.398.734.691	0,00%	98,92%	0,00	1.398.734.691	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	42.601.532	-	-	-	8.690.121	1	20.305.000	1	13.140.000	2	42.135.121	100,00%	98,91%	2,00	42.135.121	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	31.292.874	-	-	-	797.000	1	30.104.000	1	-	2	30.901.000	100,00%	98,75%	2,00	30.901.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	1.200.438	-	826.500	-	-	42	-	-	-	42	826.500	100,00%	68,85%	42,00	826.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	2.867.141	-	-	-	-	-	1.479.620	42	1.340.000	42	2.819.620	100,00%	98,34%	42,00	2.819.620	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	1.560.300	-	1.392.020	-	-	-	-	-	-	-	1.392.020	0,00%	89,21%	0,00	1.392.020	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	2.229.980	-	-	-	-	-	-	42	1.851.980	42	1.851.980	100,00%	83,05%	42,00	1.851.980	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	336.541.861	-	40.220.255	-	31.010.180	-	33.434.660	-	227.621.355	-	332.286.450	0,00%	98,74%	0,00	332.286.450	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	143.700.855	-	-	-	20.423.730	1	64.731.305	1	58.270.900	2	143.425.935	100,00%	99,81%	2,00	143.425.935	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	338.514.311	-	19.582.800	-	27.574.953	1	2.310.000	-	282.181.587	1	331.649.340	100,00%	97,97%	1,00	331.649.340	0,00%	0,00%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	32.046.110	-	14.148.000	-	5.290.090	2	5.630.340	-	5.737.500	2	30.805.930	100,00%	96,13%	2,00	30.805.930	0,00%	0,00%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	32.840.610	-	16.032.500	-	16.407.000	-	-	2	110.000	2	32.549.500	100,00%	99,11%	2,00	32.549.500	0,00%	0,00%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	20.441.040	-	11.882.715	2	3.074.120	-	2.690.000	-	2.290.000	2	19.936.835	100,00%	97,53%	2,00	19.936.835	0,00%	0,00%	
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	120	428.206.586	-	109.020.000	90	106.534.460	-	3.900.000	30	208.700.000	120	428.154.460	100,00%	99,99%	120,00	428.154.460	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	by Persentase Ti Kabupaten terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi (Persen)	0,00	-	0,00	-	98	282.933.848	-	13.459.500	-	42.895.680	-	76.741.480	-	149.334.620	-	282.431.280	0,00%	99,82%	0,00	282.431.280	0,00%	0,00%	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan APBD Kabupaten/Kota)	0,00	-	0,00	-	12	129.461.686	3	5.000.000	3	11.838.200	3	16.952.000	3	95.234.620	12	129.024.820	100,00%	99,66%	12,00	129.024.820	0,00%	0,00%	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	74.350.708	2	-	4	14.210.000	3	6.123.600	3	54.000.000	12	74.333.600	100,00%	99,98%	12,00	74.333.600	0,00%	0,00%	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	64.712.180	-	4.810.000	6	8.020.000	3	51.865.880	3	-	12	64.695.880	100,00%	99,97%	12,00	64.695.880	0,00%	0,00%	
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	2.609.350	3	-	3	2.503.640	3	-	3	100.000	12	2.603.640	100,00%	99,78%	12,00	2.603.640	0,00%	0,00%	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.557.964	-	-	1	1.554.880	-	-	-	-	1	1.554.880	100,00%	99,80%	1,00	1.554.880	0,00%	0,00%	
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	10.241.960	-	3.649.500	30	4.768.960	-	1.800.000	-	-	30	10.218.460	100,00%	99,77%	30,00	10.218.460	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD (Persen)	0,00	-	0,00	-	94	559.999.999	-	135.883.370	-	135.972.857	-	95.529.804	-	186.430.130	-	553.816.161	0,00%	98,90%	0,00	553.816.161	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	191.682.256	3	53.622.370	3	25.857.057	3	47.966.604	3	63.619.930	12	191.065.961	100,00%	99,68%	12,00	191.065.961	0,00%	0,00%	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	152	36.438.093	152	10.225.200	-	7.591.000	-	4.759.000	-	12.855.000	152	35.430.200	100,00%	97,23%	152,00	35.430.200	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	69.750.160	-	2.732.000	1	49.362.000	2	11.450.000	1	5.362.000	4	68.906.000	100,00%	98,79%	4,00	68.906.000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				5				6		7		8		9		10		11		K		Rp		
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	82.069.071	2	6.182.000	4	18.801.000	3	5.757.000	3	49.469.000	12	80.209.000	100,00%	97,73%	12,00	80.209.000	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	180.060.419	2	63.121.800	2	34.361.800	-	25.597.200	-	55.124.200	4	178.205.000	100,00%	98,97%	4,00	178.205.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	543.016.220	-	100.961.820	-	135.362.081	-	95.292.910	-	201.546.150	-	533.162.961	0,00%	98,19%	0,00	533.162.961	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	516	178.686.252	129	18.940.000	150	44.708.100	149	33.260.250	88	78.300.250	516	175.208.600	100,00%	98,05%	516,00	175.208.600	0,00%	0,00%	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	106.319.242	-	73.662.460	-	20.841.021	-	-	1	11.700.000	1	106.203.481	100,00%	99,89%	1,00	106.203.481	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	101.474.936	-	-	-	20.995.680	1	49.883.060	1	30.304.000	2	101.182.740	100,00%	99,71%	2,00	101.182.740	0,00%	0,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	156.535.790	1	8.359.360	1	48.817.280	1	12.149.600	1	81.241.900	4	150.568.140	100,00%	96,19%	4,00	150.568.140	0,00%	0,00%	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	97	214.183.194.687	-	45.427.163.550	-	57.790.171.250	-	51.031.674.924	-	59.098.937.983	-	213.347.947.707	0,00%	99,61%	0,00	213.347.947.707	0,00%	0,00%	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	13.092.981.961	-	3.648.483.004	-	3.359.928.510	-	3.032.488.868	1	3.052.081.578	1	13.092.981.960	100,00%	100,00%	1,00	13.092.981.960	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	835.246.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	200.254.965.747	-	41.778.680.546	2	54.430.242.740	1	47.999.186.056	1	56.046.856.405	4	200.254.965.747	100,00%	100,00%	4,00	200.254.965.747	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Menggunakan SIPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	428.950.115	-	79.426.455	-	131.912.250	-	93.489.000	-	121.890.500	-	426.718.205	0,00%	99,48%	0,00	426.718.205	0,00%	0,00%	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	428.950.115	-	79.426.455	100	131.912.250	-	93.489.000	-	121.890.500	100	426.718.205	100,00%	99,48%	100,00	426.718.205	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		99,46%	99,60%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							415.000.002		100.770.160		73.064.740		139.070.630		92.129.359		405.034.889		97,60%		405.034.889		0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD (Persen)	0,00	-	0,00	-	50	415.000.002	-	100.770.160	-	73.064.740	-	139.070.630	-	92.129.359	-	405.034.889	0,00%	97,60%	0,00	405.034.889	0,00%	0,00%	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	47.497.763	-	19.441.180	-	17.686.700	1	10.166.580	-	-	1	47.294.460	100,00%	99,57%	1,00	47.294.460	0,00%	0,00%	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	14.319.473	-	3.591.400	-	2.819.400	3	7.247.300	2	124.800	5	13.782.900	100,00%	96,25%	5,00	13.782.900	0,00%	0,00%	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	47.368.792	-	11.510.280	-	2.809.920	1	16.072.020	-	16.533.370	1	46.925.590	100,00%	99,06%	1,00	46.925.590	0,00%	0,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	183.253.138	1	18.334.760	1	35.999.760	1	72.640.910	1	49.024.105	4	175.999.535	100,00%	96,04%	4,00	175.999.535	0,00%	0,00%	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	34.811.499	-	3.600.000	-	7.305.000	1	20.400.300	-	2.919.000	1	34.224.300	100,00%	98,31%	1,00	34.224.300	0,00%	0,00%	
Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	62.949.976	1	36.608.600	-	2.480.600	2	9.093.840	1	14.033.584	4	62.216.624	100,00%	98,84%	4,00	62.216.624	0,00%	0,00%	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	17.409.085	1	5.399.760	1	2.467.280	1	1.922.960	1	7.523.500	4	17.313.500	100,00%	99,45%	4,00	17.313.500	0,00%	0,00%	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	7.390.275	-	2.284.180	1	1.496.080	-	1.526.720	1	1.971.000	2	7.277.980	100,00%	98,48%	2,00	7.277.980	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	97,60%					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							3.473.390.611		376.128.842		584.632.387		876.407.616		1.562.309.017		3.399.477.862		97,87%		3.399.477.862		0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	3.473.390.611	-	376.128.842	-	584.632.387	-	876.407.616	-	1.562.309.017	-	3.399.477.862	0,00%	97,87%	0,00	3.399.477.862	0,00%	0,00%	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	161.216.784	-	14.868.000	2	40.611.624	1	76.556.980	1	28.826.440	4	160.863.044	100,00%	99,78%	4,00	160.863.044	0,00%	0,00%	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	0,00	-	0,00	-	12	51.842.665	2	19.072.478	4	14.005.600	4	11.534.050	2	6.956.480	12	51.568.608	100,00%	99,47%	12,00	51.568.608	0,00%	0,00%	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemastian yang Telah Dilindaklanjuti dan Belum Dilindaklanjuti (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.217.723.037	2	277.925.268	4	388.486.803	4	463.064.799	2	1.025.086.462	12	2.154.563.332	100,00%	97,15%	12,00	2.154.563.332	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	0,00	-	0,00	-	12	519.734.321	2	24.304.096	4	50.021.750	4	236.189.057	2	202.410.755	12	512.925.658	100,00%	98,69%	12,00	512.925.658	0,00%	0,00%	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Penetapan/Pengalokasian)	0,00	-	0,00	-	4	91.914.988	1	14.754.000	1	27.832.860	1	28.402.990	1	20.263.500	4	91.253.350	100,00%	99,28%	4,00	91.253.350	0,00%	0,00%	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	328.924.401	1	13.100.000	1	37.321.700	1	41.434.940	1	234.967.320	4	326.823.960	100,00%	99,36%	4,00	326.823.960	0,00%	0,00%	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	102.034.415	2	12.105.000	4	26.352.050	4	19.224.800	2	43.798.060	12	101.479.910	100,00%	99,46%	12,00	101.479.910	0,00%	0,00%	
																		100,00%	97,87%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	97,87%							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
KEPEGAWAIAN																								
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			-		-	8.479.033.195	455.371.899		616.804.171		2.866.105.002		4.259.280.493		8.197.561.565		96,68%		8.197.561.565		0,00%			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai (Persen)	0,00	-	0,00	-	2,79	2.799.271.725	-	47.248.000	-	61.374.388	-	1.666.095.643	-	1.009.143.786	-	2.783.861.817	0,00%	99,45%	0,00	2.783.861.817	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	140	695.921.614	-	39.748.000	-	46.704.388	-	173.694.643	-	421.737.786	-	681.884.817	0,00%	97,98%	0,00	681.884.817	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	105	51.341.433	-	-	-	8.470.000	-	31.022.000	-	11.230.000	-	50.722.000	0,00%	98,79%	0,00	50.722.000	0,00%	0,00%	
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	1.440.000.000	-	560.000.000	-	2.000.000.000	0,00%	100,00%	0,00	2.000.000.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	22.920.663	3	3.600.000	1	3.600.000	-	9.669.000	-	5.795.000	4	22.664.000	33,33%	98,88%	4,00	22.664.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	29.088.015	3	3.900.000	1	2.600.000	-	11.710.000	-	10.381.000	4	28.591.000	33,33%	98,29%	4,00	28.591.000	0,00%	0,00%	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	922.716.269	-	31.130.000	-	181.571.980	-	111.969.664	-	402.983.931	-	727.655.575	0,00%	78,86%	0,00	727.655.575	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	300	115.993.435	-	13.560.000	-	28.052.801	-	28.503.000	-	34.174.800	-	104.290.601	0,00%	89,91%	0,00	104.290.601	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Naiknang Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naiknang Pangkat ASN (Laporan)	0,00	-	0,00	-	650	46.401.449	-	6.180.000	-	6.340.000	-	27.757.600	-	5.467.000	-	45.744.600	0,00%	98,58%	0,00	45.744.600	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	42	760.321.385	-	11.390.000	-	147.179.179	-	55.709.064	-	363.342.131	-	577.620.374	0,00%	75,97%	0,00	577.620.374	0,00%	0,00%	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Persen)	0,00	-	0,00	-	15,45	4.345.454.530	-	311.753.899	-	315.493.423	-	999.745.695	-	2.657.888.776	-	4.284.881.793	0,00%	98,61%	0,00	4.284.881.793	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	270.799.744	-	-	-	7.500.000	-	11.347.000	-	250.585.491	-	269.432.491	0,00%	99,50%	0,00	269.432.491	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	311.648.220	272	9.780.000	-	31.000.000	-	24.833.999	-	244.210.851	272	309.824.850	272,00%	99,41%	272,00	309.824.850	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	25	3.677.751.616	9	301.973.899	-	269.870.000	-	954.259.696	-	2.105.609.131	9	3.631.712.726	36,00%	98,75%	9,00	3.631.712.726	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (Orang)	0,00	-	0,00	-	250	85.254.950	177	-	-	7.123.423	-	9.305.000	-	57.483.303	177	73.911.726	70,80%	86,69%	177,00	73.911.726	0,00%	0,00%	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin (Persen)	0,00	-	0,00	-	14	411.590.671	-	65.240.000	-	58.364.380	-	88.294.000	-	189.264.000	-	401.162.380	0,00%	97,47%	0,00	401.162.380	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	129.385.034	3	50.895.000	1	22.875.000	-	27.263.000	-	26.500.000	4	127.533.000	33,33%	98,57%	4,00	127.533.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	235	28.376.256	158	-	-	9.467.380	-	9.548.000	-	9.014.000	158	28.029.380	67,23%	98,78%	158,00	28.029.380	0,00%	0,00%	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	253.829.381	-	14.345.000	-	26.022.000	-	51.483.000	-	153.750.000	-	245.600.000	0,00%	96,76%	0,00	245.600.000	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27,26%	96,68%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.782.544.103		461.504.002		518.630.697		503.425.933				1.483.560.632		83,23%		1.483.560.632		0,00%		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	0,00	-	0,00	-	80	698.209.890	40	382.972.492	40	182.819.312	-	119.320.728	-	-	80	685.112.532	100,00%	98,12%	80,00	685.112.532	0,00%	0,00%	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	0,00	-	0,00	-	80	698.209.890	40	382.972.492	80	182.819.312	80	119.320.728	80	-	80	685.112.532	100,00%	98,12%	80,00	685.112.532	0,00%	0,00%	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional (Orang)	0,00		0,00		40		-		40		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			6			I		II		III		IV			12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
			5	Rp		7	8	9	10	11	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K
3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi (Orang)	0,00		0,00		100	1.084.334.213	-	78.531.510	10	335.811.385	-	384.105.205	-	798.448.100	0,00%	73,63%	0,00	798.448.100	0,00%	0,00%		
	Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi (Sertifikat)	0,00		0,00		4		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%			
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	0,00		0,00		3	437.601.103	1	27.579.800	2	163.937.043	2	51.205.295	2	242.722.138	66,67%	55,47%	2,00	242.722.138	0,00%	0,00%		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	0,00		0,00		40	646.733.110	-	50.951.710	40	171.874.342	40	332.899.910	40	555.725.962	100,00%	85,93%	40,00	555.725.962	0,00%	0,00%		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguatiran, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	0,00		0,00		0		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																91,82%	83,23%						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							1.000.000.000		177.171.654		187.361.294		177.891.580		454.096.216		996.520.744		99,65%		996.520.744		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						482.942.440		-	63.411.441		101.896.580		317.107.136		482.415.157		99,89%		482.415.157		0,00%				
Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	365.102.000	-	-	-	63.411.441	-	39.221.580	1	261.988.136	1	364.621.157	100,00%	99,87%	1,00	364.621.157	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	117.840.440	-	-	-	-	-	62.675.000	1	55.119.000	1	117.794.000	100,00%	99,96%	1,00	117.794.000	0,00%	0,00%		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						202.871.480		139.305.496	43.989.600		12.500.000		4.885.000		200.680.096		98,92%		200.680.096		0,00%				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	202.871.480	-	139.305.496	-	43.989.600	1	12.500.000	-	4.885.000	1	200.680.096	100,00%	98,92%	1,00	200.680.096	0,00%	0,00%		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan						67.594.640		-	66.910.253		-		96.000		67.006.253		99,13%		67.006.253		0,00%				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	67.594.640	-	-	-	66.910.253	1	-	-	96.000	1	67.006.253	100,00%	99,13%	1,00	67.006.253	0,00%	0,00%		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi						246.591.440		37.866.158	13.050.000		63.495.000		132.008.080		246.419.238		99,93%		246.419.238		0,00%				
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	246.591.440	-	37.866.158	-	13.050.000	-	63.495.000	-	132.008.080	-	246.419.238	0,00%	99,93%	0,00	246.419.238	0,00%	0,00%		
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75,34%	99,65%						
								Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	0,00%					0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	0,00%				0,00%				
Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																	0,00%				-	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan (Dokumen)		-		-		-		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		-		-		-		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
PENGLOLAAN PENGHUBUNG																								
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			-		-	1.704.777.200		418.908.861		436.816.855		361.991.617		474.276.368		1.691.993.701	99,25%	1.691.993.701	0,00%					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Capaian Pelayanan Penghubung (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.704.777.200	-	418.908.861	-	436.816.855	-	361.991.617	-	474.276.368	-	1.691.993.701	0,00%	99,25%	0,00	1.691.993.701	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	761.200.000	-	321.400.000	-	212.980.000	-	95.158.500	-	126.000.000	-	755.538.500	0,00%	99,26%	0,00	755.538.500	0,00%	0,00%	
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	186.392.200	-	1.780.000	-	72.449.960	-	76.120.500	-	35.760.000	-	186.110.460	0,00%	99,85%	0,00	186.110.460	0,00%	0,00%	
Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	258.850.000	-	32.800.000	-	51.171.000	-	75.810.000	-	93.747.000	-	253.528.000	0,00%	97,94%	0,00	253.528.000	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	0,00	-	0,00	-	200	498.335.000	-	62.928.861	-	100.215.895	-	114.902.617	-	218.769.368	-	496.816.741	0,00%	99,70%	0,00	496.816.741	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	99,25%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
INSPEKTORAT DAERAH																								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			-		-	2.022.354.440		203.310.000		535.141.160		489.395.120		793.231.940		2.021.078.220	99,94%	2.021.078.220	0,00%					INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Laporan Hasil Pemeriksaan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	349	660.241.040	87	92.240.000	80	139.147.940	-	135.501.000	-	292.141.831	167	659.030.771	47,85%	99,82%	167,00	659.030.771	0,00%	0,00%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	349	362.753.400	-	79.640.000	-	82.268.305	-	129.761.000	-	70.557.000	-	362.226.305	0,00%	99,85%	0,00	362.226.305	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (I laporan)	0,00	-	0,00	-	1	524.698.060	-	40.902.200	-	25.813.909	-	37.160.000	-	418.668.228	-	522.544.337	0,00%	99,59%	0,00	522.544.337	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	99,99%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							600.194.900		118.854.857		134.845.368		-		271.810.271		525.510.496		87,56%		525.510.496		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus. (Dokumen Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	600.194.900	-	118.854.857	-	134.845.368	-	-	-	271.810.271	-	525.510.496	0,00%	87,56%	0,00	525.510.496	0,00%	0,00%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (yang Disusun Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	474.659.428	-	118.854.857	-	134.845.368	-	-	-	204.782.271	-	458.482.496	0,00%	96,59%	0,00	458.482.496	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (I laporan)	0,00	-	0,00	-	1	125.535.472	-	-	-	-	-	-	-	67.028.000	-	67.028.000	0,00%	53,39%	0,00	67.028.000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	87,56%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Tinggi							
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							19.759.924.100		4.021.548.800		3.809.913.500		5.435.110.000		6.466.883.872		19.733.456.172		99,87%		19.733.456.172		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus. (Dokumen Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	19.759.924.100	-	4.021.548.800	-	3.809.913.500	-	5.435.110.000	-	6.466.883.872	-	19.733.456.172	0,00%	99,87%	0,00	19.733.456.172	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dokumen Laporan)	0,00	-	0,00	-	45	160.417.700	-	-	-	65.862.300	-	22.620.000	-	62.904.350	-	151.386.650	0,00%	94,37%	0,00	151.386.650	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
								I		II		III		IV										
		3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13=12/7x100%	K	Rp	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	128	193.831.060	-	-	-	43.740.000	-	-	-	148.870.796	-	192.610.796	0,00%	99,37%	0,00	192.610.796	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	176.615.140	-	34.033.750	-	26.671.250	-	12.490.000	-	102.308.726	-	175.503.726	0,00%	99,37%	0,00	175.503.726	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	19.229.060.200	-	3.987.515.050	-	3.673.639.950	-	5.400.000.000	-	6.152.800.000	-	19.213.955.000	0,00%	99,92%	0,00	19.213.955.000	0,00%	0,00%	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	99,87%					
								Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
						1.851.815.037.690		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										157,54%	86,65%					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi					

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1. Permasalahan terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Perekonomian

Kondisi Perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat Perekonomian Sulawesi Barat masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif ditengah tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ditahun 2024 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 64,21 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 37,09 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,76 meningkat positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5,23 persen (c-to-c). Perekonomian Sulawesi Barat memberikan andil terhadap sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan hal ini terkonfirmasi dari pangsa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Sulawesi Barat tercatat sebesar 44,11 persen kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,41 persen, Perekonomian Sulawesi Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan di Sulawesi Barat seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata, kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalama rangka menurungkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan. Gambaran kondisi permasalahan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Barat belum akseleratif.

Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, kinerja perekonomiannya belum mencapai tingkat akseleratif yang diharapkan. Beberapa faktor telah menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, namun masih terdapat kekurangan dalam jaringan transportasi, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi daya saing ekonomi daerah. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan juga menjadi kendala. Fluktuasi harga komoditas dan kerentanan terhadap perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada ekonomi lokal.

2. Belum kuatnya indutsri pengolahan berbasis masyarakat.

Di Provinsi Sulawesi Barat, industri pengolahan berbasis masyarakat belum mencapai tingkat kekuatan yang diharapkan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan kekayaan alam lainnya, namun industri pengolahan masih mengalami tantangan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan dalam proses pengolahan. Banyak masyarakat lokal yang masih bergantung pada metode tradisional dalam mengolah hasil pertanian atau perikanan mereka, yang sering kali tidak efisien dan kurang menghasilkan produk berkualitas. Kurangnya akses terhadap pasar dan distribusi juga menjadi hambatan dalam mengembangkan industri pengolahan berbasis masyarakat. Banyak produsen lokal yang kesulitan untuk menjual produk mereka di pasar yang lebih luas karena terbatasnya jaringan distribusi dan kurangnya akses pasar yang memadai.

3. Belum optimalnya hilirisasi

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pabrik pengolahan yang modern dan terintegrasi dengan baik. Keterbatasan fasilitas pengolahan menyebabkan produk-produk lokal Sulawesi Barat sering harus dijual mentah tanpa nilai tambah, sehingga berpotensi mengurangi potensi pendapatan bagi para petani dan produsen lokal serta rendahnya tingkat teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan juga menjadi kendala. Banyak produsen lokal masih menggunakan metode pengolahan tradisional yang tidak efisien dan tidak memenuhi standar kualitas pasar yang lebih tinggi. Keterbatasan akses terhadap pasar dan distribusi juga merupakan faktor yang mempengaruhi hilirisasi. Kurangnya jaringan distribusi yang memadai membuat sulit bagi produsen lokal untuk menjual produk mereka di pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Potensi unggulan daerah belum berbasis investasi

Potensi unggulan daerah yang belum berbasis investasi merujuk pada sumber daya atau keunggulan yang dimiliki suatu daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menarik investasi, salah satunya perlu adanya dukungan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Over) sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di provinsi Sulawesi Barat, yang termuat berupa feasibility study terkait kelayakan potensi yang akan diinvestasikan.

B. Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 pertumbuhan IPM selalu tumbuh positif dari 69,80 poin menjadi 70,46 poin. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat berada pada kategori level tinggi akan tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 75,02 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah.
2. Komponen IPM dari sektor pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah, dimana RLS di Sulawesi Barat mencapai 8,15 tahun berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,85 tahun. Komponen berikutnya adalah Harapan Lama

Sekolah. HLS di Sulawesi Barat sebesar 12,89 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 13,21 tahun. Permasalahan utama yang terkait sektor pendidikan di Sulawesi Barat yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta perlunya perubahan pola pikir dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Barat sebesar 66,27 tahun sementara nasional sebesar 72,39 tahun. Rendahnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kematian bayi, kematian balita, dan jumlah kematian Ibu di tahun 2024. Beberapa permasalahan di sektor kesehatan sangat berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, perilaku hidup bersih dan sehat yang belum berjalan secara ideal, terbatasnya Sumberdaya Manusia bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berkompeten.
4. Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih (10,76%) dan masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses sanitasi layak (17,48%), faktor yang kedua adalah Perilaku Kesehatan, diantaranya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,50% (Risksdas 2018), masih tingginya pernikahan usia anak mencapai 19,20% tertinggi ke-tiga secara nasional. Faktor selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan terkait dengan penyediaan Akses dan Fasilitas Kesehatan dimana berdasarkan data bahwa Akses Desa/Kelurahan menuju rumah sakit sebesar 46,7%, Rumah sakit bersalin 15,0%, Puskesmas 74,9%, Poliklinik 37,7%, dan Akses Desa/Kelurahan menuju ke tempat Dokter sebesar 63,1% (Podes 2018, TNP2K) dan selanjutnya adalah faktor keturunan yang hanya berkontribusi sebesar 5 persen terhadap derajat kesehatan.
5. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat juga disebabkan oleh tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan gizi, dimana masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi serta sektor terkait lainnya seperti sanitasi dan air bersih yang berkualitas juga sangat mempengaruhi permasalahan stunting.

C. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Kondisi lingkungan hidup dan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim serta nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). Gambaran lainnya yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, dan penganggulangan bencana. Gambaran kondisi permasalahan

lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai wilayah di dunia, termasuk Sulawesi Barat. Perubahan Iklim merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi.

2. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Ini dapat dilihat dari grafik persentase pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Barat yang semakin tahun mengalami penurunan.

Selain sampah permasalahan Limbah B3 Medis perlu juga mendapatkan perhatian. Limbah medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis baik biologis maupun non biologis yang dihasilkan oleh fasyankes (rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya termasuk laboratorium kesehatan). Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber kontaminasi dan pencemaran lingkungan

3. Permasalahan Wilayah Pesisir

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem

Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Berupa Pengembangan generasi lingkungan

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk dikembangkan. Program pengembangan sekolah Adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipasi dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini

5. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah Kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setiap tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penegakan Hukum sehingga dari tahun 2020 sampai tahun 2024 persentase penegakan hukum mencapai 100 Persen

6. Permasalahan Hampir punahnya Keanekaragaman Hayati

Khusus di Provinsi Sulawesi Barat Keberadaan burung Maleo menjadi semakin terancam punah. Maleo (*Macrocephalon maleo*) adalah satwa endemik Sulawesi dan tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Burung ini hanya ada di Pulau Sulawesi dan populasinya makin terancam karena maraknya pembukaan lahan di habitatnya berupa kawasan pantai berpasir panas atau pegunungan dengan sumber air panas atau kondisi geotermal tertentu. Pencurian telur maleo juga mengancam kelestarian burung itu. Seekor maleo memang hanya bertelur sebutir dalam satu musim. Untuk itu diperlukan suatu aksi nyata bagaimana untuk melestarikan burung maleo tersebut

7. Nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia Sulawesi Barat tertinggi secara Nasional

Berdasarkan data dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir, jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan

lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Provinsi Sulawesi Barat memiliki Indeks risiko 155,69 (tinggi).

D. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020–2024 cenderung menunjukkan peningkatan. walaupun nilainya pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 74,30 (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP yang diperoleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018-2023 menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2023 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Barat memperoleh 68,32 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan nilai 68,67 dengan predikat B.

Tata Kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh kinerja ASN yang baik. Namun manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, harus didukung dengan penempatan dan penataan ASN secara transparan, jaminan pengembangan karir bagi ASN, adanya Assesment Center, fasilitasi pendidikan bagi ASN, serta pengembangan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi bagi ASN. Serta diperlukannya sarana dan prasarana pengembangan kepegawaian yang memadai.

2.3.2. Permasalahan Terkait Bidang Urusan

Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap

perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagai berikut

5.3.2.1. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. PENDIDIKAN

1. Masih Banyak Penduduk Usia Sekolah yg Tidak Bersekolah
2. Masih tingginya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
3. Masih Rendahnya Kualitas PTK
4. Jumlah Sekolah yang memenuhi SNP masih Renda
5. Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal
6. Masih Rendahnya Kualitas PTK pada daerah tertentu
7. SDM Sesuai kebutuhan masih rendah pada beberapa bagian

B. KESEHATAN

1. Akses Pelayanan Kesehatan yang tidak merata
Ketimpangan fasilitas kesehatan, memberikan dampak besar terhadap kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat khususnya provinsi Sulawesi Barat yang menghadapi tantangan serius dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Penyebaran fasilitas kesehatan yang belum merata, khususnya di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan, menjadi prioritas dimana Sebanyak 39,3% masyarakat masih sangat kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 46,5% sangat sulit dalam mendapatkan layanan rumah sakit (SKI, 2023) . Dan terdapat 22,45% yang belum lengkap 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar ketenagaan di puskesmas serta 71,43%. Belum lengkap 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya/penunjang di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah (SISDMK, 2024), Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan pada tahun 2024 sebesar 3.040.357
2. Prevalensi stunting masih tinggi
Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya provinsi sulawesi barat dimana berdasarkan data riset Survey Kesehatan Indonesia(SKI) , saat ini berada pada urutan kelima tertinggi secara nasional dengan capaian tahun 2024 sebesar 35,47 persen atau naik sebesar 5,27 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 30,30 persen yang disebabkan akses terbatasnya terhadap gizi dan layanan kesehatan. yang mengakibatkan kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, serta pola asuh yang kurang optimal.
3. Masih tingginya kematian ibu dan bayi
Menunjukkan kasus kematian ibu (AKI)tahun 2024 sebesar 40 kasus (Jumlah Absolut) sedangkan AKB sebesar 306 (Jumlah Absolut) kasus masih menjadi prioritas masalah kesehatan yang sangat mempengaruhi

capaian kinerja indikator umur harapan hidup disebabkan salah satunya kunjungan pemeriksaan kehamilan / standar pelayanan antenatal care (ANC) yang di fasilitas kesehatan masih belum optimal dimana kunjungan ANC 4 sebesar 48,7 % (SKI, 2023) dimana adanya hambatan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas selama masa kehamilan

4. Beban penyakit menular dan tidak menular masih tinggi
Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan, terutama tingginya beban penyakit menular dan tidak menular. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta akses layanan kesehatan yang belum merata turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat kedua jenis penyakit ini. Berdasarkan data, angka kesakitan rata-rata di Sulawesi Barat mencapai 51,32%, namun terdapat perbedaan signifikan di beberapa kabupaten: Angka kesakitan yang masih tinggi menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan edukasi masyarakat, serta program pencegahan penyakit perlu diperkuat untuk menekan angka kesakitan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat
5. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana (Alat CT Scan, Gas Medis, Kelengkapan Operasi Mata.)
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan (Ketersediaan fasilitas medis yang belum memadai (Cathlab, MRI, Sitostatika, Radioterapi, Alat ventilator) serta peningkatan standar layanan di rumah sakit dan peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan.)
7. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung RSUD (Ruang Perawatan belum maksimal (Kamar Mandi, Plafon, Dak Atap, Kelas Rawat Inap Standar)
8. Manajemen Internal dan Efisiensi Operasional (Penambahan Regulasi / Kebijakan, Peningkatan Kompetensi pengelola BLUD dan Penguatan sistem Informasi BLUD)

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Rendahnya prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap
2. Rendahnya persebtase areal D.I kewenangan provinsi yang fungsional dalam kondisi baik
3. Penataan dan rehabilitasi bangunan perkantoran dan lambatnya pembangunan SPAM regional
4. Rendahnya jumlah tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di provinsi Sulawesi barat
5. Rendahnya kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW provinsi
6. Belum optimalnya pelayanan UPTD pengujian dan laboratorium

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Rendahnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya dikawasan kumuh 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha sesuai kewenangan pemerintah provinsi

2. Kurangnya prasarana sarana utilitas umum (PSU) penunjang fungsi di permukiman
3. Kurangnya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana provinsi

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Pelaksanaan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
2. Penerapan perda dan perkara belum optimal
3. Fungsi PPNS sebagai aparat penegak perda dan perkara belum optimal.
4. Belum ada Pemetaan Wilayah Rawan Kebakaran
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ancaman Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran.
6. Belum maksimalnya Penanganan terhadap Ancaman Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran

F. SOSIAL

1. Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:
 - a. Rendahnya penanganan PPKS;
 - b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;

5.3.2.2. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. TENAGA KERJA

1. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja
2. Rendahnya Penempatan Tenaga Kerja
3. Rendahnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
4. Rendahnya Tingkat Kepatuhan di Perusahaan

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Adanya kesenjangan Pembangunan gender
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui indikator kabupaten layak anak
3. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak
4. Masih tingginya perkawinan anak

C. PANGAN

1. Distribusi Pangan, disparitas/Perbedaan harga dan Bahan pangan pokok masih dominan dari luar daerah Sulawesi Barat
2. Rendahnya panganekaragaman/diversifikasi pangan; Skor PPh 80,34 Nasional 94

3. Masih terdapat daerah Rentan Rawan Pangan
4. Angka PoU (Prevalence of undernourishment)/Persentase Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, masih di atas target RPJMN; PoU Sulawesi Barat Tahun 2024, 6.53 sementara target RPJMN kurang 5%
5. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah; Target CPP sesuai Perbadan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2023 Sebesar 130,68 Ton Sedangkan Stock Akhir Sulawesi Barat 89,565 Ton Atau 68,5%
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha tentang keamanan pangan segar; dengan nilai persentase 76

D. LINGKUNGAN HIDUP

1. Masih tingginya kerusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana
2. Masih tingginya Tingkat pencemaran lingkungan akibat belum maksimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
3. Belum efektifnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

E. PERTANAHAN

1. Belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum

F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Pengurangan Blangko KTP-eL dari pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diperuntukan ke Provinsi berkurang yang mengakibatkan pelayanan cetak KTP-eL di Kabupaten terhambat)
2. Belum optimalnya jaringan untuk mengakses layanan administrasi kependudukan bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau

G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Rendahnya kerjasama antar desa (Hingga Tahun 2024 Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang aktif 127 BKAD (22,09 %) Berdasarkan Data IDM, kondisi ini masih sangat rendah dari 575 Desa di Provinsi Sulawesi Barat, Rendahnya kerjasama antar desa ini disebabkan karena Perdesaan memiliki keterbatasan sumber daya
2. Belum ada Desa di Sulawesi Barat yang menerapkan Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Digital (Aparat desa belum memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi digital ➤ Tidak adanya alokasi dana khusus untuk digitalisasi pelayanan desa ➤ Belum ada aplikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah ➤ Di beberapa wilayah Desa, belum tersedia jaringan internet yang memadai)
3. Belum Tuntasnya Batas Desa (Dari 575 Desa di Sulawesi Barat, 129 Desa yang sudah memiliki Batas Desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan telah sesuai mekanisme yang diamanatkan

Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa ➤ 344 Desa telah memiliki Penegasan Batas Desa melalui Peraturan Bupati namun belum diakui karena tidak sesuai Prosedur yang diamanatkan oleh Permendagri 45 Tahun 2016 ➤ Pemerintah Daerah telah melakukan dengan TOP DAM terkait penyelesaian batas desa namun sampai saat ini belum tuntas)

4. 2.189 Posyandu di Sulawesi Barat sudah berstatus Aktif namun Angka Stunting masih Tinggi (➤ Revitalisasi Posyandu berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu Belum tersosialisasi ➤ Pengetahuan/Kompetensi Kader Posyandu masih rendah dalam Pelayanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu ➤ Fasilitas Sarana Dan Prasarana di Posyandu Masih Kurang ➤ Keterlibatan Lintas Sektor Masih Kurang Optimal Di Posyandu sehubungan dengan 6 SPM Bidang Pendidikan, kesehatan, perumahan Rakyat, kesehatan, Pekerjaan Umum, Trantibunlinmas dan Sosial)
5. BUMDes Kesulitan Menemukan Dan Mengembangkan Potensi Desa (➤ Dari 575 desa yang tersebar di 6 Kabupaten, 517 Desa telah memiliki BUMDes, 143 diantaranya telah Berbadan Hukum ➤ Dana penyertaan modal yang terbatas membuat BUMDes sulit berkembang. ➤ Pengelolaan usaha cenderung berbasis kekeluargaan, bukan pada prinsip bisnis profesional. ➤ Pengelola BUMDes kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran)
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu ditangani secara Terpadu (➤ Ada 35 Kawasan Perdesaan yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Barat dan terdapat sebanyak 184 Desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan ➤ Keputusan Gubernur nomor 188.4/138/SULBAR/II/2019 perlu diperbaharui dan direvisi)

H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Tingginya angka kelahiran toral dan jumlah keluarga pra Sejahtera

I. PERHUBUNGAN

1. Belum optimalnya konektifitas wilayah
2. Masih tingginya angka kecelakaan LLAJ
3. Terbatasnya alokasi anggaran

J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikatif
2. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Sistem dan data digital antar urusan/OPD belum terintegrasi otomatis dengan akses terpadu

4. Manajemen dan tata kelola SPBE belum teratur ideal sesuai kaidah yang semestinya
5. Kualitas dan kuantitas SDM ASN dalam penggunaan teknologi masih kurang
6. Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik (PIK) Masih Rendah

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Keterbatasan sumber daya manusia pelaku koperasi dan pelaku usaha
2. Rendahnya ketersediaan data valid koperasi dan UKM
3. Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan koperasi dan UMKM secara digital
4. Lemahnya informasi, akses pasar dan pembiayaan untuk pengembangan usaha
5. Pusat layanan usaha terpadu (PLUT) belum berjalan secara optimal

L. PENANAMAN MODAL

1. Masih perlunya penyediaan Peta Potensi Berbasis IPRO (Investment Project Ready to Offer).
2. Masih rendahnya capaian realisasi investasi
3. Minat investasi masih rendah
4. Harmonisasi regulasi terkait Penanaman Modal yang multisektoral dan dinamis
5. Strategi egi promosi belum terpetakan dan pelaksanaan promosi investasi masih kurang
6. Masih kurangnya kemitraan antara UMKM dan Usaha berskala besar
7. Masih terdapat penerbitan perizinan yang belum terintegrasi secara elektronik
8. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai
9. Peningkatan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional melalui Pendidikan dan pelatihan

M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Belum adanya data base yang akurat terkait pemuda usia 16-30 Tahun yang memiliki usaha
2. Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda
3. Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha
4. Tingginya trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi, perkelahi dan narkoba
5. Nilai indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat tahun 2023 pengukuran tahun 2024 masih dibawah nasional yaitu 55,50, sementara Nasional 56,33
6. Minimnya sarana prasarana olahraga
7. Kurangnya SDM para pelatih dan wasit
8. Kurangnya pusat pembinaan atlet pelajar
9. Kurangnya pelaksanaan kejuaraan Multi/Single Event
10. Belum adanya data base yang akurat terkait keolahragaan

N. STATISTIK

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral dikarenakan belum optimalnya data terstruktur yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan terinput sesuai jadwal update pada portal satu data.
2. Masih minimnya kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan pimpinan, sehingga seringkali data yang dimiliki tidak tersusun rapi dan tidak tercatat dengan baik, sehingga banyak dari kamus data yang terdapat pada portal data sudah merupakan data agregat atau beberapa data juga menjadi kurang berkualitas.
3. Data yang tersedia belum dianalisis untuk kepentingan penguatan kebijakan dan/ atau perencanaan pembangunan daerah
4. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam analisis statistik

O. PERSANDIAN

1. Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan rendahnya pembangunan aplikasi perangkat daerah yang memenuhi standart teknis.
2. Masih minimnya SDM yang memahami tentang keamanan informasi pada masing-masing perangkat daerah.
3. Dokumentasi dan reviu pemantauan dan penanganan insiden belum maksimal sehingga Penanganan Insiden belum terorganisir dengan baik

P. KEBUDAYAAN

1. Kegiatan Pemajuan Kebudayaan masih sangat rendah
2. Rendahnya SDM Teknis Pengelolaan Budaya
3. Belum adanya Gedung/ bangunan Museum Provinsi di Sulawesi Barat

Q. PERPUSTAKAAN

1. Masih Masih kurangnya Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca
2. Sarana fasilitasi layanan perpustakaan belum memadai (layanan sirkulasi dan multimedia)
3. Masih kurangnya SDM perpustakaan/pustakawaan
4. Jumlah koleksi bahan Pustaka belum memadai standar

R. KEARSIPAN

1. Belum adanya DEPO Arsip
2. Masih Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM Kearsipan / Arsiparis pada LKD dan OPD
3. Belum Optimalnya Implementasi Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan melalui SRIKANDI dan Simpul dan Jaringan Kearsipan Nasional
4. Pengelolaan Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Belum Maksimal di Pencipta Arsip

5.3.2.3. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Selain itu, pada keduanya, baik perikanan tangkap, budidaya, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

2. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (perishable) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

B. PARIWISATA

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dan stakeholders dalam pengembangan kepariwisataan dan ekraf
2. Belum optimalnya penyusunan rencana program sektor pariwisata dan ekraf
3. Belum optimalnya pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kepariwisataan dan ekraf

C. PERTANIAN

1. Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu, unggul dan bersertifikat;
2. Adanya serangan penyakit hewan, OPT dan dampak perubahan iklim (Banjir dan kekeringan);
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
4. Masih terbatasnya dan rendahnya SDM aparatur dan pelaku usaha pertanian;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan

6. Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian
7. Belum ada Roadmap pengembangan kawasan hortikultura di kabupaten;
8. Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat;
9. Masih rendahnya kemitraan usaha pertanian dengan pelaku agribisnis, baik pada usaha hulu (budidaya) maupun usaha hilir (pengolahan dan pemasaran);
10. Kurangnya akses petani terhadap permodalan
11. Pertumbuhan produksi termasuk peningkatan produktivitas pada komoditas unggulan perkebunan (kakao, kelapa, kopi dan sawit) banyak dipengaruhi oleh populasi tanaman tua, dan tidak optimalnya input pada tanaman menghasilkan.
12. Adanya alih komoditas, komoditas perkebunan membutuhkan waktu tahunan baru mulai berproduksi.
13. Pekebun yang tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan berkebun, melainkan juga bekerja pada sektor lain.
14. Eskalasi permasalahan yang makin kompleks berbanding terbalik dengan kemampuan penanganan yang dilaksanakan seiring dengan alokasi yang makin terbatas dan cenderung jangkauannya makin menurun.
15. Komoditas perkebunan adalah komoditas ekspor yang menuntut peningkatan mutu dan kualitas produksi yang berstandar internasional.
16. Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan kemajuan teknologi di sektor perkebunan. Serta peningkatan produksi dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.
17. Penguatan kelembagaan petani dan kemitraan oleh berbagai pelaku usaha.
18. Sumber daya petani perkebunan yang masih perlu ditingkatkan.
19. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi penunjang pembangunan perkebunan.
20. Pengawasan dan pengendalian peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsin di sektor perkebunan.
21. Peta geospasial komoditas tanaman perkebunan yang baru dapat diidentifikasi untuk sementara ada pada tanaman sawit.
22. Hak atas kepemilikan dan penggunaan lahan yang sebagian besarnya belum terdaftar di pertanahan.

D. KEHUTANAN

1. Masih terdapatnya lahan kritis di luar kawasan hutan
2. Masih - Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan baik karena konflik tenurial Kawasan hutan, Pembalakan liar dan Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya
5. Belum efektifnya pengelolaan hutan Lestari mendukung perekonomian daerah
6. Masih Rendahnya Kapasitas SDM KTH dan KUPS dalam mengelola potensi hutan
7. Sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan yang belum memadai

E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

1. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki listrik PLN (Terdapat 36.000 RTS berdasarkan Data Validasi Bersama PLN dan Dinas ESDM Sulbar)
2. Masih Terdapat 12.520 RTS yang sudah menyampaikan usulan Program Bantuan Pasang Baru Listrik: Mengalokasikan Program Bantuan Pasang Baru Listrik Kementerian ESDM RI Tahun 2024. [Bit.ly/sulbar2024](https://bit.ly/sulbar2024)
3. Masih terdapat 19 desa yang belum berlistrik PLN Pemanfaatan Energi Terbarukan: Mendorong pembangunan Energi (Kab. Mamuju 11 Desa dan Kab. Mamasa 8 Desa)
4. Minimnya Infrastruktur Energi Primer dan Energi Baru Terbarukan
5. Mitigasi Bencana Geologi di Provinsi Sulawesi Barat
6. Rendahnya Kepatuhan Pemegang IUP terhadap aspek finansial dan administrasi

F. PERDAGANGAN

1. Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang;
3. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi
4. Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.

G. PERINDUSTRIAN

1. Masih rendahnya daya saing industri
2. Belum optimalnya pengolahan bahan baku local
3. Belum optimalnya pengelolaan sentra industri kecil dan menengah
4. Validasi data industri kecil menengah masih rendah
5. Kurangnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM Pembina industri

H. TRANSMIGRASI

1. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria 2C (clear and clean) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang); sehingga pola SP pugar desa SP tempatan dan SP baru dibutuhkan
2. Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan

3. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi
4. Pengembangan ekonomi lokal di Kawasan transmigrasi masih belum maksimal dilakukan dengan pendekatan klaster yang berbasis komoditas unggulan untuk mendukung SDGs Desa
5. Adanya regulasi yang membatasi kewenangan daerah dalam hal perencanaan Kawasan dan sharing biaya antar daerah

5.3.2.4. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Umum

A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama.
2. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga / masyarakat tentang Sistem Demokrasi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan
4. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (Aparatur) serta sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan terdapat 2 Jabatan Fungsional ahli Muda (Setara eselon IV) yang lowong serta Ruang Rapat yang Kurang Memadai

5.3.2.5. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Penunjang

A. PERENCANAAN

1. Masih terdapat dokumen perencanaan perangkat daerah yang tidak selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Kurangnya konsistensi penjabaran RPD ke dalam RKPD dan APBD
3. Kinerja program pembangunan daerah masih rendah
4. Dinamika perubahan kebijakan nasional yang tinggi, sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan evaluasi
5. Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal. Basis data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, saat ini basis data dan informasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. basis data dan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terintegrasi antar instansi terkait perencanaan pembangunan. Data masih tersebar dan belum terkelola dengan baik. Akibatnya, perencanaan pembangunan daerah seringkali tidak tepat sasaran dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Program kerap tumpang tindih antar instansi. Diperlukan upaya penguatan basis data dan informasi daerah, mulai dari

pendataan, integrasi data, hingga analisis data yang mendalam. Basis data yang kuat akan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif

B. KEUANGAN

1. Belum Optimalnya Penerapan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD
2. Belum optimalnya aplikasi Pendapatan
3. Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset yang belum maksimal
4. Pengamanan dan penertiban aset yang belum dilaksanakan secara komprehensif
5. Rekonsiliasi Belanja SKPD setiap bulan belum tertib dilaksanakan
6. Pentahapan penyusunan APBD dan P-APBD tidak tepat waktu
7. Anggaran Belanja Pegawai terlalu tinggi, melebihi 30% dari total anggaran belanja dalam APBD
8. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai berstatus tidak aktif (meninggal dunia; ditahan)

C. KEPEGAWAIAN

1. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
2. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
3. Belum Optimalnya Penerapan Merit Sistem.

D. PENDIDIKAN PELATIHAN

1. Belum tersedianya Gedung pelatihan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi ASN di Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov dan Pemkab) yang berakibat:
2. Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi ASN kurang karena biaya penyelenggaraan pelatihan menjadi relative besar
3. Sulit memperoleh status sebagai Lembaga pelatihan yang terakreditasi

E. PENELITIAN DAN KELITBANGAN

1. Belum Optimalnya rekomendasi hasil penelitin yang ditindaklanjuti
2. Masih kurangnya OPD yang menghasilkan inovasi daerah

5.3.2.6. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pendukung

A. SEKRETARIAT DAERAH

Biro Hukum

1. Hasil Fasilitasi Perda dan Pergub lama di Kemendagri
2. Belum adanya ASN yang mengikuti diklat jabatan (Perancang Perundang-undangan, Analis Hukum, Penanganan Perkara)
3. Perangkat daerah mengambil langkah hukum tanpa berkoordinasi dengan Biro Hukum
4. Terbatasnya SDM dalam melakukan kajian dan evaluasi produk hukum daerah

Biro Organisasi

5. Kualitas pelayanan public pada perangkat daerah sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku masih perlu ditingkatkan
6. Penataa ketatalaksanaan yang belum optimal (SOP, Probis, penertiban pakaian dinas, dll)
7. Pemenuhan capaian indicator RB, SAKIP dan Budaya Kerja masih perlu ditingkatkan
8. Jumlah perangkat daerah terlalu gemuk tidak berbanding lurus dengan potensi daerah dan tidak mempunyai Fokus prioritas
9. Masih terdapat beberapa formasi jabatan fungsional yang belum mendapatkan rekomendasi dan instansi

Biro Barang dan Jasa

10. Rendahnya pencatatan nontransaksional pada SPBE untuk belanja pengadaan langsung
11. PPK tidak menyelesaikan tahapan pengadaan sampai tahap akhir pada aplikasi SPBE
12. Perubahan katalog versi 5 ke versi 6
13. OPD tidak menyelesaikan penginputan RUP
14. Sarana dan Prasarana belum memadai
15. Pemanfaatan layanan Advokasi Pengadaan, WBS, SP4N Lapor, dan Helpdesk belum optimal (Pelaku pengadaan menggunakan WA untuk berkonsultasi)

B. SEKRETARIAT DPRD

1. Belum Efektifnya Peraturan Perundang-Undangan
2. Belum Optimalnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat
3. Belum Optimalnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

5.3.2.7. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pengawasan

A. INSPEKTORAT

1. Masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghadapi Permasalahan Hukum (Tindak Pidana Korupsi)
2. Kurangnya Respon Entitas (OPD) dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan
3. Belum maksimalnya Pelaksanaan MoU Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan antara APIP dan APH
4. APIP (Inspektorat Daerah) Belum dapat melakukan Pengawasan Secara menyeluruh atas Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan fisik dikarenakan keterbatasan dukungan sumber daya finansial dalam Operasionalisasi kelembangaan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan analisis kerangka ekonomi daerah dan analisis kapasitas riil keuangan daerah, yang kemudian disajikan dalam 2 (dua) subbab yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memasuki babak baru seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Terbitnya undang-undang ini telah membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan tujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, UU ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya nasional, serta menciptakan hubungan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel antara pusat dan daerah. UU HKPD memberikan kerangka kerja baru yang dapat mengubah cara pengelolaan keuangan daerah. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Implementasi yang efektif dari UU HKPD akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana interaksi antara kebijakan pusat dan pengelolaan keuangan daerah dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pemerintah pusat memiliki dampak signifikan terhadap keuangan daerah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti: (i) Transfer Dana, kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti DAU dan DAK, sangat penting untuk mendukung anggaran daerah yang mana kebijakan ini dapat memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan; (ii) Regulasi Pajak, kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat memengaruhi potensi pendapatan daerah, misalnya pengaturan pajak yang lebih fleksibel dapat memberikan ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD; dan (iii) Prioritas Pembangunan, kebijakan pusat yang menetapkan prioritas pembangunan nasional juga berimplikasi pada alokasi anggaran daerah, sehingga daerah perlu menyesuaikan rencana pembangunan agar sejalan

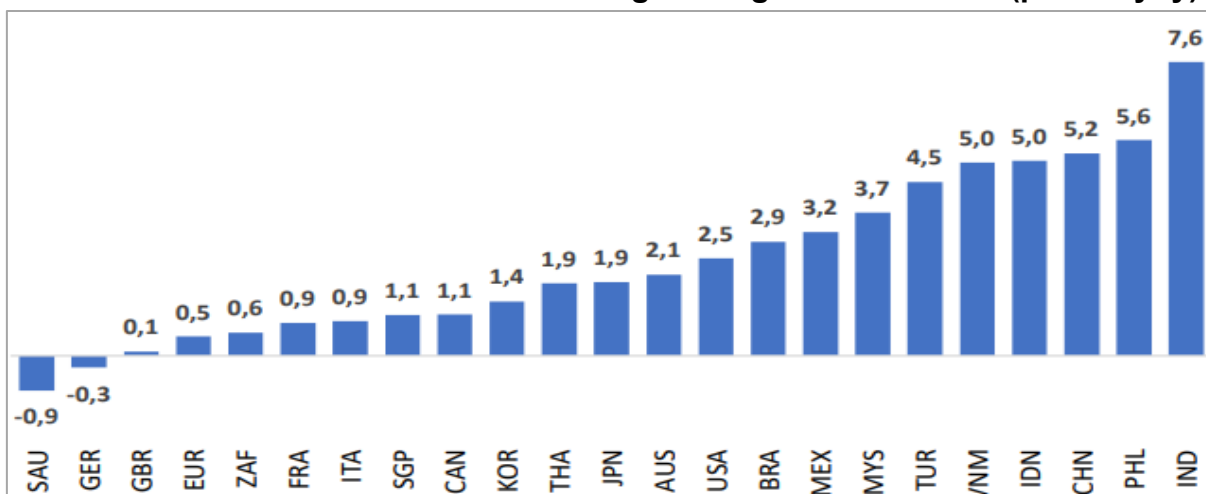
dengan kebijakan nasional, sehingga dapat memperoleh dukungan dana yang lebih besar.

Salah satu hal yang menjadi sangat krusial dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025–2029 adalah gambaran keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang kondisi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Kondisi keuangan daerah yang dimaksudkan adalah kapasitas atau kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat Rancangan RPJMD Tahun 2025–2029 akan menjadi acuan bagi para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas yang umumnya disebut sebagai janji politik.

Dalam penyajian gambaran keuangan daerah, dilakukan dengan menganalisis kondisi keuangan daerah lima Tahun terakhir menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, serta memproyeksi keuangan daerah lima Tahun kedepan menggunakan asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

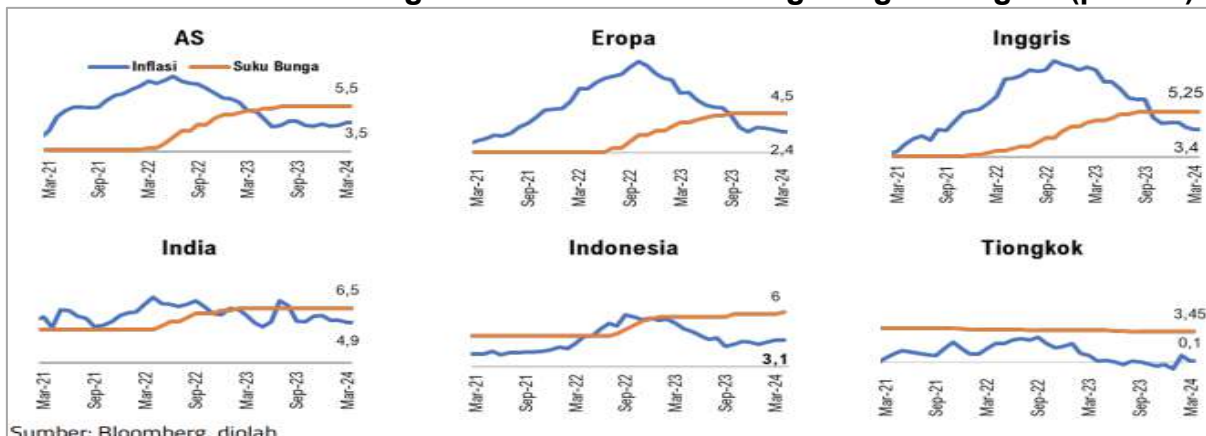
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*). Negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam sepanjang tahun 2023. Negara-negara berkembang di wilayah Asia seperti India, Filipina, Tiongkok, Vietnam dan Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen. Meskipun tumbuh cukup tinggi, perekonomian Tiongkok tumbuh di bawah ekspektasi pasar, dipicu oleh lemahnya konsumsi dan isu sektor properti. Sementara itu, negara-negara di Zona Eropa tumbuh sangat lemah (di bawah 1 persen), sedangkan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapura tumbuh terbatas (di bawah 2 persen). Di tengah pengetatan moneter yang agresif, perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tumbuh cukup tinggi (2,5 persen), ditopang oleh konsumsi dan juga investasi.

Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2023 (persen/yoy)

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Sementara itu, tren penurunan harga komoditas global yang terjadi pada tahun 2023 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2024, seiring dengan masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, berbagai ketidakpastian dapat memicu fluktuasi harga komoditas, terutama faktor geopolitik dan perubahan iklim. Sepanjang tahun 2023, harga komoditas energi seperti minyak mentah, batu bara dan gas alam mengalami penurunan. Sementara itu, sampai dengan akhir April 2024 harga minyak masih meningkat, dipicu oleh pengumuman perpanjangan pengurangan produksi oleh negara OPEC+ hingga Juni 2024 serta kerentanan rantai pasok akibat tensi geopolitik. Tidak berbeda dari komoditas energi, harga beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan gandum mengalami penurunan sepanjang tahun 2023. Sementara itu, harga beras global sempat melonjak sejak Oktober 2023, dipicu oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang. Hal tersebut memicu penurunan hasil panen, sehingga mendorong negara pengekspor utama beras, seperti India, melakukan pelarangan ekspor yang selanjutnya memicu lonjakan harga beras global. Grafik dibawah mengilustrasikan perbandingan perkembangan harga komoditas tahun 2023 dan 2024.

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara-Negara (persen)

Sumber: Bloomberg, diolah

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

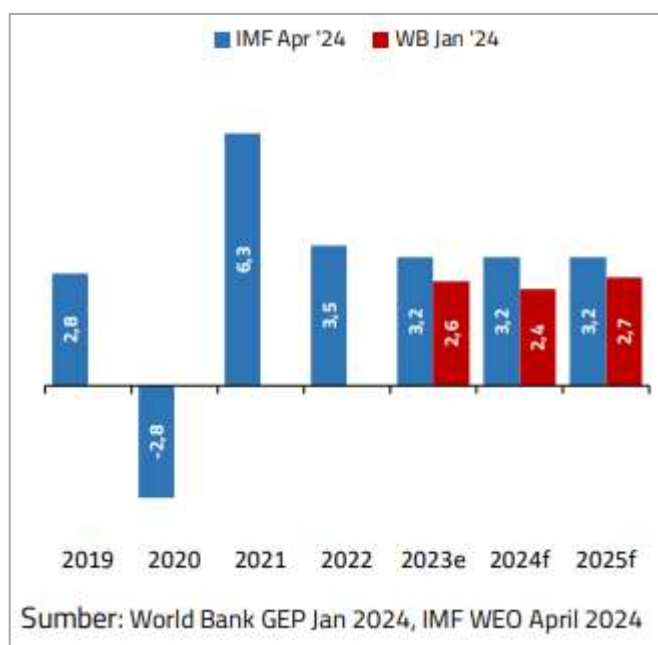
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 6, World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade. Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut (*high for longer*). Meskipun pada bulan Maret 2024 *the Fed* sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (*capital outflow*) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan *cost of fund*, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (*debt distress*), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko debt distress tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami *debt distress*.

Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam *WEO Updates* Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko debt distress. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau dependency ratio secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua (*ageing population*).

Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki dependency ratio lebih dari 50 persen. Dalam kondisi dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global.

Penurunan angka kelahiran dan ageing population dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. Ageing population juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial. Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu ageing population di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

Grafik 3.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

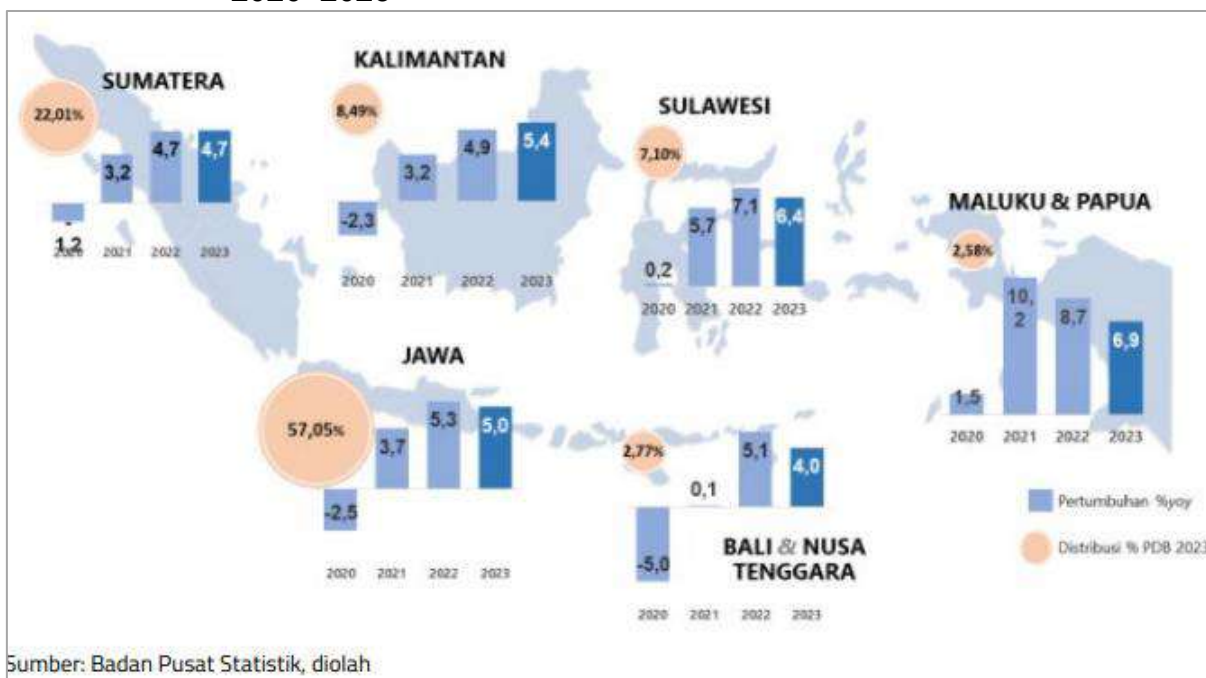
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan

pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).

Grafik 3.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020–2023



Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun

2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

3.1.4 Kondisi Perekonomian Daerah (analisis arah kebijakan ekonomi daerah)

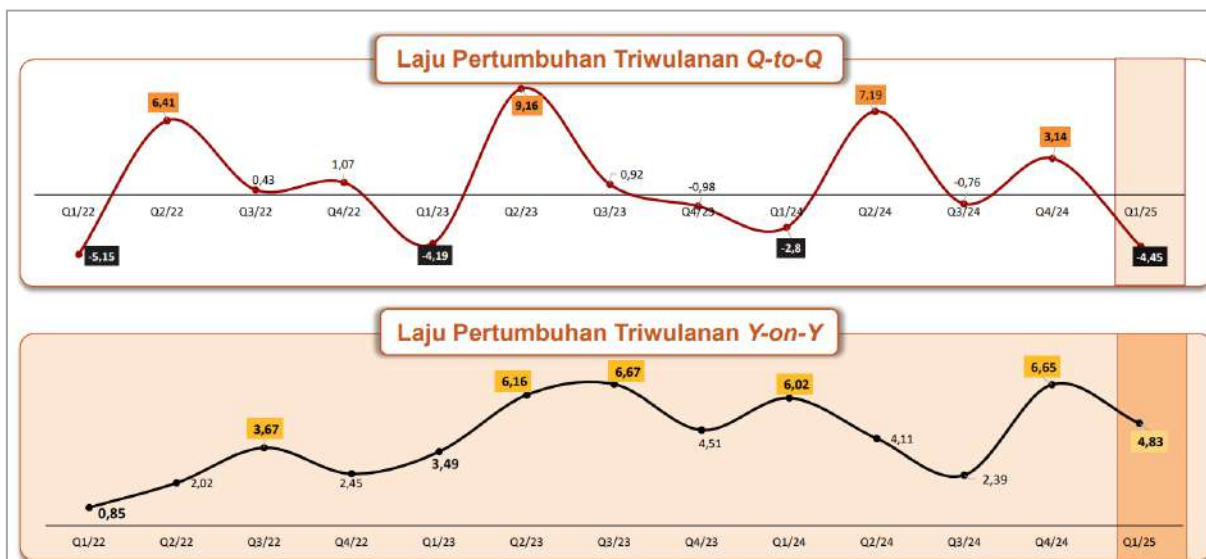
a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah menyebabkan perekonomian tumbuh pada sebagian besar kategori lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Tiga kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,83 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 13,97 persen, dan kategori Jasa Perusahaan yang mampu tumbuh sebesar 12,45 persen. Di sisi lain, terdapat empat kategori yang mengalami kontraksi dibandingkan triwulan I-2024, yaitu kategori konstruksi; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2025 menunjukkan perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,32 persen dengan andil terbesar pada subkategori Perkebunan Tahunan. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,68 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 9,62 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,24 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,18 persen.

Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 4,45 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan nilai tambah yang tercipta pada triwulan I-2025 mengalami penurunan dibanding triwulan IV-2024. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kinerja perekonomian pada triwulan I-2025 tampak lebih rendah dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh sebesar 3,14 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja triwulan I-2025 belum bisa lebih baik dibanding triwulan IV-2024. Begitupun jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian triwulan I-2024 yang berkontraksi 2,80 persen, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja di triwulan I-2025 belum dapat mengimbangi kinerja perekonomian pada triwulan yang sama tahun lalu. Penurunan kinerja perekonomian pada triwulan I-2025 disebabkan oleh penurunan nilai tambah yang terjadi pada kategori lapangan usaha yang memiliki andil yang cukup besar. Kategori lapangan usaha yang memiliki besaran kontraksi terdalam adalah kategori

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 39,35 persen. Kategori lapangan usaha dengan kontraksi terdalam kedua adalah kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 11,92 persen. Selanjutnya, kategori dengan kontraksi terdalam ketiga adalah kategori Perdagangan sebesar 10,07 persen.

Grafik 3.5. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2022–Q1/2025 (Persen)



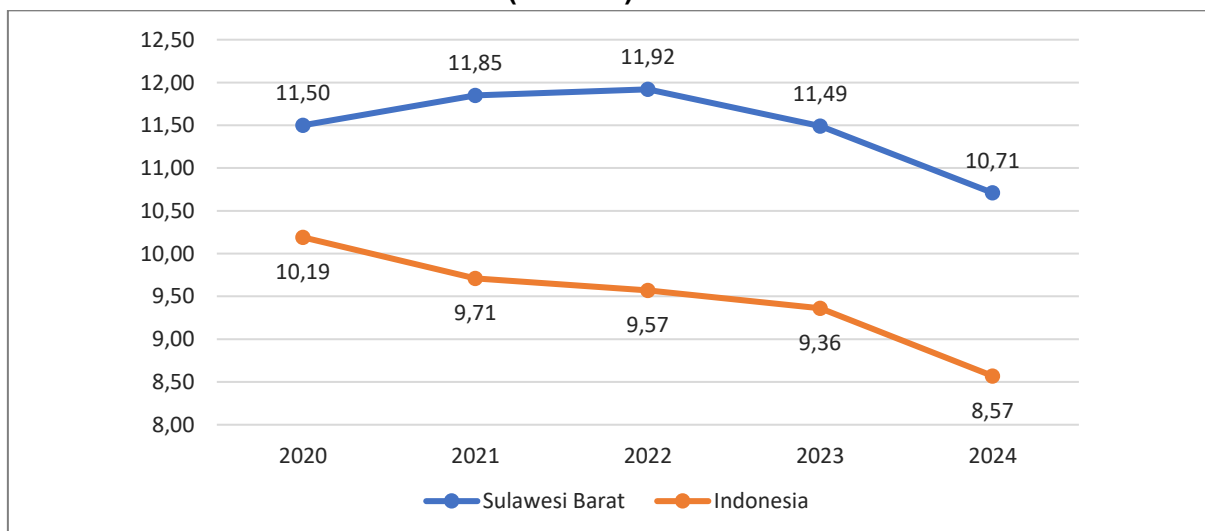
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2025

b. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di antara berbagai sektor. Kemajuan pembangunan suatu daerah sangat terkait dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi kunci utama. Namun, pertumbuhan tersebut perlu disertai dengan upaya pemerataan pendapatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan faktor-faktor seperti pendidikan rendah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang kurang memadai. Upaya pengentasan kemiskinan yang berhasil harus melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya dengan keterpaduan di antara mereka, dapat dihasilkan solusi yang efektif. Keseluruhan, penanganan kemiskinan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitasnya, bersama dengan komitmen untuk menciptakan perubahan positif melalui upaya bersama yang holistik. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Grafik 3.6. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2020–2024 (Persen)

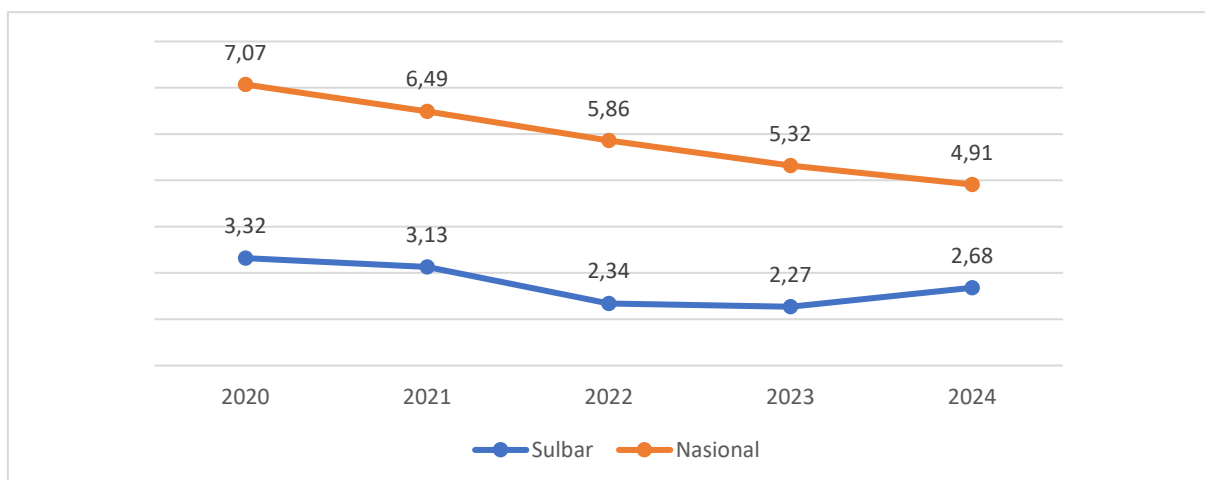


Sumber: BPS, bps.go.id

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada Tahun 2023 yakni sebesar 2,23 persen dan tertinggi berada pada Tahun 2020 sebesar 3,32 persen. meski kembali naik di Tahun 2024 sebesar 2,68 persen. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 4,91 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional.

Grafik 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3.2.1 Kebijakan Rencana Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana transfer pusat dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2026, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mendorong kerjasama yang intensif dengan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam penagihan pajak dan opsen pajak yang menjadi kewenangan masing masing.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi pembayaran.
3. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan deviden yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Peningkatan kinerja layanan BLUD.
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Balai Wilayah Sungai Sulawesi Barat, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Instansi terkait lainnya.
10. Meningkatkan kinerja dan akurasi data yang menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana transfer oleh pemerintah pusat.

Secara umum realisasi untuk pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp1.921.190.082.455,31. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.154.002.669.913,00 atau meningkat sebesar 12,12 persen dari realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Pendapatan Daerah diproyeksikan berdasarkan asumsi rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024–2026. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan analisis trend yang dilakukan serta upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang direncanakan sebesar Rp558.213.716.163,00, diasumsikan terjadi kenaikan PAD sebesar 10,88 persen dengan rencana kenaikan pajak daerah sebesar 8,62 persen, kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar 2.095,09 persen, kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,27 persen dan penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 65,91 persen. Selanjutnya gambaran realisasi tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2025 dan proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027

Kode					Uraian	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	Pagu APBD TA.2025	Proyeksi P-RKPD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
4					PENDAPATAN DAERAH	1.917.849.352.273,79	2.104.676.581.406,00	1.890.215.647.497,00	2.140.767.952.074,00	2.314.107.302.963,00
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.897.367.881,79	655.461.713.238,00	593.081.227.329,00	724.276.637.940,00	572.187.271.152,00
4	1	01			Pajak Daerah	424.900.921.421,00	463.806.635.915,00	474.806.635.915,00	577.170.901.286,00	445.951.516.345,00
4	1	02			Retribusi Daerah	2.696.689.582,00	158.410.450.441,00	75.029.964.532,00	87.000.000.000,00	5.356.868.773,00
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.167.724.164,00	14.230.290.824,00	14.230.290.824,00	37.018.351.003,00	9.073.895.633,00
4	1	04			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.132.032.714,79	19.014.336.058,00	29.014.336.058,00	23.087.385.651,00	111.804.990.401,00
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.390.839.473.648,00	1.426.008.063.000,00	1.295.771.891.000,00	1.415.128.784.966,00	1.740.446.320.261,00
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.390.839.473.648,00	1.426.008.063.000,00	1.295.771.891.000,00	1.415.128.784.966,00	1.740.446.320.261,00
4	2	01	06		Insentif Fiskal	-	6.554.777.000,00	6.554.777.000,00	-	-
4	2	01	07		Dana Bagi Hasil (DBH)	23.146.396.000,00	21.351.778.000,00	21.351.778.000,00	24.490.412.100,00	26.939.453.310,00
4	2	01	08		Dana Alokasi Umum (DAU)	1.066.935.225.997,00	1.082.355.049.000,00	1.022.515.062.000,00	1.145.288.098.866,00	1.405.480.639.931,00
4	2	01	09		Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.757.851.651,00	315.746.459.000,00	245.350.274.000,00	245.350.274.000,00	308.026.227.020,00
4	2	01	09	01	DAK Fisik	98.592.921.182,00	84.214.711.000,00	13.772.926.000,00	13.772.926.000,00	103.831.892.950,00
4	2	01	09	02	DAK Non Fisik	202.164.930.469,00	231.531.748.000,00	231.577.348.000,00	231.577.348.000,00	204.194.334.070,00
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.112.510.744,00	23.206.805.168,00	1.362.529.168,00	1.362.529.168,00	1.473.711.550,00
4	3	01			Pendapatan Hibah	22.486.159.275,00	22.639.401.968,00	795.125.968,00	795.125.968,00	860.008.248,00
4	3	02			Dana Darurat	-	-	-	-	-
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	626.351.469,00	567.403.200,00	567.403.200,00	567.403.200,00	613.703.302,00

3.2.2. Kebijakan Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah menjadi komponen dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan merealisasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: belanja pegawai (Gaji ASN, Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur, Gaji DPRD dan TPP) dan belanja jasa kantor (listrik, air, internet dan belanja premi asuransi kesehatan).
2. Pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pemilihan tahun 2024.
3. Pengalokasian belanja daerah untuk membiayai pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
4. Pengalokasian belanja daerah untuk menunjang 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional.
5. Pengalokasian daerah untuk belanja *mandatory spending* diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, APIP dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
6. Pengalokasian belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi.

Secara umum realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.839.819.233.030,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.749.498.339.619,00 mengalami penurunan dari realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peningkatan rencana belanja daerah tersebut, akan memberikan dampak bagi pengalokasian belanja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran realisasi tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2025 dan proyeksi belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027

Kode					Uraian	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	Pagu APBD TA.2025	Proyeksi P-RKPD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
5					BELANJA DAERAH	1.841.274.266.891,92	2.086.110.952.646,00	1.831.921.653.024,00	2.067.608.402.540,00	2.299.107.302.963,00
5	1				BELANJA OPERASI	1.425.876.129.423,20	1.618.021.969.197,00	1.451.587.479.681,00	1.618.857.333.730,00	1.427.576.922.332,00
5	1	01			Belanja Pegawai	731.625.282.871,00	806.735.697.038,00	778.301.733.460,00	791.301.733.460,00	689.732.190.889,00
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	570.435.932.912,20	761.859.639.281,00	627.642.408.343,00	767.458.205.297,00	697.421.569.323,00
5	1	03			Belanja Bunga	13.092.981.960,00	8.723.438.878,00	7.773.438.878,00	2.342.495.973,00	-
5	1	04			Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	1	05			Belanja Hibah	110.061.931.680,00	37.473.194.000,00	25.733.399.000,00	43.039.899.000,00	36.115.562.120,00
5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	660.000.000,00	3.230.000.000,00	12.136.500.000,00	14.715.000.000,00	4.307.600.000,00
5	2				BELANJA MODAL	215.143.171.721,72	290.242.119.227,00	195.760.285.101,00	214.591.705.855,00	691.142.207.103,00
5	2	01			Belanja Modal Tanah	37.075.642.233,00	50.504.235.000,00	8.045.000.000,00	12.804.862.500,00	56.584.375.000,00
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.562.008.063,00	89.246.720.948,00	52.972.646.647,00	57.065.599.334,00	107.467.904.082,00
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.366.651.013,72	36.348.910.186,00	15.277.151.200,00	26.408.670.201,00	152.172.817.494,00
5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.439.908.747,00	107.427.658.093,00	115.563.852.624,00	115.977.306.820,00	301.071.079.277,00
5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	468.695.000,00	924.195.000,00	746.470.000,00	292.000.000,00	2.111.906.250,00
5	2	06			Belanja Modal Aset Lainnya	3.230.266.665,00	5.790.400.000,00	3.155.164.630,00	2.043.267.000,00	71.734.125.000,00
5	3				BELANJA TIDAK TERDUGA	-	5.000.000.000,00	9.142.024.020,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5	3	01			Belanja Tidak Terduga	-	5.000.000.000,00	9.142.024.020,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5	4				BELANJA TRANSFER	200.254.965.747,00	172.846.864.222,00	175.431.864.222,00	224.159.362.955,00	170.388.173.528,00
5	4	01			Belanja Bagi Hasil	200.254.965.747,00	155.046.864.222,00	160.546.864.222,00	169.209.362.955,00	164.388.173.528,00
5	4	02			Belanja Bantuan Keuangan	-	17.800.000.000,00	14.885.000.000,00	54.950.000.000,00	6.000.000.000,00
					SURPLUS / (DEFISIT)	76.575.085.381,87	18.565.628.760,00	58.293.994.473,00	73.159.549.534,00	15.000.000.000,00

3.2.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat dilaksanakan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang dan penyertaan modal.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp64.105.879.694,00. Namun untuk APBD Pokok Tahun Anggaran 2026, kebijakan penerimaan pembiayaan diasumsikan tanpa memperhitungkan adanya SiLPA.

Selanjutnya Pada APBD Pokok tahun 2026 kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan dengan pengalokasian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp93.460.748.391,00 yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang kepada SMI sebesar Rp83.460.748.391,00 dan penyertaan modal daerah ke Bank Sulselbar sebesar Rp10.000.000.000,00.

Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 s.d. proyeksi Tahun 2027 telah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 s.d. Tahun 2027

Kode					Uraian	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	Pagu APBD TA.2025	Proyeksi P-RKPD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
6					PEMBIAYAAN DAERAH					
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.107.207.840,22	80.922.512.579,00	41.194.146.866,00	37.301.198.857,00	-
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.107.207.840,22	80.922.512.579,00	41.194.146.866,00	37.301.198.857,00	-
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6	1	07			Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-
6	1	08			Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-	-
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.488.146.356,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	110.460.748.391,00	15.000.000.000,00
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	27.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.488.146.356,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	83.460.748.391,00	-
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6	2	06			Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-
6	2	07			Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-	-
					PEMBIAYAAN NETTO	- 35.380.938.515,78	- 18.565.628.760,00	- 58.293.994.473,00	- 73.159.549.534,00	- 15.000.000.000,00
					SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	41.194.146.866,09	-	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam tahapan awal pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi menekankan akselerasi pencapaian visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” melalui penetapan sasaran dan prioritas pembangunan yang terukur, terarah, dan responsif terhadap isu strategis daerah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026 dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan teknokratik dan normatif, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Fokus pembangunan diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan arah yang lebih terfokus dalam pencapaian kinerja pembangunan di tahun kedua implementasi RPJMD Tahun 2025–2029. Sasaran dirumuskan sebagai turunan langsung dari tujuan pembangunan daerah dan mencerminkan capaian antara yang ingin diraih melalui program dan kegiatan strategis lintas sektor.

Perumusan sasaran pembangunan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi isu utama, proyeksi kebutuhan masyarakat, serta potensi unggulan daerah yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Setiap sasaran disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan logis antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan, serta mengacu pada indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif. Dengan pendekatan tersebut, sasaran pembangunan Tahun 2026 diharapkan mampu mengonsolidasikan upaya pencapaian target prioritas pembangunan provinsi, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, dan mendukung penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RKP Tahun 2026.

Dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 adalah:

“SULAWESI BARAT MAJU DAN SEJAHTERA”

Yang mana, Maju dimaknakan sebagai kondisi dimana Sulawesi Barat mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, yang mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Maju juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, inovatif dalam berbagai sektor, dan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan, Sejahtera dimaknakan sebagai kondisi dimana

masyarakat Sulawesi Barat hidup dalam kesejahteraan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan secara signifikan antar kelompok masyarakat. Sejahtera juga dimaknakan sebagai kondisi dimana sumberdaya manusia Sulawesi Barat benar-benar berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Misi yang akan dijalankan dalam lima tahun kedepan untuk mencapai Visi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 adalah:

1. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**, misi ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati dan memberi manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat serta menciptakan lapangan kerja yang luas. Misi ini juga diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang persisten dengan tetap menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
2. **Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat, terutama penduduk miskin, dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar, menjaga daya beli masyarakat, memperluas sumber-sumber penghidupan yang layak, dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap berbagai sumberdaya ekonomi dan layanan publik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.
3. **Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter**, misi ini diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter dengan meningkatkan dan memperluas akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan keahlian, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan akhlak, iman dan taqwa kepada Allah SWT.
4. **Membangun Infrastruktur, Konektivitas, dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**, misi ini diarahkan untuk menyediakan berbagai infrastruktur sosial ekonomi yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menciptakan konektivitas antar wilayah untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Misi ini juga diarahkan untuk mendorong pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas**, misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata-kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan pemerintahan daerah yang bersih (clean government). Pembinaan kelembagaan birokrasi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pengembangan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misi ini juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan

rasa aman, tenteram, damai, hormanis, rukun, saling menghormati, dan penuh toleransi.

Tabel 4.1. Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Provinsi Sulawesi Barat

No	Misi	Pokok Visi
1	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Maju
2	Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sejahtera
3	Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Sejahtera
4	Membangun Infrastruktur, Konektivitas, dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Maju
5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Maju

Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 sebagaimana telah diuraikan di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah Tujuan dan Sasaran, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan (4) memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, and timely*).

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029

Elemen	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Visi	Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera						
Misi 1	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan						
Tujuan 1	Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	5,20	5,60	8,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDB Nasional	Persen	0,30	0,30	0,30	0,30
Sasaran 1.1	Berkembangnya Hilirisasi Komoditas Unggulan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,42	10,78	11,15	12,62
Sasaran 1.2	Meningkatnya Peran Ekonomi Biru dalam Perekonomian Daerah	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	n/a	25,64	26,76	31,12
Sasaran 1.3	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,330	0,320	0,310 – 0,306	0,286 – 0,282
Sasaran 1.4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,68	2,51	2,38 – 2,19	1,90 – 1,76
Misi 2	Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat						
Tujuan 2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Pendapatan per-Kapita	Rp Juta	42,72	45,99	49,74	71,90
Sasaran 2.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,71	10,42	9,74 – 9,05	5,80 – 5,11

Elemen	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 2.2	Membaiknya Posisi Tawar Petani	Nilai Tukar Petani	Rasio	144,62	145,47	146,64	151,20
Misi 3	Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter						
Tujuan 3	Meningkatkan Kualitas dan Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks	n/a	0,51	0,51	0,54
Sasaran 3.1	Meningkatnya Akses terhadap Layanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	8,15	8,25	8,50	9,50
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	13,02	13,28	14,10
Sasaran 3.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,12	71,74	74,99
Misi 4	Membangun Infrastruktur, Konektivitas, dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup						
Tujuan 4	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	78,34	79,44	80,54	84,94
Sasaran 4.1	Membaiknya Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	75,40	77,50	80,00	100
Tujuan 5	Memperbaiki Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	84,92	85,50	86,00	88,00
Sasaran 5.1	Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	60,32	61,65	65,40	77,00
Sasaran 5.2	Menurunnya Potensi Risiko Bencana	Indeks Risiko Berencana	Indeks	155,69 (Tinggi)	135 (Sedang)	128 (Sedang)	100 (Sedang)

Elemen	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas						
Tujuan 6	Memperkuat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,76 (BB)	76,40 (BB)	79,80 (BB)	89,90 (A)
Sasaran 6.1	Membaiknya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,35	85,00	86,00	90,00
Sasaran 6.2	Meluasnya Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,70 (Sangat Baik)	3,80 (Sangat Baik)	4,00 (Sangat Baik)	4,50 (Memuaskan)
Sasaran 6.3	Berkembangnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,50 (Inovatif)	53,50 (Inovatif)	57,50 (Inovatif)	70,00 (Sangat Inovatif)
Sasaran 6.4	Membaiknya Pengendalian dan Pengawasan	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	77,00	78,00	79,00	83,00
Tujuan 7	Menciptakan Kehidupan Sosial yang Aman, Tertib, dan Tenang	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	n/a	3,80	3,90	4,30
Sasaran 7.1	Membaiknya Lingkungan Sosial Masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	n/a	0,17	0,16	0,12
Sasaran 7.2	Membaiknya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,90	80,02	82,09	90,00

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang terintegrasi hingga ke level daerah, diperlukan keselarasan antara arah kebijakan pusat dengan strategi pembangunan di tingkat provinsi. Salah satu bentuk konkret dari sinergi tersebut adalah penyelarasan antara Asta Cita, yang merupakan delapan agenda prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029, dengan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat bukan sekadar mengikuti arah pembangunan nasional, tetapi juga mengambil peran aktif dan strategis dalam menyukseskan agenda Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan bahwa misi daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional, diharapkan setiap kebijakan yang diimplementasikan mampu menghasilkan dampak yang sinergis, memperkuat integrasi antarwilayah, serta menjamin efektivitas pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Lebih jauh, harmonisasi ini juga mencerminkan komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama membangun bangsa melalui pendekatan yang kontekstual namun tetap dalam koridor visi besar negara.

Tabel 4.3. Keselarasan Asta Cita/Misi RPJM Nasional Tahun 2025–2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029

Asta Cita/Misi RPJM Nasional Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (1)	
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (2)	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (1)
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (3)	Membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (4)
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (4)	Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter (3)

Asta Cita/Misi RPJM Nasional Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri (5)	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (1)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (6)	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (1) Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (7)	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas (5)
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (8)	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas (5)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Asta Cita/Misi RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 telah selaras. Setidaknya ini bisa terlihat dari substansi masing-masing Misi. Tentu saja, Asta Cita/Misi RPJMN memiliki dimensi substansi yang luas sesuai dengan cakupan wilayahnya (skala Nasional) dibandingkan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Perbedaan skala wilayah, menyebabkan Misi Asta Cita/Misi RPJMN terdiri atas 8 (delapan), sedangkan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat hanya 5 (lima), namun dari sisi substansi tetap menunjukkan keselarasan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penggunaan diksi dan keluasan substansi Misi. Dengan kata lain, seluruh substansi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat telah “terpanyungi” oleh Misi RPJMN.

Indikator makro pembangunan yang merupakan sasaran pembangunan adalah cerminan dari kondisi umum perekonomian, kesejahteraan sosial, serta daya saing suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, keberadaan indikator makro menjadi instrumen penting dalam mengukur arah dan capaian pembangunan secara agregat, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pada data dan fakta. Indikator makro nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menjadi rujukan utama dalam penyusunan target indikator makro daerah. Oleh karena itu, penyelarasan target antara pusat dan daerah menjadi langkah strategis guna menjaga konsistensi arah pembangunan, memperkuat

koordinasi lintas pemerintahan, dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, indikator makro tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai kompas kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah dalam merancang langkah-langkah strategis yang lebih terfokus, terarah, dan berkelanjutan.

Tabel 4.4. Indikator Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target Daerah 2025	Target Daerah 2026	Target Nasional 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	5,20	5,60	5,0–5,6
2	PDRB per-Kapita	Rp Juta	42,72	45,99	49,74	48,2–49,5
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	0,30	0,30	0,30	0,30
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,71	10,42	9,74 – 9,05	8,50–9,20
5	Rasio Gini	Persen	0,330	0,320	0,310 – 0,306	0,310–0,320
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	n/a	0,51	0,51	0,52
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	60,32	61,65	65,40	60,48–65,40
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	84,92	85,50	86,00	84,94
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,68	2,51	2,38 – 2,19	2,36–2,42

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan prioritas pembangunan daerah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mengarahkan sumber daya pembangunan secara tepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam menetapkan prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memadukan berbagai pendekatan mulai dari kajian teknokratik yang berbasis data dan analisis permasalahan, hingga pendekatan normatif yang merujuk pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta aspirasi yang tumbuh dari proses partisipatif.

Prioritas pembangunan tidak hanya mencerminkan jawaban atas tantangan yang sedang dihadapi daerah, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kolektif dalam menjawab harapan publik secara adil dan berkelanjutan. Penetapan prioritas juga memperhatikan kesinambungan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana

tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan Asta Cita, serta keterpaduannya dengan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dengan mengutamakan keterpaduan lintas sektor dan wilayah, serta menjunjung asas keadilan dan inklusivitas, prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kualitas layanan publik. Lebih dari itu, prioritas pembangunan juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025–2029 **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada bagan dibawah ini:



PN 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

Keterangan: *) Lima Direktif Presiden

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 merupakan bagian strategis dalam proses perencanaan tahunan yang bertumpu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Penyusunan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang mengatur substansi serta mekanisme penyusunan dokumen RKPD. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga diarahkan agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta mendukung pencapaian visi jangka panjang pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025–2045 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta menjaga kesinambungan arah pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Asta Cita.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dirumuskan dengan mempertimbangkan pendekatan teknokratik dan normatif yang kuat. Tema ini mencerminkan fokus pembangunan terhadap pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tema tersebut lahir dari pengkajian mendalam terhadap isu-isu strategis global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, isu nasional seperti ketimpangan wilayah dan daya saing SDM, serta isu regional yang mencakup rendahnya nilai tambah ekonomi daerah dan keterbatasan akses pelayanan dasar di wilayah tertinggal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dikejar dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kebermanfaatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, membuka lapangan kerja yang luas, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Penjabaran prioritas dan sasaran ini tidak hanya menjadi ukuran kinerja pembangunan tahunan, tetapi juga instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tetap pada jalur pencapaian visi **“Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”**.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 secara lebih terukur dan berorientasi pada hasil, telah ditetapkan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama. Indikator-indikator ini disusun berdasarkan kondisi awal RPJMD dan proyeksi capaian pada akhir periode, serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk memastikan konsistensi antara tujuan strategis RPJMD dan pelaksanaan tahunan melalui RKPD, maka setiap indikator kinerja dikelompokkan sesuai dengan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan proses pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara tepat sasaran, antara lain:

1. **Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing**, yang difokuskan pada (i) penyediaan sarana dan prasarana pertanian, (ii) penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, (iii) penjaminan ketersediaan dan akses pangan masyarakat, (iv) fasilitasi 1.000 UMKM dan ekonomi kreatif, (v) peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja.
2. **Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**, yang difokuskan pada (i) penanganan rumah tidak layak huni, (ii) pemberian bantuan sosial, bantuan KUBE dan UEP, (iii) penyediaan Listrik Hemat dan Murah dan PLTS Tersebar, (iv) pemberian bantuan asuransi bagi nelayan, beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada jenjang SMA/SMK, SLB, dan Pendidikan Tinggi, (v) bantuan iuran PBI bagi masyarakat miskin ekstrim, (vi) penyediaan lapangan pekerjaan melalui padat karya infrastruktur dan produktif.
3. **Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan**, yang difokuskan pada (i) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, (ii) penanganan Anak Tidak Sekolah, (iii) pengembangan pendidikan vokasi, (iv) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, (v) peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan RSUD Prov. Sulawesi Barat, (vi) peningkatan gizi ibu dan anak untuk pencegahan stunting, (vii) pemberian makan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, (viii) Sulawesi Barat 100% Universal Health Coverage/UHC, (ix) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan, (x) penyediaan akses jaringan internet di sekolah.
4. **Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan**, yang difokuskan pada (i) pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan, (ii) kerjasama peningkatan konektivitas transportasi udara melalui jaminan *block seat*, (iii) peningkatan jaringan irigasi pertanian, (iv) peningkatan akses sanitasi dan air bersih, (v) penyediaan akses internet pada wilayah *blankspot*, (vi) pengelolaan persampahan, (vii) penguatan mitigasi bencana, (viii) peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana.
5. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**, yang difokuskan pada (i) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik, (ii) digitalisasi layanan pemerintahan, (iii) peningkatan sistem dan budaya pemerintahan yang anti KKN, (iv) pengelolaan manajemen ASN yang profesional, (v) peningkatan kualitas layanan publik di desa melalui pemberian insentif berbasis Kinerja, (vi) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Untuk memastikan sinergi antara arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dilakukan dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyelarasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian integral dari agenda transformasi Indonesia. Penyelarasan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan

pembangunan, memperkuat kohesi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah, serta mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui tabel berikut, dapat dilihat bagaimana prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 telah dirancang agar selaras dengan delapan prioritas nasional (Asta Cita). Masing-masing prioritas provinsi ditautkan dengan isu dan arah strategis nasional yang relevan, sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah di tahun perencanaan.

Tabel 4.5. Penyelarasan Prioritas Nasional (Asta Cita) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Sulawesi Barat
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing PP4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan
PN2. Memantapkan Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PP1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing PP4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan
PN3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	PP3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan
PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	PP3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan
PN5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing
PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PP1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Sulawesi Barat
PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	PP5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Kamtibmas
PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	PP2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PP5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Kamtibmas

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2026 bukan hanya menjadi pedoman pembangunan bagi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi acuan sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten. Untuk Tahun 2026, dinamika pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks: pemulihan dan penguatan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, hingga pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kabupaten harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara merata. Sinergi antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan. Setiap program dan kegiatan di tingkat daerah harus saling menguatkan, menghindari tumpang tindih, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan semangat kolaborasi dan keselarasan perencanaan, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

5.1. Arah Kebijakan Umum

5.1.1 Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b.

kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendidikan

Pentingnya Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan yang perlu ditingkatkan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Terdapat 10 (sepuluh) indikator prioritas kabupaten yaitu:

- a. Indikator PAUD. Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun, jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten yang bersangkutan.
- b. Indikator Dasmen. Angka partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam, jumlah warga negara usia -15 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang Pendidikan. Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang Pendidikan. jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten yang bersangkutan.
- c. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 Kesetaraan, jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (*), Partisipasi anak usia 7-8 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

- d. Kemampuan Literasi. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar; pendidikan menengah, kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi. Merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi)
- e. Kemampuan Numerasi, rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (pada pelayanan dasar Pendidikan dasar). Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.
- f. Indikator PAUD. Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkbn minimal akreditasi B, Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evakuasi kelayakan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrument akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan terhadap standar nasional Pendidikan. Persentase jumlah satuan PAUD yang akreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.
- g. Indikator PAUD. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4, pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV, Pendidik PAUD pada satuan Pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam undang0undang guru dan dosen, persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1.D4 di kota/kabupaten.
- h. Indikator dasmen, iklim keamanan. Indeks iklim keamanan di satuan Pendidikan, Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan Pendidikan, perlindungan, hukuman fisik, pelecehan seksual dan aktivitasbnarkoba di lingkungan satuan Pendidikan. Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis dan rasa aman terhadap perundungan, hukuma fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras dan narkoba berdasarkan survey lingkungan belajar
- i. Iklim kebhinekaan di satuan Pendidikan, Konmdisi satuan Pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan Pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen berkebangsaan, Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar.
- j. 10. Iklim inklusivitas di satuan Pendidikan, Iklim inlusivitas menyangkut bagaimana satuan Pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas maupunlatar belakang sosial budaya. Nilai trerata iklim

inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas dan fasilitas satuan Pendidikan disabilitas berdasarkan survey lingkungan belajar.

2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di tingkat kabupaten/kota merupakan standar yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Berikut adalah komponen utama dan strategi untuk mencapai SPM kesehatan di kabupaten ialah (i) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) meliputi Pelayanan Antenatal: Minimal empat kali selama kehamilan, Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan: Penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, Pelayanan Pasca Persalinan: Pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir minimal tiga kali setelah persalinan dan Imunisasi Lengkap: Penyediaan imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan anak; (ii) Pelayanan Kesehatan Reproduksi melakukan Pemeriksaan dan Pengobatan Penyakit Menular Seksual (PMS): Akses terhadap layanan untuk diagnosis dan pengobatan PMS dan Konseling dan Tes HIV: Penyediaan layanan konseling dan tes HIV untuk ibu hamil dan populasi berisiko; (iii) Pelayanan Gizi melalui pemantauan gizi anak dan suplementasi gizi lainnya; (iv) Pelayanan Kesehatan Dasar; (v) Pelayanan Kesehatan Lingkungan meliputi Sanitasi dan Air Bersih: Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, Pengelolaan Limbah Medis: Pengelolaan limbah medis yang aman dan sesuai standar; (vi) Pelayanan Kesehatan Sekolah lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan :

SPM Kesehatan Provinsi	
Kinerja Provinsi	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
SPM Kesehatan Kab/Kota	
Siklus Hidup	1. Ibu Hamil 2. Ibu Bersalin 3. Bayi Baru Lahir 4. Balita (12-59 bulan) 5. Usia Pendidikan Dasar (7-15 tahun) 6. Usia Produktif (15-59 tahun) 7. Usia Lanjut (60+ tahun)
Penyakit Tidak Menular	8. Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas 9. Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas 10. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Penyakit Menular	11. Orang Terduga Tuberkulosis 12. Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

3. Pekerjaan Umum

SPM Bidang Pekerjaan Umum mencakup SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota. SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub-bidang Air Minum; dan

- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk sub-bidang air limbah.

Materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

4. Perumahan Rakyat

SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud untuk Daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada Kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Agar mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum dapat tercapai secara maksimal, idealnya keempat faktor tersebut harus disiapkan secara terintegrasi atau bersama-sama. Artinya, mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

Diharapkan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi dapat melakukan Proses perencanaan yang sepenuhnya berbasis SPM, Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan SPM, Menjadikan prioritas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Membuat pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran dan Membuat pemetaan kawasan atau daerah terdampak atas penegakan perda.

5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten, Arah kebijakan pembangunan kabupaten terdiri atas kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan kebijakan pembangunan kabupaten berbasis prioritas pembangunan daerah provinsi.

5.2.1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten

5.2.1.1. Penentuan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum menetapkan kawasan strategis Nasional di wilayah Sulawesi Barat. Walaupun demikian, berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah ini, maka ada beberapa kawasan strategis provinsi yang layak ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan Lumbung beras

Untuk kepentingan ketahanan pangan berupa padi dan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka ditetapkan pengembangan kawasan sawah irigasi teknis di Kabupaten Pasangkayu, Pengembangan irigasi Teknis Tommo di Kabupaten Mamuju, Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, dan pengembangan kawasan sawah irigasi teknis di Kabupaten Polewali Mandar, yang dipadu selaraskan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang potensial menyediakan air sepanjang tahun, Sungai-sungai yang potensial mendukung sistem irigasi teknis persawahan di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju seperti S, Kaluku, S, Karosa, S, Budong-Budong, S, Karama, S, Babalang, S, Tomo, S, Lariang, Sungai-sungai yang potensial mendukung sistem irigasi teknis persawahan di Kabupaten Polewali Mandar seperti S, Sa'dang Maloso, S, Mandar dan S, Mapili,

2. Kawasan Perkebunan

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: sentra-sentra perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju, sentra-sentra perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sentra-sentra perkebunan jeruk di wilayah perbatasan Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju

Tengah, dan Kabupaten Mamuju, sentra-sentra perkebunan kelapa disepanjang pesisir Selat Makassar, sentra-sentra perkebunan kopi, teh dan hortikultura di Kabupaten Mamasa.

5.2.1.2. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya terdapat di setiap kabupaten, Pengembangan kawasan budaya di Kabupaten Mamuju seperti rumah adat mamuju di Kota Mamuju dan pengembangan kerajinan tenun ikat Sekomandi, Di Kabupaten Majene terdapat Kompleks Pemakaman Raja-raja Mandar, Museum Majene, Makam pahlawan Mandar, Makam I Mannyambungi, Makam Syech Al Ma'ruf, Monumen Hj, Andi Depu, Kawasan wisata budaya dan alam di Kabupaten Mamasa, yang budaya dan karakter alamnya mirip dengan Tana Toraja terdapat Kompleks Makam Tedong-Tedong dan lokasi lokasi perayaan adat, Pengembangan kawasan pariwisata Mamasa dipadu selaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasional dari Bandara Baharuddin Lopa ke Kabupaten Tana Toraja dan sebaliknya yang melewati Kabupaten Mamasa.

5.2.1.3. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung

Untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan Kawasan Lindung Nasional (KLN) Suaka Margasatwa Mampie dan Lampoko sebagai suaka margasatwa dan margasatwa laut, begitu juga dengan Suaka Margasatwa Kalumpang yang ada di Kabupaten Mamuju, Taman Nasional Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju dan Mamasa serta kawasan perlindungan laut di sekitar P, Karampuang, P, Balabalakang di Kabupaten Mamuju dan P, Lere-lerekang di Kabupaten Majene.

5.2.2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hasil sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka ditetapkan target arah kebijakan pembangunan terhadap kabupaten untuk memenuhi harapan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten Tahun 2026 yang terdiri dari 5 (Lima) prioritas, sebagai berikut: 1) Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing; 2) Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat; 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan; 4) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan; (5) Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Majene

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Majene dengan melalui penguatan implementasi SPM, modernisasi tata kelola pemerintahan, maksimalisasi potensi bonus demografi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kabupaten Majene akan diarahkan pada pengembangan pusat pendidikan pada semua level pendidikan, terutama perguruan tinggi negeri (Universitas Sulawesi Barat), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta memudahkan akses lapangan kerja. Pada aspek ketenagakerjaan didorong melalui Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan pelaksanaan *on the job training* dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja melalui pemagangan Kewirausahaan tenaga kerja produktif dan pendataan ketenagakerjaan. Di bidang pembangunan ekonomi, akan diarahkan pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal melalui Pengembangan Kampung Sutera yang dipusatkan di Pamboang dan Malunda dan pengembangan UMKM lainnya. Begitupun disektor pertanian dengan Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan serta Pengembangan melalui diversifikasi produk unggulan sektor perikanan seperti abon, tuna, maupun pengembangan komoditi rumput laut yang tentunya disertai dengan adanya fasilitas yang memadai untuk nelayan didaerah tersebut. Pengembangan disektor pariwisata yang sangat mendukung seperti Pantai Dato dan Pantai Barane, makam raja-raja dan pahlawan mandar, pengembangan museum, dan pengembangan kawasan monumen kecil dan menengah yang kondusif, Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, serta optimalisasi program Bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dari sektor Kesehatan dengan Optimalisasi dan peningkatan Posyandu sebagai pusat layanan terdepan dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kualitas layanan Kesehatan dan Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi. Dari sektor Pendidikan Program Beasiswa keluarga tidak mampu untuk siswa kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, merupakan stimulan aktif yang mendorong angka bertahan sekolah dan meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat.

Tabel 5.1 Highlight Kebijakan Kabupaten Majene Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata 7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin 6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting 6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan 3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 9. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

2. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar pada sektor ekonomi diarahkan sebagai pusat perdagangan dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan industri melalui strategi pemasaran hasil produk pertanian dan UMKM berbasis teknologi digital, peningkatan daya saing industri pengolahan, serta mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Pengembangan kawasan destinasi wisata di gugus Pulau Kecamatan Binuang dan Destinasi Wisata Agro Kebun Raya Bulu. Pengembangan sektor pertanian terpadu berbasis korporasi petani menggunakan strategi sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS yang potensial menyediakan air sepanjang tahun. Untuk pembangunan sosial budaya, daerah ini akan diarahkan sebagai pusat pengembangan kebudayaan karena didukung oleh keanekaragaman budaya, mulai dari seni tari tradisional, seni sastra (kalinda'da), perahu sandeq, hingga peninggalan sejarah makam para raja, tokoh agama, dan pahlawan. Sedangkan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan laut, bandara perintis, pengembangan wilayah dan pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

Tabel 5.2 Highlight Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor 4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata 7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin 6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting 6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan 3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 9. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

3. Kabupaten Mamasa

Sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten yang berada pada dataran tinggi dengan cuaca udara yang sangat dingin, pada sektor pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan perkebunan, yang dikembangkan pada sentra perkebunan kopi, kakao, jagung, nilam dan tanaman hortikultura yang sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Mamasa. Pengembangan Keparawisataan yang diarahkan pada pengembangan kawasan wisata budaya dan pelestarian keindahan alam, pengembangan kawasan makam, dan pengembangan lokasi perayaan adat. Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kegiatan sosial budaya di daerah ini. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, wilayah Kabupaten Mamasa akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari sektor Kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak, Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit, Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga Kesehatan, Peningkatan kualitas pelayanan posyandu melalui Posyandu Ceting dan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder melalui program dan kegiatan yang menysasar lokus percepatan penurunan stunting. Dari sektor Pendidikan dengan Intervensi melalui program dan kegiatan seperti Pengelolaan pendidikan PAUD, Pengelolaan Sekolah Dasar, Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan Pemberiaan Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu yaitu program Indonesia Pintar serta Intervensi pada program pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Tabel 5.3 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamasa Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor 4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata budaya dan pelestarian keindahan alam, pengembangan kawasan makam, dan pengembangan lokasi perayaan adat. 7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting 6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan 3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	9. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

4. Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memegang peran strategis, dimana pengembangan wilayah diarahkan sebagai pusat pemerintahan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Kabupaten Mamuju dalam bidang pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong penetapan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Belang-Belang Mamuju melalui surat rekomendasi lokasi dan Kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Mamuju, Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan pertanian, Pengembangan UMKM melalui (Peningkatan SDM/Pelatihan, Perizinan, Peralatan) terutama Fasilitas Industri Rumah Tangga dengan bantuan akses modal dengan bantuan pasar serta Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Pemulihan pasca bencana gempa bumi dengan memaksimalkan bantuan terkait dengan Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan sesuai dengan data yang valid. Dari sektor Pendidikan dengan adanya Intervensi program pada kegiatan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Non-Formal, Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu yaitu Program Indonesia Pintar dan Program Beasiswa Keluarga Miskin dan Intervensi pada Program Portal ATS. Dari sektor Kesehatan dengan Bantuan Jaminan Kesehatan kepada penduduk miskin seperti BPJS Mandiri Gratis dan Kartu Mamuju Keren, Penguatan kelembagaan serta koordinasi tingkat Kabupaten (OPD), Kecamatan, Desa untuk memaksimalkan intervensi integrasi percepatan penurunan stunting dan Peningkatan kualitas koordinasi di Desa untuk memaksimalkan intervensi percepatan penurunan stunting melalui Rumah Desa Sehat. Rumah Gizi sebagai salah satu model berbasis komunitas sebagai upaya mengembangkan kedaulatan dan ketahanan pangan melalui pemberdayaan Ibu PKK Desa/Kelurahan serta Sosialisasi Pencegahan

Perkawinan Anak dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Tabel 5.4 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor 4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata 7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin 6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting 6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan 3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 9. Percepatan penanganan kawasan kumuh

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

5. Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Mamuju Utara yang telah berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dengan didukung pengembangan Irigasi pertanian pada desa Bambaira, desa Kasaloang, Desa Patika, Desa Rondonmayang, disamping itu adanya inovasi dengan Penguatan program *strong from home*/pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur-sayuran. Dari sektor industri melalui peningkatan daya saing UMKM Khususnya untuk udang Vaname dan Peternakan (sapi, kambing), Mengoptimalkan CSR sektor industri yang ada di Pasangkayu. Intervensi pada kelompok pesisir melalui mesin kapal dan alat tangkap, Pengembangan Komoditi gula aren. Ini merupakan dukungan Kabupaten untuk Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Mendorong dan mengembangkan kreatifitas dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini, maka akan dikembangkan kawasan pertambangan minyak blok suremana, blok pasangkayu, dan blok kuma. Dari sektor Pendidikan dengan Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga kependidikan lainnya, Pemerataan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dan perbaikan akses layanan pendidikan. Dari sektor Kesehatan dengan Meningkatkan akses layanan kesehatan, Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, penerapan gerakan hidup sehat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil dan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita.

Tabel 5.5 Highlight Kebijakan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor 4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata 7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin 6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan 3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 9. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

6. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan ibukota kabupaten adalah Topoyo. Arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tidak jauh berbeda dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Mamuju. Pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah diarahkan pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS) yang potensial. Pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra sentra perkebunan kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan kelapa dalam. Selain itu, pengembangan kawasan pertambangan minyak blok karama dan blok budong-budong kini masuk kedalam wilayah daerah ini yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Mamuju. Pengembangan sarana pertanian (sektor unggulan), diversifikasi produk unggulan pertanian dan pengelolaan perikanan budidaya. Dari sektor industri melalui pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Pengembangan UMKM dan investasi, Pengembangan produksi dan hilirisasi pertanian. Dari sektor tenaga kerja untuk mengembangkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam menekan tingkat pengangguran. Mendorong investasi baru padat karya, Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan serta Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Dari sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan Pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, Pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, Penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Tabel 5.6 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	1. Penyediaan infrastruktur untuk melakukan hilirisasi komoditas strategis, khususnya pada sektor pertanian secara luas 2. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk melakukan ekspansi bisnis 3. Perbaikan iklim investasi dan Peningkatkan pemasaran investasi untuk menarik minat investor 4. Penyediaan infrastruktur untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif 5. Pendampingan pengusaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 6. Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokus pada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	7. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan 8. Pengembangan SDM yang berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Barat
Penguatan Perlindungan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	1. Perumusan keahlian (skill) yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja melibatkan stakeholder yang relevan 2. Penyediaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM 3. Penguatan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder yang relevan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja 4. Perluasan akses terhadap layanan permodalan bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masuk kategori miskin 6. Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin 7. Penguatan monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan 8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 2. Pemerataan distribusi guru, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, terutama pada kemampuan dasar literasi dan numerasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Kesehatan 5. Perbaikan pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi, terutama untuk anak yang mengalami stunting dan berisiko stunting 6. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat 7. Penerapan pola hidup sehat sebagai upaya preventif mencegah munculnya berbagai penyakit
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta mendistribusikan secara merata infrastruktur dasar yaitu seperti jalan, telekomunikasi, dan listrik dengan mengembangkan pemanfaatan EBT 2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan

Prioritas	Highlight Kebijakan/Indikasi Intervensi
	3. Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi 5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST 6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan 7. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT 8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 9. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penggunaan sistem pelaporan yang berbasis teknologi terkait kinerja, pengaduan, dan pelanggaran 2. Penerapan sistem meritokrasi secara menyeluruh, konsisten dan transparan 3. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE 4. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ASN dalam mendukung pengembangan inovasi daerah 5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi inovasi daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan toleransi sosial dalam kelompok masyarakat melalui pelibatan secara bermakna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya

5.2.3. Indikator Makro Kabupaten

Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini Rasio. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2023–2024

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	
		Realisasi	
		2023	2024
1	Kabupaten Majene	72,44	73,25
2	Kabupaten Polewali Mandar	69,24	69,88
3	Kabupaten Mamasa	68,14	68,68
4	Kabupaten Mamuju	71,07	71,86
5	Kabupaten Pasangkayu	70,42	71,04
6	Kabupaten Mamuju Tengah	67,63	68,53
Provinsi Sulawesi Barat		69,80	70,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.8 Kategori Capaian IPM Kabupaten

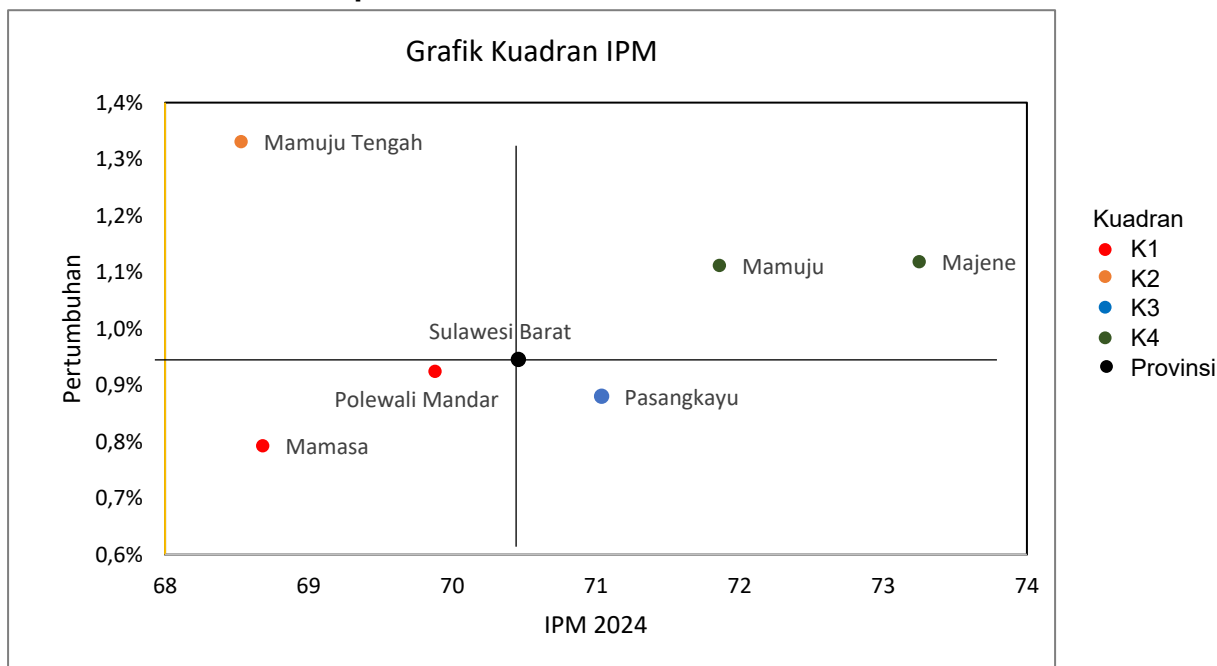
Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM dan Laju pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI
III		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, 2025

- Kuadran I, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
- Kuadran II, Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah
- Kuadran III, Pada kelompok ini terdapat 1 (Satu) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pasangkayu

- d) Kuadran IV, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten Mamuju dan Majene

Grafik 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tahun 2023–2024



Sumber: BPS, diolah Bapperida Sulbar

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM, antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan IPM.

Tabel 5.9 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Kabupaten Majene	75,02
2	Kabupaten Polewali Mandar	71,64
3	Kabupaten Mamasa	70,40
4	Kabupaten Mamuju	73,43
5	Kabupaten Pasangkayu	72,41
6	Kabupaten Mamuju Tengah	70,48
Provinsi Sulawesi Barat (Indeks Modal Manusia/IMM)		0,51

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan capaian LPE kabupaten Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, maka capaian LPE kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5.10 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2023–2024

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	
		Realisasi	
		2023	2024
1	Kabupaten Majene	5,28	5,30
2	Kabupaten Polewali Mandar	4,54	5,94
3	Kabupaten Mamasa	3,43	3,26
4	Kabupaten Mamuju	4,37	6,47
5	Kabupaten Pasangkayu	6,78	0,68
6	Kabupaten Mamuju Tengah	2,84	2,98
Provinsi Sulawesi Barat		5,25	4,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, pengembangan produksi pertanian dan perkebunan menjadi prioritas pembangunan kewilayahan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ditambah dengan peluang baru yang terbuka dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, sehingga memperbesar peluang Provinsi Sulawesi Barat dalam memasok kebutuhan pangan maupun tenaga kerja di IKN. Sehingga Pemerintah Sulawesi Barat memberikan target optimistik pada setiap kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5.11 Penetapan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Kabupaten Majene	5,41 – 5,91
2	Kabupaten Polewali Mandar	7,04 – 7,54
3	Kabupaten Mamasa	3,14 – 3,64
4	Kabupaten Mamuju	7,38 – 7,88
5	Kabupaten Pasangkayu	6,72 – 7,22
6	Kabupaten Mamuju Tengah	2,86 – 3,36
Provinsi Sulawesi Barat		5,60

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten Tahun 2024 dibandingkan capaian Tahun 2023, maka capaian kinerja TPT kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.12 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tahun 2023–2024

No	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	
		Realisasi	
		2023	2024
1	Kabupaten Majene	2,64	4,19
2	Kabupaten Polewali Mandar	1,95	3,10
3	Kabupaten Mamasa	2,35	2,50
4	Kabupaten Mamuju	2,99	2,77
5	Kabupaten Pasangkayu	2,02	1,20
6	Kabupaten Mamuju Tengah	1,83	1,70
Provinsi Sulawesi Barat		2,27	2,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

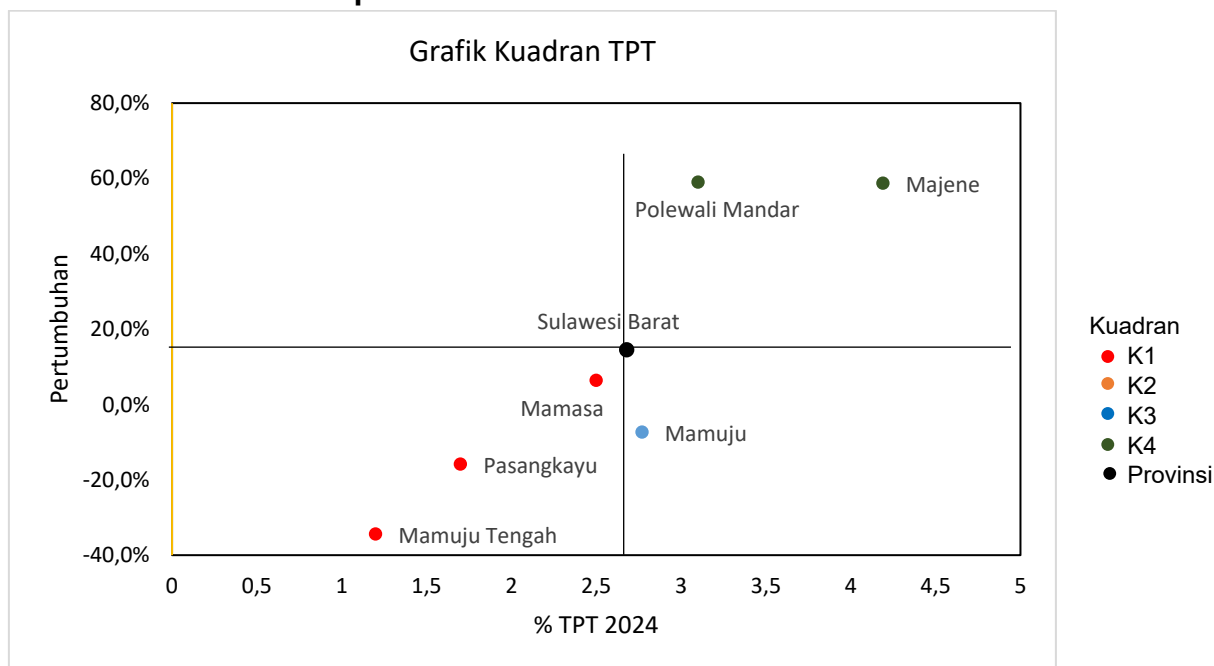
Tabel 5.13 Kategori Capaian TPT Kabupaten

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian Provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi

- a) Kuadran I, Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.
- b) Kuadran III, Pada kelompok ini terdapat 1 (Satu) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamuju.

- c) Kuadran IV, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene.

Grafik 5.2 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Pertumbuhan TPT Kabupaten Tahun 2023–2024



Sumber: BPS, diolah Bapperida Sulbar

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Salah satunya dengan menyiapkan angkatan kerja dalam memenuhi kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Tabel 5.14 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Kabupaten Majene	2,99 – 3,19
2	Kabupaten Polewali Mandar	2,72 – 2,52
3	Kabupaten Mamasa	2,40 – 2,20
4	Kabupaten Mamuju	2,79 – 2,59
5	Kabupaten Pasangkayu	1,27 – 1,07
6	Kabupaten Mamuju Tengah	1,73 – 1,53
Provinsi Sulawesi Barat		2,38 – 2,19

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten Tahun 2024 dibandingkan capaian Tahun 2023, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.15 Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2023–2024

No	Kabupaten	Tingkat Penduduk Miskin (Persen)	
		Realisasi	
		2023	2024
1	Kabupaten Majene	14,54	13,64
2	Kabupaten Polewali Mandar	16,08	15,66
3	Kabupaten Mamasa	14,31	14,20
4	Kabupaten Mamuju	7,57	7,15
5	Kabupaten Pasangkayu	4,79	5,21
6	Kabupaten Mamuju Tengah	7,32	7,72
Provinsi Sulawesi Barat		11,49	10,71

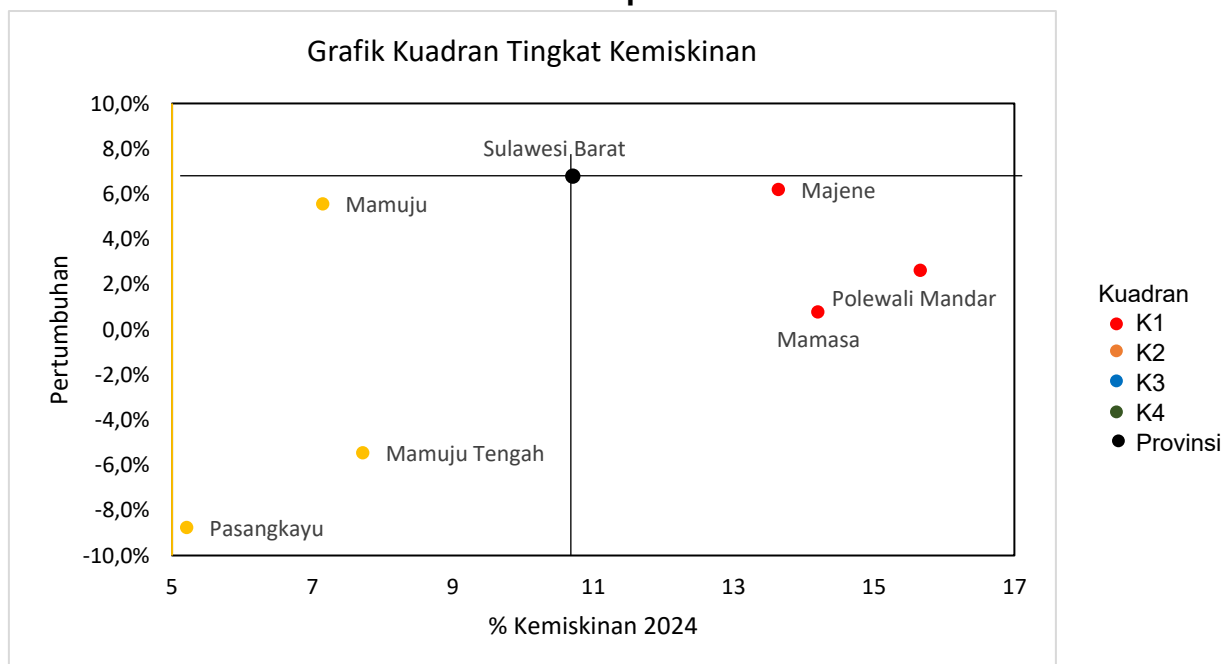
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.16 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

- Kuadran I, Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.
- Kuadran II, Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin Lebih Tinggi dan Laju Penurunan Lebih Rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu.

Grafik 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2023–2024



Sumber: BPS, diolah Bapperida Sulbar

Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten tahun 2024.

Tabel 5.17 Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Kabupaten Majene	12,61 – 12,11
2	Kabupaten Polewali Mandar	11,87 – 11,37
3	Kabupaten Mamasa	13,30 – 12,80
4	Kabupaten Mamuju	6,28 – 5,78
5	Kabupaten Pasangkayu	5,17 – 4,67
6	Kabupaten Mamuju Tengah	7,61 – 7,11
Provinsi Sulawesi Barat		9,74 – 9,05

5. Indeks Gini Rasio

Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Distribusi tersebut digambarkan dengan angka 0-1, dimana angka 1 menunjukkan ketimpangan terbesar antar daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Indeks Gini Ratio kabupaten Tahun 2024 dibandingkan capaian Tahun 2023, maka capaian kinerja Indeks Gini Ratio kabupaten dapat ditampilkan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 5.18 Capaian Indeks Gini Ratio Kabupaten Tahun 2023–2024

No	Kabupaten	Indeks Gini Rasio (Poin)	
		Realisasi	
		2023	2024
1	Kabupaten Majene	0,340	0,335
2	Kabupaten Polewali Mandar	0,333	0,303
3	Kabupaten Mamasa	0,380	0,306
4	Kabupaten Mamuju	0,372	0,425
5	Kabupaten Pasangkayu	0,292	0,298
6	Kabupaten Mamuju Tengah	0,344	0,336
Provinsi Sulawesi Barat		0,351	0,354

Sumber: BPS Sulbar 2025, Hasil olah Susenas Maret

Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten Tahun 2026. Berikut merupakan target indeks gini rasio:

Tabel 5.19 Penetapan Target Indeks Gini Ratio Kabupaten Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Kabupaten Majene	0,331 – 0,321
2	Kabupaten Polewali Mandar	0,320 – 0,300
3	Kabupaten Mamasa	0,293 – 0,273
4	Kabupaten Mamuju	0,427 – 0,407
5	Kabupaten Pasangkayu	0,286 – 0,266
6	Kabupaten Mamuju Tengah	0,310 – 0,290
Provinsi Sulawesi Barat		0,345-0,349

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat disusun sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia, untuk memastikan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Bab ini memuat keterkaitan yang erat antara alokasi pendanaan, indikator kinerja, dan target capaian pada setiap prioritas pembangunan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat terukur dan dievaluasi secara obyektif. Kerangka hubungan tersebut diwujudkan melalui: (i) Penjabaran prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, yang disertai indikator kinerja terukur; (ii) Penghitungan kebutuhan pendanaan yang proporsional dengan capaian target indikator kinerja, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, transfer pemerintah pusat, serta sumber pendanaan lainnya; dan (iii) Penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang menghubungkan realisasi anggaran dengan pencapaian target kinerja, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran berjalan sinkron.

Dengan pendekatan ini, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dalam RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sinergi antara perencanaan berbasis kinerja dan pengelolaan pendanaan diharapkan mampu memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Adapun alokasi indikasi anggaran Tahun 2026 di masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 6.1 berikut yang selanjutnya lebih rinci disajikan pada matriks rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.

**Tabel 6.1 Daftar Alokasi Indikasi Anggaran Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026**

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	573.218.229.843
2	Rumah Sakit Umum Daerah	147.354.251.062
3	Dinas Kesehatan	71.498.725.943
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.387.405.446
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	46.312.370.271
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20.737.803.788
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.835.776.983

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
8	Dinas Sosial	24.973.530.863
9	Dinas Tenaga Kerja	83.069.484.729
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	7.818.950.101
11	Dinas Ketahanan Pangan	7.645.244.163
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.158.165.997
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.385.473.072
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.494.123.105
15	Dinas Perhubungan	11.220.763.854
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	28.239.837.260
17	Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	20.172.750.117
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.127.146.413
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.260.993.262
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.856.211.847
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	37.726.006.823
22	Dinas Pariwisata	10.637.741.732
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	65.760.041.068
24	Dinas Perkebunan	48.170.566.849
25	Dinas Kehutanan	34.772.025.396
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.343.753.571
27	Dinas Transmigrasi	13.571.336.438
28	Sekretariat Daerah	
	- Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	44.187.815.521
	- Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.792.765.390
	- Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.273.955.045
	- Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.266.292.439
	- Sekretariat Daerah Biro Organisasi	1.581.876.739
	- Sekretariat Daerah Biro Umum	98.342.401.710
29	Sekretariat DPRD	100.000.000.000
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	14.297.609.682

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	282.233.221.567
32	Badan Kepegawaian Daerah	13.017.260.554
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.414.444.963
34	Badan Penghubung Provinsi	5.459.456.762
35	Inspektorat Daerah	17.279.929.010
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.712.663.162
	Total	2.067.608.402.540

Tabel 6.2. PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						573.218.229.843,00							666.889.860.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						562.617.869.093,00							658.009.410.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						562.617.869.093,00							658.009.410.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 72 poin	417.542.666.893,00							425.389.500.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks Profesionalitas ASN Indeks Reformasi Birokrasi Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4.25 4,30 80 85.25	2.38 2,50 3,70 68,79 70.75 97,62 99.66	100 2,60 3.28 3,80 70 76.75 99.69	100 2,70 3.60 3,90 72 78.00 99.73	417.542.666.893,00	-	-	-	-	-	-	425.389.500.000,00	-
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	-			100 Persen	315.108.700,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	94.846.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	45.644.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	11.586.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.645.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11.617.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	21.926.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	79.949.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	39.893.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	417.542.666.893,00	-	-	-	-	-	-	425.389.500.000,00	-
	1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks Profesionalitas ASN Indeks Reformasi Birokrasi Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4.25 4,30 80 85.25	2.38 2,50 3,70 68,79 70.75 97,62 99.66	100 2,60 3.28 3,80 70 76.75 99.69	100 2,70 3.60 3,90 72 78.00 99.73	417.542.666.893,00	-	-	-	-	-	-	425.389.500.000,00	-
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Serapan RAK Tingkat Serapan Anggaran	-			100 Persen 100 Persen	414.188.474.861,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	420.437.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3915 Orang/ Bulan	414.117.979.861,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		420.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	37.945.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.356.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	25.193.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat secara tertib dalam database	-			100 Persen	210.994.100,00			-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	39.956.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	27.185.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	143.852.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan	-			100 Persen	356.722.400,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	740.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	41.699.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	269.423.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	45.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran proses administrasi umum yang mendukung operasional perangkat daerah	-			100 Persen	817.105.972,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.271.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	94.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	47.800.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	44.288.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	477.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.430.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	146.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang memadai dan sesuai kebutuhan	-			100 Persen	127.351.100,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	60.353.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	66.997.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.289.049.760,00			-	-	-	-	131.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.674.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.286.375.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai setelah pemeliharaan	-			100 Persen	237.860.000,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	163.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	43.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					56.74 Persen 62.32 Persen 65.02 Persen 65.52 Persen 71.51 Persen 75.85 Persen	144.062.917.200,00							229.947.410.000,00	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
				100	100	100	100									
			Iklim Inklusivitas	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Keamanan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Iklim Kebinekaan	65,03	54,68	55,71	56,74									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk	66,22	59.20	61,35	62,32									
			disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	71,5	60,37	62.36	65,02									
				75.00	61,78	63,4	65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73.26	74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72.09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	-			100 Persen	70.438.570.092,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	60.374.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	16.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			0				1 0	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	995.799.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	24.191.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		1.314.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	763.719.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	20.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
				100	100	100	100									
			Iklm Inklusivitas	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklm Keamanan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Iklm Kebinekaan	65,03	54,68	55,71	56,74									
			Jumlah Warga Negara Usia													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	24.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	67.812.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	4.395.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	4.060.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	272.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
				100	100	100	100									
			Iklim Inklusivitas	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Keamanan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Iklim Kebinekaan	65,03	54,68	55,71	56,74									
			Jumlah Warga Negara Usia													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				540 Peserta didik	2.861.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		10.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta Didik	542.754.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03 66,22 71,5 75.00	54,68 59.20 60,37 61,78	55,71 61,35 62.36 63,4	56,74 62,32 65,02 65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19 80,17	68,67 71,98	70,09 73.26	71,51 74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81 84,71	72.09 73,83	74,77 75,64	75,85 77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Skor Kemampuan Literasi													
			Skor Kemampuan Numerasi													
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1770 Orang	57.169.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59,20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62,36	65,02									
				75,00	61,78	63,4	65,52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73,26	74,94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72,09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS</i>				94 Satuan Pendidikan	51.234.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		5.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03 66,22 71,5 75.00	54,68 59.20 60,37 61,78	55,71 61,35 62.36 63,4	56,74 62,32 65,02 65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19 80,17	68,67 71,98	70,09 73.26	71,51 74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81 84,71	72.09 73,83	74,77 75,64	75,85 77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Skor Kemampuan Literasi													
			Skor Kemampuan Numerasi													
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30 Orang	174.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				30 Konten Digital	23.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59.20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62.36	65,02									
				75.00	61,78	63,4	65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73.26	74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72.09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				30 Orang	21.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		166.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.134.993.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	383.674.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03 66,22 71,5 75.00	54,68 59.20 60,37 61,78	55,71 61,35 62.36 63,4	56,74 62,32 65,02 65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19 80,17	68,67 71,98	70,09 73.26	71,51 74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81 84,71	72.09 73,83	74,77 75,64	75,85 77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Skor Kemampuan Literasi													
			Skor Kemampuan Numerasi													
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1.670.827.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklm Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklm Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklm Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59.20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62.36	65,02									
				75.00	61,78	63,4	65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73.26	74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72.09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		457.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	48.614.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		413.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	992.848.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				1 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59.20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62.36	65,02									
				75.00	61,78	63,4	65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73.26	74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72.09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				100 Orang	141.827.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				93 Satuan Pendidikan	208.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		4.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun Iklim Inklusivitas Iklim Keamanan Iklim Kebinekaan Jumlah Warga Negara Usia	0 100 33,33 60,86 65,03	0 100 19,69 20,5 54,68	0 100 25,00 32,718 55,71	0 100 30,00 40,00 56,74	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	66,22 71,5 75.00	59.20 60,37 61,78	61,35 62.36 63,4	62,32 65,02 65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19 80,17	68,67 71,98	70,09 73.26	71,51 74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81 84,71	72.09 73,83	74,77 75,64	75,85 77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Skor Kemampuan Literasi													
			Skor Kemampuan Numerasi													
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK yang Melaksanakan Teaching Factory	-			100 Persen	63.154.989.828,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	133.910.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		22.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	54.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	549.223.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				6 Unit	103.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		585.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	3.883.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	4.263.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	272.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	5.209.318.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGgunaann YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				800 Peserta didik	2.039.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGgunaann YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				360 Peserta Didik	902.104.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				144 Orang	27.536.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		324.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				129 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				129 Satuan Pendidikan	40.715.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		41.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				129 Orang	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				220 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30 Orang	21.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		28.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		75.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	174.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		92.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				25 Orang	187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				3 Paket	1.419.463.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	112.293.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				100 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				150 Buku	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	844.244.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	419.319.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				129 Satuan Pendidikan	235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	215.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				5 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0079	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi														
			Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun				1 Unit	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	-			100 Persen	10.469.357.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-	35.661.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	209.050.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.478.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		662.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59.20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62.36	65,02									
				75.00	61,78	63,4	65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73.26	74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72.09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				2 Paket	202.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	261.548.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklm Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklm Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklm Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia	65,03	54,68	55,71	56,74									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				900 Peserta Didik	1.196.901.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				290 Peserta Didik	291.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59,20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62,36	65,02									
				75,00	61,78	63,4	65,52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73,26	74,94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72,09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus</i>				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				29 Orang	102.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		324.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia	65,03	54,68	55,71	56,74									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				25 Satuan Pendidikan	6.176.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		6.176.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	91.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03 66,22 71,5 75.00	54,68 59.20 60,37 61,78	55,71 61,35 62.36 63,4	56,74 62,32 65,02 65.52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19 80,17	68,67 71,98	70,09 73.26	71,51 74.94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81 84,71	72.09 73,83	74,77 75,64	75,85 77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Skor Kemampuan Literasi													
			Skor Kemampuan Numerasi													
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	141.281.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	117.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklm Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklm Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklm Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	65,03	54,68	55,71	56,74									
				66,22	59,20	61,35	62,32									
				71,5	60,37	62,36	65,02									
				75,00	61,78	63,4	65,52									
			Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	77,19	68,67	70,09	71,51									
				80,17	71,98	73,26	74,94									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	81	72,09	74,77	75,85									
				84,71	73,83	75,64	77,46									
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi													
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca													
			Persentase satuan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK													
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi</i>				50 Orang	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1.131.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklm Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklm Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklm Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	65,03 66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	54,68 59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	55,71 61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	56,74 62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	62.541.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	76.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
			Iklim Inklusivitas	100	100	100	100									
			Iklim Keamanan	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Kebinekaan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Jumlah Warga Negara Usia	65,03	54,68	55,71	56,74									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	0	0	0	0	144.062.917.200,00	-	-	-	-	-	-	229.947.410.000,00	-
				100	100	100	100									
			Iklim Inklusivitas	33,33	19,69	25,00	30,00									
			Iklim Keamanan	60,86	20,5	32,718	40,00									
			Iklim Kebinekaan	65,03	54,68	55,71	56,74									
			Jumlah Warga Negara Usia													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Skor Kemampuan Literasi Skor Kemampuan Numerasi Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	66,22 71,5 75.00 77,19 80,17 81 84,71	59.20 60,37 61,78 68,67 71,98 72.09 73,83	61,35 62.36 63,4 70,09 73.26 74,77 75,64	62,32 65,02 65.52 71,51 74.94 75,85 77,46									
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				50 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					50 Persen	545.700.000,00							1.620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	Indeks literasi SLB Indeks literasi SMA Indeks literasi SMK Indeks numerasi SLB Indeks numerasi SMA Indeks numerasi SMK Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 28.22 35.72 50.24 52.11 59.74 65.34	0 26.46 32.35 46.64 47.20 55.46 59.18	1 26.72 33 47.11 48.14 56.01 60.36	1 27.00 33.66 47.58 49.11 56.57 61.57	545.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1.620.000.000,00	-
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Menengah	-			0 Persen	500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	-	1.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia</i>				667 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				150 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah				2 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	<i>Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</i>	-			0 Persen	45.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				50 Orang	45.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					11.5 Persen 12.00 Persen 12.5 Persen 13.4 Persen 6.00 Persen	228.180.000,00							280.500.000,00	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	Rasio guru murid SD Rasio guru murid SLB Rasio guru murid SMA Rasio guru murid SMK Rasio guru murid SMP	10.00 14.5 16.00 17.00	10.08 12.50 3.31 8.99 9.35	10.5 10.7 11.3 13.00 4.6	11.5 12.00 12.5 13.4 6.00	228.180.000,00	-	-	-	-	-	-	280.500.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	<i>Persentase pemindahan sesuai dengan kebutuhan pemerataan</i>	-			100 Persen	228.180.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dasar	-	280.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	180.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dasar		181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	47.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dasar		99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					100 Persen	60.945.000,00							240.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan retensi arsip Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/ Diperbaharui	0	0	0	0 2	60.945.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan izin pendidikan menengah yang disetujui sesuai standar dan prosedur	-			100 Persen	60.945.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	60.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan izin pendidikan khusus oleh masyarakat yang disetujui sesuai standar dan prosedur	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Khusus		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					100 Persen	177.460.000,00							532.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	177.460.000,00	-	-	-	-	-	-	532.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Bahasa Daerah Lintas Kabupaten/kota yang telah dilakukan Pembinaan atau Pengembangan	-			100 Persen	177.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-	532.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah														
			Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan				1000 Buku	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi				100 Orang	15.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.570.819.800,00							8.640.450.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						10.570.819.800,00							8.640.450.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					100 Persen 4.96 Persen	2.778.370.300,00							3.637.750.000,00	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	100 6.35	100 3.57	100 4.50	100 4.96	2.778.370.300,00	-	-	-	-	-	-	3.637.750.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan kebudayaan lintas daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	-			100 Persen	2.229.383.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern	-	2.669.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		148.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				2 Unit	590.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				5 Objek	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0011	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina				2 Lembaga	2.407.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperku a t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperku a t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				5 Kegiatan	1.313.776.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina				30 Orang	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Komunitas Budaya Tradisional dan Modern		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	-			100 Persen	345.987.200,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sanggar Seni dan Komunitas Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota	-	718.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				10 Objek	334.987.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sanggar Seni dan Komunitas Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		458.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				2 Laporan	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sanggar Seni dan Komunitas Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Sanggar Seni dan Komunitas Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga adat lintas kabupaten/kota yang dibina	-			100 Persen	203.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Adat yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Adat yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					100 Persen 3.17 Persen	192.736.700,00							843.700.000,00	
		[Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100 5.0	0.10 100	100 2.56	100 3.17	192.736.700,00	-	-	-	-	-	-	843.700.000,00	-
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian lintas kabupaten/kota yang dibina	-			100 Persen	192.736.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Kelompok Seniman Tradisional Lintas Kabupaten/Kota	-	843.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	26.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Kelompok Seniman Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		537.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				25 Sertifikat	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Kelompok Seniman Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	151.236.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kelompok Seniman Tradisional Lintas Kabupaten/Kota		250.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100 Persen	136.000.000,00							762.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	136.000.000,00	-	-	-	-	-	-	762.000.000,00	-
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pembinaan sejarah lokal yang dilaksanakan	-			100 Persen	136.000.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sejarawan, Peneliti Lokal, Guru dan Tenaga Pendidik Sejarah di Sekolah	-	762.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sejarawan, Peneliti Lokal, Guru dan Tenaga Pendidik Sejarah di Sekolah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Sejarawan, Peneliti Lokal, Guru dan Tenaga Pendidik Sejarah di Sekolah		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				5 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Sejarawan, Peneliti Lokal, Guru dan Tenaga Pendidik Sejarah di Sekolah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				2 Dokumen	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Sejarawan, Peneliti Lokal, Guru dan Tenaga Pendidik Sejarah di Sekolah		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					100 Persen 45.60 Indeks	20.500.000,00							772.000.000,00	
		[Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan]	Indeks warisan budaya (pilar dalam indeks pembangunan kebudayaan) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100 50.67	100 40.57	100 43.90	100 45.60	20.500.000,00	-	-	-	-	-	-	772.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase cagar budaya yang diidentifikasi dan diverifikasi untuk penetapan	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pemilik atau Pengelola Situs/Bangunan Cagar Budaya	-	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pemilik atau Pengelola Situs/Bangunan Cagar Budaya		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pemilik atau Pengelola Situs/Bangunan Cagar Budaya		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda														
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan				5 Objek	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pemilik atau Pengelola Situs/Bangunan Cagar Budaya		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	<i>Cagar budaya yang dikelola secara rutin sesuai standar konservasi</i>	-			100 Persen	10.500.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pengelola Situs dan Bangunan Cagar Budaya	-	322.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi</i>				3 Objek	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pengelola Situs dan Bangunan Cagar Budaya		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pengelola Situs dan Bangunan Cagar Budaya		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Pengelola Situs dan Bangunan Cagar Budaya		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					100 Persen	7.443.212.800,00							2.625.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	7.443.212.800,00	-	-	-	-	-	-	2.625.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	<i>Persentase koleksi museum yang didata dan ditata sesuai standar</i>	-			100 Persen	7.443.212.800,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengelola Museum Provinsi	-	2.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengelola Museum Provinsi		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				100 Orang	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengelola Museum Provinsi		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia</i>				1 Unit	7.443.212.800,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengelola Museum Provinsi		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pengelola Museum Provinsi		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	NON URUSAN						29.540.950,00							240.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.540.950,00							240.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen	29.540.950,00							240.000.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Serapan RAK Tingkat Serapan Anggaran	-			100 Persen 100 Persen	10.826.200,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10.826.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	18.714.750,00			-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.714.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							147.354.251.062,00						155.351.336.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						147.354.251.062,00							155.351.336.084,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						147.354.251.062,00							155.351.336.084,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2.70 Skor 3.90 Poin 72 Poin	127.926.740.584,00							135.535.275.396,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 3,10 4,30 4.6 80	0 2,50 3,70 4.3 68,79 74.75 96.66 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.36 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.42 72	127.926.740.584,00	-	-	-	-	-	-	135.535.275.396,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Monev Evaluasi Penyerapanan Anggaran(APBD&BLUD), Laporan LKPJ, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	30.256.080,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	5.080.861.202,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.149.080,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak- sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.252.062,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.301.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak- sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.055.407.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.951.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.050.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.951.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.050.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.951.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.050.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.951.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		5.050.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			2 Laporan 12 Laporan 355 Orang	47.272.904.582,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat	-	48.218.362.674,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				355 Orang/ Bulan	47.036.483.982,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		47.977.213.662,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.951.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		5.050.428,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	231.469.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		236.098.584,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 Dokumen	37.328.972,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat	-	38.075.551,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	37.328.972,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		38.075.551,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	-			1 Unit	137.736.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat	-	140.491.689,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	137.736.950,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		140.491.689,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			4 Paket	448.514.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat	-	457.484.280,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	448.514.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		457.484.280,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	80.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat	-	81.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	80.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi barat		81.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					78 Persen	17.999.061.078,00							18.359.042.300,00	
		-	-	-	-	-	-	17.999.061.078,00	-	-	-	-	-	-	18.359.042.300,00	-
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-			11 Unit 7 Unit 2 Unit	17.608.088.747,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	17.960.250.522,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	356.962.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		364.101.750,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	15.182.704.556,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		15.486.358.647,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				7 Unit	2.068.421.691,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		2.109.790.125,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-			5 Unit	214.041.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	218.321.922,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	214.041.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak- sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		218.321.922,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	-			37 Unit 37 Unit	176.931.231,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak- sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	180.469.856,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				37 Unit	48.773.831,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		49.749.308,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				37 Unit	128.157.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		130.720.548,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					72 Persen	1.428.449.400,00							1.457.018.388,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-			57 Orang	868.358.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	885.725.568,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				57 Orang	868.358.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		885.725.568,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-			800 Orang	560.091.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	-	571.292.820,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				700 Orang	560.091.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		571.292.820,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS KESEHATAN						71.498.725.943,00							76.084.627.620,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						71.498.725.943,00							76.084.627.620,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						71.498.725.943,00							76.084.627.620,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	17.569.536.432,00							24.487.127.620,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4.00 4,30 80 85.00	2,50 3.28 3,70 68,79 73.53 74.75 96.66 97,62	100 100.00 2,60 3.42 3,80 70 77.42 79.8	100 100.00 2,70 3.57 3,90 72 79.32 84.85	17.569.536.432,00	-	-	-	-	-	-	24.487.127.620,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	146.078.460,00			-	-	-	-	338.251.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	29.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	29.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.832.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.144.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.879.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	75.278.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.283.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.110.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.434.453.888,00			-	-	-	-	19.799.446.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ Bulan	16.415.253.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.650.969.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.569.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.439.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	10.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.178.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.289.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	51.081.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.081.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	439.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.404.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	194.235.645,00			-	-	-	-	1.204.370.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.870.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.279.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.396.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		490.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	102.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	870.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-0	677.182.179,00			-	-	-	-	1.276.603.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	554.566.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.886.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		561.080.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	77.729.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		205.523.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.586.260,00			-	-	-	-	507.484.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	76.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	35.006.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.984.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					60 Persen 78 Persen	52.515.117.461,00							46.802.500.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	1 100	0 100	100 100.00	100 100.00	52.515.117.461,00	-	-	-	-	-	-	46.802.500.000,00	-
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	100.00 11.45	100.00 110.00	14.00 2.08	13.31 1.94									
			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1.50 20	14.72 18,1	25 26	2,3 25									
			Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20.00	20,6	28.48	26.65									
			Angka penggunaan tempat tidur (Bed Occupancy	21.18	2.23	3	33.80									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rate)	26	30.30	35	35									
			Angka Populasi Bebas penyakit Menular	5	33	37	40									
			Angka Populasi Bebas penyakit Tidak Menular	60.00	40	38.40	45									
			Angka Populasi Bebas penyakit Tidak Menular	7,2	43	55.40	59.80									
			Cakupan kunjungan Nifas (KF Lengkap Sesuai Standar)	73.00	51.00	67	73									
			Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tingkat Provinsi	78.25	65.00	7	7,5									
			Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tingkat Provinsi	80	67	70.00	75.00									
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	85	7	74.08	75.13									
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90	72	78	80									
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90.00	78	84.85	8,4									
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	94.82	81	90	86.89									
			Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	99	82.81	90.16	90									
			Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)		89	9,2	90.00									
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan daerah provinsi		98	98,6	91.33									
			Insiden Stunting Balita (Kasus Baru)				98,7									
			Jumlah Kasus Kematian Ibu													
			Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan													
			Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan													
			Ketersediaan obat													
			Persentase Anemia pada Ibu Hamil													
			Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan (JKN)													
			Persentase Kabupaten Kota yang memiliki rumah sakit dengan komptensi yang menangani 10 penyakit prioritas													
			Persentase rujukan													
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pendek) Prevalensi Wasting (Gizi Kurang , dan Gizi Buruk Pada Balita) Waktu tunggu pelayanan rawat jalan													
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-			25 Unit 3 Paket 3 Unit	5.699.892.993,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat	-	8.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	2.121.048.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		390.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				6 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	-	-	-	-	-	52.515.117.461,00	-	-	-	-	-	-	46.802.500.000,00	-
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Angka penggunaan tempat tidur (Bed Occupancy Rate) Angka Populasi Bebas penyakit Menular Angka Populasi Bebas penyakit Tidak Menular Cakupan kunjungan Nifas (KF Lengkap Sesuai Standar) Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tingkat Provinsi Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	1 100 100.00 11.45 1.50 20 21.18 26 5 60.00 7,2 73.00 78.25 80 85 90 90.00 94.82 99	0 100 100.00 110.00 14.72 18,1 20,6 2.23 30.30 33 40 43 51.00 65.00 67 7 72 78 81 82.81	100 100.00 14.00 2.08 25 26 28.48 3 35 37 38.40 55.40 67 7 70.00 74.08 78 84.85 90 90.16	100 100.00 13.31 1.94 2,3 25 26.65 33.80 35 40 45 59.80 73 7,5 75.00 75.13 80 8,4 86.89 90	52.515.117.461,00	-	-	-	-	-	46.802.500.000,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan daerah provinsi Insiden Stunting Balita (Kasus Baru) Jumlah Kasus Kematian Ibu Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Ketersediaan obat Persentase Anemia pada Ibu Hamil Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan (JKN) Persentase Kabupaten Kota yang memiliki rumah sakit dengan komptensi yang menangani 10 penyakit prioritas Persentase rujukan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) Prevalensi Wasting (Gizi Kurang , dan Gizi Buruk Pada Balita) Waktu tunggu pelayanan rawat jalan		89 98	9,2 98,6	90.00 91.33 98,7									
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3.443.844.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Masyarakat		1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-			12 Dokumen 20 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 1000 Orang	46.495.224.468,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Ka bupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat	-	37.355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1000 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		725.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		725.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				6 Dokumen	495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	7.892.626.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		6.825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		1.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	951.333.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		4.225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	35.273.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		19.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				5 Dokumen	182.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/ Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				125 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas/Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lainnya/Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-			12 Dokumen	90.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-			1 Dokumen 6 Dokumen	230.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	497.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				6 Unit	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				18 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					95 Persen	790.000.000,00							1.595.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	Persentase Fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai Standar Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih minimal 20 jam setahun Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	61.00 65.00 95	45.66 56.00 95	48.73 58.00 95	51.80 59.00 95	790.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.595.000.000,00	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-			20 Orang	160.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	-			90 Persen	630.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.445.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				120 Orang	630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		1.220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					90 Persen	134.072.050,00							130.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase kabupaten dengan ketersediaan obat esensial	100.00 95	100.00 95	100.00 95	100.00 95	134.072.050,00	-	-	-	-	-	-	130.000.000,00	-
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan	-			90 Persen	115.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				12 Sarana	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar	-			100 Persen	19.072.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				6 Sarana	19.072.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					100 Persen	490.000.000,00							3.070.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Angka kesakitan (morbiditas) Presentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan meningkatkan aktifitas Fisik	85 9.08	0 11.14	10.73 50	10.32 60	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.070.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktivitas fisik	-			50 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		1.270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat)	-			90 Persen	100.000.000,00			-	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		390.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	-			90 Persen	390.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	-	660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				5 Dokumen	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						142.387.405.446,00							282.347.560.835,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						142.387.405.446,00							282.347.560.835,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						142.387.405.446,00							282.347.560.835,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 persen 70,5 Poin 95 Persen	18.452.024.703,00							26.897.560.835,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.00 40.00	27.55 3.62 80.00 98.50	100.00 30.04 6.70	100.00 32.53 3.77	18.452.024.703,00	-	-	-	-	-	-	26.897.560.835,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	-			13,50 Poin 7 Poin 13 Poin 19 Poin 24 Poin 100 Persen	357.297.831,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	2.559.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	138.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	7.184.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	7.184.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	5.339.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	5.339.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	66.281.831,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	23.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		23.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	81.769.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			95 Persen	14.685.567.752,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	17.293.452.830,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				160 Orang/ Bulan	13.901.194.552,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		16.374.531.064,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				160 Dokumen	600.573.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		608.748.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2500 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		15.819.306,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				24 Dokumen	142.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	26.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		31.796.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		17.556.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 Persen	63.366.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	38.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	15.266.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		37.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.049.020.000,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	1.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	1.049.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		1.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	349.836.960,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				179 Paket	103.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	180.486.960,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	17.850.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				9 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				180 Orang	48.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen	544.500.000,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	715.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	4.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	165.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 Persen	86.971.200,00			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	1.918.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		1.343.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	31.893.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	31.881.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	23.196.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	238.426.560,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	300.108.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		25.108.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	218.426.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	1.077.038.400,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	-	1.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				80 Unit	390.990.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				32 Unit	215.432.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	247.916.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	18.452.024.703,00	-	-	-	-	-	-	26.897.560.835,00	-
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.00 40.00	27.55 3.62 80.00 98.50	100.00 30.04 6.70	100.00 32.53 3.77	18.452.024.703,00	-	-	-	-	-	-	26.897.560.835,00	-
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	22.700.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					22,63 persen	6.156.200.000,00							62.300.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	6.156.200.000,00	-	-	-	-	-	-	62.300.000.000,00	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	-			1 Dokumen	1.000.000.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi Barat	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2.3 KM	900.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tapango, Riso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi Barat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan Persentase irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	0 25.14	0 20.67	0 21.08	0 21.72	6.156.200.000,00	-	-	-	-	-	-	62.300.000.000,00	-
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara	-			210 Ha 290 Hektar 1131 Ha 834 Hektar	5.156.200.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi barat	-	60.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,33 KM	860.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi barat		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak														
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan				4 KM	1.770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi barat		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				5 KM	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi barat		18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				3 Bendung	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi barat		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				6000 KM	256.426.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi barat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara</i>				2 Bendung	1.069.773.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi barat		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi barat		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					100 Persen	145.000.000,00							700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	100	100 80.14	100 83.34	100 86.84	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	-
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene	-			30,90 Persen	145.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi Barat (masyarakat Kab. Polewali dan Kab Majene)	-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Kabupaten/ Kota	96.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi Barat (masyarakat Kab. Polewali dan Kab Majene)		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	48.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Sulawesi Barat (masyarakat Kab. Polewali dan Kab Majene)		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					50 persen	48.500.000,00							40.000.000,00	
		[Meningkatnya layanan persampahan regional]	Persentase sarana prasarana persampahan yang terbangun sesuai standar	0	0	0	0	48.500.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen koordinasi dan pendataan terkait pengelolaan dan pengembangan Persampahan Regional	-			1 Document	48.500.000,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	48.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					100 Persen	48.500.000,00							40.000.000,00	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	0	0	0	0	48.500.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen koordinasi dan pendataan terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-			1 Dokumen	48.500.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	48.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					80,95 Persen	1.330.144.000,00							10.400.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.330.144.000,00	-	-	-	-	-	-	10.400.000.000,00	-
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-			14 Dokumen	1.330.144.000,00			-	-	Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota	-	10.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				3 Kabupaten/ Kota	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				6 Dokumen	403.287.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota		7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	926.856.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					16,67 Persen	3.367.856.000,00							12.400.000.000,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi	-			3 Dokumen	3.367.856.000,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	-	12.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	3.367.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					100 Persen 56,19 Persen	111.999.882.343,00							163.870.000.000,00	
		[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Persentase kondisi mantap jalan provinsi Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60	46.98 47.33	49.13 50	50.95 52	111.999.882.343,00	-	-	-	-	-	-	163.870.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara dan terehabilitasi akibat bencana	-			9,10 Kilometer 100,4 Kilometer	111.999.882.343,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-	-	163.870.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		42.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				24 KM	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PKB	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				101 KM	1.131.309.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				150 Meter	4.709.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PKB	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				175 Meter	51.282.616,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		470.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				25.065 KM	105.908.290.327,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PKB, DBH SAWIT	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		96.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					78,93 Persen	323.875.000,00							3.900.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	323.875.000,00	-	-	-	-	-	-	3.900.000.000,00	-
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi dan Asesor yang dberi Pelatihan/ Sertifikasi</i>	-			515 Orang	228.875.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi	-	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>				6 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>				60 Orang	128.875.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>				60 Orang	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</i>	-			1 Laporan	0,00			-	-	Masyarakat Sulawesi Barat	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				3 Layanan Informasi	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-			1 Laporan	95.000.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				15 Paket Pekerjaan	95.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				1 Lembaga	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				5 Badan Usaha	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					39,8 Persen	515.423.400,00							1.800.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah DokumenRencana Tata Ruang (RTR) Provinsi	-			1 Dokumen	82.079.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				200 Orang	82.079.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase ketaatan terhadap RTRW	50	32.33	35.43	38.73	515.423.400,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	-
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-			2 Dokumen	58.344.400,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				2 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				2 Dokumen	58.344.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-			2 Dokumen	275.000.000,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha														
			Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				0 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	515.423.400,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	-
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	100.000.000,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						46.312.370.271,00							144.877.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.684.762.391,00							78.877.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						30.684.762.391,00							78.877.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	6.700.041.846,00							7.027.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2.22	100	100	6.700.041.846,00	-	-	-	-	-	-	7.027.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3.00	3,70	2.38	2.53									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	50.00	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	66.75	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	68,79	56.00	62.00									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	80.00	97,62	70	72									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		99.65	70.00	80.00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.386.550,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	145.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen Dokumen	26.670.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.162.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen Dokumen	11.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.545.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.687.870.934,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-	-	4.760.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	4.342.725.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		4.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	43.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				9 Dokumen	281.851.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	17.093.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	347.891.262,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-	-	392.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3.608.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	46.201.017,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		47.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	32.712.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	265.368.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	81.722.900,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	32.398.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		-	-	-	-	-	-	6.700.041.846,00	-	-	-	-	-	-	7.027.000.000,00	-
	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	49.324.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3.00 3,10 4,30 80 80.00	2.22 2,50 3,70 50.00 66.75 68,79 97,62 99.65	100 100.00 2.38 2,60 3,80 56.00 70 70.00	100 100.00 2.53 2,70 3,90 62.00 72 80.00	6.700.041.846,00	-	-	-	-	-	-	7.027.000.000,00	-
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	645.630.200,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	620.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	536.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	89.929.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16.435.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	856.540.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		-	-	-	-	-	-	6.700.041.846,00	-	-	-	-	-	-	7.027.000.000,00	-
	1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	606.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-	2.344.155.940,00							8.850.000.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	89.531.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				6 Dokumen	89.531.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	2.344.155.940,00	-	-	-	-	-	-	8.850.000.000,00	-
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	2.254.624.940,00			-	-	-	-	6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				50 Unit Rumah	823.581.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				50 Unit Rumah	1.431.043.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		-	-	-	-	-	-	2.344.155.940,00	-	-	-	-	-	-	8.850.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					-	5.770.000.000,00							10.500.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	Persentase areal kawasan kumuh	10	20	18	16	5.770.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.500.000.000,00	-
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	5.770.000.000,00			-	-	-	-	10.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				5 Laporan	39.186.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	5.730.813.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					-	15.870.564.605,00							51.500.000.000,00	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	Presentase perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas Umum	60	45	48	51	15.870.564.605,00	-	-	-	-	-	-	51.500.000.000,00	-
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	15.870.564.605,00			-	-	-	-	51.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				10 Dokumen	358.583.009,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				10 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				20 Lokasi	15.211.981.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-	0,00							1.000.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				5 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.627.607.880,00							66.000.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						15.627.607.880,00							66.000.000.000,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					-	15.627.607.880,00							66.000.000.000,00	
		[Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum]	Persentase luas lahan bersertifikat	0	0	0	0	15.627.607.880,00	-	-	-	-	-	-	66.000.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	15.627.607.880,00			-	-	-	-	66.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>				10 Dokumen	2.719.079.483,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan</i>				20 Dokumen	12.908.528.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						20.737.803.788,00							41.130.296.480,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.737.803.788,00							41.130.296.480,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						20.737.803.788,00							41.130.296.480,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					4.2 Poin 75 Poin 85 Persen 95 Persen	15.748.418.941,00							32.182.951.480,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	15.748.418.941,00	-	-	-	-	-	-	32.182.951.480,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	3.44	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	68,79	3.55	3.66									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	72.15	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	97,62	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		99.06	77.12	83.29									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			20 Poin 10 Poin 25 Poin 26 Poin	45.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	310.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		172.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			95 Persen	11.904.961.279,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	20.127.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	11.593.562.279,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		16.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	273.399.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		3.797.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	-			7 Laporan	2.000.000,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	-			12 Laporan	251.569.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	3.249.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		1.466.940.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	146.909.280,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		747.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	104.660.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		575.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	-			12 Laporan 100 Persen	631.190.382,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.298.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	144.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		575.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	214.015.709,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		690.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	11.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		17.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	82.723.193,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	261.807.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		690.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	61.100.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		211.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			12 Dokumen	627.061.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	4.287.171.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		805.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	626.662.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		2.795.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	399.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		284.596.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		402.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Laporan	1.892.974.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	529.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	8.914.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	102.660.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.781.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		287.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	392.861.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	1.265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	171.190.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	191.597.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	29.930.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		287.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	144.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		287.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					100 Persen	4.589.384.847,00							7.222.345.000,00	
		-	-	-	-	-	-	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani	-			12 Laporan	3.449.903.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Masyarakat Sulawesi Barat	-	5.635.345.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Masyarakat Sulawesi Barat		86.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum]	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100	0	100	100	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				3 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		517.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	1.605.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		69.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum]	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100	0	100	100	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		596.275.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				4 laporan	1.930.853.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		2.154.870.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				4 Laporan	610.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		575.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				16 Orang	87.343.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		805.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				3 Unit	800.100.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		831.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (%) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100 81.27	0 77.03	100 77.53	100 78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	-			6 laporan	1.102.430.827,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat	-	1.035.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	81.27	77.03	77.53	78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (%) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100 81.27	0 77.03	100 77.53	100 78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				4 Laporan	1.102.430.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Sulawesi Barat		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	81.27	77.03	77.53	78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (%) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100 81.27	0 77.03	100 77.53	100 78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan PPNS Provinsi	-			1 Laporan	37.051.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Personil Satuan Polisi Pamong Praja	-	552.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	37.051.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Personil Satuan Polisi Pamong Praja		552.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat]	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	81.27	77.03	77.53	78.13	4.589.384.847,00	-	-	-	-	-	-	7.222.345.000,00	-
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100 Persen	400.000.000,00							1.725.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) menurut kabupaten di provinsi	0	0	0	0	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.725.000.000,00	-
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-			1 Dokumen	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat	-	1.725.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.725.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 Laporan	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) menurut kabupaten di provinsi	0	0	0	0	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.725.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Petugas Pemadam Kebakaran dan Warga Sulawesi Barat		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6.835.776.983,00							13.367.598.071,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.835.776.983,00							13.367.598.071,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.835.776.983,00							13.367.598.071,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	4.685.437.907,00							6.432.598.071,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 2.60 3,10 4,30 80	0 1.82 2,50 3,70 68,79 78.00 90.20 97,62	0 100 100.00 1.98 2,60 3,80 70 82.40	0 100 100.00 2.13 2,70 3,90 72 86.80	4.685.437.907,00	-	-	-	-	-	-	6.432.598.071,00	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	96.849.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	BPBD Prov Sulbar	-	241.336.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	44.048.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		185.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.580.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		20.580.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		3.756.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	17.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		23.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu</i>	-			100 Persen	3.512.239.007,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar	-	3.934.696.071,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/ Bulan	3.422.769.007,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		3.841.626.071,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	27.950.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		27.950.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	61.520.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		65.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	41.988.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	73.066.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	41.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		73.066.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	-			100 Persen	34.840.000,00			Memperkua t penelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	BPBD Prov Sulbar	-	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t penelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	BPBD Prov Sulbar		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	34.840.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen 100 Persentase	289.589.640,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar	-	524.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	28.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.300.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	132.579.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	BPBD Prov Sulbar		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	5.270.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	BPBD Prov Sulbar		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	62.940.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen 100 Persentase	30.323.700,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	30.323.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	BPBD Prov Sulbar		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen 100 Persentase	412.468.560,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	BPBD Prov Sulbar	-	890.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	164.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem- angunan I nfrastruktur dan Konekti- vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	158.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem- angunan I nfrastruktur dan Konekti- vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.668.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	BPBD Prov Sulbar		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	267.140.000,00			-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	449.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	59.440.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		59.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	178.170.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.120.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	22.410.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					85 Persen	2.150.339.076,00							6.935.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	-			200 Orang	99.778.876,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur	-	920.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		470.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Indeks ketahanan daerah	0.50	0.20	0.26	0.32	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota</i>				200 Orang	99.778.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	-			90 Persen	411.419.200,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur	-	3.065.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			<i>Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>				6 Kawasan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Indeks ketahanan daerah	0.50	0.20	0.26	0.32	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				250 Orang	0,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				3 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				12 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				300 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				1500 Orang	411.419.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	-			90 Persen	1.343.555.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur	-	1.450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				6 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				40 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				6 Laporan	49.983.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				6000 Orang	813.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				6 Laporan	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Pasca Bencana Provinsi	-			90 Persen	295.586.000,00			-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur	-	1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				500 Keluarga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Indeks ketahanan daerah	0.50	0.20	0.26	0.32	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Indeks ketahanan daerah	0.50	0.20	0.26	0.32	2.150.339.076,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				6 kabupaten/ kota	45.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat, Lembaga, Aparatur		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						24.973.530.863,00							71.354.684.983,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.973.530.863,00							71.354.684.983,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						24.973.530.863,00							71.354.684.983,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	8.052.479.607,00							15.445.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 3.7 4,30 80	100.00 2,50 2.8 3,70 68,79 72.75	100 100.00 2,60 2.98 3,80 70	100 100.00 2,70 3.16 3,90 72	8.052.479.607,00	-	-	-	-	-	-	15.445.000.000,00	-
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	137.488.110,00			-	-	-	-	1.295.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.488.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
		-	-	-	-	-	-	8.052.479.607,00	-	-	-	-	-	-	15.445.000.000,00	-
	1.06.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				4 Subtansi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	100.00	100	100	8.052.479.607,00	-	-	-	-	-	-	15.445.000.000,00	-
			100.00		2,50	100.00	100.00									
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	3,10	2.8	2,60	2,70									
			Indeks SPBE OPD	3.7	3,70	2.98	3.16									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	80	72.75	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		97,62											
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		98.71											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.307.396.597,00			-	-	-	-	8.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/ Bulan	6.036.396.597,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				100 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		-	-	-	-	-	-	8.052.479.607,00	-	-	-	-	-	-	15.445.000.000,00	-
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.158.400.000,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				100 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 3.7 4,30 80	100.00 2,50 2.8 3,70 68,79 72.75 97,62 98.71	100 100.00 2,60 2.98 3,80 70	100 100.00 2,70 3.16 3,90 72	8.052.479.607,00	-	-	-	-	-	-	15.445.000.000,00	-
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	773.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	1.550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.714.900,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	91.714.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	183.480.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	72.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					-	40.000.000,00							1.390.246.186,00	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	Persentase individu miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100	100	100	100	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.390.246.186,00	-
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	-			100 Persen	0,00			-	PP-2. Penguatan Perlindung an Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Sosial	-	101.301.896,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindung an Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Sosial		101.301.896,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	1.288.944.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Lembaga	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		238.944.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan				20 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				60 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					-	0,00							100.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					-	1.300.000.000,00							7.469.438.797,00	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.469.438.797,00	-
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	1.563.372.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.606.960,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.765.280,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				20 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.				6 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				20 orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	329.412.700,00			-	-	-	-	1.864.397.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.321.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	129.412.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.075.960,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)														
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	260.587.300,00			-	-	-	-	1.425.477.701,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	110.587.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.525.760,00	DINAS SOSIAL,
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		208.951.941,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	1.116.191.376,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.113.096,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.078.280,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial	-			100 Persen	70.000.000,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
		-	-	-	-	-	-	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.469.438.797,00	-
	1.06.04.1.05.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya														
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.469.438.797,00	-
	1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah														
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					-	14.625.000.000,00							39.000.000.000,00	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	Persentase individu miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Persentase individu yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1 100	1 100	1 100	1 100	14.625.000.000,00	-	-	-	-	-	-	39.000.000.000,00	-
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	14.625.000.000,00			-	-	-	-	38.950.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	680.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				10000 Orang	13.945.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				6 Kab/Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial														
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi				500 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					-	956.051.256,00							7.450.000.000,00	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	100	100	956.051.256,00	-	-	-	-	-	-	7.450.000.000,00	-
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	956.051.256,00			-	-	-	-	7.450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	73.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				1000 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1000 Orang	155.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1000 Orang	60.835.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda														
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				100 Orang	184.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai				1000 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				5000 Orang	95.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana														
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan				100 Orang	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana														
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi				30 Desa/Kelu rahan	165.697.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					-	0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				% Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				500 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						83.069.484.729,00							50.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						73.483.646.423,00							50.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						73.483.646.423,00							50.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	86.647.500,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 3.2 4,30 80	0 2.36 2,50 3,70 68,79 79.25 97,62 98.4	0 100.00 2.53 2,60 3,80 70	0 100.00 2.7 2,70 3,90 72	86.647.500,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26.497.500,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	26.497.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	60.150.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	60.150.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-	204.036.500,00							0,00	
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disetujui Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	0 100	3 42,86	42,86 5	57,14 7	204.036.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	204.036.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	77.823.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				30 Orang	79.419.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				40 Orang	46.793.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					-	1.714.088.984,00							0,00	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Produktivitas tenaga kerja (Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja)	5.50	1.77	2.52	3.26	1.714.088.984,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	1.286.360.184,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				240 Orang	1.014.360.184,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				15 Unit	272.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	200.039.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	200.039.200,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	30.021.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	30.021.200,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	197.668.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				20 Dokumen	197.668.400,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					-	70.371.083.439,00							0,00	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam & luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja)	25	17.53	19.02	20.52	70.371.083.439,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.024.883.539,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	169.820.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				120 Orang	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				5460 Orang	69.804.275.939,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD</i>				100 Orang	50.787.600,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	249.972.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)</i>				2000 Orang	49.978.600,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				75 Orang	199.994.100,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-			-	96.227.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				50 Orang	96.227.200,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				50 Orang	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					-	626.530.340,00							0,00	
		[Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja]	Upah rata-rata per jam pekerja	22500	17352	18380	19410	626.530.340,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	182.556.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			0				5 0	139.094.400,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				10 Laporan	43.462.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	163.769.050,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	52.194.500,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	29.909.800,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	57.473.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	24.191.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	280.204.890,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	233.266.390,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				100 Orang	46.938.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					-	481.259.660,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlindunginya hak-hak pekerja]	Persentase perusahaan yang Dilakukan Pembinaan Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	0 15,50	0 3,02	0 4,40	0 12,09	481.259.660,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	481.259.660,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				200 Perusahaan	410.307.960,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				12 Kasus	11.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				150 Perusahaan	59.746.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X	NON URUSAN						9.585.838.306,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.585.838.306,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	9.585.838.306,00							0,00	
		-	-	-	-	-	-	9.585.838.306,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	497.999.520,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	88.135.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	59.249.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	37.058.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.060.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	27.041.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	80.821.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	93.902.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	102.731.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.060.863.946,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	6.928.544.846,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	7.017.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35.606.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	89.694.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.074.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	20.074.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	676.285.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22.656.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	109.264.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	24.704.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.958.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	98.217.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	416.484.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	196.011.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	32.332.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	39.336.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	124.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	570.153.840,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	168.013.680,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	186.654.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	215.486.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	564.450.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	164.697.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	399.752.640,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA						7.818.950.101,00							16.680.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.818.950.101,00							16.680.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7.618.950.101,00							13.230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					0 persen 100 persen 2,88 nilai 89,5 nilai	6.578.007.101,00							9.490.000.000,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 3.4 4,30 80	0 2,50 2.54 3,70 68,79 82.50	0 100.00 2,60 2.71 3,80 70 86.00	0 100.00 2,70 2.88 3,90 72 89.5	6.578.007.101,00	-	-	-	-	-	-	9.490.000.000,00	-
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	123.921.694,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	82.436.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	10.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	-			1 Laporan 1 Laporan 46 orang	5.129.068.147,00			-	-	-	-	6.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	5.120.996.147,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			2 Orang 100 Persen	17.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	17.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	714.421.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.492.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.967.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	249.954.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	5.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	123.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	19.767.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	19.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	6.578.007.101,00	-	-	-	-	-	-	9.490.000.000,00	-
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 3.4 4,30 80	0 2,50 2.54 3,70 68,79 82.50 97,62 98.32	0 100.00 2,60 2.71 3,80 70 86.00	0 100.00 2,70 2.88 3,90 72 89.5	6.578.007.101,00	-	-	-	-	-	-	9.490.000.000,00	-
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			undefined undefined undefined undefined	469.928.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				100 Laporan	268.825.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.920.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	196.183.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	-			21 kendaraan	103.180.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	103.180.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	6.578.007.101,00	-	-	-	-	-	-	9.490.000.000,00	-
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					57,66 persen	175.000.000,00							650.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,9 90.79	56,46 90.25	56,6 90.46	57,66 90.53	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000.000,00	-
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-			41 OPD 25 Lembaga	175.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Perangkat Daerah se- Provinsi Sulawesi Barat	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				65 Lembaga	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perangkat Daerah se- Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perangkat Daerah se- Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	-			20 persen 20 Orang	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi				50 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					95 persen	165.168.000,00							860.000.000,00	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	100.00	85.00	90.00	95.00	165.168.000,00	-	-	-	-	-	-	860.000.000,00	-
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	-			1 Dokumen 1 Dokumen	85.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Kegiatan	85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang membutuhkan Layanan Rujukan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota umlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			25 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang	79.668.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 orang	13.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	18.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 orang	20.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	21.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				25 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100 Persen	0,00							0,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi</i>	-			6 Kabupaten	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					83,33 persen	525.000.000,00							975.000.000,00	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	Persentase wilayah yang menjadi Kab/Kota Layak Anak (KLA)	100.00	66.66	66.66	83.33	525.000.000,00	-	-	-	-	-	-	975.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi umlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-			20 undefined 30 undefined 40 undefined	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				6 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				20 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	-			1 Dokumen 10 Lembaga 1 Lembaga 20 Lembaga	375.000.000,00			-	-	-	-	525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				25 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan				15 Lembaga	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					95 persen	175.775.000,00							1.255.000.000,00	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak]	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan	100.00	85.00	90.00	95.00	175.775.000,00	-	-	-	-	-	-	1.255.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	-			28 Orang	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				40 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				25 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang	117.635.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	18.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	24.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	22.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6 Orang	13.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-			1 Laporan 20 Lembaga	58.140.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	58.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	Anak Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						200.000.000,00							3.450.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					38,3 persen	0,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	Angka Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertilitu Rate/ASFR 15- 19) Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate (TFR)	1.47 2.42 37,5	1.53 2.50 39,1	1.52 2.49 38,5	1.51 2.47 38,3	0,00	-	-	-	-	-	-	850.000.000,00	-
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak Remaja	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak Remaja		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.01.0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Remaja		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain														
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				6 Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Remaja		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				2 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					77,40 persen	0,00							1.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)]	Cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	15.25 26.70 80.09	16.00 32.50 75.60	15.90 25.70 76.60	15.80 25.95 77.40	0,00	-	-	-	-	-	-	1.850.000.000,00	-
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	-			1 Laporan	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Pasangan Usia Subur	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Pasangan Usia Subur		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Pasangan Usia Subur		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			1 Lembaga	0,00			-	-	Pasangan Usia Subur	-	1.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pasangan Usia Subur		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pasangan Usia Subur		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				20 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pasangan Usia Subur		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					64,8 persen	200.000.000,00							750.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000.000,00	-
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga undefined	-			1 Dokumen undefined undefined	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				150 Keluarga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				10 Kelompok	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang diberikan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			1 Organisasi	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota															
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS KETAHANAN PANGAN							7.645.244.163,00							14.100.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.645.244.163,00							14.100.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						7.645.244.163,00							14.100.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 84.67 Nilai 90 Persen 98 Persen	5.053.546.803,00							7.450.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4.2 4,30 80	0 2,50 3.56 3,70 68,79 74.45 95.04	0 100 100.00 2,60 3.69 3,80 70	0 100 100.00 2,70 3.82 3,90 72	5.053.546.803,00	-	-	-	-	-	-	7.450.000.000,00	-
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	137.266.347,00			-	-	-	-	720.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	46.645.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	37.425.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	34.395.647,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			1 Dokumen 38 Orang	4.481.890.272,00			-	-	-	-	5.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/ Bulan	4.371.598.272,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	110.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	5.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-			1 Dokumen 1 Laporan 20 Paket 10 Paket	149.340.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	8.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			5 Paket 2 Unit	31.500.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	100.830.184,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	100.830.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit 5 Unit 1 Unit	147.720.000,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	66.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					102.5 Persen 131.6 Persen 60.5 Persen 98.2 Persen	1.552.468.800,00							3.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat]	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Ketersediaan) Angka Kecukupan Energi (AKE) (Konsumsi) Angka Kecukupan Protein (AKP) (Ketersediaan) Angka Kecukupan Protein (AKP) (Konsumsi) Persentase cadangan pangan pemerintah provinsi Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 80 90 98	105,3 2423 68.53 80.34 81.84 92.40 98,5	0 70.82 82.27 93.52	0 73.12 84.20 94.64	1.552.468.800,00	-	-	-	-	-	-	3.850.000.000,00	-
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	483.419.800,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-2. Penguatan Perlindung an Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	Masyarakat	-	2.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-2. Penguatan Perlindung an Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	373.419.800,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-			2 Ton	66.051.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				2 Ton	66.051.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	1.002.998.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	960.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	42.998.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					8.7 Persen	1.010.040.000,00							2.300.000.000,00	
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	Persentase Kecamatan Rentan Rawan Pangan	5	7.25	6.8	6.35	1.010.040.000,00	-	-	-	-	-	-	2.300.000.000,00	-
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	-			7 Dokumen	40.040.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	40.040.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	970.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	720.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					79 Persen	29.188.560,00							500.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	29.188.560,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-			1 Dokumen 1 Dokumen 3 Sertifikat	29.188.560,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Sertifikat	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	29.188.560,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						9.158.165.997,00							17.410.235.182,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.158.165.997,00							17.410.235.182,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						9.158.165.997,00							17.410.235.182,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 3.66 Poin 78 undefined	6.842.777.572,00							8.204.835.182,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4.1 4,30 80	2,50 3.36 3,70 68,79 76.00 91.94	100 100.00 2,60 3.51 3,80 70	100 100.00 2,70 3.66 3,90 72	6.842.777.572,00	-	-	-	-	-	-	8.204.835.182,00	-
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	399.299.400,00			-	-	-	-	439.210.931,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	37.032.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		132.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.868.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.351.753,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.868.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.351.753,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	44.804.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.056.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	248.125.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.450.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	59.600.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.649.124.504,00			-	-	-	-	7.173.467.847,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	5.649.124.504,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.173.467.847,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.128.000,00			-	-	-	-	3.351.753,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.128.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.351.753,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.621.000,00			-	-	-	-	78.122.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	6.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	85.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.122.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	265.117.840,00			-	-	-	-	41.091.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.461.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.100.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.630.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	12.079.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	211.368.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	24.550.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	63.988.500,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	63.988.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.283.328,00			-	-	-	-	236.363.551,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	96.344.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.949.846,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	112.939.168,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143.413.705,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.215.000,00			-	-	-	-	233.227.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	139.530.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		194.676.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	7.680.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.550.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	-	-	-	-	6.842.777.572,00	-	-	-	-	-	-	8.204.835.182,00	-
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	11.005.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					100 Persen	102.313.258,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	-			undefined undefined	102.313.258,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	102.313.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					76.51 Poin 92.54 Poin	983.045.778,00							9.055.400.000,00	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	Indeks Kualitas Air Indeks kualitas udara Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu	76.25 93.77	55.93 91.46	58.73 91.92	62.25 92.38	983.045.778,00	-	-	-	-	-	-	9.055.400.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			undefined undefined	983.045.778,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	9.055.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				0 Paket	79.283.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	396.048.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				4 Lokasi	76.312.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				4 Unit	159.986.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				4 Dokumen	271.414.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.055.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					0.54 Poin	99.918.700,00							0,00	
		-	-	-	-	-	-	99.918.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	99.918.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>				1 Dokumen	99.918.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					42 Persen	104.625.456,00							0,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	104.625.456,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				1 Dokumen	104.625.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					5.55 Persen	164.963.400,00							0,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	164.963.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				18 Usaha/Ke giatan	164.963.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					11.11 Persen	733.821.633,00							0,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	733.821.633,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				300 Orang	113.724.633,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				4 Lembaga	620.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100 Persen	28.425.200,00							0,00	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100	100	28.425.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	28.425.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	28.425.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					29 Persen	98.275.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata Kelola persampahan]	Persentase sampah yang terkelola Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	1 45	21	1 25	1 29	98.275.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	98.275.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	98.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				7 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.385.473.072,00							3.538.499.078,27	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.385.473.072,00							3.538.499.078,27	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.385.473.072,00							3.538.499.078,27	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 100 undefined 3,2 Poin 75 Persen 75 Poin	3.829.556.572,00							3.348.499.078,27	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 3,10 4,30 80	0 2,50 2.72 3,70 68,79 69.75 95.63 97,62	0 100 2,60 3,80 70	0 100 2,70 3,90 72	3.829.556.572,00	-	-	-	-	-	-	3.348.499.078,27	-
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif	-			6 Berita Acara 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	50.847.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi	-	61.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			0				0 0	1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disdukcapil Provinsi		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18.300.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.499.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	18.550.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Berita Acara	6.498.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	'Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 'Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 'Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan 1 Laporan 31 Orang	3.193.712.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi	-	3.192.904.078,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/ Bulan	3.182.714.430,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		3.189.904.078,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	9.998.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	13.595.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi	-	13.595.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	13.595.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		13.595.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 'Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 'Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 'Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 'Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 'Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan 30 Laporan 280 Dos 25 Paket 4 Paket 1 Paket	267.205.822,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi	-	59.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				280 Paket	27.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9.172.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25 Paket	11.909.112,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	168.122.710,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.002.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	'Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	252.995.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	124.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128.995.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 'Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Unit 25 Unit 100 Persen	51.200.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	41.210.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	9.990.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					35 Persen 5 Persen	195.916.500,00							130.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	13 43 5.00	1.53 1,95 30	2.22 3 32	2.92 35 5	195.916.500,00	-	-	-	-	-	-	130.000.000,00	-
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan undefined	-			1 Dokumen 100 Persen undefined	31.734.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	31.734.320,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-			1 Persen	52.911.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	52.911.500,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	-			1 Persen	111.270.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	111.270.680,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten dan Masyarakat Sulawesi Barat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					100 Persen 43 Persen 49 Persen 98 Persen	180.000.000,00							20.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah	1.00 100 51 57	0.45 0.96 100 39 45 96	0.56 0.97 100 41 47 97	0.67 0.98 100 43 49 98	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-			1 Persen	180.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					31 Persen	145.550.000,00							20.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	145.550.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Persen	145.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	145.550.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					100 Persen	34.450.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	-			2 Dokumen	34.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	34.450.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Disdukcapil Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						10.494.123.105,00							11.729.883.489,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.494.123.105,00							11.729.883.489,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.494.123.105,00							11.729.883.489,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 3,07 Indeks 72,00 poin	5.755.623.105,00							6.279.883.489,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100.00 3,10 3.6 4,30 80	100.00 2,50 2.84 3,70 68.75 68,79 96.64 97,62	100.00 2,60 2.9 3,80 70	100.00 2,70 3.07 3,90 72	5.755.623.105,00	-	-	-	-	-	-	6.279.883.489,00	-
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Berita Acara 19 Data 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	97.606.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	184.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24.307.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	14.544.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				19 Data	9.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Berita Acara	29.155.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas PMD Sulbar		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen 1 Laporan 12 Laporan 47 Orang	4.525.868.893,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	4.953.883.489,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	4.444.892.893,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		4.853.383.489,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	41.792.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	34.184.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	14.592.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	14.592.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			1 Dokumen 100 Laporan 2 Paket 3 Paket 2 Paket	263.357.314,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	387.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	28.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	22.060.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	160.596.814,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	41.900.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-			12 Laporan 12 Laporan	759.618.498,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	610.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67.600.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	692.017.898,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			15 Unit 1 Unit 20 Unit	94.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.970.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	54.310.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	17.300.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas PMD Sulbar		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					64,91 Persen	1.100.000.000,00							1.500.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi pemerintahan desa]	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	90	48.18	56.54	64.91	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-			575 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	1.100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Desa	-	1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Desa		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				575 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Desa		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Desa		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					15,13 Persen 49,58 Persen	3.638.500.000,00							3.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan]	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang menjadi binaan provinsi Persentase Lembaga Posyandu yang menjadi binaan provinsi	20 65	11.88 39.30	13.50 44.44	15.13 49.58	3.638.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.950.000.000,00	-
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	-			1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 575 Lembaga	3.638.500.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa	-	3.950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				575 Lembaga	1.588.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa		1.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		-	-	-	-	-	-	3.638.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.950.000.000,00	-
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				2 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						11.220.763.854,00							13.760.286.954,12	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.220.763.854,00							13.760.286.954,12	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						11.220.763.854,00							13.760.286.954,12	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	7.333.859.709,00							7.360.017.038,83	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4.10 4,30 90.00	2,50 3.38 3,70 75.00 78.5 97,62 99.36	100 100.00 2,60 3.52 3,80 78.00	100 100.00 2,70 3.67 3,90 80.00	7.333.859.709,00	-	-	-	-	-	-	7.360.017.038,83	-
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	76.000.000,00			-	-	-	-	58.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.220.734.126,00			-	-	-	-	5.913.498.345,81	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/ Bulan	6.220.734.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.888.498.345,81	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				18 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.980.583,00			-	-	-	-	93.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	29.980.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		53.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.500.000,00			-	-	-	-	550.518.693,02	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.518.693,02	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	67.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	655.360.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	591.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.285.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	8.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	4.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					-	3.761.887.745,00							5.477.917.553,32	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan provinsi	15,59 6,97	3,43 8.15	5,23 8.56	5,26 9.41	3.761.887.745,00	-	-	-	-	-	-	5.477.917.553,32	-
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-			-	11.990.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			0				0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				1 Dokumen	11.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				377 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	3.500.000.000,00			-	-	-	-	3.240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-			-	164.913.600,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	108.713.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				3 Laporan	56.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-			-	19.900.000,00			-	-	-	-	22.917.553,32	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	19.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.917.553,32	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	3.761.887.745,00	-	-	-	-	-	-	5.477.917.553,32	-
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	24.805.200,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ														
			Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	24.805.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan provinsi	15.59 6,97	3,43 8.15	5,23 8.56	5,26 9.41	3.761.887.745,00	-	-	-	-	-	-	5.477.917.553,32	-
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	40.278.945,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	40.278.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	3.761.887.745,00	-	-	-	-	-	-	5.477.917.553,32	-
	2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan provinsi	15.59 6,97	3,43 8.15	5,23 8.56	5,26 9.41	3.761.887.745,00	-	-	-	-	-	-	5.477.917.553,32	-
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					-	100.018.400,00							822.352.361,97	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	Jumlah barang yang melalui Pelabuhan (juta ton) Jumlah orang yang melalui Pelabuhan (orang)	3.12 66.187	2.77 58.789	2.82 59.965	2.88 61.164	100.018.400,00	-	-	-	-	-	-	822.352.361,97	-
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	52.352.361,97	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.352.361,97	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-	-			-	50.018.400,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	50.018.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	0,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	0,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0 Persen	24.998.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	24.998.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	24.998.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	24.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN						28.239.837.260,00							40.075.838.299,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.239.837.260,00							40.075.838.299,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						27.576.896.448,00							38.625.838.299,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,60 Skor 4,41 Skor 85 Poin	9.574.935.320,00							11.855.838.299,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	9.574.935.320,00	-	-	-	-	-	-	11.855.838.299,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	4.28	3,80	3,90									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.6	68,79	4.34	4.41									
			Nilai SAKIP OPD	80	75.00	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		97,62	80.00	85.00									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		99.64											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	186.785.856,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	136.785.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	-			100 Persen	7.997.551.364,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	8.825.838.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				76 Orang/ Bulan	7.722.551.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		8.495.838.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Profesional	-			100 Persen	30.000.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	10,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berbasis Digital	-			100 Persen	370.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	570.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	-			100 Persen	20,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	10,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	10,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-			100 Persen	690.598.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	810.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46.598.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	459.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					85 Persen	8.441.520.000,00							7.600.000.000,00	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	Persentase dokumen publik yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat (%)	100.00	80.00	82.00	85.00	8.441.520.000,00	-	-	-	-	-	-	7.600.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Jumlah Konten Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	-			12 Laporan 10 Orang 12 Konten 14 Laporan 2 Dokumen	8.441.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat	-	7.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	3.718.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				14 Laporan	3.393.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				30 Komunitas	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perngkat Daerah, Media, dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2,47 Poin 3,78 Poin 4,35 Poin 4,40 Poin 52,08 Poin 56,14 Poin	9.560.441.128,00							19.170.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4.00	2.18	2.29	2.47	9.560.441.128,00	-	-	-	-	-	-	19.170.000.000,00	-
			Indeks Domain Layanan SPBE	5.00	3.40	3.57	3.78									
			Indeks Domain Manajemen	63.10	4.00	4.20	4.35									
				67.73	4.14	4.22	4.40									
			Indeks Domain Tata Kelola		41.65	46.87	52.08									
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia		46.86	53.82	56.14									
			Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-			13 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Layanan 40 Perangkat Daerah 40 Perangkat Daerah	9.560.441.128,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	19.170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	249.961.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	502.885.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	151.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	622.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				40 perangkat daerah	516.548.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				40 Perangkat Daerah	3.312.307.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				13 Aplikasi	917.088.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	127.877.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	160.241.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						470.440.812,00							800.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					93,89 Persen	470.440.812,00							800.000.000,00	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional]	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%)	97.21	92.68	93.14	93.89	470.440.812,00	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	-
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-			1 Kegiatan 2 Orang 100 Persen 75 Persen 50 Persen	470.440.812,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat	-	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>				75 %	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>				50 %	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>				100 %	270.440.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				7 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral														
			<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						192.500.000,00							650.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					0 Persen	192.500.000,00							650.000.000,00	
		[Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi di lingkungan pemerintah daerah]	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	0	0	0	0	192.500.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000.000,00	-
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen	182.500.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				42 Perangkat Daerah	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				12 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	-			3 Kegiatan	10.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				2 Kegiatan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN						20.172.750.117,00							31.245.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.723.189.135,00							15.240.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						11.723.189.135,00							15.240.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Poin 3,90 Poin 72 Poin	6.991.368.135,00							9.020.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.60 80	0 2,50 3,70 4.28 68,79 70.00 95.08 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.34 70 76.00	0 100 100.00 2,70 3,90 4.41 72 82.00	6.991.368.135,00	-	-	-	-	-	-	9.020.000.000,00	-
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			2 Dokumen	264.712.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi	-	815.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	211.950.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		370.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	44.682.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koperasi		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	-			1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	6.686.894.635,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	7.920.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	6.686.894.635,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		7.700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		220.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			2 Laporan	39.761.500,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	285.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	31.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8.361.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					17 Persen 73 Persen	0,00							360.000.000,00	
		[Meningkatnya pengawasan koperasi aktif]	Persentase Koperasi Aktif Persentase koperasi aktif yang diawasi sesuai regulasi yang berlaku (%) Persentase Koperasi Sehat	25 80 85	12 70	15 72 72,5	17 74 75	0,00	-	-	-	-	-	-	360.000.000,00	-
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam, Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang Wilayah Keanggotaanya antar Kabupaten/Kota Tingakt Provinsi	-			120 Unit Usaha 5 Persen	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi	-	360.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				120 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi		360.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					26 Persen	403.270.000,00							320.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	403.270.000,00	-	-	-	-	-	-	320.000.000,00	-
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	-			120 Orang	403.270.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi	-	320.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	403.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi		320.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1,1 Persen	100.000.000,00							870.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-			15 Unit Usaha	100.000.000,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi	-	870.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				60 Unit Usaha	0,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					23,45 Persen	4.228.551.000,00							3.870.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri]	Persentase UMKM yang diberdayakan Rasio Kewirausahaan Daerah	20.20 25,15	11 23,02	11.60 23,25	12.70 23,45	4.228.551.000,00	-	-	-	-	-	-	3.870.000.000,00	-
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	-			80 Unit Usaha 80 Unit Usaha	4.228.551.000,00			Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM	-	3.870.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>				80 Unit Usaha	3.832.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	4.228.551.000,00	-	-	-	-	-	-	3.870.000.000,00	-
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>				300 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri]	Persentase UMKM yang diberdayakan	20.20 25,15	11 23,02	11.60 23,25	12.70 23,45	4.228.551.000,00	-	-	-	-	-	-	3.870.000.000,00	-
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	4.228.551.000,00	-	-	-	-	-	-	3.870.000.000,00	-
	2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				80 Unit Usaha	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					18 Persen	0,00							800.000.000,00	
		[Meningkatnya status dan daya saing UMKM]	Persentase usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah Proporsi UKM Menjalिन Kemitraan dan Ekspor	0 33 40	0 12 43	0 15 15	0 18 20	0,00	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-			30 Orang 35 Persen	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM	-	800.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				260 Unit Usaha	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	-
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				30 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	KUMKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.229.202.038,00							13.195.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4.252.202.038,00							9.290.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100 Persen	0,00							130.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-			10 Dokumen	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					-	495.833.000,00							1.260.000.000,00	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Koefisien variasi harga Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	0 7.00	0 8.70	0 8.70	0 8.50	495.833.000,00	-	-	-	-	-	-	1.260.000.000,00	-
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	340.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				8 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	-			14 Laporan	445.833.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	770.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				8 Laporan	68.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	376.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	495.833.000,00	-	-	-	-	-	-	1.260.000.000,00	-
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-			4 Laporan	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					10,3 Persen	160.000.000,00							1.450.000.000,00	
		[Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan]	Ekspor Barang dan Jasa Nilai ekspor bersih Perdagangan (Juta USD)	11,98 50.60	44.75 9,7	10 45.21	10,3 46.52	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	-			30 UMKM 2 UMKM	160.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	1.450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				2 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		750.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>				30 Pelaku Usaha	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Pelaku UMKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					90 Persen	400.215.038,00							2.600.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	400.215.038,00	-	-	-	-	-	-	2.600.000.000,00	-
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-			1 Laporan	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	-			2 Laporan	327.227.302,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				2 laporan	327.227.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Ditangani Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	-			10 Laporan 8 Laporan	72.987.736,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				8 Laporan	72.987.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Kasus yang Ditangani				10 Kasus	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					3,57 Persen	3.196.154.000,00							3.850.000.000,00	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Kemitraan Pertumbuhan penjualan pelaku usaha (volume penjualan produk dalam negeri)	10.02 20	0 5.00	1,78 5.50	3,57 6.05	3.196.154.000,00	-	-	-	-	-	-	3.850.000.000,00	-
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	-			7 UMKM	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				7 UMKM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku UMKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-			250 UMKM	3.196.154.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	UMKM	-	3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				80 UMKM	3.196.154.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	UMKM		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.977.000.000,00							3.905.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					100 Persen	2.977.000.000,00							3.680.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	2.977.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.680.000.000,00	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.977.000.000,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM	-	3.680.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				8 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		900.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	158.701.559,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2.599.298.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		1.700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		[Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan melalui perencanaan dan pembangunan industri yang lebih inovatif]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan	0 7.50	0 -1.69	0 0.15	0 1.99	2.977.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.680.000.000,00	-
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		160.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	69.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	IKM		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100 Persen	0,00							225.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	225.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (	-			1 Dokumen 1 Dokumen	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	IKM	-	225.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	IKM		225.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X	NON URUSAN						1.220.358.944,00							2.810.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.220.358.944,00							2.810.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Poin 3,90 Poin 72 Poin	1.220.358.944,00							2.810.000.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-			1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	20.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Laporan 12 Laporan	5.860.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			2 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	22.197.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	22.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		80.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	-			2 Laporan	293.260.944,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	745.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		45.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	36.263.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	50.533.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	112.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	93.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit 3 Unit 2 Unit 5 Item	0,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	760.106.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	430.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	481.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		230.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	84.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	184.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			15 Unit 15 Unit 15 Item 2 Gedung	118.885.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar	-	700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	26.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	92.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		160.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN Dinas Koperindag Sulbar		40.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Koperindag Sulbar		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						8.127.146.413,00							13.534.923.630,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.127.146.413,00							13.534.923.630,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8.127.146.413,00							13.534.923.630,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	131.346.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.280.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.280.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.093.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.093.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	77.220.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	20.000.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 51 Orang/ Bulan	5.938.254.746,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Realisasi Keuangan	-	6.179.923.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	5.751.828.746,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Realisasi Keuangan		6.002.423.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	153.356.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Realisasi Keuangan		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.214.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Realisasi Keuangan		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	31.855.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Realisasi Keuangan		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			1 Dokumen	7.354.100,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Barang Milik Daerah DPMTSP	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.354.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan Barang Milik Daerah DPMTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			12 Dokumen 13 Dokumen 50 Orang	112.501.700,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Kesiplinan ASN DPMTSP	-	113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13 Dokumen	68.151.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Kesiplinan ASN DPMPTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1.288.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Kesiplinan ASN DPMPTSP		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	43.062.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen Kesiplinan ASN DPMPTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 30 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	178.458.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP	-	292.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.998.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.964.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4.972.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	32.199.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	66.453.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPTSP		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	46.872.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Umum DPMPSTP		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	-			3 Unit	26.339.088,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sarana dan Prasarana Kantor	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	26.339.088,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sarana dan Prasarana Kantor		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	-			2 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	580.737.440,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP	-	715.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	90.297.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	162.223.300,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	328.217.140,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			1 Unit 15 Unit 1 Unit 18 Unit	149.397.678,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan BMD	-	620.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.042.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan BMD		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	43.520.750,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan BMD		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	19.762.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan BMD		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	63.072.928,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan BMD		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					70.15 Persen	244.224.630,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Pertumbuhan investasi (%) Realisasi Total terhadap Target Investasi	28 70,81	23.43 75,01	24.34 70	25.26 70,15	244.224.630,00	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	-
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	-			1 Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen	244.224.630,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	244.224.630,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.10 Persen	65.039.885,00							2.150.000.000,00	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	Jumlah investor Persentase Peningkatan Jumlah Investor	1329 60,5	1158 52,41	1181 50,1	1205 50,4	65.039.885,00	-	-	-	-	-	-	2.150.000.000,00	-
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	-			1 Dokumen 1 Dokumen	65.039.885,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	2.150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	65.039.885,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		1.950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					100 Persen	379.229.024,00							1.200.000.000,00	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Pertumbuhan izin investasi	100 4	100 -52	100 -30	-10 100	379.229.024,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-			20 Kegiatan Usaha 1 Dokumen 80 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha	379.229.024,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				80 Pelaku Usaha	89.329.024,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	179.900.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				20 Kegiatan Usaha	110.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					69 Persen	79.637.410,00							400.000.000,00	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase pelaku usaha yang patuh pada aturan pelaksanaan perizinan berusaha (%) Persentase pelaku usaha yang patuh pada aturan pelaksanaan perizinan berusaha (pelaku usaha yang diwajibkan hanya dengan modal >5 miliar) (%)	78.47	69.70	71.09	72.52	79.637.410,00	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	-			50 Kegiatan Usaha 20 Pelaku Usaha 7 Kegiatan Usaha	79.637.410,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	28.478.872,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				7 Kegiatan usaha	5.107.044,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				20 Pelaku Usaha	46.051.494,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					60 Persen	132.656.512,00							400.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal. (Jumlah data dan informasi yang disediakan/ data informasi yang harus ada) (%) Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100	100	100 60	100 70	132.656.512,00	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	-			2 Dokumen	132.656.512,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	132.656.512,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.260.993.262,00							34.962.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.260.993.262,00							34.962.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.260.993.262,00							34.962.000.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2.7 Skor 3.60 Poin 83 Poin	5.901.305.255,00							7.112.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	5.901.305.255,00	-	-	-	-	-	-	7.112.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	3.48	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.1	68,79	3.6	3.73									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	80.75	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	97,62	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		98.38	84.6	88.45									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-			7 Dokumen	110.231.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	149.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	70.368.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.430.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.881.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.703.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.496.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.536.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	20.815.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				0 Berita Acara	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			3 Laporan	5.082.886.937,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	5.708.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	5.050.276.537,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	5.901.305.255,00	-	-	-	-	-	-	7.112.000.000,00	-
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	5.901.305.255,00	-	-	-	-	-	-	7.112.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	3.48	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.1	68,79	3.6	3.73									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	80.75	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	97,62	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		98.38	84.6	88.45									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.201.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	27.472.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	937.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan terhadap administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	31.443.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	140.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	26.420.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	5.023.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			6 Laporan	246.285.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	485.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	46.770.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.540.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	13.032.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	104.777.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	616.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	77.550.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	353.477.258,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.020.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.168.778,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	247.288.480,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			2 Laporan	76.981.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	66.815.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.166.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					100 Persen	771.090.100,00							8.150.000.000,00	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) Pertumbuhan wirausaha muda (%)	16.5 85.00	75.00 9.00	77.00 9.45	10.4 79.00	771.090.100,00	-	-	-	-	-	-	8.150.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Daerah	-			400 Orang	771.090.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	-	6.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	161.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				100 Persentase	341.612.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	81.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi														
			Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				130 Orang	145.858.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah OKP yang Berpartisipasi pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepmudaan Tingkat Daerah Provinsi	-			55 Orang	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	-	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda</i>				0 Persentase	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi</i>				0 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					100 Orang 100 Persen	8.488.597.907,00							16.500.000.000,00	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga]	Cakupan pembinaan olahraga (%) Jumlah atlet berprestasi	14.71 53.00	44.00 8.23	45.00 8.82	47.00 8.82	8.488.597.907,00	-	-	-	-	-	-	16.500.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-			80 Orang 4 Dokumen	1.059.906.025,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan	-	4.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha														
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	395.238.425,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				2 Dokumen	55.667.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				2 Unit	609.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Cabor yang diikuti dan di selenggarakan pada kejuaraan olahraga	-			8 Cabor	1.475.219.732,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan	-	5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				85 Orang	549.759.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	225.460.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				4 Kegiatan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	-			136 Orang	153.472.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan	-	4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlet, Tenaga Keolahragaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				0 Pelatda	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlet, Tenaga Keolahragaan		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	143.472.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelajar, Masyarakat Umum, Atlit, Tenaga Keolahragaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	JUmlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			3 Dokumen	5.800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Organisasi Olahraga	-	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				2 Dokumen	5.800.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Organisasi Olahraga		2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Organisasi Olahraga		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					7 Lembaga	100.000.000,00							3.200.000.000,00	
		[Meningkatnya keaktifan lembaga pramuka]	Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif	7.00	6.00	7.00	7.00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.200.000.000,00	-
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan yang ikut serta dalam kegiatan Kepramukaan Tk. Provinsi dan Nasional	-			200 Orang	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat	-	3.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi														
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan termanfaatkan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				0 Organiasasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Organisasi Pramuka Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						6.856.211.847,00							25.147.050.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.856.211.847,00							25.147.050.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.824.081.847,00							8.097.050.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen	4.740.570.123,00							7.387.050.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	4.740.570.123,00	-	-	-	-	-	-	7.387.050.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,3	3,98	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	4.04	4.11									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	77.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97,62	82.2	86.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		98.38											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			25 Poin	45.930.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	280.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	23.890.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	4.740.570.123,00	-	-	-	-	-	-	7.387.050.000,00	-
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.3 4,30 80	0 2,50 3,70 3.98 68,79 77.75 97,62 98.38	0 100.00 2,60 3,80 4.04 70 82.2	0 100.00 2,70 3,90 4.11 72 86.65	4.740.570.123,00	-	-	-	-	-	-	7.387.050.000,00	-
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	-			98 Persen	3.863.979.457,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	5.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	3.840.444.457,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	23.535.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD	-			100 Persen	20.394.240,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	10.344.240,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10.050.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	4.740.570.123,00	-	-	-	-	-	-	7.387.050.000,00	-
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen	327.293.222,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	940.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	8.518.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	4.740.570.123,00	-	-	-	-	-	-	7.387.050.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,3	3,98	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	4,04	4,11									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	77.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97,62	82.2	86.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		98.38											
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	46.720.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	18.150.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25 Paket	21.346.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	194.198.422,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	38.360.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi OPD	-			100 Persen	61.490.000,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	61.490.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 Persen	348.253.204,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	105.080.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				24 Laporan	120.565.304,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	122.607.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	73.230.000,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	92.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	45.620.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	12.050.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		12.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15.560.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					5 Persen	1.982.751.724,00							610.000.000,00	
		[Meningkatkan pembinaan perpustakaan]	Persentase perpustakaan yang dibina (%) Persentase perpustakaan yang dibinadan dikembangkan Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	100 65.00	26.28 46.48	40 50.18	53.89 60	1.982.751.724,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-			98 Persen	1.478.940.224,00			-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup	-	410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustaka an	82.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				150 Orang	202.666.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				3 Layanan	468.744.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				3000 Eksemplar	285.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			<i>Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat</i>				1 Dokumen	250.212.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	1.982.751.724,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			<i>Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi</i>				5 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya pembinaan perpustakaan]	Persentase perpustakaan yang dibina (%) Persentase perpustakaan yang dibinadan dikembangkan Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	100 65.00	26.28 46.48	40 50.18	53.89 60	1.982.751.724,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	189.703.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan oleh Masyarakat</i>	-			98 Persen	503.811.500,00			-	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Lokus	297.852.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	PP-3. Peni ngkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1 Perpustaka an	129.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				3 Perpustaka an	76.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar, Komunitas Literasi dan Lembaga Perpustakaan Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					50 Persen	100.760.000,00							100.000.000,00	
		[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan di perpustakaan provinsi (%)	0 46,44	0	0	0 20,32	100.760.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase peningkatan Serah- Simpan KCKR menjadi koleksi daerah	-			98 Persen	0,00			-	-	Penerbit dan Pengusaha Rekaman Lingkup	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				60 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Penerbit dan Pengusaha Rekaman Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah KID dan BID yang diterbitkan	-			1 Terbitan	25.698.000,00			-	-	Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Instansi Vertikal serta OPD Lingkup	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				50 Entry	25.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Instansi Vertikal serta OPD Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				0 Naskah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Instansi Vertikal serta OPD Lingkup		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-			-	75.062.000,00			-	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				4 Eksemplar	75.062.000,00	Kab. Majene, Sendana, Lalatedzong	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PP-3. Peningkatan Ak sesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						32.130.000,00							17.050.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					70 Persen	32.130.000,00							17.050.000.000,00	
		[Meningkatkan tata Kelola arsip dinamis dan statis]	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100 35.00 75	0.20 20 25	23.00 25 40	26.00 35 55	32.130.000,00	-	-	-	-	-	-	17.050.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Daftar Arsip Dinamis yang tersusun	-			1 Daftar	32.130.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah	-	16.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				100 Arsip	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				0 Arsip	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi														
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				94 Instansi	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		16.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				47 Lembaga	32.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	-			25 Boks	0,00			-	-	OPD Lingkup Pemerintah	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				0 Arsip	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Lingkup Pemerintah		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Simpul Jaringan SIKN Tingkat Provinsi	-			1 Simpul Jaringan	0,00			-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah	-	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				47 Pengguna	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan OPD Lingkup Pemerintah		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						37.726.006.823,00							35.727.200.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	9.524.022.313,00							12.150.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	255.400.000,00			-	-	-	-	570.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Polewali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				0 Berita Acara	0,00	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.239.930.020,00			-	-	-	-	8.090.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				70 Orang/ Bulan	7.154.930.020,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	151.100.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	80.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	80	97,62	70	72									
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	705.218.600,00			-	-	-	-	555.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	93.210.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	469.338.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	102.670.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	242.529.925,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	221.225,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	36.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	114.390.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 3,10 4,30 80	2,50 3,70 68,79 97,62	100 2,60 3,80 70	100 2,70 3,90 72	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	91.118.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	542.367.768,00			-	-	-	-	640.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	49.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	86.183.768,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	94.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	312.784.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.476.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	327.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	276.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	9.524.022.313,00	-	-	-	-	-	-	12.150.000.000,00	-
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	20.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					-	18.114.902.910,00							3.333.000.000,00	
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.675.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				0 Ha	0,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir														
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia														
			Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru														
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				0 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan]	Persentase luas ekosistem mangrove yang terjaga dan dipulihkan dibandingkan dengan target Persentase Luas tutupan terumbu karang dalam kondisi baik dan sangat baik	40,51 54,94	30 47,41	31,5 47,88	33,08 48,84	18.114.902.910,00	-	-	-	-	-	-	3.333.000.000,00	-
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha														
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			-	18.114.902.910,00			-	-	-	-	438.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang	578.552.310,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				10 Kelompok	16.918.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		127.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100 Orang	130.006.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		64.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				9 Kelompok	488.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		107.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					-	319.086.400,00							9.311.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	1,69	0,88	0,97	1,06	319.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	3.845.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.540.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	0,00			-	-	-	-	598.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				0 Persentase	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		523.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	300.196.400,00			-	-	-	-	4.316.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				0 Pelabuhan Perikanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	250.196.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	319.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	0,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	197.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		197.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	1,69	0,88	0,97	1,06	319.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	18.890.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	18.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	319.086.400,00	-	-	-	-	-	-	9.311.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					-	4.455.347.200,00							5.340.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	210.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	219.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	3,37	1,68	1,68	2,03	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	3.810.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.540.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	3,37	1,68	1,68	2,03	4.455.347.200,00	-	-	-	-	-	-	5.340.200.000,00	-
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	4.355.347.200,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	2.814.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	1.541.347.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					-	167.648.000,00							1.821.000.000,00	
		[Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	100	100	100	100	167.648.000,00	-	-	-	-	-	-	1.821.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	166.842.000,00			-	-	-	-	1.725.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	1.341.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		620.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				8 Kelompok Masyarakat	24.500.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		-	-	-	-	-	-	167.648.000,00	-	-	-	-	-	-	1.821.000.000,00	-
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	806.000,00			-	-	-	-	96.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					-	5.145.000.000,00							3.772.000.000,00	
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Persentase konsumsi ikan	2,43	0,88	0,97	1,11	5.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.772.000.000,00	-
			Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	2,52	1,02	1,12	1,29									
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	357.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	0,00			-	-	-	-	455.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		276.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	5.145.000.000,00			-	-	-	-	2.960.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				20 Unit Usaha	5.045.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						10.637.741.732,00							18.027.100.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.637.741.732,00							18.027.100.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						10.637.741.732,00							18.027.100.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen	6.148.421.023,00							7.927.100.000,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2,50	100	100	6.148.421.023,00	-	-	-	-	-	-	7.927.100.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3.50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.20	68,79	3.64	3.78									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	75.00	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	90.00	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	95.00	97,62	91.00	92.00									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			72 Poin	121.276.745,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	357.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		8.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		6.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		6.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	31.276.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		70.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	-			100 Persen	4.780.894.278,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	5.631.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	4.770.894.278,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		5.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	-			2.70 Indeks	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	35.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		5.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	-			3.80 Persen	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Kantor	-	205.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	-			3.90 Persen	285.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor	-	614.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			2.70 Persen	15.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	98.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		18.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3.90 Persen	824.250.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	905.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	734.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2.70 Persen	22.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor	-	81.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		18.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kantor		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		-	-	-	-	-	-	6.148.421.023,00	-	-	-	-	-	-	7.927.100.000,00	-
	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					0.18 Persen	650.000.000,00							8.100.000.000,00	
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Rata-rata lama menginap wisatawan (hari)	1 1.79	0 1.23	0 1.39	0,18 1.49	650.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<i>persentase capaian pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</i>	-			0.18 Persen	650.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Wisatawan	-	8.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				0 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Wisatawan		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Wisatawan		1.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				300 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Wisatawan		6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					0.33 Persen	1.625.000.000,00							700.000.000,00	
		[Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata]	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	0.50 0,67 1.00	0 -0.03 -0.23	0 0.18 0.28	0,33 0.34 0.38	1.625.000.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	-
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-			1 Laporan	1.625.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Media	-	700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Media		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Media		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Media		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					738 Pelaku Usaha	1.464.320.709,00							850.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki legalitas	1000 500 7.80	0 6.70	0 6.90	249 489 7.10	1.464.320.709,00	-	-	-	-	-	-	850.000.000,00	-
			jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh hak kekayaan intelektual													
			Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-			1 Laporan	1.464.320.709,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	1.464.320.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Penegmbangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			1 Dokumen	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha	-	450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual</i>				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					5 Persen	750.000.000,00							450.000.000,00	
		[Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi	15 55	0 20	0 30	35 5	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000.000,00	-
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<i>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkembang Kompetensinya</i>	-			1 Laporan	750.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				210 Orang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif															
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA	
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN							65.760.041.068,00							83.672.825.370,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						65.760.041.068,00							83.672.825.370,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						65.760.041.068,00							83.672.825.370,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 persen 4,2 Poin 78,50 persen 95 persen	22.177.045.106,00							25.386.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.5 80	0 2,50 3,70 4.08 68,79 78.25 90.9 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.16 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.16 72	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Indeks Pengelolaan Aset Tercapainya KINERJA ANGGARAN Tercapainya Nilai SAKIP Tercapainya Nilai SPBE	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	366.725.953,00			-	-	-	-	455.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	241.140.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.948.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.735.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	95.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya KINERJA ANGGARARAN Tercapainya Nilai SAKIP Tercapainya Pengelolaan Aset	-			100 persen 100 persen 100 persen	19.339.820.845,00			-	-	-	-	22.108.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				191 Orang/ Bulan	19.225.901.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20.781.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	52.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	22.173.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8.904.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	9.267.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Anggaran Tercapainya Nilai SAKIP Tercapainya Nilai SPBE Tercapainya Pengelolaan Aset	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	602.499.800,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	41.948.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	437.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	63.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.5 80	0 2,50 3,70 4.08 68,79 78.25 90.9 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.16 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.16 72	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	59.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya indeks pengelolaan aset Tercapainya Kinerja Anggaran Tercapainya Nilai Rapor SPBE Tercapainya Nilai SAKIP	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	560.160.736,00			-	-	-	-	852.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.620.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	137.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.687.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	244.214.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	63.943.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.5 80	0 2,50 3,70 4.08 68,79 78.25 90.9 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.16 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.16 72	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Indeks Pengelolaan Aset Tercapainya Kinerja Anggaran Tercapainya Nilai SAKIP Tercapainya Nilai SPBE	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0,00			-	-	-	-	36.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Indeks Pengelolaan Aset Tercapainya Kinerja Anggaran Tercapainya Nilai Rapor SPBE Tercapainya Nilai SAKIP	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	997.970.073,00			-	-	-	-	1.040.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	103.607.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	318.423.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		340.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	575.939.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Indeks Pengelolaan Aset Tercapainya Kinerja Anggaran Tercapainya Nilai SAKIP Tercapainya Nilai SPBE	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	309.867.699,00			-	-	-	-	520.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	151.285.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 3,10 4,30 4.5 80	0 2,50 3,70 4.08 68,79 78.25 90.9 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.16 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.16 72	22.177.045.106,00	-	-	-	-	-	-	25.386.000.000,00	-
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	22.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	135.761.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3,47 persen	40.638.256.571,00							27.591.988.155,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	5.57	2.57	2.98	3.47	40.638.256.571,00	-	-	-	-	-	-	27.591.988.155,00	-
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	-			3,47 persen	4.645.983.784,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	1.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	4.296.605.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>				6 Dokumen	349.378.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan</i>				2 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>				1 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	-			3,47 persen	16.392.467.732,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	15.803.727.064,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				150 Sertifikat	315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		78.467.064,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				17000 Batang	1.268.689.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		575.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				140 Ton	1.381.052.959,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				10 Ton	328.331.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	1.883.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		5.800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				1 Laporan	11.215.419.447,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		7.700.260.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan</i>	-			3,47 persen	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	1.022.922.762,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		947.730.890,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		75.191.872,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan</i>	-			3,47 persen	2.295.520.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	1.810.209.829,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>				3 Laporan	248.520.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		899.006.669,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	2.047.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		455.601.580,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		455.601.580,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Tersedianya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	-			3,47 persen	87.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	63.201.364,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	87.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		63.201.364,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya bantuan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	-			3,47 persen	17.217.284.455,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	7.841.927.136,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				650 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		356.873.093,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				10000 Dosis	17.217.284.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				0 Ekor	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		6.985.054.043,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					39856 hektar 500 hektar	0,00							11.325.000.000,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Cakupan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian	0 1000 39856	0 189 30156	0 39156 400	0 39856 500	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksanannya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura Terlaksananya penetapan LP2B	-			500 hektar 39856 hektar	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	11.325.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		950.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				7 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				100 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		457.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Cakupan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian	0 1000 39856	0 189 30156	0 39156 400	0 39856 500	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi														
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi														
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				42 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		5.890.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Cakupan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian	0 1000 39856	0 189 30156	0 39156 400	0 39856 500	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan														
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	11.325.000.000,00	-
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				18 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		457.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					100 persen	1.060.998.391,00							6.497.711.169,00	
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	-			100 persen	400.072.391,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	3.117.674.482,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		869.338.143,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	400.072.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.630.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			<i>Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan</i>				6 Kasus	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		543.336.339,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader zoonosis				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		75.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	-			100 persen	96.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	525.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		325.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Terlaksannya penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)</i>	-			100 persen	446.486.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	2.470.325.198,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit														
			<i>Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		231.479.242,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.538.845.956,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan				6 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				6 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				3 Unit Usaha	146.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</i>				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														
			<i>Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan</i>				1 Produk	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)</i>	-			100 persen	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM</i>				50 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan														
			<i>Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi</i>				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	<i>Terlaksananya penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)</i>	-			100 persen	118.440.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	234.711.489,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani</i>				0 Kasus	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis di Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	1.060.998.391,00	-	-	-	-	-	-	6.497.711.169,00	-
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			<i>Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</i>				2 Sertifikat	118.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		134.711.489,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100 persen	1.457.441.000,00							1.651.231.852,00	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	Cakupan penanganan bencana pertanian	100.00	100.00	100.00	100.00	1.457.441.000,00	-	-	-	-	-	-	1.651.231.852,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	terlaksananya penanganan bencana pertanian	-			100 persen	1.457.441.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	1.651.231.852,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				9750 Ha	521.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.484.253.350,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				450 Ha	935.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		166.978.502,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					38,12 persen	426.300.000,00							11.220.894.194,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	Persentase kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian (%)	55.45	33.00	36.45	38.12	426.300.000,00	-	-	-	-	-	-	11.220.894.194,00	-
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian (%)	-			38,12 persen	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	950.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				80 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian (%)	-			38,12 persen	426.300.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	9.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				100 Kelompok	426.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		8.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Terlaksananya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian (%)</i>	-			undefined undefined	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI	-	670.894.194,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani															
			<i>Jumlah korporasi petani yang didampingi</i>				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		123.215.200,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	KELOMPOK PETANI		547.678.994,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
		DINAS PERKEBUNAN						48.170.566.849,00							77.182.700.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.170.566.849,00							77.182.700.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						48.170.566.849,00							77.182.700.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					80 Poin	9.537.869.645,00							12.297.700.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	0 100.00 4.25	0 3.72 70.75 91.72	0 100.00 3.83 76.6	0 100.00 3.93 82.45	9.537.869.645,00	-	-	-	-	-	-	12.297.700.000,00	-
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	216.268.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	921.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	57.491.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		16.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	80.751.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				7 Data	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		170.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		-	-	-	-	-	-	9.537.869.645,00	-	-	-	-	-	-	12.297.700.000,00	-
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	25.024.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		175.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	0 100.00 4.25	0 3.72 70.75 91.72	0 100.00 3.83 76.6	0 100.00 3.93 82.45	9.537.869.645,00	-	-	-	-	-	-	12.297.700.000,00	-
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Pengelolaan Anggaran	-			100 Persen	7.766.101.901,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	8.461.700.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	7.691.669.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		8.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4.496.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.793.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	19.728.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		37.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	17.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		17.700.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	11.510.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	-			100 Persen	77.023.400,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	412.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	7.534.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	30.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	39.188.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		132.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		65.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan	-			95 Persen	275.805.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	648.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		3.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	97.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	147.270.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran</i>	-			95 Persen	1.109.125.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kantor/Instansi/Lembaga/Pihak Ketiga/ASN/TATT	-	1.480.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	135.291.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kantor/Instansi/Lembaga/Pihak Ketiga/ASN/TATT		280.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	973.833.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kantor/Instansi/Lembaga/Pihak Ketiga/ASN/TATT		1.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		-	-	-	-	-	-	9.537.869.645,00	-	-	-	-	-	-	12.297.700.000,00	-
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Masa Layak Pakai Kendaraan Dinas</i>	-			60 Persen	82.035.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	82.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pegawai Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5 Persen	35.601.864.774,00							51.310.000.000,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana perkebunan	0 5	0 2,4	0 3	0 5	35.601.864.774,00	-	-	-	-	-	-	51.310.000.000,00	-
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan</i>				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan</i>				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga Jumlah Sertifikat Benih</i>	-			100.000 Batang 2 Laporan 20 Sertifikat	35.601.864.774,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	50.730.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				20 Sertifikat	100.236.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		-	-	-	-	-	-	35.601.864.774,00	-	-	-	-	-	-	51.310.000.000,00	-
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				0 Setek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana perkebunan	0 5	0 2,4	0 3	0 5	35.601.864.774,00	-	-	-	-	-	-	51.310.000.000,00	-
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				100000 Batang	720.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		880.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				4 Laporan	34.781.628.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		49.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Teridentifikasinya Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan	-			1 Laporan	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					5 Persen	2.430.832.430,00							7.130.000.000,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Cakupan luas lahan yang terdampak Persentase kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	0 3500	0 230	0 80	0 1500	2.430.832.430,00	-	-	-	-	-	-	7.130.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan</i>	-			1 Laporan	2.430.832.430,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	7.130.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	735.572.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SAWIT	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		1.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				36 Ha	725.259.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				6 Unit	970.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		1.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					5050 Ha	600.000.000,00							2.340.000.000,00	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	Luas cakupan penanganan bencana perkebunan Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	0 25.000	0 446	0 900	0 5000	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.340.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-			25 Hektar 25 Hektar 5000 Hektar	600.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	2.340.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5000 Ha	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		1.750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				25 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani/Kelompok Tani		310.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				25 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani/Kelompok Tani		280.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					90 Persen	0,00							1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]	Persentase izin usaha perkebunan yang diterbitkan	20,48	3,65	4,56	5,01	0,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000,00	-
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-			1 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen	0,00			-	-	Kelompok Tani/Gapo ktan/Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.050.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani/Gapo ktan/Pelaku Usaha Perkebunan		680.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kelompok Tani/Gapo ktan/Pelaku Usaha Perkebunan		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Kelompok Tani/Gapo ktan/Pelaku Usaha Perkebunan		170.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					25 Persen	0,00							3.055.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	Persentase kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan perkebunan (%)	25	15	20	25	0,00	-	-	-	-	-	-	3.055.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Capaian Pengembangan Ketenagaan Penyuluh yang Kompeten</i>	-			90 Persen	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Penyuluh Perkebuna n/Kelompok Tani	-	525.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Penyuluh Perkebuna n/Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Penyuluh Perkebuna n/Kelompok Tani		375.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Layanan Penyuluh Perkebunan</i>	-			85 Persen	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	2.210.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				1 Kelompok	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		1.860.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Persentase Tercapainya Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Perkebunan</i>	-			85 Persen	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani	-	320.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			<i>Jumlah korporasi petani yang didampingi</i>				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Petani/Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		DINAS KEHUTANAN						34.772.025.396,00							41.973.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						34.750.955.396,00							41.958.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						34.750.955.396,00							41.958.000.000,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					70.5 Poin	27.886.328.476,00							34.103.000.000,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100.00	2,50	100.00	100.00	27.886.328.476,00	-	-	-	-	-	-	34.103.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	3,10	3.28	2,60	2,70									
			Indeks SPBE OPD	4.00	3,70	3.42	3.57									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	80	71.50	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00	77.20	82.90									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97.61											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		97.62											
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD	-			70.5 Poin	125.494.000,00			-	-	-	-	149.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	49.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			95 Persen	25.905.741.462,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	32.064.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	25.331.457.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		31.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	432.484.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	45.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	86.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	40.236.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	29.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	10.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	248.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	374.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	89.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 Persen	501.272.114,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	635.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		17.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.520.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.151.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	61.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.376.500,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	12.376.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			95 Persen	330.660.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	335.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	297.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 Persen	722.548.400,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	475.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	60.347.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	204.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		240.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	435.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	21.707.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					0.05 Persen	5.846.623.360,00							5.995.000.000,00	
		[Menurunnya laju deforestasi untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan]	Laju deforestasi (%)	0.03	0.06	0.06	0.05	5.846.623.360,00	-	-	-	-	-	-	5.995.000.000,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	-			1 Dokumen	2.156.852.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi</i>				1 Dokumen	2.156.852.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan		90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>	-			12 Dokumen	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan		450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>	-			8 Dokumen	0,00			-	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	-	-	35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				8 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan I nfrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjut an	-		35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	-			1 Dokumen 100 Ha	771.962.760,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat	-	1.300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	50.011.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem bangunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				45 Ha	608.700.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				3 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				1 Ha	30.005.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				3 Unit	33.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-			40 laporan 2 Laporan 4 Dokumen 4000 Ha	2.857.934.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Hutan	-	3.900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Hutan		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	133.715.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Hutan		470.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				4000 Ha	2.724.219.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Hutan		3.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas <6000 m3/tahun yang diawasi dan fasilitasi Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	-			7 unit 5 Laporan	59.873.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha Kehutanan	-	220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				5 Laporan	59.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Pelaku Usaha Kehutanan		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					15 Persen 48 Persen	116.586.200,00							230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya]	Luas area rehabilitasi ekosistem (Ha) Persentase Pengelolaan Kawasan Ekosistem Bernilai Penting	100 50.00	0 38.00	10 39.00	15 40.00	116.586.200,00	-	-	-	-	-	-	230.000.000,00	-
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan Jumlah unit kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	-			120 Orang 1 unit	116.586.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	230.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				120 Orang	116.586.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		230.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					15 Persen 50.32 Persen 50.69 Persen 50 Persen	617.032.600,00							860.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan]	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan (%) Persentase SDM kehutanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	61.69 65.05	43.67 45.89	46.73 48.18	50.32 50.69	617.032.600,00	-	-	-	-	-	-	860.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-			10 Kelompok 130 kelompok 2 Unit 3 Orang 10 Orang 5 Orang 5000 Ha	617.032.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	860.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	345.485.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	51.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	74.473.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	96.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					35.22 Persen 78 Persen	284.384.760,00							770.000.000,00	
		[Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)]	Persentase luas daerah aliran sungai yang terkelola dengan baik (%)	38.37	33.12	34.17	35.22	284.384.760,00	-	-	-	-	-	-	770.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	-			1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Lembaga 30 Orang	284.384.760,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat	-	770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	84.384.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X	NON URUSAN						21.070.000,00							15.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						21.070.000,00							15.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					70.5 Poin	21.070.000,00							15.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	21.070.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	5.370.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 Persen	15.700.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						6.343.753.571,00							12.121.412.090,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.343.753.571,00							12.121.412.090,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						6.343.753.571,00							12.121.412.090,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Indeks 3,42 Indeks 72 Poin	5.367.728.254,00							7.605.912.090,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 3.90 4,30 80	0 2,50 3.10 3,70 68,79 76.75 97,62 98.23	0 100 100.00 2,60 3.26 3,80 70 81.40	0 100 100.00 2,70 3.42 3,90 72 86.05	5.367.728.254,00	-	-	-	-	-	-	7.605.912.090,00	-
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	214.670.745,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM	-	290.944.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22.720.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		21.515.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	33.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		37.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		31.410.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		45.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	60.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	26.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		26.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		69.169.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD Tingkat penyerapan anggaran lingkup OPD	-			95 Persen 95 Persen	4.560.899.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM	-	4.587.369.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/ Bulan	4.500.869.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		4.500.869.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	60.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		78.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		3.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			1 Dokumen	129.204.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM	-	489.888.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	129.204.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		164.888.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket	190.854.259,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM	-	762.710.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.031.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		7.031.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Dinas ESDM		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.939.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	13.810.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	88.839.983,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	68.064.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		103.679.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM	-	750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Dinas ESDM		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan 1 Laporan	98.139.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM	-	110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		65.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	34.139.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Dinas ESDM		45.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		-	-	-	-	-	-	5.367.728.254,00	-	-	-	-	-	-	7.605.912.090,00	-
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-			1 Unit 10 Unit 1 Paket	173.960.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Publik/ Masyarakat	-	615.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	70.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Publik/ Masyarakat		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 3.90 4,30 80	0 2,50 3.10 3,70 68,79 76.75 97,62 98.23	0 100 100.00 2,60 3.26 3,80 70 81.40	0 100 100.00 2,70 3.42 3,90 72 86.05	5.367.728.254,00	-	-	-	-	-	-	7.605.912.090,00	-
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93.560.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Publik/ Masyarakat		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		-	-	-	-	-	-	5.367.728.254,00	-	-	-	-	-	-	7.605.912.090,00	-
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Publik/ Masyarakat		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					20.000 Hektar 40.802 Hektar	100.310.317,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	79.603.317,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	79.603.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			1 Laporan	20.707.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	20.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					100 Persen 4778,42 Hektar	50.000.000,00							511.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan tata kelola mineral dan batubara]	Luas lokasi aktivitas pertambangan (Ha) Persentase Izin Usaha yang tidak melanggar perda	100 4801.40	100 4768.88	100 4773.65	100 4778.42	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	511.000.000,00	-
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	39.319.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	10.680.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)														
			Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	-			1 Dokumen	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	96.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		96.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			1 Laporan	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					30,83 Persen	200.000.000,00							1.050.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan]	Bauran energi terbarukan	40.00	24.72	27.78	30.83	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000,00	-
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-			1 Laporan 1 Dokumen	200.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	850.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				100 unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000,00	-
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	-			1 UNIT	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi														
			Jumlah rencana kegiatan konservasi energi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					94,37 Persen	625.715.000,00							2.154.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan]	Rasio Elektrifikasi	100	90.62	92.50	94.37	625.715.000,00	-	-	-	-	-	-	2.154.500.000,00	-
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-			10 Dokumen	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			1 Laporan	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/ Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Tingkat Ketaatan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang memenuhi Kewajiban aspek manajemen mutu, teknis dan keselamatan ketenagalistrikan dan penggunaan produk dalam negeri	-			10 Persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-			1 Dokumen 1 Laporan 171 KK	625.715.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat	-	1.904.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				171 Keluarga	567.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat		1.658.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				1 Laporan	18.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Publik/Masyarakat		96.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS TRANSMIGRASI						13.571.336.438,00							58.427.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.571.336.438,00							58.427.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						13.571.336.438,00							58.427.000.000,00	
1.	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	6.230.790.248,00							10.397.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 3.30 4,30 80	0 2,50 2.50 3,70 68,79 70.75 97,62 98.28	0 100 100.00 2,60 2.66 3,80 70 76.60	0 100 100.00 2,70 2.82 3,90 72 82.45	6.230.790.248,00	-	-	-	-	-	-	10.397.000.000,00	-
	3.32.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	335.006.400,00			-	-	-	-	505.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	107.900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	29.740.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	29.488.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	28.128.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	24.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	34.880.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	80.770.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.534.576.514,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	6.222.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	4.435.441.714,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		6.100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
		-	-	-	-	-	-	6.230.790.248,00	-	-	-	-	-	-	10.397.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	49.292.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	6.230.790.248,00	-	-	-	-	-	-	10.397.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	2.50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP OPD	3.30	68,79	2.66	2.82									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4,30	70.75	3,80	3,90									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	80	97,62	70	72									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		98.28	76.60	82.45									
	3.32.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	49.842.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	39.997.000,00			-	-	-	-	295.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	39.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	845.697.854,00			-	-	-	-	1.315.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	31.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	52.167.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	57.761.054,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan Laporan	47.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	500.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		850.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
		-	-	-	-	-	-	6.230.790.248,00	-	-	-	-	-	-	10.397.000.000,00	-
	3.32.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	106.664.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.125.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	336.802.480,00			-	-	-	-	535.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	84.010.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68.293.680,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	184.498.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.710.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	99.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
2.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					6 Dokumen 94,50 Persen	2.000.000.000,00							4.080.000.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi]	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	0	0	0	0	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.080.000.000,00	-
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	2.000.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	4.080.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				20 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		3.100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				6 Kawasan Transmigrasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi														
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				5000 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		550.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		230.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
3.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-	509.665.411,00							2.450.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmigrasi]	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang	0	0	0	0	509.665.411,00	-	-	-	-	-	-	2.450.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	509.665.411,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	2.450.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)</i>				300 Kepala Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														
			<i>Jumlah Transmigran yang Ditempatkan</i>				200 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindung an Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				300 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				275 Orang	209.665.411,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				100 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
		-	-	-	-	-	-	509.665.411,00	-	-	-	-	-	-	2.450.000.000,00	-
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				6 Lokasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
4.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100 Persen	4.830.880.779,00							41.500.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kawasan transmigrasi melalui revitalisasi]	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan Rata-rata nilai indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan Kementerian yang direvitalisasi	70 80	0.58 50	55 60	60 62.50	4.830.880.779,00	-	-	-	-	-	-	41.500.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan	-			9 UPT	4.830.880.779,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Warga UPT	-	41.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman															
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				275 Kepala Keluarga	830.880.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Warga UPT		1.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman															
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				22 Satuan Permukiman	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Warga UPT		40.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						44.187.815.521,00							82.319.674.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44.187.815.521,00							82.319.674.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						44.187.815.521,00							82.319.674.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 3,00 undefined 4,5 undefined 99,5 Persen	1.347.222.292,00							4.566.950.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			13,92 Poin 11,70 Poin 23,33 Poin 25,42 Poin	97.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	201.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		40.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		25.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		41.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	14.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		23.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			100 Persen 100 Persen	4.124.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	77.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3.2	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	3,70	3.36	3.52									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	72.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		82.63	78.2	83.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		97,62											
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	787.536,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3.2	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	3,70	3.36	3.52									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	72.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		82.63	78.2	83.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		97,62											
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.237.280,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	-			100 Persen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75 82.63 97,62	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			100 Persen	271.553.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	491.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3.2	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	3,70	3.36	3.52									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	72.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		82.63	78.2	83.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		97,62											
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	213.422.880,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		15.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75 82.63 97,62	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	30.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		55.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	17.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		23.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75 82.63 97,62	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		115.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen	531.551.996,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	2.113.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.785.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3.2	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	3,70	3.36	3.52									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	72.75	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		82.63	78.2	83.65									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		97,62											
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	56.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		255.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	42.850.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		222.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75 82.63 97,62	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	28.992.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		212.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	370.000.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		650.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	23.724.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		151.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	216.701.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	1.201.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		345.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3.2	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.00	3,70	3.36	3.52									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	80	72.75	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82.63	78.2	83.65									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97,62											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	162.201.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		355.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	54.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	222.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	362.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	126.110.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		160.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		65.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		25.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.00 4,30 80	0 2,50 3.2 3,70 68,79 72.75 82.63 97,62	0 100.00 2,60 3.36 3,80 70 78.2	0 100.00 2,70 3.52 3,90 72 83.65	1.347.222.292,00	-	-	-	-	-	-	4.566.950.000,00	-
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	19.270.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		55.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	77.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					100 Persen	1.075.000.000,00							3.136.380.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan) Kinerja Penyelenggaran Daerah	0 100 3,4 (Tinggi)	0 1,39 (Sangat Rendah) (2023)	0 100 2,6 (Sedang)	0 100 2,69 (sedang)	1.075.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.136.380.000,00	-
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-			1 Dokumen 1 Dokumen	344.207.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.172.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		477.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	86.589.384,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	107.617.616,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		345.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia	-			2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	530.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.226.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	202.348.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		450.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		320.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	327.652.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		455.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	200.793.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	737.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		250.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		232.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	60.793.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		254.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					100 Persen	41.765.593.229,00							74.616.344.000,00	
		[Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	Jumlah barang yang melalui bandara Jumlah orang yang melalui bandara Proporsi individu yang menggunakan internet	461220 83.00 86696	417741 48770 66.61	426096 53647 69.88	434618 60085 73.16	41.765.593.229,00	-	-	-	-	-	-	74.616.344.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	-			100 Persen	23.333.825.286,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	65.400.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1300 Unit	11.110.825.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		60.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				35 Lembaga	12.223.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		4.500.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	<i>Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar</i>	-			3 Dokumen	15.151.496.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	8.420.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				800 Dokumen	15.141.496.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		7.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		255.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	<i>Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar</i>	-			3 Dokumen	3.280.271.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	795.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		265.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1.214.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				2 Dokumen	2.060.671.520,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		260.054.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM						1.792.765.390,00							4.760.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.792.765.390,00							4.760.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.792.765.390,00							4.760.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2.70 Poin 4.20 Poin 75 Poin	521.076.778,00							2.660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4,30 4.6 80	0 2,50 3,70 4.28 68,79 73.25 97,62 99.61	0 100.00 2,60 3,80 4.34 70 78.6	0 100.00 2,70 3,90 4.41 72 83.95	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	117.636.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	16.811.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	11.419.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.249.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.011.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.027.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	85.337.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	781.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	123.768.358,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	79.209.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.183.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.087.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.571.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	877.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	39.840.358,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Laporan	4.301.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.301.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			1 Dokumen 1 Orang	27.319.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	27.319.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	-	-	-	-	-	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 90 Laporan 2 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket	141.658.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	1.545.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4,30 4.6 80	0 2,50 3,70 4.28 68,79 73.25 97,62 99.61	0 100.00 2,60 3,80 4.34 70 78.6	0 100.00 2,70 3,90 4.41 72 83.95	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.116.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	750.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	80.865.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	-	-	-	-	-	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	4.28	3,80	3,90									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.6	68,79	4.34	4.41									
			Nilai SAKIP OPD	80	73.25	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		97,62	78.6	83.95									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		99.61											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	37.927.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	-			5 Unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	-			1 Laporan	17.640.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	17.640.320,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-			1 Unit 13 Unit 11 Unit 10 Unit 10 Unit	88.752.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				13 Unit	66.240.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	11.752.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	-	-	-	-	-	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7.100.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4,30 4.6 80	0 2,50 3,70 4.28 68,79 73.25 97,62 99.61	0 100.00 2,60 3,80 4.34 70 78.6	0 100.00 2,70 3,90 4.41 72 83.95	521.076.778,00	-	-	-	-	-	-	2.660.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	3.660.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					100 Persen	1.271.688.612,00							2.100.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan]	Indeks Reformasi Hukum Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan Persentase Capaian Aksi HAM Persentase Produk Hukum yang di hasilkan	100 98	100 95	100 95	100 96	1.271.688.612,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	-			150 Dokumen 530 Dokumen 40 Dokumen 620 Dokumen	660.484.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				40 Dokumen	296.803.612,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				500 Dokumen	71.056.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>				560 Dokumen	97.112.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				150 Dokumen	195.513.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i>	-			3 Kasus 6 Kasus	611.204.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				3 Kasus	480.402.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	130.802.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.273.955.045,00							8.858.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.273.955.045,00							8.158.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.273.955.045,00							8.158.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	694.787.870,00							4.258.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.1 4,30 80	0 2,50 3.34 3,70 68,79 74.00 97,62 99.42	0 100.00 2,60 3.49 3,80 70 79.2	0 100.00 2,70 3.64 3,90 72 84.4	694.787.870,00	-	-	-	-	-	-	4.258.000.000,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	110.848.976,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.681.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	80.167.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		87.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	149.061.680,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	246.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		-	-	-	-	-	-	694.787.870,00	-	-	-	-	-	-	4.258.000.000,00	-
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.1 4,30 80	0 2,50 3.34 3,70 68,79 74.00 97,62 99.42	0 100.00 2,60 3.49 3,80 70 79.2	0 100.00 2,70 3.64 3,90 72 84.4	694.787.870,00	-	-	-	-	-	-	4.258.000.000,00	-
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	149.061.680,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		156.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.720.640,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.720.640,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	58.474.534,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	24.857.894,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	33.616.640,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	238.674.207,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.795.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.110.550,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.924.710,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	26.830.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.999.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8 Laporan	147.142.587,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				6 Dokumen	53.667.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	743.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.123.546,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.123.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.884.287,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	542.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	129.630.767,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.253.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		57.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		-	-	-	-	-	-	694.787.870,00	-	-	-	-	-	-	4.258.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					100 Persen	448.915.606,00							3.230.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	35	26	28.30	30	448.915.606,00	-	-	-	-	-	-	3.230.000.000,00	-
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			4 Dokumen 4 Dokumen 95 Persen	253.043.019,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	126.686.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	126.356.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-			1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	3.245.300,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	3.245.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-			0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	192.627.287,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				6 Dokumen	192.627.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					-	130.251.569,00							670.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	93.5	90.73	91	91.5	130.251.569,00	-	-	-	-	-	-	670.000.000,00	-
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-			0 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	101.800.000,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	73.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-			2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	28.451.569,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2 Laporan	28.451.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X	NON URUSAN						0,00							700.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							700.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	0,00							700.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	-
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.266.292.439,00							5.555.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.266.292.439,00							5.555.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.266.292.439,00							5.555.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100.00 Persentase 2,70 Indeks 3,90 Indeks 72 Poin	2.206.801.919,00							3.280.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	2.206.801.919,00	-	-	-	-	-	-	3.280.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.25	3.74	3,80	3,90									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3.84	3.94									
			Nilai SAKIP OPD	80	79.5	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		97,62	83.6	87.7									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik													
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	83.698.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	28.406.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	17.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.192.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-			12 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	1.426.364.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.420.324.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.520.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.520.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		1.660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			15 Orang	100.261.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	100.261.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 5 Paket 5 Paket 2 Paket 1 Paket	285.521.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	38.950.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	7.900.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	27.548.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	168.103.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit 4 Unit	53.090.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	17.297.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.793.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			4 Laporan	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-			1 Unit 7 Unit 2 Unit 30 Unit 1 Unit	242.865.999,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	44.940.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	44.630.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	33.140.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		-	-	-	-	-	-	2.206.801.919,00	-	-	-	-	-	-	3.280.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.25 4,30 80	0 2,50 3,70 3.74 68,79 79.5 97,62 98.72	0 100.00 2,60 3,80 3.84 70 83.6	0 100.00 2,70 3,90 3.94 72 87.7	2.206.801.919,00	-	-	-	-	-	-	3.280.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	120.155.999,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					3 Level	1.059.490.520,00							2.275.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	Level Kematangan UKPBJ Tingkat Kematangan UKPBJ	90 Level 5	77.78 Level 3	80 Level 3	83 Level 3	1.059.490.520,00	-	-	-	-	-	-	2.275.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-			4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	440.561.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	102.127.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	167.096.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	171.338.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	318.686.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				4 Laporan	120.568.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	100.212.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	97.906.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-			2 Dokumen 2 Dokumen 15 Orang	300.243.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	94.477.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	107.860.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	97.906.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI						1.581.876.739,00							3.523.750.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.581.876.739,00							3.523.750.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.581.876.739,00							3.523.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Indeks 4,00 Indeks 83 Nilai	833.117.563,00							1.435.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.3 4.30 80	0 2,50 3,70 3.92 68,79 81.75 97,62 99.1	0 100.00 2,60 3,80 4.00 70 85.4	0 100.00 2,70 3,90 4.07 72 89.05	833.117.563,00	-	-	-	-	-	-	1.435.000.000,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan	322.657.396,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	57.112.595,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	204.433.281,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	61.111.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			9 Orang	8.055.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	8.055.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
		-	-	-	-	-	-	833.117.563,00	-	-	-	-	-	-	1.435.000.000,00	-
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Bahan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	-			1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 1 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket	381.890.321,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.197.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4.3 4.30 80	0 2,50 3,70 3.92 68,79 81.75 97,62 99.1	0 100.00 2,60 3,80 4.00 70 85.4	0 100.00 2,70 3,90 4.07 72 89.05	833.117.563,00	-	-	-	-	-	-	1.435.000.000,00	-
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	13.576.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.287.225,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.147.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.665.875,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	61.941.540,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	137.819.051,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.991.010,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	123.265.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	61.968.846,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	61.968.846,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			1 Unit 12 Unit	58.546.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	58.546.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
		-	-	-	-	-	-	833.117.563,00	-	-	-	-	-	-	1.435.000.000,00	-
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				10	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					70 Indeks 74,7 Indeks	748.759.176,00							2.088.750.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah]	Indeks Ber-Akhlak Indeks Kelembagaan	80 82,5	65.03 69,08	67 72,09	70 74,7	748.759.176,00	-	-	-	-	-	-	2.088.750.000,00	-
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-			6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	248.562.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	843.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		331.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				3 Dokumen	87.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		231.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-			3 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 37 Dokumen 1 Laporan	500.197.176,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.245.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	112.405.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				7 Dokumen	106.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	73.473.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				37 Dokumen	100.631.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				3 Dokumen	107.175.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM						98.342.401.710,00							119.028.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						98.342.401.710,00							119.028.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						98.342.401.710,00							119.028.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2.70 Indeks 3.90 Indeks 72 Poin	98.342.401.710,00							119.028.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100.00 3,10 4,30 4.6 80	0 2,50 3,70 4.32 68,79 80.5 97,62 99.58	0 100.00 2,60 3,80 4.38 70 84.4	0 100.00 2,70 3,90 4.43 72 88.3	98.342.401.710,00	-	-	-	-	-	-	119.028.000.000,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			12 Dokumen 10 Dokumen 18 Poin 13 Poin 24 Poin 27 Poin	212.674.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Umum	-	675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	135.921.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Biro Umum		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	76.752.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Umum		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			5 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 21600 Dokumen 3360 OB 100 Persen 100 Persen	29.659.491.898,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	33.007.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3360 Orang/ Bulan	28.449.604.398,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		31.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	279.944.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21600 Dokumen	703.914.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		823.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	173.275.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	52.752.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	-			6 Laporan 2 Laporan 5 Dokumen 100 Persen	1.300.564.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	1.565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	338.199.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	680.653.300,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	281.711.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			75 Dokumen 120 Orang 12 Paket 100 Persen	1.794.044.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	651.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		415.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				38 Dokumen	295.972.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				118 Orang	846.572.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			261 Dokumen 12 laporan 350 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	9.879.274.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	12.881.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	597.202.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	570.009.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.387.653.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.767.655.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		6.145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	416.736.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		828.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				261 Dokumen	140.017.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		218.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			10 Unit 200 Unit 100 Persen	10.866.220.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	11.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	6.470.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				178 Unit	4.396.220.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			48 laporan 36 Laporan 12 Laporan 100 Persen	11.196.012.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	10.145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	376.619.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	4.195.855.675,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	6.623.536.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			8 Unit 120 Unit 20 Unit 550 Unit	6.779.569.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Umum	-	7.141.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1.298.085.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Umum		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				120 Unit	3.074.404.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Biro Umum		2.955.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				550 Unit	860.023.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Umum		636.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.547.056.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Biro Umum		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
		[Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pimpinan]	Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum	100	100	100	100	98.342.401.710,00	-	-	-	-	-	-	119.028.000.000,00	-
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			24 OB 24 OB	4.036.416.517,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	1.239.619.917,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	2.796.796.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-			84 Paket 84 Paket 84 Paket	10.275.576.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	18.805.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				84 Paket	4.144.878.940,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				84 Paket	3.312.843.940,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				84 Paket	2.817.853.740,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		8.965.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	-			800 Laporan 12 Laporan	10.349.435.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	15.796.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				800 Laporan	9.286.062.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		13.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	1.063.372.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.846.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-			12 Laporan 750 Laporan	1.993.121.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	3.023.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	769.247.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				750 Laporan	1.223.874.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.548.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
		SEKRETARIAT DPRD						100.000.000.000,00							132.020.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000.000,00							132.020.000.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						100.000.000.000,00							132.020.000.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Poin 3,90 Indeks 72 Poin	59.263.322.600,00							71.750.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	59.263.322.600,00	-	-	-	-	-	-	71.750.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	1.92	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	2,50	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	2.70	3,70	2.08	2.23									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	68,79	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	79.75	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	97.23	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		97,62	83.80	87.85									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik													
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 undefined 2 undefined 1 undefined 1 undefined 1 Dokumen 4 undefined 2 undefined	649.674.260,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	1.080.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	284.639.480,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	31.606.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	31.606.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	17.798.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	17.798.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	36.737.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	229.487.680,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen 12 Dokumen 100 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan 13 Laporan 100 Orang	9.603.059.442,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	11.210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	8.952.044.962,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				95 Dokumen	252.229.080,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	221.536.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	56.221.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.327.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	22.183.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	40.341.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	33.175.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			60 Orang	706.200.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	706.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Dokumen 180 Laporan 4 Paket 5 Paket	3.353.643.906,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	11.060.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	147.817.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	600.296.080,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	972.159.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	172.430.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.142.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	153.685.426,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	1.199.540.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	77.574.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			10 Paket 20 Unit 20 Unit	1.327.797.817,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	320.810.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	62.682.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				101 Unit	944.305.817,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	5.547.278.328,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	4.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	73.200.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.833.145.528,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.640.932.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			5 Unit 68 Unit 5 Unit 30 Unit 40 Unit 40 Unit	4.948.733.600,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	6.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	269.752.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	729.890.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.602.079.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	73.216.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	273.796.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-			45 Orang 225 Paket	24.754.866.447,00			-	-	DPRD	-	24.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	24.148.366.447,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		24.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				225 Paket	606.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-			45 Dokumen 7 Laporan 90 Laporan 10 Paket	8.372.068.800,00			-	-	DPRD	-	8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	1.227.292.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	85.084.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				90 Laporan	1.284.348.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	5.775.343.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					100 Persen	40.736.677.400,00							60.270.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya Ketepatanan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan	100 20.00 Tepat Waktu	0 10.00 Tepat Waktu	0 12.00 Tepat Waktu	100 14.00 Tepat Waktu	40.736.677.400,00	-	-	-	-	-	-	60.270.000.000,00	-
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-			4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	2.498.199.600,00			-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	308.160.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				4 Dokumen	1.743.939.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	112.302.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	333.797.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	3.693.809.600,00			-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	6.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	52.418.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	52.418.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1.443.809.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1.072.981.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1.072.181.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-			2 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	3.412.041.800,00			-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	5.570.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	549.609.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	548.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	547.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	588.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	42.586.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	181.394.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	953.627.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-			2 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 30 Orang 7 Orang	5.233.629.600,00			-	-	DPRD	-	8.980.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				90 Dokumen	2.050.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				33 Orang	966.072.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	294.072.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				6 Dokumen	54.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	49.493.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	1.819.920.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-			135 Dokumen 1 Dokumen 180 Laporan	22.536.861.600,00			-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	28.090.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				270 Laporan	9.793.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	65.193.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	12.678.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		13.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-			1 Dokumen 4 Laporan	166.223.200,00			-	-	DPRD	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	142.547.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	23.676.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-			2 Dokumen 2 Dokumen	47.880.000,00			-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	370.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	24.240.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				2 Dokumen	23.640.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda/DPRD/Masya rakat		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-			2 Dokumen 2 Dokumen 180 Dokumen 180 Dokumen 19 Laporan	3.148.032.000,00			-	-	DPRD	-	5.960.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				190 Dokumen	2.053.561.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				15 Laporan	20.120.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	253.646.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5 Dokumen	820.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						14.297.609.682,00							18.856.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.297.609.682,00							18.856.500.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						13.288.269.682,00							16.796.500.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 4.5 Poin 70 Persen 83 Nilai	11.257.721.754,00							11.584.500.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.80 80	0 2,50 3,70 4.42 68,79 80.25 96.26 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.50 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.57 72	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar realisasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan 1 Dokumen	190.940.800,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	204.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	106.840.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.650.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	23.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	32.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan B ulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan 18 Laporan 79 Orang	9.139.411.696,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	10.075.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	9.073.711.696,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		10.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.650.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	61.050.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			12 Laporan 2 Dokumen	16.050.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			4 Dokumen 9 Orang	113.273.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	63.488.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
			100		2,50	100	100									
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3,70	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	4.42	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	4.80	80.25	4.50	4.57									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	96.26	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97,62											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	49.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 2 Laporan 10 Paket 1 Paket 4 Paket 5 Paket 7 Paket	556.169.700,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	615.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	13.022.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.374.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.80 80	0 2,50 3,70 4.42 68,79 80.25 96.26 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.50 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.57 72	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	47.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				35 Paket	14.260.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	359.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	-			1 Paket 15 Unit	88.511.700,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	88.511.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 4.80 80	0 2,50 3,70 4.42 68,79 80.25 96.26 97,62	0 100 100.00 2,60 3,80 4.50 70	0 100 100.00 2,70 3,90 4.57 72	11.257.721.754,00	-	-	-	-	-	-	11.584.500.000,00	-
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	658.630.858,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	124.595.360,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	204.403.728,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	329.631.770,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 unit 15 unit 58 Unit	494.734.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	166.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	280.360.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	175.194.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				70 Unit	39.180.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					12 Poin	1.018.847.458,00							2.600.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran IPKD Persentase Pemenuhan Data dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase perangkat daerah dengan nilai minimal 60 Poin pada komponen penilaian SAKIP Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti pada Perencanaan tahun selanjutnya	100 13 60.00	0 100 38.00 9,028	0 10 100 42.4	100 12 46.8	1.018.847.458,00	-	-	-	-	-	-	2.600.000.000,00	-
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-			1 Berita Acara 1 Dokumen 1 Berita Acara 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	691.398.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.030.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	49.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	28.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	136.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	91.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	218.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	166.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan Jumlah Dokumen Hasi Anlasis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi Jumlah SDM Pemerintah Kabupaten/kota yang dibina dalam pemanfaatab data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan	-			1 Buku 1 Dokumen 100 Orang 36 Orang	89.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat	-	370.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				100 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				36 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	19.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-			12 Dokumen 2 Kerja Sama 17 Laporan 2 Laporan	177.455.458,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat	-	1.020.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	46.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				2 Kerja Sama	16.724.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				17 Laporan	72.331.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				12 Dokumen	42.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat	-	180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					100 Persen	1.011.700.470,00							2.612.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. bidang infrastruktur dan kewilayahan. serta bidang perekonomian dan SDA]	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0 100	0	0	0 100	1.011.700.470,00	-	-	-	-	-	-	2.612.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia" Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan "Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia" Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	446.113.470,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	13.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	70.585.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	242.319.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	119.858.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		430.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	-			1 Dokumen 1 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	298.395.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	922.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	167.593.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	36.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	81.764.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	12.491.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	267.192.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	555.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	239.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	28.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.009.340.000,00							2.060.000.000,00	
1.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100 Persen	1.009.340.000,00							2.060.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan]	Indeks kapabilitas inovasi (pilar dalam IDSD) Persentase Hasil Inovasi Daerah Yang Diterapkan Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100 4.51	100 2.58	100 3.14	100 3.48	1.009.340.000,00	-	-	-	-	-	-	2.060.000.000,00	-
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	447.903.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				4 Laporan	350.819.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		1.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				4 Naskah	97.083.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	1.009.340.000,00	-	-	-	-	-	-	2.060.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-			2 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 1 Sistem Informasi	561.437.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	860.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				2 Laporan	198.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.1.02.0012	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				1 Sistem Informasi	69.636.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.1.02.0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				5 Laporan	274.854.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		560.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	283.703.302,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	268.447.879,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	137.762.284,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		136.226.481,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.742.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		7.863.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.834.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		5.714.659,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.397.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		3.615.459,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.086.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		3.565.459,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	124.882.018,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		111.461.962,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			4 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 12 Dokumen 2 Laporan 14 Laporan 161 Orang/Bulan	36.693.666.798,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	36.755.057.775,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				161 Orang/Bulan	36.096.863.962,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		36.096.863.962,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	440.165.769,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		501.556.746,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	5.181.325,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		5.181.325,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	12.883.443,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		12.883.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	26.457.712,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		26.457.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.089.387,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		6.089.387,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	106.025.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		106.025.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			12 Laporan	28.891.462,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	51.980.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	28.891.462,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		51.980.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-			12 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen	180.247.691,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	219.992.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	121.277.911,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		151.022.488,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	28.969.780,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		28.969.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 45 Laporan 2 Paket 4 Paket 1 Paket	1.022.883.681,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	999.410.118,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.766.268,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		61.532.537,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	165.302.903,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		165.302.903,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	243.536.603,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		177.372.477,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	471.277.907,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		255.202.201,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	-			3 Unit	48.263.809,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	298.263.809,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	48.263.809,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		298.263.809,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			72 Laporan 12 Laporan	763.181.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	763.181.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	58.884.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		58.884.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	704.297.380,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		704.297.380,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			5 Unit 52 Unit 29 Unit 4 Unit	947.474.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD	-	1.808.446.506,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	327.907.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		181.590.121,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	193.904.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		106.570.298,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	121.215.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		1.256.315.243,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	304.448.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN BPKPD		263.970.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					100 Persen -15.17 Persen 32 Persen 39 Persen 94.50 Persen	238.787.348.346,00							359.945.827.666,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase aparat desa yang mendapatkan insentif Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Penurunan SILPA Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0 100 30 40 6,57 96,5	0 100 19,84 33,1 -35,74 92,9	0 100 -20,00 22,53 33,5 94	0 100 -15,17 30 40 94,5	238.787.348.346,00	-	-	-	-	-	-	359.945.827.666,00	-
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-			2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 42 Dokumen 120 Orang 2 Dokumen 2 Dokumen 42 Dokumen 42 Dokumen 42 Dokumen	733.838.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar	-	732.409.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	29.747.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		29.793.936,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	18.030.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		17.954.976,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	2.366.261,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	2.078.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	2.060.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		1.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	2.023.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		1.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	117.067.582,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		109.835.234,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	78.181.360,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		86.839.740,00	BBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	35.136.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		35.263.136,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	21.866.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		21.860.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	8.232.860,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		6.449.852,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	1.595.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				120 Orang	415.454.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		415.411.847,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 30 Orang	235.912.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara	-	236.595.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				12 Laporan	99.076.460,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		99.737.996,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				12 Laporan	65.578.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		65.611.008,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				12 Laporan	61.351.540,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		61.374.796,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				12 Dokumen	1.291.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		1.284.684,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	944.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		937.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	7.670.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Bara		7.649.216,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-			12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 152 Dokumen 4 Dokumen 12 Laporan	447.339.419,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar	-	315.385.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	65.281.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		41.445.696,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				152 Dokumen	8.214.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		12.530.768,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	90.497.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		33.509.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4 Dokumen	53.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		20.000.000,00	BBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	36.087.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		27.242.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4 Dokumen	193.578.019,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		180.657.389,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	-			6 Dokumen 1068 Dokumen 20 Laporan 2 Dokumen 65 Orang	411.764.997,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar	-	359.810.753,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				1068 Dokumen	103.230.165,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		100.350.165,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				20 Laporan	103.501.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		50.861.716,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				2 Dokumen	102.015.672,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		50.048.872,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				6 Dokumen	86.317.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		58.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	238.787.348.346,00	-	-	-	-	-	-	359.945.827.666,00	-
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				65 Orang	16.700.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatkan tata kelola anggaran]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	0 100	0 100	0 100	0 100	238.787.348.346,00	-	-	-	-	-	-	359.945.827.666,00	-
			Persentase aparat desa yang mendapatkan insentif	30 40	19,84 33,1	-20,00 22,53	-15,17 30									
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	6,57 96,5	-35,74 92,9	33,5 94	40 94,5									
			Persentase laporan keuangan tepat waktu													
			Persentase Penurunan SILPA													
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-			1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan	236.501.858.928,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank	-	358.146.002.539,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	2.342.495.973,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		21.367.477.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	54.950.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		2.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		141.277.336.604,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4 Laporan	169.209.362.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		192.701.188.649,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	-			200 Orang	456.634.179,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar	-	155.624.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				200 Orang	456.634.179,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar		155.624.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3,0 Poin	425.000.000,00							356.837.730,00	
		[Meningkatnya tata Kelola aset daerah]	Indeks Pengelolaan Aset Persentase barang milik daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 3.10	100 2.50	100 2.60	100 2.70	425.000.000,00	-	-	-	-	-	-	356.837.730,00	-
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-			6 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan 40 Orang 9 Dokumen	425.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA	-	356.837.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				9 Dokumen	23.489.037,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA		23.489.037,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	367.110.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA		202.759.368,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	11.596.140,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA		11.596.838,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	20.474.303,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA		20.474.303,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	2.330.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Pemprov Sulbar 34.930.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERA		98.518.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					14 Persen	3.052.560.098,00							2.281.601.667,00	
		[Meningkatnyaupaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Tingkat Pertumbuhan PAD	16.00 33.33	10.39 26.30	10.00 27.71	12.00 29.11	3.052.560.098,00	-	-	-	-	-	-	2.281.601.667,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	-			12 Dokumen Ketetapan 12 Dokumen SSPD 12 Laporan 1 Laporan 16 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	3.052.560.098,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut	-	2.281.601.667,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		40.979.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	3.052.560.098,00	-	-	-	-	-	-	2.281.601.667,00	-
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnyaupaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Tingkat Pertumbuhan PAD	16.00 33.33	10.39 26.30	10.00 27.71	12.00 29.11	3.052.560.098,00	-	-	-	-	-	-	2.281.601.667,00	-
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	72.392.764,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		20.408.764,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	1.822.810.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		1.650.457.649,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				12 Dokumen SSPD	555.863.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		248.263.235,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				16 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	181.492.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		101.492.859,00	BBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						13.017.260.554,00							19.665.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.012.670.554,00							19.635.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						13.012.670.554,00							19.635.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,60 Indeks 4,2 Indeks 79 Poin 98 %	6.980.168.899,00							10.380.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.50 80	2,50 3,70 4.22 68,79 79.00 94.00 96.65 97,62	100 100.00 2,60 3,80 4.28 70 96.00	100 100.00 2,70 3,90 4.33 72 98.00	6.980.168.899,00	-	-	-	-	-	-	10.380.000.000,00	-
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 12 Laporan	52.098.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	305.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	37.446.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				7 Dokumen	5.046.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				7 Dokumen	5.046.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Pemprov Sulbar		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.560.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan 1 Laporan 50 Orang/Bulan	5.919.782.902,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	7.035.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	5.915.192.902,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		7.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.590.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup BKD	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Dokumen 32 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket	622.302.637,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	955.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.350.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	139.717.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	40.965.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	317.470.637,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	106.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit 10 Unit	51.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Pemprov Sulbar	-	1.010.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Pemprov Sulbar		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Pemprov Sulbar		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Pemprov Sulbar		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.980.168.899,00	-	-	-	-	-	-	10.380.000.000,00	-
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	21.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.50 80	2,50 3,70 4.22 68,79 79.00 94.00 96.65 97,62	100 100.00 2,60 3,80 4.28 70 96.00	100 100.00 2,70 3,90 4.33 72 98.00	6.980.168.899,00	-	-	-	-	-	-	10.380.000.000,00	-
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan	189.288.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	340.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	166.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	23.288.640,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			1 Unit 31 Unit 10 Unit	145.696.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	515.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	114.790.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.980.168.899,00	-	-	-	-	-	-	10.380.000.000,00	-
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.150.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2,50	100	100	6.980.168.899,00	-	-	-	-	-	-	10.380.000.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3,70	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	4.22	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.50	79.00	4.28	4.33									
			Nilai SAKIP OPD	80	94.00	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		96.65	96.00	98.00									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		97,62											
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.756.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					225 Poin	6.032.501.655,00							9.255.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN]	Indeks sistem merit	250.00	208.00	216.00	225.00	6.032.501.655,00	-	-	-	-	-	-	9.255.000.000,00	-
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah dokumen hasil penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-			105 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 140 Dokumen 1 Lembaga	748.873.424,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	2.170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	43.215.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				155 Dokumen	262.525.911,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				107 Dokumen	59.558.188,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	72.517.421,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	61.056.904,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-			410 Dokumen 65 Dokumen 460 Laporan	637.300.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	820.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				380 Dokumen	98.843.176,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Laporan	140.880.112,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				46 Dokumen	397.577.256,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	-			100 Dokumen 50 Dokumen 2 Dokumen 100 Orang	4.445.029.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	5.840.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				101 Dokumen	405.747.736,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				100 Dokumen	61.816.976,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				131 Dokumen	3.910.011.194,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		4.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Pemprov Sulbar		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				40 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Pemprov Sulbar		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				500 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Pemprov Sulbar		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				500 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Pemprov Sulbar		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				50 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Pemprov Sulbar		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				350 Orang	67.453.944,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				50 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	ASN Pemprov Sulbar		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-			220 Orang 80 Orang 1 Laporan 13 Dokumen 14 Dokumen	201.297.837,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar	-	425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	56.715.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	6.142.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				155 Orang	57.570.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	70.942.357,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				15 Dokumen	9.928.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ASN Pemprov Sulbar		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	NON URUSAN						4.590.000,00							30.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.590.000,00							30.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,60 Indeks 4,2 Indeks 79 Poin 98 %	4.590.000,00							30.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	4.590.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan 1 Laporan 50 Orang/Bulan	4.590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.590.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9.414.444.963,00							7.725.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.414.444.963,00							7.723.000.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						9.414.444.963,00							7.723.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Poin 3,70 Poin 80,50 Poin	6.091.461.748,00							5.593.000.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.50 80	2,50 3,70 4.22 68,79 80.00 93.00 97,62 99.22	100 100.00 2,60 3,80 4.28 70 95.00	100 100.00 2,70 3,90 4.33 72 97.00	6.091.461.748,00	-	-	-	-	-	-	5.593.000.000,00	-
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	-			27,60 Poin	47.629.000,00			-	-	ASN	-	32.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		24.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	20.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang diselenggarakan sesuai standar dan tepat waktu	-			100 Persen	4.667.513.718,00			-	-	-	-	5.126.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/ Bulan	4.665.267.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	-	-	-	-	-	6.091.461.748,00	-	-	-	-	-	-	5.593.000.000,00	-
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi BMD yang diselenggarakan sesuai standar dan tepat waktu	-			100 Persen	2.246.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.50 80	2,50 3,70 4.22 68,79 80.00 93.00 97,62 99.22	100 100.00 2,60 3,80 4.28 70 95.00	100 100.00 2,70 3,90 4.33 72 97.00	6.091.461.748,00	-	-	-	-	-	-	5.593.000.000,00	-
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselenggarakan sesuai standar dan tepat waktu	-			100 Persen	157.946.000,00			-	-	-	-	49.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	11.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	146.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi umum yang diselenggarakan sesuai standar dan tepat waktu	-			100 Persen	440.182.190,00			-	-	ASN	-	178.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		6.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	29.556.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59 Laporan	283.645.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		90.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	59.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang dilaksanakan sesuai standar dan tepat waktu	-			100 Persen	575.034.840,00			-	-	-	-	95.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	281.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.741.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan yang dilakukan sesuai anggaran dan standar	-			100 Persen	200.910.000,00			-	-	-	-	111.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	60.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	140.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					27,94 Persen	3.322.983.215,00							2.130.000.000,00	
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional]	Nilai dimensi kompetensi terhadap indeks profesionalitas ASN Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	28,5 40.00 5.70	1.42 27.84	2.14 27,9 29.23	27,94 2.85 30.99	3.322.983.215,00	-	-	-	-	-	-	2.130.000.000,00	-
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	-			7,4 Persen	1.012.912.040,00			-	-	ASN	-	1.120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				320 Orang	1.012.912.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		1.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi kompetensi Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional sesuai Jenjang Jabatan Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial sesuai Jenjang Jabatan	-			5 Persen 75 Persen 75 Persen	2.169.071.175,00			-	-	-	-	990.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				160 Orang	247.034.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	400.119.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				11 Dokumen	71.351.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				85 Orang	1.450.565.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-			1 Persen	141.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				40 Orang	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	NON URUSAN						0,00							2.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							2.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 2,70 Poin 3,70 Poin 80,50 Poin	0,00							2.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	-			27,60 Poin	0,00			-	-	-	-	2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI						5.459.456.762,00							9.279.950.550,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.459.456.762,00							9.279.950.550,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						5.459.456.762,00							9.279.950.550,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	3.989.836.762,00							7.523.061.798,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	0 100 100.00 3,10 4,30 66.5 80	0 20.40 2,50 3,70 66.5 74.75 97,62 99.12	0 100 100.00 2,60 3,80 66.5 70 79.80	0 100 100.00 2,70 3,90 66.5 72 84.85	3.989.836.762,00	-	-	-	-	-	-	7.523.061.798,00	-
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	116.686.240,00			-	-	-	-	285.262.091,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.985.700,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.234.971,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.626.471,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.234.971,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.626.471,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	85.944.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		202.927.036,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.626.471,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.425.058.001,00			-	-	-	-	1.695.116.736,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	1.271.800.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.668.020.335,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.801.800,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	148.260.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.294.601,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	230.189.200,00			-	-	-	-	214.980.942,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.234.971,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	215.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.234.971,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.311.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.996.400,00			-	-	-	-	25.742.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	4.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.742.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	325.875.275,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.375.275,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		192.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	732.894.921,00			-	-	-	-	912.398.882,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	18.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	24.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.300.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	64.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.450.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.788.625,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	32.984.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.362.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.079.700,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	318.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		359.604.332,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	54.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.613.725,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	85.500.000,00			-	-	-	-	1.517.650.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		726.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		260.150.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	349.182.000,00			-	-	-	-	1.236.433.297,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		242.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	155.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		234.771.097,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		638.662.200,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.040.330.000,00			-	-	-	-	1.309.601.825,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	520.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		409.222.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	277.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		501.004.200,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	19.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.872.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	44.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.362.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	178.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		274.140.625,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					-	1.469.620.000,00							1.756.888.752,00	
		[Meningkatnya Dukungan Layanan Penghubung]	Tingkat Layanan Penghubung	100	100	100	100	1.469.620.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.888.752,00	-
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	1.469.620.000,00			-	-	-	-	1.756.888.752,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	511.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		560.364.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				4 Laporan	104.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		151.250.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				4 Laporan	350.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		378.246.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				100 Laporan	503.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		667.028.752,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
		INSPEKTORAT DAERAH						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 Persen 4.24 Poin 83 Poin 94 Persen	13.623.448.010,00							16.102.551.991,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2,50	100	100	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3,70	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	4.14	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	4.40	82.50	4.19	4.24									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	90.00	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	84.20	97,62	82.70	83									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		99.90	92.00	94.00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	229.894.600,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	95.682.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.651.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.126.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19.955.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	19.322.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	56.156.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		18.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			12 Dokumen 77 ASN	11.299.521.483,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	11.732.551.991,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				77 Orang/ Bulan	11.234.160.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		11.524.551.991,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	31.230.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	34.130.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2,50	100	100	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3,70	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	4.14	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4.40	82.50	4.19	4.24									
			Nilai SAKIP OPD	80	90.00	70	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.20	97,62	82.70	83									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		99.90	92.00	94.00									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			77 Orang 77 Orang 77 Orang	468.048.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	970.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				77 Orang	436.928.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				77 Orang	31.120.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Paket 41 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	770.138.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.829.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.655.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.40 80 84.20	2,50 3,70 4.14 68,79 82.50 90.00 97,62 99.90	100 100.00 2,60 3,80 4.19 70 82.70 92.00	100 100.00 2,70 3,90 4.24 72 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44.842.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	91.290.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	89.727.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	100 100.00 3,10 4,30 4.40 80 84.20	2,50 3,70 4.14 68,79 82.50 90.00 97,62 99.90	100 100.00 2,60 3,80 4.19 70 82.70 92.00	100 100.00 2,70 3,90 4.24 72 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	173.920.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				41 Dokumen	281.875.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			10 Unit	51.707.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	51.707.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	100	2,50	100	100	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100.00	3,70	100.00	100.00									
			Indeks SPBE OPD	3,10	4.14	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	4.40	82.50	4.19	4.24									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	90.00	70	72									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	84.20	97,62	82.70	83									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		99.90	92.00	94.00									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan 1 Laporan	312.880.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.460.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	214.420.960,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-			1 Unit 23 Unit 50 Unit	491.257.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	203.730.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	252.937.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	34.590.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					100 Persen 74 Persen	2.606.030.000,00							14.450.000.000,00	
		[Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan]	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	100 80	100 70	100 72	100 74	2.606.030.000,00	-	-	-	-	-	-	14.450.000.000,00	-
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-			30 Laporan 105 Laporan 30 Laporan 50 Laporan 8 Laporan 7 Laporan	1.708.714.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah	-	13.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Laporan	314.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		4.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				73 Laporan	624.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				7 Laporan	409.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	61.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				8 Laporan	50.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				105 Dokumen	247.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-			39 Laporan 44 Laporan	897.316.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				44 Laporan	172.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				39 Laporan	725.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					71,50 Poin	1.050.451.000,00							4.350.000.000,00	
		[Meningkatnya kuliatas pendampingan dan asistensi]	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	73	70.80	71	71.50	1.050.451.000,00	-	-	-	-	-	-	4.350.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	-			2 Rekomendasi	128.656.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	128.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			27 Kegiatan 29 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 70 Perangkat Daerah	921.795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah	-	4.150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				70 Perangkat Daerah	548.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		1.750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 Perangkat Daerah	41.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				27 Kegiatan	91.699.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				29 Perangkat Daerah	240.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12.712.663.162,00							25.785.500.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						12.712.663.162,00							25.785.500.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12.712.663.162,00							25.785.500.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3,04 Nilai 80 Persen 90 Persen	5.323.945.387,00							10.685.500.000,00	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	5.323.945.387,00	-	-	-	-	-	-	10.685.500.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	3.04	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3.90	68.74	3.21	3.38									
			Nilai SAKIP Lingkup OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP OPD	80	80.00	70	71.53									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.29	97,62	70.56	72									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		99.40	84.00	88.00									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik													
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase penyediaan jasa penunngangan urusan pemerintahan daerah	-			2 Dokumen 3 Dokumen 80 Nilai 85 Persen 90 Persen	21.096.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.470.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	-	-	-	-	-	5.323.945.387,00	-	-	-	-	-	-	10.685.500.000,00	-
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.090.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.066.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran	0	0	0	0	5.323.945.387,00	-	-	-	-	-	-	10.685.500.000,00	-
			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	2,50	100	100									
			Indeks SPBE OPD	100.00	3.04	100.00	100.00									
			Indeks SPBE Perangkat Daerah	3,10	3,70	2,60	2,70									
			Nilai SAKIP Lingkup OPD	3.90	68.74	3.21	3.38									
			Nilai SAKIP OPD	4,30	68,79	3,80	3,90									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80.00	70	71.53									
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	81.29	97,62	70.56	72									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD		99.40	84.00	88.00									
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	7.470.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.114.858.215,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	6.125.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/ Bulan	4.106.970.215,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		6.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.128.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	4.760.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	399.085.032,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	840.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.984.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.100.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				75 Laporan	211.931.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	93.450.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.875.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	675.798.640,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	633.792.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	42.006.640,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	113.107.500,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	113.107.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					113 Orang	2.257.903.043,00							5.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	100.00 113	100.00 73	100.00 73	100.00 113	2.257.903.043,00	-	-	-	-	-	-	5.050.000.000,00	-
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter	-			4 Dokumen	2.257.903.043,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	5.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				73 Orang	2.057.903.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		3.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					90% Persen	2.346.719.148,00							2.150.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	2.346.719.148,00	-	-	-	-	-	-	2.150.000.000,00	-
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi	-			4 Laporan	2.346.719.148,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	2.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	47.382.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	2.299.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				250 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					90% Persen	1.190.000.000,00							1.500.000.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuska	-			5 Dokumen	1.190.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pembe rdayaan Masyarakat	-	-	1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				80 Orang	1.190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					90% Persen	403.095.584,00							2.100.000.000,00	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyatakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku	100 97.66	90 91.64	85 93.00	90 94.50	403.095.584,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	-
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus	-			4 Dokumen	403.095.584,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	203.095.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					90% Persen	1.191.000.000,00							4.300.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.191.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.300.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus</i>	-			90% Persen	1.191.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	4.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				400 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	1.191.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		1.950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							2.067.608.402.540,00							2.876.795.891.973,39		

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang tentunya juga turut berkontribusi dalam pencapaian RPJMD Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan kebijakan pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Bantuan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap dukungan pendanaan yang diberikan memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, sehingga setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan fiskal, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berbasis pada hasil (*result-oriented development*), sehingga seluruh komponen pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Adapun indikasi daftar calon penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Daftar Calon Penerima Hibah Tahun 2026

No	Calon Penerima	Alamat
1	Satuan Pendidikan Menengah Swasta	Provinsi Sulawesi Barat
2	Satuan Pendidikan Kejuruan Swasta	Provinsi Sulawesi Barat
3	Satuan Pendidikan Khusus Swasta	Provinsi Sulawesi Barat
4	Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
5	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
6	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
7	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat	Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju
8	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
9	Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (KPNI)	Provinsi Sulawesi Barat
10	Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Barat	Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju
11	DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat	Jln. Emmy Saelan, Mamuju
12	DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat	Jln. M. Husni Thamrin Nomor 17, Mamuju
13	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Barat	Jln. Mustafa Kacho, Mamuju
14	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Barat	Jln. Soekarno Hatta, Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
15	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sulawesi Barat	Jln. Mustafa Kacho, Mamuju
16	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Barat	Jln. Ambo Tjatja Nomor 7, Mamuju
17	DPW Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Sulawesi Barat	Jln. Martadinata, Mamuju
18	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Barat	Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju
19	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Sulawesi Barat	Jln. Diponegoro, Mamuju
20	DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Sulawesi Barat	Jln. Andi Dai, Mamuju
21	Lembaga Fraksi Sulbar Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
22	Pelopor Muda Inspirasi Kesehatan Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
23	Forum Masyarakat Intelektual Sulawesi Barat (FORMAL SULBAR) Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
24	Netfid Sulbar Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
25	Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
26	Lembaga Satu Bangsa Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
27	Lembaga Pemerhati Sulbar Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
28	Lembaga FPPS Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
29	Perkumpulan Ummat Beragama	Jln. Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
30	Himpunan Pemuda Muslim	BTN Bumi Salupangi Sejahtera Blok A32 Kec. Simboro Kab. Mamuju
31	Forum Pemuda Peduli Literasi Agama	Lingk. Tahaya - haya Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
32	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Prov. Sulawesi Barat	Jln. Abd. Malik Pattana Endeng No. 46 Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
33	IPMAPUS Prov. Sulawesi Barat	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
34	Pembangunan Kantor Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB)	Jln. Sultan Hasanuddin No. 32 Binanga, Kab. Mamuju
35	PW. Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat	Jln. Soekarno Hatta No. 81 (Gedung Dakwah Muhammadiyah) Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
36	PD. IKAKAS Kab. Mamuju	Jln. Martadinata (Depan Rumah Makan Cici) Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
37	Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulawesi Barat	Jln. Soekarno Hatta Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
38	PW. GP Ansor Sulawesi Barat	Jln. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
39	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat	Jln. Tandulako 2 Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli

No	Calon Penerima	Alamat
40	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Karossa	Jln. KM. 6Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
41	Sekretariat Panitia Hari Besar Islam (PHBI)	Bukit Karema Indah Blok B2 No. 12 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
42	Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Barat	Dusun Belang - Belang Utara Desa Belang - Belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
43	Pimpinan Wilayah DMI Prov. Sulawesi Barat	Lantai 1Masjid Baitul Anwar Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
44	Komisi Penanggulangan Aids Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Jln. Angsa Lingk. Padang Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
45	MPW. GBT Sulawesi Barat	Jln. Tobadak Raya Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
46	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Barat,	Jln. Martadinata No. 1 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
47	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Jln. Abdullah Umar Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
48	Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Barat	KompleksMasjid Baitul Anwar Kantor Gubernur Kec. Simboro Kab. Mamuju
49	Paguyuban Margo Mulyo	Kelurahan Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
50	Forum Pemuda Lintas Agama	BTN Masagena Blok F 1 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
51	MTs. Al-Amin DDI Tapalang	Lingk. Karanamu Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
52	Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat	Jln. Kurungan Bassi Lingk. Padang Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
53	STAI DDI Majen	Jln. AP Pettarani No. 24 Lingk. Kampung Baru Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
54	Pemuda Peduli Ummat Prov. Sulawesi Barat	BTN Masagena 4 Blok B No 13 Lingk. Talibu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
55	Persaudaraan Muslim Mamuju	Dusun Salulayang Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
56	Komunitas Pemuda Muslim Prov. Sulawesi Barat	Jln. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
57	DPD. Asosiasi Pendeta Indonesia Prov. Sulawesi Barat	Jln. Mangga No. 27 GSJA Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
58	Pemuda Lintas Agama Prov. Sulawesi Barat	Dusun Tawaro Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
59	Pimpinan Cabang GP Ansor Kab. Mamuju	Jln. RE. Martadinata Lr. Villa Bogor Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
60	Badan Koordinasi Pemuda Lintas Agama Provinsi Sulawesi Barat	Jln. Mustafa Katjho BTN Graha Nusa 5 Blok M No. 14 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
61	Persekutuan Pemuda Antar Ummat	Jln. Pamombang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
62	Pemuda Penggerak Moderasi Beragama	BTN Axury Blok J No 25 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
63	Pemuda Toleransi Lintas Agama	Kel. Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
64	Persatuan Pemuda Ummat Beragama	Jln. PelitaDusun Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
65	Pelatihan	-
66	Masjid Ar Rahman	Lingk. Kampung Tengah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
67	Masjid Istiqlal	Jln. Kijang BTN Pemda Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
68	Masjid Nurul Huda	Dusun Pebondo Dua Desa Kalukunangka Kec. Bammhaira Kab. Pasangkayu
69	Masjid Nurul Ihsan	Desa Lilimori Kec. Bulu taba Kab. Pasangkayu
70	Masjid Nurul Jihad	Dusun Lomanja RT 02 RW 02 Desa Bulumario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
71	Masjid Shiratul Jannah	Dusun Hikma Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
72	Masjid Alauddin	Dsn Tohiti Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
73	Masjid Al Muhajirin	Dsn Manunggal Desa Parabu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
74	Masjid Nurul Ikhlas	Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
75	Masjid Nur Al - Amin	Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
76	Masjid Nurul Amin Wayanbojaya	Dsn Wayanbojaya Desa Martasri Kec. Pedongga
77	Masjid Nurul Johar Makkasau	Jln. Jambu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
78	Masjid Nurul Ilmi	JLn. Ir. Soekarno Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
79	Masjid Nurul Taqwa	Dusun Salunggaluku II Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
80	Masjid Nurul Amin	Dusun Wayanbonjaya Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
81	Masjid Darussalam	Jln. Trans SulawesiDusun Maranggapa Desa Sarudu Kel. Sarudu Kab. Pasangkayu
82	Masjid Hijratul Ummah	Dusun Salurindu How Desa Bukit Harapan Kec.Bulu Taba Kab.Pasangkayu
83	Masjid Ma'mur	Lingk Labuang Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
84	Masjid Ali Imran Bukit Husada	Jln. Bukit Husada II Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
85	Mushollah Al - Amin	Dusun Tarareka Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
86	MI Ainun Sahab Marangngappa	Jln. Trans SulawesiDusun Marangngappa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
87	Madrasah Aliyah DDI Sarudu	Jln. Trans Sulawesi Tanamoni Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab Pasangkayu
88	MTs. Ma' arif Al - Barakah 2 Rojo	Jln. Trans Sulawesi Desa Rojo Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu
89	MIS Al - Munawwarah	Dusun Tangnga-Tangnga Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu
90	MA Darul Ulum Benggaulu	Benggaulu Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
91	Yayasan Alkhairat Baras	Jln. Bukit VidaDusun Pantai Batu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
92	Yayasan Pendidikan Tilawatil Quran Alfi Syahri	Jln. Tanjung Babia 1 Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
93	Ponpes Tahfidzul Quran Manbaul Ulum Malei	Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
94	Yayasan Darussalam Nahdlatul Wathan Pasangkayu	Jln. Bandeng Pasar Smart Pasangkayu Kab. Pasangkayu
95	Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Pasangkayu	Jln. Gatot Subroto Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
96	Pondok Pesantren Daarul Huffaazh Muhammadani Al bukhari Pasangkayu	Jln. Tanjung Harapan Kel Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
97	Yayasan Amal Nurul Ihsan Rumah Qur'an Nurul Ilmi	Jln. Ir Soekarno Kab. Pasangkayu
98	Ra Perwinda II Pasangkayu	Jln. Andi Depu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
99	Ra Perwinda 9 Sulu	Dusun Sulu Desa karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
100	MTS Ma Arif Al Barakah 1 Sulu	Jln ToindoDusun Suu Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
101	TPA Al Istiqomah	Dusun Limoa II Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
102	TPA Babul Hasan	Dusun Ika Utama Desa Saptanajaya Kec.Duripoku Kab. Pasangkayu
103	Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Ekklesia Pepatan	Dsn Salulemo Desa Tampakkurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
104	Masjid Raya Suada	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
105	Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Zoar Taloang Pesisir	Desa Beru - Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
106	GBI. Jemaat Salubatu	Jln. Poros Mamuju - Kalumpang Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
107	GKSB Jemaat Pelita Bambu	Desa Batu Pannu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
108	Masjid Al-Muhajirin	Dusun Bukit Husada Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
109	Gereja Kibaid Lomban Baraba	Dsn Lomban Baraba Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju
110	GTM Jemaat Kallan Baru	Dsn Kallan Baru Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
111	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD)	Jln. Bau Masseppe No. 14 Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
112	Gereja Toraja Jemaat Moria Tommo III Cabang Kebaktian Swakarsa Klasik Sulawesi Barat	Dusun Rama Desa Buana Sakti Kec.Tommo Kab. Mamuju
113	Gereja Toraja Jemaat Moria Tommo III Cabang Kebaktian Tommo 7	Dusun Simba Desa Malino Kec. Tommo Kab. Mamuju
114	Gereja Jemaat Kalvari Soreang Klasik Sulawesi Barat	Dusun Soreang Desa Boda - boda Kec. Papalang Kab. Mamuju
115	Gereja Toraja Jemaat Moria Tommo III Klasik Sulawesi Barat	Dusun Kampung Baru Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju
116	Gereja Protestan Indonesia Timur (GPIT) Jemaat Bukit Indah	Desa Banua Adak Kec. Bonehau Kab. Mamuju
117	Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Bukti Sion Mamuju	Jln. Sultan Hasanuddin No. 32 Mamuju Kab. Mamuju
118	GTM Jemaat Efrata Klasik Tommo	Dusun Tondok Bakarua Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju
119	Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Pelita Bambu Mamuju	Dusun Panuntungan Desa Batupannu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
120	Gereja Protestan Indonesia Timur (GPIT) Jemaat Naungan Kasso	Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
121	Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasik Sulawesi Barat Mamuju	Jln. Atiek Soetedja No. 17 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
122	Gereja Toraja Mamasa Jemaat Alus Salubamba	Desa Banua Adak Kec. Kalukku Kab. Mamuju
123	Gereja Jemaat Getsemani Tamalea Gereja Kristen Sulawesi Barat	Desa Tamalea Kec. Bonehau Kab. Mamuju
124	Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Doa Kallan baru	Kallan baru Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
125	GTM Jemaat Mamuju	Jln. Atiek Soetedja No. 17 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
126	GTM Jemaat Imanuel	Dusun Rantekamase Desa Bodaa - Boda Kec. Papalang Kab. Mamuju
127	Masjid Darul Fauzan	Lingk. Parung-Parung Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
128	Masjid Al - Iman	Lembang Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
129	Masjid Al - Abrar	Jln. Tamasapi Lingk. Papodede Kel. Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju
130	Masjid Sitti Aisyah	Bone-Bone Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
131	Masjid Al Abbas	Pulau Sabakkatang Desa Bala-balakang Kec. Kep.Bala-balakang Kab. Mamuju
132	Masjid Al Quba	Jln. Yos Sudarso Lingk. Kasiwa Induk Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
133	Masjid Al-Anshar	Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
134	Masjid Babussalam	Jln. Pengayoman Kantor Rutan Mamuju Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
135	Masjid Baitul Ukhuwah	Komp. BTN Graha Nusa 5 Lingk. Ghamasi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
136	Masjid Ilma Pongtiku	Kompleks Perumahan Pongtiku Residence Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
137	Masjid Jabal Nur	Jln. Hapati Hasan Lingk. Bukit Karema Indah Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
138	Masjid Nurul Jannah	Dusun Labuang Rano Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
139	Masjid Nurul Qamariah Kalubibing	Jln. Poros Mamuju - Kalukku Lingk. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
140	Masjid AL Jabaar Kaloa	Dusun Kaloa Desa Saludengen Kec. Tommo Kab. Mamuju
141	Masjid Nurul Haq Salletto	Jln. Poros Mamuju Tapalang Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
142	Masjid Babussalam	Lingk. Kasambang Tengah Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
143	Masjid At - Taqwa	Lingk. Karamang Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
144	Masjid Al Quba	Dsn Botteng Desa Salukayu Kec. Papalang Kab. Mamuju
145	Masjid Nurul Ansar	Dsn Kursallimbo Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju
146	Masjid Ar - Rabi' ah	Jln Poros Kalumpang Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
147	Masjid Wahidunnisa	Jln. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
148	Masjid Nurul Asqar Beru - Beru	Desa Beru - Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
149	Masjid Baburrahmah	Dsn Mariri Desa Trailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju
150	Masjid Babus Salam	Dsn Kampung Baru Desa Beru -Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
151	Masjid An - Nur Tanete Guru	Lingk. Danga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
152	Masjid Al - Mukarramah	Lingk. Makkarama Kel. Bebang Kel. Kalukku Kab. Mamuju
153	Masjid Al - Ihsan Wahdah Islamiyah Mamuju	Jln. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
154	Mushollah Al - Ansor	Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
155	Masjid An - Nur Le'be	Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
156	Masjid Nurul Imanuddin	Dsn Kalonding Desa Kalonding Kec. Sampaga Kab. Mamuju
157	Masjid Al - Amin Korem 142 Taro Ada Taro Gau	Jln. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
158	Masjid At - Taqwa	Simbuang, Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
159	Masjid Hasnur Al Hakim Axuri	Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
160	Masjid Jami Nurul Hijrah Axuri	Btn Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
161	Masjid Ponpes Ibnu Athar	Dsn Talondo Barat Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
162	Masjid Ashsaff	Salupangi Kel Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
163	Masjid Nurul Iman	Dusun Saboyang Desa Bala - Balakang Kec. Bala - Balakang Kab. Mamuju
164	Masjid At - Tanwir Ranting Muhammadiyah	Dusun Rarani Selatan Desa Kabuloang Kec. Kaluikku Kab. Mamuju
165	Masjid Djafar Al - Ikhlas Rimuku	Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
166	Masjid At Taqwa	Jln. R. A. Kartini No. 44 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
167	Masjid Darus Syafaat	Dusun Salumanu Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju
168	Masjid Babul Haq	Dusun Lawasan Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
169	Masjid Nurul Ibrahim	Lingk. Kassa Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
170	Masjid As - Salihin	Dusun Babalalang Timur Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
171	Masjid Sayyidah Darul Mu'minin	Lingk. Padang Panga Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
172	Masjid Al Musyawwir	Btn Anggrek Indah Rt V Ling. Padang Baka Barat Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
173	Masjid Al Qubah	Dusun Nipa-Nipa Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
174	Masjid Nurul Falah	Dusun Labu-Labuang Desa Onang Utara Kec. Sendana Kab. Mamuju
175	Masjid Al - Fatihah	Dusun Barambajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
176	Masjid Nurul Muttahidah	Jln. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
177	Masjid Nurul Iman	Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
178	Masjid Al Munawwarah	Lingk. Te'beng Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
179	Masjid Jami' Nurul Rahman	Jln. Jenderal Sudirman No. 30 Kel Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
180	Masjid Al Ayyub	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
181	Masjid Abdir - Ridha	Dusun Karatuan Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
182	Masjid Haqqul Yaqin	Dusun Buadao Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
183	Masjid Miftahul Khair	Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
184	Masjid Al Muflihun	Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
185	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Panamba Barat Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
186	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Pambuntungan Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju
187	Mushallah Bahari Imam Al - Ghazali	Dusun Losa Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab Mamuju
188	Ponpes As' Adiyah Raudhatulthalibin	Lingk. Tadui Kel. Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
189	MI. Darul Ilmi Sampoang	Lingk. Ranga - ranga Selatan Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
190	MI Nurul Jannah	Dusun TaniDusun Para'baya Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
191	MTs. Al -Luthfiyah Taludu	Dusun Kurasallimbo Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju
192	Ponpes At Tahiriyah Annahdhiyah	Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
193	Ponpes. Hidayatullah Mamuju	Jln. Abd. Syakur No. 02 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
194	Kelompok Pengajian Ruhul Jadid	Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju
195	Majelis Sholawat Ahbabus Syafa'ah	Jln. Kamaluddin Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju
196	Yayasan Rabi' ah Islamiah Nusantara MTS Mandala Nusantara	Jln Poros Kalumpang Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
197	Yayasan Rabi' ah Islamiah Nusantara MA Mandala Nusantara	Jln Poros Kalumpang Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
198	MA Istiqamah Dolangan	Dusun Dolangan KM 10 Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
199	MA Rezki Anugerah Ahu	Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
200	MTS Ibnu Athar	Dsn Talondo Barat Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
201	GP ANSOR Kab. Mamuju	Jln. Re Martadinata Lr Villa Grand Kec. Simboro Kab. Mamuju
202	Rumah Tahfidz Qur'an Baburrahman	Desa Bala - Balakang Kec. Bala - Balakang Kab. Mamuju
203	Rumah Belajar Al - Hidayah	Lingk. Lombang-lombang Utara Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
204	Kerukunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (KPPM) Kepulauan Bala Balakang	Jln. Nelayan II Kel. Simboro Kab. Mamuju
205	Pengajian Al Hidayah	Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
206	Mts Nurul Falaq Tommo	Dusun Salukanan Desa Tammejarra Kec. Tommo Kab. Mamuju
207	MAS Al - Chariyah Ma'Arif	Jln. Martadinata Komp. BTN Simboro Permai Kec. Simboro Kab. Mamuju
208	BKMT Kab. Mamuju	Jln. Sultan Hasanuddin No. 5 Kec. Mamuju Kab. Mamuju
209	MTS Ddi Toabo	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
210	Rumah Tahfidz Al Munawwir NW	Jln. Ir. Juanda BTN Perum Pesona Timbu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
211	MA Al - Furqan Sese	Lingk. Sese Selatan Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
212	Masjid Nurul Qubah	Dusun Tandiassa Desa Guliling Kec. Kalukku Kab. Mamuju
213	Masjid Balatedong	Lingk. Balatedong Kel. Sinyonyoi Kab. Mamuju
214	Mesjid Al Waysi	Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kec. Kec. Kalukku Kab. Mamuju
215	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Balatedong Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
216	Majelis Taklim Wahidunnisa	Jln. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
217	Majelis Taklim Al - Munawwarah	Lingk. Te'beng Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
218	Majelis Taklim Darul As' adiyah	Jln. Andi Makkasau Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
219	Majelis Taklim Al Ikhlash	Jln. Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
220	TPA Al - Qadri	Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
221	TPA Al Munawwarah	Dusun Rumbia Apo Desa Pammulukang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
222	Majelis Taklim Masjid Raya Suada	Lingk. Danga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
223	TPA Jannatul Firdaus	Lingk. Ghamasi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
224	TPA Darul Muttaqin	Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
225	TPA AL - Izra	Lingk. Talange Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
226	TPA Nur Alam Muttaqin	Kel Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
227	TPA As' Adiyah Malikal Mulk	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
228	TPA At Taqwa	Dusun Mollo Desa Pati' di Kec. Simboro Kab. Mamuju
229	TPA. Al Mubarak	Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
230	TPA Al Fath Mu' minun	Lingk. Sese Selatan Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
231	Masjid Jami An - Nur	Jln. Poros Majene Mamuju No. 16 Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
232	Masjid Darud Da'wah Pumballar	Kel Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
233	Masjid Al - Hidayah	Dusun Salutambung Barat Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
234	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Kampung Baru Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
235	Masjid Al Qadri	Dusun Camba - camba Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
236	Masjid Syuhada 45 Pa'leo	RW 06 Pa'leo Kec. Banggae Kab. Majene
237	Masjid Baitul Maslahah	Lingk. Garo' go - Garo' go Selatan Selatan Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
238	Masjid Darul Arafah	Dusun Parrasangan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
239	Masjid Jami Al - Furqan	Jln. Poros Majene - Mamuju Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
240	Masjid Miftahush Shiddiq	Dusun Manyamba Tengah Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
241	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
242	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
243	Masjid Nurul Imam	Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
244	Masjid Nurul Jama' ah	Dusun Kampong Totolisi Tengah Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
245	Masjid Nurul Maghfirah	Dusun Waigamo Selatan Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
246	Masjid Raudhatul Djabbar	Jln. Kemakmuran Lingk. Somba Timur Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
247	Masjid Ainul Yaqin	Dusun Masigi- Salassang Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
248	Masjid Nurul Syaamil	Jln Cumi - cumi No. 80 Tamo Rw. 05 Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
249	Musholla Lagama	Dusun Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene
250	Masjid Baitul Maslahah Garo'go	Lingk. Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
251	Masjid Nurul Jihad	Perumahan Griya Pesona Lembang, Lingk Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
252	Masjid Nurur Rahmat Tappagalung	Desa LalatedzongDusun Tappagalung Kec. Sendana Kab. Majene
253	Masjid Nurul Asrar	Dusun Galung Paara Selatan Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene
254	Mushallah Asmaul Husnah	Komp. SMP N 3 Sendana Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
255	Mushallah SMK Neg. 4 Majene	Dusun Bonde - bonde Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
256	MI DDI Lombona	Dusun Lombona Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
257	Mushollah Jabal Taqwa	Ratte LasseDusun Siiyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
258	Mushollah Nurul Ilmi	Kompleks SMA No.1 Jln. Kemakmuran No. 20 Somba Kec. Sendana Kab. Majene
259	Masjid Syuhada 45	Dsn Simbang Desa Simbang Kec. Pamboang Kab. Majene
260	Mushallah Nurul Ibad Puare Timur	Dsn Puare Timur Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
261	Masjid Al Aqsa	Dsn Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene
262	Masjid Baitul Mahmudah	Jln. Poros Majene - Mamuju Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene
263	Masjid Luqmanul Hakim	Dusub Siiyang RT 3 Dolong Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
264	Masjid Nurul Iman	Lingk. Tangnga- Tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
265	Muhsallah Darul Muhajirin Pallarangan	Jln. Batu SokkoDusun Pallarangan Kec. Pamboang Kab. Majene
266	Masjid Al Muhtadin	Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
267	Masjid Nurul Jihad	Dsn Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
268	Masjid Agung Ilaikal Mashiir	Jln. Gatot Subroto Kel. Pangali - ali Kec. Banggae Kab. Majene
269	Masjid Nurul Insan	Desa Pasuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
270	Masjid Nurul Taqwa Pangale	Ke. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
271	Masjid Nurul Islam	Desa Tinambung Kec. Pamboang Kab. Majene
272	Masjid Nur Tauhid	Dusun Limboro Induk Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene
273	Masjid Nurul Amin	Dusun Tullu Bulan Timur Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene
274	Mushollah Baitul Ilmi SMP Negeri 1 Majene	SMP 1 Negeri Majene Kab. Majene
275	Masjid Nurul Arafah	Desa Awo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
276	MTs. Totolisi	Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
277	Rumah Qur'an Yayasan Al Khairat Wal Barakah Taukong	Dusun Taukong, Desa TandeAllo Kec. Ulumanda Kab. Majene
278	Rumah Qur'an Athallah	Dusun Bonde - Bonde Desa Bonde - Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
279	Ponpes Tahfidzul Qur'an Darul Imran	Dato Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
280	MTS DDI Somba	Jln. Sultan Alauddin No. 25 Somba Kec. Sendana Kab. Majene
281	Madrasah Aliyah DDI Lombo'na	Kec.Tubo Sendana Kab. Majene
282	Madrasah Aliyah DDI Lombo'na	Kec.Tubo Sendana Kab. Majene
283	Ponpes Jabal Rahmah DDI Limboro	Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene
284	Mts Guppi Mekatta	Jln. Poros Majene Mamuju Km 95 Mekatta, Desa Mekatta Kec. Malunda Kab. Majene
285	Majelis Taqlim Ikhwanul Khasanah	Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
286	MT. Fathima Az - Zahra	Kel Lalampunua Kec. Pamboang Kab. Majene
287	Tpa Al Khairat	Dusun Taraweki Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
288	TPA. Az - Zahra	Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene
289	TPA Al-Iqra	Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
290	TPA Muallimah	Dusun Poniang Utara Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
291	TPA Salafiya	Dusun Poniang Utara Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
292	TPA Al - Furqan	Lingk. Labuang Utara Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
293	TPA Nur Hidayah	Dusun Totolisi Utara Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana kab. Majene
294	TPA Al Furqan	Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
295	Masjid Yamp - Al Asyariah Unasman	Jln. Budaya No. 21 Madatte Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
296	Masjid Nurussadah	Jln. VeteranDusun II Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
297	Masjid Al - Amin	Dusun Kambe Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
298	Masjid Al - Ikhlas	Lingk. Kampung Baru Kel. Matangnga Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
299	Masjid Ahmad Azhar	Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
300	Masjid Al - Ikhlas	Jln. BambuDusun 1 Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
301	Masjid Nurul Ilmi Banua	Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
302	TPA. Firdaus	Dusun Lapeo Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
303	Masjid Al - Muhajirin	Lingk. Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
304	Masjid Babul Rahman	Dusun Beuwas Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
305	Masjid Miftahul Jannah Lambe	Lambe Jln. Poros Tinambung Karama Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
306	Masjid An - Nur Ujung Timur	Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
307	Masjid Jami' Nurul Jihad	Dusun Manumanukan Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
308	Masjid Az Zikra Walhidayah	Dsn Mirring Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
309	Masjid AL Ikhlas Matakali	Jln Poros Trans Sulawesi Lingk Kappung Tangnga Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
310	Masjid Al - Qasimiyah	Dsn Tana Takko Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
311	Mushalla Darul Ilmi	Dsn Gonda Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
312	Masjid Jami At-Taqwa	Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
313	Majelis Taklim Darul Muraqabah	Dusun para Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali mandar
314	Masjid Al Falah	Dusun Kampung Baru Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
315	Masjid Al Muhajirin	Desa Pao - Pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
316	Mushalla Muhlisinah Lahuddin	Jln. Poros Kampung Baru Pakkamisang Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
317	Masjid Nurul Muttaqin	Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
318	Masjid Al - Ittihad	Alli Alli, Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
319	Masjid Nurul Huda	Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
320	Masjid Nurul Hikmah	Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
321	Masjid Al Muttaqin	Dsn Salurihan Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
322	Masjid AL - Muhajirin	Jln. Daeng Bakkarang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
323	Masjid Jmai Darul Iman Mammi	Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
324	Mushalla Ar Rahman	Rea Timur Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
325	Masjid Nurul Yaqin	Kelurahan Ammasangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
326	Masjid Darus Sa'adah	Desa Rea Kontara Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
327	Masjid Qalbun Saliim Salujerre	Dusun Siratuang Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
328	Masjid Nurul Amin	Kandemeng Desa Batu Laya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
329	Masjid As - Shoefiyah	Lingk. Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
330	Masjid Nurul Huda	Kampung Galung Daala Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
331	Masjid Al - Mu'mina	lingk. Congo Sarabakang Kel. Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
332	Masjid Darussalam Seppong	Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
333	Masjid Fastabiqul Khairat Nenebece	Desa Barumbung Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
334	Masjid Iradatullah Rondongan	Jln. Poros Rondongan Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
335	Masjid Besar Al Hurriyah	Jl Daeng Riso Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
336	Masjid Nurul Iman	Lingk. Binuang II Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
337	Masjid Alif Al Bader	Jln. H. Andi Depu Kel. Takatindung Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
338	Masjid Jmai Nurut Taubah	Desa Tubbi Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
339	Masjid Jami Al Falah	Dusun Waitawar Desa Tammangalle Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
340	Masjid Tanwirul Masjid	Dusun Manjopai Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
341	Masjid Jami Nurul Hikmah	Jln. Pappuangan Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
342	Masjid Babunnur	Dusun Lewukang Desa Tandasura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
343	GTM Gereja Anugerah Tabone	Jln. Poros Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
344	Madrasah Aliyah Nur Aliyah Nur Ma'Arif Sepang	Dusun Sepang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
345	Madrasah Aliyah Nur Aliyah Nur Ma'Arif Sepang	Dusun Sepang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
346	MI Al - Irsyad Bumbumbatu	Dusun Bumbumbatu Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
347	MI DDI NO. 32 Sumnerjo	Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
348	MTs. Cabang DDI Mapilli	Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
349	MI DDI Dokka	Desa Dokka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
350	MI DDI Tubbi	Desa Tubbi Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
351	MA. Al Balad Kamande	Jln. Poros Tubbi No. 3 Desa Pollewani Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
352	Madrasah Ibtidaiyah BPI	Jln. Bandeng No. 1 Kampung Baru Desa Tandung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
353	MTs AI - Munawwir Pumbejagi	Jln. Poros Desa PodaDusun Pumbejagi Desa Poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
354	RA Asyalia	Dusun Taupe Desa Mombi Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
355	MIS Baiturrahim	Jln.Masjid Baiturrahim Lingk. Gernas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
356	Pondok Pesantren Syekh Muhammad Amin	Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
357	MIS DDI Panggalo	Jln. Kanne Onro Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
358	MTs. DDI Lebbukang	Desa Tandasura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
359	Yayasan Al Kahfi Mandar	Jln. Poros Sila - Sila Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
360	MTS Addiba'l Manjopa	Manjopai Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
361	MA Nurul Ilmi Panggao	Jln. Poros Ongko Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
362	MI HIKMAT AI IHSAN	Jln Poros Tutar Kel. Batupanag Kel. Luyo Kab. Polewali Mandar
363	Ponpes DDI AL - Ihsan Kanang	Jln. Mangondang No. 35 Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
364	RA Anugrah 2 Bonde	Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
365	MA Assiddiqy Limboro	Kambajawa Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
366	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As' Adiyah Wonomulyo	Jln. Akses Terminal Lingk. 1 Kel. Sidodali Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
367	Ra Al Wahid Batulaya	Jln. Poros TammejarraDusun BatuLaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
368	Madrasah Ibtidaiyah Al Irwan Pangalo	Jln. Poros Ongko Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
369	RA Nurul Yaqin Tinambung	Desa Tandung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
370	Madrasah Tsanawiah Pergis Campalagian	Jln. Ammana Majju No. 85 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polman
371	Yayasan Haruna Yasin Al-Mandary	Jln. H.Andi Depu BTN Telkom Mas Villa Mas Blok A No. 18 Kel. Takatindung Kec. Polewali Kb. Polewali Mandar
372	Masjid Nurun Na'im Karoke	Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
373	Majelis Taklim Mahabbaturrasu	Dusun I Parappe Desa Pambosuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
374	Majelis Taklim Miftahul Jannah	Dusun I Parappe Desa Pambosuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
375	TPA Al Hikam	Dusun I Parappe Desa Pambosuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
376	TPA Darul Ilmi	Karama Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
377	TPA Darul Arqam	Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
378	Mushollah Al-Kahfi SD Negeri 046 Sidorejo	Jln. Inpres Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
379	Masjid Al Muhajirin	Desa Puppuring Kecamatan allu Kab. Polman
380	PPrGTM SINODE	Kelurahan Mamasa. Kecamatan Mamasa Kab. Mamasa
381	Masjid Darul Anhar	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
382	Masjid AL ABRAR	DUSUN TINONTO DESA LETAWA KECAMATAN SARJO KAB.PASANGKA YU
383	Masjid Nurul Arrahman	Dusun Pundambu Desa Peburru Kec. Tutar Kab. Polman
384	Masjid Jami' NURUL YAQIN	Desa Bala, Kec. Balanipa Kab. Polman Mandar
385	Mushalla BABUSSALAM	Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kec. Balanipa Kab. Polman Mandar
386	Mushalla AL HIDAYAH	Dusun Renggeang Utara, Desa Renggeang, Kec. Limboro, Kab. Polman Mandar
387	Masjid ADDARQUL MUSYAHADA	Desa Tandung, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar
388	Masjid BAITURRIDHA	Dusun Baulu, Desa sarangiang, Kec. Alu, Kab. Polman
389	TPQ AS-SALAM	Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polman Mandar
390	Majelis Taklim Majelis Maulid & Ilmu	Desa Sabang Subik, kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar
391	Mesjid Ruhamah	paropo Desa mombi, Kec. alu, Kab. polewali mandar
392	Masjid Nuru Huda	Dusun Pundambu Desa Peburru Kec. Tutar Kab. Polman
393	GTM Sinode	Kelurahan Mamasa, Kec.Mamasa Kab. Mamasa
394	Gereja Katolik Stasi St. Andreas Tanah Merah	Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah
395	Masjid Nurut Taman Tamo	Alamat Lingk. Tamo dhua kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
396	Masjid Nurul A'mal	Jln. Poros PanuntunganDusun Batupannu Desa Batupannu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju
397	TPA Babul Jannah Rante	Jln. PorosDusun rante Desa Batupannu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju
398	Masjid Al - Zikra	Dusun Tinaungan Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Kab. Mamuju
399	Masjid Murni	Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
400	GKSB Jemaat Tambing - Tambing	Dusun Tambing2 Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
401	Masjid Ar - Rahman	Lingk. Balatedong Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
402	Masjid Al Furqan	Dusun Turadu Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
403	Masjid Al Muttaqin	Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
404	Masjid Darussalam	Dusun Indoure Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
405	Masjid Al Abshar	Dusun Rantedoda Desa Rantedoda Kec. Tapalang Kab. Mamuju
406	Masjid Nurul Amiin	Lingk. Kasambang Utara Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
407	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Kasiwa Timur Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
408	Masjid Al - Quba	Dusun Betoong Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
409	MTs. Babul Jannah	Lingk. Katapi Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
410	Masjid Baburrahman	Dusun Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene
411	MA. DDI Lombang - Lombang	Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
412	MA. Darul Abrar Toabo	Dusun Toabo Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
413	Pura Ulun Danu	Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju
414	Masjid Al Qahhar	Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
415	TPA Nurul Muttahida	Lingk. Binanga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
416	Masjid An Nur	Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
417	Masjid Nurul Da" wah	Dusun Ahu Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
418	Masjid Babussalam	Dusun Turadu Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
419	Masjid Nurul Hidayah Umrah	Dusun Tamakula Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
420	Masjid Al - Aqsa	Dusun Baobatu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
421	Masjid Ansharullah	Dusun Sumakuyu Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
422	Masjid Darul Falihin	Dusun Bunga Desa Buttu Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene
423	Masjid Nurul Ibaad	Dusun Sappu Desa Tinambung Kec. Pamboang Kab. Majene
424	Belanja Hibah Uang Kepada GTM Jemaat Malimbong	Dusun Malimbong Desa Malimbong Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
425	Masjid Darul Mu"minin	Dusun Tanete Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
426	Ponpes Darul Hikmah	Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
427	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Darussalam	Jln. Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
428	Belanja Hibah Uang Kepada Pura Tri Lingga Natha	Desa Lelejae Kec. Bulu Taba Kab. Pasangkayu
429	Belanja Hibah Uang Kepada Mushallah Babul Jannah	Dusun Ika Utama Desa Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
430	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Taqwa Sendana	Dusun Sendana Desa Kombiling Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
431	Belanja Hibah Uang Kepada Ponpes Lukmanul Hakim Barakkang	Jln. Trans Sulawesi Desa Barakkang Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
432	Belanja Hibah Uang Kepada Gereja Kibaid Tobadak Tanjung	Dusun Mesakada Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
433	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Haq Transari	Dusun Transari Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
434	Masjid Syaiful Islam	Jln. Cendrawasih Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
435	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Babul Jannah	Dusun Segerang Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
436	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Al - Muhajirin Pekkabata Kanang	Lingk. Pekkabata Kanang Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
437	Masjid Baiturrahman	Dusun 1 Maraddia Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
438	Masjid Darul Muraqabah	Dusun Para Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
439	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid As - Shalah	Dusun Pulo Tangnga Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
440	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid As - Sulaeman	Dusun Malio Desa Sayoang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
441	MTs. Yayasan Permai Tutalu	Jln. Poros Tinambung Alu Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
442	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Amin Malise	Dusun Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
443	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Darul Falah	Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
444	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Jabal Rahmah	Dusun Baro - baro Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
445	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Tauhid	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
446	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurut Taqwa	Dusun Bunu Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
447	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Jami' Al Ittihad	Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
448	Masjid Baitul Mahmudah	Dusun Palipi Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
449	Masjid Darussalam	Dusun Popenga Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
450	Masjid Nurul Amin	Dusun Kayuangan Utara Desa Kayuangan Kec. Malunda Kab. Majene
451	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Lombong Manaraya Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene
452	GPdI Jemaat Alfa Omega	Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
453	GPdI Jemaat Betania Ende - Ende	Dusun Ende - Ende Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
454	Masjid Nurul Taqwa.	Dusun Daman Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
455	Masjid Al - Muhajrin	Dusun Tapparang Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
456	Masjid Nurul Amin.	Lingk. Padang Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
457	Masjid Nurul Iman.	Lingk. Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
458	Masjid Umar Bin Khattab	Lingk. Galung Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
459	Masjid Nurul Amin.	Lingk. Rangas Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
460	MTs. Nurul Ilmi Budong - budong	Dusun Karondang Desa Babana Kec. Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah
461	GPdI Jemaat Air Hidup	GPdI Jemaat Air Hidup Jln. Poros Lingk. Salulossa Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
462	GBT. Jemaat Tobadak IV	Jln. Poros Tobadak IV Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
463	TPA Ummy	Perumahan Puncak Indah Residence No 13 Jln. Husni Thamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju
464	GPdI Jemaat Aralle	GPdI Jemaat Aralle Lingk. Aralle Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
465	Masjid Darussalam	Lingk. Padang Malolo Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
466	Masjid Ar Rahman	Dusun Malauwa Selatan Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
467	Masjid Babul Khoir	Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju
468	Masjid Fastabiqul Khaerat	Lingk. Talibu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
469	Masjid Majma"" ul Falah	Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju
470	Masjid Nurul Amin	Dusun Ujung Bulu Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
471	Masjid Nurul Hidayah.	Dusun Galung Lemo Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
472	GPdI Jemaat Sumber Kasih	GPdI Jemaat Sumber Kasih Dusun Limbong Lopi Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa
473	Masjid Nurul Wahab	Dusun Barang - barang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
474	Masjid Ridha	Dusun Bone - bone Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju
475	TPA Babul Hijrah	Kompleks Graha Nusa 1 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
476	Masjid Sirajul Mukminin	Lingk. Ahuni Pili Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
477	Masjid Taqwallah	Dusun Karangsari Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju
478	Ponpes Hasyim Asy' ari Tapalang	Dusun Serang Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
479	GTM Jemaat BuranaDusun Burana Desa Burana Kec. Tabulahan Kab. Mamasa	GTM Jemaat BuranaDusun Burana Desa Burana Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
480	Ponpes At - Tanwir Muhammadiyah	Jln. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
481	Masjid At - Taubah	Dusun Sempo Utara Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
482	Masjid Babul Jannah	Dusun Binoli Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
483	Masjid Babul Jannah.	Dusun Tanjung Harapan Desa Bambakoro Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
484	GTM Jemaat Sepang	GTM Jemaat SepangDusun Mesakada Desa Mesakada Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
485	GTM Jemaat Silo Penanian	GTM Jemaat Silo PenanianDusun Penanian Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa
486	Masjid Al - Muhajirin Lingk. Lombongan Kel. Talippuki Kec. Mambi	Masjid Al - Muhajirin Lingk. Lombongan Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa
487	MI. Nurul Huda	Desa Bulu Mario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
488	MA. Al - Irsyad Karoke	Jln. Poros Pendulangan Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
489	Masjid Al - Akbar	Masjid Al - AkbarDusun Batutaku Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
490	MA. Pergis Campalagian	Jln. Ammana Majju No 85 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
491	Masjid An - NurDusun Butungan	Masjid An - NurDusun Butungan Desa Bonde Utara Kec. Pamboang Kab. Majene
492	Masjid Al - Fadly	Jln. Padi Unggul 2, Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
493	Masjid Al Ikhlas	Dusun Talise Desa Tapango Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
494	Masjid Al - Mujahidin	Dusun Suppungan Desa Ratte Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
495	Masjid As Sajadah	Dusun Limboro Desa Ongko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
496	Masjid At - Taqwa,	Dusun Lombok Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
497	Masjid Babul Jannah...	Dusun Palleroang Desa Salarri Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
498	Masjid H. Abd. Madjid Layonga	Dusun Layonga Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
499	Masjid Husain Saleh	Jln. Andi PatiroiDusun Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
500	Masjid Jami Nurul Hidayah	Dusun III Bina Rejo Desa Banato Rejo Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
501	Masjid Nuirussalihim	Lingk. Mombi Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
502	Mushallah Quba	Dusun Tosondeng Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
503	Masjid Nurul Taqwa	Dusun Passembarang Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
504	Masjid Nurul Ihsan	Dusun Bodang - bodang Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
505	Masjid Nurul Ruhama'	Dusun Parribuang Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
506	Masjid As Sahabah	Masjid As SahabahDusun Taukong Desa Tandeallo Kec. Ulumanda Kab. Majene
507	Masjid Babul Jannah Lingk. Rangas Timur	Masjid Babul Jannah Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
508	Masjid Nurul Jawad	Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
509	Masjid Darul Qarar	Masjid Darul QararDusun Apoang Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene
510	Masjid DarussalamDusun Tappa Banua	Masjid DarussalamDusun Tappa Banua Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene
511	Masjid Khaeruttaqwa	Masjid KhaeruttaqwaDusun Taukong Desa Tandeallo Kec. Ulumanda Kab. Majene
512	Masjid Nurut Taqwa	Dusun Belulu Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
513	Masjid Nurut Tauhit	Dusun Pendukuan Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
514	MI. Al - Irsyad Bumbumbatu	Jln. Poros Pussui Barat Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
515	MI. DDI Lapeo	Jln. Poros Majene No. 45 Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
516	MTs. Al Parakkasi	Jln. Poros Tutar Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
517	Masjid Nurul FalahDusun Labu - labuang	Masjid Nurul FalahDusun Labu - labuang Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
518	Masjid Nurul ImanDusun Totolisi Utara	Masjid Nurul ImanDusun Totolisi Utara Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
519	Masjid Nurul Muttaqin Lingk. Kalorang	Masjid Nurul Muttaqin Lingk. Kalorang Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
520	Masjid Nurul YaqinDusun Waigamo	Masjid Nurul YaqinDusun Waigamo Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
521	TPA Adzaariyaat	Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
522	Masjid Raodhatussalihin Lingk. Parappe	Masjid Raodhatussalihin Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene
523	Masjid Sirajul MunirDusun Petudang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene	Masjid Sirajul MunirDusun Petudang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
524	MTs. GUPPI Ulidang	Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
525	GKSB Jemaat Bukit Anugerah	Dusun Kalumpang Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
526	GKSB Jemaat Patudaan	Dusun Patudaan Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
527	GKSB. Jemaat Eben Haezer Pombalaan	Dusun Pombalaan Desa Hinua Kec. Bonehau Kab. Mamuju
528	GKSB. Jemaat Moria Takkesanga	Dusun Takkesanga Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
529	GKSB. Jemaat Sabamba	Dusun Sabamba Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
530	GKSB. Jemaat Sabamba	Dusun Sabamba Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
531	GPdI Jemaat Bethesda	Dusun Belang - belang utara Desa Belang - belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
532	GPdI Jemaat Filadelfia Tommo III	Dusun Rama Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju
533	GPdI Jemaat Hebron	Dusun boda - boda Desa Hebron Kec. Mamuju Kab. Mamuju
534	GPdI Jemaat Maranatha Toabo	Dusun Nusantara Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
535	GTM Jemaat Bukit Kasih	Dusun Galung Dambu Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
536	GTM Jemaat Manak Puang	Dusun Sisango Desa Sisango Kec. Papalang Kab. Mamuju
537	MA. DDI Sumare	Dusun Sumare Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
538	Majelis Taklim Istiqamah	Lingk. Dayanginna Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
539	Masjid Al - Aqsa,	Lingk. Tegar Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
540	Masjid Al Muhajirin	Lingk. Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
541	Masjid Ar - Rabiah	Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
542	Masjid Ar Rahim	Dusun Barang - barang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
543	Masjid Babul Yaqin	Dusun Pancasila Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
544	Masjid Baitul Maqdis	Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
545	Masjid Jabal Nur	BTN Korongana Bukit Asri Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
546	Masjid Nurul Fatwa	Dusun Bela Desa Bela Kec. Tapalang Kab. Mamuju
547	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Taruminding Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
548	Masjid Nurul Imam	Dusun Salu manarang Desa Saludengen Kec. Tommo Kab. Mamuju
549	Masjid Nurul Inayah,	Lingk. Kapandeang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
550	Masjid Nurul Mu'min	Dusun Tasiu Timur Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
551	Masjid Nurul Taqwa	Dusun Batu Lappa Utara Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
552	MTs. Nurul Iman Bunde	Bunde Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju
553	Muallaf Centre Ibrahim	BTN Masagena 4 Lingk. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
554	PD. DDI Kab. Mamuju	Jln. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
555	SMTK Setia Mamuju	Dusun Salulampio Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
556	Masjid Al - Falah,	Lingk. Labuang Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
557	Masjid Al - Mubaroqah	Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
558	Masjid Al - Muhajirin	Lingk. Salewang Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene
559	Masjid Al- Mukasyafah	Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
560	Masjid Baiturrahim Ulidang	Dusun Ulidang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
561	Masjid Darussa'adah	Dusun Puttada Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene
562	MA. Hajaratul Akbar	Jln. Poros Saragian Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
563	MA. Nurul Ma'arif Pariangan	Jln. Poros Pussui Barat Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
564	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Patto - patto Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
565	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Beulo Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
566	Masjid Al - Namira	Dusun Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
567	Masjid Al-Aqsa	Dusun Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
568	Masjid Babul Ilmi,	Kompleks SMP N 1 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
569	Masjid Baitul Mukarram Piteteang	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
570	Masjid Jabal Nur	Dusun 2 Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
571	Masjid Jabal Nur Malimbu	Dusun Batusasi Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
572	Masjid Jami' Al - Amin	Dusun 1 Subik Desa Sabang Subik Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
573	Masjid Mubaraqa	Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
574	Masjid Nurul Amilin	Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
575	Masjid Nurul Asror	Lingk. Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
576	Masjid Nurul Hilal	Dusun Bajoe Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
577	Masjid Nurul Huda	Dusun Galung Daala Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
578	Masjid Nurul Iman	Jln. Poros Lemo baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
579	Masjid Nurul Iman	Dusun Tabassala Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
580	Masjid Nurul Takwa Palludai	Dusun Palludai Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
581	Masjid Ruhul Jama'atil Mu'min	Dusun Berampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
582	Masjid Sulthanul Auliya	Dusun Tallo Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
583	MI. DDI No. 372 Lampa	Jln. Olahraga No. 4 Lingk. Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
584	MI. DDI Suruang	Jln. Poros Suruang Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
585	GTM Jemaat Efrata Salusiampek	Dusun Salusiampek Desa Tampakkurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
586	GTM Jemaat Imanuel Buangin	Dusun Buangin Desa Buangin Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
587	GTM Jemaat Maranatha,	Dusun Paladan Desa Paladan Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
588	GTM Jemaat Syalom Tampak Loppo	Dusun Tampak Loppo Desa Tampak Kurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
589	GTM Jemaat Talimbung	Dusun Talimbung Desa Talimbung Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
590	Majelis Taklim At - Taqwa	Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
591	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Salubiru Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
592	Masjid Taqwa	Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
593	GKS. Maria Stasi Baras VI	Jln. Ahmad Kirang Baras IV Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
594	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
595	Masjid Al - Kautsar	Dusun Palapi Desa Tumpaure Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
596	Masjid An" Nur	Dusun Peburo Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
597	Masjid Babussalam	Dusun Panebunggu Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
598	Masjid Darul Ummah	Dusun Tabalia Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
599	Masjid Darussalam	Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
600	Masjid Darussalam	Dusun Salu apu Desa Vakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
601	Masjid Nurul Haq	Dusun Bantalaka Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
602	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
603	Masjid Nurul Khairaat	Dusun Panta batu Desa Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
604	Mushallah Yu"min Salunggabo	Jln. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
605	Ponpes. As'adiyah Darussalam	Dusun Belawa Rahmat Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
606	Pura Pasek Dukuh	Dusun Lelejae Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
607	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Hako Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
608	Masjid Al - Munawwaroh	Jln. Poros Mamuju - Palu Desa Salupangkang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
609	PAC. GP. Ansor Karossa	Dusun Karossa Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
610	Masjid Jami Al Jihad	Dusun Banua Utara Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
611	Masjid Jami Nurul Huda	Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
612	Masjid Khadijah,	Dusun Taninni Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
613	Masjid Nurul Fitrah	Dusun Ratte Apas Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
614	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Biinanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene
615	Masjid Nurul Huda	Lingk. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
616	Masjid Nurul Mujahidin	Dusun Pullobe Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene
617	Masjid Darul Syuhada	Dusun Batu Bira Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
618	Masjid Babussalam	Dusun Tampomea Desa Orobato Kec. Tapalang Kab. Mamuju
619	Masjid At Taqwa	Dusun Mollo Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
620	Masjid Al - Munawwarah	Lingk. Te' beng Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
621	Masjid At Taqwa	Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
622	Masjid Al Furqan	Dusun Lomban Bulu Desa Leling Timur Kec. Tommo Kab. Mamuju
623	Masjid Nurul Akbar	Lingk. Kampung Baru Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
624	Masjid Al - Qahhar	Lingk. Kampung Jati Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
625	Masjid Miftahul Jannah	Lingk. Ahuni Timur Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
626	Masjid Nurul Hikmah	Lingk. Danga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
627	Masjid Al - Amin	Dusun Anggatang Poang Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
628	Masjid An Nur Al Mukhtar	Dusun Tanere Barru Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
629	Masjid Baburrayyan	BTN Maspul Lingk Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
630	Masjid Al - Ikhlas	Lr. 8Dusun Garuda Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
631	Masjid Nurul Iman	Jln. KS. Tubun No. 28 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
632	Masjid Ar Rahman	Dusun Salupalado Desa Pati' di Kec. Simboro Kab. Mamuju
633	Masjid Al Hijrah	Dusun Barru Desa Tanete Pao Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
634	Masjid Babussalam	Dusun Dolangan II Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
635	Masjid Al - Falah	Lingk. Pure II Kel. Sinyonyoi Kec. Mamuju Kab. Mamuju
636	Masjid Darul Falah Tamao	Dusun Tamao Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
637	Masjid Al Madjid	Jln. Poros Tabailo Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
638	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Salubara' na Desa Salubara' na Kec. Pangale Kab. Mamuju
639	Masjid Djafar Al Ikhlas	Lingk. Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
640	Masjid Darussalam	Lingk. Bukit Karema Indah Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
641	Mushallah Al - Achlak	Lingk. Ampallas Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
642	GPT. Jemaat Ende - Ende	Dusun Buttuada Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
643	GTM Jemaat Salusituru	Dusun Salusituru Desa Leling Utara Kec. Tommo Kab. Mamuju
644	GPdI Jemaat Efata Pure	Dusun Pure Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju
645	GTM Jemaat Sarunggu	Dusun Kayu lune Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
646	GBP. Jemaat Pure Timur	Dusun Pure Timur Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
647	GTM Jemaat Bajem Maranatha	Dusun Pokkang Utara Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
648	GTM Jemaat Elim	Lingk. Le' beng Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
649	GBI Jemaat Mamuju,	Jln. Pattimura No. 6 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
650	GTM Jemaat Bukit Zaitun	Jln. Sultan Hasanuddin No. 09 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
651	GKSB Jemaat Periangen	Dusun Periangen Desa Kondobulo Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
652	GKSB. Jemaat Firdaus	Dusun Tamessasang Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju
653	GPdI Jemaat Bukit Sion	Dusun Tommo Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
654	TPA Nurussalam	Dusun Limbeng Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
655	TPA Nurul Yaqin	Dusun Kabe Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju
656	TPA Babul Suci	Lingk. Ranga - Ranga Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
657	TPA Al - Hafis	Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
658	TPA Babul Ilmi	Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
659	TPA. Darul Mukhlisin	Dusun Beru - beru Desa Pasa' bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
660	TPA Ar Rahim	Lingk. Dayanginna Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
661	MA. Ainun Sahab	Lingk. Landi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
662	MI. Al Ikhwan Toansang	Dusun Toansang Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
663	MI. Annur Ma' arif Bakengkeng	Dusun Bakengkeng Desa Belang - Belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
664	MTs. Al Qamar	Lingk. Kassa Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
665	MTs. Darul Ilmi Sampoang	Lingk. Sampoang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
666	MTs. Nurul Falaq	Dusun Salukanan Desa Tammejarra Kec. Tommo Kab. Mamuju
667	Ponpes Ar Rahman	Dusun Kabuloang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
668	Ponpes Nurul Iman	Dusun Mariri Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju
669	Ponpes Modern Darul Adab wal Ilmi	Dusun Tanete Barru Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
670	Ponpes Tahfidz Al Huda	Jln. Andi Endeng No. 2 Pesona Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
671	Ponpes Tahfidz Ar - Rahman	Dusun Batupannu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
672	Ponpes Tahfidz Akhlakul Karimah	Jln. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
673	LD. Darul As' Adiyah	Depan Warung Cici Jln. RE. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
674	Ponpes Darul Qur'an Wal Hadts NW	Jln. Poros Wisata Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
675	MA. Amaliyah GUPPI Mamuju	Jln. Ir. H. Djuanda No. 03 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
676	MA. Azzahrah Papalang	Jln. Poros Batupapan Kel. Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
677	MI. DDI Malauwa,	Dusun Malauwa Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
678	PW. Nahdlatul Wathan Prov. Sulawesi Barat	Jln. Poros Wisata Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
679	RA. Baburrahman	Lingk. Ranga - ranga Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
680	TK. Benih Cahaya Bangsa	Graha Nusa 2 Tahap 1 Blok F 23 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
681	IPM. Tapalang	Jln. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
682	HIPMAKAR. Kalumpang Raya	Jln. Baharuddin Lopa BTN Binanga Blok G 9 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
683	Masjid Fatuhrrahman	Dusun Bajoleng Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
684	Masjid Darul Hidayah	Dusun Banua Desa Paminggalan Kec. Sendana Kab. Majene
685	Masjid Nurul Jama'ah	Dusun Kappung Totolisi Tengah Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
686	Masjid Nurul Jama'ah	Dusun Kappung Totolisi Tengah Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
687	Masjid Jami' Nurul Yaqin	Dusun Luaor Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene
688	Masjid Darul Faizin,	Lingk. Segeri Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene
689	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Buttutala Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene
690	Masjid Al - Muallimin	Dusun Ba' basondong Desa Kabiraan Kec. Uluanda Kab. Majene
691	Masjid Baburrahman	Dusun Sambabo Desa Sambabo Kec. Uluanda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
692	Masjid As Salam	Dusun Kampung Baru Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene
693	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Ba' balombi Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
694	Masjid Alauddin	Dusun Bo' di Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene
695	Masjid A' la	Dusun Adolang Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
696	Masjid Nurul Islam	Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
697	Masjid Al - Mujahidin	Dusun Leppangan Timur Desa Leppangan Kec. Sendana Kab. Majene
698	Masjid Baburrahmah	Lingk. Mandalle Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
699	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Tammalupu Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
700	Masjid Al - Haysr	Lingk. Apoleang Utara Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
701	Masjid Darul Ma'ruf	Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene
702	Masjid Nurul Insan	Jln. Poros Majene Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
703	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Naulluyo Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene
704	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Kanei Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene
705	Mushallah Raudha Darmi	Lingk. Galung Utara Kel. Galung Kec. Banggae Kab. Majene
706	Mushallah Jabal Taqwa	Dusun Siyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
707	Mushallah Nurul Mubin	Dusun Butungang Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
708	TPA. Nadhifa	JLN. Poros Majene - Mamuju Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
709	TPA Nurul Iqra	Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
710	BKMT. An Nisa	Dusun Waigamo Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
711	Rumah Qur' an Ar - Raudah	Dusun Lembang Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
712	MI. DDI Segeri	Lingk. Segeri Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene
713	RA. Auliya Kayu Colo	Lingk. Kayu Colo Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
714	RA. Al Hikmah Tubo	Dusun Tubo Dalam Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
715	MI. Nurul Insan GUPPI Pesuloang	Dusun Pesuloang Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
716	MI. DDI Lipu	Lingk. Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene
717	Ponpes Al Mansuriyah	Dusun Malunda Desa Malunda Kec. Malunda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
718	Masjid Jami Nurul Huda	Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
719	Masjid Bilal Al Fatih	Dusun Batu Appang Desa Kurrak Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
720	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Taramanu Desa Taramanu Tua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
721	Masjid Agussalim	Dusun Toledang Desa Pao - pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
722	Masjid S. Abbas Ali,	Dusun V Kappung Psr. Baru Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
723	Masjid Al - Aqlussalim	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
724	Masjid Babul Khairat	Dusun Pundali - dali Desa Poda - poda Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
725	Masjid Al Huda	Dusun Poda - poda Desa Poda - poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
726	Masjid Al - Muttahir	Dusun Taloba Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
727	Masjid Al Ikhlas	Dusun Alla' Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
728	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Tandakan Baru Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
729	Masjid Nurul Ihsan	Dusun Betteng Desa Palece Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
730	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Kawelaan Desa Besoangin Utara Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
731	Masjid Ansharullah	Dusun Petoosang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
732	Masjid Nurul Amin	Dusun Paahang Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
733	Masjid Nurussalim	Jln. Kolong Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
734	Masjid Assa' adah	Lingk. Binuang 2 Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
735	Masjid Al - Jannah	Dusun Panggalo Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
736	Masjid Al Ikhlas	Dusun Loa Desa Poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
737	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Passubbe' Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
738	Masjid Nurul Taubah	Dusun 1 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
739	Masjid Babul Jannah	Jln. Kapten Jumhana Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
740	Masjid Nurul Huda	Dusun Manye - manye Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
741	Masjid Nurul Huda	Dusun Bakka - bakka Desa Bakka - bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
742	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Kelapa dua Desa Kelapa dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
743	Masjid Al Nurul Taqwa	Dusun Kalimbua Desa Kalimbua Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
744	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sumberjo Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
745	Masjid Tawaakkal	Dusun Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
746	Masjid Nurul Taqwa	Lingk. Matakali Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
747	Masjid Jami Taqwa	Dusun Garongong Desa Besoangin Utara Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
748	Masjid Jami Nurul Akbar Leteang	Dusun Baro - baro Desa Tenggeling Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
749	Masjid An - Nur Batang Utta	Dusun Batang Utta Desa Palatta Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
750	Masjid Al - Anshor	Dusun Lamutte Kamase Desa Rangoan Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
751	Masjid As Shalihin	Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
752	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Sidorejo Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
753	Masjid Nurul Hidayat	Dusun Rappang Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
754	Masjid Al - Ikhlas.	Lingk. Juddasaf Kel. Palitikan Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
755	Masjid Jabal Rahmah	Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
756	Masjid Ta' mir Muhammadiyah	Lingk. Sidodadi Kel. Sidodadii Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
757	Masjid Darul Falaq	Dusun Pangalloang Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
758	Masjid Al - Khaerat	Dusun Lambe Kayu Desa Bakka - bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
759	Masjid Nurul Huda	Dusun Bumiayu Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
760	Masjid Al - Khalfi	Dusun II Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
761	Masjid Darul Khair	Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
762	Masjid Syuhada	Dusun Tulung Rejo Desa Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
763	Masjid Nurul Tijarah	Komp. Pasar Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
764	Masjid Taqwa	Dusun Lasambe Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
765	Masjid Al - Ikhlas	Dusun 2 Baba bussu Desa Bussu Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
766	Masjid Lailatul Qadar	Dusun Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
767	Masjid Bukatul Al Mubaraka	Dusun Daala Desa Daala Timur Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
768	Masjid Hajaratul Akbar	Dusun Tangan Baru Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
769	Masjid Baetul Mubarakah	Dusun Padang Sari Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
770	Masjid Hj. Muhsana Tahir	Dusun Pangalloang Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
771	Masjid Miftakhul Khair	Dusun I Dakka Desa Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
772	Masjid Raudhatul Ambasyiah	Dusun Laliko Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
773	Masjid Nurul Ihsan	Lingk. Pappang Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
774	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Batupanga Desa Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
775	Masjid Jami' Al Ghazali	Dusun Kamp. Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
776	Mushallah Al Jabbar	Dusun Siratuang Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
777	Mushallah Muhlisina Lahuddin	Jln. Poros Kampung Baru Desa Padang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
778	Mushallah Al - Firdaus	Lingk. Pallis Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
779	MI. DDI Pulo Tangnga	Lingk. Pulo Tangnga Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
780	MTs. Bukit Marwah	Hl. Daeng Parakai Desa Bunga - bunga Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
781	MI. DDI Lemo Baru	Jln. Poros Lemo Baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
782	MI. Al Furqan Basseang	Jln. Poros Salupana Desa Duampanua Basseang Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
783	MTs. Mas' udiyah Wonomulyo	Jln. Padi Unggul 2 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
784	MI. Al Irsyad Rondongan	Dusun Rondongan Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
785	MI. Al Irsyad Leteang	Dusun Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
786	MI. Hikmat Al Ihsan Kalimbua	Jln. Poros Tutar Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
787	Ponpes Nahddlatul Ummah	Dusun Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
788	Ponpes Modern Darul Mahfudz	Jln. Maradia Tokape No. 101 Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
789	MI DDI Ringginan	Jln. Poros Matangga Desa Katimbang Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
790	MI. DDI Kurrak	Jln. Poros Kalimbua Desa Kurrak Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
791	Ponpes Salafiyah Al - Ihsan Kenje	Jln. Elang No. 10 Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
792	RA. HS. Muhdar Cabang Pasiang	Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
793	RA. HS. Muhdar Cabang Kurma	Jln. Poros Dusun Paredea Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
794	RA. HS. Muhdar Cabang Bonra	Dusun Bonra II Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
795	MI Pasar Baru	Jln. Poros Tinambung Limboro Desa Lekopaddis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
796	MI. DDI No. 361 Ugi Baru	Jln. Pendidikan No. 07 Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Poewali Mandar
797	MI. Baiturrahim	Lingk. Gernas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
798	MTs. Miftahul Jannah	Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
799	RA. Samasundu	Dusun Samasundu Desa Samasundu Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
800	MTs. DDI Pariangan	Dusun Pariangan Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
801	MTs. Nuhayah Pambusuang	Dusun Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
802	GTM Jemaat Gloria Balo - balo	Dusun Balo - balo Desa Salutambun Timur Kec. Buntumalangka' Kab. Mamasa
803	GPIT. Jemaat Bukit Doa	Lingk. Salumata Kel. Lakahang Kec. Lakahang Kab. Mamasa
804	GTM Bukit Zaitun Limba	Dusun Kampung Baru Desa Limba Debata Kec. Bambang Kab. Mamasa
805	GTM Jemaat Musafir Kadolang	Dusun Kadolang Desa Salutambun Barat Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
806	GTM Jemaat Tokka	Dusun Tokka Desa Salutambun Kec. Pana Kab. Mamasa
807	GTM Jemaat Elim Talondo	Lingk. Tondok Bakaru Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
808	GTM Jemaat Imanuel Bakeng	Lingk. Bakeng Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
809	GPdI Jemaat Tabaya	Dusun Tabaya Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
810	GTM Klasis Tamalantik	Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
811	GTM Jemaat Mawa'	Dusun Mawa' Desa Tabang Barat Kec. Tabang Kabang Kab. Mamasa
812	GTM Jemaat Eden Minanga	Dusun Minanga Desa Kanan Kec. Tandukkalua ' Kab. Mamasa
813	GTM Jemaat Bukitt Zaitun	Dusun Lambanan Desa Tadisi Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
814	GTM Jemaat Sion Orabua	Dusun Orobua Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
815	GTM Jemaat Kanan Roka' Dua	Dusun Kanan Roka' Dua Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
816	GTM Jemaat Bambang Buda	Dusun Buntu bulo Desa Bambang Buda Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
817	GKSS Jemaat Imanuel Aralle	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
818	GTM Jemaat Salumayang	Dusun Salumayang Desa Salumakanan Barat Kec. Rantebulahan Timur
819	GPdI Jemaat Victory	Dusun Litak Sakka' Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa
820	GTM Jemaat Musafir Puncak Indah	Jln. Poros Polewali Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa
821	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Padang - padang Desa Saludurian Kec. Mambi Kab. Mamasa
822	Masjid Al - Ikhlas	UPT Rano Trans 25 Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
823	Masjid Al - Muhsinin	Dusun Katakata Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
824	Masjid Attaubah	Dusun Ba' bapane Desa Panetean Kec. Aralle Kab. Mamasa
825	Masjid Nurul Hamalul	Dusun Saludurian Desa Katiluaan Timur Kec. Mambi Kab. Mamasa
826	Masjid Nurul Falah	Dusun Lembang Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
827	Mushallah SMA Negeri 1 Mamasa	Komp. SMA N 1 Mamasa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
828	YPK - GTM TK. Tunas Harapan	Dusun Tokkalaba Desa Salutambun Barat Kec. Buntu Makangka Kab. Mamasa
829	YPK - Paud Satria	Dusun Seppom Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
830	KTA - Gassing Salutambun	Dusun Salutambun Desa Salutambun Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
831	YPK - TK Kulammbu Malilin	Dusun Salumayang Desa Salumokanan Barat Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
832	Rumah Adat. Tongkonan Kondo	Dusun Tokka Desa Salutambun Kec. Pana Kab. Mamasa
833	Masjid Al Ikhlas	Dusun Meolaan Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
834	Masjid Al Muhajrin	Dusun Bukit Asri Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu
835	Masjid An – Nur	Dusun Loppung Desa Taranggi Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
836	Masjid Al – Hijrah	Dusun Kali Kuma Desa Sipakainga Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
837	Masjid Jabal Resky Matangtasi	Lingk. Bulu Maya Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
838	Masjid Dakhlal Jannah	Dusun Bulu Tambaga desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
839	Masjid Al – Muhajirin	Dusun Polewali Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
840	Masjid Raudhatul Jannah	Dusun Batukasoro Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
841	Masjid Ar-Rahman	Dusun Anjare Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
842	Masjid Nurul Taqrim	Dusun Kasalai Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
843	Mushallah Al Khairat	Dusun Lambara Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu
844	GMPU Jemaat Pasangkayu	Lingk. Martajaya Kel. Martajaya Kab. Pasangkayu
845	GMPU Jemaat Oikumene Sion PT. Letawa	Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
846	GPIB Pelita Baras	Dusun Motu Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu
847	GSJA Shalom Martajaya	Jln. Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
848	Gereja Bakal Jemaat Meolaan	Dusun Meolaan Desa Benggaulu Kec.. Dapurang Kab. Pasangkayu
849	Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Salupangi	Dusun Kumboli Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu
850	GK. Stasi Santa Maria	Dusun Baras IV Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
851	Pura Panti Pangeran Tangkas Kori Agung	Dusun Taharai Desa Balanti Kec Baras Kab Pasangkayu
852	Pondok Pesantren Thoriqul Ulum	Desa Tirta Buana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
853	Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an Abu Huraerah	Dusun Peburo Desa Ako Kec. Pasngkayu Kab. Pasangkayu
854	Pondok Al Qur'an Al Jariyah	Jln. Gatot Subroto Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
855	Ponpes. Takhfidz Qur' an Al Madani	JLN. Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasamgkayu
856	Masjid Nurul Jihad	Dusun Mambi Desa Salule' bo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
857	Masjid Nurul Qalbi	Dusun Alla - alla Desa Babana Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
858	Masjid Al - Khairat	Dusun Benggaulu Timur Desa Benggaulu Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
859	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Tasantung Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
860	Masjid Al - Mukhlisin	Dusun Tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
861	GBT. Jemaat Tobadak VII	Dusun Sidomukti Desa Saloadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
862	GBT. Jemaat Tobadak V	Jln. Rambutan Desa Sulobaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
863	GK. Jemaat Tasantung	Dusun Tasantung Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
864	GPdl. Jemaat Nanakan	Dusun Nanakan Desa Sertanamaju Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
865	PW. GBT Sulawesi Barat	Jln. Tobadak Raya Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah

No	Calon Penerima	Alamat
866	Pondok Pengajian Manakib Jawahirul Maani	Jln. DukuDusun Nusa Rinjani Desa Sulobaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
867	Masjid Al - Mubarakah	Dusun Sarampu Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
868	Masjid Jabal Nur	Dusun Peburru Desa Peburru Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
869	Mushallah As - Syukur	Kantor Camat Desa Parabu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
870	PMII Cabang Mamuju	Jln. Andi Endeng Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
871	GKSB Jemaat Rantepata	Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
872	GPIT Jemaat Bahtera Saludango	Dusun Saludango Desa Pammulukang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
873	GTM Jemaat Talaya	Dusun Talaya Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
874	IPPM - Leling Raya	Jln. H. Baharuddin Lopa (BTN Binanga) Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
875	Majelis Taklim Aswajah Muslimat NU	Jln.Martadinata Lingk.RT.02 Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju
876	Majelis Taklim Baburrayyan	BTN Graha Pelabuhan Permai Maspol Lingk. Simboro Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
877	Majelis Ta'lim Attaqwa Simbuang	Lingk Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
878	Majelis Ta'lim Miftahul Rahma	Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
879	MAS. DDI Sumare	Dusun Sumare Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
880	Masjid Al - A'raf	Lingk. Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
881	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Tamemongga Desa Tamemongga Kec. Tommo Kab. Mamuju.,.,.
882	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Tamala Desa Lebani Kec. Tapalang Kab. Mamuju
883	Masjid Al - Muawanah	Lingk. Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
884	Masjid Al - Muhajirin Tajimane	Dusun Tajimane Desa Taan Kec. Tappalang Kab. Mamuju
885	Masjid Al - Waarist Saka	Dusun Nipa-nipa Desa Lebani Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju
886	Masjid Al -Asri	Lingk. Grahamadani Simboro Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
887	Masjid Al Mani	Dusun Toppong Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
888	Masjid Al Munawwarah	Lingk. Galung Selatan Kel. Galung Selatan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
889	Masjid Al-Ikhlas	Dusun Panggalo Desa Batu Pannu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.,.

No	Calon Penerima	Alamat
890	Masjid Al-Muhajirin	Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju
891	Masjid Al-Muhajirin	Peuweang Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
892	Masjid Ar Rahman	Dusun Pati'di Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
893	Masjid Ar-Ridha	Desa Tammejarra Kec Tommo Kab. Mamuju
894	Masjid Babul Jannah	Dusun Rumbakan Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
895	Masjid Babussalam	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
896	Masjid Besar Nurul Yaqin	Lingk. Galung Kel. Galung Kec. Taapalang Kab. Mamuju,
897	Masjid Darul Falah	Lingk. Lombang - lombang Utara Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
898	Masjid Jabal Nur	Dusun Ende Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
899	Masjid Jabal Nur Puri Mutiara II	Lingk. Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
900	Masjid Lumika	Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
901	Masjid Marmatunnajah	Jln. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
902	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Salupangi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
903	Masjid Nurul Hilal.	Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
904	Masjid Nurul Islam Simbuang II	Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
905	Masjid Nurul Mu'min Kombiling	Desa Kombiling Kec. Kalukku Kab. Mamuju
906	Masjid Nurul Taqwa	Dusun rantedunia Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
907	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Galung Utara Kel. Galung Kec. Tappalang Kab. Mamuju
908	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Lambang-lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
909	Masjid Nurul Taqwa	Lingk. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
910	Masjid Sayyida Darul Mu'minin	Jln. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
911	Masjid Taqwa	Dusun Batupapan Barat Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
912	MI Ainun Sahab Landi	Jln.H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
913	MI Miftahul Ulum Toabo	Lr.10 Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
914	MIS. Nurul Imam Bunde	Jln.Teratai Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju
915	Mts. Al-Furqan Sese	JI Pendidikan Sese Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
916	Mts. Amaliyah Guppi Mamuju	Jln.Ir H. Djuanda No.03 Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
917	Mts. Muslimina Keang	Dusun Tahuppo Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
918	Mushollah AI - Ikhlas	Lingk. Galung Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
919	Ormas Muslimah Wahdah Wilayah Sulbar	Jln. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
920	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Prov. Sulawesi Barat	Jln. Ngurah Rai Kompleks Pura Stana Dewata Mamuju
921	Perwakilan BWI Prof. Sulbar	Jln.H. A. M. Pattana Endeng Lt. 1Masjid Baitul Anwar Kec. Simboro Kab. Mamuju
922	Ponpes Syahid AI - Hidayah	Desa Belang - belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
923	PPGTM. Jemaat Elim Lebbeng	Lingk. Lebbeng Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
924	Pura Ped	Dusun Tulung Agung Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
925	PW Muslimat NU Provinsi Sulawesi Barat	Jln.Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju.,
926	RA. Babul Jannah	Lingk. Katapi Kel. Bebangka Kec. Kalukku Kab. Mamuju
927	TPA AI - Aqsha	Jln. Andi pettana Endang Kompleks Legenda Lingk.Tegar Kel. Simboro.Kec Simboro Kab. Mamuju
928	TPA AI - Fatih Nur	Dusun Limbong Bassi Desa Salletto Kec. Simboro Kab Mamuju
929	TPA AI - Hidayah	Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kab. Mamuju
930	TPA AI - Hidayah	Lingk. Talange Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
931	TPA AI - Hidayah	Dusun Taloba Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
932	TPA AI - Hidayah	Dusun Pambutungan Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju
933	TPA AI - Ikhlas	Lingk. Galung Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
934	TPA AI - Khairat	Jln. Puatta Karema No.29 Kab. Mamuju
935	TPA Ar - Rahman	Lingk. Makkarama Kel. Bebangka Kec. Kalukku Kab. Mamuju
936	TPA Ar - Rahman	Dusun Pala'da Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
937	TPA Arrahman	Lingk. Bulutakkang Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
938	TPA Babul Jannah	Kompleks Pasar Baru Lingk. Salukarema Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
939	TPA Manakarra II Mamuju	Jln. Abdul Khalik Pua Tjabai Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
940	TPA Nurul Hijrah	Dusun Lolonggauang Desa Labuangrano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
941	TPA Nurul Ilmi ,.	Jln. Poros Sese Bia Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
942	Gereja Bala Keselamatan Korps Pinora'a	Dusun Watubete Desa Wulai Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
943	Gereja Bala Keselamatan Tapalili	Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
944	GTM Jemaat Funju	Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
945	MA. Nurul Jadid	Jln. Pendidikan No.10 Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
946	Masjid Abdullah Bin Ja'far	Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
947	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Todang Jaya Desa Bambaira Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
948	Masjid Al - Qubah	Dusun Jono Timur Desa Tikke Kec. Tikke Rayaa Kab. Pasangkayu
949	Masjid Al Ikhwan	Dusun Benggaulu Tua Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
950	Masjid Al-Fatih	Jln. Trans SulawesiDusun Matua Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
951	Masjid Al-Hijrah	Dusun Tobajo Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab Pasangkayu
952	Masjid Al-Hijrah	Dusun Lione Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
953	Masjid Al-Muhajirin	Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
954	Masjid Al-Munawarah	Dusun Morobio Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
955	Masjid An - Nur SMA Neg. 2 Pasangkayu	Dusun Tanjung Babia Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
956	MA As - Syam Lebani	Lingk. Lebani Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
957	Gereja Kibaid Jemaat Aralle	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka' Kab. Mamasa
958	GBI Star Karossa	Jln. Poros Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
959	Gereja Kibaid Jemaat Tobadak II	Dusun Singayoka Kel. Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
960	Madrasah Ibtidaiyah	Dusun Muhajir Desa Tasokko Kec. Korossa Kab. Mamuju Tengah
961	Masjid Al Biruni	Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
962	Masjid Babussalam	Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
963	MPW. GBT Sulawesi Barat	Jln. Tobadak Raya Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
964	Mts Ar Razaq	Jln. Trans SulawesiDusun Salupangkan Tua Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.
965	Mts Nurul Muttakin Topoyo	Dusun Topoyo Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
966	Mts. Al Chaeriyah Budong- Budong.	Jln. Pue Ballung Patulana Kec. Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah.

No	Calon Penerima	Alamat
967	Pesantren DDI Al-Ma'arif Topoyo.	Topoyo 2 Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
968	TPA Al - Ibrahim.	Dusun Salupangkan II Desa Bambamanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
969	TPQ Al- Imam Ashim	Dusun Batu Karampuang Desa Tasokko Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.
970	Masjid At - Taqwa.	Desa Pedanda Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu.
971	Masjid Attauba.	Dusun Duri Bohe Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
972	Masjid Babul Khair.	Dusun Siparappe Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu.
973	Masjid Muhammad Hasan Assyauli.	Dusun Sendana Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu.
974	Masjid Nur Samsi.	Dusun Sukamaju Desa Sipakainga Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu.
975	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
976	Masjid Nurul Jihad.	Dusun Kusumanegara Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu.
977	MI Darus Sholihin NW	Dusun Barubu Desa Lilimori Kec. Bulu Taba Kab. Pasangkayu.
978	Mushollah SDN Bulu Bonggu	Dusun Duri Bohe Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu.
979	Mushollah UPTD SMAN 1 Lariang	Jln. Pendidikan Desa Batu Matoru Kec. Lariang Kab. Pasangkayu.
980	Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Pasangkayu	Jln. Bukit Husada II Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
981	Pura Merajapati	Dusun Tri moro Desa Tirta Buana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu.
982	GK. ST. Karolus Borromeus	Dusun Salubeang Desa Banea Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
983	GK. ST. Michael Tabone	Jln. Poros Kel. Tabone Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
984	GK. ST. Santo Yohanes Makula'	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka' Kab. Mamasa
985	GK. ST. Yoseph Suami Maria	Dusun Ratte Desa Batanguru Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
986	GPdI Jemaat Elim Pekandungan	Lingk. Purroma' Utama Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
987	MA AL Chaeriyah	Dusun Leba - Leba Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
988	Madin Al - Hikmah	Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
989	Madin Takmiliyah Al - Hikmah	Dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
990	Majelis Al - Istiqamah	Lingk. Tammaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
991	Majelis Taklim Al - Hikmah	Dusun Tubo Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
992	Majelis Taklim An Nur Samuane Sambaine	Kecamatan Banggae Kab. Majene
993	Majelis Taklim Binaan Penyuluh Agama Islam	Jln. Sultan Alauddin No.2 Somba Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
994	Majelis Taklim Naimatul Aini	Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
995	Majelis Ta'lim Al-Mujahidah	Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene
996	Majelis Taqlim Nur Annisa	Dusun Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
997	Majelis Taqlim Qurrata Ayyun	Dusun Tinggas Timur Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
998	Mas Ddi Taukong	Dusun Taukong Desa Tande allo Kec. Ulumanda Kab. Majene
999	Masjid Al - Muhajirin.,.	Dusun Labu Labuang Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
1000	Masjid Al -Asri	Dusun Camba -camba Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
1001	Masjid Al-Aqsa	Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene
1002	Masjid Al-Mu'min	Dusun Taraweki Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
1003	Masjid Babul Jannah	Dusun Tamajannang Desa Ulumanda Kec. Ulumanda Kab. Majene
1004	Masjid Baitul Hamdani	RW 003 Deteng- Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene
1005	Masjid Baitul Izzah	Lingk. Camba Utara Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
1006	Masjid Baitul Mukminin Mosso	Dusun Mosso Timur Desa Lombong Timur Kec. Malunda Kab. Majene
1007	Masjid Jabalul Istiqamah	Dusun Rawang Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
1008	Masjid Jami Taqwa	Dusun Balombong Selatan Desa Balombong Kec. Pamboang Kab. Majene
1009	Masjid Jami Ussisa Alattaqwa	Ratte Bila Desa Tallambalao Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1010	Masjid Jami Ussisa Alattaqwa	Ratte Bila Desa Tallambalao Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1011	Masjid Nurul Bayan	Dusun Tanisi Desa Mekatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
1012	Masjid Nurul Falah	Dusun Puttada Selatan Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene
1013	Masjid Jabal Nur Lotu	Dusun Lotu Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1014	GPIT Jemaat Mentari Lakahang	Lingk. Purroma' Utama Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1015	GPIT. Jemaat Bukit Sion Kabae	Dusun Kabae Desa Kabae Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
1016	GPIT. Jemaat Ora Et Labora	Dusun Sumua' Desa Buntu Malangka' Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
1017	GPIT. Jemaat Palliabu	Dusun Palliabu Desa Malatinro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1018	GPIT. Jemaat Sola Fide Sodangan	Dusun Sodangan Desa Buntu Malangka Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
1019	GPIT. Jemaat Taora	Dusun Taora Desa Taora Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
1020	GTM Jemaat Bahtra Pongka Ka' da	Jln. PorosDusun Ka' da Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1021	GTM Jemaat Betania	Dusun Bukit Indah Desa Minanga Kec. Bambang Kab. Mamasa
1022	GTM Jemaat Bukit Kasih Buangin	Dusun Buangin Desa Buangin Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
1023	GTM Jemaat Cabang Bongabosa	Dusun Katihandusan Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
1024	GTM Jemaat Ebenheiser Kahaleang	Dusun Lalampeu' Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka. Kab. Mamasa
1025	GTM Jemaat Efrata Talambai	Dusun Talambai Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1026	GTM Jemaat Galilea	Dusun Karang Kalua' Desa Bombong Lambe' Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1027	GTM Jemaat Galung - Galung	Dusun Galung - galung Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
1028	GTM Jemaat Gunung Hermon	Jln. Poros Tawalian Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1029	GTM Jemaat Hosana Lakahang	Lingk. Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1030	GTM Jemaat Imanuel	Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
1031	GTM Jemaat Imanuel Maroangin	Dusun Maroangin Desa Paladan Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1032	GTM Jemaat Maranatha	Dusun Sendana Desa Mehalaan Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1033	GTM Jemaat Masuppu	Dusun Masuppu Desa Masuppu Kec. Tabang Kab. Mamasa
1034	GTM Jemaat Mongkok	Dusun Mongkok Desa Aralle Timur Kec. Bumal Kab. Mamasa
1035	GTM Jemaat Orabua	Dusun Orabua Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1036	GTM Jemaat Rantekamiri	Dusun Rantekamiri Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1037	GTM Jemaat Sion Betteng	Dusun Betteng Desa Mellangkana Padang Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1038	GTM Jemaat Sion Pangandaran.	Dusun Parrantak Desa Pangandaran Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1039	Majelis Taklim Al - Irsyad	Dusun Salualo Desa Salualo Kec. Mambi Kab. Mamasa
1040	Mas Al Fauziah talippuki	Pepana Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
1041	Masjid Al - Jabbar	Dusun Pebi Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa
1042	Masjid An - Nur Salualo	Desa Salualo Kec. Mambi Kab. Mamasa
1043	Masjid An Nur.	Dusun Salusibino Desa Salu Alo Kec. Mambi Kab. Mamasa
1044	Masjid Besar Nurul Ihsan Mambi.	Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
1045	Masjid Jabal Nur.	Lingk. Maerang 1 Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa
1046	Masjid Nurul Al - Taqwa Messawa	Kel. Messawa Kec. Messawa Kab. Mamasa
1047	Masjid Nurul Hidayah Makula	Dusun Sareppe Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
1048	Masjid Nurul Iman	Dusun Saluhussu Desa Kalakbe Kec. Aralle Kab. Mamasa
1049	Masjid Nurul Yaqin.	Jln. Pembangunan Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1050	Mis Al - Ma' arif Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1051	Mis Sambaho	Tokoning Desa Pamoseang Kab. Mamasa
1052	Mts DDI Tapalinna	Jln. Poros Mambi Aralle Desa Tapalinna Kec. Mambi Kab. Mamasa
1053	MTSS Pamoseang Pangga	Desa Pamoseang PanggaDusun SaluMasimbo Kec. Aralle Kab. Mamasa
1054	Panti Asuhan Hudallinnas Indonesia	Jln. Poros Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
1055	Ponpes Miftahul Risalah	Jln Poros Tatoa Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1056	Ponpes Miftahurrisalah Tatoa	Dusun Tatoa Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1057	Ponpes Nurul Padilah Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1058	PPGTM Jemaat Bukit Damai Mongko'	Dusun Mongko' Desa Aralle Timur Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
1059	PPGTM Jemaat Elim Salutambun	Dusun Ratte Desa Salutambun Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
1060	PPGTM Jemaat Tarinding	Dusun Tarinding Desa Talopa' Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1061	RA Nurul Imam Soppeng	Dusun Soppeng Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
1062	RA Perwanida Nurul Ikhsan.	Kec. Mambi Kab. Mamasa
1063	RA. Al Fauziah	Kel. Talipuki Kab. Mamasa
1064	Rumah Adat Mappurondo.	Dusun Salubalo Desa Salubalo Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
1065	SDS Uhaidao	Jln. Poros UhaidaoDusun Kurasa Kec. Aralle Kab. Mamasa
1066	SMKS Awara Aralle	Dusun Tapakok Desa Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
1067	SMPS 001 Unggulan Indona Lembang	Dusun Galung Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1068	SMPS Indona Lembang Pedou	Dusun Pedou Desa Salubanua Selatan Kec. Mambi Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
1069	Tk. Alhijrah Salukero	Dusun Salukero Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
1070	TPA Al Furqan Kurasa	Dusun Kurasa Kec. Aralle Kab. Mamasa
1071	TPA Nurul Taqwa Tangngauma	Dusun Tangngauma Desa Uhai Lanu Kec. Aralle Kab. Mamasa
1072	TPA Sondong Layuk	Desa Sondong Layuk Kec. Mambi Kab. Mamasa
1073	TPA Taqmirul Baitang.	Desa Aralle Utara Kec. Aralle Kab. Mamasa
1074	Masjid Nurul Hidayah.	Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
1075	Masjid Nurul Ihsan.	Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
1076	Masjid Nurul Mudzakirin	Jl Abu Salam Rusung-rusung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
1077	Masjid Nurul Mujahidin.	Lingk. Binanga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
1078	Masjid Nurul Taufiq.	Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene
1079	Masjid Nurul Wahyu Labuang.	Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1080	Masjid Nurul Wahyu Labuang.	Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1081	Masjid Raya Raudhatul Abidin.	Jln. Mayjen Azis Bustam No.7 Kec. Banggae Kab. Majene
1082	MI Guppi Saleppa.	Jln.K.H. Zainal Abidin Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene
1083	MI. Al Fatah Siyang	Dusun Siyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
1084	Mis Al - Amanah Pangaleroang	Desa Tallang Balao Kec. Tammeroda Sendana Kab. Majene
1085	Mis LSMMI Paga	Jln Poros Majene Mamuju Km 94 Dusa Paga Desa Mekkatta Selatan kec. Malunda Kab. Majene
1086	MTs. DDI Majene	Jln. KH. Muh. Shaleh Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majeje
1087	Mts.Guppi Pesuloang	Jln. Poros Majene - Mamuju Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
1088	Mushallah Jabal Nur.	Dusun Belalang Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
1089	Mushollah Al - Amin	Dusun Sumakuyu Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
1090	Pondok Tahfidz Al - Qur'an Imam Syafii	Dusun Salu Lemo Desa Tandeallo Kec. Ulumanda Kab. Majene
1091	Ponpes Miftakhul Ilmi DDI Seppong	Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammerodo Kab. Majene
1092	RA. Purwanda Nurul Wahyu	Dusun Lasuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1093	TPA Al - Bayan	Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
1094	TPA AI - Ghufuran.	Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene
1095	TPA AI - Hidayah.	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
1096	TPA AI - Hidayah.	Desa Mekatta SelatanDusun Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene
1097	TPA AI - Ikhlas.	Lingk. Rangas Tamalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1098	TPA AI - Muhajirin.	Dusun Tatibajo Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
1099	TPA AI -Asri	Dusun Camba -camba Desa Tallu Banua Kec Sendana Kab. Majene
1100	TPA AI -Ikhlas	Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
1101	TPA AI Iqra	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1102	TPA AI-Muttaqin	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1103	TPA Attaqwa	Dusun Pallang - pallang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
1104	TPA Kalilamungan	Dusun Tarupa Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
1105	TPA Nurhidayah	Lingk. Rangas Pabesoang Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1106	TPA Nurul Hikma	Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1107	TPA Nurul Iman	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
1108	TPA Nurul Yaqin	Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
1109	TPA Ulil Maryam	Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
1110	Majelis Taklim Khairunnisa	Dusun Kalummang Desa Kalummang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1111	Masjid Abadan	Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
1112	Masjid Agung Syuhada	Jln. Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
1113	Masjid AI - Anshar.	Dusun Samma Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
1114	Masjid AI - Ikhlas.	Dusun Alla Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
1115	Masjid AI - Ittihad.	Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab . Polewali Mandar
1116	Masjid AI - Kausar	Dusun Leppan Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
1117	Masjid AI - Munawwara	Dusun Tabassala Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1118	Masjid AI Ikhlas	Dusun 3 Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
1119	Masjid Al Ikhlas Al Madina	Dusun Rea Jaya Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polman Mandar
1120	Masjid Al Mujahidin Suppungan	Dusun suppungan Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
1121	Masjid almubarakah	Perumahan Ampi Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman
1122	Masjid ANNur	Dusun 4 Matalie Desa Nepo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1123	Masjid Ansharullah	Dusun Pusu Desa Pao-pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1124	Masjid Arrahim	Dusun Sepang Desa Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
1125	Masjid As - Shofiyah	Lingk Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
1126	Masjid Babul Jannah	Dusun Rappogading Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1127	Masjid Babussalam	Dusun Banu - banua Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1128	Masjid Dharul Huda	Dusun Ponorogo Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1129	Masjid Jabal Nur Lapadang.	Dusun Pusu Desa Pao-pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1130	Masjid Jami' Anni'mat Sosso	Dusun Sosso Desa Saragian Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1131	Masjid Jami Darussalam	Dusun Kalummang Desa Kalummang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1132	Masjid Jami Darussalam	Dusun Lembang - lembang Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1133	Masjid Jami Nurul Amin	Dusun Jombang Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1134	Masjid Jami Nurul Amin	Kp. Kandemeng RT 02 RW 02 Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
1135	Masjid Jami Raudhatul Dzakirin	Dusun I Lekopadis Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
1136	Masjid Jami Raudhatul Muttaqin	Dusun Kekkes Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
1137	Masjid Jannatu Adnin	Dusun Saleko Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
1138	Masjid Juang	Dusun Parapa Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
1139	Masjid Miftahunnur	Dusun Mambu Barat Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1140	Masjid Miftakhul Khaer	Dusun Palece Desa Ogi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
1141	Masjid Nurul Furqan	Dusun Puspo Desa Peburru Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
1142	Masjid Nurul Huda	Dusun Rura Desa gattungan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
1143	Masjid Nurul Huda	Dusun Morro Desa Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1144	Masjid Nurul Huda Ululilli	Dusun Pussendana Desa Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Manda
1145	Masjid Nurul Ihsan	Dusun IV Mekar Rejo Desa Banato Rejo Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
1146	Masjid Nurul Iman	Dusun Bonra II Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1147	Masjid Nurul Iman	Dusun Lembang Desa Tandassura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1148	Masjid Nurul Izzah	Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1149	Mts. Marhalim Campalagian	Jln. Poros Kampung Baru Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1150	Masjid Nurussyuhada	Jln. Poros Tutar Mambu Timur Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1151	Masjid Nuruttaubah	Jln. Budi Utomo Komp. Kodim Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
1152	Masjid Qalbun Salim Salujerre	Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1153	Masjid Raudatul Jannah	Jln.BulubawangDusun Rea Jaya Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
1154	Masjid Raudhatul Jannah	Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1155	Masjid Raudhatul Muttaqin	Dusun II Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
1156	Masjid Raudhatussajidin	Dusun Tara Ujung Desa Segerang Kec. Mapilli Kab Polewali Mandar
1157	Masjid Umar Bin Khatab	Dusun Passairang Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1158	Masjid Yathalattaf	Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1159	MI DDI Alu	Jln. Makam Ammana Pattowali Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
1160	MI DDI Penatangan	Jln. Pendidikan No. 1Dusun Penatangan Desa Patambanuan Kec. Bulo Kab. Poman
1161	MI DDI Pulele	Kel. Darma Kel. Polewali Kab. Polewali Mandar
1162	MI Ma'arif Sarampu	Jln.Masjid Al Ma'arif Sarampu Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
1163	Yayasan Al - Faruq Bulu	Dusun Lombangan Desa Sepporraki Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
1164	MI. Al Wasilah Ihing	Jln. Poros Matangnga Desa Ihing Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
1165	MI. DDI Madatte	Lingk. Madatte Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
1166	MI. DDI No. 366 Bumi Ayu	Jln. Poros Kebun Sari Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1167	TPA Nurul Yaqin	Lingk. Pokko Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
1168	MI. Nursaleha Napo - napo	Dusun Napo - napo Desa Todang - todang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1169	TPA AI – Ikhlas	Dusun Tanatakko Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali
1170	MTs. AI Balad Kamade	Jln. Poros Tubbi Kamande Desa Polewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
1171	Stimik Hasan Sulus	Jln. Gatot Soebroto No. 1 Sidoali Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1172	MTs. AI Fajrin Tangnga – tangnga	Jln. Poros Pulliwa Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
1173	MTs. AI Irsyad Leteang	Kampung Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
1174	MTs. An Nur Baiturrahim	Lingk. Gernas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
1175	Mts. Annur Baiturrahim Seppong	Lingk. Seppong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
1176	MTs. Darul Iman Wattaqwa Tibun	Jln. Poros Tibun Desa Besoangin Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
1177	MTs. DDI Penatangan	Jln. Pendidikan No. 1 Desa Penatangan Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
1178	RA. AI - Waqiah Tutar	Jln. Poros Tubbi Desa Polewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
1179	MTs. DDI Polewali	Jln. Kemakmuran Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
1180	Mushallah AI Fatih	Komp. DDI Dakka Desa Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
1181	MTs. Khatibul Umam Kurma	Jln. Poros S. Mengga Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
1182	MTs. Ma' arif Patu Limboro	JLN. Poros Saragian Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
1183	RA Ar-Ridwan Panggalo	Jln.Poros Ongko Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1184	Mushallah Nurul Hasni Ibrahim	Komp. DDI Kurak Desa Kalimbua Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
1185	Ponpes Syekh Hasan Yaman	Jln. Syekh Hasan Yaman Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
1186	Pondok Pesantren Al-Jariyah	Jln. Poros Majene Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
1187	Ponpes Nahdlatul Ulum Sarampu	Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
1188	Majelis Taklim Nurul Muttahidah	Jln. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.Mamuju
1189	Masjid Baitul Ikhsan	Jln. Husni Thamrin Lingk. Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
1190	Masjid Jami Al – Amin	Dusun Lombang Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
1191	Masjid Tanwirul Hadi	Dusun Blitar Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
1192	Masjid Miftahul Hasanah	Dusun Kadaila desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1193	GKSI. Jemaat Sola Gratia Taname	Dusun Taname Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1194	Gereja Kibaid Jemaat Popenga	Dusun Durikumba Timur Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1195	Gereja Kibaid Jemaat Popenga	Dusun Durikumba Timur Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1196	Pura Kerta Buana	Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1197	Gereja Beth - El Tabernakel	Jln. Rambutan Desa Salubaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1198	Gereja Jemaat Hosiana Salu Kalando	Dsn Yudha Mulya Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1199	Gereja Jemaat Imanuel Tobadak Tanjung	Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1200	GTM Jemaat Eben Haezer	Dsn Sumber Makmur Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1201	Asosiasi Pendeta Indonesia Kab. Mamuju Tengah	Jln. Tobadak Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1202	GKSI Jemaat Agape Kilo II	Dsn Harapan Kilo II Desa Kalkullasan Kec. Tommo Kab. Mamuju Tengah
1203	GKSI Jemaat Elshaddai Bojo	Dsn Benteng Situru Desa Bojo Kec. Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah
1204	Gereja Beth - El Tabernakel Jemaat Tobadak IV	Dsn Batuparigi Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1205	Gereja Beth - El Tabernakel Jemaat Tobadak VII	Dsn Sidomukti Desa Saloadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1206	Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Jemaat Diaspora Tobadak IV	Dusun Tapakannai Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1207	GTM Jemaat Polo Camba	Desa Polo Camba Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
1208	Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Jemaat El - Shadai Bojo	Dusun Benteng Situru Desa Bojo Kec. Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah
1209	Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Air Hidup Tanjung	Dusun Mesakada Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1210	GTM Jemaat Oikoumene Polohu	Dusun Polohu Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah
1211	GTM Jemaat Tamatiku	Dusun Tobadak Desa Bambadaru Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1212	GTM Jemaat Tobadak II	Dusun Tengkosituru Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1213	GTM Jemaat Betania Kondosapata	Dusun Batupapan Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1214	GBI Sikamase	Dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1215	Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Jemaat Shalom Baitang	Dusun Baitang Desa Tamajara Kec. Tommo Kab. Mamuju Tengah
1216	Gereka Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) Jemaat Tobadak II	Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah

No	Calon Penerima	Alamat
1217	Mushollah Nurul Iman	Dsn Sumber Rejeki Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1218	Masjid Nurul Hasan	Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kab. Mamuju Tengah
1219	Masjid An - Nur	Dusun Buana Sakti Desa Polo Lereng Kec. Pangale Kec. Mamuju Tengah
1220	Masjid Nurul Huda Tallungallo	Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1221	Masjid Baiturrobaniah	Desa Salubaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
1222	Masjid Al – Muhajirin	Dsn Rahmatu Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1223	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Kire Utara Desa Kire Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
1224	Musholla Jabal Khoir	Jln. Poros Trans Sulawesi Dusun Bulu Baru Desa Lara Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1225	MA Annadhah Pontanakayang	Desa Pontakayang Kec. Budon-Budong Kab. Mamuju Tengah
1226	MTs. Annadhah Pontakayang	Desa Pontakayang Kec. Budon-Budong Kab. Mamuju Tengah
1227	RA. Babussalam	Dusun Bum Sari Desa Tankou Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
1228	Yayasan Al Arsyad	Desa Salulekbo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
1229	Pondok Pesantren Ar-Razaq	Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1230	TPA Al - Munawwarah	Dusun Muhajir Timur Desa Tasokko Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
1231	GKII Eben Heazer Sumarorong	Dusun Minanga Desa Tadisi Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
1232	Gereja Jemaat Nafiri Tarinding	Desa Talopak Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1233	GPIT. Jemaat Gunung Karmel	Dusun Siso Desa Salurindu Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
1234	GTM Jemaat Nazaret Parak	Dusun Parak Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1235	Rumah Adat Tumangke	Desa Orobua Timur Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1236	Gedung Paud Sirumpun	Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa
1237	GBI Jemaat Kalama	Desa Kalama Kec. Tabang Kab. Mamasa
1238	Badan Pekerja Majelis Jemaat Lamba Klasis Tadokalua	Lamba, Desa Tadolakua Kec. Tabang Kab. Mamasa
1239	GBI Jemaat Taupe	Banta Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1240	GTM Badan Pekerja Majelis Jemaat Lamba Buka	Buka Desa Kalama' Kec. Tabang Kab. Mamasa
1241	Gereja Jemaat Zaitun Pana Pana Klasi Sesenapadang	Pana - Pana Desa Marampan - Orabua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
1242	Gereja Jemaat Kalvari	Desa Marampan Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
1243	Gereja Jemaat Imanuel Kanan Roka II	Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
1244	GTM Jemaat Musyafir Tamalantik	Tamalantik Kab. Mamasa
1245	GTM Klasis Sindagamanik I Jemaat Tondokbakaru	Desa Sindagamanik Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
1246	Gereja Jemaat Parsa Ulumambi	Desa Ulumambi Kec. Bambang Kab. Mamasa
1247	Gereja Jemaat Sapankale	Desa Minanga Timur Kec. Nosu Kab. Mamasa
1248	GTM Jemaat Sion Ladi Klasis Tabang	Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
1249	GTM Jemaat Bukit Doa Kallan Baru	Kallang Baru Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamasa
1250	GTM Jemaat Salu Bamba	Dusun Salu Bamba Desa Banua Ada' Kec. Bonehau Kab. Mamuju
1251	GTM Jemaat Sion Tabulahan	Desa Tabulahan Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1252	GTM Jemaat Imanuel Peu	Timoho Desa Peu Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1253	GBI Jemaat Matana Mamasa Kota	Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1254	Persekutuan Kaum Bapak GTM (PKB-GTM)	Jln Demmatande No 17 Kantor Sinode GTM Kel. Mamasa
1255	GTM Jemaat Buntu Tanete Klasis Sindagamanik 1	Buntu Tanete Desa Parondobulawan Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa
1256	GTM Taman Kanak-Kanak Fajat Salulossa	Lingk. Salullosa Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1257	Gereja Pantekosta Tabernakel "Kristus Kasih" Sindagamanik	Sindagamanik Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa
1258	GKSS KP Imanuel Aralle Timur	Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka' Kab. Mamasa
1259	GBI Batumatombon	Desa Mellangkena Padang Kec. Sesena Padang Kab. Mamasa
1260	GTM Jemaat Getsemani Limba	Desa Limba Debata Kec. Bambang Kab. Mamasa
1261	GTM Majelis Sinode	Kampung Baru Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1262	GTM Jemaat Bukit Zaitun	Dusun Posi' Padang Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa
1263	GPT. Jemaat GPT Lakahang	Jln. Poros Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
1264	GTM Jemaat Manggi'	Lingk. Nosu Kel. Nosu Kec. Nosu Kab. Mamasa
1265	GTM Jemaat Siloam Tumtum	Dusun Tumtum Desa Bambang Timur Kec. Bambang Kab. Mamasa
1266	Pura Giri Kusuma Puncak	Dusun Rano Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
1267	Masjid Ar - Rahman SDK	Dusun Tondek 1 Desa Ralleanak Kec. Aralle Kab. Mamasa
1268	Masjid Al - Muhajirin Salukepopok	Desa Salukepopok Kec. Bambang Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
1269	Masjid Al - Muhajirin At - Thahirin	Pasar Makau Desa Buntu buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa
1270	Masjid At - Taqwa Mambi	Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
1271	Masjid Al - Mutakabbir	Dusun Muara Uhaideo Desa Uhaideo Kec. Aralle Kab. Mamasa
1272	Masjid Nurul Huda Malabo	Jln. Poros Polewali Mamasa Desa Malabo Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa
1273	Masjid Al - Furqan Kurasa	Dsn Kurasa Desa Uhaideo Kec. Aralle Kab. Mamasa
1274	Masjid Nurul Taqwa Tangngauma	Dusun Tangngauma Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa
1275	Masjid Al-Hijrah Salukero	Desa Uhaideo Kec. Aralle Kab. mamasa
1276	Masjid Al - Fatah	Dusun Saluali Desa Pamoseang Kec. Mambi Kab. Mamasa
1277	Masjid Al - Furqan	Dusun Galung Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1278	Mas Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1279	Mis Palado	Dusun Palado Desa Indobanua Kec. Mambi Kab. Mamasa
1280	Madrasah Aliyah Swasta Uhaideo	Jln. Poros SakukeroDusun Salukero Desa Salukero Kec. Aralle Kab. Mamasa
1281	SMPS Unggulan Tapalina	Jln. Poros Mamasa MamujuDusun Dambu Desa Tapalinda Kec. Mambi Kab. Mamasa
1282	RA. Al-Furqon	Dusun galung Desa salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1283	Tk Sinar Harapan Ranteberang	Desa Ranteberang Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
1284	Tk Sukbuan Ada' Kebanga	Desa Kebanga Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
1285	Tk Satu Atap Sodangan	Desa Buntumalangka Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
1286	TK Azzahra Pedou	UPT Rano Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
1287	TPA Al - Iqra	Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
1288	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat shalom	Dusun Lestari Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1289	Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Eben Haezer Pasangkayu	Jln. Andi Depu Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1290	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat persaudaraan Motu	Dusun Lembah Makmur Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu
1291	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Persaudaraan Pasangkayu	Dusun Labuang Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1292	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El-Shadai	Dusun Mekarsari Desa Tirtabuana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
1293	Maha Gotra Pasek Sanak Sapta RSI	Desa lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
1294	Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Kalibamba	Dsn Kalimbamba Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
1295	Gereja Sidang Jemaat Allah Talitakum Bambaapu	Dsn Bambaapu Desa Pakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1296	Gereja Sidang Jemaat Allah Pemulihan Moi Hijrah	Dsn Moi Hijrah Desa Pakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1297	Gereja Bala Keselamatan	Dsn Saluraya Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1298	Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia (GKKA-I) Jemaat Palu Cabang Bambamone	Dusun Bambamone Desa Gunungsari Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1299	Gereja Bala Keselamatan Korps Purnama Baru	Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
1300	Gereja Bala Keselamatan Korps Tosonde	Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
1301	Gereja Bala Keselamatan Korps Duria Sulapa	Dusun Duria Sulapa Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
1302	GPIB Jemaat Sinar Kasih Baras	Desa Karave Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1303	Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Rosari Baras IV	Dusun Lestari Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1304	Gereja Bala Keselamatan Pos Bambarano	Desa TumpaureDusun Kalindapu Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
1305	Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU) Jemaat Imanuel Afd. Alfa	Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Kab. Pasangkayu
1306	Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Shalom	Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1307	Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Persaudaraan Pasangkayu	Jln. Andi Bandaco Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1308	Gereja Toraja Jemaat Sion Pasangkayu	Jln. Pemancar TVRI Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1309	Pura Dalem Penataran Ped	Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1310	Pura Tri Purwa Saksi Jagat Natha	Desa Parabu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
1311	Pura Giri Nata Loka	Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1312	Pura Pengeruak Lumbung Merta	Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1313	Pura Panti Bendesa Manik Mas	Desa Karave Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1314	Pura Puncak Natha	Desa Bajawali Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
1315	Pura Pasek Gel Gel	Desa Bajawali Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
1316	Pura Penataran Dalem Ped	Dusun Taharani Desa Balanti Kec. Baras Kab. Pasangkayu
1317	Pura Agung Giri Mukti	Desa Karave Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
1318	Pura Griya Pasupati Tanaya	Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
1319	Pura Giri Kusuma	Dusun Taharai Desa Balanti Kec. Baras Kab. Pasangkayu
1320	Pura Kayangan Tri Pramana	Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
1321	Mahagotra Pasek Sanak Sapta RSI Provinsi Sulawesi Barat	Jln. Gusti Nurah Rai Kab. Pasangkayu
1322	Masjid Al - Ikhlas	Jln. RA. Kartini Pasangkayu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1323	Masjid Al - Istiqomah	Jln. Trans Sulawesi Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
1324	Masjid Al-Munawarah	Dusun Palipi Tenggo Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
1325	Masjid Ar - Rahaman	Dusun Burangge Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu

Tabel 6.3 Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2026

No	Calon Penerima	Alamat
1	JAHARIA	Tondo Desa Pallis Kec. Balanipa
2	RASA	Tondo Desa Pallis Kec. Balanipa
3	BAKHTIAR	Alu Kec. Alu Kab. Polman
4	KAMING	Tondo Desa Pallis Kec. Balanipa
5	MAWARDI	Alu Kec. Alu Kab. Polman
6	ST. HALIJA	Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman
7	NURSYAM	Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman
8	HADISA	Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman
9	ISA BELA	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
10	KACO	Tondo Desa Pallis Kec. Balanipa
11	AHMAD	Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman
12	ARSYAD	Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polman
13	RAODA	Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman
14	BASRI	Tu'bulutang Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman
15	HABIL	Tu'bulutang Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman
16	MOHARDI	Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman
17	HASBI HAMID	Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polman
18	HERMAN R	Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polman
19	ABDUL MALIK	Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polman
20	SU'BANG	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
21	ST AMINAH	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
22	ELSA	Samasundu Kec. Limboro Kab. Polman
23	ST. ASIA	Samasundu Kec. Limboro Kab. Polman
24	RAMLI	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
25	HARIALANG	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
26	SARTINI	Petoosang Kec. Alu Kab. Polman
27	ROSMAWATI	Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman

No	Calon Penerima	Alamat
28	SANTI	Pao-Pao Kec. Alu Kab. Polman
29	UEP Keluarga	Mamuju
30	HARTI	Kalumammang Kec. Alu Kab. Polman
31	Kepala Keluarga Kategori Miskin Ekstrem	Provinsi Sulawesi Barat
32	KUBE SIMBAR	Desa Napo, Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
33	KUBE AIDIL ALU	Kec. Alu Kab. Polman
34	KUBE ELI	Kec. Tinambung Kab. Polman
35	KUBE SEPPONG	Kec. Alu Kab. Polman
36	KUBE LENA	Kec. Alu Kab. Polman
37	KUBE LAIKO	Kec. Campalagian Kab. Polman
38	KUBE KALUMAMMAN	Kec. Alu Kab. Polman
39	KUBE MASAGENA	Kecamatan Tinambung Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat
40	KUBE USAHA MASAGENA	Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
41	KUBE KIOS ARSILA	Desa Laliko, Kec. Campalagian Kab. Polman
42	KUBE CAHAYA BATULAYA	Desa Batulaya, Kec. Tinambung, Kab Polewali Mandar
43	KUBE BENGKEL MOTOR PERJUANGAN BUMIAYU	Kab. Polewali Madar Provinsi Sulawesi Barat
44	KUBE DAUN PUSU	Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar
45	KUBE BERU - BERU	Desa Galung Tuluk, Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
46	KUBE MARANNAJ	Desa Galung Tuluk Kec Balanipa, Kab.Polewali Mandar
47	KUBE MUTIARA	Desa Sabang Subik Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
48	KUBE MILENIAL NETT	Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
49	KUBE DAPUR HJ. NUR	Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar
50	KUBE IKAN UNIK	Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar
51	KUBE ANUGERAH	Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar
52	KUBE IKAN LESTARI	Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab Polewali Mandar
53	KUBE BERKAH	Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polman Mandar
54	KUBE SIARIOI	Kel. Limboro kec. limboro, Kab Polewali Mandar
55	KUBE PAPAMULA	Desa lembang2 kec. Limboro, Kab. Polewali mandar
56	KUBE DALLE DISIOLAI	Dusun Kabajawa Desa Samasundu Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar
57	KUBE SIWALI PARRI	Kel. Limboro kec Limboro, Kab. Polewali Mandar
58	KUBE TOMADIO PUTRI	Kel. Pappang kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
59	KUBE AIDI MUEBEL	Dusun Bakkola Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar
60	KUBE MEUBEL IKEL	Kel. Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
61	KUBE KIOS MITRA SEJAHTERA	Dusun Sidondo Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu,
62	KUBE BURA'LEMO	Desa Kenje Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
63	KUBE SISENGA	Dusun Paahang Desa Padang Timur Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
64	KUBE SIASAYANGI	Desa Padang Timur kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
65	KUBE BAROKAH	Dusun Beru-beru Desa Ongko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
66	KUBE ALLWATTA	Kel. Balanipa Kec Balanipa, Kab. Polewali Mandar
67	KUBE SINSENGA	DESA NAPO KEC. LIMBORO, KAB. POLEWALI MANDAR
68	KUBE PAMMASE	DESA KARAMA KEC TINAMBUNG, KAB. POLEWALI MANDAR
69	KUBE SIRUA	DESA TENGGELANG KEC LUYO, KAB. POLEWALI MANDAR
70	KUBE MARASA	DESA TANGNGA-TANGNGA KEC. TINAMBUNG, KAB. POLEWALI MANDAR
71	KUBE TELUK MANDAR	DESA TANGNGA-TANGNGA KEC. TINAMBUNG, KAB. POLEWALI MANDAR
72	KUBE ALLO PAINDO	DESA LEMBANG-LEMBANG KEC. LIMBORO, KAB. POLEWALI MANDAR
73	KUBE ANUGRAH	Desa Kenje Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
74	KUBE RAHMAT	DESA SURUANG KEC. CAMPALAGIAN, KAB. POLEWALI MANDAR
75	KUBE PEOLO	DUSUN PANDENG BULUAN KEL. BALANIPA KEC. BALANIPA, KAB. POLEWALI MANDAR
76	KUBE SANGANA	DESA NAPO KEC. LIMBORO, KAB. POLEWALI MANDAR
77	KUBE SAHABAT	DESA PUCADI KEC. LUYO, KAB. POLEWALI MANDAR
78	KUBE SIPATTONGAN	KEL. BATUPANGA, KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR
79	KUBE BERKAH FAJAR	LINGKUNGAN LAMARIAN KEL. BALANIPA KEC BALANIPA, KAB. POLEWALI MANDAR
80	KUBE JAYA BERSAMA	DESA MOMBI KEL. ALU, KEC. ALLU KAB. POLEWALI MANDAR
81	KUBE CAHAYA	DESA BONDE KEC. CAMPALAGIAN, KAB. POLEWALI MANDAR
82	KUBE RANDAM	DESA TANGA-TANGA KEC TINAMBUNG, KAB. POLEWALI MANDAR
83	KUBE TABOTTU	DESA TANGNGA-TANGNGA KEC TINAMBUNG, KAB. POLEWALI MANDAR
84	KUBE MALOLO	DESA PAO-PAO KEC. ALLU, KAB. POLEWALI MANDAR
85	KUBE DEWI LAUT	DESA TANGNGA-TANGGA Kec. tinambung, Kab. Polewali Mandar
86	KUBE TOMANURUNG	Desa lapeo kec. campalagian Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
87	KUBE MANIS	Desa lembang-lembang kec. limboro polman, Provinsi Sulawesi Barat
88	KUBE TANDU TEDONG KATITTING	Desa tandung kec. tinambung Polman, Provinsi Sulawesi Barat
89	KUBE PUTRI KANDOOD	Desa leko pa'dis kec. tinambung Polman, Provinsi Sulawesi Barat
90	KUBE MESA RUPA	Desa piriang tapiko kec. tutar Polman, Provinsi Sulawesi Barat
91	KUBE CAHAYA ZIKIR	Desa piriang tapiko kec. tutar Polman, Provinsi Sulawesi Barat
92	KUBE MAWARRA	Desa tenggelang kec. luyo Polman, Provinsi Sulawesi Barat
93	KUBE MAMMIS	Desa batupanga'daala kec. luyo, Provinsi Sulawesi Barat
94	KUBE LEMBANG GOLLA	Lingkungan palippis Kelurahan Batu Panga Kec Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
95	KUBE CANGGORENG	Kelurahan batu panga kec Luyo polman, Provinsi Sulawesi Barat
96	KUBE LAWAR	Desa Tamangngalle kec Balanipa kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat
97	KUBE TUNAS KELAPA	desa sabang subik kec. balanipa kab polman, Provinsi Sulawesi Barat
98	KUBE MATA ALLO	Desa Sabang Subik Kec Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
99	KUBE RUA PEOLO	Desa Sabang Subik kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
100	KUBE MASARRI	Desa Padang keec Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
101	KUBE GEMILANG	Dusun Londong desa Peburru kec Tutar Kab Polman, Provinsi Sulawesi Barat
102	KUBE MAPIA	Desa Kalumammang, Kec. Allu Kab. Polewali Mandar
103	KUBE SAMUSENGANA	Desa Kalumammang, Kec. Allu Kab. Polewali Mandar
104	KUBE SAMURAPPENA	Desa Kalumammang, Kec. Allu Kab. Polewali Mandar
105	KUBE ASSUKRAN	Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
106	KUBE BERSINAR	Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
107	KUBE MARANNU.	Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
108	KUBE BERKAH...	Desa Napo, Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
109	KUBE TENUN LEMBANG-LEMBANG	Desa Lembang-lembang, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
110	KUBE MARIO	Desa Palece, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar
111	KUBE METAMORFOSIS	Dusun Pasa, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
112	KUBE PARASALAMA	Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
113	KUBE MESA KANNEQ	Desa Panyampa, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar
114	KUBE SIBALI PARRI	Dusun Pahang, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Manda
115	KUBE DAENG SILA	Desa Iembang-Iembang, Kec. limboro, Kab. Polewali Mandar
116	KUBE KELUARGA MANDIRI	Desa Peburru, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar
117	KUBE SIPAKARAYA SANREKO	Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar
118	KUBE SIRANNUANG.	Desa Lamariang Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar
119	KUBE MALAYUR	Desa Napo, Kec. limboro, Kab. Polewali Mandar
120	KUBE MENUNGGU	Desa Napo, Kec. limboro, Kab. Polewali Mandar
121	KUBE USAHA BARU...	Desa Napo, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar
122	KUBE SINAR GALUNG TULUK	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar
123	KUBE BERKAH SUBIK	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar
124	KUBE MAWAR	Dusun Lingk. Sasende Dhua desa/kel. Kel. Malunda Kec. Malunda, Kab. Majene
125	KUBE SEJAHTERA	Dusun Bonde-bonde Desa/kel. Bonde-bonde Kec. Tubo, Kab. Majene
126	KUBE TIGA PUTRI.	Dusun Sumakuyu Desa/kel. Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene
127	KUBE MAMMESA	Desa Karama Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar
128	KUBE UMUM	6 Kabupaten
129	KUBE RUMAH MAKAN AN-NUR	Lingk. Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
130	KUBE RESTI	Lingk. Simbuang 2 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
131	KUBE SEJAHTERA BERSAMA	Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
132	KUBE RAIHAN	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
133	KUBE HENNA	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
134	KUBE MAWAR	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
135	KUBE MEKAR JAYA	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
136	KUBE KELUARGA	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
137	KUBE AL-IKHLAS	Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
138	KUBE KIOS INAYAH	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
139	KUBE ASWAJA	Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
140	KUBE KIOS SEDERHANA	Dusun Dolongan Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
141	KUBE MAKMUR	Kel. Binanga Kec. Mamuju
142	KUBE KIOS MANDIRI	Desa Bambu Kec. Mamuju
143	KUBE KIOS SOSSORANG	Kel. Binanga Kec. Mamuju
144	KUBE KIOS NURISMI	Kalukku Barat Kec. Kalukku kab. Mamuju
145	KUBE TAMPOTORA	Kel. Binanga Kec. Mamuju
146	KUBE PANGULU	Desa Bambu Kec. Mamuju
147	KUBE BAMBU MUDA	Desa Bambu Kec. Mamuju
148	KUBE TO GALUNG	Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
149	KUBE FAUSAN MOTOR	DESA AHU KECAMATAN TAPALANG BARAT, Provinsi Sulawesi Barat
150	KUBE MALOLO	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
151	KUBE BERKAH BAKERY	Desa Salukayu Kec. Papalang Kab. Mamuju
152	KUBE KIOS ALDO	Desa Botteng Utara Kec. Simboro Kab. Mamuju
153	KIOS FAJRIN	Desa Bebangga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
154	KUBE SUMBER REJEKI	Desa takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
155	KUBE MESAPATTUJU	Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
156	KUBE MESAKADA	Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
157	KUBE SIOLA MAPIA	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
158	KUBE PEMUDA KREATIF	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
159	KUBE KIOS SUKRAN	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
160	KUBE KIOS LAUDRY KITA	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
161	KUBE PEMUDA MANDIRI	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
162	KUBE KIOS SIAMASEI	Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
163	KUBE PESONA	Desa Salubarana Kec. Sampaga Kab. Mamuju
164	KUBE KIOS ABYAN	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
165	KUBE KIOS NAYA	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
166	KUBE KIOS MILQA	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
167	KUBE KIOS ANNA	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
168	KUBE KIOS INDRA	Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
169	KUBE SUMBER REZEKI	Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
170	KUBE RAJENDRA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
171	KUBE TANDI PANNA	Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
172	KUBE JAJANAN ANAK MUDA BERKAH	Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
173	KUBE KIOS KEMBAR	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
174	KUBE KIOS ABIL	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. mamuju
175	KUBE KIOS FAUZAN	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. mamuju
176	KUBE SIOLATA	Desa Salukayu Kec. Papalang Kab. Mamuju
177	KUBE MANDIRI BOTTENG	Desa botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju
178	KUBE MANAKARRA	Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
179	KUBE AISHA NUR	Desa kasambang Kec. tapalang Kab. mamuju
180	KUBE KIOS RAFI	Desa Bambu Kec. mamuju Kab. mamuju
181	KUBE TALINTING	Desa Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju
182	KUBE TALINTING	Desa Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju
183	KUBE SEHATI	Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
184	KUBE SAMUSENGA'NA	Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
185	KUBE PARIA	Desa Bambu Kec. mamuju Kab. Mamuju
186	KUBE PAKAKITA	Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
187	KUBE TANETE	Desa Bambu Kec. mamuju Kab. Mamuju
188	KUBE SONDOANG INDAH	Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
189	KUBE KASTARA	Desa kasambang Kec. tapalang Kab. mamuju
190	KUBE MARENDENG	Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
191	KUBE NURUL SAYUR	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
192	KUBE TAKAPA INDAH	Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
193	KUBE BUNGA TERATAI	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
194	KUBE SIRUMPUNG	Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
195	KUBE MAMMESA	Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
196	KUBE INNAKIYA	Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
197	KUBE MELATI	Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
198	KUBE RANGAS POANG	Kec. Simboro Kab. Mamuju
199	KUBE LEPA-LEPA	Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
200	KUBE BATU BIRA	Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
201	KUBE BERSAMA SAHABAT	Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
202	KUBE BINTANG SEJATI	Desa Batupannu Kec. Mamuju Kab. Polman
203	KUBE TOSITURU	Desa Batupannu Kec. Mamuju Kab. Polman
204	KUBE HARAPAN RESKI	Desa Batupannu Kec. Mamuju Kab. Polman
205	KUBE OTI-OTI	Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
206	KUBE ANNISA	Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
207	KUBE KESINAMBUNGAN	Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
208	KUBE BAJAK	Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
209	KUBE IRZAN MOTOR	Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
210	KUBE KARYA BERSAMA	Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
211	KUBE SALU LEBUTTANG	Desa Limbong Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
212	KUBE SIULU	Desa Limbong Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
213	KUBE AIRIN SALON	Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
214	KUBE KALAI PADANG	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
215	KUBE CLARA	Dusun Tamalea Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
216	KUBE USAHA BERKAH	Dusun Paniki Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
217	KUBE USAHA RUSMAN	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
218	KUBE USAHA JENI	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
219	KUBE PEPPOLEANG DALLE	Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kab. Mamuju
220	KUBE ES KELAPA MALOLO	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
221	KUBE SAUDARA	Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju
222	KUBE IZZAN FOOD & DRINK	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
223	KUBE SIOLA MALAQBI	Desa Saludengen Kec. Tommo Kab. Mamuju
224	KUBE MATOTTONG	Desa Kalonding Kec. Sampaga Kab. Mamuju
225	KUBE MADALLE	Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
226	KUBE RERA BERSATU	Desa Ulusalu Kec. Pana Kab. Mamasa
227	KUBE ME'ME DERBY	Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa
228	KUBE PASANG LAMBE	Beang Desa Sapan Kec. Pana Kab. Mamasa
229	KUBE SIKAMASE	Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa
230	KUBE PAMUMBUN	Desa Mehalaan Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
231	KUBE TRIGONA TAMENO	Dusun Kanan Desa Taupe Kec. Mamasa
232	KUBE TANDUNG SIKAMASE	Dusun Tandung Desa Bakadisura Kec. Tabang Kab. Mamasa
233	KUBE BUNGIN	Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
234	KUBE TERNAK JAYA	Rantebuda Desa Rambusaratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa
235	KUBE USAHA SEJAHTERA	Lingk Pebusu Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
236	KUBE USAHA BERSAMA	Desa Bonde bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
237	KUBE SIAMASEI	Desa Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
238	KUBE USAHA MAWAR	Lingk. Pebusu Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
239	KUBE MUTIARA	lingk. Palipi Soreang Kel. Palipi Soreang Kec. Banggae.

No	Calon Penerima	Alamat
240	KUBE SIAMASEI	Porendeang kel. Babbabulo kec. Pamboang Kab. Majene
241	KUBE SIPATUO	Porendeang kel. Babbabulo kec. Pamboang Kab. Majene
242	KUBE TANGGELANG	Kec. Luyo Kab. Polman
243	KUBE BARU LUYO	Kec. Luyo Kab. Polman
244	KUBE PETOOSANG INDAH	Kec. Alu Kab. Polman
245	Kelompok Pembudidaya Lebah Madu Trigona	Desa Taupe, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
246	LKS PD SLB LUTANG	Majene
247	LKS PD SLB LUTANG	Majene
248	LKS AMANAH AISIYIAH	Jl. Ahmad Kirang, Lingkungan Tunda
249	LKS MIFTAHUL HIDAYAH	Lingkungan Talumung
250	LKS Timbu Paraban	Mamasa
251	Kube Sipakainga	Kab. Majene, Pamboang, Bonde Utara
252	LKS Maju Malaqbi	Jl. Lingkungan Kappung Tangnga
253	LKS Siola Mario	Kompleks BTN Marwah 9
254	LKS AL-MUNAWWARAH	Dusun Salutalawar
255	LKSA HARAPAN KASIH	Dusun Bali
256	LKS LUKMANUL HAKIM	Dusun Palasari, RT.01
257	LKS ASHABUL KAHFI	AKO
258	LKS PD SLB LUTANG	Majene
259	LKS Campaloga	Mamuju
260	LKS MIFTAHUL HIDAYAH	Lingkungan Talumung
261	LKS AMANAH AISIYIAH	Jl. Ahmad Kirang, Lingkungan Tunda
262	LKS AL-MUTARAHAMAH	Jl. Masjid Syuhada
263	LKS AL-BALAD	Jl. Poros Tubbi Taramanu No.3
264	LKS NURUL ILMI	Jl. Polohu, Dusun Karondang
265	LKS AWALUDDIN	Jl. Santri No.1
266	LKS LUKMANUL HAKIM	Dusun Palasari, RT.01
267	LKSA HARAPAN KASIH	Dusun Bali
268	LKSA ANTHIOKIA	Jl. Pasir Putih
269	LKS AL-MUNAWWARAH	Dusun Salutalawar

Tabel 6.4 Daftar Calon Penerima Bantuan Keuangan Tahun 2026

No	Calon Penerima	Alamat
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju	Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Mamuju
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	Jalan Gatot Subroto Nomor 59, Majene
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Jalan Manunggal Nomor 11, Polewali
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa	Jalan Poros Mamasa-Polewali, Mamasa
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Jalan Andi Pandoco Nomor 1, Pasangkayu
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Jalan Tammauni Pue Ballung, Tobadak
7	Pemerintah Desa Taan	Kantor Desa Taan
8	Pemerintah Desa Pasma Mambu	Kantor Desa Pasma Mambu
9	Pemerintah Desa Tanete Batu	Kantor Desa Tanete Batu
10	Pemerintah Desa Bakka-Bakka	Kantor Desa Bakka Bakka

No	Calon Penerima	Alamat
11	Pemerintah Desa Arjo Sari	Kantor Desa Arjo Sari
12	Pemerintah Desa Orobua	Kantor Desa Orobua
13	Pemerintah Desa Galeson	Kantor Desa Galeson
14	Pemerintah Desa Paladan	Kantor Desa Paladan
15	Pemerintah Desa Orobua Timur	Kantor Desa Orobua Timur
16	Pemerintah Desa Ambopadang	Kantor Desa Ambopadang
17	Pemerintah Desa Rante Puang	Kantor Desa Rante Puang
18	Pemerintah Desa Tubbi	Kantor Desa Tubbi
19	Pemerintah Desa Satenetean	Kantor Desa Satenetean
20	Pemerintah Desa Ratte	Kantor Desa Ratte
21	Pemerintah Desa Besoangin	Kantor Desa Besoangin
22	Pemerintah Desa Orobua Selatan	Kantor Desa Orobua Selatan
23	Pemerintah Desa Piriang Tapiko	Kantor Desa Piriang Tapiko
24	Pemerintah Desa Malangkena Padang	Kantor Desa Malangkena Padang
25	Pemerintah Desa Malimbong	Kantor Desa Malimbong
26	Pemerintah Desa Peburru	Kantor Desa Peburru
27	Pemerintah Desa Marampan Orobua	Kantor Desa Marampan Orobua
28	Pemerintah Desa Taloba	Kantor Desa Taloba
29	Pemerintah Desa Pollewani	Kantor Desa Pollewani
30	Pemerintah Desa Malabo	Kantor Desa Malabo
31	Pemerintah Desa Arabua	Kantor Desa Arabua
32	Pemerintah Desa Sindagamanik	Kantor Desa Sindagamanik
33	Pemerintah Desa Besoangin Utara	Kantor Desa Besoangin Utara
34	Pemerintah Desa Parondobulawan	Kantor Desa Parondobulawan
35	Pemerintah Desa Tamalantik	Kantor Desa Tamalantik
36	Pemerintah Desa Poda	Kantor Desa Poda
37	Pemerintah Desa Mannababa	Kantor Desa Mannababa
38	Pemerintah Desa Taramanu Tua	Kantor Desa Taramanu Tua
39	Pemerintah Desa Mesakada	Kantor Desa Mesakada
40	Pemerintah Desa Ballabatu	Kantor Desa Ballabatu
41	Pemerintah Desa Tonyaman	Kantor Desa Tonyaman
42	Pemerintah Desa Pambe	Kantor Desa Pambe
43	Pemerintah Desa Kuajang	Kantor Desa Kuajang
44	Pemerintah Desa Salurano	Kantor Desa Salurano
45	Pemerintah Desa Paku	Kantor Desa Paku
46	Pemerintah Desa Talimbung	Kantor Desa Talimbung
47	Pemerintah Desa Mirring	Kantor Desa Mirring
48	Pemerintah Desa Kanan	Kantor Desa Kanan
49	Pemerintah Desa Batetangnga	Kantor Desa Batetangnga
50	Pemerintah Desa Tadokalua	Kantor Desa Tadokalua
51	Pemerintah Desa Mammi	Kantor Desa Mammi
52	Pemerintah Desa Tabang Barat	Kantor Desa Tabang Barat
53	Pemerintah Desa Kaleok	Kantor Desa Kaleok
54	Pemerintah Desa Masupu	Kantor Desa Masupu
55	Pemerintah Desa Amola	Kantor Desa Amola
56	Pemerintah Desa Kalama	Kantor Desa Kalama
57	Pemerintah Desa Rea	Kantor Desa Rea
58	Pemerintah Desa Bakadisura	Kantor Desa Bakadisura
59	Pemerintah Desa Salukona	Kantor Desa Salukona
60	Pemerintah Desa Tapango	Kantor Desa Tapango
61	Pemerintah Desa Rappang	Kantor Desa Rappang

No	Calon Penerima	Alamat
62	Pemerintah Desa Mokallang	Kantor Desa Mokallang
63	Pemerintah Desa Dakka	Kantor Desa Dakka
64	Pemerintah Desa Masoso	Kantor Desa Masoso
65	Pemerintah Desa Batu	Kantor Desa Batu
66	Pemerintah Desa Saluassing	Kantor Desa Saluassing
67	Pemerintah Desa Riso	Kantor Desa Riso
68	Pemerintah Desa Salubulo	Kantor Desa Salubulo
69	Pemerintah Desa Palatta	Kantor Desa Palatta
70	Pemerintah Desa Salukadi	Kantor Desa Salukadi
71	Pemerintah Desa Tapango Barat	Kantor Desa Tapango Barat
72	Pemerintah Desa Kurrak	Kantor Desa Kurrak
73	Pemerintah Desa Salukepopok	Kantor Desa Salukepopok
74	Pemerintah Desa Bussu	Kantor Desa Bussu
75	Pemerintah Desa Ulumambi Barat	Kantor Desa Ulumambi Barat
76	Pemerintah Desa Tuttula	Kantor Desa Tuttula
77	Pemerintah Desa Limbadebata	Kantor Desa Limbadebata
78	Pemerintah Desa Tanete Tomba	Kantor Desa Tanete Tomba
79	Pemerintah Desa Rantebulahan	Kantor Desa Rantebulahan
80	Pemerintah Desa Salubanua	Kantor Desa Salubanua
81	Pemerintah Desa Sondonglayu	Kantor Desa Sondonglayu
82	Pemerintah Desa Tapalina	Kantor Desa Tapalina
83	Pemerintah Desa Sendana	Kantor Desa Sendana
84	Pemerintah Desa Pamosean	Kantor Desa Pamosean
85	Pemerintah Desa Selumaka	Kantor Desa Selumaka
86	Pemerintah Desa Bujung Manurung	Kantor Desa Bujung Manurung
87	Pemerintah Desa Salu Alo	Kantor Desa Salu Alo
88	Pemerintah Desa Indobanua	Kantor Desa Indobanua
89	Pemerintah Desa Saludurian	Kantor Desa Saludurian
90	Pemerintah Desa Onang	Kantor Desa Onang
91	Pemerintah Desa Tubo	Kantor Desa Tubo
92	Pemerintah Desa Ralle Anak	Kantor Desa Ralle Anak
93	Pemerintah Desa Onang Utara	Kantor Desa Onang Utara
94	Pemerintah Desa Panetean	Kantor Desa Panetean
95	Pemerintah Desa Tubo Selatan	Kantor Desa Tubo Selatan
96	Pemerintah Desa Uhailanu	Kantor Desa Uhailanu
97	Pemerintah Desa Bonde bonde	Kantor Desa Bonde bonde
98	Pemerintah Desa Aralle Utara	Kantor Desa Aralle Utara
99	Pemerintah Desa Tubo Tengah	Kantor Desa Tubo Tengah
100	Pemerintah Desa Uhaidaho	Kantor Desa Uhaidaho
101	Pemerintah Desa Baruru	Kantor Desa Baruru
102	Pemerintah Desa Tubo Poang	Kantor Desa Tubo Poang
103	Pemerintah Desa Ralleanak Utara	Kantor Desa Ralleanak Utara
104	Pemerintah Desa Buttu Baruga	Kantor Desa Buttu Baruga
105	Pemerintah Desa Pamoseang Pangga	Kantor Desa Pamoseang Pangga
106	Pemerintah Desa Kalabe	Kantor Desa Kalabe
107	Pemerintah Desa Aralle Selatan	Kantor Desa Aralle Selatan
108	Pemerintah Desa Hahangan	Kantor Desa Hahangan
109	Pemerintah Desa Rambusaratu	Kantor Desa Rambusaratu
110	Pemerintah Desa Osango	Kantor Desa Osango
111	Pemerintah Desa Lisuan Ada	Kantor Desa Lisuan Ada
112	Pemerintah Desa Lambanan	Kantor Desa Lambanan

No	Calon Penerima	Alamat
113	Pemerintah Desa Lembana Salulo	Kantor Desa Lembana Salulo
114	Pemerintah Desa Taupe	Kantor Desa Taupe
115	Pemerintah Desa Buntu Buda	Kantor Desa Buntu Buda
116	Pemerintah Desa Tondok Bakaru	Kantor Desa Tondok Bakaru
117	Pemerintah Desa Pebassian	Kantor Desa Pebassian
118	Pemerintah Desa Mambuliling	Kantor Desa Mambuliling
119	Pemerintah Desa Karama	Kantor Desa Karama
120	Pemerintah Desa Tangnga Tangnga	Kantor Desa Tangnga Tangnga
121	Pemerintah Desa Bombong Lambe	Kantor Desa Bombong Lambe
122	Pemerintah Desa Bubun Batu	Kantor Desa Bubun Batu
123	Pemerintah Desa Lekopadis	Kantor Desa Lekopadis
124	Pemerintah Desa Galung Lombok	Kantor Desa Galung Lombok
125	Pemerintah Desa Tandung	Kantor Desa Tandung
126	Pemerintah Desa Batulaya	Kantor Desa Batulaya
127	Pemerintah Desa Manipi	Kantor Desa Manipi
128	Pemerintah Desa Mamullu	Kantor Desa Mamullu
129	Pemerintah Desa Sapan	Kantor Desa Sapan
130	Pemerintah Desa Datubaringan	Kantor Desa Datubaringan
131	Pemerintah Desa Panura	Kantor Desa Panura
132	Pemerintah Desa Tallang Bulawan	Kantor Desa Tallang Bulawan
133	Pemerintah Desa Karaka	Kantor Desa Karaka
134	Pemerintah Desa Ulusalu	Kantor Desa Ulusalu
135	Pemerintah Desa Sepabatu	Kantor Desa Sepabatu
136	Pemerintah Desa Weri	Kantor Desa Weri
137	Pemerintah Desa Laliko	Kantor Desa Laliko
138	Pemerintah Desa Salutambun	Kantor Desa Salutambun
139	Pemerintah Desa Bonde	Kantor Desa Bonde
140	Pemerintah Desa Ulusalu Indah	Kantor Desa Ulusalu Indah
141	Pemerintah Desa Katumbangan Lemo	Kantor Desa Katumbangan Lemo
142	Pemerintah Desa Periang	Kantor Desa Periang
143	Pemerintah Desa Panyampa	Kantor Desa Panyampa
144	Pemerintah Desa Malatiro	Kantor Desa Malatiro
145	Pemerintah Desa Suruang	Kantor Desa Suruang
146	Pemerintah Desa Lampoko	Kantor Desa Lampoko
147	Pemerintah Desa Tabulahan	Kantor Desa Tabulahan
148	Pemerintah Desa Saluleang	Kantor Desa Saluleang
149	Pemerintah Desa Katumbangan	Kantor Desa Katumbangan
150	Pemerintah Desa Lapeo	Kantor Desa Lapeo
151	Pemerintah Desa Parappe	Kantor Desa Parappe
152	Pemerintah Desa Gandang Dewata	Kantor Desa Gandang Dewata
153	Pemerintah Desa Burana	Kantor Desa Burana
154	Pemerintah Desa Ongko	Kantor Desa Ongko
155	Pemerintah Desa Kenje	Kantor Desa Kenje
156	Pemerintah Desa Salubakka	Kantor Desa Salubakka
157	Pemerintah Desa Sumarrang	Kantor Desa Sumarrang
158	Pemerintah Desa Pangandaran	Kantor Desa Pangandaran
159	Pemerintah Desa Botto	Kantor Desa Botto
160	Pemerintah Desa Talopak	Kantor Desa Talopak
161	Pemerintah Desa Gattung	Kantor Desa Gattung
162	Pemerintah Desa Peu'	Kantor Desa Peu'
163	Pemerintah Desa Padang Timur	Kantor Desa Padang Timur

No	Calon Penerima	Alamat
164	Pemerintah Desa Timoro	Kantor Desa Timoro
165	Pemerintah Desa Padang	Kantor Desa Padang
166	Pemerintah Desa Lakahang Utama	Kantor Desa Lakahang Utama
167	Pemerintah Desa Lagi-Agi	Kantor Desa Lagi Agi
168	Pemerintah Desa Sidorejo	Kantor Desa Sidorejo
169	Pemerintah Desa Batang Uru	Kantor Desa Batang Uru
170	Pemerintah Desa Sumberejo	Kantor Desa Sumberejo
171	Pemerintah Desa Sasakan	Kantor Desa Sasakan
172	Pemerintah Desa Salumakki	Kantor Desa Salumakki
173	Pemerintah Desa Polio	Kantor Desa Polio
174	Pemerintah Desa Limbong	Kantor Desa Limbong
175	Pemerintah Desa Sandapang	Kantor Desa Sandapang
176	Pemerintah Desa Kondo Bulu	Kantor Desa Kondo Bulu
177	Pemerintah Desa Makkaliki	Kantor Desa Makkaliki
178	Pemerintah Desa Batu Makkada	Kantor Desa Batu Makkada
179	Pemerintah Desa Lasa'	Kantor Desa Lasa'
180	Pemerintah Desa Toabo	Kantor Desa Toabo
181	Pemerintah Desa Papalang	Kantor Desa Papalang
182	Pemerintah Desa Bonda	Kantor Desa Bonda
183	Pemerintah Desa Topore	Kantor Desa Topore
184	Pemerintah Desa Salukayu	Kantor Desa Salukayu
185	Pemerintah Desa Sukadamai	Kantor Desa Sukadamai
186	Pemerintah Desa Boda-Boda	Kantor Desa Boda Boda
187	Pemerintah Desa Sisango	Kantor Desa Sisango
188	Pemerintah Desa Batu Ampa	Kantor Desa Batu Ampa
189	Pemerintah Desa Bunde	Kantor Desa Bunde
190	Pemerintah Desa Kalonding	Kantor Desa Kalonding
191	Pemerintah Desa Tarailu	Kantor Desa Tarailu
192	Pemerintah Desa Sampaga	Kantor Desa Sampaga
193	Pemerintah Desa Tanambuah	Kantor Desa Tanambuah
194	Pemerintah Desa Salubarana	Kantor Desa Salubarana
195	Pemerintah Desa Losso	Kantor Desa Losso
196	Pemerintah Desa Tommo	Kantor Desa Tommo
197	Pemerintah Desa Campaloga	Kantor Desa Campaloga
198	Pemerintah Desa Buana Sakti	Kantor Desa Buana Sakti
199	Pemerintah Desa Tamemongga	Kantor Desa Tamemongga
200	Pemerintah Desa Tamejarra	Kantor Desa Tamejarra
201	Pemerintah Desa Rantemario	Kantor Desa Rantemario
202	Pemerintah Desa Malino	Kantor Desa Malino
203	Pemerintah Desa Kakullasang	Kantor Desa Kakullasang
204	Pemerintah Desa Leling	Kantor Desa Leling
205	Pemerintah Desa Kalepu	Kantor Desa Kalepu
206	Pemerintah Desa Sandana	Kantor Desa Sandana
207	Pemerintah Desa Leling Barat	Kantor Desa Leling Barat
208	Pemerintah Desa Leling Utara	Kantor Desa Leling Utara
209	Pemerintah Desa Saludengen	Kantor Desa Saludengen
210	Pemerintah Desa Botteng	Kantor Desa Botteng
211	Pemerintah Desa Saletto	Kantor Desa Saletto
212	Pemerintah Desa Sumare	Kantor Desa Sumare
213	Pemerintah Desa Botteng Utara	Kantor Desa Botteng Utara
214	Pemerintah Desa Tapandullu	Kantor Desa Tapandullu

No	Calon Penerima	Alamat
215	Pemerintah Desa Pati'di	Kantor Desa Pati'di
216	Pemerintah Desa Dungkait	Kantor Desa Dungkait
217	Pemerintah Desa Lebani	Kantor Desa Lebani
218	Pemerintah Desa Labuang Rano	Kantor Desa Labuang Rano
219	Pemerintah Desa Pasabu	Kantor Desa Pasabu
220	Pemerintah Desa Tanete Pao	Kantor Desa Tanete Pao
221	Pemerintah Desa Pangasaan	Kantor Desa Pangasaan
222	Pemerintah Desa Ahu	Kantor Desa Ahu
223	Pemerintah Desa Bonehau	Kantor Desa Bonehau
224	Pemerintah Desa Salutiwo	Kantor Desa Salutiwo
225	Pemerintah Desa Buttuada	Kantor Desa Buttuada
226	Pemerintah Desa Tamalea	Kantor Desa Tamalea
227	Pemerintah Desa Lumika	Kantor Desa Lumika
228	Pemerintah Desa Mappu	Kantor Desa Mappu
229	Pemerintah Desa Banuada	Kantor Desa Banuada
230	Pemerintah Desa Hinua	Kantor Desa Hinua
231	Pemerintah Desa Kinatang	Kantor Desa Kinatang
232	Pemerintah Desa Bala Balakang	Kantor Desa Bala Balakang
233	Pemerintah Desa Bala-Balakang Timur	Kantor Desa Bala Balakang Timur
234	Pemerintah Desa Sendana	Kantor Desa Sendana
235	Pemerintah Desa Banua Sendana	Kantor Desa Banua Sendana
236	Pemerintah Desa Letawa	Kantor Desa Letawa
237	Pemerintah Desa Sarude	Kantor Desa Sarude
238	Pemerintah Desa Palipi Soreang	Kantor Desa Palipi Soreang
239	Pemerintah Desa Maponu	Kantor Desa Maponu
240	Pemerintah Desa Sarjo	Kantor Desa Sarjo
241	Pemerintah Desa Kaluku Nangka	Kantor Desa Kaluku Nangka
242	Pemerintah Desa Tempaure	Kantor Desa Tempaure
243	Pemerintah Desa Kasoloang	Kantor Desa Kasoloang
244	Pemerintah Desa Bambaيرا	Kantor Desa Bambaيرا
245	Pemerintah Desa Sanjango	Kantor Desa Sanjango
246	Pemerintah Desa Martasari	Kantor Desa Martasari
247	Pemerintah Desa Salubiro	Kantor Desa Salubiro
248	Pemerintah Desa Batu Oge	Kantor Desa Batu Oge
249	Pemerintah Desa Pedanda	Kantor Desa Pedanda
250	Pemerintah Desa Kambunong	Kantor Desa Kambunong
251	Pemerintah Desa Malei	Kantor Desa Malei
252	Pemerintah Desa Suka Maju	Kantor Desa Suka Maju
253	Pemerintah Desa Jengeng Raya	Kantor Desa Jengeng Raya
254	Pemerintah Desa Benggaulu	Kantor Desa Benggaulu
255	Pemerintah Desa Pajalele	Kantor Desa Pajalele
256	Pemerintah Desa Lariang	Kantor Desa Lariang
257	Pemerintah Desa Lembah Hopo	Kantor Desa Lembah Hopo
258	Pemerintah Desa Makmur Jaya	Kantor Desa Makmur Jaya
259	Pemerintah Desa Tikke	Kantor Desa Tikke
260	Pemerintah Desa Kayu Calla	Kantor Desa Kayu Calla
261	Pemerintah Desa Kadaila	Kantor Desa Kadaila
262	Pemerintah Desa Lara	Kantor Desa Lara
263	Pemerintah Desa Tasokko	Kantor Desa Tasokko
264	Pemerintah Desa Karossa	Kantor Desa Karossa
265	Pemerintah Desa Sinabatta	Kantor Desa Sinabatta

No	Calon Penerima	Alamat
266	Pemerintah Desa Pangalloang	Kantor Desa Pangalloang
267	Pemerintah Desa Salulekbo	Kantor Desa Salulekbo
268	Pemerintah Desa Bambamanurung	Kantor Desa Bambamanurung
269	Pemerintah Desa Tappilina	Kantor Desa Tappilina
270	Pemerintah Desa Salupangkang IV	Kantor Desa Salupangkang IV
271	Pemerintah Desa Salupangkang	Kantor Desa Salupangkang
272	Pemerintah Desa Paraili	Kantor Desa Paraili
273	Pemerintah Desa Tabolang	Kantor Desa Tabolang
274	Pemerintah Desa Awo	Kantor Desa Awo
275	Pemerintah Desa Manyamba	Kantor Desa Manyamba
276	Pemerintah Desa Tammerodo Utara	Kantor Desa Tammerodo Utara
277	Pemerintah Desa Tallambalao	Kantor Desa Tallambalao
278	Pemerintah Desa Ulidang	Kantor Desa Ulidang
279	Pemerintah Desa Tammerodo	Kantor Desa Tammerodo
280	Pemerintah Desa Seppong	Kantor Desa Seppong
281	Pemerintah Desa Panggalo	Kantor Desa Panggalo
282	Pemerintah Desa Sulai	Kantor Desa Sulai
283	Pemerintah Desa Popenga	Kantor Desa Popenga
284	Pemerintah Desa Salutambung	Kantor Desa Salutambung
285	Pemerintah Desa Ulumanda	Kantor Desa Ulumanda
286	Pemerintah Desa Tanduallo	Kantor Desa Tanduallo
287	Pemerintah Desa Sambabo	Kantor Desa Sambabo
288	Pemerintah Desa Kabiraan	Kantor Desa Kabiraan
289	Pemerintah Desa Kayuangan	Kantor Desa Kayuangan
290	Pemerintah Desa Mekatta Selatan	Kantor Desa Mekatta Selatan
291	Pemerintah Desa Lombong Timur	Kantor Desa Lombong Timur
292	Pemerintah Desa Salutahongan	Kantor Desa Salutahongan
293	Pemerintah Desa Lombong Timur	Kantor Desa Lombong Timur
294	Pemerintah Desa Maliaya	Kantor Desa Maliaya
295	Pemerintah Desa Mekatta	Kantor Desa Mekatta
296	Pemerintah Desa Lombong	Kantor Desa Lombong
297	Pemerintah Desa Lombong	Kantor Desa Lombong
298	Pemerintah Desa Bambangan	Kantor Desa Bambangan
299	Pemerintah Desa Bukit Samang	Kantor Desa Bukit Samang
300	Pemerintah Desa Limbua	Kantor Desa Limbua
301	Pemerintah Desa Limboro Rambu-Rambu	Kantor Desa Limboro Rambu Rambu
302	Pemerintah Desa Tallubanua Utara	Kantor Desa Tallubanua Utara
303	Pemerintah Desa Parabu	Kantor Desa Parabu
304	Pemerintah Desa Kenangan	Kantor Desa Kenangan
305	Pemerintah Desa Bajawali	Kantor Desa Bajawali
306	Pemerintah Desa Singgani	Kantor Desa Singgani
307	Pemerintah Desa Kulu	Kantor Desa Kulu
308	Pemerintah Desa Batu Matoru	Kantor Desa Batu Matoru
309	Pemerintah Desa Bambakoro	Kantor Desa Bambakoro
310	Pemerintah Desa Bambu	Kantor Desa Bambu
311	Pemerintah Desa Karampuang	Kantor Desa Karampuang
312	Pemerintah Desa Pamboborang	Kantor Desa Pamboborang
313	Pemerintah Desa Adolang	Kantor Desa Adolang
314	Pemerintah Desa Bababulo	Kantor Desa Bababulo
315	Pemerintah Desa Bonde	Kantor Desa Bonde

No	Calon Penerima	Alamat
316	Pemerintah Desa Betteng	Kantor Desa Betteng
317	Pemerintah Desa Simbang	Kantor Desa Simbang
318	Pemerintah Desa Bonde Utara	Kantor Desa Bonde Utara
319	Pemerintah Desa Bababulo Utara	Kantor Desa Bababulo Utara
320	Pemerintah Desa Buttu Pamboang	Kantor Desa Buttu Pamboang
321	Pemerintah Desa Banua Adolang	Kantor Desa Banua Adolang
322	Pemerintah Desa Adolang Dhua	Kantor Desa Adolang Dhua
323	Pemerintah Desa Tinambung	Kantor Desa Tinambung
324	Pemerintah Desa Pesuloang	Kantor Desa Pesuloang
325	Pemerintah Desa Balombong	Kantor Desa Balombong
326	Pemerintah Desa Totolisi Sendana	Kantor Desa Totolisi Sendana
327	Pemerintah Desa Tallubanua	Kantor Desa Tallubanua
328	Pemerintah Desa Lalatedzong	Kantor Desa Lalatedzong
329	Pemerintah Desa Tadui	Kantor Desa Tadui
330	Pemerintah Desa Binanga	Kantor Desa Binanga
331	Pemerintah Desa Puttada	Kantor Desa Puttada
332	Pemerintah Desa Batu Pannu	Kantor Desa Batu Pannu
333	Pemerintah Desa Paminggalan	Kantor Desa Paminggalan
334	Pemerintah Desa Leppangang	Kantor Desa Leppangang
335	Pemerintah Desa Orobatu	Kantor Desa Orobatu
336	Pemerintah Desa Pundau	Kantor Desa Pundau
337	Pemerintah Desa Takandeang	Kantor Desa Takandeang
338	Pemerintah Desa Bela	Kantor Desa Bela
339	Pemerintah Desa Tampak Kurra	Kantor Desa Tampak Kurra
340	Pemerintah Desa Tampilang	Kantor Desa Tampilang
341	Pemerintah Desa Rantedoda	Kantor Desa Rantedoda
342	Pemerintah Desa Kopeang	Kantor Desa Kopeang
343	Pemerintah Desa Sondoang	Kantor Desa Sondoang
344	Pemerintah Desa Beru-Beru	Kantor Desa Beru Beru
345	Pemerintah Desa Belang Belang	Kantor Desa Belang Belang
346	Pemerintah Desa Kabuloang	Kantor Desa Kabuloang
347	Pemerintah Desa Keang	Kantor Desa Keang
348	Pemerintah Desa Pokkang	Kantor Desa Pokkang
349	Pemerintah Desa Guliling	Kantor Desa Guliling
350	Pemerintah Desa Uhaimate	Kantor Desa Uhaimate
351	Pemerintah Desa Kalukku Barat	Kantor Desa Kalukku Barat
352	Pemerintah Desa Pammulukang	Kantor Desa Pammulukang
353	Pemerintah Desa Kalumpang	Kantor Desa Kalumpang
354	Pemerintah Desa Karataun	Kantor Desa Karataun
355	Pemerintah Desa Karama	Kantor Desa Karama
356	Pemerintah Desa Siraun	Kantor Desa Siraun
357	Pemerintah Desa Tumoga	Kantor Desa Tumoga
358	Pemerintah Desa Polewali	Kantor Desa Polewali
359	Pemerintah Desa Randomayang	Kantor Desa Randomayang
360	Pemerintah Desa Pangiang	Kantor Desa Pangiang
361	Pemerintah Desa Kalola	Kantor Desa Kalola
362	Pemerintah Desa Wulai	Kantor Desa Wulai
363	Pemerintah Desa Pakava	Kantor Desa Pakava
364	Pemerintah Desa Karya Bersama	Kantor Desa Karya Bersama
365	Pemerintah Desa Ako	Kantor Desa Ako
366	Pemerintah Desa Gunung Sari	Kantor Desa Gunung Sari

No	Calon Penerima	Alamat
367	Pemerintah Desa Baras	Kantor Desa Baras
368	Pemerintah Desa Mahahe	Kantor Desa Mahahe
369	Pemerintah Desa Bulu Parigi	Kantor Desa Bulu Parigi
370	Pemerintah Desa Salobaja	Kantor Desa Salobaja
371	Pemerintah Desa Tobadak	Kantor Desa Tobadak
372	Pemerintah Desa Motu	Kantor Desa Motu
373	Pemerintah Desa Palongaan	Kantor Desa Palongaan
374	Pemerintah Desa Towoni	Kantor Desa Towoni
375	Pemerintah Desa Kasano	Kantor Desa Kasano
376	Pemerintah Desa Batu Parigi	Kantor Desa Batu Parigi
377	Pemerintah Desa Sarudu	Kantor Desa Sarudu
378	Pemerintah Desa Bulu Mario	Kantor Desa Bulu Mario
379	Pemerintah Desa Bambadaru	Kantor Desa Bambadaru
380	Pemerintah Desa Kumasari	Kantor Desa Kumasari
381	Pemerintah Desa Sejati	Kantor Desa Sejati
382	Pemerintah Desa Saloadak	Kantor Desa Saloadak
383	Pemerintah Desa Polo Pangale	Kantor Desa Polo Pangale
384	Pemerintah Desa Pangale	Kantor Desa Pangale
385	Pemerintah Desa Sartanamaju	Kantor Desa Sartanamaju
386	Pemerintah Desa Polo Lereng	Kantor Desa Polo Lereng
387	Pemerintah Desa Patika	Kantor Desa Patika
388	Pemerintah Desa Kuo	Kantor Desa Kuo
389	Pemerintah Desa Polo Camba	Kantor Desa Polo Camba
390	Pemerintah Desa Doda	Kantor Desa Doda
391	Pemerintah Desa Lamba-lamba	Kantor Desa Lamba lamba
392	Pemerintah Desa Kombiling	Kantor Desa Kombiling
393	Pemerintah Desa Dapurang	Kantor Desa Dapurang
394	Pemerintah Desa Lemo-Lemo	Kantor Desa Lemo Lemo
395	Pemerintah Desa Benggaulu	Kantor Desa Benggaulu
396	Pemerintah Desa Babana	Kantor Desa Babana
397	Pemerintah Desa Tirtabuana	Kantor Desa Tirtabuana
398	Pemerintah Desa Bulu Bonggu	Kantor Desa Bulu Bonggu
399	Pemerintah Desa Lumu	Kantor Desa Lumu
400	Pemerintah Desa Sarasa	Kantor Desa Sarasa
401	Pemerintah Desa Pontanakayang	Kantor Desa Pontanakayang
402	Pemerintah Desa Salogatta	Kantor Desa Salogatta
403	Pemerintah Desa Tammarunang	Kantor Desa Tammarunang
404	Pemerintah Desa Kire	Kantor Desa Kire
405	Pemerintah Desa Saptanajaya	Kantor Desa Saptanajaya
406	Pemerintah Desa Tinali	Kantor Desa Tinali
407	Pemerintah Desa Taranggi	Kantor Desa Taranggi
408	Pemerintah Desa Salumanurung	Kantor Desa Salumanurung
409	Pemerintah Desa Sipakainga	Kantor Desa Sipakainga
410	Pemerintah Desa Pasapa	Kantor Desa Pasapa
411	Pemerintah Desa Bojo	Kantor Desa Bojo
412	Pemerintah Desa Lilimori	Kantor Desa Lilimori
413	Pemerintah Desa Barakkang	Kantor Desa Barakkang
414	Pemerintah Desa Karave	Kantor Desa Karave
415	Pemerintah Desa Lembah Hada	Kantor Desa Lembah Hada
416	Pemerintah Desa Bukit Harapan	Kantor Desa Bukit Harapan
417	Pemerintah Desa Budong-Budong	Kantor Desa Budong Budong

No	Calon Penerima	Alamat
418	Pemerintah Desa Kastabuana	Kantor Desa Kastabuana
419	Pemerintah Desa Sumber Sari	Kantor Desa Sumber Sari
420	Pemerintah Desa Topoyo	Kantor Desa Topoyo
421	Pemerintah Desa Lelejae	Kantor Desa Lelejae
422	Pemerintah Desa Tumbu	Kantor Desa Tumbu
423	Pemerintah Desa Ompi	Kantor Desa Ompi
424	Pemerintah Desa Kabubu	Kantor Desa Kabubu
425	Pemerintah Desa Waeputeh	Kantor Desa Waeputeh
426	Pemerintah Desa Tangkou	Kantor Desa Tangkou
427	Pemerintah Desa Mehalaan	Kantor Desa Mehalaan
428	Pemerintah Desa Bala	Kantor Desa Bala
429	Pemerintah Desa Botteng	Kantor Desa Botteng
430	Pemerintah Desa Salukonta	Kantor Desa Salukonta
431	Pemerintah Desa Lambanan	Kantor Desa Lambanan
432	Pemerintah Desa Lego	Kantor Desa Lego
433	Pemerintah Desa Mesakada	Kantor Desa Mesakada
434	Pemerintah Desa Pallis	Kantor Desa Pallis
435	Pemerintah Desa Mehalaan Barat	Kantor Desa Mehalaan Barat
436	Pemerintah Desa Duampanua	Kantor Desa Duampanua
437	Pemerintah Desa Saluahok	Kantor Desa Saluahok
438	Pemerintah Desa Kelapa Dua	Kantor Desa Kelapa Dua
439	Pemerintah Desa Salubalo	Kantor Desa Salubalo
440	Pemerintah Desa Papandangan	Kantor Desa Papandangan
441	Pemerintah Desa Passembuk	Kantor Desa Passembuk
442	Pemerintah Desa Kondo	Kantor Desa Kondo
443	Pemerintah Desa Kunyi	Kantor Desa Kunyi
444	Pemerintah Desa Leko Sukamaju	Kantor Desa Leko Sukamaju
445	Pemerintah Desa Petampanua	Kantor Desa Petampanua
446	Pemerintah Desa Ulumea	Kantor Desa Ulumea
447	Pemerintah Desa Barumbung	Kantor Desa Barumbung
448	Pemerintah Desa Pasiang	Kantor Desa Pasiang
449	Pemerintah Desa Tonrolima	Kantor Desa Tonrolima
450	Pemerintah Desa Indomakkombong	Kantor Desa Indomakkombong
451	Pemerintah Desa Bunga-Bunga	Kantor Desa Bunga Bunga
452	Pemerintah Desa Mombi	Kantor Desa Mombi
453	Pemerintah Desa Kalumammang	Kantor Desa Kalumammang
454	Pemerintah Desa Pao-pao	Kantor Desa Pao pao
455	Pemerintah Desa Puppu Uring	Kantor Desa Puppu Uring
456	Pemerintah Desa Saragian	Kantor Desa Saragian
457	Pemerintah Desa Sayoang	Kantor Desa Sayoang
458	Pemerintah Desa Alu	Kantor Desa Alu
459	Pemerintah Desa Bulu	Kantor Desa Bulu
460	Pemerintah Desa Pulliwa	Kantor Desa Pulliwa
461	Pemerintah Desa Patambanua	Kantor Desa Patambanua
462	Pemerintah Desa Karombang	Kantor Desa Karombang
463	Pemerintah Desa Daala Timur	Kantor Desa Daala Timur
464	Pemerintah Desa Lenggo	Kantor Desa Lenggo
465	Pemerintah Desa Sabura	Kantor Desa Sabura
466	Pemerintah Desa Sepporraki	Kantor Desa Sepporraki
467	Pemerintah Desa Ihing	Kantor Desa Ihing
468	Pemerintah Desa Jambu Malea	Kantor Desa Jambu Malea

No	Calon Penerima	Alamat
469	Pemerintah Desa Bambang	Kantor Desa Bambang
470	Pemerintah Desa Kalimbua	Kantor Desa Kalimbua
471	Pemerintah Desa Rantelemo	Kantor Desa Rantelemo
472	Pemerintah Desa Banato Rejo	Kantor Desa Banato Rejo
473	Pemerintah Desa Saludengen	Kantor Desa Saludengen
474	Pemerintah Desa Ugibaru	Kantor Desa Ugibaru
475	Pemerintah Desa Ulumambi	Kantor Desa Ulumambi
476	Pemerintah Desa Rumpa	Kantor Desa Rumpa
477	Pemerintah Desa Bambang Timur	Kantor Desa Bambang Timur
478	Pemerintah Desa Minanga	Kantor Desa Minanga
479	Pemerintah Desa Kurma	Kantor Desa Kurma
480	Pemerintah Desa Buku	Kantor Desa Buku
481	Pemerintah Desa Sikamase	Kantor Desa Sikamase
482	Pemerintah Desa Rantetarima	Kantor Desa Rantetarima
483	Pemerintah Desa Bonne Bonne	Kantor Desa Bonne Bonne
484	Pemerintah Desa Salururu	Kantor Desa Salururu
485	Pemerintah Desa Beroangin	Kantor Desa Beroangin
486	Pemerintah Desa Salutabang	Kantor Desa Salutabang
487	Pemerintah Desa Segerang	Kantor Desa Segerang
488	Pemerintah Desa Balatana	Kantor Desa Balatana
489	Pemerintah Desa Bonra	Kantor Desa Bonra
490	Pemerintah Desa Sattoko	Kantor Desa Sattoko
491	Pemerintah Desa Balla	Kantor Desa Balla
492	Pemerintah Desa Rappang Barat	Kantor Desa Rappang Barat
493	Pemerintah Desa Balla Barat	Kantor Desa Balla Barat
494	Pemerintah Desa Landi Kanusuang	Kantor Desa Landi Kanusuang
495	Pemerintah Desa Balla Satanetean	Kantor Desa Balla Satanetean
496	Pemerintah Desa Lilli	Kantor Desa Lilli
497	Pemerintah Desa Rangoan	Kantor Desa Rangoan
498	Pemerintah Desa Balla Tumuka	Kantor Desa Balla Tumuka
499	Pemerintah Desa Tapua	Kantor Desa Tapua
500	Pemerintah Desa Sepakuan	Kantor Desa Sepakuan
501	Pemerintah Desa Pidara	Kantor Desa Pidara
502	Pemerintah Desa Mambu Tapua	Kantor Desa Mambu Tapua
503	Pemerintah Desa Bambapuang	Kantor Desa Bambapuang
504	Pemerintah Desa Ba'ba Tapua	Kantor Desa Ba'ba Tapua
505	Pemerintah Desa Balla Timur	Kantor Desa Balla Timur
506	Pemerintah Desa Minanga	Kantor Desa Minanga
507	Pemerintah Desa Katimbang	Kantor Desa Katimbang
508	Pemerintah Desa Batupapan	Kantor Desa Batupapan
509	Pemerintah Desa Mambu	Kantor Desa Mambu
510	Pemerintah Desa Masewwe	Kantor Desa Masewwe
511	Pemerintah Desa Siwi	Kantor Desa Siwi
512	Pemerintah Desa Minanga Timur	Kantor Desa Minanga Timur
513	Pemerintah Desa Tenggeling	Kantor Desa Tenggeling
514	Pemerintah Desa Parinding	Kantor Desa Parinding
515	Pemerintah Desa Baru	Kantor Desa Baru
516	Pemerintah Desa Pussui	Kantor Desa Pussui
517	Pemerintah Desa Mapili Barat	Kantor Desa Mapili Barat
518	Pemerintah Desa Tawalian Timur	Kantor Desa Tawalian Timur
519	Pemerintah Desa Kariango	Kantor Desa Kariango

No	Calon Penerima	Alamat
520	Pemerintah Desa Sambali Wali	Kantor Desa Sambali Wali
521	Pemerintah Desa Rantetangnga	Kantor Desa Rantetangnga
522	Pemerintah Desa Batupanga Daala	Kantor Desa Batupanga Daala
523	Pemerintah Desa Luyo	Kantor Desa Luyo
524	Pemerintah Desa Salumokanan	Kantor Desa Salumokanan
525	Pemerintah Desa Salumokanan Barat	Kantor Desa Salumokanan Barat
526	Pemerintah Desa Pussui Barat	Kantor Desa Pussui Barat
527	Pemerintah Desa Buangin	Kantor Desa Buangin
528	Pemerintah Desa Puccadi	Kantor Desa Puccadi
529	Pemerintah Desa Bambang Buda	Kantor Desa Bambang Buda
530	Pemerintah Desa Lembang Lembang	Kantor Desa Lembang Lembang
531	Pemerintah Desa Leko	Kantor Desa Leko
532	Pemerintah Desa Tandasura	Kantor Desa Tandasura
533	Pemerintah Desa Kirak	Kantor Desa Kirak
534	Pemerintah Desa Salumokanan Utara	Kantor Desa Salumokanan Utara
535	Pemerintah Desa Samasundu	Kantor Desa Samasundu
536	Pemerintah Desa Sampale	Kantor Desa Sampale
537	Pemerintah Desa Napo	Kantor Desa Napo
538	Pemerintah Desa Buntumalangka	Kantor Desa Buntumalangka
539	Pemerintah Desa Ranteberan	Kantor Desa Ranteberan
540	Pemerintah Desa Todang Todang	Kantor Desa Todang Todang
541	Pemerintah Desa Kebanga	Kantor Desa Kebanga
542	Pemerintah Desa Pendulangan	Kantor Desa Pendulangan
543	Pemerintah Desa Renggeang	Kantor Desa Renggeang
544	Pemerintah Desa Salurindu	Kantor Desa Salurindu
545	Pemerintah Desa Salarri	Kantor Desa Salarri
546	Pemerintah Desa Tangan Baru	Kantor Desa Tangan Baru
547	Pemerintah Desa Palece	Kantor Desa Palece
548	Pemerintah Desa Taora	Kantor Desa Taora
549	Pemerintah Desa Tammajarra	Kantor Desa Tammajarra
550	Pemerintah Desa Kabae	Kantor Desa Kabae
551	Pemerintah Desa Tamanggalle	Kantor Desa Tamanggalle
552	Pemerintah Desa Salutambun Barat	Kantor Desa Salutambun Barat
553	Pemerintah Desa Mosso	Kantor Desa Mosso
554	Pemerintah Desa Penatangan	Kantor Desa Penatangan
555	Pemerintah Desa Galung Tuluk	Kantor Desa Galung Tuluk
556	Pemerintah Desa Salutambun Timur	Kantor Desa Salutambun Timur
557	Pemerintah Desa Salutambun	Kantor Desa Salutambun
558	Pemerintah Desa Sabang Subik	Kantor Desa Sabang Subik
559	Pemerintah Desa Aralle Timur	Kantor Desa Aralle Timur
560	Pemerintah Desa Pambusuang	Kantor Desa Pambusuang
561	Pemerintah Desa Bumiayu	Kantor Desa Bumiayu
562	Pemerintah Desa Tadisi	Kantor Desa Tadisi
563	Pemerintah Desa Kebunsari	Kantor Desa Kebunsari
564	Pemerintah Desa Sibanawa	Kantor Desa Sibanawa
565	Pemerintah Desa Banua Baru	Kantor Desa Banua Baru
566	Pemerintah Desa Batangnguru Timur	Kantor Desa Batangnguru Timur
567	Pemerintah Desa Nepo	Kantor Desa Nepo
568	Pemerintah Desa Salubalo	Kantor Desa Salubalo
569	Pemerintah Desa Sugihwaras	Kantor Desa Sugihwaras
570	Pemerintah Desa Banea	Kantor Desa Banea

No	Calon Penerima	Alamat
571	Pemerintah Desa Rante Kamase	Kantor Desa Rante Kamase
572	Pemerintah Desa Campurjo	Kantor Desa Campurjo
573	Pemerintah Desa Rippung	Kantor Desa Rippung
574	Pemerintah Desa Makuang	Kantor Desa Makuang
575	Pemerintah Desa Sepang	Kantor Desa Sepang
576	Pemerintah Desa Malimbong	Kantor Desa Malimbong
577	Pemerintah Desa Matande	Kantor Desa Matande
578	Pemerintah Desa Bumimulyo	Kantor Desa Bumimulyo
579	Pemerintah Desa Sipai	Kantor Desa Sipai
580	Pemerintah Desa Tumpiling	Kantor Desa Tumpiling
581	Pemerintah Desa Pasma Mambu	Kantor Desa Pasma Mambu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan daerah yang dirumuskan secara terukur, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi. Bab ini menyajikan sasaran kinerja yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengacu pada indikator kinerja utama dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Penyusunan target kinerja dilakukan melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), sehingga setiap target yang ditetapkan memiliki keterkaitan langsung dengan capaian tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah.

Penetapan target kinerja ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan di tahun perencanaan 2026, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2026 dapat diukur tingkat keberhasilannya secara obyektif, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Dari hasil capaian kinerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah yang sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dan Tabel 7.2 tentang Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60
2	Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDB Nasional	Persen	0,30
3	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	11,15
4	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	26,76
5	Indeks Gini	Indeks	0,310 – 0,306

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,38 – 2,19
7	Pendapatan per-Kapita	Rp Juta	49,74
8	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,74 – 9,05
9	Nilai Tukar Petani	Rasio	146,64
10	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,51
11	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	8,50
12	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,74
14	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	80,54
15	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	80,00
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86,00
17	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	65,40
18	Indeks Risiko Berencana	Indeks	128 (Sedang)
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,80 (BB)
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,00 (Sangat Baik)
22	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,50 (Inovatif)
23	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	79,00
24	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	3,90
25	Angka Kriminalitas	Persen	0,16
26	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,09

7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja perangkat daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, IKU Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	5,63	5,70	5,80
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	70,75	76,6	82,45
3	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	60,32	61,65	65,40
	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	5,63	5,70	5,80
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,53	1,52	1,51
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,33	0,32	0,31
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(Persen) Indeks	0,49	0,49	0,49
3	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,51-0,52	0,53-0,55	0,55-0,56
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,25	90,46	90,52
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,50	57,83	64,14
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	54,26	54,35	54,39
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	54,53	54,59	54,62
8	Luasan Kawasan Konservasi	HA	70,00	70,00	70,00
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	101,00	102,00	102,00
10	Pendapatan Per Kapita	Rp	42.720.000	45.990.000	49.740.000
11	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Dokumen	3,00	3,00	3,00
12	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen Indeks	0,00	0,00	0,00
13	Persentase individu yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	1,00	1,00	1,00
14	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persen	0,33	0,34	0,34
15	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	5,20	5,60
16	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen	26,06	24,50	20,25
17	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,71	10,42	9,74

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	Persen	0,98	1,00	1,05
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,68	2,51	2,38
20	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,03	71,12	71,78
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	89,00	90,16	91,33
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 kelahiran hidup	Angka	14,72	14,00	13,31
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	43,00	38,40	33,80
4	Angka kesakitan (morbiditas)	Persen	11,14	10,73	10,32
5	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	Persen	72,09	73,26	74,94
6	Angka penggunaan tempat tidur (Bed Occupancy Rate)	Angka	51,00	55,40	59,80
7	Bauran energi terbarukan	Persen	24,72	27,78	30,83
8	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal, (Jumlah data dan informasi yang disediakan/ data informasi yang harus ada) (Persen)	Persen	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan pembinaan olahraga (Persen)	Persen	8,23	8,82	8,82
10	Cakupan penanganan bencana pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	72,00	74,08	75,13
12	Cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	32,50	25,70	25,95
13	Capaian Realisasi Anggaran	Persen	98,50	100,00	100,00
14	Capaian Realisasi Anggaran	Persen	99,06	100,00	100,00
15	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		90,73	91,00	91,50
16	Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan)	Persen	0,00	0,00	0,00
17	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Indeks	4,00	4,20	4,40
18	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	4,14	4,22	4,35
19	Indeks Domain Manajemen	Indeks	2,18	2,29	2,47
20	Indeks Domain Tata Kelola	Indeks	3,40	3,57	3,78

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Indeks kapabilitas inovasi (pilar dalam IDSD)	Indeks	2,58	3,14	3,48
22	Indeks Kelembagaan	Indeks	65,03	67,00	70,00
23	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan daerah provinsi	Indeks	82,81	84,85	86,89
24	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	75,50	77,50	80,00
25	Indeks ketahanan daerah	Poin	0,20	0,26	0,32
26	Indeks Kualitas Air	Indeks	55,93	58,73	62,25
27	Indeks kualitas udara	Indeks	91,46	91,92	92,38
28	Indeks literasi SLB	Indeks	32,35	33,00	33,66
29	Indeks literasi SMA	Indeks	59,18	60,36	61,57
30	Indeks literasi SMK	Indeks	47,20	48,14	49,11
31	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	41,65	46,87	52,08
32	Indeks numerasi SLB	Indeks	26,46	26,72	27,00
33	Indeks numerasi SMA	Indeks	55,46	56,01	56,57
34	Indeks numerasi SMK	Indeks	46,64	47,11	47,58
35	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	100,00	100,00	100,00
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	100,00	100,00	100,00
37	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	95,00	95,00	96,00
38	Indeks sistem merit	Poin	208,00	216,00	225,00
40	Indeks SPBE	Indeks	3,70	3,80	3,90
41	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	70,80	71,00	71,50
42	Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)	Indeks	46,86	53,82	56,14
43	Indeks warisan budaya (pilar dalam indeks pembangunan kebudayaan)	Indeks	40,57	43,90	45,60
44	Jumlah atlet berprestasi	Angka	44,00	45,00	47,00
45	Jumlah barang yang melalui bandara	Kg	417,741,00	426,096,00	434,618,00
46	Jumlah barang yang melalui Pelabuhan (juta ton)	Juta Ton	2,77	2,82	2,88
47	Jumlah investor	Investor	1,158,00	1,181,00	1,205,00

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif	Lembaga	6,00	7,00	7,00
49	Jumlah orang yang melalui bandara	Orang	48,770,00	53,647,00	60,085,00
50	Jumlah orang yang melalui Pelabuhan (orang)	Orang	58,79	59,97	61,16
51	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Angka	100,00	100,00	100,00
52	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Angka	100,00	100,00	100,00
53	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya	Angka	10,00	12,00	14,00
54	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00
55	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00
56	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	100,00	100,00	100,00
57	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00
58	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00
59	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00
60	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	100,00	100,00	100,00
61	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (Persen)	Persen	0,00	100,00	100,00
62	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Angka	0,00	0,00	0,00
63	Ketersediaan obat	Persen	65,00	70,00	75,00
64	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB (Persen)	Persen	6,70	6,90	7,10
65	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	Persen	26,30	27,71	29,11

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Laju deforestasi (Persen)	Persen	0,06	0,06	0,05
67	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,53	1,52	1,51
68	Luas area rehabilitasi ekosistem (Ha)	Ha	38,00	39,00	40,00
69	Luas lokasi aktivitas pertambangan (Ha)	Ha	4,768,88	4,773,65	4,778,42
70	Nilai dimensi kompetensi terhadap indeks profesionalitas ASN	Poin	27,84	29,23	30,99
71	Nilai ekspor bersih Perdagangan (Juta USD)	USD	44,75	45,21	46,52
72	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,75	76,6	82,45
73	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
74	Penyerapan Anggaran;	Poin	99,66	99,69	99,73
75	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan	Persen	85,00	90,00	95,00
76	Persentase aparat desa yang mendapatkan insentif	Persen	0,00	0,00	0,00
77	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	20,00	18,00	16,00
78	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan retensi arsip	Persen	0,00	0,00	0,00
79	Persentase bangunan sekolah SMA sederajat dalam kondisi baik	Persen	59,20	62,36	65,52
80	Persentase barang milik daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00
81	Persentase cadangan pangan pemerintah provinsi	Persen	68,53	70,82	73,12
82	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	48,18	56,54	64,91
83	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemetaan, dan konsolidasi penggunaan tanah yang diselesaikan sesuai jadwal	Persen	0,00	0,00	0,00
84	Persentase dokumen publik yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat (Persen)	Persen	80,00	82,00	85,00
85	Persentase individu miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00
86	Persentase individu miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00
87	Persentase irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Persen	20,67	21,08	21,72

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	Persentase IUI, IPUI, dan IUKI yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Persen	0,00	0,00	0,00
89	Persentase Izin Usaha yang tidak melanggar perda	Persen	100,00	100,00	100,00
90	Persentase kabupaten dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100,00	100,00	100,00
91	Persentase kasus sengketa tanah garapan yang tertangani	Persen	0,00	0,00	0,00
92	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	16,00	15,90	15,80
93	Persentase Kecamatan Rentan Rawan Pangan	Persen	7,25	6,80	6,35
94	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan prasarana pertanian	Persen	0,00	0,00	0,00
95	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana perkebunan	Persen	0,00	0,00	0,00
96	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	Persen	2,57	2,98	3,47
97	Persentase kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian (Persen)	Persen	33,00	36,45	38,12
98	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan (Persen)	Persen	43,67	46,73	50,32
99	Persentase kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	Persen	0,00	0,00	0,00
100	Persentase Kerjasama Desa yang difasilitasi pemerintah provinsi	Persen	24,00	27,20	30,40
101	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persen	0,00	0,00	0,00
102	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	32,33	35,43	38,73
103	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan di perpustakaan provinsi (Persen)	Persen	0,00	0,00	0,00
104	Persentase koperasi aktif yang diawasi sesuai regulasi yang berlaku (Persen)	Persen	70,00	72,00	74,00
105	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	8,15	8,56	9,41
106	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang menjadi binaan provinsi	Persen	39,30	44,44	49,58
107	Persentase Lembaga Posyandu yang menjadi binaan provinsi	Persen	11,88	13,50	15,13
108	Persentase luas daerah aliran sungai yang terkelola dengan baik (Persen)	Persen	33,12	34,17	35,22
109	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	0,00	0,00	0,00

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00
111	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Persen)	Persen	92,68	93,14	93,89
112	Persentase organisasi pemuda yang aktif (Persen)	Persen	75,00	77,00	79,00
113	Persentase pelaku usaha yang patuh pada aturan pelaksanaan perizinan berusaha (pelaku usaha yang diwajibkan hanya dengan modal >5 miliar) (Persen)	Persen	69,70	71,09	72,52
114	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00
115	Persentase Pemerintahan Desa dengan Pelayanan Standar Minimal	Persen	98,96	99,17	99,38
116	Persentase penanganan kasus penyakit† hewan† menular dan Zoonosis di Provinsi (Persen)	Persen	100,00	100,00	100,00
117	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	Persen	3,57	4,50	4,96
118	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	Persen	0,10	2,56	3,17
119	Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih minimal 20 jam setahun	Persen	45,66	48,73	51,80
120	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persen	0,00	0,00	0,00
121	Persentase penurunan luas daerah genangan air di Kawasan Strategis Provinsi	Persen	0,00	0,00	0,00
122	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	Persen	85,00	90,00	95,00
123	Persentase perangkat daerah dengan nilai minimal 60 Poin pada komponen penilaian SAKIP	Persen	38,00	42,40	46,80
124	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0,20	23,00	26,00
125	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (Persen)	Persen	0,00	0,00	0,00
126	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persen	3,34	5,32	5,26

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
127	Persentase perpustakaan yang dibina (Persen)	Persen	46,48	50,18	53,89
128	Persentase Perpustakaan yang Telah Terakreditasi	Persen	13,64	14,91	16,18
129	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Persen	0,00	0,00	0,00
130	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	100,00	100,00	100,00
131	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	0,00	0,00	0,00
132	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Persen	26,28	27,02	27,77
133	Persentase rujukan	Persen	2,23	2,08	1,94
134	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80,14	83,34	86,84
135	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	Persen	100,00	100,00	100,00
136	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku	Persen	91,64	93,00	94,50
137	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00
136	Persentase sarana prasarana persampahan yang terbangun sesuai standar	Persen	0,00	0,00	0,00
137	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persen	0,00	0,00	0,00
138	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	0,00	0,00	0,00
139	Persentase SDM kehutanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Persen)	Persen	45,89	48,18	50,69
140	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam & luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja)	Persen	17,53	19,02	20,52
141	Persentase UMKM yang diberdayakan	Persen	11,00	11,60	12,70
142	Persentase usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah	Persen	0,00	0,00	0,00
143	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha (Persen)	Persen	100,00	100,00	100,00
144	Persentase wilayah yang menjadi Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	66,66	66,66	83,33

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
145	Pertumbuhan investasi (Persen)	Persen	23,43	24,34	25,26
146	Pertumbuhan izin investasi	Persen	-52,00	-30,00	-10,00
147	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Persen	-0,23	0,28	0,34
148	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Persen	-0,03	0,18	0,38
149	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan	Persen	-1,69	0,15	1,99
150	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha (volume penjualan produk dalam negeri)	Persen	5,00	5,50	6,05
151	Pertumbuhan wirausaha muda (Persen)	Persen	9,00	9,45	10,40
152	Presentase perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas Umum	Persen	45,00	48,00	51,00
153	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	6,53	5,82	5,12
154	Produktivitas tenaga kerja (Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja)	Persen	1,77	2,52	3,26
155	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	66,61	69,88	73,16
156	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	46,98	49,13	50,95
157	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	77,03	77,53	78,13
158	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,96	0,97	0,98
159	Rasio Elektrifikasi	Persen	90,62	92,50	94,37
160	Rasio guru murid SD	Angka	10,08	11,30	12,50
161	Rasio guru murid SLB	Angka	3,31	4,60	6,00
162	Rasio guru murid SMA	Angka	12,50	13,00	13,40
163	Rasio guru murid SMK	Angka	9,35	10,70	12,00
164	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam & luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja)	Persen	17,53	19,02	20,52
165	Persentase UMKM yang diberdayakan	Persen	11,00	11,60	12,70
166	Rasio guru murid SMP	Angka	8,99	10,50	11,50
167	Rasio konektivitas provinsi	Nilai	75,5:0	77,50:0	80,00:0

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
168	Rasio pasangan berakate nikah	Rasio	0,45	0,56	0,67
169	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1,53	2,22	2,92
170	Rasio tenaga kesehatan per 100,000 penduduk	Angka	56,00	58,00	59,00
171	Rata-rata lama menginap wisatawan (hari)	Hari	1,23	1,39	1,49
172	Rata-rata nilai indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan Kementerian yang direvitalisasi	Indeks	0,58	60,00	62,50
173	Return on Aset (ROA) BUMD (Persen)	Persen	26,00	28,30	30,00
174	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Nilai	80,34	82,27	84,20
175	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai	92,40	93,52	94,64
176	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Persen	70,00	72,00	74,00
177	Tingkat Kematangan UKPBJ		77,78	80,00	83,00
178	Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum	Persen	100,00	100,00	100,00
179	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Persen	0,00	100,00	100,00
180	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) menurut kabupaten di provinsi	Menit	0,00	0,00	0,00
181	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp	17,352,00	18,380,00	19,410,00
182	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan	Menit	110,00	100,00	90,00
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
	1,01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	12,91	12,93
	2,22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	50,49	50,79	51,09
	2,20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,19	2,50	2,80
	3,28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,33	0,33	0,34

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2,21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Maturitas Keamanan Siber	Poin	2,76	2,80	2,90
	3,28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
1	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persen	3,00	2,50	2,50
	1,01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,18	8,20

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 merupakan hasil dari proses perencanaan yang berbasis pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, serta *evidence-based planning*. Dokumen ini disusun untuk menjamin konsistensi, keselarasan, dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta menjawab tantangan aktual yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat secara objektif dan terukur. Sebagai tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026 memiliki arti strategis dalam meletakkan dasar kebijakan pembangunan yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan didasarkan pada analisis data dan informasi yang *valid*, pencermatan terhadap arah kebijakan nasional, serta evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan formulasi perencanaan yang realistis, terarah, dan akuntabel.

Proyeksi capaian pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan antar level pemerintahan. RKPD Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika perubahan global maupun regional. Dengan telah tersusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026. Lebih jauh, dokumen ini diharapkan mampu menjadi alat kendali yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*result-based development*), serta menjamin ketercapaian target-target pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan sasaran pembangunan Sulawesi Barat secara menyeluruh

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat

**MAJU &
SEJAHTERA**

